Laporan Tahunan 2009
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

Membawa Anda Menuju Dunia Masa Depan

Telkom Indonesia

the world in your hand

Membawa Anda Menuju Dunia

Kami melakukan transformasi secara fundamental dan menyeluruh untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar. Sejalan dengan transformasi tersebut kami menerapkan strategi untuk menjadikan TELKOM lebih fleksibel dan kompetitif dalam mengantisipasi dan menghadapi berbagai perubahan dan kompetisi yang semakin ketat di masa depan.

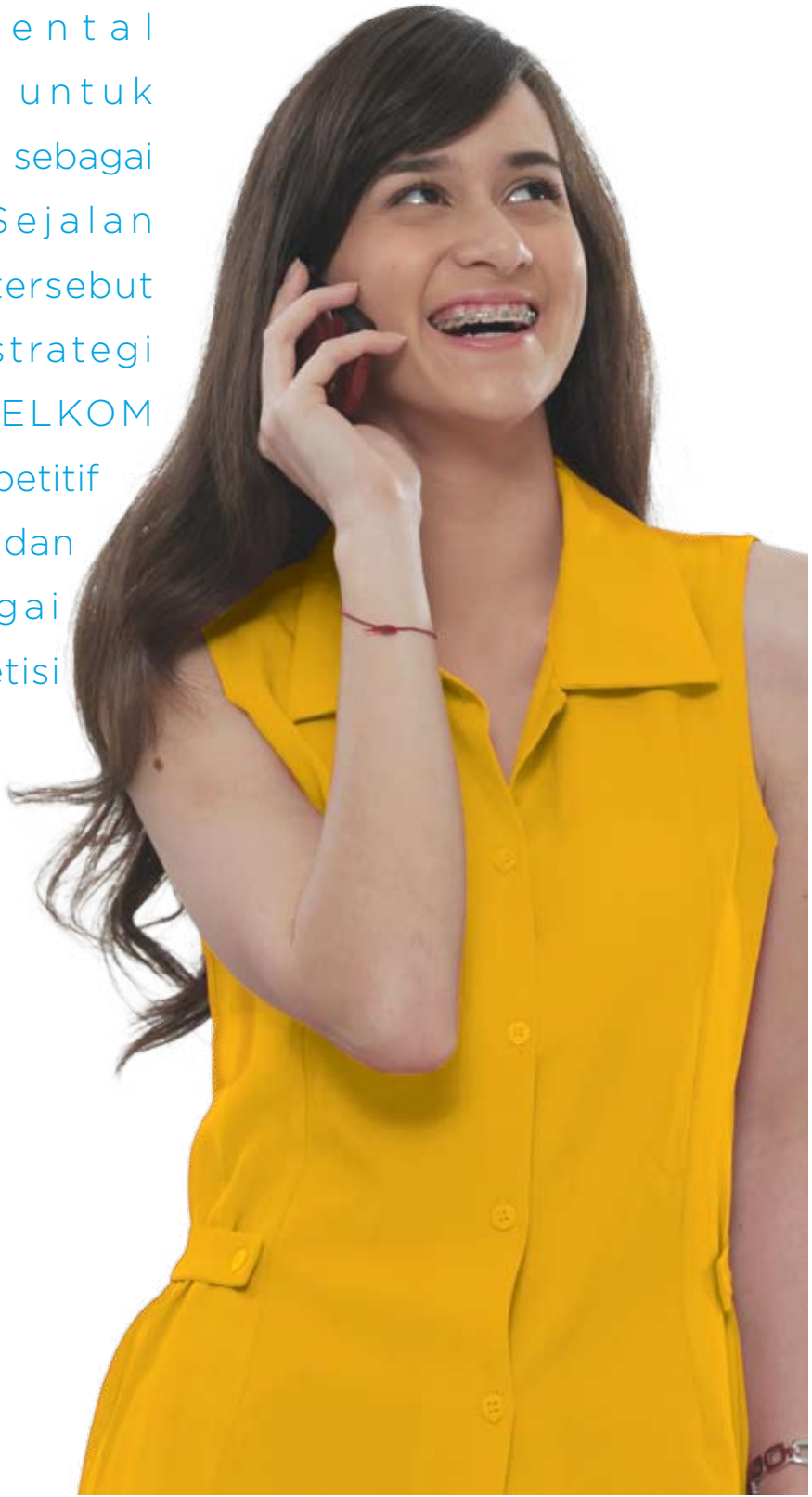

Masa Depan

Logo Baru

the world in your hand

Corporate Identity (logo) Telkom Indonesia yang baru diciptakan berdasarkan strategi ***brand*** yang baru, yang didasari 5 *Brand Values* yang membentuk *Brand Positioning. Brand Values* merupakan nilai-nilai dasar ***brand*** yang wajib diamalkan dalam kehidupan insan Telkom Indonesia sehari-harinya. *Brand Positioning* "*Life Confident*" dibentuk berdasarkan 5 ***Brand Value*** tersebut dan merupakan pernyataan tentang posisi unik Telkom Indonesia sebagai ***brand***.

Brand Values

Expertise – keahlian yang dicapai dari pengetahuan yang dalam dan pengalaman yang teruji.

Empowering – Memberdayakan *stakeholders* dalam menanggapi aspirasi mereka.

Assured – Keyakinan dalam tindakan kita, nilai-nilai, dan jaringan yang meningkatkan kepercayaan dan loyalitas.

Progressive – progresif dan terdepan dalam teknologi, pemikiran, produk, dan *customer service*.

Heart – Melayani dengan hati kebutuhan dalam segala hal yang kita lakukan untuk kebutuhan *stakeholders*.

Brand Positioning

Life Confident

Keahlian dan dedikasi kami pada kemajuan akan memberikan keyakinan bagi semua *stakeholder* kami untuk mendukung kehidupan mereka di mana pun mereka berada.

Daftar Isi

1 SEKILAS TELKOM

Logo Baru	2
Ikhtisar Keuangan	6
Data Keuangan	8
Ikhtisar Operasi	12
Ikhtisar Saham Biasa	13
Tentang TELKOM	22
Visi, Misi, Tujuan, Inisiatif Strategis	23
Peristiwa Penting 2009	24
Penghargaan 2009	28

2 LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

Laporan Komisaris Utama	32
Laporan Direktur Utama	36

3 TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Industri Telekomunikasi di Indonesia	41
Regulasi di Bidang Telekomunikasi	41
Persaingan	46
Lisensi	48
Tarif dan Biaya Interkoneksi	50
Faktor-Faktor Risiko	56
Risiko yang Terkait dengan Indonesia	56
Risiko terkait dengan TELKOM dan Anak Perusahaan	58
Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif atas Risiko Pasar	64

4 TINJAUAN OPERASIONAL TELKOM 2009

Tinjauan Bisnis	69
Infrastruktur Jaringan	74
Pengembangan Jaringan	79
Strategi Perusahaan	82
Layanan Kepada Pelanggan	84
Penjualan, Pemasaran dan Distribusi	86
Tagihan, Pembayaran dan Penagihan	87
Pengelolaan Piutang Pelangan	88
Asuransi	89
Merek Dagang, Hak Cipta dan Paten	89

5 PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

Tinjauan dan Prospek Operasi dan Keuangan	91
Tinjauan Hasil Usaha	91
Hasil Usaha	100
Hasil Segmen	109
Likuiditas dan Sumber-Sumber Permodalan	110
Arus Kas Bersih	111
Modal Kerja	113
Aset Lancar	113
Kewajiban Jangka Pendek	113
Struktur Modal	114
Kewajiban	114
Belanja Modal	114
Kebijakan Akuntansi yang Signifikan, Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan	116
Riset dan Pengembangan serta Kekayaan Intelektual	118
Informasi Tren	118
Pengaturan Transaksi di Luar Neraca	119
Kewajiban Kontraktual	119

6 INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi Keuangan	121
Kasus Hukum Material	121
Memorandum dan Anggaran Dasar	123
Rangkuman Perbedaan Signifikan Antara Praktik Tata Kelola Perusahaan Indonesia dan Standar Tata Kelola Perusahaan NYSE	125
Kontrak Material	127
Pengendalian Nilai Tukar	127
Perpajakan	128

7 TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola Perusahaan	133
Struktur Tata Kelola Perusahaan	134
Organisasi Tata Kelola Perusahaan	135
Komite dan Unit Pendukung	137
Laporan Komite Audit	140
Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi	143

Laporan Direktur Utama
Hal. 36

Struktur Bisnis dan Organisasi
Hal. 180

Laporan Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko	146
Prosedur dan Pengendalian Internal	151
Budaya Korporasi dan Etika Bisnis	152
Informasi yang Berkaitan dengan Penerapan *Good Corporate Governance* ("GCG")	152
Menuju Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Lebih Baik	158
Auditor Independen	164
Ketersediaan Dokumen	164
Pengendalian dan Prosedur	164
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	165

8 SDM TELKOM: SUMBER DAYA TERBAIK

TELKOM Memberdayakan dan Mengelola SDM	171
Profil SDM	172
Pengukuran SDM	174
Pengembangan SDM	174

9 DATA PERUSAHAAN

Sejarah Perusahaan	178
Struktur Bisnis dan Organisasi	180
Informasi Mengenai Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi	181
Profil Dewan Komisaris	184
Profil Direksi	186
Jajaran Manajemen Senior	190
Produk dan Layanan	191
Sambungan Telepon Tidak Bergerak Kabel	191
Sambungan Telepon Tidak Bergerak Nirabel	191
Data dan Internet	192
Jaringan dan Interkoneksi	192
Seluler	193
Peta Daerah Operasional	194
Aset Tetap	194
Alamat Perusahaan	195

10 LAMPIRAN

Daftar Istilah	198
Referensi Silang Form 20-F	202
Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6	203

11 LAPORAN KEUANGAN

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Tahunan	206
Pernyataan Direksi	207
Laporan Keuangan Konsolidasian	

PERNYATAAN YANG BERSIFAT PANDANGAN KE DEPAN

Dokumen ini berisi pernyataan tertentu yang bersifat pandangan ke depan sesuai dengan pengertian Section 27A dari *Securities Act* 1933, yang telah diubah ("*Securities Act*") dan Section 21E dari *Securities Exchange Act* 1934, yang telah diubah ("*Exchange Act*") dan *Private Securities Litigation* 1995, yang terkait dengan kondisi keuangan, hasil kinerja operasional dan usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan anak perusahaannya ("TELKOM","kami", "Perseroan", atau "Perusahaan") dan rencana serta tujuan tertentu Perseroan atau Perseroan dan anak perusahaannya, dimana perlu, khususnya terkait dengan hal-hal tersebut, diantara pernyataan-pernyataan tertentu dalam bagian 'Prospek dan Kajian Operasional & Keuangan, termasuk tapi tidak terbatas pada, pernyataan-pernyataan yang merujuk pada ekspektasi serta rencana Perseroan, strategi, tujuan manajemen, tren di pangsa pasar secara keseluruhan, manajemen risiko, nilai tukar mata uang dan pendapatan serta beban umum dan administrasi dan pernyataan-pernyataan yang bersifat pandangan ke depan mengenai operasi, kinerja dan kondisi keuangan Perseroan. Pernyataan-pernyataan tersebut secara umum dapat diidentifikasi oleh penggunaan istilah seperti "percaya", "berharap", "mungkin","akan", "ingin","dapat","berencana". Atau "mengantisipasi", serta sisi negatif dari istilah-istilah tersebut atau istilah serupa.

Akibat sifatnya, pernyataan-pernyataan yang bersifat pandangan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian karena terkait pada peristiwa yang tergantung pada kondisi-kondisi yang akan terjadi di masa depan. Terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan hasil dan perkembangan aktual menjadi berbeda secara materiil dari hal-hal yang diungkapkan atau tersirat pada pernyataan-pernyataan yang bersifat pandangan ke depan tersebut.

Informasi penting terkait dengan risiko dan ketidakpastian tertuang pada bagian lain dari laporan tahunan ini, termasuk pada bagian "Faktor Risiko", "Pengaturan Transaksi Di Luar Neraca", "Pengungkapan Dalam Tabel untuk Kewajiban Kontraktual", dan "Pengungkapan Kuantitatif dan Kualitatif mengenai Risiko Pasar".

Ikhtisar Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan (Berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia)
Neraca Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah)

	31 Des 2005	31 Des 2006	31 Des 2007	31 Des 2008	31 Des 2009
Total Aset Lancar	10.305	13.921	15.978	14.622	16.186
Total Aset Tidak Lancar	51.866	61.215	66.081	76.634	81.374
TOTAL ASET	62.171	75.136	82.059	91.256	97.560
Total Kewajiban Jangka Pendek	13.513	20.536	20.674	26.998	26.718
Total Kewajiban Jangka Panjang	19.061	18.344	18.331	20.260	20.919
TOTAL KEWAJIBAN	32.574	38.880	39.005	47.258	47.637
HAK MINORITAS	6.305	8.187	9.305	9.684	10.933
EKUITAS	23.292	28.069	33.749	34.314	38.990
INVESTASI	13.553	17.239	15.780	22.244	19.161
MODAL KERJA BERSIH	(3.208)	(6.615)	(4.696)	(12.376)	(10.531)

Tabel Laporan Laba - Rugi Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali untuk laba bersih per lembar saham dan laba bersih per ADS)

	31 Des 2005	31 Des 2006	31 Des 2007	31 Des 2008	31 Des 2009
Jumlah Pendapatan Usaha	41.807	51.294	59.440	60.689	64.597
Jumlah Beban Usaha	24.636	29.701	32.967	38.382	41.994
EBITDA *)	25.660	31.716	37.067	34.621	36.560
LABA USAHA	17.171	21.593	26.473	22.307	22.603
(Beban) Penghasilan lain-lain bersih	(929)	400	(877)	(1.995)	(254)
LABA SEBELUM PAJAK	16.242	21.994	25.596	20.312	22.349
LABA BERSIH	7.994	11.006	12.857	10.619	11.332
Laba bersih per saham dasar	396,51	547,15	644,08	537,73	576,13
Laba Bersih per ADS (40 saham seri B per ADS)	15.860,25	21.886,00	25.763,20	21.509,20	23.045,20

Tabel Rasio Keuangan dan Operasi Konsolidasian

	31 Des 2005	31 Des 2006	31 Des 2007	31 Des 2008	31 Des 2009
Laba Bersih per Total Aset (ROA)[1] (%)	12,9	14,6	15,7	11,6	11,6
Laba Bersih per Ekuitas (ROE)[2] (%)	34,3	39,2	38,1	30,9	29,1
Rasio Lancar[3] (%)	76,3	67,8	77,3	54,2	60,6
Total Kewajiban per Total Aset[4] (%)	52,4	51,7	47,5	51,8	48,8
Marjin Usaha[5] (%)	41,1	42,1	44,5	36,8	35,0
Rata-rata Periode Kolektibilitas Piutang[6] (Hari)	31,2	26,5	20,6	21,4	21,4
Marjin EBITDA[7] (%)	61,4	61,8	62,4	57,0	56,6
Marjin Laba Bersih[8] (%)	19,1	21,5	21,6	17,5	17,5
Hutang per Ekuitas[9] (%)	57,9	54,8	46,7	57,6	56,1
Hutang per EBITDA (%)	52,5	48,5	42,5	57,1	59,8
EBITDA per Beban Bunga[10] (kali)	21,8	24,7	25,8	21,9	18,3
EBITDA per Hutang Bersih[11] (%)	322,7	454,9	677,7	276,0	267,5
RASIO PRODUKTIVITAS:					
Total Pendapatan Usaha/Karyawan (Rp miliar)	1,2	1,5	1,8	2,0	2,2
LIS/Karyawan (SST)	452,4	465,9	593,3	853,7	1.015,6

(1) ROA merupakan laba bersih dibagi total aset pada akhir tahun.
(2) ROE merupakan laba bersih dibagi total ekuitas pada akhir tahun.
(3) Rasio lancar merupakan aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek pada akhir tahun.
(4) Total kewajiban per total aset merupakan total kewajiban dibagi total aset pada akhir tahun.
(5) Marjin usaha merupakan laba usaha dibagi pendapatan usaha.
(6) Rata-rata periode kolektibelitas piutang merupakan jumlah piutang usaha dibagi dengan pendapatan usaha dikali 365 hari.
(7) Marjin EBITDA merupakan EBITDA dibagi pendapatan usaha.
(8) Marjin laba bersih merupakan laba bersih dibagi pendapatan usaha.
(9) Hutang per ekuitas merupakan total hutang dibagi total ekuitas pada akhir tahun.
(10) EBITDA per beban bunga merupakan EBITDA dibagi beban bunga.
(11) EBITDA per hutang bersih merupakan EBITDA dibagi total kewajiban yang dikurangi kas dan setara kas, penyertaan sementara dan rekening escrow pada akhir tahun.

*) EBITDA merupakan laba usaha sebelum penyusutan dan amortisasi. EBITDA dan rasio-rasio terkait lainnya yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini adalah sebagai indikator tambahan atas kinerja dan tingkat likuiditas Perusahaan yang tidak diwajibkan oleh atau disajikan sesuai dengan PSAK Indonesia. EBITDA tidak merupakan indikator dari kinerja atau likuiditas keuangan TELKOM sesuai dengan PSAK Indonesia dan tidak boleh dianggap sebagai pengganti dari laba bersih, laba usaha atau pengukur kinerja lainnya yang didapat sesuai dengan PSAK Indonesia atau sebagai pengganti dari arus kas yang didapat dari kegiatan operasional sebagai indikator dari tingkat likuiditas Perusahaan. TELKOM menganggap bahwa EBITDA adalah indikator yang efektif dalam mengukur kinerja operasional Perusahaan karena mencerminkan biaya kas operasional dengan menghapus penyusutan dan amortisasi. Metode yang digunakan untuk menghitung EBITDA mungkin saja berbeda dengan istilah yang digunakan oleh perusahaan lain untuk EBITDA. Berikut ini adalah rekonsilidasi laba usaha TELKOM terhadap EBITDA.

Tabel Rekonsilidasi Laba Usaha TELKOM terhadap EBITDA

	31 Des 2005	31 Des 2006	31 Des 2007	31 Des 2008	31 Des 2009
Laba Usaha	17.171	21.593	26.473	22.307	22.603
Tambah (Kurang):					
Penyusutan	7.571	9.094	9.440	11.070	12.566
Amortisasi	918	1.029	1.154	1.244	1.390
EBITDA	25.660	31.716	37.067	34.621	36.560

DATA KEUANGAN

KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (sebelum 8 Maret 2010, KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan bernama KAP Haryanto Sahari & Rekan), *a member firm of PricewaterhouseCoopers global network ("PwC"),* telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM tahun fiskal 2006, 2007, 2008 dan 2009. Sebelumnya KAP Siddharta Siddharta & Widjaja, *a member firm of KPMG International ("KPMG")* di Indonesia telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM untuk tahun fiskal 2005.

Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang dalam beberapa hal berbeda dengan U.S. GAAP. Lihat Catatan No. 52 dan 53 Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM yang menjelaskan mengenai ikhtisar dari beberapa perbedaan signifikan antara PSAK Indonesia dan U.S. GAAP, serta rekonsiliasi U.S. GAAP untuk jumlah laba bersih dan ekuitas pemegang saham TELKOM pada setiap akhir tahun yang disajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.

Pada Tanggal 31 Desember 2009, sembilan perusahaan dan anak perusahaannya telah dikonsolidasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM tahun buku 2009, kesembilan perusahaan adalah yaitu PT Telekomunikasi Indonesia International ("TII", sebelumnya PT AriaWest International - "AWI", 100%-dimiliki TELKOM), PT Dayamitra Telekomunikasi ("Dayamitra", 100%-dimiliki TELKOM), PT Pramindo Ikat Nusantara ("Pramindo", 100%-dimiliki TELKOM), PT Telekomunikasi Seluler ("Telkomsel", 65%-dimiliki TELKOM), PT Multimedia Nusantara ("Metra", 100%-dimiliki TELKOM), PT Infomedia Nusantara ("Infomedia", 100%-dimiliki TELKOM, melalui 49% kepemilikan Metra), PT Indonusa Telemedia ("Indonusa", 100%-dimiliki TELKOM, melalui 1,25% kepemilikan Metra), PT Graha Sarana Duta ("GSD", 99,99%-dimiliki TELKOM), dan PT Napsindo Primatel Internasional ("Napsindo", 60%-dimiliki TELKOM). Lihat Catatan 1d dalam Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

Tabel berikut menguraikan rangkuman informasi keuangan TELKOM pada tahun-tahun tertentu. Informasi ini sebaiknya dibaca bersama dengan "Pembahasan dan Analisis Manajemen - Tinjauan dan Prospek Operasi dan Keuangan" dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM beserta catatan-catatan pendukung yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Komisaris Utama dan Direktur Utama TELKOM bersama dengan Meneg BUMN dan Menkominfo melakukan penekanan tombol sebagai tanda diresmikannya logo baru TELKOM Indonesia, di Jakarta 17 Oktober 2009.

Tabel Data Laporan Laba Rugi Konsolidasian

	Tahun yang berakhir 31 Desember,					
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
	(angka disajikan dalam miliar Rupiah, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)					(angka disajikan dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)[1]
Data Laporan Laba Rugi Konsolidasian						
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia						
PENDAPATAN USAHA						
Telepon						
Telepon tidak bergerak						
Percakapan Lokal dan SLJJ	7.223	7.131	7.023	5.738	4.774	506
Pendapatan abonemen bulanan	3.290	3.492	3.701	3.668	3.508	372
Pendapatan pasang baru	197	170	124	130	92	10
Lain-lain	71	186	153	194	271	29
Jumlah pendapatan telepon tidak bergerak	**10.781**	**10.979**	**11.001**	**9.730**	**8.645**	**917**
Seluler						
Pendapatan pemakaian	13.666	19.257	21.990	24.138	26.071	2.766
Pendapatan abonemen bulanan	384	298	205	186	424	45
Pendapatan jasa penyambungan	64	109	130	285	224	24
Fitur	457	959	313	723	483	51
Jumlah pendapatan seluler	**14.571**	**20.623**	**22.638**	**25.332**	**27.202**	**2.886**
Jumlah pendapatan telepon	**25.352**	**31.602**	**33.639**	**35.062**	**35.847**	**3.803**
Kerjasama Operasi (KSO)						
Pendapatan minimum TELKOM (MTR)	269	207	-	-	-	-
Bagian atas pendapatan KSO yang harus dibagi (DKSOR)	319	275	-	-	-	-
Amortisasi pendapatan kompensasi KSO yang ditangguhkan	1	7	-	-	-	-
Jumlah pendapatan kerjasama operasi	**589**	**489**	**-**	**-**	**-**	**-**
Interkoneksi - bersih	7.742	8.682	9.651	8.791	7.622	809
Pendapatan	10.724	11.794	12.706	12.054	10.551	1.120
Beban	(2.982)	(3.112)	(3.055)	(3.263)	(2.929)	(311)
Jaringan	587	719	708	1.080	1.218	129
Data, internet dan jasa teknologi informasi	6.934	9.065	14.684	14.713	18.506	1.964
Jasa telekomunikasi lainnya	603	737	758	1.044	1.404	149
Jumlah pendapatan usaha	**41.807**	**51.294**	**59.440**	**60.690**	**64.597**	**6.854**
BEBAN USAHA						
Penyusutan	7.571	9.094	9.440	11.069	12.566	1.333
Karyawan	6.563	8.514	8.495	9.117	8.533	906
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	5.916	7.496	9.591	12.218	14.582	1.547
Umum dan administrasi	2.764	3.356	3.672	3.629	4.053	430

	Tahun yang berakhir 31 Desember,					
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
	(angka disajikan dalam miliar Rupiah, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)					(angka disajikan dalam juta Dolar Amerika Serikat, kecuali data yang terkait dengan saham, dividen, dan ADS)[1]
Pemasaran	1.126	1.241	1.769	2.349	2.260	240
Penurunan nilai aset	617	–	–	-	-	-
Kerugian atas komitmen pembelian	79	–	–	-	-	-
Jumlah beban usaha	**24.636**	**29.701**	**32.967**	**38.382**	**41.994**	**4.456**
LABA USAHA	17.171	21.593	26.473	22.308	22.603	2.371
(Beban) Penghasilan lain-lain						
Pendapatan bunga	345	655	519	672	462	49
Bagian (rugi) laba bersih perusahaan asosiasi	11	(6)	7	20	(30)	(3)
Beban bunga	(1.177)	(1.286)	(1.436)	(1.582)	(2.000)	(212)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih	(517)	836	(295)	(1.614)	973	103
Lain-lain - bersih	409	202	328	509	341	36
(Beban) Penghasilan lain - bersih	(929)	401	(877)	(1.995)	(254)	(27)
Laba sebelum pajak	16.242	21.994	25.596	20.313	22.349	2.371
Beban pajak	(5.184)	(7.040)	(7.928)	(5.640)	(6.373)	(676)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	11.058	14.954	17.668	14.673	15.976	1.695
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi - bersih	(3.064)	(3.948)	(4.811)	(4.054)	(4.644)	(493`)
LABA BERSIH	7.994	11.006	12.857	10.620	11.332	1.202
Rata-rata tertimbang saham yang beredar (juta)	20.160	20.115	19.962	19.749	19.669	19.669
Laba bersih per saham	396,5	547,2	644,1	537,7	576,1	0,06
Laba bersih per ADS	15.860,3	21.886,0	25.763,2	21.509,2	23.045,2	2,40
U.S. GAAP[3]						
Laba bersih	7.840	12.111	11.966	10.874	12.092	1.283
Pendapatan usaha	42.187	54.357	62.813	64.115	67.852	7.139
Laba bersih per saham	388,89	602,12	599,43	550,63	614,78	0,07
Laba bersih per ADS	15.555,74	24.085,00	23.977,20	22.025,34	24.591,25	2,61
Dividen terkait periode (berbasis akrual)[2]						
Dividen per saham yang diumumkan	218,86	303,21	455,87	296,94	26,65[6]	-
Dividen per ADS yang diumumkan	8.754,40	12.128,40	18.234,80	11.877,60	1.066,00[6]	0,11
Dividen dibayarkan pada periode (berbasis kas)						
Dividen per saham yang diumumkan	144,90	267,27	303,25	407,42	323,59	0,03
Dividen per ADS yang diumumkan	5.796,09	10.692,40	12.130,00	16.296,80	12.943,60	1,37

	Tahun yang berakhir 31 Desember					
	2005	2006	2007	2008	2009	2009
	(angka disajikan dalam miliar Rupiah)					(angka disajikan dalam juta Dolar Amerika Serikat)(1)
Neraca Konsolidasian						
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia						
Total Aset	62.171	75.136	82.059	91.256	97.560	10.351
Kewajiban jangka pendek(4)	13.513	20.536	20.674	26.998	26.718	2.812
Kewajiban lain-lain	7.728	8.095	7.736	7.019	6.352	674
Kewajiban jangka panjang	11.332	10.249	10.595	13.241	14.566	1.545
Total kewajiban	32.574	38.880	39.005	47.258	47.637	5.031
Hak minoritas	6.305	8.187	9.305	9.684	10.933	1.160
Modal saham(5)	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	535
Total ekuitas	23.292	28.069	33.749	34.314	38.990	4.160
U.S. GAAP (3)						
Aset lancar	10.953	14.639	16.977	15.598	18.436	1.956
Aset tidak lancar	52.528	61.495	66.963	76.636	83.100	8.817
Total aset	63.481	76.134	83.940	92.234	101.536	10.772
Kewajiban jangka pendek	13.797	19.682	22.068	27.033	26.964	2.861
Kewajiban jangka panjang	18.800	21.976	22.731	20.869	22.544	2.392
Total kewajiban	32.597	41.658	44.799	47.902	49.508	5.253
Kepemilikan non-pengendali atas aset bersih anak perusahaan	6.316	8.167	9.323	9.605	11.067	1.174
Ekuitas shareholder	24.568	26.309	29.818	34.727	40.961	4.346
Total kewajiban dan ekuitas	63.481	76.134	83.940	92.234	101.536	10.773

(1) Nilai tukar Rupiah ke Dolar AS ditujukan hanya untuk kemudahan kepada pembaca dan menggunakan rata-rata atas nilai beli dan jual sebesar Rp9.425 per Dolar AS yang dipublikasikan oleh Reuters pada tanggal 31 Desember 2009. Kemudahan translasi ini tidak untuk diartikan sebagai representasi dari nilai tukar di mana Rupiah telah dapat atau akan, dikonversikan ke dalam Dolar AS.

(2) Dividen per lembar saham yang diumumkan pada tahun 2005 terdiri dari dividen tunai tahun 2004 sebesar Rp152,01 per lembar saham dikurangi dividen tunai interim yang didistribusikan pada bulan Desember 2004 sebesar Rp7,11 per lembar saham. Dividen yang diumumkan pada tahun 2006 adalah dividen tunai untuk tahun 2005 sebesar Rp218,86 per lembar saham. Dividen yang diumumkan pada tahun 2007 terdiri dari dividen tunai untuk tahun 2006 sebesar Rp303,21 per lembar saham dikurangi dividen tunai interim yang didistribusikan bulan Desember 2006 sebesar Rp48,41 per lembar saham. Dividen yang diumumkan pada tahun 2008 terdiri dari dividen tunai dan spesial deviden untuk tahun 2007 sebesar Rp455,87 per lembar saham dikurangi dividen tunai interim yang didistribusikan pada bulan Nopember 2007 sebesar Rp48,45 per lembar saham. Dividen yang diumumkan pada tahun 2009 merupakan dividen tunai tahun 2008, sebesar Rp296,94, per lembar saham.

(3) Jumlah berdasarkan U.S. GAAP menunjukkan penyesuaian atas beberapa perbedaan perlakuan akuntansi dari imbalan pemutusan kontrak kerja secara sukarela, kapitalisasi selisih kurs ke aset dalam konstruksi, instrumen derivatif melekat, kapitalisasi biaya bunga ke aset dalam konstruksi, pola bagi hasil (PBH), imbalan kerja, bagian rugi (laba) bersih perusahaan asosiasi, amortisasi hak atas tanah, pengakuan pendapatan, amortisasi *goodwill*, sewa pembiayaan, akuisisi Dayamitra, kewajiban yang timbul dari penghentian penggunaan aset, pajak tangguhan, efek tersedia untuk dijual, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi, amandemen dan pernyataan kembali KSO di Divre VII, dan kepemilikan non-pengendali. Lihat Catatan No 52 Laporan Keuangan Konsolidasian.

(4) Termasuk porsi hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun.

(5) Pada tanggal 31 Desember 2009, Modal Saham yang ditempatkan dan disetor penuh terdiri dari satu Saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp250 per lembar (saham Dwiwarna) dan 20.159.999.279 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp250 per lembar (Saham Biasa) dari modal saham terdiri dari satu Saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 Saham Seri B.

(6) Merupakan dividen interim.

Ikhtisar Operasi

Tabel Ikhtisar Operasi

	31 Des 2005	31 Des 2006	31 Des 2007	31 Des 2008	31 Des 2009
TELEPON TIDAK BERGERAK KABEL					
Jumlah pelanggan (dalam ribuan)*	8.686	8.709	8.685	8.630	8.377
Jumlah produksi pulsa (dalam jutaan pulsa)	67.669	64.012	75.451	62.940	54.186
TELEPON TIDAK BERGERAK NIRKABEL (FLEXI)					
Jumlah pelanggan (dalam ribuan):					
Classy/Pascabayar	821	794	828	731	649
Trendy/Prabayar	3.241	3.381	5.535	11.994	14.490
Total*	4.062	4.176	6.363	12.725	15.139
* *Line In Service* ("LIS") = pelanggan (telepon tidak bergerak kabel atau telepon tidak bergerak nirkabel) + telepon umum					
Penjualan (dalam ribuan pelanggan)					
Classy/Pascabayar	475	261	273	177	73
Trendy/Prabayar	3.558	3.175	5.026	13.414	14.762
Jumlah	4.034	3.436	5.299	13.591	14.835
ARPU (rata-rata 12 bulan-Rp'000):					
Pascabayar	123	135	115	93	84
Prabayar	19	35	42	32	18
Campuran	47	54	53	38	22
Jaringan:					
Base Transceiver Station / BTS (unit)	1.448	1.531	1.911	4.054	5.543
Jumlah kota yang termasuk dalam layanan	231	236	238	353	370
SELULER					
Base Transceiver Station / BTS (unit)	9.895	16.057	20.858	26.872	30.992
Kapasitas jaringan (dalam jutaan pelanggan)	26,2	38,8	50,5	67,3	85,2
Jumlah pelanggan (dalam jutaan)					
Pascabayar (kartuHALO)	1,5	1,7	1,9	1,9	2,0
Prabayar (*sim*PATI)	16,0	21,4	24,0	43,0	58,0
Prabayar (Kartu As)	6,8	12,5	22,0	20,4	21,6
Total	24,3	35,6	47,9	65,3	81,6
ARPU (rata-rata 12 bulan-Rp'000)					
Pascabayar (kartuHALO)	291	274	264	216	214
Prabayar (*sim*PATI)	84	83	84	63	48
Prabayar (Kartu As)	45	54	57	37	31
Campuran	87	84	80	59	48
LAIN - LAIN					
Pita lebar Internet (Speedy):					
Jumlah pelanggan (dalam ribuan)	31	93	241	645	1.145
Jumlah kota yang termasuk dalam layanan	2	28	88	375	378
Internet *Dial-up* (TELKOMNet Instan):					
Rata-rata pengguna (dalam ribuan)	500	680	662	574	448
Jumlah produksi menit (dalam miliar)	2,8	3,7	3,7	2,8	1,5
Televisi kabel dan berbayar (TELKOM-Vision):					
Jumlah pelanggan (dalam ribuan)	29,0	42,0	67,2	210,3	178,6

Ikhtisar Saham Biasa *(Common Stock)*

Tabel Kronologi Aksi Korporasi *(Corporate Action)*

Tanggal	Tindakan Korporasi	Komposisi Kepemilikan Saham			
		Pemerintah Republik Indonesia	%	Publik	%
13/11/1995	*Pre Initial Public Offering* (Pre-IPO)	8.400.000.000	100,0	-	-
14/11/1995	IPO				
	Penjualan saham milik Pemerintah	(933.334.000)		933.334.000	
	Emisi saham baru TELKOM			933.333.000	
	Komposisi kepemilikan saham	7.466.666.000	80,0	1.866.667.000	20,0
11/12/1996	*Block sale* saham milik Pemerintah	(388.000.000)		388.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	7.078.666.000	75,8	2.254.667.000	24,2
15/05/1997	Pemerintah membagikan saham insentif kepada para pemegang saham publik	(2.670.300)		2.670.300	
	Komposisi kepemilikan saham	7.075.995.700	75,8	2.257.337.300	24,2
07/05/1999	*Block sale* saham milik Pemerintah	(898.000.000)		898.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	6.177.995.700	66,2	3.155.337.300	33,8
02/08/1999	Pembagian bonus saham (emisi) (setiap 50 saham mendapatkan 4 saham)	494.239.656		252.426.984	
	Komposisi kepemilikan saham	6.672.235.356	66,2	3.407.764.284	33,8
07/12/2001	*Block sale* saham milik Pemerintah	(1.200.000.000)		1.200.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	5.472.235.356	54,3	4.607.764.284	45,7
16/07/2002	*Block sale* saham milik Pemerintah	(312.000.000)		312.000.000	
	Komposisi kepemilikan saham	5.160.235.356	51,2	4.919.764.284	48,8
30/07/2004	Pemecahan nilai nominal saham (1:2)				
	Komposisi kepemilikan saham	10.320.470.712	51,2	9.839.528.568	48,8
21/12/2005	Program pembelian saham kembali (I) (1)	10.320.470.712	51,7	9.628.238.068	48,3
29/06/2007	Program pembelian saham kembali (II) (2)	10.320.470.712	52,3	9.413.238.068	47,7
20/06/2008	Program pembelian saham kembali (III) (3)	10.320.470.712	52,5	9.348.954.068	47,5

(1) Program pembelian kembali saham tahap pertama dimulai pada tanggal 21 Desember 2005 (bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ketika program tersebut disetujui) dan berakhir pada bulan Juni 2007.

(2) Program pembelian kembali saham tahap kedua dimulai pada tanggal 29 Juni 2007 (bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ketika program tersebut disetujui) dan berakhir pada bulan Juni 2008.

(3) Program pembelian kembali saham tahap ketiga dimulai pada tanggal 20 Juni 2008 (bertepatan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ketika program tersebut disetujui) dan berakhir pada bulan Desember 2009.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham diajukan dan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"). Rasio pembayaran dividen TELKOM adalah sebesar 55% untuk tahun buku 2005, 55% untuk tahun buku 2006, 70% untuk tahun buku 2007 dan 55% untuk tahun buku 2008. Rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2009 akan ditetapkan pada RUPST 2010, yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 2010. kronologi pembayaran dividen saham biasa TELKOM.

TELKOM membayar dividen tunai atas Saham Biasa seperti yang diputuskan oleh RUPST, sebagai berikut:

Tabel Kronologi Pembayaran Dividen Saham Biasa TELKOM

Tahun Dividen	Tanggal RUPST	Rasio Pembayaran (1) (%)	Jumlah Dividen (Rp juta)	Dividen per Lembar Saham (Rp)
2005	30 Juni 2006	55	4.400.090	218,86
2006	29 Juni 2007	55	6.053.067 (2)	303,21
2007	20 Juni 2008	70	8.999.913 (3)	455,87
2008	12 Juni 2009	55	5.840.708	296,94

(1) Merupakan persentase laba bersih yang dibayar ke pemegang saham sebagai dividen.
(2) Termasuk dividen tunai interim yang dibayarkan pada bulan Desember 2006 sejumlah Rp971.017 juta.
(3) Termasuk dividen tunai interim yang dibayarkan pada bulan November 2007 sejumlah Rp965.398 juta.

Pada tanggal 29 Desember 2009, TELKOM membayarkan dividen interim untuk tahun buku 2009 sebesar Rp524.190 juta atau Rp26,65 per lembar saham.

Pada tahun 2007, 2008, dan 2009, dividen tunai dibayarkan kepada Singapore Telecom Mobile Pte. Ltd. ("SingTel Mobile"), pemegang saham minoritas Telkomsel, masing-masing berjumlah Rp3.308,7 miliar, Rp3.332,5 miliar, dan Rp2.518,2 miliar.

Berdasarkan RUPST yang diselenggarakan pada bulan Juni 2009, Telkomsel menyetujui, antara lain, dividen tunai sebesar Rp9,1 triliun yang merupakan 80% dari laba bersih Telkomsel di tahun 2008. Dari dividen yang diumumkan, sebanyak 35% telah dibayarkan kepada SingTel Mobile.

KINERJA PERDAGANGAN SAHAM DAN ADS TELKOM 2009

Volume Harga

Grafik Harga dan Volume Perdagangan Saham TELKOM Di Bursa Efek Jakarta

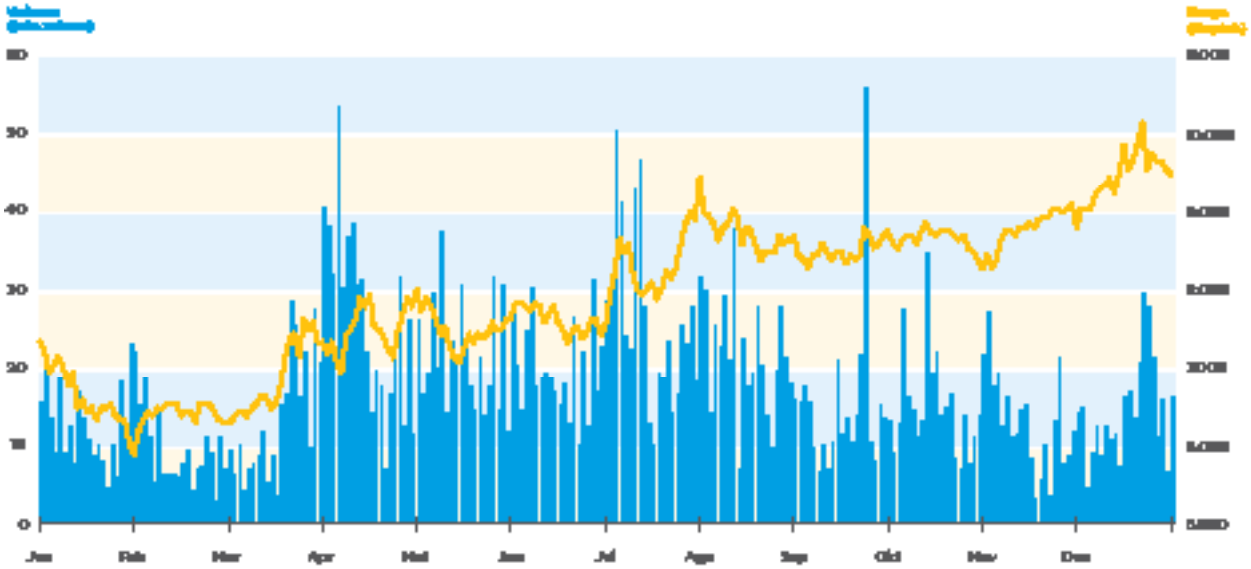

Grafik Harga dan Volume Perdagangan ADS TELKOM Di New York Stock Exchange

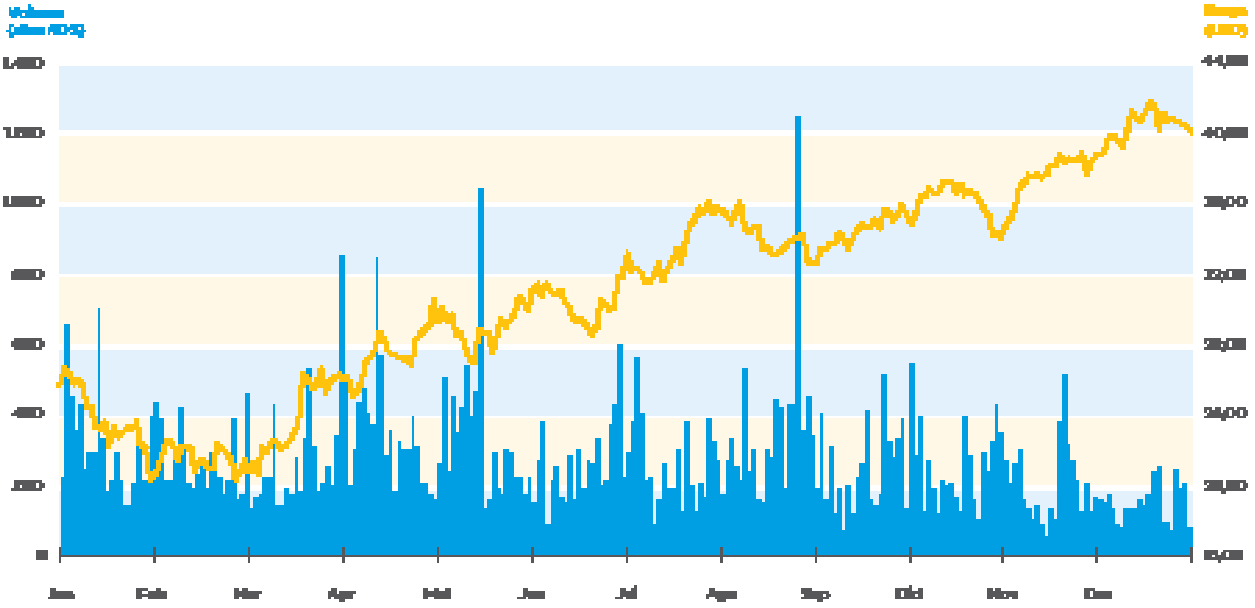

HARGA SAHAM PER KUARTAL

Tabel berikut merupakan harga tertinggi dan terendah dari Saham Biasa untuk periode tertentu, yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada periode yang disajikan.

Tabel Informasi Harga Saham

Tahun Kalender	Harga per Saham Biasa*	
	Tertinggi	Terendah
	(dalam Rupiah)	
2005	6.150	4.175
Kuartal Pertama	5.125	4.300
Kuartal Kedua	5.350	4.175
Kuartal Ketiga	5.800	4.775
Kuartal Keempat	6.150	4.925
2006	10.550	5.950
Kuartal Pertama	7.000	5.950
Kuartal Kedua	8.400	6.750
Kuartal Ketiga	8.450	7.100
Kuartal Keempat	10.550	8.200
2007	12.650	8.900
Kuartal Pertama	10.350	8.900
Kuartal Kedua	10.800	9.400
Kuartal Ketiga	11.450	9.850
Kuartal Keempat	12.650	10.000
2008	10.250	5.000
Kuartal Pertama	10.250	8.400
Kuartal Kedua	9.700	7.189
Kuartal Ketiga	7.878	6.155
Kuartal Keempat	7.250	5.000
2009	10.350	5.750
Kuartal Pertama	7.900	5.750
Kuartal Kedua	8.100	6.850
Kuartal Ketiga	9.450	7.550
September	8.800	8.250
Oktober	8.950	7.850
November	9.150	8.100
Desember	10.350	8.950
2010		
Januari	9.700	9.200
Februari	9.450	8.200
Maret	8.750	8.000

* Perusahaan melaksanakan pemecahan saham (*stock split*) dengan ratio 1:2 untuk Saham Biasa dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham menjadi nilai nominal Rp250 per lembar saham sebagaimana diputuskan dalam RUPST pada tanggal 30 Juli 2004, yang efektif pada tanggal 1 Oktober 2004. Nilai nominal hasil *stock split* telah diperhitungkan pada seluruh periode yang tertera.

Pada tanggal 30 Desember 2009 harga penutupan saham pada hari terakhir perdagangan BEI di tahun 2009 adalah Rp9.450.

Tabel berikut menyajikan harga tertinggi dan terendah *American Depositary Shares* ("ADS") TELKOM untuk jangka waktu tertentu, yang tercatat di New York *Stock Exchange* ("NYSE") dan London *Stock Exchange* ("LSE"). Perdagangan dalam bentuk ADS tidak dilakukan "di LSE", akan tetapi diperdagangkan secara "*off exchange*" (di luar bursa) sesuai aturan LSE. Berdasarkan peraturan LSE, perdagangan *off exchange* berarti bahwa tidak ada penawaran yang terjadi di LSE, bahwa perusahaan anggota LSE tidak melaksanakan transaksi tersebut di LSE melainkan di bursa lain atau transaksi pribadi, dan setelah transaksi tersebut dilaksanakan, perdagangan tersebut dilaporkan ke LSE.

Tabel Informasi Harga Saham ADS

Tahun Kalender	Harga per ADS (NYSE)		Harga per ADS (LSE)	
	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah
	(dalam Dolar AS)			
2005	25,50	16,85	29,76	16,88
Kuartal Pertama	21,96	18,11	21,86	18,17
Kuartal Kedua	21,96	16,85	21,99	16,88
Kuartal Ketiga	23,66	18,10	29,76	17,97
Kuartal Keempat	25,50	19,81	25,47	19,71
2006	46,68	24,65	46,70	23,78
Kuartal Pertama	31,51	24,65	31,38	23,78
Kuartal Kedua	38,28	27,95	38,35	27,90
Kuartal Ketiga	36,56	30,32	36,15	30,08
Kuartal Keempat	46,68	35,64	46,69	36,00
2007	56,50	37,74	56,87	38,29
Kuartal Pertama	46,98	37,74	46,82	39,30
Kuartal Kedua	47,02	42,70	47,15	39,60
Kuartal Ketiga	51,61	40,00	51,60	38,29
Kuartal Keempat	56,50	41,88	56,87	41,79
2008	45,50	17,31	45,74	16,89
Kuartal Pertama	45,50	37,50	45,74	36,32
Kuartal Kedua	42,86	31,50	41,99	32,03
Kuartal Ketiga	34,49	26,47	35,43	26,46
Kuartal Keempat	30,65	17,31	29,31	16,89
2009	41,55	20,19	40,76	25,67
Kuartal Pertama	26,45	20,19	27,92	25,67
Kuartal Kedua	31,25	24,93	36,91	31,76
Kuartal Ketiga	35,93	31,38	37,43	37,16
September	36,06	32,20	34,40	32,78
Oktober	37,65	33,56	37,43	37,16
November	38,68	34,58	40,76	38,53
Desember	41,55	38,51	40,66	39,83
2010				
Januari	41,07	39,05	40,66	39,83
Februari	40,13	35,64	35,57	35,57
Maret	38,00	34,90	40,21	35,41

Pada tanggal 31 Desember 2009, hari terakhir perdagangan saham di NYSE dan LSE pada tahun 2009, harga penutupan untuk satu lembar ADS TELKOM masing - masing adalah sebesar US$39,95 dan US$40.75.

PASAR

Saham Biasa TELKOM tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Selain itu, saham TELKOM juga tercatat dan diperdagangkan di New York *Stock Exchange* ("NYSE") dan London *Stock Exchange* ("LSE") melalui mekanisme *American Depositary Shares* ("ADS"). Satu lembar saham ADS mewakili 40 lembar saham dari Saham Biasa. Saham TELKOM juga terdaftar di Jepang melalui *Public Offering Without Listing* ("POWL").

Pasar sekuritas Indonesia dan Sekilas BEI

Di masa lalu, terdapat dua bursa efek di Indonesia. Pertama, Bursa Efek Jakarta, berlokasi di Jakarta. Kedua, Bursa Efek Surabaya, berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Pada tanggal 1 Desember 2007, bursa efek tersebut merger dan dibentuk Bursa Efek Indonesia atau "BEI". Pada tanggal 31 Desember 2009, total nilai perdagangan di BEI mencapai Rp975,1 triliun, dengan kapitalisasi pasar senilai Rp2.019,4 triliun.

Pada tanggal 31 Desember 2009, BEI memiliki 120 anggota perusahaan pialang. Mekanisme perdagangan di BEI diatur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh BEI. Saat ini dalam satu hari terdapat dua sesi perdagangan untuk pasar reguler dan pasar negosiasi (*negotiated market*) dari Senin hingga Kamis. Sesi pagi dimulai pukul 09.30 hingga pukul 12.00, sementara sesi siang berlangsung antara pukul 13.30-16.00. Pada hari Jumat, sesi pertama mulai pukul 09.30-11.30 dan sesi kedua mulai pukul 14.00-16.00. Hanya ada satu sesi perdagangan pasar tunai setiap harinya, berlangsung dari Senin hingga Kamis mulai pukul 09.30-12.00, dan pada hari Jumat dari pukul 09.30-11.30.

Perdagangan sekuritas dibagi menjadi tiga segmen yaitu pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai (kecuali untuk *right issue* yang hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan pasar negosiasi). Pasar reguler merupakan mekanisme untuk memperdagangkan saham dalam lot standar di pasar lelang yang dilakukan secara terus menerus selama jam bursa. Perdagangan pasar reguler dan pasar tunai pada umumnya dilaksanakan dalam unit lot, satu lot yang terdiri dari 500 lembar saham. Selain itu, BEI juga memberlakukan pembatasan atas pergerakan harga saham.

Aktivitas lelang berlangsung sesuai dengan prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga merujuk pada pemberian prioritas berdasarkan pesanan pembelian dengan harga yang lebih tinggi atau pesanan penjualan dengan harga yang lebih rendah. Apabila pesanan pembelian atau penjualan diajukan dengan harga yang sama, maka prioritas diberikan untuk pesanan pembelian atau penjualan yang diajukan lebih awal (prioritas waktu).

Perdagangan pasar negosiasi dilaksanakan melalui negosiasi langsung antara (i) anggota BEI atau (ii) antara klien melalui satu anggota BEI atau (iii) antara klien dan anggota BEI atau (iv) antara anggota BEI dengan Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI").

Transaksi di pasar regular BEI harus diselesaikan selambat-lambatnya pada perdagangan hari ketiga setelah transaksi kecuali untuk perdagangan silang. Transaksi di pasar negosiasi diselesaikan berdasarkan perjanjian antara anggota bursa yang menjual dan anggota bursa yang membeli dan diselesaikan per transaksi. Transaksi di pasar tunai BEI harus diselesaikan pada hari yang sama saat perdagangan dilakukan. Dalam hal anggota bursa gagal melakukan penyelesaian, maka berlaku ketentuan perdagangan pasar tunai tempat perdagangan sekuritas dilakukan dengan negosiasi langsung berdasarkan persyaratan tunai dan langsung (*cash and carry*). Seluruh transaksi pasar tunai harus dilaporkan ke BEI. Setiap anggota bursa diwajibkan membayar biaya transaksi sebagaimana yang diatur oleh BEI. Selanjutnya keterlambatan atas pembayaran biaya transaksi akan dikenakan denda sebesar 1,0% dari jumlah yang terhutang untuk setiap hari keterlambatan. Untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan BEI, maka BEI dapat mengenakan sanksi kepada anggotanya, termasuk denda, peringatan tertulis, skorsing, atau pencabutan ijin sebagai anggota bursa.

Seluruh transaksi terkait saham yang hanya tercatat di BEI dan menggunakan jasa pialang harus dilaksanakan melalui BEI. Agar perdagangan dapat dilaksanakan di BEI (kecuali *block trade*), maka baik penyelesaian (*settlement*) tunai maupun sekuritas harus dilaksanakan melalui fasilitas BEI. Sementara itu, penggunaan modus *short selling* dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, BEI memiliki wewenang untuk membatalkan sebuah transaksi apabila terdapat bukti adanya kecurangan, manipulasi pasar atau penggunaan informasi orang dalam. BEI juga dapat menangguhkan perdagangan apabila terdapat petunjuk adanya transaksi yang berupa penipuan atau penggelembungan harga saham, informasi yang menyesatkan, referensi informasi orang dalam, sekuritas palsu atau sekuritas yang diblokir dari perdagangan, atau peristiwa material lainnya. BEI memiliki wewenang untuk menangguhkan perdagangan sekuritas tertentu atau menskors anggota tertentu dari bursa efek.

Anggota BEI mengenakan biaya pialang untuk jasa mereka berdasarkan perjanjian dengan klien hingga maksimum sebesar 1,0% dari nilai transaksi. Saat melaksanakan transaksi saham di BEI, setiap anggota bursa diwajibkan untuk membayar biaya transaksi sebesar 0,03% dari nilai transaksi (untuk transaksi di pasar regular dan pasar tunai) dan biaya transaksi sebesar 0,03% dari nilai transaksi di pasar regional, atau besaran lain tergantung kebijakan bursa. Biaya transaksi minimal sebesar Rp2 juta per bulan sebagai kontribusi untuk penyediaan fasilitas bursa efek dan tetap berlaku untuk anggota bursa efek yang sedang diskors. Klien juga bertanggung jawab membayar pajak pertambahan nilai sebesar 10,0% dari jumlah biaya pialang dan biaya transaksi. Selain itu, penjual saham lokal diharuskan membayar wajib pungut pajak penghasilan (*with holding tax*) sebesar 0,1% atau 0,6% untuk saham pendiri dari total jumlah nilai transaksi. Selain itu, bea meterai sebesar Rp3.000 harus dibayar untuk setiap transaksi dengan nilai antara Rp250.000 dan Rp1.000.000, dan bea meterai sebesar Rp6.000 untuk setiap transaksi dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.

Para pemegang saham atau pihak yang ditunjuk, dapat meminta emiten atau biro administrasi sekuritas yang ditunjuk oleh emiten saham tersebut untuk mendaftarkan saham mereka ke dalam daftar pemegang saham emiten. Para pemegang saham dengan kepemilikan saham sebesar 5,0% atau lebih dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh, setelah memenuhi tingkat kepemilikan saham tersebut atau setelah terjadinya perubahan kepemilikan tersebut, diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK").

Guna mengantisipasi fluktuasi harga saham yang tidak normal dalam situasi krisis keuangan global pada kuartal terakhir 2008, maka BEI merasa perlu untuk merubah persyaratan atas *auto rejection*, yaitu suatu mekanisme ketika saham akan diberhentikan dari perdagangan secara otomatis guna menjaga perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. Berdasarkan penyesuaian yang dibuat oleh BEI pada bulan Oktober 2008 dan Januari 2009, tingkat *auto rejection* berubah menjadi 35% di atas atau di bawah harga acuan untuk saham seharga antara Rp50 – Rp200, 25% untuk saham dengan harga antara Rp200 sampai dengan Rp5.000, dan 20% untuk saham dengan harga di atas Rp5.000.

Perdagangan di NYSE, LSE, Dan biaya depositary

Bank of New York Mellon (sebelumnya The Bank of New York) bertindak sebagai *depositary ("Depositary")* untuk saham ADS yang diperdagangkan di NYSE dan LSE. Pada tanggal 31 Desember 2009, terdapat sebanyak 44.718.251 ADS dengan 128 pemegang ADS terdaftar.

Depositary mendapat bayaran untuk pengiriman dan penyerahan ADS secara langsung dari investor pada saat melakukan deposit saham atau ketika menyerahkan ADS untuk keperluan penarikan atau bertindak sebagai penengah bagi mereka. *Depositary* juga menerima bayaran ketika melakukan distribusi kepada investor dengan mengurangi upah tersebut dari jumlah yang didistribusikan atau dengan menjual sebagian dari properti yang akan didistribusikan guna membayar upah tersebut. *Depositary* dapat mengumpulkan iuran tahunan untuk layanan *depositary* dengan mengurangi distribusi kas atau secara langsung mengirim tagihan ke investor atau dengan menagih ke rekening dari sistem pembukuan pihak yang mewakili mereka. Secara umum, *Depositary* dapat menolak memberikan layanan yang menghasilkan upah sampai tagihan mereka untuk layanan tersebut dibayar.

Tabel Biaya Terkait Penerbitan dan Pembuatan ADS

Pemegang saham yang melakukan deposit atau penarikan dari saham Biasa atau ADS, harus membayar:	Untuk:
US$5 (atau kurang) per 100 saham ADS (atau sebagian dari 100 saham ADS).	Penerbitan saham ADS, termasuk penerbitan hasil dari pembagian saham atau hak atau kepemilikan lainnya. Pembatalan dari saham ADS untuk keperluan penarikan, termasuk jika perjanjian deposit berakhir.
US$0,02 (atau kurang) per saham ADS.	Setiap pembayaran tunai (*cash*) kepada pemegang saham ADS yang terdaftar.
Biaya yang setara dengan biaya yang dibebankan apabila surat berharga yang didistribusikan kepada pemegang saham berupa saham dan saham tersebut telah dideposit untuk penerbitan saham ADS.	Penyampaian surat berharga kepada pemegang saham oleh *Depositary* kepada pemegang saham tercatat ADS.
US$0,02 (atau kurang) per saham ADS per tahun kalender.	Layanan *Depositary.*
Biaya registrasi atau pemindahan.	Pemindahan dan pencatatan saham pada daftar saham Perusahaan dari atau kepada atas nama *Depositary* atau agennya ketika pemegang saham melakukan deposit atau melakukan penarikan saham biasa.
Biaya *Depositary.*	Pengiriman melalui telegram, telex dan faksimili (jika disediakan sesuai perjanjian deposit). Menukar mata uang asing ke Dolar AS.
Pajak dan biaya lainnya yang dibebankan oleh pemerintah, *Depositary* atau kustodian pada saat membayar saham ADS atau saham lain di bawah jaminan ADS, seperti pajak untuk pemindahan saham, meterai atau pajak penghasilan.	Sesuai dengan kebutuhan.
Setiap biaya yang dikenakan oleh *Depositary* atau agennya untuk melayani surat berharga yang didepositkan.	Sesuai dengan kebutuhan.

Depositary menyetujui penggantian biaya sampai dengan US$300.000 per tahunnya sampai tahun 2013 untuk beberapa beban tertentu yang timbul akibat dari kegiatan administrasi dan pemeliharaan fasilitas ADR, termasuk, namun tidak terbatas, untuk beban hubungan investor, baik langsung maupun tidak langsung, serta beban program ADR terkait lainnya. Penggantian ini akan dievaluasi dan disesuaikan jika jumlah saham ADS yang beredar berada di bawah jumlah minimum yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak tercatat lagi dari NYSE. Kami berharap dapat melakukan negosiasi ulang terhadap jumlah penggantian biaya tersebut untuk tahun-tahun setelah tahun 2013. Pada tahun 2009, TELKOM menerima penggantian biaya sebesar US$159.006,65.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Modal Dasar Perseroan:

1 lembar saham Seri A Dwiwarna, dan 79.999.999.999 saham Seri B (Saham Biasa).

Tabel Komposisi Pemegang Saham TELKOM sampai dengan 31 Desember 2009

	Saham Seri A Dwiwarna	Saham Seri B (Saham Biasa)	(%)
Pemerintah Republik Indonesia	1	10.320.470.711	52,47
Publik		9.348.954.068	47,53
Sub total modal (ditempatkan dan disetor penuh)	1	19.669.424.779	100,00
Saham Treasuri (saham yang dibeli kembali)		490.574.500	-
TOTAL	1	20.159.999.279	100,00

Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah) memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna, yang memiliki hak suara istimewa. Hak-hak material dan batasan-batasan yang terdapat pada saham biasa, juga berlaku pada saham Dwiwarna kecuali Pemerintah tidak dapat mengalihkan saham Dwiwarna, memiliki hak veto berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, penerbitan saham baru dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk perubahan untuk menggabungkan atau membubarkan perusahaan sebelum masa berlakunya berakhir, menambah atau mengurangi modal dasar dan mengurangi saham yang dipesan *(subscribed capital)*.

Tabel Pemegang Saham TELKOM Dengan Kepemilikan Lebih Dari 5% Dan Jumlah Saham Yang Dimiliki Dewan Komisaris Dan Direksi, Pada Tanggal 31 Desember 2009

Jenis Saham	Identitas Orang atau kelompok	Jumlah Saham Yang Dimiliki	Persentase Saham (%)
Seri A	Pemerintah	1	-
Seri B	Pemerintah	10.320.470.711	52,47
Seri B	Direksi	23.112	<0,01

Tabel Pemegang Saham biasa TELKOM Dengan Kepemilikan Perorangan Kurang Dari 5%, Pada Tanggal 31 Desember 2009

Kelompok	Jumlah Saham Biasa Yang Dimiliki	Persentase (%) Kepemilikan Saham Biasa Beredar
Perorangan Indonesia	109.881.600	0,56
Karyawan - Lokal	14.316.126	0,07
Koperasi	657.220	-
Yayasan	9.953.880	0,05
Dana Pensiun	186.820.440	0,95
Perusahaan	260.074.040	1,32
Bank	252.364	-
Perusahaan Terbatas	310.629.646	1,58
Badan Usaha Lainnya	4.320	-
Danareksa	32.000	-
Reksadana	446.830.660	2,27
Perorangan Asing	4.871.796	0,02
Badan Usaha Asing	8.004.606.864	40,70
Total	9.348.930.956	47,53

HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAN INSTANSI PEMERINTAH

Hubungan TELKOM dengan Pemerintah terjadi dalam banyak segi. Pemerintah adalah pemegang saham mayoritas dan pengendali. Pemerintah merupakan regulator yang membuat, mengawasi dan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan sektor telekomunikasi dan penetapan tarif. Selain itu, Pemerintah menerbitkan lisensi, dan juga merupakan salah satu pelanggan TELKOM.

Adapun yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia, termasuk kementerian, departemen dan instansi pemerintah, namun tidak termasuk badan usaha milik negara.

Pemerintah sebagai Pemegang Saham

Sampai dengan 31 Desember 2009, Pemerintah memiliki 52,47% Saham Biasa dan satu Saham Seri A (Saham Dwiwarna) TELKOM, yang memiliki hak suara khusus.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, "kepemilikan" saham biasa dan satu saham Dwiwarna berada di bawah kuasa Departemen Keuangan RI. Kemudian, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Departemen Keuangan, Menteri BUMN menggunakan hak-hak yang diberikan dalam saham ini sebagai pemegang saham pengendali TELKOM.

Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemerintah sangat berkepentingan atas kinerja TELKOM, baik terkait dengan manfaat yang diberikannya kepada bangsa dan kemampuan TELKOM untuk beroperasi secara komersial. Hak dan batasan material yang berlaku untuk Saham Biasa juga berlaku untuk Saham Seri A Dwiwarna, dengan pengecualian pemerintah tidak boleh mengalihkan Dwiwarna dan Saham Seri A, Pemerintah memiliki hak veto berkenaan dengan: (i) pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian direksi; (ii) pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian komisaris; (iii) penerbitan saham baru; dan (iv) perubahan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk tindakan untuk menggabungkan atau membubarkan TELKOM, meningkatkan atau mengurangi modal dasarnya,

menurunkan modal dasar, atau mengurangi modal yang ditempatkan. Dengan demikian, Pemerintah memiliki kendali efektif atas hal-hal tersebut walaupun memiliki kurang dari mayoritas Saham Biasa yang beredar. Hak-hak Pemerintah berkenaan dengan Saham Seri A Dwiwarna tidak akan berakhir, kecuali ada perubahan sehingga diperlukan amandemen terhadap Anggaran Dasar Perusahaan yang mensyaratkan persetujuan Pemerintah sebagai pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut. Lihat Catatan 25 dan 43 Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

Perusahaan mempunyai kebijakan untuk tidak mengadakan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa apabila tidak lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang diperoleh Perusahaan dari transaksi dengan pihak ketiga. Menteri BUMN telah menyampaikan kepada Perusahaan bahwa kementrian tidak mengadakan transaksi dengan entitas lain yang berada di bawah kendalinya, kecuali bila perjanjian bisnisnya konsisten dengan syarat-syarat dan kebijakan Perseroan sebagaimana yang diuraikan dalam kalimat sebelumnya.

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK, karena Perusahaan tercatat di BEI, setiap transaksi yang memiliki benturan kepentingan sebagaimana dijelaskan di bawah ini dengan perusahaan lain yang tercatat di BEI, harus mendapat persetujuan dari mayoritas pemegang saham dari Saham Biasa yang tidak memiliki benturan kepentingan atas transaksi yang diusulkan, kecuali benturan kepentingan tersebut terjadi sebelum Perusahaan tercatat dan diungkapkan sepenuhnya dalam dokumen penawaran.

Benturan kepentingan seperti yang didefinisikan dalam peraturan Bapepam-LK adalah benturan antara kepentingan ekonomi Perusahaan dan para pemegang saham di satu sisi dan di sisi lain kepentingan ekonomi pribadi anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama (pemegang 20% atau lebih saham yang ditempatkan) serta afiliasi mereka, baik secara gabungan atau terpisah. Suatu benturan kepentingan juga terjadi apabila anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham prinsipal dari Perusahaan atau afiliasi mereka masing-masing terlibat dalam transaksi, kepentingan pribadi mereka mungkin berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Bapepam-LK berwenang untuk memberlakukan peraturan ini; pemegang saham Perusahaan juga berhak untuk mengajukan tuntutan atas pemberlakuan peraturan ini.

Sesuai dengan peraturan Bapepam-LK, transaksi antara Perusahaan dan badan usaha milik negara atau badan usaha lainnya yang dikendalikan oleh

Komisaris Utama dan Direktur Utama TELKOM berfoto bersama Meneg BUMN dan Menkominfo sesaat setelah acara softlaunching logo baru TELKOM, pada tanggal 17 Oktober 2009, di Jakarta.

negara dapat mengakibatkan "benturan kepentingan". Dalam hal ini, persetujuan dari pemegang saham yang tidak berkepentingan wajib diperoleh jika "benturan kepentingan" ini terjadi. Perusahaan meyakini bahwa transaksi-transaksi yang dilaksanakan dengan badan usaha milik negara atau yang dikendalikan negara telah dilakukan melalui praktik bisnis yang independen, berbasis komersial dan bukan merupakan transaksi yang mengandung "benturan kepentingan" yang memerlukan suara pemegang saham netral. Transaksi tersebut termasuk penjualan jasa telepon oleh TELKOM kepada badan usaha milik negara atau yang dikendalikan negara atau pembelian listrik dari Perusahaan dari badan usaha milik negara. Perusahaan berharap, dalam hubungannya dengan pengembangan dan pertumbuhan bisnisnya, dari waktu ke waktu Perusahaan dapat mengadakan usaha patungan, perjanjian atau transaksi dengan badan usaha milik negara atau yang dikendalikan oleh Pemerintah tersebut. Dalam situasi ini, TELKOM dapat berkonsultasi dengan Bapepam-LK dalam menentukan apakah usaha patungan, perjanjian atau transaksi yang diusulkan memerlukan suara dari pemegang saham netral berdasarkan syarat-syarat peraturan Bapepam-LK. Apabila Bapepam-LK berpandangan bahwa usaha patungan perjanjian atau transaksi yang diusulkan tidak memerlukan suara dari pemegang saham netral sesuai peraturan yang berlaku, maka TELKOM akan melaksanakannya tanpa memerlukan persetujuan dari pemegang saham netral tersebut. Namun, apabila Bapepam-LK mensyaratkan bahwa usulan tersebut memerlukan suara dari pemegang saham netral sesuai peraturan yang berlaku, maka TELKOM harus berupaya mendapatkan persetujuan dari pemegang saham netral sebagaimana yang disyaratkan atau membatalkan usulan tersebut.

Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah mengatur sektor telekomunikasi melalui Menteri Komunikasi dan Informasi ("Menkominfo"). Menkominfo berwenang menerbitkan peraturan pelaksanaan atas undang-undang, yang umumnya memiliki lingkup yang luas. Berdasarkan keputusan ini Menkominfo mendefinisikan struktur industri, menentukan formula tarif, menentukan kewajiban Kewajiban Pelayanan Umum ("KPU"), dan mengendalikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi kompetitif, usaha dan kondisi keuangan TELKOM. Melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("Ditjen Postel"), Menkominfo mengatur alokasi frekuensi dan menentukan jumlah sambungan telepon tidak bergerak. TELKOM wajib memperoleh lisensi dari Ditjen Postel untuk setiap jenis layanan yang ditawarkan, termasuk frekuensi yang dipergunakan (sebagaimana dialokasikan oleh Menkominfo). TELKOM dan operator lain diharuskan membayar biaya hak penggunaan frekuensi. Telkomsel memiliki beberapa lisensi yang diterbitkan oleh Menkominfo (yang sebelumnya dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan) untuk penyediaan jasa selulernya, dan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia terkait dengan investasi oleh Telkomsel untuk pembangunan jasa sambungan telepon seluler dengan jangkauan nasional, termasuk perluasan jangkauan jaringannya. Pemerintah, melalui Menkominfo sebagai pengatur, berwenang untuk memberikan lisensi baru untuk pendirian usaha patungan dan pengaturan baru lainnya, khususnya di bidang telekomunikasi.

Kepemilikan lisensi di atas mengharuskan TELKOM membayar biaya hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disediakan dan biaya hak penggunaan frekuensi radio kepada Menkominfo. Biaya hak penyelenggaraan adalah sebesar Rp587,8 miliar pada tahun 2007, Rp632,5 miliar pada tahun 2008 dan Rp327,1 miliar (US$34,7 juta) pada tahun 2009. Persentase biaya penyelenggaraan tersebut dari jumlah beban usaha adalah sebesar 1,8% di tahun 2007, 1,6% di tahun 2008 dan 0,8% di tahun 2009. Biaya hak penggunaan frekuensi radio senilai Rp1.138,5 miliar pada tahun 2007, Rp2.400,3 miliar pada tahun 2008 dan Rp2.499,3 miliar (US$265,2 juta) pada tahun 2009. Persentase biaya tersebut dari keseluruhan beban usaha adalah 3,5% di tahun 2007, 6,2% di tahun 2008 dan 6,0% di tahun 2009. TELKOM membayar biaya KPU kepada Menkominfo sebesar Rp438,5 miliar di tahun 2007, Rp462,5 miliar di tahun 2008 dan Rp809,6 miliar (US$85,9 juta) di tahun 2009. Persentase biaya KPU ini mencerminkan 1,3% di tahun 2007, 1,2% di tahun 2008 dan 2,0% di tahun 2009 dari keseluruhan beban usaha.

Sampai dengan 31 Desember 2009, sebanyak 31.718 orang, termasuk Pemerintah, terdaftar sebagai pemegang Saham Biasa TELKOM, termasuk 8.009.478.660 Saham Biasa yang dimiliki oleh 1.385 pemegang saham di luar Indonesia

Pemerintah sebagai Pemberi Pinjaman

Pada bulan Juli 1994, Pemerintah mengatur sebuah fasilitas dengan sejumlah institusi asing menyediakan dana bagi TELKOM (melalui Pemerintah) dalam bentuk "pinjaman penerusan" (sebagai *two-step-loans*) yang digunakan untuk sejumlah pengeluaran tertentu. Pinjaman ini dijamin oleh Pemerintah. Sampai dengan 31 Desember 2009, pinjaman dalam bentuk "*two-step -loans*" sebesar Rp3.518,09 miliar (US$373,08 juta), termasuk yang jatuh tempo pada tahun berjalan (*current maturities*). TELKOM diwajibkan membayar bunga kepada Pemerintah dan membayar kembali pokok pinjamannya yang selanjutnya dibayarkan oleh Pemerintah kepada masing-masing pemberi pinjaman. Sampai dengan 31 Desember 2009, 70,89% dari pinjaman penerusan tersebut merupakan pinjaman dalam mata uang asing. Sisanya, sebesar 29,11% dari pinjaman tersebut dalam mata uang Rupiah. Pada tahun 2009, tingkat suku bunga tahunan atas pinjaman yang harus dibayar kembali, dalam Rupiah berkisar antara 9,65% sampai 10,30% atas pinjaman yang harus dibayar kembali, dalam Dolar Amerika Serikat mulai dari 4% sampai 6,67% dan atas pinjaman yang harus dibayar kembali dalam Yen Jepang sebesar 3,10%.

Departemen dan Instansi Pemerintah sebagai Pelanggan TELKOM

Sejumlah departemen dan instansi Pemerintah, membeli layanan TELKOM sebagai pelanggan, negosiasi kontrak dilakukan secara komersial. TELKOM tidak memberikan layanan secara cuma-cuma atau dalam bentuk barter. TELKOM berhubungan dengan berbagai departemen dan instansi Pemerintah sebagai pelanggan secara terpisah satu dengan lainnya. Pada tahun 2009, total pendapatan yang diterima dari berbagai departemen dan instansi sebanyak Rp1.069 miliar, jumlah itu kurang dari 2% dari total pendapatan operasional konsolidasian TELKOM, dan tidak merupakan jumlah yang material terhadap pendapatan operasional. Departemen dan instansi pemerintah dikenakan tarif pemakaian dan bulanan yang sama dengan segmen perumahan, yang lebih rendah daripada tarif layanan untuk bisnis. Perlakuan khusus ini tidak berlaku untuk tarif panggilan lokal, jarak jauh dan SLI.

LAIN-LAIN

Proporsi Saham Biasa TELKOM yang dimiliki di Indonesia dan di luar Indonesia

Sampai dengan 31 Desember 2009, sebanyak 31.718 pemegang saham, termasuk Pemerintah, terdaftar sebagai pemegang Saham Biasa TELKOM, termasuk 8.009.478.660 Saham Biasa yang dimiliki oleh 1.385 pemegang saham di luar Indonesia.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, terdapat 128 pemegang saham ADS yang memiliki 44.718.251 ADS (setara dengan 1.927.402.040 Saham Biasa).

Perubahan Kendali

Tidak ada rencana apapun yang dapat mengakibatkan perubahan kendali terhadap TELKOM.

Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

TELKOM terikat dengan beberapa perjanjian tertentu dan terlibat dalam transaksi dengan sejumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan TELKOM, seperti perusahaan patungan, koperasi dan yayasan, dan juga Pemerintah serta badan usaha yang terkait atau yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah, seperti badan usaha milik negara. Lihat Catatan 43 pada Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM untuk informasi lebih rinci mengenai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Pembelian Surat Saham oleh Emiten dan Pembeli Terafiliasi

Sampai dengan 31 Desember 2009, jumlah total saham TELKOM yang telah dibeli kembali sebanyak 490.574.500 lembar Saham Biasa setara dengan 2,43% dari Saham Biasa yang diterbitkan dan beredar dengan harga pembelian kembali senilai Rp4.264.073 juta, termasuk biaya broker dan kustodian. Berdasarkan program pembelian kembali, TELKOM membeli dengan perincian sebagai berikut: 118.376.500 lembar saham di tahun 2006, 126.364.000 lembar saham di tahun 2007 dan 245.834.000 lembar saham di tahun 2008. Selama periode dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2009, TELKOM tidak melakukan pembelian kembali Saham Biasa. Lihat Catatan 27 Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

Kami berencana untuk mempertahankan, menjual atau menggunakan *treasury stock* untuk keperluan lain sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. XI.B.2 dan UU No. 40/2007 mengenai Perusahaan Terbatas.

Tentang TELKOM

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. ("TELKOM", "Perseroan", "Perusahaan" atau "Kami") adalah penyedia layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan layanan InfoComm, telepon tidak bergerak kabel (*fixed wireline*) dan telepon tidak bergerak nirkabel (*fixed wireless*), layanan telepon seluler, data dan internet, serta jaringan dan interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan.

Sampai dengan 31 Desember 2009, jumlah pelanggan TELKOM telah tumbuh sebesar 21,2% atau menjadi 105,1 juta pelanggan. TELKOM melayani 8,4 juta pelanggan telepon tidak bergerak kabel, 15,1 juta pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel, dan 81,6 juta pelanggan telepon seluler.

Sampai dengan 31 Desember 2009, sebagian besar dari saham biasa TELKOM dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya dimiliki oleh pemegang saham publik. Saham TELKOM diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"), New York *Stock Exchange* ("NYSE"), London *Stock Exchange* ("LSE") dan Tokyo *Stock Exchange* (tanpa tercatat). Harga saham TELKOM di BEI pada akhir Desember 2009 adalah Rp9.450 dengan nilai kapitalisasi pasar saham TELKOM pada akhir tahun 2009 mencapai Rp190.512 miliar atau 9,43% dari kapitalisasi pasar BEI.

Untuk menghadapi tantangan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan mobilitas dan konektivitas tanpa putus, TELKOM telah memperluas portofolio bisnisnya yang mencakup telekomunikasi, informasi, media dan *edutainment* (TIME). Dengan meningkatkan infrastruktur, memperluas teknologi *Next Generation Network* (NGN) dan memobilisasi sinergi di seluruh jajaran TELKOMGroup, TELKOM dapat mewujudkan dan memberdayakan pelanggan ritel dan korporasi dengan memberikan kualitas, kecepatan, kehandalan dan layanan pelanggan yang lebih baik.

Visi, Misi, Tujuan, Inisiatif Strategis

Visi

Menjadi perusahaan InfoComm terkemuka di kawasan regional.

Misi

- Menyediakan layanan InfoComm terpadu dan lengkap dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif.
- Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

Tujuan

Menciptakan posisi unggul dengan memperkokoh bisnis *legacy* & meningkatkan bisnis *new wave* untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015.

Inisiatif Strategis

1. Mengoptimalkan layanan jaringan telepon tidak bergerak kabel / *fixed wireline* ("FWL").
2. Memperkuat & mengembangkan bisnis jaringan tidak bergerak nirkabel / *fixed wireless access* ("FWA") dan mengelola portofolio nirkabel.
3. Melakukan investasi pada jaringan pita lebar (*broadband*).
4. Mengintegrasikan solusi *enterprise* dan berinvestasi di bisnis *wholesale.*
5. Mengintegrasikan *Next Generation Network* ("NGN").
6. Mengembangkan layanan teknologi informasi.
7. Mengembangkan bisnis media dan *edutainment*.
8. Merampingkan portofolio anak perusahaan.
9. Menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio.
10. Melakukan transformasi budaya perusahaan.

Peristiwa Penting 2009

Januari

TELKOM & GARUDA INDONESIA MERESMIKAN LAYANAN *CONTACT CENTER* TERPADU

Menkominfo Mohammad Nuh meresmikan Kantor Layanan *Contact Center* Garuda Indonesia di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2009. Peresmian ini dihadiri Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar dan Direktur Utama TELKOM, Rinaldi Firmansyah. Layanan *contact center* ini berfungsi sebagai *integrated information center* guna melayani reservasi dan layanan GFF (*Garuda Frequent Flyer*). Layanan contact center Garuda Indonesia ini dikelola dan dioperasikan oleh anak perusahaan TELKOM yaitu PT Infomedia Nusantara, yang telah berpengalaman dalam mengelola layanan sejenis.

Mei

PELUNCURAN *INDIGO FELLOWSHIP* 2009

Kami meluncurkan *Indigo Fellowship* 2009 pada tanggal 25 Mei, sebuah program tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk membantu penyediaan *link and match* bisnis pemula di dalam industri kreatif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Peluncuran *Indigo Fellowship* 2009 ini dihadiri oleh Direktur Utama, Rinaldi Firmansyah, Direktur IT & Supply, Indra Utoyo, Direktur NWS, Ermady Dahlan serta *senior leaders* TELKOMGroup.

Juni

RUPST 2009 DIGELAR DENGAN TUJUH AGENDA UTAMA

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) TELKOM tahun 2009 digelar di Jakarta pada tanggal 12 Juni dan membahas tujuh agenda utama.

Juli

TELKOM MEMPEROLEH LISENSI AKSES PITA LEBAR NIRKABEL UNTUK FREKUENSI 2,3 GHZ

Berdasarkan hasil lelang tanggal 15 Juli, TELKOM memperoleh lisensi penyelenggaraan jaringan tidak bergerak lokal berbasis *packet switched* untuk frekuensi radio 2,3 GHz di Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Maluku, dan Sulawesi bagian utara.

Agustus

SINERGI BUMN – TELKOM DAN HIMBARA

Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI 46 dan BTN melakukan kerjasama dengan TELKOM dalam pelaksanaan transaksi elektronik dengan tujuan untuk menciptakan efisiensi biaya dan kemudahan transaksi bagi nasabah. Sinergi BUMN ini diresmikan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus dan dihadiri oleh Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, dan para Direktur Utama Bank anggota Himbara dan Dirut TELKOM, Rinaldi Firmansyah.

September

TELKOM MEMBERIKAN BANTUAN KEMANUSIAAN UNTUK KORBAN GEMPA BUMI DI SUMATERA BARAT

Sebagai wujud solidaritas pada masyarakat yang terkena musibah gempa bumi di Sumatera Barat (Padang-Pariaman), TELKOM telah menyediakan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan seperti upaya normalisasi layanan telekomunikasi terutama pada rumah sakit, tenda-tenda pengungsian maupun posko-posko. TELKOM juga menyediakan fasilitas telepon bebas pulsa (*toll free*) bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang musibah gempa bumi ini, menyediakan layanan telepon gratis, menyediakan layanan kesehatan, membangun *Speedy Press Center* serta fasilitas satelit untuk pengiriman berita.

September

MUDIK NYAMAN BERSAMA TELKOMGROUP

Pada tanggal 18 September, di Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Menkominfo Mohammad Nuh melepas peserta mudik nyaman bersama TELKOMGroup Peduli yang diikuti oleh 4.402 orang. TELKOMGroup bekerjasama dengan Polri dan Dishub, serta agen tunggal pemegang merek mendirikan berbagai pos untuk mengantisipasi arus mudik maupun arus balik lebaran. TELKOMGroup juga menyediakan *video streaming* yang bisa diakses melalui *hand phone* atau komputer di 33 lokasi.

September

BAKTI SOSIAL KOMUNITAS POSTEL UNTUK KORBAN GEMPA BUMI TASIKMALAYA

Sebagai wujud kepedulian atas gempa bumi yang mengguncang Tasikmalaya, Menkominfo bersama komunitas Postel mengunjungi Desa Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 9 September. Bakti sosial ini ditandai dengan pemberian sumbangan kepada masyarakat. Ada dua macam sumbangan yang diberikan yaitu sumbangan yang bersifat jangka pendek seperti sembako, selimut, layanan telekomunikasi gratis, layanan kesehatan, dapur umum, serta layanan air bersih, dan sumbangan yang bersifat jangka panjang dalam bentuk layanan SMS Tunasis, yaitu pendapatan dari para donatur yang dikirimkan melalui SMS selama satu bulan ke depan yang akan disumbangkan untuk perbaikan sarana pendidikan yang rusak karena gempa.

September

MENKOMINFO MENGHADIRI *TRIAL* PERDANA *IPTV*

Menteri Komunikasi dan Informasi, Mohammad Nuh, menyerahkan sertifikasi penyelenggaraan layanan *Internet Protocol Television/ IPTV* (berdasarkan pada Peraturan Menteri No. 30/PER/M. KOMINFO/8/2009) kepada Direktur Utama TELKOM, Rinaldi Firmansyah. Pada kesempatan yang sama, TELKOM melaksanakan *trial* perdana *IPTV* di hadapan Menkominfo beserta para pejabat Depkominfo, serta asosiasi terkait di Jakarta pada tanggal 8 September.

IPTV merupakan konvergensi antara siaran televisi dan layanan telekomunikasi (termasuk suara, teks, data, dan video). Layanan ini didukung oleh infrastruktur pita lebar (*broadband*). Untuk akses pita lebar, TELKOM telah memiliki jaringan kabel telepon ke rumah-rumah sebanyak 8,7 juta satuan sambungan telepon (SST). Sedangkan kontennya, TELKOM juga telah memiliki jaringan TV berlangganan (*pay TV*).

Oktober

PELUNCURAN *NEW* TELKOM INDONESIA

TELKOM melakukan transformasi bisnis secara fundamental yang diikuti juga dengan memperkenalkan *corporate identity* baru dalam menyambut era baru TELKOM sebagai satu-satunya perusahaan *Telecommunication, Information, Media* dan *Edutainment* (TIME) di Indonesia.

New TELKOM Indonesia ini resmi diperkenalkan kepada publik pada tanggal 16 Oktober di Jakarta pada acara *Official Launching New* TELKOM Indonesia dengan ditekannya sirine bersama-sama oleh Direktur Utama Rinaldi Firmansyah, Komisaris Utama Tanri Abeng, Menkominfo Mohammad Nuh, dan Meneg BUMN Sofyan Djalil. *Grand launching New* TELKOM Indonesia digelar pada tanggal 23 Oktober di Djakarta Theatre bersamaan dengan penganugerahan *Indigo Award* yang disiarkan secara langsung oleh Trans TV.

Oktober

PERINGATAN HARI JADI TELKOM KE-153

Tanggal 23 Oktober 2009 merupakan hari jadi TELKOM yang ke 153, dan untuk pertama kalinya dirayakan oleh semua staf TELKOM di seluruh Indonesia. Acara ini juga memperingati dilakukannya pengoperasian layanan jasa telekomunikasi untuk pertama kalinya di Indonesia dalam bentuk layanan telegrap elektromagnetik yang menghubungkan Jakarta dan Bogor pada bulan Oktober 1856.

Oktober

MENTERI NEGARA BUMN MERESMIKAN *INSURE NET*

Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, meresmikan *Indonesia Insurance Shared Service Platform (InSure Net)* dan Asosiasi Asuransi Negara (Asgara) di Jakarta pada tanggal 15 Oktober. *InSure Net* merupakan sebuah *platform* kolaborasi dan transaksi secara *online*, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta mutu pelayanan institusi asuransi. *InSure Net* menghubungkan institusi asuransi dengan entitas pelaku di industri kesehatan, seperti apotek, penyedia layanan kesehatan, regulator dan institusi keuangan.

November

PRESIDEN INDONESIA MERESMIKAN PROYEK PALAPA RING

Pada tanggal 30 November, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pembangunan awal dari Palapa Ring untuk sektor selatan Indonesia Bagian Timur berupa penggelaran serat optik yang menghubungkan antara Mataram-Nusa Tenggara Barat dengan Kupang-Nusa Tenggara Timur. Dengan terintegrasinya *backbone* serat optik dari kawasan barat, tengah dan timur Indonesia, maka infrastruktur ICT Nasional dengan nama TELKOM *Super Highway* akan terwujud. Jaringan serat optik nasional telah menjangkau 33 ibukota provinsi dan 440 kota serta kabupaten di seluruh Indonesia dan akan menjadi tulang punggung bagi semua penyelenggara telekomunikasi serta pengguna jasa telekomunikasi yang membutuhkan transfer data dalam kecepatan tinggi atau pita lebar.

November

MENKOMINFO MENDUKUNG TELKOM DALAM PELUNCURAN DNS NAWALA

Tanggal 17 Nopember di Jakarta, TELKOM dan Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) meluncurkan *Domain Name System* (DNS) yang dikenal dengan nama Nawala. Nawala adalah layanan gratis bagi pengguna internet yang menyediakan fasilitas penyaringan terhadap konten yang bersifat negatif, pornografi, *blocking malware, phishing* dan lain-lain. Pada kesempatan itu EGM Multimedia, Ruslan Rustam menandatangani MoU dengan Ketua Awari, Irwin Day, yang disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring, Ketua Komnas Perlindungan anak, Kak Seto Mulyadi, Direktur NWS, Ermady Dahlan dan Direktur IT & Supply, Indra Utoyo.

Penghargaan 2009

Februari

TELKOM DAN TELKOMSEL RAIH *TOP BRAND AWARD* 2009

TELKOM yang diwakili oleh Direktur Konsumer, I Nyoman G Wiryanata, menerima penghargaan untuk kategori *Internet Service Provider* (Speedy & Telkomnet Instant), *prepaid* CDMA (Flexi Trendy), dan *post-paid* CDMA (Flexi Classy) dalam ajang penghargaan tahunan *Top Brand Award* di Jakarta pada tanggal 10 Februari. Telkomsel diwakili Dirutnya, Sarwoto, menerima penghargaan kategori *Cellular SIM Card simPati* dan *Cellular SIM card* kartuHalo.

02

Februari

TELKOM MENERIMA *INDONESIAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AWARD 2008* DARI MENTERI SOSIAL

TELKOM meraih 6 kategori pada penghargaan tahunan Indonesian *CSR Award 2008* di Jakarta, salah satunya adalah penghargaan *Platinum*, yaitu penghargaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Direktur HCGA, Faisal Syam menerima penghargaan ini yang diserahkan langsung oleh Menteri Sosial RI, Bachtiar Chamsyah. TELKOM juga meraih penghargaan *Gold* di bidang sosial, *Silver* di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan, juara pertama di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan untuk TELKOM Divre I, serta juara kedua untuk bidang ekonomi sosial, dan lingkungan untuk TELKOM Divre V.

02

April

TELKOM TERCATAT DI URUTAN 675 FORBES GLOBAL 2000

TELKOM menduduki urutan 675 dalam Forbes Global 2000 yang didasarkan pada *market value* TELKOM senilai US$10,60 miliar, laba sebesar US$7,41 miliar serta aset mencapai US$8,74 miliar. Ini adalah untuk yang ketiga kalinya TELKOM tercatat di daftar Forbes Global 2000. Pada tahun 2007, TELKOM berada di peringkat 835 dan pada tahun 2008 meningkat ke posisi 729. Pada tahun 2009 ini, peringkat TELKOM naik menjadi urutan 675, tertinggi di antara enam perusahaan Indonesia yang masuk daftar Forbes Global 2000.

04

Mei

TELKOM RAIH THE BEST *CONTACT CENTER OPERATION*

Melalui *Contact Center* 147 TELKOM bekerjasama dengan Infomedia turut serta dalam acara Indonesia *Contact Center Award* yang diselenggarakan oleh *Indonesia Contact Center Assosiation* (ICCA) dari tanggal 28 April sampai dengan 29 Mei 2009. TELKOM berhasil meraih award *The Best Operational Contact Center (Emas), The Best Business Contribution (Emas), The Best Technology Innovation (Perunggu)* serta *The Best Manager above 100 seats (Perunggu)*.

05

Juni

TELKOM RAIH PENGHARGAAN *CONTACT CENTER* TINGKAT ASIA-PASIFIK

ContactCenterWorld.com mengumumkan TELKOM sebagai *The Best Outsourcing Partnership* – Asia Pasifik 2009. Penyerahan penghargaan di lakukan di *Contact Center Asia Pasifik Top Performer 2009* yang berlangsung di Singapura, pada tanggal 26 Juni, dan diikuti oleh lebih dari seribu peserta termasuk dari Singapura, Malaysia, Pakistan dan Australia.

06

Juni

TELKOM FLEXI DAN TELKOMSEL RAIH PENGHARGAAN PADA CELLULAR AWARD 2009

TELKOM Flexi meraih *Best Customer Care Operator* dan *Best CDMA Operator* dalam penganugerahan *Cellular Award* ke-enam tahun 2009. Pemilihan tersebut dilakukan oleh lembaga survei MARS yang bekerjasama dengan Majalah Seluler yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 24 Juni. Majalah Seluler juga memberikan apresiasi pada Telkomsel untuk kategori *Best of Operator* dan *Best GSM operator*.

06

Juli

TELKOM – PERUSAHAAN TERBAIK, RINALDI FIRMANSYAH - CEO OF THE YEAR 2009

TELKOM dinobatkan sebagai perusahaan terbaik kategori Emiten Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi pada Bisnis Indonesia Awards 2009, yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2009 di Jakarta. Dalam acara tersebut, juga diberikan penghargaan CEO of the Year 2009 pada Dirut TELKOM Rinaldi Firmansyah.

07

Agustus

TELKOM RAIH DUA PENGHARGAAN IMAC 2009

TELKOM menerima *Indonesia's Most Admired Companies* (IMAC) *Award* 2009 di bidang telekomunikasi berdasarkan survei yang diselenggarakan atas kerjasama Majalah Business Week dan Frontier Consulting Group. Penghargaan tahunan tersebut diberikan oleh Chairman Frontier Consulting Group Handi Irawan dan diterima oleh Direktur Konsumer TELKOM, I Nyoman G Wiryanata, pada tanggal 12 Agustus di Jakarta. Selain itu, TELKOM juga mendapat penghargaan *The Most Sustainable Corporate Image 2009* berdasarkan kriteria penilaian *performance, quality, attractiveness* dan *responsibility* serta ditambah strategi komunikasi perusahaan. Acara ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 28-29 Juli.

08

September

TELKOM RAIH ICSA 2009

TELKOM berhasil meraih Penghargaan *Indonesian Customer Satisfaction Award* (ICSA) 2009 untuk kategori *Internet Service Provider Wireline/ Fixed category for Speedy*. Penghargaan diserahkan oleh *Chairman* Frontier Consulting Group, Handi Irawan kepada Direktur Konsumer TELKOM, I Nyoman G Wiryanata di Jakarta pada tanggal 3 September.

09

Oktober

TELKOM RAIH BEST OF THE BEST e-COMPANY AWARD 2009

TELKOM meraih *Best of The Best e-Company Award* 2009 pada ajang tahunan *Warta Ekonomi e-Company Award* 2009 di Jakarta pada tanggal 29 Oktober. Penghargaan diberikan oleh CEO Warta Ekonomi, Mario Alisjahbana pada Direktur IT & Supply, Indra Utoyo. *Warta Ekonomi e-Company Award* merupakan ajang penghargaan perusahaan terbaik di Indonesia yang dinilai sukses mengimplementasikan teknologi informasi yang mampu mendorong kinerja bisnis perusahaan.

10

Oktober

TELKOM TERIMA PENGHARGAAN *ZERO ACCIDENT* DAN SMK3

TELKOM menerima Piagam Penghargaan Tahunan Kecelakaam Nihil (*Zero Accident Award*) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno, atas prestasinya dalam melaksanakan program Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2009, di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2009. TELKOM Divisi Regional V juga berhasil menerima Penghargaan Kecelakaan Nihil dari bidang telekomunikasi dan menerima 18 penghargaan untuk *Sistem Manajemen K3 (*SMK3).

10

November

TELKOM RAIH *BEST OF THE BEST FROST & SULLIVAN TELECOMS AWARD* 2009

Country Director Frost & Sullivan, Eugene Van de Weerd menyerahkan penghargaan kepada Direktur Konsumer, I Nyoman G Wiryanata, dalam ajang *Frost & Sullivan Indonesia Telecoms Award* 2009 di Jakarta pada tanggal 11 November. TELKOM meraih penghargaan *Best of the Best Service Provider of the Year, Data Communication Service Provider of the Year,* dan *Broadband Service Provider of the Year*. Selain itu, Telkomsel juga meraih penghargaan *Mobile Service Provider of the Year*. TELKOM dan Telkomsel berhasil mempertahankan penghargaan tahunan tersebut selama dua tahun berturut-turut.

11

November

RBT ANGKLUNG FLEXI RAIH MURI

Pada tanggal 14 November, Divisi TELKOM Flexi menerima 2 penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Pertama, TELKOM Flexi menciptakan sesuatu yang belum pernah ada dan memotivasi adanya permainan angklung dengan peserta 4.500 orang. Kedua, TELKOM Flexi merupakan pemrakarsa dan penyelenggara kolaborasi musik *Ring Back Tone* (RBT) "TELKOM Flexi bukan Telepon Biasa" yang melibatkan sebanyak 4.500 orang pemain angklung. Penghargaan MURI tersebut diberikan langsung oleh Ketua MURI, Jaya Suprana kepada Direktur Konsumer TELKOM, I Nyoman G Wiryanata dan EGM Divisi TELKOM Flexi Triana Mulyatsa.

11

Desember

TELKOM RAIH IHCS AWARD 2009

TELKOM mendapatkan penghargaan tahunan sebagai Perusahaan Telekomunikasi dengan pengelolaan SDM terbaik dalam ajang *Indonesian Human Capital Study* 2009. Penghargaan diterima oleh Direktur HCGA, Faisal Syam di Jakarta pada tanggal 22 Desember. Menurut penilaian dewan juri, TELKOM memiliki pengelolaan SDM yang terbaik di antara perusahaan telekomunikasi lainnya.

12

Desember

TELKOM RAIH PENGHARGAAN *BEST OF* ISRA 2009

TELKOM menerima penghargaan tahunan *Best of Indonesia Sustainability Reporting Awards* (ISRA) 2009, dalam kategori industri jasa keuangan, infrastruktur, utilitas dan transportasi, serta perdagangan, jasa dan investasi. Pemberian penghargaan ini diselenggarakan atas kerjasama *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR), Indonesia-Netherlands Association, Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), serta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Penghargaan Best ISRA 2009 tersebut diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Gusti Muhammad Hatta kepada Direktur HCGA, Faisal Syam, di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009.

12

Desember

TELKOM RAIH INVESTOR AWARD 2009

TELKOM meraih penghargaan tahunan Investor Award 2009 dengan kategori BUMN Terbaik untuk Badan Usaha Non Keuangan Sektor Telekomunikasi versi Majalah Investor. Penghargaan diserahkan oleh Said Didu selaku Sekretaris Kementrian BUMN kepada AVP Marketing Communication, Desnaidi Aziz di Jakarta pada tanggal 10 Desember.

12

Desember

TELKOM PERUSAHAAN IDAMAN 2009 VERSI WARTA EKONOMI

TELKOM menduduki peringkat teratas di antara 15 perusahaan papan atas yang masuk dalam peringkat Perusahaan Idaman 2009 versi Warta Ekonomi. Perusahaan idaman adalah Perusahaan yang dianggap terbaik di industrinya serta dipersepsikan sebagai perusahaan besar, terkenal, dan memiliki manajemen yang baik. Pemeringkatan ini didasarkan dari hasil survei Warta Ekonomi selama bulan September 2009. Penghargaan tahunan tersebut diberikan langsung oleh Pemimpin Perusahaan Warta Ekonomi, Mario Alisjahbana, yang didampingi Menteri Kelautan & Perikanan, Fadel Muhammad kepada Dirut TELKOM Rinaldi Firmansyah di Jakarta pada tanggal 4 Desember. TELKOM juga dinilai memiliki kualitas pengelolaan SDM yang baik di antaranya melalui kepastian pengembangan karir dan kompetensi.

12

Laporan Komisaris Utama

Di tengah kondisi persaingan yang ketat dan turun drastisnya tarif telekomunikasi pada beberapa tahun terakhir ini, TELKOM tetap dapat mempertahankan laju pertumbuhan di samping mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar

Pemegang Saham yang terhormat,

Strategi kami "mempertahankan pertumbuhan yang kompetitif' tercermin pada kinerja kami selama 2009. Di tengah kondisi persaingan yang ketat dan turun drastisnya tarif pada beberapa tahun terakhir ini, TELKOM tetap dapat mempertahankan laju pertumbuhan di samping mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar. Total pendapatan kami sebesar Rp64.596,6 miliar dan laba bersih sebesar Rp11.332,1 miliar meningkat masing-masing sebesar 6,4% dan 6,7%.

Kami telah menyaksikan pertumbuhan pelanggan yang signifikan di setiap segmen pasar. Pangsa pasar kami pada segmen-segmen tersebut juga meningkat. Kami juga berhasil menghambat penurunan yang sebelumnya diperkirakan terjadi pada bisnis *legacy* yakni melalui penerapan beragam promosi strategis. Pada saat yang sama, pendapatan *new wave* kami tumbuh pesat lebih dari 82,8%, dengan pertumbuhan yang signifikan pada pendapatan internet. Hal tersebut merupakan pencapaian manajemen perusahaan yang patut dibanggakan.

Saat ini kondisi industri telekomunikasi sedang mengalami saat-saat yang berat. Tiga atau empat tahun yang lalu, industri telekomunikasi di Indonesia menikmati ARPU tertinggi di Asia, namun saat ini justru termasuk salah satu yang terendah di kawasan Asia Tenggara. Pada saat yang sama, persaingan menjadi semakin ketat ditambah lagi kondisi ekonomi global

terpuruk dalam krisis yang cukup parah belum lama ini. Walaupun demikian, TELKOM tetap dapat memperkokoh posisinya, meningkatkan profitabilitas dan menunjukkan pertumbuhan. Pencapaian ini merupakan kesuksesan dari langkah strategis dan implementasi yang diambil oleh pihak manajemen. Hal tersebut merupakan berita baik bukan saja bagi para investor dan karyawan, tapi juga bagi seluruh *stakeholder*, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Kami juga merasa puas dengan cara Direksi mengelola masa depan perusahaan yakni menciptakan nilai jangka panjang dengan mempertahankan pertumbuhan. Guna mencapai target tersebut, TELKOM melakukan sebuah transformasi fundamental agar dapat mengikuti perkembangan bidang komunikasi dan informasi yang pesat. Sebagai upaya untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar, TELKOM melakukan ekspansi portofolio bisnis dari semula hanya bisnis *voice*, kini mencakup bisnis informasi, media dan *edutainment* atau lebih dikenal dengan IME.

Transformasi dari sebuah perusahaan domestik yang bersifat monopolistik menjadi pemain yang dinamis dalam industri yang sangat kompetitif, telah memberi dampak yang kuat pada karakter organisasi. TELKOM telah melakukan transformasi dari sebuah perusahaan yang awalnya berorientasi produk, dalam hal ini jaringan, menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi pelanggan; dari semula fokus terhadap pasar informasi dan komunikasi domestik, menjadi sebuah perusahaan yang memposisikan dirinya untuk meraih peluang sebagai operator TIME di kawasan regional dan global.

Untuk menjawab perubahan yang strategis dan mendasar ini, maka TELKOM meluncurkan identitas baru perusahaan di tahun 2009. Identitas baru ini menyampaikan pesan kepada semua *stakeholder* bahwa kami tengah melakukan perubahan, bukan hanya dalam bentuk produk dan layanan yang kami tawarkan, tapi juga pada batas-batas bidang kami beroperasi. Hal ini akan membantu mendorong transformasi budaya internal dalam grup secara keseluruhan.

Investasi pada identitas baru ini merupakan sebuah langkah strategis. Namun, hanya dengan identitas saja tidak akan menghasilkan apapun; kinerja TELKOM-lah yang akan memberikan nilai pada identitas tersebut. Oleh sebab itu, terhadap investasi yang telah dilakukan adalah tanggung jawab kami untuk memberikan hasil yang nyata. Dengan berbekal sebuah strategi yang kuat dan jelas, rencana operasi yang realistis, sumber daya manusia yang kompeten dan manajemen yang berwawasan luas, kami yakin target itu akan tercapai.

Saya percaya bahwa salah satu kunci utama dari daya tahan TELKOM selama masa-masa yang penuh tantangan ini adalah semangat kerjasama dan keterbukaan antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Kerjasama yang baik dalam satu tim, memungkinkan kami untuk mengelola faktor-faktor eksternal sambil mempertahankan arah strategi perusahaan. Sinergi ini dapat tercapai karena Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tujuan yang sama yakni mengembangkan Perusahaan yang kompetitif. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris tidak dapat ditawar; fungsi pengawasan dapat menjadi lebih efektif karena

Identitas baru ini menyampaikan pesan kepada semua *stakeholder* bahwa kami tengah melakukan perubahan, bukan hanya dalam bentuk produk dan layanan yang kami tawarkan, tapi juga pada batas-batas bidang kami beroperasi

selarasnya persepsi terhadap tujuan Perusahaan dan bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai.

Dalam tugasnya untuk mengawasi tujuan dan kegiatan perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite yang memastikan bahwa semua prosedur telah dipatuhi dan standar integritas yang tinggi tetap dijaga. Salah satu komite yang penting dalam hal ini adalah Komite Audit, yang dengan semangat keterbukaan sebagaimana telah disinggung sebelumnya, mendapatkan akses penuh serta kerjasama dari Direksi. Kegiatan dari Komite Audit selama tahun 2009 dijabarkan dengan lebih rinci pada Laporan Tahunan ini.

Organ pengawasan utama lainnya adalah Komite Evaluasi dan Monitoring, Perencanaan dan Risiko. Ini merupakan bagian kritis dari proses perencanaan dan merupakan salah satu dari kekuatan yang dimiliki oleh Perusahaan, yang memberikan kontribusi terhadap tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Meskipun saham kami tercatat di NYSE dan hasil audit *Sarbanes-Oxley* terakhir membuktikan kemampuan kami untuk dapat mematuhi sistem regulasi Amerika Serikat yang ketat, kami akan senantiasa memperkokoh pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas.

Perusahaan terus melakukan investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan masyarakat di seluruh Nusantara. Salah satu cara untuk memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat yang kurang beruntung adalah dengan memberikan mereka akses informasi dan komunikasi. Inisiatif kami di bidang ini adalah memberdayakan masyarakat untuk dapat menikmati era digital agar kehidupan mereka dapat berubah menjadi lebih baik.

Pada tahun 2009, TELKOM kembali memberikan bantuannya kepada masyarakat yang membutuhkan, yakni pertolongan darurat kepada korban gempa bumi di Padang, serta masyarakat di daerah lain yang juga terkena bencana, yang walaupun tidak terlalu banyak diberitakan, namun kerusakannya menyebabkan dampak yang cukup besar bagi komunitas tersebut.

Transformasi yang dilakukan TELKOM bukanlah tanpa risiko. Dengan memperluas portofolio kami yang semula hanya sektor telekomunikasi yang konservatif, merambah pada industri informasi, media dan *edutainment* yang lebih inovatif dan dinamis, TELKOM menghadapi berbagai risiko baru dan berbeda dari sebelumnya. Kami telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Proporsi besar dari risiko masih terkait dengan regulasi di bidang telekomunikasi, terutama terkait pemberian lisensi. Regulasi dapat memberikan dampak yang besar terhadap industri telekomunikasi dan juga terhadap pelanggan kami. Menjadi tanggung jawab kami sebagai *incumbent* untuk memastikan bahwa regulator dan legislator menyadari bahwa operator telekomunikasi harus bisa mendapat keuntungan agar mereka dapat melakukan investasi untuk inovasi dan ekspansi yang akan bermanfaat bagi para pelanggan dan bangsa secara keseluruhan. Sampai saat ini, kami terus membina hubungan dan kerjasama yang positif dengan pihak regulator untuk memastikan bahwa kepentingan semua *stakeholder* senantiasa terwakili dan terlindungi secara adil.

Kami bersama Direksi sepakat bahwa tantangan-tantangan utama yang akan dihadapi TELKOM di tahun mendatang adalah mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar serta meraih semua peluang dalam bisnis *new wave*. Kami akan terus bekerja keras untuk memperluas jenis layanan, konten dan aplikasi yang ditawarkan kepada pelanggan individu maupun kepada pelanggan bisnis, serta memberikan *platform* jaringan berkualitas tinggi dan menambah *bandwidth* untuk mendukung semua itu.

Atas nama Dewan Komisaris, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pelanggan untuk kesetiaan dan dukungannya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Direksi serta para karyawan untuk kerja keras dan dedikasinya untuk mewujudkan visi kami. Akhir kata, ijinkan saya untuk menyampaikan terima kasih juga kepada para pemegang saham untuk keyakinan dan kepercayaan yang diberikan kepada Perusahaan dan kami berharap dapat bekerja sama lagi di tahun mendatang untuk memberikan yang terbaik.

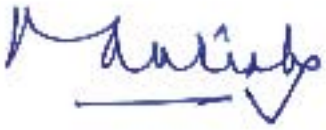

Tanri Abeng
Komisaris Utama

Laporan Direktur Utama

Dengan tetap mempertahankan bisnis *legacy* yaitu layanan suara untuk telepon tidak bergerak dan seluler, kami telah mempunyai strategi membangun portofolio bisnis *new wave* yang meliputi pita lebar, layanan TI dan korporasi, dan juga konten dengan tujuan untuk mempertahankan pertumbuhan yang kompetitif.

Masa depan industri kami adalah T.I.M.E. (Telecommunications, Information, Media & Edutainment). Beberapa tahun yang lalu, kami menyadari bahwa TELKOM menghadapi tantangan lebih besar untuk memenuhi ekspektasi dan aspirasi para pemegang saham, pelanggan maupun bangsa, jika kami hanya tetap sebagai operator telekomunikasi. Seiring dengan meningkatnya tren dan jumlah komunikasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang didorong oleh teknologi seluler, satelit, digital dan pita lebar, kami melihat bahwa masa depan TELKOM akan tergantung dari kemampuannya untuk menyediakan akses tanpa putus kepada beragam informasi, media dan *edutainment* melalui berbagai macam *platform*.

Oleh sebab itu, kami melakukan transformasi skala besar yang saat ini sedang berlangsung. Dengan tetap mempertahankan bisnis legacy yaitu layanan suara untuk telepon tidak bergerak dan seluler, kami telah mempunyai strategi membangun portofolio bisnis new wave yang meliputi pita lebar, layanan TI dan korporasi, dan juga konten dengan tujuan untuk mempertahankan pertumbuhan yang kompetitif.

Di tahun 2009, strategi tersebut dapat terwujud sehingga TELKOM berhasil mempertahankan posisinya sebagai *market leader*, bukan hanya di bisnis telepon tidak bergerak kabel, tapi juga pada pasar telepon tidak bergerak nirkabel dan seluler dengan masing-masing pangsa pasar sebesar 58% dan 49%. Selanjutnya, kami terus melihat adanya pertumbuhan yang sehat dari bisnis *new wave* kami, terutama pada bisnis pita lebar tidak bergerak dan pita lebar bergerak. Kenyataannya, bisnis *new wave* kami ini telah menyumbang sebesar kurang lebih 15,6% terhadap total pendapatan konsolidasian di tahun 2009. Untuk TELKOM sendiri, porsi *new wave* tersebut adalah sebesar 23,8% terhadap total pendapatan TELKOM 2009, melebihi harapan dan menjadi landasan yang baik untuk kondisi masa depan, ketika pendapatan dari layanan suara menjadi tidak dominan lagi.

Pada tahun 2009, laba bersih konsolidasian kami sebesar Rp11.332,1 miliar meningkat 6,7% dibanding tahun 2008 atau 100,8% terhadap target tahun 2009. Sementara itu margin laba bersih kami sebesar 17,5% di tahun 2009 yang merupakan pencapaian 105,4% terhadap target margin laba bersih.

Prestasi keuangan tersebut didukung oleh kinerja operasional kami yang juga solid. Saat ini kami melayani 105,2 juta pelanggan, dari bisnis seluler, telepon tidak bergerak dan telepon tidak bergerak nirkabel. Jumlah tersebut merupakan pencapaian 106% terhadap target perusahaan. Penambahan pelanggan kami dipimpin oleh bisnis seluler yang bertambah 16,34 juta pelanggan atau pencapaian 162% terhadap target perusahaan tahun 2009.

Kami juga berhasil mempercepat pelaksanaan investasi di tahun 2009. Pengembangan infrastruktur NGN sedang dalam tahap pengerjaan dan kami berharap infrastruktur *triple play* dapat diluncurkan pada bulan Juni 2010. TELKOM juga turut berpartisipasi dalam dua konsorsium kabel laut, Asia America Gateway, yang sekarang sudah selesai, dan Palapa Ring, yang akan siap pada awal 2011. Investasi ini akan meningkatkan kapasitas pita lebar dan memungkinkan kami untuk memberikan *bandwidth* yang lebih besar dan harga yang lebih baik kepada para pelanggan. Investasi penting lainnya adalah pembangunan satelit TELKOM 3, yang setelah diluncurkan di tahun 2011, akan sangat mendorong kemampuan komunikasi dan pemancaran kami.

Di samping kinerja yang positif, TELKOM juga menghadapi beberapa kendala selama tahun 2009 antara lain menurunnya pendapatan telepon kabel dan pendapatan interkoneksi, menurunnya ARPU pada layanan seluler serta tidak tumbuhnya pendapatan bisnis telepon tidak bergerak nirkabel. Menurunnya pendapatan telepon tidak bergerak yang merupakan bisnis *legacy,* adalah karena pergeseran preferensi pelanggan ke arah penggunaan yang lebih banyak pada telepon nirkabel. Menurunnya pendapatan interkoneksi yang terjadi semenjak tahun 2007 terutama disebabkan oleh penerapan ketentuan baru interkoneksi berbasis biaya mulai 1 Januari 2007. Sementara itu persaingan yang ketat di bisnis nirkabel menjadi penyebab turunnya ARPU layanan seluler dan relatif stabilnya pendapatan telepon tidak bergerak nirkabel TELKOMFlexi.

Walaupun ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki lebih lanjut, seperti melakukan perampingan birokrasi, meningkatkan kompetensi dan sinergi baik di TELKOM maupun di seluruh jajaran TELKOMGroup, kami sudah memiliki pemetaan yang jelas untuk menangani semua hal tersebut. Pelatihan gabungan untuk karyawan TELKOMGroup sudah berjalan. Kami mencoba untuk mendorong semua anak perusahaan dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia dalam grup guna menghindari duplikasi investasi. Sebagai contoh, Telkomsel yang merupakan operator seluler kami, menggunakan jaringan TELKOM; dan sebaliknya menara Telkomsel digunakan oleh operator telepon tidak bergerak nirkabel kami, Flexi. Baik TELKOM maupun Telkomsel mulai memanfaatkan *call center* Infomedia, sedangkan untuk layanan TI, mereka menggunakan Metra.

Hasil yang dicapai tahun 2009 telah memberikan kontribusi yang solid terhadap kondisi keuangan perusahaan. Hal ini memberi keyakinan bagi Perusahaan untuk terus maju meskipun kondisi ekonomi dan bisnis penuh tantangan selama tahun 2009. Yang lebih penting lagi, hasil yang dicapai selama tahun 2009 menyediakan landasan kokoh yang memungkinkan perusahaan terus tumbuh secara berkelanjutan dan menguntungkan.

Saat ini, telekomunikasi adalah kekuatan penting yang mampu mendorong dunia usaha, dan telah juga merambah ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Industri telekomunikasi berubah dengan cepat. Bisnis *legacy* TELKOM, sektor telepon tidak bergerak kabel, saat ini sudah mulai menurun karena para pelanggan beralih ke layanan seluler yang lebih cocok dengan gaya hidup dan model usaha yang makin *mobile*. Pertumbuhan bisnis seluler pun saat ini tidak sebaik pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu TELKOM secara aktif mencari peluang-peluang baru untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Bisnis *new wave* - termasuk pita lebar tidak bergerak dan bergerak (Speedy dan Telkomsel Flash), serta bisnis korporasi - akan menjadi pendorong utama pertumbuhan di masa depan. Pada tahun 2009, pendapatan TELKOM yang berasal dari bisnis *new wave* tumbuh 82,8%, dan kami berharap kenaikan ini akan semakin meningkat di tahun 2010. Dampaknya terhadap pendapatan TELKOM (*unconsolidated*) juga signifikan, dengan pertumbuhan sebesar 42,3%.

Bertambahnya penekanan pada bisnis *new wave* adalah landasan bagi transformasi Perusahaan. Hal ini tidak hanya memerlukan tambahan unit bisnis baru, namun merupakan sebuah perubahan mendasar dalam infrastruktur jaringan, organisasi, dan budaya Perusahaan. TELKOM bukan lagi hanya sebagai pemain *incumbent* dalam industri telekomunikasi domestik, namun juga berusaha menjadi pemimpin, pemain yang inovatif dalam bidang informasi digital, media dan *edutainment*. Semua investasi, pengembangan infrastruktur dan pembangunan kapasitas difokuskan kepada peningkatan akses, kualitas dan pilihan layanan bagi pelanggan TELKOM.

Sejalan dengan selesainya transformasi, kami terus berupaya memperkokoh sinergi di seluruh TELKOMGroup. Dengan portofolio perusahaan yang mencakup bisnis TI, konten, media dan seluler, Kami memiliki sumber daya beragam yang dapat diakses dan digunakan bersama untuk mencapai tujuan strategis TELKOMGroup. Selama tahun 2009, sinergi ini telah menciptakan momentum, tidak hanya antara TELKOM dan anak perusahaan, tapi juga antar anak-anak perusahaan tersebut. Kami sudah mulai memberikan layanan bernilai tambah secara berkesinambungan melalui seluruh gerai bisnis kami. Selanjutnya, ketika pergerakan SDM maupun ide-ide dalam TELKOMGroup menjadi semakin lancar, maka hal tersebut akan berdampak pada tersebar dan tertanamnya budaya TELKOM secara mendalam di setiap unit bisnis di lingkungan grup.

Perubahan cara pandang dan budaya yang menyentuh banyak segi, menuntut peremajaan citra Perusahaan. Oleh sebab itu, pada tahun 2009, kami meluncurkan indentitas baru yang lebih dinamis dan mencerminkan posisi baru TELKOM serta memberikan gambaran akan masa depan yang cemerlang.

Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami melihat semua itu sebagai peluang

Bagian inti Perusahaan adalah karyawan, dan mereka merupakan fokus utama transformasi. Melalui berbagai program pelatihan, orientasi dan pengembangan kompetensi yang menyeluruh, semua karyawan di lingkungan TELKOMGroup dapat menghayati arah dan budaya baru TELKOM. Program Pensiun Dini kami memiliki peranan penting dalam proses transformasi ini. Pada tahun 2009 sebanyak 1.336 karyawan memilih untuk berhenti secara sukarela sehingga pada tahun 2009 untuk pertama kalinya terjadi penurunan biaya karyawan. Hasilnya adalah sumber daya manusia yang efisien dan kompeten yang selaras dengan visi TELKOM serta sesuai dengan kebutuhan kami sebagai perusahaan TIME di masa mendatang.

TELKOM berkomitmen untuk terus menerapkan standar tinggi dalam integritas dan tanggung jawab untuk semua hal yang dilakukannya. Kemajuan dalam menjalankan kepatuhan, pengendalian internal, dan transparansi tercermin pada hasil audit *Sarbanes Oxley* tahun 2008, yang untuk pertama kalinya tidak menemukan kelemahan material. Pada tahun 2009, kami terus memperkuat proses tata kelola perusahaan sehingga di akhir tahun 2009, TELKOM menerima penghargaan sebagai "Perusahaan Paling Terpercaya" untuk kategori non-bank atas hasil evaluasi independen oleh *Indonesian Institute of Corporate Governance*. Dorongan untuk mendukung dan memperbaiki praktek bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, berkembang menjadi keprihatinan terhadap komunitas dimana kami beroperasi.

Pada tahun 2009, kami terus berhubungan secara konstruktif dan proaktif dengan pihak regulator dan legislator untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kepentingan para pelanggan, industri serta semua pemangku kepentingan kami. Walaupun TELKOM mempunyai prioritas untuk mewujudkan manfaat yang dijanjikan oleh teknologi-teknologi baru bagi pelanggan secepat mungkin, namun hal tersebut harus tetap dilaksanakan dalam kerangka regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mendukung persaingan yang sehat.

Pada tahun 2010, TELKOM memasuki tahap penting proses transformasi. Fokus utama adalah agar kami semakin dekat kepada para pelanggan dengan menjadi semakin responsif terhadap kebutuhan mereka akan konektivitas. Untuk itu, prioritas kami adalah menjadi penyedia bukan hanya infrastruktur, tapi juga layanan bernilai tambah: menyediakan akses terpadu, *mobile* dan tanpa putus ke berbagai konten dan aplikasi serta menawarkan skema harga yang inovatif untuk dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan lebih lengkap kepada setiap pelanggan.

Guna mencapai tujuan tersebut, kami akan terus melanjutkan reorganisasi Perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan fleksibilitas dan memaksimalkan potensi sumber pendapatan utama. Pada akhir tahun 2009, TELKOM mendirikan divisi tersendiri untuk *Business Services* (untuk melayani perusahaan kecil dan menengah), *Consumer Services* (untuk melayani pelanggan retail), *Enterprise & Wholesale* dan Flexi, sehingga dengan demikian dapat menghasilkan organisasi yang lebih fokus, lebih efisien dan lebih berorientasi kepada pelanggan.

Banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami melihat semua itu sebagai peluang. Salah satu dari tantangan tersebut adalah bagaimana menghambat penurunan bisnis *legacy*. Walaupun penurunan ini tidak dapat dihindarkan, namun kami akan terus memperlambat laju penurunan tersebut dengan menawarkan berbagai program yang menarik dan lebih menguntungkan bagi pelanggan, seperti tarif tetap yang lebih progresif. TELKOM juga terus berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis pita lebar seperti saat ini melalui peningkatan jaringan, termasuk melalui investasi pada kabel bawah laut dan memberikan penawaran harga dan content yang lebih menarik. Portal Mojopia dan *IPTV* akan kami luncurkan pada tahun 2010. Prioritas lainnya adalah mempertahankan pertumbuhan telepon tidak bergerak nirkabel Flexi dan bisnis seluler dengan memperbaiki jaringan, cakupan, kualitas dan kapasitas. Mengingat penetrasi pita lebar, nirkabel dan seluler di Indonesia yang masih relatif rendah, kami berharap dapat mempertahankan posisi TELKOM sebagai pemimpin pasar pada bisnis-bisnis tersebut.

Peluang bisnis untuk tumbuh secara berkelanjutan dan kompetitif terbuka luas. Fokus TELKOM saat ini adalah memastikan bahwa organisasi dan SDMnya selaras dengan peluang-peluang tersebut. Melalui disiplin yang berasal dari pengalaman panjang sebagai pemimpin pasar, sumber daya yang besar untuk berinovasi dan kemampuan beradaptasi dalam organisasi, didorong oleh visi strategis yang jelas, kami yakin bahwa semua itu akan tercapai.

Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan arahan dari Dewan Komisaris dalam proses transformasi dan dalam menentukan serta mencapai semua tujuan strategis. Akhir kata, Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan dan pemegang saham atas dukungannya, dan kami menjamin komitmen yang berkelanjutan dalam memberikan yang terbaik.

Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama/CEO

Tinjauan Industri Telekomunikasi di Indonesia

INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Sejak tahun 1961, layanan telekomunikasi di Indonesia diselenggarakan oleh badan usaha milik negara. Sebagaimana terjadi pada negara berkembang lainnya, pengembangan dan modernisasi infrastruktur telekomunikasi berperan penting dalam perkembangan ekonomi nasional secara umum. Selain itu, jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat telah mendorong permintaan yang tinggi akan layanan telekomunikasi.

Pemerintah mengatur regulasi sektor telekomunikasi, terutama melalui Menkominfo. Pada awalnya Pemerintah memberlakukan monopoli atas layanan telekomunikasi di Indonesia. Reformasi telah menciptakan kerangka regulasi yang mendorong tumbuhnya persaingan dan percepatan pembangunan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi. Reformasi regulasi berikutnya bulan September 2000, ditujukan untuk meningkatkan persaingan dengan menghapus monopoli, meningkatkan transparansi dan kepastian terhadap kerangka regulasi, menciptakan peluang bagi aliansi strategis dengan mitra asing dan memfasilitasi masuknya pemain baru dalam industri telekomunikasi. Pada saat itu, deregulasi sektor telekomunikasi sangat erat kaitannya dengan program pemulihan ekonomi nasional yang didukung oleh *International Monetary Fund* ("IMF").

Reformasi yang terjadi akhir-akhir ini telah menciptakan kerangka regulasi yang mendorong tumbuhnya persaingan dan percepatan pembangunan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi

Penetrasi sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia masih rendah apabila ditinjau dari standar internasional. Sesuai dengan studi internal yang kami lakukan, per tanggal 31 Desember 2009, penetrasi sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia (termasuk pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel) diperkirakan hanya sebesar 14,9% sedangkan penetrasi seluler diperkirakan sebesar 71,9%.

Kami meyakini adanya beberapa kecenderungan yang signifikan dalam industri telekomunikasi di Indonesia, antara lain:

- pertumbuhan yang berkesinambungan. Kami yakin industri telekomunikasi akan terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan akan meningkatkan permintaan layanan telekomunikasi.
- migrasi ke jaringan nirkabel. Kami mengantisipasi layanan nirkabel akan semakin populer sebagai dampak dari semakin luasnya area cakupan, membaiknya kualitas jaringan nirkabel, menurunnya harga telepon genggam dan meluasnya layanan prabayar.
- meningkatnya persaingan. Kami mengantisipasi kompetisi pasar telekomunikasi di Indonesia yang semakin meningkat sebagai dampak dari reformasi peraturan pemerintah.

REGULASI DI BIDANG TELEKOMUNIKASI

TINJAUAN UMUM

Kerangka hukum industri telekomunikasi terdiri atas undang-undang khusus, peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang diumumkan dan diterbitkan dari waktu ke waktu. Kebijakan telekomunikasi yang berlaku saat ini pertama kali diformulasikan dan dijabarkan dalam "Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Telekomunikasi", yang terkandung di dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) No. KM. 72 tahun 1999 tanggal 20 Juli 1999. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk:

- meningkatkan kinerja sektor telekomunikasi di era globalisasi;
- melakukan liberalisasi sektor telekomunikasi dengan struktur yang kompetitif dengan cara meniadakan monopoli;
- meningkatkan transparansi dan kepastian kerangka regulasi;
- menciptakan peluang bagi operator telekomunikasi nasional untuk membentuk aliansi strategis dengan para mitra asing;
- menciptakan peluang bisnis untuk badan usaha skala kecil dan menengah; dan
- memfasilitasi terciptanya lapangan kerja baru.

Regulasi sektor telekomunikasi yang berlaku pada saat ini berlandaskan pada Undang-undang Telekomunikasi No. 36/1999, yang berlaku efektif sejak tanggal 8 September 2000.

UNDANG-UNDANG TELEKOMUNIKASI

Undang-undang Telekomunikasi menetapkan pedoman bagi reformasi industri telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri, kemudahan masuknya pemain baru, serta peningkatan transparansi dan persaingan. Undang-undang Telekomunikasi hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan, Keputusan Menteri, serta Keputusan Dirjen Postel.

Undang-undang Telekomunikasi meniadakan konsep "badan penyelenggara" sehingga mengakhiri status TELKOM dan Indosat sebagai badan penyelenggara yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan layanan telekomunikasi domestik dan internasional. Untuk meningkatkan persaingan, Undang-undang Telekomunikasi melarang praktik monopoli dan persaingan tidak wajar antar operator telekomunikasi.

Peran Pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas sektor telekomunikasi. Untuk memastikan transparansi dalam proses pembuatan regulasi sesuai Undang-undang Telekomunikasi. Sebuah badan regulasi independen, Badan Regulasi Telekomunikasi Independen (BRTI) didirikan pada bulan Juli 2003 guna mengatur, memantau dan mengontrol industri telekomunikasi. BRTI terdiri dari para pejabat dari Ditjen Postel dan Komite Regulasi Telekomunikasi serta diketuai oleh Dirjen Postel.

Keputusan Menhub No. 67/2003 mengatur hubungan antara Menhub (yang bertanggungjawab atas pengaturan telekomunikasi sebelum dialihkan kepada Menkominfo pada bulan Februari 2005), dan BRTI. Sebagai bagian dari fungsi pengatur, BRTI berwenang untuk (i) melaksanakan pemilihan atau evaluasi untuk pemberian lisensi jaringan dan layanan telekomunikasi sesuai dengan kebijakan Menkominfo, dan (ii) mengusulkan kepada Menkominfo mengenai standar kinerja operasi jaringan dan layanan telekomunikasi, standar kualitas layanan, biaya interkoneksi dan standardisasi perangkat. Sebagai bagian dari fungsi pemantauan, BRTI berwenang memantau dan diharuskan melaporkan kepada Menkominfo mengenai (i) pelaksanaan standar kinerja operasi jaringan dan layanan telekomunikasi, (ii) persaingan antar operator jaringan dan layanan, dan (iii) kepatuhan terhadap penggunaan perangkat telekomunikasi sesuai dengan standar yang berlaku. Sebagai bagian dari fungsi pemantauan, BRTI diberi wewenang untuk memantau dan diharuskan untuk melaporkan kepada Menkominfo mengenai (i) bantuan penyelesaian sengketa antar operator jaringan dan layanan, dan (ii) pengendalian penggunaan perangkat telekomunikasi dan pelaksanaan standar kualitas layanan. Keputusan BRTI dituangkan dalam bentuk keputusan Dirjen Postel.

KATEGORI LAYANAN BARU

Undang-undang Telekomunikasi menggolongkan penyedia telekomunikasi ke dalam tiga kategori:

(i) penyedia jaringan telekomunikasi;
(ii) penyedia layanan telekomunikasi; dan
(iii) penyedia telekomunikasi khusus.

Lisensi diperlukan untuk setiap kategori layanan telekomunikasi. Penyedia jaringan telekomunikasi diberikan lisensi untuk menyediakan dan/atau mengoperasikan jaringan telekomunikasi.

Penyedia layanan telekomunikasi diberikan lisensi untuk menyediakan layanan dengan menyewa kapasitas jaringan dari penyedia jaringan lain. Lisensi telekomunikasi khusus diperlukan untuk penyedia layanan telekomunikasi privat untuk tujuan yang terkait dengan penyiaran dan kepentingan keamanan nasional. Keputusan Menkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan Keputusan Menhub No. KM. 21/2001 tanggal 31 Mei 2001 mengenai Operasi Layanan Telekomunikasi (yang diubah berdasarkan Keputusan Menhub No. KM. 30/2004 tanggal 11 Maret 2004, Peraturan Menkominfo No. 07/P/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 4 April 2008 dan Peraturan Menkominfo No. 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tanggal 9 September 2008) melaksanakan ketentuan Undang-undang Telekomunikasi mengenai kategori baru atas jaringan telekomunikasi dan layanan operasi.

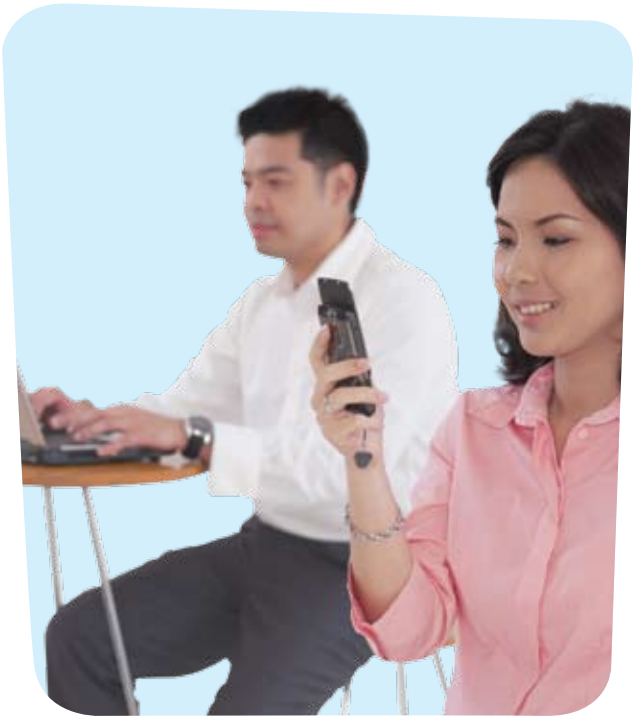

Teknologi digital berkembang dengan pesat dan terus meningkat mengarah pada konvergensi, atau integrasi layanan telekomunikasi, data, informasi dan penyiaran. Hal ini menyebabkan diterbitkannya beberapa peraturan yang secara khusus menggabungkan beberapa aspek dari bidang-bidang tersebut:

- Undang-undang No. 11/2008 tanggal 21 April 2008 tentang transaksi dan informasi elektronik ("UU No.11/2008"), memungkinkan TELKOM untuk dapat menyelenggarakan dan memperluas usaha di bidang informasi dan transaksi elektronik, termasuk *e-payment*. Hingga saat ini belum terdapat petunjuk pelaksanaan dari undang-undang tersebut di atas.
- Peraturan Menteri No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaran Layanan Televisi berbasis Internet Protokol ("IPTV") sebagai dasar peraturan bagi

TELKOM untuk memberikan layanan baru *IPTV*, *Net* TV dan *Web* TV, dalam rangka memberi nilai tambah bagi infrastruktur *wireline* yang sudah ada.

PERSAINGAN

Walaupun telah diberlakukan terminasi atas hak eksklusivitas, Pemerintah tidak melarang atau mencegah operator untuk mempertahankan posisi dominan berkenaan dengan layanan telekomunikasi. Namun, Pemerintah melarang operator menyalahgunakan posisi dominan tersebut. Pada bulan Maret 2004, Menhub mengeluarkan Keputusan No. 33/2004 (Peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 5/1999, anti monopoli dan persaingan tidak sehat), yang memberlakukan larangan atas penyalahgunaan posisi dominan bagi penyedia jaringan dan layanan. Penyedia yang dominan ditentukan berdasarkan atas sejumlah faktor seperti lingkup bisnis, area cakupan layanan dan apakah mereka mengontrol pasar. Keputusan tersebut secara khusus melarang penyedia yang dominan terlibat dalam praktik seperti dumping (penurunan harga besar-besaran), penetapan harga yang semena-mena, subsidi-silang, memaksa pelanggan menggunakan layanan penyedia tersebut (dengan mengesampingkan sama sekali para pesaing) dan menghambat kewajiban interkoneksi (termasuk diskriminasi terhadap penyedia layanan tertentu).

Diberlakukannya Peraturan KPPU No. 1/2009 tentang Pemberitahuan Awal Mengenai Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, berikut pedoman implementasinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum lebih lanjut dalam lingkungan bisnis di Indonesia, khususnya untuk mereka yang bermaksud untuk melakukan transaksi merger dan akuisisi. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan aktivitas M&A yang anti-kompetisi. Untuk tujuan itulah KPPU memberlakukan adanya "pemberitahuan-awal" dan "pemberitahuan-setelahnya" kepada KPPU. Pemberitahuan-awal sifatnya sukarela dan dapat disampaikan sebelum merger terjadi, sedangkan pemberitahuan-setelahnya adalah wajib dan harus disampaikan setelah merger dilakukan.

KPPU juga memiliki kewenangan untuk mengawasi transaksi luar negeri yang dapat memberikan akibat yang kurang menguntungkan bagi pasar Indonesia, sebagaimana diatur oleh UU No. 5/1999. Ini mencakup (a) merger perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, (b) merger antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing (baik yang beroperasi di Indonesian ataupun tidak) atau (c) bentuk lainnya dari merger yang melibatkan pihak asing.

INTERKONEKSI

Dengan mempertimbangkan adanya larangan atas kegiatan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan bisnis yang tidak adil, Undang-undang Telekomunikasi telah menetapkan adanya interkoneksi jaringan yang adil agar tercipta "*any to any connectivity*". Hal ini berarti, setiap penyelenggara jaringan wajib membuka interkoneksi atas jaringannya dengan jaringan milik penyedia jaringan yang lain. Biaya interkoneksi harus disepakati oleh setiap penyedia jaringan dan dihitung secara transparan. Undang-undang Telekomunikasi menetapkan panduan berkenaan dengan pola interkoneksi antara para penyedia jaringan telekomunikasi. Pada bulan Februari 2006, Menkominfo mengeluarkan Peraturan No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006 yang mewajibkan pola tarif interkoneksi berbasis-biaya untuk seluruh operator jaringan dan jasa telekomunikasi. Berdasarkan pola baru, operator jaringan tempat panggilan berakhir akan menentukan biaya yang harus diterima oleh pihaknya berdasarkan atas formula berbasis-biaya.

Berdasarkan Peraturan No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006 dan surat BRTI No. 246/BRTI/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007, TELKOM menyerahkan pemutakhiran Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") kepada BRTI pada Oktober 2007 yang mencakup penyesuaian untuk penawaran-penawaran operasional, konfigurasi, teknis dan layanan. Pada bulan Desember 2007, TELKOM dan semua operator jaringan menandatangani kesepakatan interkoneksi baru yang menggantikan semua kesepakatan interkoneksi TELKOM dengan operator lainnya termasuk amendemen kesepakatan semua interkoneksi yang ditandatangani pada bulan Desember 2006. Kesepakatan-kesepakatan ini menekankan persyaratan berdasarkan DPI TELKOM.

Pada tanggal 5 Februari 2008, Pemerintah mengeluarkan aturan penyesuaian tarif mengacu pada ketentuan tarif interkoneksi berbasis biaya. Pada tanggal 11 April 2008, berdasarkan Keputusan Dirjen Postel No. 205 tahun 2008, Pemerintah menyetujui DPI dari operator dominan (operator yang memiliki pangsa pasar sedikitnya 25%), termasuk TELKOM dan Telkomsel, untuk mengganti DPI sebelumnya. Kewajiban ini berlaku bagi semua operator dan harus dilaporkan setiap tahun.

LAYANAN SLJJ DAN SLI

TELKOM mendapatkan ijin penggunaan kode akses "007" untuk Sambungan Langsung Internasional ("SLI"). Pada bulan Desember 2005, TELKOM dan Indosat membuat perjanjian interkoneksi yang memungkinkan pelanggan masing-masing operator untuk melakukan panggilan melalui jaringan telepon tidak bergerak operator lain, dan memungkinkan pelanggan seluler Indosat untuk mengakses layanan SLI TELKOM "007".

Pada bulan Mei 2005, Menkominfo menerbitkan Keputusan No. 6/P/M.KOMINFO/5/2005 yang merupakan Amandemen Kedua dari Keputusan Menhub No. KM. 4/2001 mengenai implementasi Fundamental National Technical Plan 2000 sebagai bagian Pengembangan Telekomunikasi Nasional ("Keputusan Menhub No. 4/2001") yang memberikan wewenang penggunaan kode akses tiga digit berupa "01X" dan kode akses "0" untuk layanan SLJJ boleh digunakan. Kode akses "0" digunakan untuk mengakomodasi pelanggan yang lebih suka tidak memilih operator sambungan jarak jauh, sedangkan kode akses "01X" digunakan untuk memilih operator SLJJ dan diimplementasikan secara bertahap di wilayah-wilayah lokal yang telah memiliki kemampuan mendukung layanan tersebut.

Pada bulan Desember 2007, Menkominfo mengeluarkan Keputusan No. 43/P/M.KOMINFO/12/2007 yang merupakan Amandemen Keempat dari Keputusan Menhub No. KM. 4/2001 yang menetapkan fase-fase implementasi kode akses. TELKOM sudah dapat memulai pemakaian layanan jarak jauh berkode "01X" pada bulan April 2008 di Balikpapan, dengan persyaratan tertentu, TELKOM diharuskan untuk menerapkan kode akses "01X" di seluruh area lainnya paling lambat 27 September 2011. Namun demikian, Keputusan itu juga

menuntut pembukaan akses jaringan telepon tidak bergerak kabel dan jaringan telepon tetap nirkabel untuk SLJJ bagi operator lain sebelum batas waktu dimaksud apabila Indosat atau operator berlisensi lainnya mencapai ambang batas jumlah pelanggan yang ditentukan. Berdasarkan Keputusan ini, TELKOM diwajibkan membuka akses jaringan telepon tetap nirkabel kepada Indosat atau operator berlisensi lainnya yang mencapai jumlah pelanggan setara 30% untuk Indosat atau 15% untuk operator lain dari jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel TELKOM. Pertimbangan mengenai penerapan kode akses SLJJ di kota lainnya akan didasarkan pada studi yang dilakukan oleh BRTI atas pelanggan dari Indosat dan TELKOM serta beberapa kriteria lainnya. TELKOM harus membuka akses SLJJ "01X" di beberapa wilayah tertentu dalam jangka waktu 90 hari sejak studi oleh BRTI (i) jika Indosat, sebagai operator SLJJ kedua, memiliki layanan telepon tidak bergerak nirkabel dengan mobilitas pelanggan yang terbatas paling tidak 30% dari pelanggan layanan telepon tidak bergerak TELKOM dengan mobilitas yang terbatas pada kode area tersebut atau (ii) Jika operator SLJJ lainnya memiliki layanan telepon tidak bergerak nirkabel paling tidak 15% dari pelanggan layanan telepon tidak bergerak TELKOM dengan mobilitas yang terbatas pada kode area tersebut.

Pada bulan September 2007, Menkominfo menerbitkan lisensi SLI kepada Bakrie Telecom dengan kode akses internasional "009". Pada tanggal 16 Desember 2008, Menkominfo juga menerbitkan lisensi SLJJ kepada Bakrie Telecom, sehingga menjadikan jumlah operator SLJJ menjadi tiga.

Dampaknya, operator lainnya yaitu TELKOM dan Indosat diwajibkan untuk membuka kode akses SLJJ masing-masing kepada penyelenggara jaringan tetap tidak bergerak lokal di setiap kode area yang memenuhi persyaratan ambang batas jumalah pelanggan yang ditentukan.

SLI

Pada bulan Agustus 2001, Pemerintah melalui Dirjen Postel mengumumkan terminasi dini hak eksklusivitas Indosat untuk SLI. Pengumuman tersebut menyatakan maksud Pemerintah bahwa TELKOM akan menerima lisensi komersial untuk menyediakan layanan SLI pada akhir tahun 2003. TELKOM menerima lisensi komersial pada bulan Mei 2004, dan mulai menawarkan layanan sambungan telepon tidak bergerak SLI kepada pelanggan pada bulan Juni 2004. TELKOM telah memperbaiki peralatan *switching* agar memiliki kemampuan gerbang internasional yakni di Batam, Jakarta dan Surabaya. Gerbang tersebut telah mendapat sertifikat operasi (sertifikat ULO) dari Dirjen Postel. Agar terhubung dengan operator luar negeri, TELKOM telah membangun dua *link* gelombang mikro untuk menghubungkan Batam-Singapura dan Batam-Pangerang (Malaysia). Selain itu, TELKOM, SingTel Mobile dan CAT mengembangkan sistem kabel bawah laut TIS pada tahun 2003 yang menghubungkan Batam, Singapura dan Thailand. TELKOM juga menandatangani perjanjian dengan Telekom Malaysia Berhad untuk pembangunan dan pemeliharaan kabel optik bawah laut yang baru untuk menghubungkan Dumai (Indonesia) dengan Melaka (Malaysia) yang telah selesai pada bulan Desember 2004. Kami juga meningkatkan kapasitas kabel internasional dengan membeli kapasitas bandwidth agar terhubung dengan Hong Kong dan kami menggunakan kapasitas ini untuk hubungan ke negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Pada bulan Desember 2004 kami juga menyelesaikan pengembangan *ground segment* untuk hubungan ke Satelit Intelsat. Persiapan ini memungkinkan TELKOM untuk mulai menawarkan layanan sambungan telepon tidak bergerak SLI pada bulan Juni 2004.

Pada tahun 2009, TELKOM memindahkan operasional layanan SLI kepada perusahaan afiliasinya, TELKOM Internasional Indonesia (TII), yang meningkatkan konektivitas dari jaringan *backbone* nasional dengan jaringan global melalui penyelesaian kabel bawah laut *Batam Singapore Cable System* (*BSCS*) dan jaringan serat optik *Asian American Gateway (AAG)* yang menghubungkan Singapura – Hong Kong – USA.

KONVERGENSI

Pada tanggal 9 September 2009, Perusahaan dan dua anak Perusahaan, Telkomsel dan Indonusa, telah ditunjuk untuk melakukan uji lapangan untuk *digital mobile TV*. Hasilnya akan digunakan sebagai landasan untuk pembentukan regulasi *mobile TV*. TELKOM berharap hal ini merupakan langkah pertama untuk mendapatkan lisensi operator *mobile TV*.

Pada bulan Agustus 2009, Menkominfo mengeluarkan peraturan No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 mengenai Penyelenggaraan Layanan Televisi Berbasis Internet Protocol (IPTV) di Indonesia. Peraturan ini mengatur bisnis IPTV yang direncanakan TELKOM dimana layanan televisi berlangganan ditransmisikan melalui jaringan *internet protocol*. Seperti telah diatur oleh peraturan tersebut, IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergensi dalam bentuk radio, siaran televisi, video, audio, teks, grafik, dan data yang disalurkan melalui koneksi *internet protocol* dengan kualitas, layanan, keamanan, dan kehandalan yang dapat dipertanggungjawaban serta mampu menyediakan layanan komunikasi dengan pengguna secara interaktif dan langsung berdasarkan standar televisi. Perusahaan telah menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung layanan IPTV yang memungkinkan untuk dilakukannya akses *triple play* (3 layanan untuk suara, internet, dan video dalam 1 saluran untuk pelanggan). TELKOM percaya bahwa *IPTV* akan meningkatkan nilai tambah infrastruktur jaringan kabel yang sudah ada (kabel, serat optik) yang telah menjangkau 8,7 juta sambungan di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 9 September 2009, Perusahaan dan dua anak Perusahaan, Telkomsel dan Indonusa, telah ditunjuk untuk melakukan uji lapangan untuk *digital mobile TV*

BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (BRTI)

BRTI, dibentuk pada tahun 2003, sebagai instansi pelaksana Undang-undang Telekomunikasi. BRTI berwenang mengatur, memantau dan mengendalikan operasi sektor telekomunikasi. BRTI terdiri dari para pejabat Ditjen Postel dan Komite Regulasi Telekomunikasi. Pembentukan badan regulator independen tersebut dimaksudkan untuk mengurangi peran Pemerintah dalam industri telekomunikasi yakni yang semula sebagai pihak yang membiayai, mengoperasikan, mengatur dan memberi lisensi menjadi pihak utama yang memberi lisensi dan mengatur industri.

Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi ("SKTT") yang dibentuk pada tahun 2003, membantu BRTI dalam menjalankan fungsinya dan bertanggung jawab atas seluruh hal terkait interkoneksi. Diharapkan melalui SKTT, BRTI akan mendapatkan data mengenai profil trafik interkoneksi antar operator untuk memastikan terwujudnya transparansi dalam pengenaan biaya interkoneksi.

Pada tahun 2009, Menkominfo mengeluarkan Keputusan No. 14/PER/M.KOMINFO/02/2009 tanggal 25 Februari 2009 terkait Kliring Trafik Telekomunikasi yang mengatur pemindahan operasional SKTT kepada pihak operator. Pemerintah akan bertindak sebagai pengawas dan operator akan bertanggung jawab terhadap sistem dan operasional. SKTT bertindak sebagai alat yang digunakan Pemerintah untuk memelihara mekanisme *check and balance* untuk memverifikasi data kliring trafik operator. Data tersebut digunakan sebagai referensi oleh Pemerintah dalam mengatur industri telekomunikasi.

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi, setiap operator harus memberikan jaminan perlindungan konsumen dalam hal kualitas layanan, penggunaan atau biaya layanan, kompensasi dan hal lainnya. Pelanggan yang dirugikan akibat kelalaian operator dalam menjalankan usahanya dapat mengajukan tuntutan terhadap operator dimaksud.

Dengan banyaknya kemajuan dalam layanan telekomunikasi, TELKOM harus lebih memperhatikan kualitas layanan. Peraturan Perlindungan Konsumen di bidang telekomunikasi menyediakan standar kualitas dari jaringan telekomunikasi untuk operator telekomunikasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa layanan jaringan telekomunikasi yang disediakan oleh operator telekomunikasi kepada para pelanggan telah memenuhi standar.

KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL ("KPU")

Seluruh operator jaringan telekomunikasi dan penyedia layanan terikat oleh Kewajiban Pelayanan Universal yang mengharuskan para operator menyediakan fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi universal atau bentuk kompensasi lain. TELKOM telah membayar KPU sejumlah: Rp383,8 miliar untuk tahun fiskal 2006, Rp438,5 miliar untuk tahun fiskal 2007, Rp462,5 miliar untuk tahun fiskal 2008, dan Rp809,6 miliar untuk tahun fiskal 2009. Informasi lebih lanjut, lihat Catatan 46h pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

PERATURAN PELAKSANAAN

Pemerintah telah menerbitkan beberapa keputusan dan peraturan pelaksanaan yang terkait Undang-Undang Telekomunikasi dan undang-undang lainnya. Tabel yang terdapat pada halaman 48 menunjukkan setiap lisensi yang dimiliki oleh TELKOM, produk yang ditawarkan, dan peraturan, regulasi serta keputusan yang terkait. Lisensi yang dimiliki terkait dengan: Jenis penyelenggaraan (Jaringan, Layanan dan Telekomunikasi Khusus), Perjanjian layanan, Rencana Teknis Dasar (FTP), peralatan yang terstandarisasi, layanan standar dan kualitas jaringan, alokasi penggunaan sumberdaya (penomoran dan spektrum frekuensi), interkoneksi, tarif dasar, dan penggunaan fasilitas bersama (menara).

Peraturan baru yang diterbitkan sejak tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 19 Januari 2009, Menkominfo mengeluarkan empat peraturan yang seluruhnya terkait dengan penataan dan penggunaan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel dan persiapan untuk operator yang diberikan ijin operasi pada frekuensi radio 2,3 GHz sebagai berikut:
  - Keputusan Menkominfo No. 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Paket *Switched* pada frekuensi radio 2,3 GHZ bagi kebutuhan pita lebar nirkabel dan di amandemen Keputusan Menkominfo No. 114/KEP/M.KOMINFO/4/01/2009 tanggal 17 April 2009;
  - Keputusan Menkominfo No. 05/KEP/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) pada radio frekuensi 3,3 Ghz untuk pengguna frekuensi yang telah ada bagi kebutuhan pita lebar nirkabel;
  - Peraturan Menkominfo No. 08/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel 2,3 GHz; dan
  - Peraturan Menkominfo No. 09/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio bagi kebutuhan Layanan Pita lebar Nirkabel pada pita frekuensi Radio 3,3 GHz dan migrasi dari Frekuensi Radio yang dipakai untuk kebutuhan Broadband Wireless dari pita frekuensi radio 3,4-3,6 GHz, sebagaimana telah diamandemen dalam Peraturan Menkominfo No. 35/PER/M.KOMINFO/08/2009 tertanggal 31 Agustus 2009;
- Pada tanggal 16 Januari 2009, Pemerintah menerbitkan Peraturan No. 7/2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Depkominfo. Beberapa hal penting yang terdapat dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:
  - Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku tidak hanya berasal dari penyelenggaraan pos dan telekomunikasi tapi juga dari penyelenggaraan penyiaran, jasa sewa sarana dan prasarana, serta jasa pendidikan dan latihan;

- BHP ("Biaya Hak Penggunaan") untuk layanan telekomunikasi turun dari 1% menjadi 0,5% dari pendapatan kotor; dan
- Penerapan sanksi administrasi dan denda atas pelanggaran terhadap pemenuhan kewajiban dan kualitas layanan;

- Pada tanggal 25 Februari 2009, Menkominfo menerbitkan Surat Keputusan No. 14/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi ("SKTT"). Regulasi ini memutuskan para operator akan bertanggung jawab terhadap sistem dan operasional dari SKTT, yang sebelumnya dilaksanakan oleh PT Pratama Jaringan Nusantara ("PJN"), sebuah perusahaan swasta yang dipilih oleh Menkominfo. Terkait dengan regulasi itu, PJN akan mengatur operasional harian dari sistem tersebut, tapi dengan peran yang tidak menonjol. Selain itu, PJN tidak dapat meneruskan penggunaan sistemnya sendiri tapi diwajibkan menggunakan SOKI, Sistem Kliring Trafik Interkoneksi milik Asosiasi Kliring Interkoneski Telekomunikasi (ASKITEL);
- Pada tanggal 30 Maret 2009, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 18/2009, Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2009, Menteri Kominfo No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal No. 3/P/2009, diterbitkan dan menjadi pedoman dalam pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi. Pada dasarnya peraturan tersebut mengatur hal sebagai berikut:

  - Perijinan pembangunan menara diajukan oleh perusahaan menara kepada Bupati/Walikota;
  - Batas waktu perijinan untuk mendirikan menara harus diproses 14 hari sejak rencana teknis disetujui;
  - Klasifikasi dari perusahaan tower dibagi menjadi perusahaan tower operator telekomunikasi dan perusahaan tower bukan operator telekomunikasi;
  - Adanya zona yang dilarang untuk membangun menara;
  - Pengaturan mengenai konstruksi menara dan pengenaan kontribusi; dan
  - Prioritas menara yang telah ada menjadi menara bersama;

- Peraturan Menkominfo No. 27/PER/M.KOMINFO/8/2009 tanggal 5 Agustus 2009 tentang Uji Coba TV Digital;
- Peraturan Menkominfo No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Penyelenggaraan Televisi Protokol Internet - layanan *IPTV* di Indonesia;
- Peraturan Menkominfo No. 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Kerangka Dasar Ketentuan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Tidak Berbayar;
- Peraturan Menkominfo No. 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 23 November 2009 mengenai Penyediaan Jasa Internet di Pedesaan pada Wilayah Pelayanan Universal;
- Peraturan Menkominfo No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tanggal 25 Januari 2010 mengenai Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; dan
- Peraturan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 tentang Kewajiban Pelayanan Umum, yang kemudian diamandemen oleh Peraturan Menkominfo No. 03/PER/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 1 Februari 2010.

REGULASI SATELIT

Industri satelit internasional merupakan industri yang diatur dengan sangat ketat. Selain harus mengikuti aturan pemberian lisensi domestik dan regulasi di Indonesia untuk penggunaan slot orbit dan frekuensi radio, penempatan dan pengoperasian satelit TELKOM juga harus didaftarkan kepada Biro Komunikasi Radio ITU (*International Telecommunications Union/ITU*).

REGULASI TELEPON TIDAK BERGERAK KABEL DAN TELEPON TIDAK BERGERAK NIRKABEL

Pada bulan Maret 2004, Menhub mengeluarkan Keputusan yang menetapkan bahwa hanya operator jaringan telepon tidak bergerak berlisensi dari Menhub dan menggunakan jaringan akses frekuensi radio saja yang boleh menawarkan layanan akses telepon tidak bergerak nirkabel. Selain itu, dinyatakan bahwa setiap penyedia akses telepon tidak bergerak nirkabel harus menyediakan layanan telepon dasar. Namun, penyedia akses telepon tidak bergerak nirkabel hanya dapat menyediakan layanan akses telepon tidak bergerak nirkabel dalam kode area yang telah ditetapkan. Selain itu, layanan akses telepon tidak bergerak nirkabel tidak boleh menggunakan fitur *roaming*. Dengan menggunakan fitur auto-mutasi, pelanggan dapat menggunakan telepon tidak bergerak nirkabel mereka untuk melakukan atau menerima panggilan sewaktu mereka berada di luar dari kode area masing-masing.

Lisensi Modern mengijinkan TELKOM untuk menyediakan layanan telepon tidak bergerak kabel untuk lokal, SLJJ dan SLI. Lisensi ini tidak memiliki batas waktu, tetapi dievaluasi setiap lima tahun.

PERSAINGAN

TELEPON TIDAK BERGERAK KABEL DAN TELEPON TIDAK BERGERAK NIRKABEL

Pada awalnya, TELKOM memiliki hak eksklusif untuk menyediakan layanan telekomunikasi domestik sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan untuk melaksanakan Undang-undang Telekomunikasi, Pemerintah mengakhiri monopoli TELKOM dalam menyediakan layanan telekomunikasi domestik sambungan telepon tidak bergerak. Menhub mengeluarkan lisensi kepada Indosat untuk menyediakan layanan telepon lokal sejak bulan Agustus 2002. Pada bulan Mei 2004, Indosat menerima lisensi komersial untuk menyediakan layanan telepon SLJJ. Indosat meluncurkan layanan akses telepon tidak bergerak nirkabel CDMA dengan merek dagang "StarOne" di Surabaya pada bulan Mei 2004 dan di Jakarta pada bulan Juli 2004, yang menciptakan "sistem duopoli" di pasar telekomunikasi domestik sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia. Mulai bulan Januari 2006, Indosat mampu menyediakan layanan SLJJ di tingkat nasional melalui jaringan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA, jaringan telepon tidak bergerak milik Indosat dan perjanjian interkoneksi dengan TELKOM. Berdasarkan perjanjian interkoneksi antara TELKOM dan Indosat tertanggal 23 September 2005, TELKOM sepakat untuk membuka interkoneksi dengan layanan sambungan telepon tidak bergerak lokal Indosat di wilayah tertentu seperti Jakarta, Surabaya, Batam, Medan, Balikpapan dan Denpasar. Hingga saat ini, Indosat telah memperluas jangkauan jaringan telepon tidak bergerak lokal ke sebagian besar daerah

di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Indosat juga mulai menawarkan layanan SLJJ terbatas untuk panggilan di dalam jaringannya pada akhir tahun 2004.

Layanan sambungan telepon tidak bergerak TELKOM menghadapi persaingan langsung maupun tidak langsung dari penyedia layanan telepon tidak bergerak kabel dan telepon tidak bergerak nirkabel lain, seperti PT Bakrie Telecom (sebelumnya Ratelindo) dan PT Batam Bintan Telecom, layanan telepon seluler, layanan pesan singkat (*Short Massaging Service*/SMS), layanan *Voice Over Internet Protocol* ("VoIP") dan *e-mail*. TELKOM memperkirakan bahwa peningkatan penggunaan layanan ini dapat memberi dampak merugikan pada permintaan terhadap layanan sambungan telepon tidak bergerak di masa mendatang.

SELULER

Sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini dibuat, pasar seluler di Indonesia didominasi oleh Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Tiga operator seluler tingkat nasional ini secara bersama-sama memiliki kurang lebih 88% pangsa pasar seluler (mobilitas penuh) Indonesia. Jumlah pelanggan seluler dengan mobilitas penuh di Indonesia mencapai jumlah total kurang lebih 138,8 juta pada akhir tahun 2008 dan kurang lebih 166,9 juta pada akhir tahun 2009, yang merupakan pertumbuhan tahunan kurang lebih 20,2% selama jangka waktu tersebut. Meskipun pertumbuhan ini sangat pesat, namun tingkat penetrasi seluler di Indonesia, yaitu sekitar 72% pada akhir tahun 2009, tetap relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Dalam tahun-tahun terakhir, persaingan di antara para operator seluler semakin meningkat.

Operator telepon seluler GSM bersaing terutama atas dasar harga, merek, jangkauan jaringan, kualitas jaringan, distribusi, teknologi, layanan bernilai-tambah dan kualitas layanan. TELKOM yakin bahwa Telkomsel mampu bersaing secara efektif di pasar seluler Indonesia dengan mengandalkan kualitas jaringan yang tinggi dan jangkauan jaringan yang luas serta kekuatan merek dagangnya.

Layanan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA, TELKOMFlexi, menawarkan mobilitas terbatas dan mengenakan tarif berdasarkan tarif PSTN yang secara substansial lebih rendah dari pada tarif layanan seluler, sehingga mungkin dapat menawarkan alternatif yang kompetitif selain layanan GSM.

Sampai dengan 31 Desember 2009, Telkomsel tetap merupakan penyedia layanan seluler berlisensi nasional terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan seluler mencapai 81,6 juta dan pangsa pasar kurang lebih 49% dari pasar seluler dengan mobilitas penuh. Penyedia terbesar kedua dan ketiga adalah Indosat dan XL Axiata dengan pangsa pasar masing-masing 20% dan 19%, yang didasarkan pada perkiraan jumlah pelanggan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009. Selain operator GSM di tingkat nasional, terdapat pula sejumlah penyedia seluler GSM, analog dan CDMA regional yang lebih kecil beroperasi di Indonesia, sehingga jumlah total operator adalah lebih dari 10 operator.

Tabel berikut memuat rangkuman informasi sampai dengan 31 Desember 2009 mengenai tiga operator utama telepon seluler GSM berlisensi nasional:

Tabel Operator Telepon Seluler GSM Berlisensi di Tingkat Nasional di Indonesia

	Operator		
	Telkomsel	**Indosat**	**XL Axiata**
Tanggal peluncuran	Mei 1995	November 1994(2)	Oktober 1996
Bandwidth frekuensi berlisensi 2G (GSM 900 dab 1800)	30 MHz	30 MHz	15 MHz
Bandwidth frekuensi berlisensi 3G (2,1 GHz)	10 MHz	10 MHz	5 MHz
Cakupan berlisensi	Nasional	Nasional	Nasional
Cakupan jaringan	Nasional	Informasi tidak tersedia	Informasi tidak tersedia
Pangsa pasar (per 31 Desember 2009)(1)	49,0%	20,0%	19,0%
Pelanggan (per 31 Desember 2009)(1)	81,6 juta	33,1 juta	31,4 juta

(1) Perkiraan, berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh TELKOM.

(2) Pada bulan Nopember 2003, Indosat dan Satelindo dimerger dan Indosat telah mengambil alih operasi seluler Satelindo.

LAYANAN SLI

Pada bulan Agustus 2001, Pemerintah melalui Dirjen Postel mengumumkan terminasi dini hak eksklusivitas Indosat untuk SLI. Pengumuman tersebut menyatakan maksud Pemerintah bahwa TELKOM akan menerima lisensi komersial untuk menyediakan layanan SLI pada akhir tahun 2003. TELKOM menerima lisensi komersial pada bulan Mei 2004, dan mulai menawarkan layanan sambungan telepon tidak bergerak SLI kepada pelanggan pada bulan Juni 2004. TELKOM telah memperbaiki peralatan *switching* agar memiliki kemampuan gerbang internasional yakni di Batam, Jakarta dan Surabaya. Gerbang tersebut telah mendapat sertifikat operasi (sertifikat ULO) dari Dirjen Postel. Agar terhubung dengan operator luar negeri, TELKOM telah membangun dua *link* gelombang mikro untuk menghubungkan Batam-Singapura dan Batam-Pangerang (Malaysia). Selain itu, TELKOM, SingTel Mobile dan CAT mengembangkan sistem kabel bawah laut TIS pada tahun 2003 yang menghubungkan Batam, Singapura dan Thailand. TELKOM juga menandatangani perjanjian dengan Telekom Malaysia Berhad untuk pembangunan dan pemeliharaan kabel optik bawah laut yang baru untuk menghubungkan Dumai (Indonesia) dengan Melaka (Malaysia) yang telah selesai pada bulan Desember 2004. Kami juga meningkatkan kapasitas kabel internasional dengan membeli kapasitas bandwidth agar terhubung dengan Hong Kong dan kami menggunakan kapasitas ini untuk hubungan ke negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Pada bulan Desember

2004 kami juga menyelesaikan pengembangan *ground segment* untuk hubungan ke Satelit Intelsat. Infrastruktur pendukung SLI tambahan telah dibangun pada tahun 2009: Jaringan *BSCS (Batam Singapore Cable System)* mulai beroperasi pada bulan Mei, sedangkan jaringan *AAG (Asia America Gateway)* mulai beroperasi pada tanggal 10 November 2009. Pada tanggal 25 Januari 2008, TELKOM mengalihkan proyek *backbone* bawah laut internasionalnya yang sedang beroperasi kepada anak perusahaan, TII.

VoIP

Kami meluncurkan layanan VoIP pada bulan September 2002. VoIP menggunakan komunikasi data untuk mengalihkan trafik suara melalui internet, yang secara signifikan dapat memberikan penghematan biaya bagi pelanggan. Selain kami, XL Axiata, Indosat, Atlasat, Gaharu, dan PT Satria Widya Prima, Primedia Armoekadata dan Jasnita Telekomindo juga menyediakan layanan VoIP di Indonesia. Operator lain yang tidak berlisensi juga menyediakan layanan VoIP yang dapat diakses melalui internet, juga dari piranti lunak yang memungkinkan komunikasi suara dari PC ke PC dapat terwujud melalui internet. Operator VoIP yang menawarkan layanan internasional juga bersaing dengan operator SLI, seperti Indosat dan TELKOM sejak Juni 2004.

Operator VoIP bersaing terutama atas tarif dasar dan kualitas layanan. Operator VoIP tertentu mulai menawarkan layanan seperti *budget call* dan *calling card* prabayar, yang diperkirakan akan mengakibatkan persaingan yang lebih ketat antar operator VoIP dan penyedia layanan SLI lain.

SATELIT

Saat ini, persaingan bisnis satelit di Asia-Pasifik semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan di bisnis ini bersaing terutama dalam hal daya jangkau, penawaran produk dan harga. Industri satelit Indonesia tidak diatur secara ketat dan dalam praktiknya beroperasi sesuai dengan kebijakan "*open-sky*", yang berarti operator satelit Indonesia harus bersaing dengan operator satelit asing.

LAIN-LAIN

Dalam tiga tahun terakhir, persaingan yang berkenaan dengan bisnis multimedia, internet, dan layanan yang terkait dengan komunikasi data semakin ketat terutama sehubungan dengan dikeluarkannya lisensi baru sebagai hasil dari deregulasi industri telekomunikasi Indonesia. Kami memperkirakan persaingan ini akan terus berlanjut dan semakin ketat. Penyedia layanan multimedia, internet dan layanan yang terkait dengan komunikasi data di Indonesia pada dasarnya bersaing dalam hal tarif dasar, rentang layanan yang disediakan, kualitas jaringan, jangkauan jaringan dan kualitas layanan kepada pelanggan.

LISENSI

Tabel di bawah ini adalah daftar lisensi beberapa produk TELKOM sesuai dengan undang-undang, peraturan atau keputusan yang berlaku:

Penyelenggara		Implementasi
Lisensi Penyelenggaraan Jaringan Tetap tertutup	KP. 238/2002, 12 Agustus 2002	Produk Sirkit Langganan Berbasis TDM lokal SLJJ dan Internasional
Lisensi Penyelenggaraan ITKP TELKOM	SK. 01/Dirjen/2004, Januari 2004	Produk TELKOM Global, TELKOMSave, penyaluran trafik wholesale internasional berbasis VoIP
Lisensi Penyelenggaraan Jaringan tetap dan Jasa telepon dasar yang terdiri dari jaringan Tetap Lokal, SLJJ, SLI, FWA	KP. 162/2004	Layanan jasa dasar TELKOM; Lokal, SLI, SLJJ, IN dan TELKOM Flexi.
Lisensi Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider)	SK. 02/Dirjen/2004, 29 Januari 2004	Produk SPEEDY, TELKOMNET, ASTINET, VPN Dial, VPN IP, IP Transit, INFONET, METRO E, dll.
Lisensi Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi internet Network Access Point (NAP)	Kep. Dirjen No. 275/Dirjen/2006, 31 Juli 2006	Produk TIX, Global IP Transit, dll.

Pada tahun 2009, TELKOM wajib menyampaikan laporan lisensi modern (ITKP, Local, SLJJ, SLI, internet) secara menyeluruh selama 5 tahun dalam rangka evaluasi dan komitmen 5 tahun ke depan tertuang dalam lisensi modern penyelenggaraan yang diberikan.

TELEPON TIDAK BERGERAK KABEL DAN TELEPON TIDAK BERGERAK NIRKABEL

Lisensi Modern yang dimiliki oleh TELKOM mewajibkan TELKOM untuk menyediakan layanan telepon tidak bergerak lokal, domestik dan sambungan jarak jauh internasional. Lisensi ini tidak memiliki batas waktu berakhir, namun dievaluasi setiap lima tahun. Lisensi ini dievaluasi pada tahun 2009 dan evaluasi selanjutnya adalah pada tahun 2014.

SELULER

Telkomsel memiliki lisensi untuk mengoperasikan jaringan telepon seluler GSM secara nasional, menggunakan frekuensi radio 7,5 MHz dalam band 900 MHz dan menggunakan frekuensi radio 22,5 MHz dalam band 1800 MHz. Telkomsel juga memiliki lisensi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia yang mengijinkannya untuk mengembangkan layanan seluler dengan jangkauan nasional, termasuk perluasan kapasitas jaringannya. Selain itu, Telkomsel memiliki ijin dan lisensi dan registrasi pada pemerintah daerah tertentu dan/atau instansi pemerintah, terutama dalam hubungannya dengan operasinya di wilayah tersebut, properti yang dimiliki oleh pihaknya dan/atau pembangunan dan penggunaan *Base Transceiver Station (BTS)*.

THIRD-GENERATION MOBILE TELECOMMUNICATIONS SYSTEM ("3G")

Pada bulan Februari 2006, Pemerintah melaksanakan tender untuk tiga lisensi spektrum frekuensi radio 2,1 GHz, masing-masing memiliki pita lebar 5 MHz, yang akan digunakan bersama lisensi baru untuk mengoperasikan jaringan telekomunikasi seluler 3G tingkat nasional di Indonesia. Lisensi 3G diberikan kepada Telkomsel, Indosat dan XL Axiata, serta dua pemegang lisensi *existing* (HCPT dan PT Lippo Telekom (Natrindo Telepon Seluler) yang telah menerima lisensi 3G melalui proses tender pada tahun 2003.

SLI

Sebagai bagian dari lisensi modern, TELKOM mulai menyediakan layanan SLI sejak tahun 2004. Lisensi ini tidak memiliki batasan waktu, tetapi akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. Evaluasi tersebut telah dilakukan pada tahun 2009 dan akan dilakukan evaluasi kembali pada tahun 2014.

Pada tanggal 2 Maret 2010, Peraturan Menkominfo No. 75/KEP/M.KOMINFO/03/2010 memberikan lisensi penyedia jaringan tetap, tertutup kepada TII sebagai penyedia layanan infrastruktur internasional.

VoIP DAN ISP

TELKOM memiliki Lisensi Modern untuk menyediakan layanan VoIP dan ISP yang mencakup ijin menyediakan layanan komunikasi data.

PENYEDIA AKSES JARINGAN

TELKOM memiliki lisensi untuk menyediakan layanan koneksi internet. Masa berlaku lisensi ini tidak memiliki batas waktu berakhir, namun akan dievaluasi setiap lima tahun. Lisensi ini dievaluasi pada tahun 2009 dan evaluasi selanjutnya pada tahun 2014.

AKSES PITA LEBAR NIRKABEL/ *BROADBAND WIRELESS ACCESS* (BWA)

Pada tahun 2009, TELKOM memperoleh lisensi layanan pita lebar nirkabel (BWA) 3,3GHz pada tujuh zona yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera bagian tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, JABODETABEK dan Banten.

Pada Agustus 2009, Menkominfo menerbitkan Keputusan Menteri No. 237/KEP/M.KOMINFO/7/2009 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched* yang menggunakan frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).

Sebanyak delapan perusahaan ditetapkan sebagai pemenang seleksi penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) atau *broadband wireless access* (BWA), yaitu Indosat Mega Media, Internux, First Media, Jasnita Telekomindo, Berca Hardayaperkasa, Konsorsium Rahajasa Media Internet dan WiMAX Indonesia, Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania, serta TELKOM.

TELKOM memperoleh lisensi BWA 2,3 GHz untuk di 5 zona yaitu: Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Maluku, dan Sulawesi bagian utara.

Menjadi operator *broadband wireless access* ini sejalan dengan transformasi bisnis TELKOM menuju TIME yang menuntut kami untuk memiliki infrastruktur dengan kemampuan merespon pasar yang semakin kompleks dan permintaan layanan yang semakin *convergent*, baik pada segmen *consumer, enterprise* maupun pada segmen *wholesale*.

SISTEM KOMUNIKASI DATA (SISKOMDAT)

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Komunikasi No. KM. 30/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Komunikasi No. KM. 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, TELKOM wajib memiliki Ijin Penyelenggaraan Jasa SISKOMDAT (*Data Communications Systems*). Ijin Penyelenggaraan Jasa SISKOMDAT tersebut adalah ijin yang diperlukan untuk menyelenggarakan layanan jasa komunikasi data. Saat ini, TELKOM telah memiliki Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa SISKOMDAT untuk melaksanakan Uji Laik Operasi, untuk selanjutnya memperoleh Ijin Penyelenggaraan Jasa SISKOMDAT. TELKOM pada saat ini menggunakan ijin jaringan tetap tertutup untuk layanan komunikasi data.

IJIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN BERLANGGANAN UNTUK INDONUSA

Saat ini Indonusa, anak perusahaan kami, beroperasi atas dasar Keputusan Dirjen Postel Nomor: 282/DIRJEN/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Jasa Multimedia dan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (kesempatan penyesuaian ijin selama 2 tahun), Indonusa mengajukan ijin Lembaga Penyiaran kepada pemerintah pada tahun 2007 yang sampai saat ini masih dalam proses pengurusan ijin dimaksud. Perkembangan saat ini, Indonusa telah mendapatkan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia sebagai kelengkapan dalam pengurusan ijin dimaksud.

Pada bulan Januari 2010, TELKOM dan Indonusa telah menyerahkan laporan uji coba lapangan *IPTV* kepada Menkominfo, menyatakan kesiapan untuk mulai beroperasi pada semester pertama 2010. Setelah menyerahkan laporan tersebut, TELKOM memulai diskusi dengan Menkominfo mengenai standar-standar yang diperlukan untuk memperoleh lisensi. Perusahaan masih menunggu diterbitkannya lisensi *IPTV* sebagai hasil diskusi tersebut.

TARIF DAN BIAYA INTERKONEKSI

Pemerintah membagi tarif menjadi dua kategori: untuk penyediaan layanan telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi.

Menkominfo mengatur tarif dan jumlah yang dapat ditagihkan oleh TELKOM berdasarkan formula tarif untuk layanan telekomunikasi di Indonesia. Operator telekomunikasi dapat menetapkan besaran tarif. Dalam hal ini, unit bisnis TELKOM dapat menyesuaikan harga berdasarkan panduan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi TELKOM.

TARIF SAMBUNGAN TELEPON TIDAK BERGERAK KABEL

Daftar tarif yang berlaku pada umum adalah sebagai berikut:

Tabel Tarif pemasangan dan Biaya Bulanan:

Biaya akses	Bisnis (Rp)	Residensial (Rp)	Sosial (Rp)
Instalasi	175.000 – 450.000	75.000 – 295.000	50.000 – 205.000
Abonemen	38.400 – 57.600	20.600 – 32.600	12.500 – 18.500

Tabel Tarif Penggunaan Sambungan Lokal:

Jarak	Harga per pulsa (Rp)	Durasi pulsa
Sampai dengan 20 km	250	3 menit (di luar jam sibuk) dan 2 menit (jam sibuk)
Lebih dari 20 km	250	2 menit (di luar jam sibuk) dan 1,5 menit (jam sibuk)

Tabel Tarif Penggunaan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ):

Jarak	Harga per menit (Rp)	Pembulatan durasi blok waktu
0-20 km	83 – 122	1 menit
20-30 km	122 – 163	1 menit
30-200 km	320 - 1.100	6 detik
200-500 km	320 - 1.770	6 detik
Lebih dari 500 km	320 - 2.100	6 detik

TARIF SAMBUNGAN TELEPON TIDAK BERGERAK NIRKABEL

Tarif yang dibebankan kepada pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel dilaporkan sebagai pendapatan telepon tidak bergerak. TELKOM menawarkan layanan telepon tidak bergerak nirkabel pascabayar dan prabayar.

a. **Pascabayar.**
Pelanggan pascabayar membayar biaya aktivasi satu kali sebesar Rp25.000 dan biaya bulanan sebesar Rp30.000. Biaya penggunaan untuk pelanggan pascabayar pada umum adalah sebagai berikut:

Tabel Tarif Sambungan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel Pascabayar

	Harga per pulsa (Rp)	Durasi pulsa
Flexi ke Flexi:		
Lokal	49	1 menit
SLJJ	300	30 detik
Flexi to PSTN / OLO Kabel tidak bergerak:		
Lokal	150	1 menit
SLJJ	600	30 detik
Flexi ke Seluler:		
Lokal	550	1 menit
SLJJ	625	30 detik
Flexi ke Mobile Satellite (Byru):	3.850	30 detik

Untuk SMS, pelanggan pascabayar dikenakan biaya Rp75 per SMS untuk Flexi ke Flexi, Rp136 dari Flexi ke operator lainnya dan Rp450 dari Flexi ke luar negeri. Untuk akses internet melalui PDN atau WAP (menggunakan #777), pelanggan pascabayar dikenakan Rp200 per menit atau Rp3 per Kbps. Pelanggan pascabayar yang menggunakan akses internet melalui *dial-up* nirkabel (menggunakan 0809 89999) dikenakan biaya Rp150 per menit.

b. **Prabayar.**
Biaya penggunaan untuk pelanggan prabayar pada umum, termasuk PPN sebesar 10%, sebagai berikut:

Tabel Tarif Sambungan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel Prabayar

	Harga per pulsa (Rp)	Durasi pulsa
Flexi ke Flexi:		
Lokal	53,9	1 menit
SLJJ	375	30 detik
Flexi to PSTN / OLO Kabel tidak bergerak:		
Lokal	250	1 menit
SLJJ	750	30 detik
Flexi ke Seluler:		
Lokal	780	1 menit
SLJJ	800	30 detik
Flexi ke Mobile Satellite (Byru):	4.235	30 detik

Untuk SMS, pelanggan prabayar dikenakan Rp100 per pesan dari Flexi ke Flexi, Rp165 per pesan ke operator lainnya dan Rp500 per pesan dari Flexi ke luar negeri. Untuk akses internet melalui PDN, pelanggan prabayar dikenakan Rp220 per menit atau Rp5 per Kb. Pelanggan prabayar yang menggunakan akses internet TELKOM melalui dial-up nirkabel dan WAP akan dikenakan biaya masing-masing Rp300 per menit dan Rp5 per Kbps.

TARIF SLI

Tarif untuk panggilan SLI ditetapkan oleh penyedia layanan sesuai batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Sampai tanggal Laporan Tahunan ini dibuat, tarif terkini SLI TELKOM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Tarif SLI

	Wilayah	Harga Per Menit (Rp)	Pembulatan durasi blok waktu
Grup I	Asia Tenggara, Pasifik Selatan	4.550 - 5.550	6 detik
Grup II	Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Asia Timur, Asia Barat dan Asia Selatan	5.550 - 6.550	6 detik
Grup III	Eropa	7.570 - 8.700	6 detik
Grup IV	Timur Tengah	8.080 - 9.290	6 detik
Grup V	Tujuan khusus	20.200 - 23.300	6 detik

TARIF TELEPON SELULER

a. Tarif Pascabayar

Untuk informasi tarif pascabayar telepon seluler, lihat Catatan 46b Laporan Keuangan Konsolidasian. Biaya pemakaian yang dibebankan kepada pelanggan pada umum adalah sebagai berikut:

Tabel Tarif Telepon Seluler Pascabayar

	Harga Per Menit		Pembulatan durasi blok waktu
	kartuHALO (Rp)	HALOhybrid (Rp)	
Telepon seluler ke telepon seluler			
Lokal	650 – 750	650 – 750	20 detik
SLJJ	650 – 1.200	850 – 1.200	15 detik
Seluler ke telepon tidak bergerak :			
Lokal	650	650	20 detik
SLJJ	1.200	1.200	15 detik
SLI*			
Asia(Selatan, Utara, Tenggara), Australia, Oseania	3.000		6 detik
Amerika	4.500		6 detik
Timur Tengah, Afrika dan yang lainnya	5.000		6 detik
Eropa	5.500		6 detik

- Tarif promo TELKOM SLI menggunakan 007 untuk seluruh pengguna Telkomsel berlaku sampai dengan 31 Desember 2009.

b. Tarif Prabayar

Untuk layanan seluler prabayar, biaya aktivasi dapat ditentukan dengan bebas oleh operator seluler sementara biaya pemakaian dibatasi maksimum 140% di atas biaya pemakaian puncak untuk layanan pascabayar. Telkomsel membebankan biaya penggunaan kepada pelanggan umuprabayar (*sim*PATI/Kartu As) seperti pada tabel berikut:

Tabel Tarif Telepon Seluler Pascabayar

	Harga Per Menit (Rp)		Pembulatan Durasi Blok Waktu	
	simPATI M@X	Kartu As	*simPATI* M@X	Kartu As
Panggilan sesama Telkomsel:				
Lokal	900	780	per 10 detik	per detik
SLJJ				
Zona 1	900	780	per 10 detik	per detik
Zona 2	900	780	per 10 detik	per detik
Panggilan ke seluler lain:				
Lokal	1.800	780	per 30 detik	per detik
SLJJ				
Zona 1	1.800	780	per 30 detik	per detik
Zona 2	1.800	780	per 30 detik	per detik
Panggilan ke telepon tidak bergerak / telepon tidak bergerak nirkabel:				
Lokal	900	780	per 10 detik	per detik
SLJJ				
30-200 km	2.100	780	per 10 detik	per detik
200-500 km	2.100	780	per 10 detik	per detik
Over 500 km	2.100	780	per 10 detik	per detik
SLI				
Asia (Selatan, Utara, Tenggara), Australia, Oseania	3.300	3.300	15 detik	15 detik
Amerika	4.950	4.950	15 detik	15 detik
Timur Tengah, Afrika dan yang lainnya	5.500	5.500	15 detik	15 detik
Eropa	6.050	6.050	15 detik	15 detik

105,1 juta

Sampai dengan 31 Desember 2009, jumlah pelanggan TELKOM telah tumbuh sebesar 21,2% atau menjadi 105,1 juta pelanggan

TARIF SEWA SIRKIT

Pemerintah mengendalikan bentuk, jenis, struktur harga dan formula tarif untuk sewa jaringan melalui penerbitan berbagai keputusan.

Tabel berikut memuat tarif sewa sirkit kami:

Tabel Tarif Telepon Seluler Pascabayar

	Tarif (Rp)
Biaya pasang baru	
Akses pelanggan	2.400.000 – 30.000.000(1)
Biaya langganan bulanan	
Point to Point	
Lokal (sampai dengan 25 km)	1.750.000 – 88.650.000(2)
Inter-lokal (lebih dari 25 km)	5.600.000 – 3.893.100.000(2)
End to End	
Lokal (sampai dengan 25 km)	4.500.000 – 165.650.000(2)
Inter-lokal (lebih dari 25 km)	8.350.000 – 3.970.100.000(2)

(1) Tarif berdasarkan kecepatan
(2) Tarif berdasarkan kecepatan dan wilayah

TARIF VoIP

Berdasarkan beban biaya, para operator VoIP secara bebas menentukan biaya untuk layanan VoIP. Kami telah meluncurkan layanan VoIP, yang pada saat Laporan Tahunan ini dibuat terdiri dari TELKOMGlobal-01017 dan TELKOMSave dengan tarif alternatif yang lebih murah.

TARIF SATELIT

Tarif maksimum tahunan per *transponder* adalah US$1,20 juta, meskipun dalam beberapa hal kami dapat menawarkan tarif dengan potongan harga untuk komitmen jangka panjang atau untuk pelanggan setia.

TARIF AKSES PITA LEBAR

Tabel di bawah ini berisikan tarif tetap layanan akses pita lebar:

Tabel Tarif Akses Pita Lebar Berbasis Volume I

Layanan Pascabayar Speedy	Biaya aktivasi (Rp)	Biaya bulanan (Rp)	Kuota pemakaian per bulan	Biaya kelebihan pemakaian (Rp)
Berbasis Volume I*				
Limited Home	75.000	200.000	1,0GB	175/MB
Limited Professional	75.000	400.000	3,0GB	175/MB
Unlimited Office	75.000	750.000	Unlimited	–
Unlimited Warnet	75.000	1.750.000	Unlimited	–

* Tarif berikut ini berlaku bagi pelanggan lama sebelum melakukan penggantian ke paket Speedy 2009

Tabel Tarif Akses Pita Lebar Berbasis Volume II

Layanan Pascabayar Speedy	Biaya aktivasi (Rp)	Biaya bulanan (Rp)	Kecepatan link
Berbasis Volume II**			
Semi Unlimited 1	75.000	195.000	sampai dengan 384 Kbps
Semi Unlimited 2	75.000	295.000	sampai dengan 512 Kbps
Unlimited 1	75.000	645.000	sampai dengan 1 Mbps
Unlimited 2	75.000	995.000	sampai dengan 2 Mbps
Unlimited 3	75.000	1.695.000	sampai dengan 3 Mbps

** Tarif berikut ini berlaku bagi pelanggan baru dan pelanggan lama paket Speedy 2009

Tabel Tarif Akses Pita Lebar Berbasis Volume I

Layanan Pascabayar Speedy	Biaya aktivasi (Rp)	Biaya bulanan (Rp)	Kuota pemakaian per bulan	Kecepatan link	Biaya kelebihan pemakaian (Rp)
Basis Waktu					
Limited sampai dengan 15 Jam	75.000	75.000	15 jam	sampai dengan 1 Mbps	75/menit
Limited sampai dengan 50 Jam	75.000	145.000	50 jam	sampai dengan 1 Mbps	25/menit

Basis waktu prabayar adalah Rp75/menit

TARIF WARTEL

Wartel adalah telepon umum yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Biaya untuk wartel dapat ditentukan dengan bebas oleh operator. TELKOM mendapatkan 70% dari tarif dasar yang dikenakan oleh wartel kepada pelanggannya untuk panggilan domestik dan mendapatkan hingga 92% dari tarif dasar yang dikenakan wartel untuk panggilan internasional (SLI).

TARIF LAYANAN LAINNYA

Tarif untuk penyewaan satelit serta layanan telepon dan multimedia lain ditentukan oleh penyedia layanan dengan mempertimbangkan biaya dan harga pasar. Pemerintah hanya menentukan formula tarif untuk layanan telepon dasar, tidak ada penetapan untuk tarif layanan lain.

TARIF INTERKONEKSI

Pemerintah menetapkan tarif interkoneksi dan akses, termasuk jumlah biaya interkoneksi yang diterima oleh setiap operator terkait dengan panggilan yang lintas jaringan. Operator mengenakan biaya untuk panggilan berdasarkan biaya untuk menyambungkan panggilan tersebut. Untuk rincian mengenai tarif ini, lihat Catatan 46c Laporan Keuangan Konsolidasian.

Pemerintah menetapkan tarif interkoneksi dan akses, termasuk jumlah biaya interkoneksi yang diterima oleh setiap operator terkait dengan panggilan yang lintas jaringan

Para pelajar dari sebuah pondok pesantren sedang menggunakan layanan Speedy Unlimited dengan promo Rp300 ribu per bulan, gratis notebook.

Faktor- Faktor Risiko

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN INDONESIA

PERISTIWA POLITIK DAN SOSIAL YANG TERJADI DI INDONESIA SAAT INI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK YANG MERUGIKAN PADA KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA

Sejak pengunduran diri mantan Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami proses perubahan demokrasi yang mengakibatkan peristiwa politik dan sosial yang menjadi fokus dari ketidakpastian atas perubahan politik di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut menyebabkan ketidakstabilan atas situasi politik serta sejumlah kerusuhan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.

Contohnya sejak tahun 2000, ribuan masyarakat Indonesia turut serta dalam berbagai demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lainya, baik yang mendukung atau anti terhadap Pemerintah, sebagai reaksi atas beberapa permasalahan yang spesifik, seperti pengurangan subsidi BBM, privatisasi dari aset-aset negara, gerakan anti korupsi, desentralisasi dan otonomi daerah, tindakan dari berbagai pejabat pemerintah termasuk anggota keluarganya, serangan tentara Amerika ke Afghanistan dan Irak serta kenaikan tarif listrik. Walaupun pada umumnya demonstrasi ini berjalan secara tertib, namun ada beberapa yang berubah menjadi anarkis. Khususnya, pada beberapa kejadian sejak bulan Juni 2001, ketika Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga sejumlah bahan dasar, seperti BBM yang menyebabkan demonstrasi dan pemogokan besar-besaran di seluruh Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa ketidakpuasan di masa mendatang tidak akan menuju kepada ketidakstabilan politik dan sosial.

Gerakan separatis dan bentrok antar agama dan suku telah mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan politik di sejumlah daerah di Indonesia. Di Propinsi Papua (sebelumnya Irian Jaya), telah terjadi sejumlah bentrokan antara para pendukung gerakan separatis dengan tentara Indonesia. Di Papua, kekerasan terhadap perusahaan tambang emas Freeport telah mengakibatkan meninggalnya beberapa tentara Indonesia, polisi dan masyarakat sipil. Di Maluku dan Poso, wilayah di Propinsi Sulawesi Tengah, bentrokan antar kelompok agama telah mengakibatkan sejumlah orang luka-luka dan meninggal.

Pada tahun 1999, pertama kalinya Indonesia berhasil melaksanakan pemilihan umum yang bebas untuk memilih Parlemen dan Presiden. Pada tahun 2004, Indonesia memilih secara langsung Presiden, Wakil Presiden dan Wakil Rakyat di Parlemen melalui sistem pemilihan yang proporsional dengan daftar calon yang terbuka untuk pertama kalinya. Pada tingkat pemerintahan daerah, masyarakat telah melakukan pemilihan langsung terhadap kepala daerah. Pada tanggal 9 April 2009, pemilihan umum dilangsungkan untuk memilih wakil-wakil rakyat di Parlemen Indonesia (termasuk wakil nasional, propinsi dan daerah). Pada bulan Juli 2009, pemilihan umum presiden telah memilih kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun pada bulan April dan Juli 2009, pemilihan umum dilakukan secara tertib, kampanye politik di Indonesia dapat saja menimbulkan ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia. Di masa lalu, politik dan perkembangan sosial terkait di Indonesia tidak dapat di tebak dan tidak ada jaminan bahwa kerusuhan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa mendatang, dalam skala yang lebih luas, kerusuhan tersebut secara langsung atau tidak langsung tidak akan berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek TELKOM.

Dengan kabinet dan legislatif baru, mungkin saja terjadi perubahan yang dapat berdampak terhadap peraturan, tarif telekomunikasi dan faktor lainnya, yang dapat mempengaruhi prospek usaha, persaingan dan ruang lingkup untuk menawarkan produk-produk baru atau terus menawarkan produk kami yang sudah ada. Perubahan komposisi dalam Pemerintahan juga dapat merubah kebijakan atau struktur TELKOM, mengingat Pemerintah adalah pemegang saham pengendali.

PERUBAHAN NEGATIF PADA TINGKAT GLOBAL, REGIONAL ATAU KEGIATAN EKONOMI INDONESIA DAPAT MENGAKIBATKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP BISNIS TELKOM

Kinerja TELKOM sangat tergantung kepada kondisi ekonomi Indonesia karena sebagian besar dari kegiatan operasional, aset dan pelanggan kami ada di Indonesia.

Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sejak pertengahan 1997 dampak yang dirasakan di Indonesia, antara lain, adalah penurunan nilai mata uang, pertumbuhan ekonomi yang negatif, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Kondisi-kondisi tersebut memiliki dampak negatif terhadap usaha di Indonesia. Krisis ekonomi tersebut telah mengakibatkan banyaknya perusahaan di Indonesia yang bangkrut, karena ketidakmampuan atau karena hal lainnya, untuk membayar hutang-hutangnya ketika jatuh tempo.

Pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia juga terpengaruh oleh kondisi ekonomi dan pasar di negara-negara lainnya. Krisis keuangan global timbul disebabkan oleh krisis *subprime Mortgage* di AS pada tahun 2008 yang menyebabkan penurunan drastis dari pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Anjloknya ekonomi dunia ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia serta mempengaruhi stabilitas pasar modal Indonesia dan kawasan regional.

Kondisi ekonomi yang buruk ini dapat mengakibatkan menurunnya kegiatan bisnis, menurunnya pendapatan sehingga mengurangi daya beli konsumen, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan akan permintaan layanan komunikasi, termasuk layanan TELKOM yang pada akhirnya mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi dan prospek TELKOM. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi global dan regional akan terus berlanjut atau kondisi ekonomi yang buruk tidak akan terjadi lagi.

FLUKTUASI NILAI RUPIAH SECARA MATERIAL DAPAT BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI TELKOM

Mata uang yang TELKOM gunakan adalah Rupiah. Salah satu penyebab utama krisis ekonomi Asia dan dampaknya terhadap Indonesia adalah depresiasi dan ketidakstabilan nilai mata uang Rupiah yang dibandingkan terhadap mata uang lainnya, seperti Dolar AS. Walaupun nilai mata uang Rupiah telah meningkat secara signifikan dari yang

sebelumnya anjlok sampai sekitar Rp15.250 per Dolar AS pada bulan Juli 1998, namun di masa mendatang mungkin saja ketidakstabilan yang signifikan terjadi kembali.

Sebagian besar dari pendapatan TELKOM adalah dalam mata uang Rupiah. Penurunan nilai Rupiah terhadap Dolar AS atau mata uang asing lainnya dapat berdampak negatif terhadap TELKOM. Hal tersebut dapat menambah beban kami dalam pembelian perangkat, yang diakibatkan oleh kerugian nilai tukar atas pembayaran hutang dalam mata uang asing, meningkatkan hutang dalam mata uang asing menjadi Rupiah dan berkurangnya penerimaan dividen dalam Dolar AS oleh pemegang saham dan pemegang saham ADS.

Tidak ada jaminan bahwa Rupiah tidak akan terdepresiasi dan terus tidak stabil, kebijakan nilai tukar akan tetap sama, atau Pemerintah akan, atau mampu untuk, bertindak seperlunya untuk menjaga kestabilan, memelihara atau meningkatkan nilai mata uang Rupiah dan tidak akan melakukan tindakan yang akan menurunkan nilai Rupiah, atau apabila salah satu dari tindakan tersebut dilaksanakan akan berhasil. TELKOM juga tidak dapat menjamin bahwa di masa mendatang pengelolaan risiko nilai tukar yang kami lakukan akan berhasil atau kami tidak akan terpengaruh oleh risiko nilai tukar.

PENURUNAN PERINGKAT HUTANG INDONESIA OLEH AGEN PERINGKAT INTERNASIONAL DAPAT MEMILIKI DAMPAK NEGATIF TERHADAP LIKUIDITAS PASAR KEUANGAN INDONESIA DAN KEMAMPUAN ATAU BEBAN PERUSAHAAN INDONESIA, TERMASUK TELKOM, UNTUK MENDAPATKAN DANA

Sampai saat pembuatan Laporan Tahunan ini, hutang jangka panjang Pemerintah dalam mata uang asing mendapat peringkat "BB+" dari Fitch Ratings dan "BB-" dari Standard & Poor's.

Peringkat ini mencerminkan penilaian dari kemampuan Pemerintah untuk membayar kewajiban dan kemampuannya untuk memenuhi komitmen keuangannya. Tidak ada jaminan bahwa peringkat tersebut tidak akan diturunkan di masa mendatang. Selain itu, krisis keuangan global telah menjadi pemicu dari evaluasi peraturan agen peringkat kredit di AS dan negara-negara lainnya. Berbeda atau lebih ketat, peraturan agen peringkat kredit dapat mengalami perubahan, termasuk penurunan atas peringkat TELKOM. Penurunan ini akan memiliki dampak negatif terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia dan kemampuan perusahaan di Indonesia, termasuk TELKOM, untuk mendapatkan dana dengan tingkat suku bunga yang dapat dikelola.

KEGIATAN TERORISME DI INDONESIA DAPAT MENGGUNCANG INDONESIA DAN DAPAT BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP BISNIS, KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL SERTA HARGA SAHAM TELKOM

Sejak tahun 2002, beberapa aksi pemboman yang mengakibatkan kematian dan luka-luka telah terjadi di Indonesia. Termasuk kejadian di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton pada bulan Juli 2009, di Bali pada bulan Oktober 2002 dan Oktober 2005, di Hotel JW Marriot di Jakarta pada bulan Agustus 2003 dan Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada bulan September 2004 dan di kota lain di Indonesia Timur, Tentena yang terletak di Sulawesi pada bulan Mei 2005. Aksi terorisme ini dapat terjadi lagi di masa mendatang. Aksi terorisme dapat menyebabkan ketidakstabilan di Indonesia dan meningkatkan perpecahan di dalam Pemerintahan pada saat mencoba untuk mengevaluasi tanggapan atas ketidakstabilan dan keresahan. Tindak kekerasan yang terjadi akibat dari dan mengarah kepada ketidakstabilan dan kerusuhan di masa lalu akan memiliki dampak negatif terhadap investasi dan keyakinan pada, dan kinerja ekonomi Indonesia, yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, prospek dan harga saham TELKOM.

INDONESIA RAWAN TERHADAP BENCANA ALAM DAN KEJADIAN DI LUAR KUASA TELKOM YANG DAPAT BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP BISNIS DAN HASIL OPERASI

Di beberapa daerah di Indonesia, termasuk area operasional TELKOM, rawan terhadap bencana alam, seperti banjir, halilintar, topan, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, kebakaran dan lain-lain. Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah di dunia ini yang memiliki banyak kegiatan gunung berapi yang aktif karena lokasinya yang berada di pertemuan antara tiga lempengan *lithospheric* utama. Hal ini menyebabkan Indonesia rawan terhadap kegiatan seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi, tsunami atau gelombang pasang. Dari waktu ke waktu, telah terjadi bencana alam yang mengakibatkan kematian, mempengaruhi atau menyebabkan pengungsian banyak orang dan kerusakan pada peralatan TELKOM. Kejadian di masa lalu ini dan kemungkinan terjadi di masa mendatang, dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan, dan menyebabkan kerusakan pada peralatan dan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan dan laba usaha.

Pada tanggal 16 Agustus 2009, Padang dan wilayah sekitarnya diguncang gempa yang mengakibatkan kerusakan aset di Divisi I Sumatera, sehubungan dengan hal tersebut TELKOM telah mengajukan klaim asuransi. Pada tanggal 2 September 2009, sebagian Jawa Barat mengalami gempa. Bencana ini mengakibatkan kerusakan pada aset Perusahaan. Pada tanggal 30 September 2009, telah terjadi gempa bumi di Sumatera Barat yang mengakibatkan gangguan layanan telekomunikasi di beberapa lokasi. Walaupun Tim Pengelolaan Krisis TELKOM telah bekerja sama dengan para karyawan dan mitra untuk mengembalikan layanan secepatnya, gempa bumi tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap aset TELKOM.

Walaupun TELKOM telah melaksanakan rencana kelanjutan usaha dan rencana pemulihan akibat bencana, dan kami juga telah mengasuransikan semua aset guna melindungi dari kerugian yang disebabkan oleh bencana alam atau fenomena lain di luar kekuasaan TELKOM, namun tidak ada jaminan bahwa jaminan asuransi akan cukup untuk mengganti kerugian potensial, atau premi asuransi ini tidak akan bertambah secara signifikan di masa mendatang atau bencana alam tidak akan mengakibatkan gangguan yang material terhadap kegiatan operasional TELKOM. Selanjutnya, gempa bumi dahsyat, gangguan geologi lainnya atau bencana alam yang disebabkan oleh cuaca di kota besar di Indonesia dapat menyebabkan gangguan yang parah terhadap ekonomi Indonesia dan mengurangi keyakinan para investor. Salah satu dari kejadian ini dapat secara material dan memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek TELKOM.

49,0%

Sampai dengan 31 Desember 2009, Telkomsel tetap merupakan penyedia layanan seluler berlisensi nasional terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan seluler mencapai 81,6 juta dan pangsa pasar kurang lebih 49,0% dari pasar seluler dengan mobilitas penuh

RISIKO TERKAIT DENGAN TELKOM DAN ANAK PERUSAHAAN

KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAPAT BERBEDA DENGAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM TELKOM LAINNYA

Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali sebesar 52,47% dari jumlah saham TELKOM yang diterbitkan dan beredar serta memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan bagi hampir seluruh tindakan yang memerlukan persetujuan dari para pemegang saham TELKOM. Pemerintah juga merupakan pemegang satu lembar saham Dwiwarna TELKOM, yang memiliki hak suara khusus dan hak veto untuk hal tertentu, termasuk pemilihan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris TELKOM. Hak veto tersebut dapat juga digunakan untuk menerbitkan saham baru, melakukan amandemen terhadap Anggaran Dasar atau melakukan tindakan penggabungan atau pembubaran perusahaan, menambah atau mengurangi modal dasar atau mengurangi modal ditempatkan atau mem-veto salah satu dari aksi tersebut. Satu atau lebih dari aksi di atas dapat menyebabkan *delisting* saham TELKOM pada bursa tertentu. Melalui Menkominfo, Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur industri telekomunikasi Indonesia. Dimungkinkan adanya situasi kepentingan Pemerintah selaku regulator dan pemegang saham pengendali TELKOM mengalami benturan kepentingan dengan kepentingan bisnis TELKOM. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan memberikan peluang kepada operator telekomunikasi lain yang sahamnya juga dimiliki oleh Pemerintah.

KEGAGALAN SISTEM PADA INFRASTRUKTUR, DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF PADA HASIL OPERASI TELKOM

TELKOM bergantung kepada keandalan jaringan infrastruktur dan perangkat agar dapat memberikan layanannya. TELKOM mengoperasikan sambungan telepon tidak bergerak kabel ("PSTN"), sambungan telepon tidak bergerak nirkabel ("CDMA"), jaringan internet dan jaringan *broadband* serta jaringan seluler. Jaringan terpadu tersebut terdiri dari jaringan akses tembaga, jaringan akses optik, BTS, *switching*, perangkat transmisi radio dan optik, jaringan *IP core*, satelit dan server aplikasi.

Selanjutnya, TELKOM juga bergantung kepada interkoneksi ke jaringan operator telekomunikasi lainnya untuk membawa panggilan dan data dari pelanggan kami ke pelanggan dari operator yang berada di Indonesia atau luar negeri. TELKOM juga bergantung kepada berbagai sistem pengelolaan informasi berteknologi tinggi dan sistem lainnya, seperti penagihan dan sistem pengelolaan hubungan dengan pelanggan, yang memungkinkan TELKOM untuk beroperasi. Jaringan infrastruktur dan perangkat TELKOM, termasuk sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi dan jaringan dari operator lainnya dengan siapa pelanggan berinterkoneksi, sangat rawan terhadap kerusakan atau gangguan operasional yang disebabkan oleh berbagai kejadian seperti gempa bumi, kebakaran, pemadaman listrik, kegagalan peralatan, perangkat lunak jaringan yang tidak sempurna, gangguan pada kabel transmisi atau hal-hal sejenis lainnya.

Walaupun TELKOM menerapkan *Business Continuity Plan* dan *Disaster Recovery Plan* secara komprehensif, tidak ada jaminan bahwa kegagalan material dari jaringan terpadu TELKOM, *server* atau *link* transmisi tidak akan mengakibatkan gangguan pelayanan TELKOM atau ketika gangguan tersebut berasal dari gangguan operasi, bencana alam atau lainnya tidak mengurangi kemampuan TELKOM dalam mendapatkan dan mempertahankan pelanggan dan dapat menimbulkan dampak kerugian kepada hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek TELKOM.

JARINGAN TELKOM, KHUSUSNYA JARINGAN AKSES KABEL, DAPAT MENGHADAPI POTENSI ANCAMAN KEAMANAN, SEPERTI PENCURIAN ATAU VANDALISME YANG DAPAT BERDAMPAK PADA HASIL USAHA TELKOM

Dalam kondisi ekonomi sekarang yang sulit, tingkat ancaman keamanan terhadap peralatan TELKOM telah meningkat, dengan lebih banyak kejadian pencurian dan vandalisme terhadap jaringan TELKOM, khususnya jaringan akses kabel. Untuk mengatasi situasi tersebut, TELKOM telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum setempat serta tokoh masyarakat dan telah melakukan berbagai upaya, khususnya di tempat yang rawan kejahatan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa pada masa yang akan datang jaringan akses kabel TELKOM tidak akan menghadapi masalah keamanan atau jika masalah tersebut berlangsung, waktu dan sumber daya yang berjumlah signifikan tidak akan diperlukan untuk memulihkan peralatan yang rusak atau dicuri, yang akan berdampak kepada beban usaha dan hasil usaha TELKOM.

KEBOCORAN PENDAPATAN DAPAT TERJADI AKIBAT KELEMAHAN INTERNAL DAN MASALAH EKSTERNAL DAN JIKA TERJADI DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA HASIL USAHA TELKOM

Dari waktu ke waktu, TELKOM dapat menghadapi masalah kebocoran pendapatan atau masalah dalam mengumpulkan semua pendapatan yang disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kelemahan kontrol pada level transaksi, kemungkinan terlambatnya proses transaksi dan kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan. TELKOM telah melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran pendapatan melalui peningkatan fungsi kendali pada proses bisnis yang ada saat ini, mengimplementasikan metode *revenue assurance*, menerapkan kebijakan dan prosedur yang memadai, serta mengimplemetasikan sistem informasi atau aplikasi untuk mencegah terjadinya kebocoran pendapatan. Namun demikian hal tersebut tidak menjamin di kemudian hari tidak terjadi risiko kebocoran pendapatan yang jika terjadi akan dapat menimbulkan dampak yang buruk pada hasil usaha TELKOM.

JIKA TELKOM ATAU ANAK PERUSAHAAN MEMBUTUHKAN DANA BAIK UNTUK KEPERLUAN YANG SESUAI MAUPUN YANG TIDAK SESUAI DENGAN LAZIMNYA USAHA, TIDAK ADA JAMINAN BAHWA PEMBIAYAAN TERSEBUT BISA DIDAPATKAN. JIKAPUN TERSEDIA, MUNGKIN DAPAT DIKENAKAN BIAYA TINGGI DAN MUNGKIN DENGAN PERSYARATAN YANG BERAT DAN / ATAU PERJANJIAN YANG MEMBATASI ATAU, JIKA TERJADI PADA ANAK PERUSAHAAN AKAN MEMINTA TELKOM UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN

TELKOM atau anak perusahaan mungkin memerlukan dana tambahan untuk mendukung pertumbuhan bisnis, melaksanakan akuisisi, menghadapi kejadian yang tidak diduga, membangun atau meningkatkan jaringan dan mengembangkan layanan baru atau meningkatkan kualitas layanan. TELKOM mungkin juga perlu melakukan sesuatu untuk menghadapi tekanan persaingan, mengembangkan bisnis pendukung atau teknologi yang tepat, atau memanfaatkan peluang bisnis. TELKOM tidak dapat memastikan bahwa kebutuhan dana tambahan tersebut, pada saat dibutuhkan, akan tersedia sesuai berdasarkan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh TELKOM. Selain itu, suatu fasilitas perjanjian pinjaman, jika ada, dapat mengandung adanya persyaratan pembatasan (“*restrictive covenant*”), yang dapat membatasi fleksibilitas operasional TELKOM untuk keperluan bisnis tertentu. Apabila tidak terdapat ketersediaan dana yang memadai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima oleh TELKOM, maka mungkin TELKOM tidak akan mampu mengembangkan atau meningkatkan layanannya. TELKOM juga mungkin tidak akan mampu memperoleh keuntungan dari peluang bisnis di masa mendatang atau menghadapi tekanan persaingan, semua itu dapat memberi dampak buruk yang material pada bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan TELKOM.

TEKNOLOGI BARU DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK YANG MERUGIKAN PADA KEMAMPUAN TELKOM UNTUK TETAP KOMPETITIF

Kemajuan teknologi telekomunikasi yang cepat dan dinamis dipacu oleh meningkatnya kebutuhan konsumen. Perkembangan teknologi, layanan atau standar baru dapat secara signifikan memengaruhi bisnis TELKOM. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan, TELKOM selalu mengikuti teknologi baru dalam menghadapi persaingan, TELKOM perlu melakukan *upgrade* teknologi ke jaringan generasi baru (*next generation network*) yang dapat menggunakan teknologi dan layanan yang terpadu serta sekaligus meningkatkan efisiensi biaya. Selain itu, TELKOM juga perlu untuk melakukan *upgrade* pada sistem-sistem pelayanan pelanggan untuk mendukung pertumbuhan bisnis baru dan teknologi baru dan layanan baru.

Karena cepat dan dinamisnya perkembangan teknologi saat ini dan mendatang, TELKOM tidak dapat memprediksi secara akurat hasil operasi dan daya saing layanannya. Demikian pula TELKOM tidak dapat menjamin bahwa teknologi yang saat ini digunakan tidak akan segera usang atau selalu mampu mengikuti perkembangan teknologi-teknologi baru di masa mendatang.

TELKOM BEROPERASI DALAM SUATU INDUSTRI YANG HUKUM DAN PERATURANNYA MENGALAMI REFORMASI SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN TERSEBUT DAPAT BERDAMPAK MERUGIKAN PADA BISNIS TELKOM

Peraturan di bidang industri telekomunikasi di Indonesia mengandung sejumlah ketidakpastian. Pada dasarnya, Undang-Undang Telekomunikasi telah mengatur tentang kerangka utama reformasi industri telekomunikasi, antara lain liberalisasi industri, pemberian fasilitas untuk masuknya operator baru dan perubahan struktur kompetisi. TELKOM melihat adanya ketidakpastian dalam peraturan di bidang telekomunikasi di Indonesia, di antaranya berkaitan dengan hal-hal berikut:

- **Regulasi terkait SLJJ**
  Saat ini, Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menyesuaikan jumlah *Point of Charging* ("POC") dan Points of Interconnection ("POI") antara jaringan bergerak dan tetap yang akan mengurangi jumlah kode area, oleh karenanya hal ini dapat menimbulkan risiko pada struktur tarif yang mempunyai dampak terhadap bisnis TELKOM.

- **Regulasi atas interkoneksi dan layanan sirkit sewa**
  Implementasi regulasi interkoneksi berbasis biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 5 Februari 2008 menetapkan skema interkoneksi berbasis biaya dengan panduan berbasis formula untuk semua operator telekomunikasi. Operator telekomunikasi yang menguasai paling sedikit 25% pangsa pasar seperti TELKOM dan Telkomsel, diwajibkan untuk menyampaikan DPI setiap tahunnya untuk mendapat persetujuan dari Pemerintah. Menentukan jenis layanan interkoneksi dengan tarif yang dikenakan untuk setiap layanan. Tinjauan tahunan ini memperbolehkan Pemerintah untuk menurunkan tarif interkoneksi. Operator telekomunikasi non-dominan dengan mudah memberi tahu Pemerintah akan tarif yang mereka kenakan dan dapat menerapkan tarif tersebut kepada pelanggan tanpa harus mendapat persetujuan dari Pemerintah. Perbedaan perlakuan bagi operator dominan dan non-dominan dapat meningkatkan persaingan, memberikan manfaat bagi operator non-dominan, menciptakan peluang bagi pendatang baru, memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk menetapkan tarif yang lebih rendah dan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek TELKOM.

- **Regulasi terkait penataan penggunaan bersama infrastruktur, khususnya menara BTS**
  Pada tanggal 17 Maret 2008 dan 30 Maret 2009 pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang pembangunan dan penggunaan menara BTS bersama. Berdasarkan peraturan tersebut, pembangunan menara BTS harus mendapat ijin dari institusi pemerintah terkait dan juga pemerintah daerah untuk menentukan penempatan dari menara dan lokasi tempat menara tersebut dapat didirikan. Selanjutnya, penyedia telekomunikasi atau penyedia menara yang merupakan pemilik dari menara tersebut dan memiliki kurang dari tiga lisensi sistem atau penyedia menara yang hanya menyewakan kepada satu operator diwajibkan untuk mengijinkan operator telekomunikasi lain untuk menyewa tempat dan memanfaatkan menara telekomunikasi tanpa diskriminasi.

  Peraturan tersebut akan mengakibatkan alokasi menara BTS menjadi semakin rumit, yaitu dalam mendirikan menara baru dan juga untuk tempat yang digunakan bersama, yang dapat menghambat rencana perkembangan Telkomsel dan TELKOM Flexi. Kewajiban untuk berbagi tempat pada menara juga akan memberikan kerugian kepada para pemimpin pasar dan mengijinkan pesaing untuk berkembang secara cepat, terutama di daerah perkotaan karena lokasi baru untuk menara susah untuk di dapat.

  Contohnya adalah pada tahun 2009, terjadi permasalahan mengenai implementasi dari peraturan ini di Kabupaten Badung, Bali dimana sejumlah menara yang dimiliki oleh penyedia menara dimana perangkat BTS TELKOM ditempatkan, dirubuhkan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan operator menara tersebut tidak mendapatkan perpanjangan ijin pendirian menara (IMB). Hal ini telah mengakibatkan kerugian pada BTS TELKOM pada menara tersebut dan TELKOM harus melakukan pemindahan BTS tersebut ke menara lain.

- **Eksistensi BRTI**
  Undang-undang Telekomunikasi mengijinkan Pemerintah untuk mendelegasikan wewenang untuk menjalankan, mengawasi dan mengatur sektor telekomunikasi di Indonesia bagi lembaga independen, namun tetap berpengaruh dalam merumuskan kebijakan dari industri telekomunikasi di Indonesia. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ditunjuk oleh Pemerintah dan tidak ada jaminan bahwa BRTI tidak akan mengambil tindakan yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis, keuangan, pendapatan operasional atau prospek TELKOM.

- **Eksistensi KPPU**
  Komite Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang di masa lalu menyatakan TELKOM melakukan pelanggaran atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, telah menjatuhkan denda pada TELKOM. Lihat "Informasi Keuangan Tambahan - Kasus Hukum Material".

  Tidak ada jaminan bahwa KPPU tidak akan memberikan sanksi terhadap TELKOM atas aktivitas TELKOM di masa yang akan datang dan tidak ada jaminan bahwa tindakan KPPU dapat mengakibatkan dampak yang merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha TELKOM.

PERSAINGAN DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAPAT MEMPENGARUHI BISNIS TELKOM

Pasar Telekomunikasi Indonesia adalah sangat kompetitif dan kompetisi telah berlangsung secara intensif pada tahun-tahun belakangan, khususnya untuk sektor SLI dan SLJJ, seluler, *fixed wireless* dan data internet.

Pada tanggal 14 September 2007, pemerintah mengeluarkan lisensi SLI ke PT Bakrie Telecom, Tbk. yang menggunakan kode akses "009". Lisensi ini menambah jumlah dari penyedia layanan SLI menjadi tiga penyedia sampai dengan akhir tahun 2009.

Pada bulan Mei 2005, Menkominfo mengeluarkan ketentuan tentang penggunaan kode akses tiga digit, yang memungkinkan pelanggan memilih operator SLJJ dan ketentuan ini dimaksudkan untuk mengenalkan kompetisi.

Pada bulan Desember 2007, Menkominfo menyusun tahapan implementasi dari kode akses. TELKOM telah membuka kode akses tiga digit untuk SLJJ pada bulan April 2008 di Balikpapan, dengan berdasarkan persyaratan tertentu TELKOM diharuskan untuk melaksanakan ketentuan tiga digit kode akses tersebut di semua area, sebelum tanggal 27 September 2011. TELKOM juga diwajibkan untuk melaksanakan akses SLJJ pada layanan telepon tidak bergerak kabel dan/atau layanan telepon tidak bergerak nirkabel, kepada operator telekomunikasi lainnya dalam suatu area, jika operator lain tersebut mencapai jumlah batas pelanggan yang dipersyaratkan disuatu area dan setelah BRTI telah melakukan studi. Pada tanggal 16 Desember 2008, Menkominfo mengeluarkan lisensi SLJJ kepada PT Bakrie Telecom sehingga meningkatkan jumlah operator SLJJ menjadi tiga. Sebagai akibat adanya regulasi tersebut, kompetisi telah dimulai dan diharapkan dapat meningkatkan layanan SLJJ untuk mengakses ke berbagai area. Lihat "Regulasi di Bidang Telekomunikasi - Layanan SLJJ dan SLI".

Layanan telepon tidak bergerak kabel TELKOM telah mengalami penurunan dikarenakan meningkatnya jumlah pemakaian seluler dan layanan telepon tidak bergerak nirkabel, dengan tarif yang lebih murah. Di samping juga adanya peningkatan jumlah pelanggan seluler. TELKOM memperkirakan penurunan pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak kabel tersebut akan berlanjut.

Bisnis telepon tidak bergerak nirkabel juga menghadapi persaingan dari semakin banyaknya operator, termasuk Indosat dan PT Bakrie Telecom, Tbk. serta layanan seluler mobile, SMS, layanan VoIP dan e-mail. Selain itu, usaha telepon tidak bergerak nirkabel menghadapi kendala belum tersedia frekuensi *bandwidth* baru dari pemerintah untuk ekspansi, dan di daerah padat penduduk, usaha telepon tidak bergerak nirkabel saat ini menggunakan semua frekuensi *bandwidth* yang telah dialokasikan. Akibatnya, perusahaan mengalami masalah kapasitas suara telepon tidak bergerak nirkabel serta data dan layanan internet di daerah padat penduduk, yang membatasi kemampuan TELKOM bersaing di daerah tersebut.

Persaingan dalam pasar seluler dan telepon tidak bergerak nirkabel masih kuat, dengan operator masing-masing meluncurkan program pemasaran yang semakin menarik dan kreatif. Tarif rata-rata terendah yang diakibatkan persaingan kuat dalam pasar seluler telah membawa pada penurunan ARPU untuk Telkomsel, dengan penurunan ARPU bulanan masing-masing Rp80.000 pada tahun 2007, Rp59.000 pada tahun 2008 dan Rp48.000 pada tahun 2009.

Setelah menetapkan frekuensi 2,3 GHz dan 3,3Ghz untuk layanan BWA, pada 16 Juli 2009 Pemerintah menetapkan tender untuk akses *broadband* nirkabel di frekuensi 2,3 GHz dengan membagi Indonesia menjadi 15 area. TELKOM memperoleh lisensi untuk lima area. Tujuh operator lain yang berlisensi akses *broadband* nirkabel adalah Indosat Mega Media, Internux, First Media, Jasnita Telekomindo, Berca Hardayaperkasa, Konsorsium Rahajasa Media Internet dan WiMAX Indonesia, Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania. Seperti sebelumnya, TELKOM diberi lisensi untuk frekuensi 3,3 GHz dalam tujuh area, Perusahaan memiliki lisensi untuk mengoperasikan akses layanan broadband nirkabel di 12 area.

Tekanan kompetitif dapat berdampak negatif pada pangsa pasar TELKOM dan hasil usaha. Umumnya, TELKOM bersaing dalam tarif, kualitas, jangkauan jaringan, layanan pelengkap dan layanan pelanggan. Meskipun bisnis seluler dan tidak bergerak nirkabel, telah mampu mempertahankan dan memperluas pangsa pasar, tidak ada jaminan bahwa TELKOM tetap mampu mengikuti persaingan atau mempertahankan pangsa pasar TELKOM di semua segmen tempat TELKOM beroperasi tanpa pengaruh yang dapat merugikan.

SATELIT TELKOM MEMILIKI RENTANG HIDUP YANG TERBATAS DAN TERDAPAT RISIKO YANG SUBSTANSIAL UNTUK TELKOM-1 DAN TELKOM-2 KARENA DAPAT MENGALAMI KERUSAKAN ATAU GANGGUAN LAYANAN SELAMA OPERASI BERLANGSUNG DAN SATELIT KEMUNGKINAN DAPAT HILANG ATAU KINERJA YANG BERKURANG YANG DAPAT MEMBERI DAMPAK MERUGIKAN PADA KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN KEMAMPUAN DALAM MENYEDIAKAN LAYANAN TERTENTU

Satelit TELKOM-1 dan TELKOM-2 milik kami memiliki rentang hidup yang terbatas. Sejumlah faktor mempengaruhi rentang hidup dari satelit, termasuk kualitas pembuatannya, daya tahan bagian-bagian komponennya, jumlah bahan bakar, kendaraan peluncur yang digunakan dan cara pemantauan dan pengoperasian satelit. Satelit dapat mengalami kegagalan sebelum batas akhir masa operasionalnya dan perbaikan di orbit mungkin tidak bisa dilakukan. Meskipun telah mengasuransikan satelitnya, namun tidak dapat dipastikan bahwa asuransi tersebut akan memberikan penggantian yang memadai. Hilangnya satelit mungkin dapat mengakibatkan dampak terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan kemampuan untuk menyediakan layanan tertentu, terutama di kawasan Indonesia bagian timur yang tergantung pada luasnya area cakupan satelit untuk jasa telekomunikasi. Sementara itu, TELKOM telah memulai pengembangan TELKOM-3 yang memiliki rentang hidup kerja 15 tahun serta kapasitas

Pasar Telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif dan kompetisi telah berlangsung secara intensif pada tahun-tahun belakangan, khususnya untuk sektor SLI dan SLJJ, seluler, *fixed wireless* dan data internet

transponder lebih tinggi yang akan diluncurkan pada tahun 2011. Meskipun TELKOM mampu untuk memastikan adanya alternatif ketersediaan *bandwith* satelit, apabila terjadi kerusakan pada satelit atau kegagalan peluncuran TELKOM-3, namun demikian mempersiapkan satelit tidak lebih efisien dan kemungkinan akan meningkatkan biaya operasi.

TELKOM BERKEWAJIBAN MEMENUHI STANDAR AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN YANG BERLAKU DI INDONESIA, YANG DALAM BEBERAPA HAL SECARA SIGNIFIKAN BERBEDA DENGAN STANDAR YANG BERLAKU DI NEGARA LAIN

Kemungkinan terdapat lebih sedikit informasi tentang perusahaan publik Indonesia, termasuk TELKOM, dibandingkan dengan apa yang umumnya diungkapkan oleh perusahaan publik di negara-negara yang pasar modalnya lebih mapan. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit disiapkan atas dasar prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang dalam beberapa hal terdapat perbedaan signifikan dari U.S. GAAP. Ringkasan perbedaan antara Indonesia dan U.S. GAAP dapat dilihat dalam Catatan 52 dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.

KEMAMPUAN TELKOM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KEUANGAN KRITIKAL DALAM MENDUKUNG PEMBELANJAAN MODAL

Industri telekomunikasi adalah industri yang padat modal. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menyediakan layanan dan teknologi yang sebanding dan sesuai dengan operator layanan telekomunikasi lainnya, TELKOM harus memperluas dan memodernisasi jaringan, yang akan melibatkan investasi modal yang substansial. TELKOM percaya arus kas internal perusahaan, bila tersedia, sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan operasi dan perencanaan pembelanjaan modal. Bila kami tidak memiliki dana yang cukup atau tidak mampu mendapatkan penyedia lain atau pihak ketiga untuk mendukung pengembangan jaringan, jika TELKOM tidak memiliki cukup dana internal atau tidak dapat memperoleh pembiayaan pihak ketiga atau dari pemasok untuk pemenuhan pembelanjaan modal yang sudah direncanakan, atau membiayai pengeluaran melalui pengaturan pembiayaan lainnya, perusahaan dapat mengalami keterlambatan atau penundaan sebagian belanja modal. Hal ini dapat mencegah perusahaan untuk meningkatkan kapasitas jaringan yang memadai dan pada akhirnya dapat memberikan dampak buruk terhadap pendapatan dan pertumbuhan TELKOM.

KEGAGALAN KAMI DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN TEKNOLOGI ATAU MEMPENGARUHI TRANSFORMASI BISNIS DAN ORGANISASI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP USAHA TELKOM

Industri telekomunikasi ditandai dengan perubahan teknologi yang cepat dan signifikan. Penggabungan dari teknologi, perkembangan di masa mendatang atau aplikasi dari teknologi, layanan, standar baru atau sebagai alternatif akan membutuhkan perubahan signifikan pada bisnis model TELKOM, pengembangan produk baru, penyediaan layanan tambahan dan investasi baru dalam jumlah besar oleh TELKOM.

Guna memelihara dan memperkokoh pertumbuhan dari bisnis kami dan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, saat ini TELKOM melakukan sebuah transformasi untuk menjadi bisnis TIME (Telekomunikasi, Informasi, Media dan *Edutainment*). Transformasi ini terjadi pada saat yang bersamaan dengan perubahan pada infrastruktur dan teknologi, organisasi dan budaya TELKOM.

TELKOM menghadapi sejumlah risiko dan tantangan yang mempengaruhi transformasi bisnis dan organisasi. Contohnya, pengembangan dari penggabungan teknologi telepon tidak bergerak nirkabel yang bersaing dengan bisnis seluler anak perusahaan. Apabila TELKOM gagal untuk menyelaraskan bisnis telepon tidak bergerak nirkabel dan bisnis seluler secara strategis, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap bisnis seluler anak perusahaan.

Selanjutnya, sebagai bagian dari transformasi untuk menjadi bisnis TIME, kami berusaha untuk mengambil dan mengembangkan peluang di bisnis *new wave* yang tergantung atau mengangkat infrastruktur berbasis internet *protocol* dan penggabungan berbasis IP sesuai dengan hasil yang diharapkan. Pada bisnis *new wave* baru, termasuk di dalamnya pita lebar, IT dan layanan korporasi dan konten serta peluang-peluang baru di masa mendatang. Pengembangan dari bisnis baru atau yang sudah ada dalam sebuah lingkungan dengan perubahan teknologi yang pesat membutuhkan investasi modal dan sumber daya yang signifikan serta pengembangan dari kompetensi terkait dalam area yang kami tidak terlalu berpengalaman. Transformasi TELKOM ke bisnis TIME juga membutuhkan langkah-langkah strategis mengenai *merger* dan akuisisi, investasi dan divestasi dan pengelolaan dari anak perusahaan terkait dengan pencarian peluang-peluang baru untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan. Jika TELKOM sebagai perusahaan menggunakan sumber daya manusia dan modal secara tidak efektif dan tidak efisien, gagal dalam memberikan pelatihan yang cukup kepada karyawan dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan, atau melakukan integrasi akuisisi baru ke dalam kegiatan operasional, maka TELKOM akan mengalami kerugian.

Selanjutnya, pengembangan produk dan layanan baru akan membutuhkan biaya yang tinggi dan mungkin akan menambah jumlah pesaing ke dalam pasar. TELKOM tidak dapat memprediksi secara akurat dampak dari perubahan teknologi yang sedang berkembang dan untuk di masa mendatang terhadap kegiatan operasional kami atau daya saing dari layanan kami. TELKOM tidak dapat menjamin bahwa teknologi tidak akan menjadi usang atau mendapat persaingan dari teknologi di masa mendatang, atau TELKOM dapat memperoleh teknologi dan kompetensi baru yang dibutuhkan untuk bersaing dalam kondisi yang telah berubah dan sesuai dengan ketentuan bisnis.

Apabila TELKOM tidak berhasil untuk merubah diri dan mengikuti perkembangan teknologi, maka kinerja usaha perusahaan, daya saing, kepuasan pelanggan dan citra perusahaan akan terpengaruh secara negatif.

"FORWARD-LOOKING STATEMENT" MENGANDUNG UNSUR PROYEKSI YANG MUNGKIN TIDAK TEPAT

Laporan Tahunan ini menyertakan beberapa *forward-looking statement*, termasuk pernyataan tentang target dan proyeksi TELKOM saat ini dalam rangka meningkatkan kinerja operasi dan prospek bisnis masa mendatang. Kalimat seperti: "yakin", "ekspektasi", "antisipasi", "estimasi", "proyeksi", dan kata lain yang sejenis merupakan *forward-looking statement*. Selain itu, seluruh pernyataan selain pernyataan yang bersifat fakta historis yang tercantum dalam dokumen ini adalah *forward-looking statement*. Pernyataan-pernyataan ini merupakan ekspektasi perusahaan. Meskipun TELKOM meyakini ekspektasi yang tertuang dalam *forward-looking statement* bersifat wajar (*reasonable*), namun TELKOM tidak dapat menjamin bahwa ekspektasi akan terbukti kebenarannya. Pernyataan tersebut mengandung sejumlah risiko dan ketidakpastian, termasuk perubahan ekonomi, lingkungan sosial dan politik di Indonesia dan risiko lain yang dijelaskan di "Faktor Risiko". Seluruh *forward-looking statement* baik tertulis maupun lisan yang bersumber dari perusahaan atau orang yang bertindak atas nama perusahaan secara keseluruhan dapat merujuk pada risiko-risiko ini.

TELKOM BERDOMISILI DI INDONESIA DAN PARA INVESTOR MUNGKIN TIDAK BISA MELAKUKAN PROSES HUKUM ATAU MEMAKSAKAN DIKENAKANNYA VONIS PENGADILAN AMERIKA SERIKAT PADA TELKOM

TELKOM adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum di Indonesia, yang menjalankan usaha sesuai kerangka hukum Indonesia yang berlaku bagi perusahaan publik. Dewan Komisaris dan Direksi bertempat tinggal di Indonesia dan sebagian besar dari aset yang bersangkutan berada di luar Amerika Serikat. Oleh karena itu, dimungkinkan bahwa investor tidak dapat mengajukan proses hukum atau menerapkan suatu penafsiran terhadap Perseroan atau pribadi yang bersangkutan di Amerika Serikat termasuk penafsiran berdasarkan undang-undang pasar modal U.S. Federal atau peraturan pasar modal negara bagian di Amerika Serikat, atau berdasarkan hukum lain atau bentuk lain dari peradilan Amerika Serikat.

TELKOM telah memperoleh rekomendasi dari penasihat hukumnya bahwa vonis yang diputuskan di pengadilan-pengadilan Amerika Serikat, termasuk sejumlah

vonis yang ditetapkan berdasarkan undang-undang pasar modal federal Amerika Serikat tidaklah bisa diberlakukan di pengadilan-pengadilan Indonesia, meskipun vonis-vonis tersebut dapat dimasukkan sebagai bukti *non-conclusive* dalam proses hukum di pengadilan Indonesia. Tidak terlalu jelas apakah pengadilan Indonesia akan mengambil keputusan atas perkara tersebut sesuai dengan hukum pasar modal Amerika Serikat. Akibatnya para pemegang ADS atau saham biasa akan diharuskan mengajukan tuntutan pada TELKOM atau para Komisaris dan Direksi di pengadilan Indonesia.

PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF ATAS RISIKO PASAR

UMUM

Perusahaan memiliki risiko pasar yang terutama ditimbulkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing, suku bunga dan risiko harga ekuitas yang berpengaruh terhadap perusahaan. Perusahaan secara umum tidak melakukan lindung-nilai terhadap kewajiban jangka panjang dalam mata uang asing tetapi melakukan lindung-nilai terhadap kewajiban untuk tahun berjalan. Posisi per 31 Desember 2009, deposito berjangka kami dalam mata uang asing mencapai 35% dari kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing. Eksposur Perusahaan terhadap risiko suku bunga dikelola dengan mempertahankan kombinasi antara tingkat suku bunga tetap dan variabel kewajiban dan aset, termasuk aset dengan tingkat suku bunga tetap jangka pendek. Eksposur perusahaan terhadap risiko pasar berfluktuasi sepanjang tahun 2007, 2008 dan 2009 seperti terjadi pada ekonomi Indonesia yang telah terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah dan tingkat suku bunga. Perusahaan tidak dapat memperkirakan apakah kondisi tersebut akan berlanjut selama tahun 2010 atau sesudahnya.

RISIKO NILAI TUKAR

Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama disebabkan oleh kewajiban hutang jangka panjang dan piutang dan hutang yang dibayarkan melalui pencairan program pinjaman Pemerintah. Kewajiban jangka panjang, piutang dan kewajiban yang didenominasikan dalam Dolar AS, Yen Jepang, Euro, Dolar Singapura dan Pound Sterling Inggris. Untuk mengetahui uraian mengenai aset dan kewajiban Perusahaan dalam mata uang asing dijelaskan dalam Catatan 49 pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan. Sebagian dari kewajiban ini kemungkinan akan dikompensasi dengan kenaikan nilai deposito berjangka yang didenominasikan dalam mata uang asing dan kenaikan nilai piutang usaha dalam mata uang asing. Informasi mengenai instrumen dan transaksi yang sensitif terhadap nilai tukar mata uang asing, termasuk kewajiban hutang dalam Dolar AS, Euro, Dolar Singapura, Pound Sterling Inggris dan Yen Jepang dan deposito berjangka serta hutang usaha dan piutang Perusahaan.

Informasi yang disajikan dalam tabel berikut didasarkan pada asumsi kurs jual dan beli Dolar AS dan mata uang lainnya, yang dikutip dari Reuters pada tanggal 31 Desember 2009, untuk aset dan kewajiban moneter. Kurs beli dan jual posisi per 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp9.420 dan Rp9.430 terhadap US$1. Namun, kami yakin asumsi ini dan informasi yang digambarkan dalam tabel berikut mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk fluktuasi atau depresiasi Rupiah dimasa depan.

Komisaris Utama dan Direktur Utama TELKOM sesaat setelah penandatanganan kerja sama dengan Orange, perusahaan telekomunikasi dari Perancis

Tabel Risiko Nilai Tukar

	Saldo per 31 Desember 2009		Jatuh Tempo						
	Mata Uang Asing (dalam jutaan)	Setara Rp (Rupiah dalam jutaan)	2010	2011	2012	2013	2014	setelahnya	Nilai Wajar
			(Rupiah dalam jutaan)						
ASET									
Kas dan Setara Kas									
Dolar AS	185,71	1.747.751	-	-	-	-	-	-	1.747.751
Euro	38,35	518.321	-	-	-	-	-	-	518.321
Dolar Singapura	0,24	1.599	-	-	-	-	-	-	1.599
Yen Jepang	0,22	22	-	-	-	-	-	-	22
Ringgit Malaysia	0,03	95							95
Investasi Sementara									
Dolar AS	7,52	70.834	-	-	-	-	-	-	70.834
Piutang Usaha									
Piutang usaha yang mempunyai hubungan istimewa									
Dolar AS	2,78	26.198							26.198
Pihak Ketiga			-	-	-	-	-	-	
Dolar AS	66,64	627.487							627.487
Dolar Singapura	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Piutang lain-lain			-	-	-	-	-	-	
Dolar AS	0,64	5.994	-	-	-	-	-	-	5.994
Dolar Singapura	0,01	90	-	-	-	-	-	-	90
Pound Sterling Inggris	0,06	916							916
Euro	0,01	198	-	-	-	-	-	-	198
Aset lancar lainnya			-	-	-	-	-	-	
Dolar AS	0,67	6.318							6.318
Uang muka dan aset tak lancar lainnya									
Dolar AS	2,55	23.935	-	-	-	-	-	-	23.935
Rekening *Escrow*			-	-	-	-	-	-	
Dolar AS	4,67	44.004							44.004
KEWAJIBAN									
Hutang usaha yang mempunyai hubungan istimewa									
Dolar AS	6,81	63.981							63.981
Pihak Ketiga									
Dolar AS	453,80	4.268.114	-	-	-	-	-	-	4.268.114
Euro	18,04	243.667							243.667
Dolar Singapura	1,55	10.377	-	-	-	-	-	-	10.377
Pound Sterling Inggris	0,06	873	-	-	-	-	-	-	873
Yen Jepang	0,51	52	-	-	-	-	-	-	52
Franc Swiss	-	15	-	-	-	-	-	-	15
Ringgit Malaysia	0,55	1.501	-	-	-	-	-	-	1.501
Hutang lain-lain									
Dolar AS	0,05	515							515
Beban yang masih harus dibayar									
Dolar AS	10,55	99.468							99.468
Yen Jepang	41,09	4.199	-	-	-	-	-	-	4.199
Uang Muka dari Pelanggan dan Pemasok									
Dolar AS	1,14	10.748	-	-	-	-	-	-	10.748
Hutang jangka Panjang[1]									
Dolar AS	266,50	2.513.002	1.183.553	365.186	181.655	178.073	178.073	426.462	2.454.083
Yen Jepang	11.518,47	1.177.186	78.479	78.479	78.479	78.479	78.479	784.791	1.147.252

(1) Hutang jangka panjang dalam tabel terdiri dari pinjaman dalam mata uang asing, pinjaman penerusan (*two step loans*), kewajiban penggabungan usaha, pinjaman bank jangka panjang, obligasi dan wesel bayar yang masing-masing termasuk kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun.

RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Eksposur Perusahaan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga terutama berasal dari suku bunga mengambang atas hutang jangka panjang. Risiko ini ini terkait dengan pinjaman dalam program pinjaman Pemerintah yang telah digunakan untuk membiayai pengeluaran modal *(capital expenditure*) Perusahaan. Beban bunga mengacu pada tingkat yang diterapkan untuk mata uang Rupiah berdasarkan pada rata-rata enam bulan untuk Sertifikat Bank Indonesia ("SBI") tiga bulanan ditambah 1% atau berdasarkan suku bunga mengambang yang dibebankan oleh kreditur ditambah 5,25% dan untuk hutang dalam mata uang non-Rupiah berdasarkan suku bunga mengambang yang dibebankan oleh kreditur ditambah 0,5%. Lihat Catatan 18 pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.

Instrumen aktual arus kas didenominasikan dalam Rupiah, Dolar AS, Euro dan Yen Jepang, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel. Informasi yang tersaji dalam tabel ditentukan berdasarkan asumsi sebagai berikut: (i) suku bunga tetap atas deposito berjangka dalam Rupiah berdasarkan suku bunga rata-rata yang dibebankan untuk tiga bulan penempatan yang berdampak pada posisi per 31 Desember 2009 yang dilakukan oleh bank tempat deposito tersebut disimpan; (ii) tingkat suku bunga variabel yang didenominasikan untuk kewajiban jangka panjang yang dihitung per 31 Desember 2009 berdasarkan syarat-syarat kontraktual tingkat suku bunga yang menggunakan tingkat suku bunga rata-rata selama enam bulan dan di atas Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu tiga bulanan atau rata-rata deposito berjangka waktu tiga bulan yang dibebankan oleh kreditur. (iii) tingkat suku bunga tetap atas deposito dalam Dolar AS berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata untuk penempatan tiga bulan oleh berbagai institusi pinjaman tempat deposito tersebut disimpan untuk posisi per 31 Desember 2009, dan (iv) nilai sekuritas yang diperdagangkan didasarkan pada nilai sekuritas tersebut untuk posisi per 31 Desember 2009. Namun demikian, asumsi ini dapat berubah di masa depan. Asumsi tersebut berbeda dari tingkat suku bunga yang digunakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan; oleh karena itu jumlah yang disajikan dalam tabel mungkin dapat berbeda dari jumlah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.

Tabel Risiko Tingkat Suku Bunga

	Saldo per 31 Desember 2009			Jatuh Tempo						
	Mata Uang Asing (dalam jutaan)	Setara Rp (Rp dalam jutaan)	Suku Bunga (%)	2010	2011	2012	2013	2014	setelahnya	Nilai Wajar
				(Rp dalam jutaan)						
ASET										
Suku Bunga Tetap										
Kas dan Setara Kas										
Deposito berjangka										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	-	4.998.647	-	4.998.647	-	-	-	-	-	4.998.647
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dolar AS										
Pokok Pinjaman	172,21	1.620.614	-	1.620.614	-	-	-	-	-	1.620.614
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro										
Pokok Pinjaman	35,77	483.243	-	483.243	-	-	-	-	-	483.243
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dolar Singapura										
Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Sementara Tersedia untuk Dijual										
Rupiah	-	288.673	-	288.673	-	-	-	-	-	288.673
Dolar AS	7,52	70.834	-	70.834	-	-	-	-	-	70.834
KEWAJIBAN										
Pinjaman Bank Jangka Pendek										

	Saldo per 31 Desember 2009			Jatuh Tempo						
	Mata Uang Asing (dalam jutaan)	Setara Rp (Rp dalam jutaan)	Suku Bunga (%)	2010	2011	2012	2013	2014	setelahnya	Nilai Wajar
				(Rp dalam jutaan)						
Suku Bunga Variabel										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	-	43.850	-	43.850	-	-	-	-	-	43.850
Bunga	-	3.877	13	3.877	-	-	-	-	-	-
Suku Bunga Tetap										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hutang jangka panjang(1)										
Suku Bunga Variable										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	-	17.634.511	-	5.771.997	4.203.479	2.886.351	2.799.271	1.531.354	442.059	16.546.532
Bunga	-	3.790.326	9	1.506.212	987.680	644.431	368.620	122.777	160.606	-
Dolar AS										
Pokok Pinjaman	0,46	4.295	-	1.718	1.718	859	-	-	-	4.175
Bunga	-	192	3	115	64	13	-	-	-	-
Suku Bunga Tetap										
Rupiah										
Pokok Pinjaman	-	567.943	-	488.050	52.093	27.800	-	-	-	563.367
Bunga	-	60.570	15	52.635	5.483	2.452	-	-	-	-
Dolar AS										
Pokok Pinjaman	259,89	2.450.853	-	1.136.845	353.327	178.073	178.073	178.073	426.462	2.449.909
Bunga	-	359.115	6	125.669	64.448	50.424	39.519	28.755	50.300	-
Yen Jepang										
Pokok Pinjaman	11.518,47	1.177.186	-	78.479	78.479	78.479	78.479	78.479	784.791	1.147.252
Bunga	-	282.931	3	35.879	33.447	31.101	28.581	26.148	127.775	-
Rupiah (Sewa Guna Usaha)										
Pokok Pinjaman	-	302.393	-	107.170	96.703	69.838	25.962	2.720	-	-
Bunga	-	92.701	0,1-0,25	48.816	29.634	11.942	2.201	108	-	-
Dolar AS (Sewa Guna Usaha)										
Pokok Pinjaman	6,15	57.854	-	44.990	10.141	2.723	-	-	-	57.854
Bunga	-	0,29	0,02-0,06	0,22	0,06	0,01	-	-	-	-

(1) Hutang jangka panjang terdiri dari pinjaman yang dikenakan bunga; yaitu pinjaman penerusan (two step loans), wesel bayar dan obligasi, nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan dan hutang bank jangka panjang, masing-masing termasuk kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun.

RISIKO HARGA EKUITAS

Investasi jangka panjang Perusahaan terutama terdiri dari hak minoritas pada ekuitas dari perusahaan swasta Indonesia. Kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat dipengaruhi oleh fluktuasi kondisi ekonomi makro dan sosial seperti tingkat kegiatan ekonomi, fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain, laju inflasi dan tingkat suku bunga.

Tinjauan Operasional TELKOM 2009

TINJAUAN BISNIS

UMUM

TELKOM adalah penyedia utama terbesar layanan telekomunikasi sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia. Kami merupakan pemegang saham mayoritas Telkomsel, yang merupakan operator telepon seluler terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah pelanggan dan total pendapatan.

TELKOM juga menyediakan beragam layanan telekomunikasi lainnya termasuk layanan interkoneksi, jaringan, data dan internet. TELKOM melaporkan pendapatan dalam kategori sebagai berikut:

- Telepon tidak bergerak (yang terdiri dari telepon tidak bergerak kabel dan tidak bergerak nirkabel) dan termasuk sambungan telepon internasional;
- Seluler;
- Interkoneksi;
- Jaringan;
- Data, internet dan jasa teknologi informasi;
- Pola Bagi-Hasil ("PBH"); dan
- Layanan lain (termasuk pendapatan dari layanan direktori telepon dan pengelolaan gedung).

Untuk tujuan pelaporan segmen, Kami memiliki empat segmen: sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lain-lain. Segmen sambungan kabel tidak bergerak menyediakan layanan telepon lokal, sambungan langsung jarak jauh ("SLJJ") dan internasional, dan layanan telekomunikasi lain (seperti sirkit langganan, teleks, transponder, satelit dan *Very Small Aperture Terminal*-VSAT) sebagai jasa pelengkapnya. Segmen sambungan nirkabel tidak bergerak menyediakan layanan telepon lokal dan SLJJ berbasis CDMA di samping layanan telekomunikasi lain yang menggunakan pesawat telepon nirkabel dengan mobilitas terbatas di dalam kode area setempat. Segmen seluler menyediakan layanan telekomunikasi dasar, terutama layanan telekomunikasi telepon seluler. Segmen operasi lainnya yang tidak mewakili lebih dari 10% dari pendapatan TELKOM disajikan sebagai "lain-lain". Segmen tersebut terdiri dari layanan direktori telepon dan layanan pengelolaan gedung.

Pada tahun 2009, tidak ada satu pelanggan pun, selain pelanggan interkoneksi, dan Departemen serta Instansi Pemerintah, yang menyumbangkan lebih dari 1% dari jumlah pendapatan usaha. Bisnis TELKOM tidak memiliki bisnis musiman yang signifikan.

Kami memiliki empat segmen: sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, seluler, dan lain-lain

Layanan Telepon Tidak Bergerak

Layanan telepon tidak bergerak terutama terdiri dari lokal dan SLJJ. TELKOM adalah penyedia utama layanan sambungan telepon tidak bergerak di Indonesia.

a. Layanan Telepon Tidak Bergerak Kabel

Pelanggan telepon tidak bergerak kabel membayar satu kali biaya pasang baru, biaya langganan bulanan dan biaya pemakaian untuk layanan lokal, sambungan langsung jarak jauh, dan internasional. Selain itu, pelanggan disediakan sejumlah fitur yang mempunyai nilai tambah, seperti pesan-suara atau (*voicemail*) dan layanan informasi, serta tagihan dan bantuan direktori.

Sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mengelola cabutan (*churn*) pelanggan telepon tidak bergerak kabel, pada tahun 2009 TELKOM meluncurkan"*fixed business improvement program*", promosi ini menawarkan kepada pelanggan telepon tidak bergerak kabel berupa paket pembayaran tetap bulanan untuk panggilan lokal dan SLJJ sampai dengan jumlah panggilan tertentu. Paket biaya tetap ini ditawarkan oleh TELKOM kepada setiap pelanggan berdasarkan sejarah jumlah pemakaian pelanggan dimaksud.

b. Layanan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel

Dengan menggunakan teknologi telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA yang meminimalisir kebutuhan untuk menggelar kabel sehingga memungkinkan pengembangan jaringan telepon dengan cepat dan mengurangi belanja modal per sambungan, TELKOM menawarkan layanan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA dengan mobilitas terbatas (di dalam kode area lokal) "TELKOMFlexi" untuk pesawat telepon tidak bergerak dan genggam. Pelanggan TELKOMFlexi dapat menikmati semua fitur seperti yang ditawarkan oleh layanan seluler, kecuali untuk *roaming* ke kode area lain serta *roaming* internasional.

Pelanggan TELKOMFlexi dapat memilih layanan pascabayar atau prabayar. Pelanggan pascabayar membayar biaya aktivasi satu kali, biaya langganan bulanan dan biaya pemakaian untuk layanan lokal, SLJJ, dan internasional. Biaya-biaya ini secara umum sama seperti yang dikenakan kepada pelanggan sambungan telepon tidak bergerak kabel.

Pelanggan TELKOMFlexi dapat memanfaatkan sejumlah fitur bernilai tambah, termasuk SMS, protokol aplikasi nada dering, pesan suara dan layanan informasi seperti tagihan, bantuan direktori, dan layanan konten lainnya. Pendapatan dari layanan-layanan ini dilaporkan sebagai "Layanan Internet dan Data".

Pada bulan Juli 2009, untuk merespon permintaan pasar akan akses internet tanpa batas, TELKOM meluncurkan "FlexiNet Unlimited" yang memungkinkan pelanggan melakukan akses internet tanpa batas, hanya dengan membayar Rp2.500 per hari, Rp15.000 per minggu atau Rp50.000 per bulan. FlexiNet Unlimited difokuskan untuk pelanggan yang memerlukan layanan *mobile data*. Di samping harga yang terjangkau tersebut, layanan ini juga dapat dipergunakan di seluruh kota di Indonesia yang terlayani oleh cakupan TELKOMFlexi.

Pada bulan September 2009, menyambut bulan Ramadhan, TELKOM meluncurkan terminal handset baru dengan nama FlexiMuslim, yang menyediakan aplikasi Quran dan akses terhadap konten-konten islami, seperti pembelajaran pembacaan Al-quran, arah kiblat, dan waktu adzan sholat. Selain itu, Flexi muslim juga dibuat untuk memenuhi permintaan pelanggan terhadap telepon genggam yang memiliki kemampuan layanan *multitasking*.

c. Layanan Seluler

TELKOM menyediakan layanan telepon seluler melalui Telkomsel yang 65% sahamnya dimiliki oleh TELKOM. Pada tahun 2009, pelanggan seluler Telkomsel (prabayar dan pascabayar) meningkat 25% dari 65,3 juta pada akhir tahun 2008 menjadi 81,6 juta pada akhir 2009. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Telkomsel dari berbagai sumber, Telkomsel memperkirakan pangsa pasarnya di Indonesia mencapai 49% sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2009, sementara pada posisi tanggal 31 Desember 2008 diperkirakan sebesar 47%.

Telkomsel menyediakan layanan seluler GSM dan 3G di Indonesia dengan jaringan sendiri dan secara internasional melalui jaringan yang dioperasikan oleh 380 mitra *roaming* internasional di 197 negara pada akhir tahun 2009. Pada tanggal 31 Desember 2009, Telkomsel memiliki jaringan terbesar dibandingkan dengan operator-operator seluler lainnya di Indonesia, yang menjangkau hingga lebih dari 95% dari total populasi Indonesia, termasuk seluruh kota/kabupaten di Indonesia dan seluruh kecamatan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera.

Telkomsel menyediakan pilihan layanan pascabayar kepada pelanggannya dengan merek dagang "kartuHALO", demikian juga dengan layanan prabayar dengan merek dagang "*sim*PATI" dan "Kartu As". Pada bulan Maret 2007, Telkomsel meluncurkan HALOhybrid, produk pascabayar yang menawarkan layanan pascabayar dan prabayar dalam satu kartu SIM. Pelanggan HALOhybrid dapat menikmati manfaat kartu ini karena dapat secara bebas menentukan batas penggunaan bulanan (mulai dari Rp100.000 sampai Rp3.000.000), tarif yang fleksibel, dapat diisi ulang (ketika pelanggan telah mencapai batas penggunaan), SMS gratis, dan pemantauan penggunaan. Pada bulan Agustus 2009, Telkomsel menawarkan program bebas (dari menit ke-6 sampai menit ke-10), setelah pemakaian lima menit untuk penggunaan antar sesama pelanggan pascabayar Telkomsel, dengan pengenaan yang berulang.

Pada bulan Mei 2008, Telkomsel menjadi operator pertama di Asia Tenggara yang memperkenalkan layanan Blackberry® prabayar. Aktivasi via SMS diluncurkan pada

saat yang sama, sebagai yang pertama kali di dunia. Sampai dengan akhir tahun 2009, pelanggan Blackberry® telah mencapai jumlah 250.000. Pada bulan September 2009, Telkomsel menawarkan paket tak terbatas untuk pelanggan kartuHALO yang menggunakan layanan TelkomselFlash. Tabel berikut menyajikan paket promosi TelkomselFlash:

Tabel Modem Gratis untuk Paket *Unlimited*

Paket	Tarif Bulanan	Kecepatan Akses	Batas Penggunaan	Batas Kecepatan	Berlaku Untuk
Basic	Rp250.000	sampai dengan 256 Kbps	500 MB	sampai dengan 64 Kbps	kartuHALO
Advance	Rp350.000	sampai dengan 512 Kbps	1 GB	sampai dengan 64 Kbps	
Pro	Rp525.000	sampai dengan 3,6 Mbps	2 GB	sampai dengan 128 Kbps	

Tabel Paket *Unlimited*

Paket	Tarif Bulanan	Kecepatan Akses	Batas Penggunaan	Batas Kecepatan	Berlaku Untuk
Basic	Rp125,000	sampai dengan 256 Kbps	500 MB	sampai dengan 64 Kbps	kartuHALO
Advance	Rp225.000	sampai dengan 512 Kbps	1 GB	sampai dengan 64 Kbps	
Pro	Rp400.000	sampai dengan 3,6 Mbps	2 GB	sampai dengan 128 Kbps	

Pada bulan Mei 2009, Telkomsel menawarkan tarif promosi untuk penggunaan layanan SLI TELKOM (SLI 007). Dengan menekan 007 (kode negara) (kode area) (nomor tujuan) dari telepon genggam mereka, pelanggan Telkomsel dapat menikmati tarif khusus.

Pada bulan Agustus 2009, Telkomsel memperkenalkan program baru bagi pelanggan HALOhybrid yang berlaku untuk jangka waktu dari 5 Agustus 2009 sampai dengan 31 Januari 2010. Program baru dimaksud adalah gratis pemakaian selama 5 menit (dari menit ke-6 menuju menit ke-10) bagi pelanggan pascabayar (sesama Telkomsel), dan berulang untuk pemakaian 5 menit berikutnya.

Pada bulan September 2009, Telkomsel menawarkan program promosi harian yang dikenal dengan *sim*PATI Talk Mania dimana, pelanggan *sim*PATI dapat menikmati gratis panggilan selama 1 jam dengan hanya membayar hanya Rp2.000 atau Rp3.000 yang berlaku dari jam 01.00 sampai dengan jam 17.00.

Pada bulan November 2009, dengan adanya tambahan spektrum frekuensi 5MHz, Telkomsel meluncurkan Flash generasi baru bersamaan dengan peningkatan teknologi jaringan dari HSDPA 7,2 Mbps menjadi teknologi HSPA+ dengan kecepatan hingga 21 Mbps. Teknologi ini memungkinkan pelanggan mendapatkan kecepatan akses internet maksimum dan bonus lainnya.

Pada bulan Mei 2008, Telkomsel menjadi operator pertama di Asia Tenggara yang memperkenalkan layanan Blackberry® prabayar. Aktivasi via SMS diluncurkan pada saat yang sama, sebagai yang pertama kali di dunia. Sampai dengan akhir tahun 2009, pelanggan Blackberry® telah mencapai jumlah 250.000

Telkomsel juga meluncurkan paket perdana *sim*PATI edisi baru dengan sebutan *sim*PATI M@X pada bulan November 2009, yang menggantikan *sim*PATI PeDe dengan menawarkan bonus menarik yang bernilai lebih dari Rp100.000. Dengan harga pemakai akhir Rp10.000, *preloaded credit*, bonus isi ulang (minimum Rp20.000) serta bonus-bonus lainnya.

Pada bulan Desember 2009, Tekomsel memperkenalkan Kartu As edisi baru yang menawarkan berbagai layanan bagi pelanggan dengan cara mengetik nomor akses *100#. Pelanggan dikenakan tarif Rp1.000 per layanan, seperti "Menelepon kapan saja", "Bicara 30 menit" (ke sesama pelanggan Telkomsel), 50 atau 500 SMS ke sesama pelanggan Telkomsel (tergantung waktunya), Akses data Internet 50Kb, *Facebook & chatting* seharian, Panggilan Internasional (VoIP 01052) untuk pemakaian 5 menit, dan lain-lain.

Pada bulan September 2006, Telkomsel meluncurkan layanan 3G di Jakarta untuk para pelanggan pascabayar dan prabayarnya. Layanan ini memberikan berbagai fitur termasuk *video calls, mobile television, mobile download* dan akses data berkecepatan tinggi. Inovasi lain adalah layanan *video surveillance* dan layanan pemantauan lalu-lintas yang memungkinkan penggunanya memantau berbagai hal pada telepon genggam mereka, seperti memantau kondisi lalu lintas jalan di lokasi tertentu, suatu obyek atau suatu acara yang ditentukan sebelumnya, dan lain-lain.

Tabel berikut ini menunjukkan angka-angka pelanggan Telkomsel pada periode tertentu:

Tabel Angka-Angka Pelanggan Telkomsel

	Untuk tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember,		
	2007	2008	2009[1]
Pelanggan Seluler			
kartuHALO (Pascabayar)	1.913.130	1.940.372	2.034.693
*sim*PATI (Prabayar)	23.985.823	43.032.744	57.992.556
Kartu As (Prabayar)	21.991.186	20.326.875	21.616.283
Deaktivasi[2]			
kartuHALO (Pascabayar)	355.839	445.981	418.100
*sim*PATI (Prabayar)	36.417.396	39.156.518	45.500.291
Kartu As (Prabayar)	26.906.156	27.958.772	24.229.934
Rata-rata Bulanan Tingkat *churn*[3]			
kartuHALO (Pascabayar)	1,70%	2%	2%
*sim*PATI (Prabayar)	13,80%	10%	7%
Kartu As (Prabayar)	12,80%	11%	10%
ARPU[4]			
kartuHALO (Pascabayar) (Rp'000)	264	216	214
*sim*PATI (Prabayar) (Rp'000)	84	63	48
Kartu As (Prabayar) (Rp'000)	57	37	31

1. Pada tahun 2009, pelanggan prabayar dapat membeli kartu SIM seharga Rp10.000 dan *voucher* isi ulang seharga Rp5.000 sampai Rp1.000.000.
2. Termasuk deaktivasi/pemutusan sukarela atau terpaksa.
3. Rata-rata pemutusan bulanan selama setahun dihitung dengan cara menambahkan tingkat pemutusan tiap bulan dalam satu tahun, kemudian dibagi 12. Tingkat pemutusan bulanan dihitung dengan cara membagi jumlah pemutusan selama sebulan dengan jumlah pelanggan pada awal bulan.
4. *Average Revenue per User* (rata-rata pendapatan per pengguna) dihitung dengan menjumlahkan ARPU tiap bulan dalam setahun dan dibagi 12. ARPU dihitung dengan cara membagi total pendapatan seluler baik pascabayar maupun prabayar (kecuali *fee* koneksi, pendapatan interkoneksi, pendapatan *roaming* internasional dari *non*-pelanggan dan potongan dealer) tiap bulan dengan rata-rata jumlah pelanggan pascabayar dan prabayar pada bulan bersangkutan.

Kerja Sama Operasi ("KSO")

Sejak akuisisi mitra KSO terakhir, yaitu KSO VII pada bulan Oktober 2006, TELKOM menghentikan kerja sama operasi dengan mitra KSO.

Layanan Interkoneksi

TELKOM menerima pendapatan dari operator telekomunikasi lain yang menyediakan layanan telepon tidak bergerak, seluler, sambungan langsung internasional, dan layanan lain yang berinterkoneksi dengan jaringan TELKOM.

Pada bulan Desember 2006, sebagai hasil dari pelaksanaan pola interkoneksi berbasis-biaya, TELKOM melakukan perubahan pada seluruh perjanjian interkoneksi dengan para operator jaringan domestik lainnya dan menyesuaikan dengan pola interkoneksi berbasis biaya. Perubahan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2007. Pada bulan Desember 2007, TELKOM dan seluruh operator jaringan menandatangani kesepakatan interkoneksi baru yang mengganti seluruh perjanjian interkoneksi antara TELKOM dengan operator jaringan lain, termasuk amandemen yang ditandatangani pada bulan Desember 2006. Kesepakatan baru ini menekankan persyaratan DPI TELKOM. Pada tanggal 5 Februari 2008, Pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur penyesuaian tarif mengacu pada tarif interkoneksi berbasis biaya yang diperkenalkan pada tanggal 1 Januari 2007. Berdasarkan regulasi itu, TELKOM dan Telkomsel bersama 10 penyedia layanan telekomunikasi lainnya di Indonesia wajib menyesuaikan tarif interkoneksi sesuai skema baru paling lambat 1 April 2008. Pada tanggal 11 April 2008, Pemerintah menyetujui DPI dari operator dominan (operator yang memiliki pangsa pasar sedikitnya 25%), termasuk TELKOM dan Telkomsel, untuk mengganti DPI yang sebelumnya. Kami tidak melakukan penyesuaian tarif interkoneksi di tahun 2009.

Volume trafik interkoneksi TELKOM di sajikan pada tabel berikut ini untuk periode yang telah ditetapkan:

Tabel Volume Trafik Interkoneksi TELKOM

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,				
	2005	2006	2007	2008	2009
	(juta menit)				
Interkoneksi Telepon Seluler[1]					
Menit masuk berbayar	4.863,60	5.162,20	4.970,00	6.626,90	5.748,50
Menit keluar berbayar	7.514,90	7.704,20	7.251,80	5.879,40	4.622,90
Interkoneksi Sambungan Tidak Bergerak[2]					
Menit masuk berbayar	612,3	864,9	923,5	1.362,30	1.547,80
Menit keluar berbayar	493,5	965,2	1.437,10	1.988,50	1.910,60
Interkoneksi Telepon Satelit					
Menit masuk berbayar	10,7	9,3	5,1	3,2	1,80
Menit keluar berbayar	6,5	4,5	2,3	1,6	1,00
Interkoneksi Internasional[3]					
Menit masuk berbayar	596,4	861,9	1.208,50	1.409,80	1.475,40
Menit keluar berbayar	185,5	177,6	162,9	165,5	160,40
Total					
Menit masuk berbayar	6.083,0	6.898,3	7.107,2	9.402,1	8.773,6
Menit keluar berbayar	8.200,4	8.851,5	8.854,1	8.035,0	6.695,0

(1) Termasuk interkoneksi dengan Telkomsel.

(2) Menit interkoneksi telepon tidak bergerak mencerminkan interkoneksi dengan jaringan PT Bakrie Telecom (semula PT Radio Telepon Indonesia atau Ratelindo), PT Batam Bintan Telekomunikasi, Indosat mulai tahun 2004, dan Mobile 8 Phone mulai tahun 2008.

(3) Menit interkoneksi internasional didapat dari interkoneksi dengan jaringan internasional Indosat mulai tahun 2004, dan juga didapat dari interkoneksi dengan Jaringan Internasional Bakrie Telecom mulai tahun 2009, (panggilan masuk dan keluar juga menggunakan TIC-007).

Menit Berbayar Telkomsel tahun 2005 - 2009 sebagai berikut:

Tabel Menit Berbayar Telkomsel tahun 2005 - 2009

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,				
	2005	2006	2007	2008	2009
	(juta menit)				
Menit masuk berbayar	2.709,10	2.914	2.663,20	3.637,60	3.379,64
Menit keluar berbayar	4.251,50	4.546	4.188,00	3.270,60	2.611,90

Layanan Jaringan

TELKOM menyediakan sewa transponder satelit, siaran satelit, VSAT, distribusi audio, sirkit langganan berbasis satelit dan teresterial. Pelanggan untuk layanan jaringan TELKOM mencakup para pelaku bisnis dan operator telekomunikasi lain. Pelanggan dapat mengadakan perjanjian untuk layanan singkat seperti siaran beberapa menit atau perjanjian untuk jangka waktu yang lama untuk periode layanan satu sampai lima tahun.

Layanan Data dan Internet

TELKOM menyediakan layanan SMS untuk telepon tidak bergerak kabel, telepon tidak bergerak nirkabel dan telepon seluler, layanan akses internet *dial-up* dan *broadband*, layanan jaringan data (termasuk VPN *frame relay* dan IP VPN), layanan VoIP untuk panggilan internasional, layanan sambungan ISDN, dan layanan multimedia lainnya.

Layanan premium akses internet pra bayar *dial-up*, TELKOMNet Instan, tersedia di semua kota di Indonesia. Sebanyak 1,5 miliar menit TELKOMNet Instan digunakan pada tahun 2009 oleh sekitar 448 ribu pelanggan. Jumlah pelanggan tersebut berkurang sebanyak 22,0% dibanding tahun sebelumnya.

TELKOM juga menyediakan layanan internet pita lebar yang dioperasikan pada kabel tembaga yang telah ada dan menggunakan teknologi ADSL. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, sekitar 1.145 ribu pelanggan internet pita lebar, meningkat sebesar 77,5% dari tahun sebelumnya.

VoIP adalah layanan telepon murah untuk melakukan panggilan internasional. "TELKOMGlobal-01017" adalah layanan panggilan internasional VoIP premium, sedangkan layanan panggilan internasional standar bernama "TELKOMSave". Kedua layanan tersebut dapat diakses dengan memutar satu awalan khusus untuk panggilan internasional. TELKOM melakukan kesepakatan dengan delapan *carrier* global (empat *carrier* untuk panggilan ke luar, satu untuk panggilan ke dalam, dan tiga untuk panggilan ke luar dan ke dalam), untuk menyediakan akses ke seluruh dunia bagi pelanggan kami. Semua *carrier* global itu adalah para *wholesaler* yang memperbolehkan TELKOM mengakses jaringan internasional mereka.

Terdapat sebanyak 275,9 juta menit panggilan *outgoing* (menggunakan TELKOMSave dan TELKOMGlobal-01017) dan panggilan *incoming* VoIP (dari para mitra global TELKOM), selama tahun 2009. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 43,2 juta menit, atau 18,6%, pada panggilan VoIP dibandingkan tahun

Tujuan utama dari transformasi NGN adalah pengurangan biaya operasional (opex) dan belanja modal (capex)

2008. Panggilan *incoming* menurun 68,9% dari 63,0 juta menit pada tahun 2008 menjadi 19,6 juta menit pada tahun 2009. Namun demikian, panggilan *outgoing* VoIP meningkat 51,0% dari 169,7 juta menit pada tahun 2008 menjadi 256,3 juta menit pada tahun 2009.

Informasi tentang layanan-layanan VoIP TELKOM dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel Informasi Layanan VoIP TELKOM

Jenis	TELKOMGlobal-01017	TELKOMSave
Dial	Satu Tahap	Dua Tahap
Kualitas/Teknologi	VoIP Premium	VoIP Standar

Pola Bagi Hasil (PBH)

TELKOM mengadakan perjanjian terpisah dengan beberapa penanam modal berdasarkan pola bagi hasil untuk mengembangkan telepon tidak bergerak, telepon umum kartu (termasuk pemeliharaannya), dan fasilitas-fasilitas pendukung telekomunikasi terkait. Untuk rincian lebih lanjut tentang PBH, lihat Catatan 45 pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan.

Layanan Lain

TELKOM juga menyediakan beragam layanan seperti: layanan buku petunjuk telepon melalui anak perusahaan, Infomedia; dan televisi kabel dan berlangganan serta layanan terkait (dengan 178.559 pelanggan sampai dengan 31 Desember 2009) melalui anak perusahaan, Indonusa.

INFRASTRUKTUR JARINGAN

JARINGAN TELEPON TIDAK BERGERAK DAN *BACKBONE*

a. Jaringan telepon tidak bergerak kabel

Jaringan telepon tidak bergerak kabel TELKOM tersusun dari hirarki sentral telepon lokal sampai sentral jarak jauh. Lokasi pelanggan tersambung ke sentral telepon lokal melalui fasilitas yang dinamakan *outside plant* yaitu sambungan kabel (serat optik dan tembaga) dan penghubung transmisi lokal nirkabel serta fasilitas-fasilitas distribusi yang menyatukan mereka. Dengan fasilitas teknologi digital di sentral telepon lokal dan jarak jauh, TELKOM telah meningkatkan efisiensi jaringan, kinerja, dan fleksibilitas *routing* panggilan.

Sampai dengan 31 Desember 2009, TELKOM memiliki 8,4 juta sambungan telepon tidak bergerak kabel yang masih berfungsi di semua divisi. Sejalan dengan rencana indukInfrastruktur, Layanan

dan Operasional (INSYNC2014 tahun 2008-2014), TELKOM melakukan transisi dari jaringan *legacy* ke NGN. Transformasi ini, yang dilakukan secara bertahap, mencakup infrastruktur, metode layanan *new wave* dan metode operasi jaringan termasuk modernisasi jaringan infrastruktur ke infrastruktur IP. Tujuan utama dari transformasi NGN adalah pengurangan biaya operasional (opex) dan belanja modal (capex) untuk penggunaan *bandwidth* yang tersedia dengan lebih efisien sehingga dapat menawarkan layanan baru, layanan yang bervariasi, arsitektur jaringan, dan merampingkan peralatan. Target kami untuk menjadi penyedia layanan NGN lengkap pada tahun 2014.

Tabel berikut menyajikan data terkait dengan jaringan telepon tidak bergerak sejak 2005:

Tabel Data Jaringan Telepon Tidak Bergerak

Statistik Operasi	Pada posisi dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember,				
	2005(1)	2006(2)	2007(2)	2008(2)	2009(2)
Kapasitas sentral					
Divisi-divisi Non-KSO	9.138.167	10.439.658	10.732.304	11.038.818	11.094.063
Divisi-divisi KSO (7)	1.045.366	–	-	-	-
Total	10.183.533	10.439.658	10.732.304	11.038.818	11.094.063
Sambungan terpasang					
Divisi-divisi Non-KSO	8.497.255	9.634.910	9.704.576	9.838.537	10.013.565
KSO Divisions (7)	998.901	–	-	-	-
Total	9.496.156	9.634.910	9.704.576	9.838.537	10.013.565
Sambungan terpakai(3)					
Divisi-divisi Non-KSO	7.787.693	8.709.211	8.684.888	8.629.783	8.376.793
Divisi-divisi KSO (7)	898.438	–	-	-	-
Total	8.686.131	8.709.211	8.684.888	8.629.783	8.376.793
Sambungan berbayar					
Divisi-divisi Non-KSO	7.413.769	8.328.179	8.324.197	8.302.730	8.038.294
Divisi-divisi KSO(7)	869.631	–	-	-	-
Total	8.283.400	8.328.179	8.324.197	8.302.730	8.038.294
Telepon umum					
Divisi-divisi Non-KSO	373.924	381.032	360.691	327.053	338.499
Divisi-divisi KSO(7)	28.807	–	-	-	-
Total	402.731	381.032	360.691	327.053	338.499
Sambungan sewa sirkit terpakai					
Divisi-divisi Non-KSO(4)	11.333	7.476	6.338	6.084	4.273
Divisi-divisi KSO(7)	575	–	-	-	-
Total	11.908	7.476	6.338	6.084	4.273
Produksi pulsa telepon tidak bergerak kabel (juta)(5)					
Divisi-divisi Non-KSO	57.926	64.012	75.451	62.940	54.186
Divisi-divisi KSO(7)	9.743	–	-	-	-
Total	67.669	64.012	75.451	62.940	54.186
Tingkat kegagalan(6)					
Divisi-divisi Non-KSO	3,8	3,6	3,8	3,5	3,1
Divisi-divisi KSO(7)	2,0	–	-	-	-
Gabungan	3,6	3,6	3,8	3,5	3,1

(1) Tahun 2005, Divisi Non-KSO adalah Divisi I, II, III, IV, V dan VI, sedangkan Divisi KSO adalah Divisi VII.
(2) Sejak Oktober 2006, Divisi-divisi Non-KSO adalah Divisi I, II, III, IV, V, VI dan VII.
(3) Sambungan yang berfungsi terdiri dari sambungan pelanggan dan sambungan telepon umum, juga termasuk sejumlah sambungan yang kami operasikan untuk pola bagi hasil.
(4) Tidak termasuk sirkit sewa untuk jaringan dan bisnis multimedia TELKOM.
(5) Terdiri dari pulsa panggilan lokal and SLJJ, tidak termasuk telepon umum dan telepon seluler.
(6) Kesalahan per 100 kali sambung setiap bulan.
(7) Divisi yang tergolong KSO berbeda dari tahun ke tahun karena akuisisi di tahun tertentu. Lihat catatan kaki (1) to (3) di atas.

Tabel berikut menyajikan jaringan telepon tidak bergerak di tiap divisi sampai dengan 31 Desember 2009:

Tabel Jaringan Telepon Tidak Bergerak di Tiap Divisi

	Divisi I (Sumatera)	Divisi II (Jakarta)	Divisi III (Jawa Barat dan Banten)	Divisi IV (Jawa Tengah)	Divisi V (Jawa Timur)	Divisi VI (Kalimantan)	Divisi VII (Indonesia Timur)	Total
Kapasitas sentral lokal	5.284.789	8.921.855	4.715.035	3.539.831	8.305.781	1.502.605	2.217.798	34.487.694
Total sambungan terpakai	2.744.101	6.410.837	1.940.326	1.978.867	6.905.510	1.259.081	2.277.128	23.515.850
Kapasitas penggunaan (%)[1]	51,92	71,86	41,15	55,90	83,14	83,79	102,68	68,19
Sambungan terpasang[2]	5.601.277	9.794.264	4.513.160	3.854.559	8.622.556	2.105.107	3.176.195	37.667.118
Tingkat utilisasi (%)[1]	49,0	65,5	43,0	51,3	80,1	59,8	71,7	62,4
Pegawai[3]	2.262	4.250	971	1.166	1.470	518	1.707	12.344
Populasi (juta)[4]	49,8	9,0	52,7	35,8	36,2	13,8	34,8	232,1
Tingkat penetrasi Telekomunikasi Indonesia (%)[5]	5,5	71,6	3,7	5,5	19,1	9,1	6,5	10,1

(1) Penggunaan kapasitas (sambungan terpakai/kapasitas sentral) dan tingkat penggunaan (sambungan terpakai /sambungan terpasang) terdiri dari sambungan telepon tidak bergerak kabel dan nirkabel. Tingkatannnya dapat melebihi 100% karena kapasitas pertukaran sambungan telepon tidak bergerak nirkabel (MSC and BTS) dihitung dengan asumsi bahwa alokasi trafik percakapan per pelanggan mencapai 60 mE (mili Erlang).

(2) Total mencakup 515.072 BTS kapasitas sambungan telepon tidak bergerak dalam skema PBH.

(3) Tidak termasuk pegawai dari Kantor Perusahaan dan divisi-divisi pendukung TELKOM, seperti Divisi Infratel, Divisi TELKOMFlexi, Divisi Multimedia, dan TELKOM Construction Center(TCC).

(4) Sumber: jumlah indeks dari Badan Pusat Statistik Indonesia (angka perkiraan).

(5) Penetrasi TELKOM berdasarkan perkiraan populasi.

Compact Mobile Base Station (COMBAT), yaitu *mobile* BTS miliki Telkomsel yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai kebutuhan.

b. Jaringan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel

Jaringan telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM terdiri dari *Mobile Switching Center* ("MSC") yang dikoneksikan dengan setiap sentral trunk lainnya. Setiap MSC dihubungkan dengan *Base Station Sub System* ("BSS") yang terdiri dari *Base Station Controller* ("BSC") dan *Base Transceiver Station* ("BTS"). Semuanya menghubungkan perangkat telepon genggam dan terminal telepon tidak bergerak nirkabel pelanggan ke jaringan telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM.

Jumlah sambungan aktif telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM bertambah dari 12,7 juta pada 31 Desember 2008 menjadi sekitar 15,1 juta pada 31 Desember 2009.

Tabel berikut menyajikan data jaringan telepon tidak bergerak nirkabel sejak tahun 2005:

Tabel Data Jaringan Telepon Tidak Bergerak Nirkabel Sejak Tahun 2005

	Sampai dengan akhir tahun, 31 Desember				
	2005[1]	2006[2]	2007[2]	2008[3]	2009[3]
Kapasitas sentral (MSC)[5]					
Divisi-divisi Non-KSO	2.687.348	6.655.891	12.831.841	15.885.020	23.393.631
Divisi-divisi KSO[5]	329.708	–	–	-	–
Total	3.017.056	6.655.891	12.831.841	15.885.020	23.393.631
Sambungan terpasang (BTS) [5]					
Divisi-divisi Non-KSO	3.332.893	7.698.039	9.383.924	19.861.324	27.653.553
Divisi-divisi KSO[5]	340.568	–	–	-	–
Total	3.673.461	7.698.039	9.383.924	19.861.324	27.653.553
Sambungan terpakai[3]					
Divisi-divisi Non-KSO	3.750.821	4.175.853	6.362.844	12.725.425	15.139.057
Divisi-divisi KSO[5]	311.046	–	–	-	–
Total	4.061.867	4.175.853	6.362.844	12.725.425	15.139.057
Sambungan berbayar					
Divisi-divisi Non-KSO	3.739.095	4.163.284	6.335.452	12.698.827	15.115.892
Divisi-divisi KSO[5]	311.046	–	–	-	–
Total	4.050.141	4.163.284	6.335.452	12.698.827	15.115.892
Telepon umum					
Divisi-divisi Non-KSO	11.726	12.569	27.392	26.598	23.165
Divisi-divisi KSO[5]	–	–	–	-	–
Total	11.726	12.569	27.392	26.598	23.165
Produksi pulsa telepon tidak bergerak nirkabel/produksi menit (juta)[4][6]					
Non-KSO Divisions	3.254	5.512	9.144	12.304	14.627
KSO Divisions[5]	299	–	–	-	–
Total	3.553	5.512	9.144	12.304	14.627

(1) Tahun 2005, Divisi-divisi Non-KSO adalah Divisi I, II, III, IV, V dan VI, sementara Divisi KSO adalah Divisi VII.

(2) Sejak bulan Oktober 2006, Divisi-divisi Non-KSO adalah Divisi I, II, III, IV, V, VI dan VII.

(3) Sambungan yang berfungsi terdiri dari sambungan pelanggan dan telepon umum, termasuk sambungan yang kami operasikan untuk pola bagi hasil.

(4) Sebelum tahun 2006, kapasitas BTS dan MSC dihitung berdasarkan asumsi alokasi trafik percakapan per pelanggan sebesar 60 mE (mili Erlang). Namun, rata-rata trafik per pelanggan pada tahun 2005 hanya berkisar antara 18 sampai 30 mE. Karena itu, kapasitas BTS dan MSC pada 2006, 2007, 2008 dan 2009 dihitung dengan asumsi trafik percakapan per pelanggan sebesar 30 mE.

(5) Berisi menit pemakaian dari panggilan-panggilan lokal dan SLJJ, kecuali panggilan melalui telepon umum koin dan telepon seluler bergerak.

(6) TELKOM menawarkan layanan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis CDMA dengan mobilitas terbatas dengan nama brand "TELKOMFlexi". Sampai dengan 31 Desember 2009 TELKOM memiliki 15,1 juta satuan sambungan TELKOMFlexi.

c. Backbone

Backbone jaringan telekomunikasi TELKOM terdiri dari transmisi, sentral (*switching*) jarak jauh dan *core routers* yang menghubungkan beberapa akses *node*. Sambungan-sambungan transmisi antar *node* dan fasilitas *switching* mencakup gelombang mikro, kabel laut, satelit, serat optik, dan teknologi transmisi lainnya.

Tabel berikut menyajikan kapasitas transmisi *backbone* TELKOM sampai 31 Desember 2009:

Tabel Kapasitas Transmisi Backbone TELKOM

	Kapasitas (Jumlah sirkit medium transmisi)	Persentase
Kabel serat optik	24.489	75,4%
Gelombang mikro	4.800	14,8%
Kabel bawah laut	2.508	7,7%
Satelit	702	2,2%
Total	32.499	100%

JARINGAN SELULER

Telkomsel memiliki cakupan jaringan terbesar dibandingkan operator seluler lain di Indonesia. Saat ini Telkomsel mengoperasikan GSM/DCS, GPRS, EDGE, dan jaringan seluler 3G. Jaringan GSM/DCS terdiri dari *bandwidth* 7,5 MHz pada frekuensi 900 MHz dan *bandwidth* 22,5 MHz pada frekuensi 1800 MHz. Kedua jaringan tersebut beroperasi sebagai sebuah jaringan *dual band* yang terintegrasi. Jaringan 3G Telkomsel menggunakan *bandwidth* 10 MHz pada frekuensi 2,1 GHz.

Sampai dengan 31 Desember 2009, jaringan digital Telkomsel telah memiliki 30.992 BTS, 140 *cellular switching center* dan 760 BSC, dengan kapasitas keseluruhan jaringan mampu mendukung 85,2 juta pelanggan.

JARINGAN DATA DAN INTERNET

TELKOM mulai mengoperasikan layanan jaringan data pada tahun 1997 serta terus mengembangkan dan memperluas jaringannya secara progresif. Sampai dengan 31 Desember 2009, jaringan berbasis-IP TELKOM mencakup 506 lokasi dengan 882 *node router* dalam lingkup nasional. Perusahaan akan terus meningkatkan kecepatan dan kualitas jaringan berbasis IP. Jaringan berbasis IP berfungsi sebagai jaringan penghubung yang digunakan untuk VPN berkualitas tinggi, VoIP, layanan internet *dial-up* dan layanan internet pita lebar. TELKOM memiliki server dengan akses jarak jauh (*remote access server*) di 121 lokasi dengan 167 *node* dalam lingkup nasional yang digunakan sebagai layanan internet *dial-up* "TELKOMNet Instan" dan layanan internet *dial-up* korporasi.

Sejak tahun 2004, TELKOM telah menyediakan layanan akses pita lebar berbasis telepon tidak bergerak kabel dengan merek dagang "Speedy" yang menggunakan teknologi DSL. Sampai dengan 31 Desember 2009, terdapat sekitar 1,145 ribu pelanggan Speedy di Divisi I sampai VII. Pelanggan Speedy umumnya adalah pengguna *dial-up* rumah dengan penggunaan bulanan mencapai lebih dari Rp75.000, perusahaan skala kecil - menengah, agen perjalanan, warung internet, dan sekolah-sekolah. Sejak bulan Mei 2008, kecepatan *bandwidth* Speedy untuk keperluan *download* telah mencapai 1 Mbps.

JARINGAN INTERNASIONAL

TELKOM menawarkan layanan sambungan langsung internasional (SLI) dengan nama "TIC-007". Untuk mengarahkan SLI *outgoing* dan *incoming*, TELKOM memiliki *gateway* internasional di Batam, Jakarta, dan Surabaya. Sampai saat ini TELKOM belum memiliki rencana untuk mengembangkan *gateway* baru.

Untuk memfasilitasi interkoneksi panggilan internasional, Perusahaan telah mengadakan perjanjian layanan telekomunikasi internasional dengan operator telekomunikasi di beberapa negara. Selain itu, karena Perusahaan tidak memiliki perjanjian dengan operator telekomunikasi di setiap tempat tujuan SLI, maka TELKOM telah mengadakan perjanjian dengan SingTel Mobile, Telekom Malaysia, MCI, dan operator lainnya agar operator-operator tersebut dapat berfungsi sebagai penghubung untuk mengalihkan panggilan internasional ke tempat tujuan mereka. Sampai dengan 31 Desember 2009, perusahaan telah mengadakan perjanjian layanan telekomunikasi internasional dengan 37 operator internasional di 19 negara, dibandingkan dengan 35 operator internasional di 16 negara pada tanggal 31 Desember 2008. Perusahaan berencana mengadakan perjanjian layanan telekomunikasi internasional tambahan dengan operator telekomunikasi lain untuk interkoneksi langsung, terutama operator di 20 tempat tujuan teratas untuk trafik SLI *outgoing*.

Tujuan utama dari ekspansi dan pengembangan infrastruktur jaringan internasional adalah untuk memenuhi persyaratan kapasitas, meningkatkan kehandalan, efisiensi investasi, dan pertimbangan untuk transformasi infrastruktur berbasis NGN. Untuk saat ini, TELKOM memiliki tiga *gateway* internasional: Jakarta, Batam, dan Surabaya yang tersambung dengan jaringan domestik yang handal. Dalam pengembangan simpul layanan, TELKOM akan mengembangkan *softswitch* untuk mendukung layanan internasional.

Jaringan internasional didukung oleh Sistem Komunikasi Kabel Laut ("SKKL"), Dumai-Malaka Cable System ("DMCS"), Thailand-Indonesia-Singapore ("TIS"), Hak pakai yang tidak dapat di batalkan (*indefeasible right of use*, "IRU"), radio perbatasan berbasis *microwave,* dan satelit. Dalam upayanya untuk mengembangkan dan memperkokoh

jaringan internasional dan memperluas layanan pita lebar, TELKOM juga bergabung dalam konsorsium kabel AAG untuk menyediakan *bandwidth* 40G dengan porsi investasi awal sebesar US$48 juta pada April 2007. Perusahaan juga memiliki rencana jangka panjang untuk mengembangkan akses internasional ke Wilayah Indonesia Timur dan untuk meragamkan serta meraih peluang bisnis di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa.

INFRASTRUKTUR JARINGAN LAINNYA

Perusahaan mengoperasikan satelit TELKOM-1 dan TELKOM-2 beserta 190 stasiun bumi, termasuk satu stasiun master kendali satelit. Satelit TELKOM-1 mempunyai 36 transponder, termasuk 12 transponder extended C-band dan 24 transponder C-band standar, sedangkan satelit TELKOM-2 memiliki 24 transponder C-band standar. TELKOM menggunakan kedua satelit itu untuk hal-hal berikut:

- *Backbone* jaringan transmisi;
- Layanan telekomunikasi daerah terpencil;
- Kapasitas transmisi cadangan untuk jaringan telekomunikasi nasional;
- Pemancaran satelit, VSAT dan layanan-layanan multimedia;
- Penyewaan kapasitas *transponder* satelit;
- Sirkit sewa berbasis satelit; dan
- *Teleport* (layanan *uplinking* dan *downlinking* stasiun bumi ke dan dari satelit-satelit lain).

TELKOM melanjutkan pembangunan jaringan satelit untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar dan pendapatan dari layanan satelit, memenuhi kebutuhan transmisi satelit dan meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Saat ini, TELKOM mengoperasikan dua satelit: TELKOM-1 dan TELKOM-2. Sebagai upaya untuk memenuhi permintaan pelanggan, TELKOM juga menyewa beberapa *transponder* dari penyedia layanan satelit lainnya, seperti GE 23 dengan 8 *transponder*, Apstar-1 dengan 1 *transponder*, Sinosat dengan 2 *transponder*, dan JCSAT5A dengan 2 *transponder.*

Pada tanggal 2 Maret 2009, TELKOM membuat kesepakatan untuk pengadaan Sistem Satelit TELKOM-3 dengan Perusahaan Academician M.F. Reshetnev Sistem Informasi Satelit. Nilai kontrak untuk perjanjian ini adalah sebesar 162,6 juta Dolar AS (tidak termasuk PPN), nilai tersebut tergantung dari wahana yang akan digunakan untuk meluncurkan satelit. Satelit TELKOM-3 yang diluncurkan memerlukan waktu 26 bulan untuk diarahkan ke posisi yang dituju, dan 29 bulan untuk mencapai posisi orbital akhir yang dituju, sejak kontrak tersebut efektif pada tanggal 2 Maret 2009 TELKOM berencana meluncurkan satelit TELKOM 3 pada tahun 2011.

PENGEMBANGAN JARINGAN

PENGEMBANGAN JARINGAN TELEPON TIDAK BERGERAK

Pada tahun 2009, TELKOM memperkokoh implementasi *Next Generation Network* (NGN) seiring dengan Rencana Induk INSYNC2014 yang merupakan peta dari pengembangan jaringan akses, jaringan layanan, IP *backbone,* dan long-haul *backbone* Beberapa hal utama pengembangan jaringan telepon tidak bergerak selama tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- Sistem kabel internasional yang disediakan oleh Konsorsium Asia America Gateway telah beroperasi sejak 10 November 2009 dengan kapasitas awal sebesar 40G;
- Ekspansi kapasitas dari infrastruktur *backbone* kabel bawah laut Jawa-Sumatera-Kalimantan (Jasuka) pada saat ini sedang dalam tahap pembangunan dengan beberapa perkembangan penting: kapasitas tambahan sebesar 5 lambda (50 G) untuk Ring 3 bagian kabel laut (BatamTengah-Pontianak-Tanjung Pandan-Tanjung Pakis); kapasitas tambahan sebesar 4 lambda (40 G) untuk Ring 3 bagian darat (Dumai-Pakanbaru-Jambi), 3 lamda (40 G) untuk Palembang-Baturaja-Bandar Lampung dan 2 lambda (20 G) untuk Ring 1A (Medan-Pekanbaru-Padang-Pematang Siantar). Ekspansi *backbone* jangka panjang ini akan selesai pada bulan April 2010. Proyek *backbone* sepanjang pesisir barat Sumatera (Ring 1B Medan-Banda Aceh) akan selesai pada bulan Juni 2010 dengan kapasitas awal sebesar 70 G yang akan melengkapi ring untuk pulau Sumatera;
- Ekspansi kapasitas *backbone* pulau Jawa mencakup peningkatan kapasitas sebesar 1 lambda (10 G) untuk Telkomsel dan 1 lambda (10 G) untuk Natrindo Telepon Seluler ("NTS"). Proyek ini direncanakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2010 yang akan membuat kapasitas *backbone* pulau Jawa menjadi 15 lambda (150 G);
- Penyelesaian proyek serat optik OSP baru Kalimantan-Sulawesi pada bulan Juli 2009 yang menghubungkan serat optik terestrial dari bagian Timur ke Kalimantan bagian Selatan (Sangata-Banjarmasin) dan dari Utara ke Selatan Sulawesi (Manado-Gorontalo-Parigi-Palu-Palopo-Mamuju-Makasar) dengan panjang total 3.163 km dan kapasitas total 2 lambda (20 G);
- Kabel laut JaKa2LaDeMa dan proyek serat kabel OSP yang menghubungkan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Denpasar dan Mataram telah dikembangkan sejak awal 2009 dan akan beroperasi pada bulan April 2010 dengan kapasitas awal 2 lambda (20 G). Kabel JaKa2LaDeMa memiliki 3 ring: Ring 4 (Jawa-Kalimantan), Ring 8 (Kalimantan-Sulawesi) dan Ring 9 (Denpasar-Mataram);
- Pada tanggal 24 November 2009, TELKOM membuat kesepakatan untuk pengadaan dan instalasi Palapa Ring sistem kabel laut Mataram-Kupang. Proyek ini akan menghubungkan jaringan antara Mataram dan Kupang, dan ditargetkan untuk selesai pada Desember 2010, dengan kapasitas awal 40 G;
- Kabel serat optik regional sepanjang 2.000 km telah dikembangkan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi pada tahun 2009;
- *Softswitch* dengan cakupan seluruh nusantara pertama kali diimplementasikan pada tahun 2009 dan ditujukan untuk menggantikan *TDM switch* yang sudah melampaui usia teknis sekaligus juga untuk penambahan kapasitas telepon tidak bergerak. Implementasi ini mencakup *call agents* (*softswitch*) di 12 lokasi, gerbang *trunk* di 28 lokasi dan kapasitas total sebanyak 602.656 lisensi, termasuk untuk menambah kapasitas sambungan

telepon tidak bergerak, modernisasi sentral, dan akses. Keseluruhan dari proyek ini diperkirakan akan siap untuk beroperasi pada bulan November 2010;
- *Platform MSAN* untuk jaringan telepon tidak bergerak dibangun sebanyak 313.893 sambungan di tahun 2009. Saat ini terdapat 3 *platform* MSAN yang memberikan cakupan nasional (Divisi Regional I – VII). Pembangunan di tahun 2009 akan siap untuk beroperasi pada bulan Juni 2010;
- GPON dikembangkan pada tahun 2009 dengan fokus pada solusi *mobile backhaul Node* B untuk anak perusahaan kami, Telkomsel, sebagai upaya untuk mendukung penetrasi *mobile broadband*. GPON juga akan mendukung penyediaan layanan pita lebar berbasis optik langsung ke area perumahan dan bangunan bertingkat tinggi secara selektif. Pembangunan di tahun 2009 meliputi 140 *node* OLT, 152 *node* ONU dan 715 titik ONT, yang diestimasikan selesai seluruhnya pada bulan Juni 2010;
- Perluasan jaringan berbasis IP. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di halaman 81 sub judul Pengembangan Jaringan Data; dan
- Pembangunan jaringan *Metro Ethernet* terus dilanjutkan baik untuk ekspansi *node* maupun penambahan *port* di seluruh area regional. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di halaman 81 sub judul Pengembangan Jaringan Data.

Sebagai upaya lebih lanjut untuk memperkokoh layanan TIME, TELKOM berencana untuk:

- secara konsisten mengimplementasikan visi pita lebar yang ditetapkan pada Rencana Induk INSYNC2014: pita lebar untuk perumahan, pita lebar untuk korporasi dan bisinis serta *mobile broadband*;
- menyediakan kapasitas sambungan baru untuk memenuhi permintaan pelanggan baik untuk *fixed* layanan pita lebar bergerak maupun tidak bergerak maupun *mobile broadband*;
- melanjutkan upaya untuk memperkokoh implementasi NGN dengan menggelar, memperluas dan meningkatkan kapasitas *backbone* domestik, melakukan ekspansi sistem kabel sambungan international, sistem *softswitch*, IP *transport*, jaringan *Metro Ethernet* dan akses pita lebar;
- melanjutkan upaya untuk meningkatkan kualitas jaringan kami melalui modernisasi pada jaringan akses tembaga, jaringan transmisi dengan menggunakan sistem proteksi ring termasuk *batere* dan *rectifier*; dan
- melanjutkan integrasi jaringan dan perbaikan kualitas melalui sistem pendukung operasi nasional.

Untuk rincian komitmen kontrak TELKOM lainnya yang signifikan lihat Catatan 47a di Laporan Keuangan Konsolidasian.

PENGEMBANGAN JARINGAN TELEPON TIDAK BERGERAK NIRKABEL

Selama empat tahun terakhir, TELKOM telah melakukan peningkatan dan ekspansi jaringan telepon tidak bergerak nirkabel. Pada tahun 2006, TELKOM melakukan perjanjian dengan PT Samsung Telecommunication Indonesia untuk pengadaan layanan dan peralatan CDMA 2000-1X di Divisi Regional V (Jawa Timur); kesepakatan pengadaan dan pemasangan peralatan bersama konsorsium Samsung untuk perluasan NSS, BSS dan proyek sistem PDN FWA CDMA di Divisi Regional V (Jawa Timur); perjanjian dengan konsorsium Huawei untuk pengembangan FWA CDMA di Divisi Regional I (Sumatera) hingga Regional IV (Jawa Tengah); dan perjanjian dengan konsorsium ZTE untuk perluasan FWA CDMA di Divisi Regional VI (Kalimantan) dan Divisi Regional VII (Kawasan Indonesia Timur).

Pada tahun 2007, TELKOM melanjutkan pengembangan kapasitas di seluruh divisi, menandatangani perjanjian dengan Konsorsium Samsung untuk pengadaan FWA CDMA NSS, BSS dan sistem PDN di Divisi Regional VII Bali dan Nusa Tenggara, dan dengan konsorsium ZTE untuk pengadaan NSS, BSS FWA CDMA dan sistem PDN di Divisi Regional VII, yang mencakup Sulawesi, Maluku dan Papua. Pada tahun 2007, TELKOM menyelesaikan migrasi jaringan FWA CDMA TELKOMFlexi dari frekuensi 1900 MHz ke 800 MHz di Divisi Regional II (Jakarta) dan Divisi Regional III (Jawa Barat dan Banten).

Pada tahun 2008, TELKOM Flexi juga melakukan ekspansi jaringan BTS-nya dengan menambah sebanyak 2.143 *base station* baru. Perluasan ini melibatkan empat *vendor* besar: Huawei, Motorola, Samsung dan ZTE. Pada Divisi Regional I, Motorola mengembangkan 69 *base station* baru dengan metode penggantian dan perluasan kembali, Huawei membangun 326 *base station* baru. Huawei juga mendirikan 408 BTS baru pada Divisi II, 225 BTS baru pada Divisi III dan 181 BTS baru pada Divisi IV. Sementara itu, Samsung membangun 543 BTS baru pada Divisi V, 63 pada Divisi IV dan 39 pada Divisi VII. Pada Divisi VI (Kalimantan), ZTE membangun 140 BTS baru dan juga 149 pada Divisi VII. Kontrak untuk pembangunan BTS baru di tahun 2008 hanya sebanyak 1.140 dari total BTS yang dibangun. Sisanya sebanyak 47% (1.003 BTS) merupakan lanjutan dari kontrak pengadaan BTS yang dilakukan pada tahun 2006 dan 2007.

Divisi Fixed Wireless Network (DFWN) secara resmi menjadi divisi tersendiri pada tahun 2009. Saat ini, Divisi yang dikenal sebagai Divisi TELKOM Flexi (DTF), memiliki peran yang lebih komprehensif dan terintegrasi, mencakup perencanaan dan pengembangan produk dan infrastruktur, penjualan, pemasaran, dan pengembangan usaha dalam satu divisi.

Pada tahun 2009, DTF membangun 1.489 BTS baru yang menghasilkan tambahan kapasitas sebanyak 7.505.439 satuan sambungan Flexi. Secara total, jumlah BTS pada akhir Desember 2009 adalah sebanyak 5.543 dengan total kapasitas 27.653.553 satuan sambungan Flexi.

Perkembangan penting selanjutnya pada tahun 2009 adalah TELKOM memenangkan lisensi BWA (WiMAX) 2,3 GHz yang mencakup lima daerah (Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara serta Papua). Lisensi ini melengkapi lisensi-lisensi lainnya yang dimiliki TELKOM untuk BWA 3,3 GHz di 7 daerah. Pada tahun 2009, BWA 3,3 GHz meluncurkan 31 *base station* dan 460 *subscriber station* pelanggan dan akan siap untuk beroperasi pada September 2010.

PENGEMBANGAN JARINGAN SELULER

Cakupan GSM Telkomsel menyebar ke semua kota/kabupaten di Indonesia. Pada tahun 2009, Telkomsel telah menambah perangkat 4.120 BTS (termasuk 1.652 *node* untuk layanan 3G) dan memperluas jaringan selulernya untuk menjangkau semua kecamatan di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Telkomsel berencana melanjutkan pemasangan BTS tambahan untuk memperluas jangkauannya hingga ke kecamatan di Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia, untuk meningkatkan kapasitas di wilayah padat penduduk, mengembangkan jaringan 3G, mengembangkan *backbone* transmisi serat optik di kota-kota besar Jawa, memasang sel-sel mikro tambahan dan sentral-sentral pemancar dan penerima terutama di wilayah provinsi, memperbaiki kualitas cakupan, meningkatkan peralatan *switching* untuk meningkatkan kapasitas jaringan, dan untuk memperluas jaringan pintarnya yang dipakai dalam koneksi dengan produk-produk prabayarnya.

PENGEMBANGAN JARINGAN DATA

Pada tahun 2009, perusahaan terus memperbaiki kualitas jaringan data dengan menambah kapasitas dan cakupan. Penggelaran baru meliputi perluasan cakupan dan kapasitas IP *core* melalui penerapan IP berbasis Lambda 10 Gbps dan *Tera Router*. *Tera Router* ini dipasang di tiga kota dan enam *node* (Jakarta, Batam, Surabaya) dan tiga tambahan *node* gerbang internet. *Tera router* ini sudah beroperasi sejak Maret 2009.

Untuk mendukung program NGN, kami telah meningkatkan jaringan IP *Core* yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana layanan *triple play* dan konvergensi yang mengintegrasikan jaringan NGN *Core* antara bisnis telepon tidak bergerak kabel dan nirkabel. IP *Core* dikembangkan dengan mengimplementasi *platform* tunggal *tera-byte router* dengan arsitektur jaringan menggunakan sistem proteksi penuh. IP *Core* yang sudah beroperasi saat ini terdiri dari 22 *node router core*, *router* 601 PE, 156 10GE 702 *port* GE, 284 STM-1, 143 STM-4 dan 37 STM-16.

Jaringan *Metro Ethernet* kami telah diperluas pada tahun 2009 dengan telah menyelesaikan pembangunan 130 *node* baru (yang terletak pada *node exchange*) sebagai tambahan dari 767 *node* jaringan *Metro* yang sudah dibangun pada tahun 2008. Saat ini, total *node Metro Ethernet* adalah sebanyak 897 yang telah siap untuk mendukung kebutuhan *bandwidth* layanan pita lebar kami di seluruh Indonesia. *Metro Ethernet* juga digunakan untuk *transport* utama dari IP DSLAM, MSAN untuk *broadband* Speedy, *Softswitch*, IP VPN serta GPON baik untuk *mobile backhaul*, solusi korporasi, dan bisnis serta layanan *Triple Play* bagi pelanggan konsumer secara selektif. Pada tahun 2009, TELKOM telah menggunakan *Metro Ethernet* sebagai *mobile backhaul* pada lebih dari 900 *node* Bs milik anak perusahaan seluler kami, yaitu Telkomsel, guna mendukung penetrasi layanan pita lebar bergerak. Sinergi jaringan ini akan terus dilanjutkan untuk menyediakan *backhaul* sebanyak 4.000 *node* Bs pada tahun 2010.

Sampai akhir Desember 2009, TELKOM telah berhasil meluncurkan sebanyak 400.408 port akses pita lebar tambahan (IP DSLAM) untuk mendukung layanan TELKOMSpeedy, sehingga total kapasitas menjadi

2.350.257 port yang akan memberikan dukungan penuh atas pesatnya pertumbuhan dari penetrasi *fixed broadband* TELKOMSpeedy. Selanjutnya, pembangunan yang sedang berjalan di tahun 2009 sebanyak 303.812 port akses pita lebar MSAN yang akan siap beroperasi pada bulan Juni 2010.

Sampai akhir Desember 2009, kami telah menambah kapasitas gerbang internet sehingga mencapai 30,025 Gbps. Hal ini dilakukan untuk memastikan kecukupan kapasitas gerbang internet untuk mengantisipasi pertumbuhan trafik pita lebar yang tinggi baik untuk layanan pita lebar bergerak maupun tidak bergerak.

STRATEGI PERUSAHAAN

Pasar telekomunikasi Indonesia mempunyai tingkat penetrasi yang rendah untuk sambungan telepon tidak bergerak, penetrasi menengah ke atas untuk bisnis nirkabel (Seluler/GSM dan akses telepon tidak bergerak nirkabel), dan tingkat penetrasi rendah untuk bisnis pita lebar. TELKOM berharap bahwa bisnis pita lebar, dan layanan korporasi akan menjadi pendorong pertumbuhan berikutnya dan terus berlanjut untuk menawarkan peluang pertumbuhan di masa depan. TELKOM berharap bahwa layanan kabel tidak bergerak, nirkabel, pita lebar dan korporasi akan terus memberikan kontribusi yang besar kepada pendapatan operasi dalam waktu dekat ini. Untuk mendukung semua itu, TELKOM telah mengembangkan strategi bisnis guna mempertahankan pelanggan saat ini, menarik pelanggan baru dan merebut kembali pelanggan yang beralih kepada pesaing, dan terus melakukan penetrasi pasar melalui pengelolaan hubungan dengan pelanggan, kepemimpinan produk dan diversifikasi, harga yang bersaing, dan jalur distribusi satu pintu. Strategi ini bertumpu pada pertumbuhan pasar seperti pita lebar dan layanan korporasi yang merupakan strategi pertumbuhan yang mencakup "mempertahankan bisnis inti dengan mempertahankan pelanggan", "memanfaatkan sepenuhnya seluruh potensi produk TELKOMGroup" dan "memperluas lingkup penawaran dan kapasitas guna menelusuri peluang pertumbuhan di masa mendatang." Untuk bisnis nirkabel, strateginya adalah untuk menyelaraskan bisnis seluler dan telepon tidak bergerak nirkabel, sehingga sinergi yang maksimal dapat tercapai. Fokus untuk strategi bisnis telepon tidak bergerak kabel berbeda, yaitu pada produktivitas biaya, karena bisnis ini mengalami penurunan. Sebagai tambahan terhadap strategi yang fokus kepada memperkokoh bisnis inti, TELKOM juga berusaha mengembangkan area-area baru pertumbuhan sebagai langkah berikutnya dengan memasuki industri yang memiliki kedekatan, untuk meraih peluang di bidang layanan TI serta media dan bisnis *edutainment*.

Seluruh strategi di atas dikembangkan untuk mendukung visi TELKOM "menjadi pemain InfoComm terkemuka di regional" dengan misi "menyediakan layanan InfoComm terpadu dan lengkap dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif" dan "menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia".

TELKOM juga berusaha mengembangkan area-area baru pertumbuhan sebagai langkah berikutnya dengan memasuki industri yang memiliki kedekatan, untuk meraih peluang di bidang layanan TI serta media dan bisnis *edutainment*

Unsur-unsur utama strategi TELKOM adalah:

a. **Mengoptimalkan layanan jaringan telepon tidak bergerak kabel**
   Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat penetrasi sambungan telepon tidak bergerak terendah di Asia Tenggara. Posisi per 31 Desember 2009, mayoritas sambungan layanan berada di kota-kota besar utama: Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan dan Denpasar. TELKOM bermaksud memperkuat bisnis telepon tidak bergerak kabel dengan:

   - meningkatkan biaya yang kompetitif melalui perbaikan efisiensi lintas fungsional;
   - transformasi infrastruktur *legacy* menjadi infrastruktur NGN;
   - meningkatkan penetrasi sambungan telepon tidak bergerak dengan lebih cepat dan dengan belanja modal yang lebih rendah per sambungan melalui penggunaan teknologi telepon tidak bergerak nirkabel;
   - meningkatkan penggunaan layanan suara dan layanan bernilai-tambah pada produk telepon tidak bergerak kabel;
   - meluncurkan program-program untuk pengelolaan pemutusan sambungan;
   - memperkuat bisnis interkoneksi melalui pembangunan pusat layanan yang dikhususkan untuk operator telekomunikasi dan pelanggan interkoneksi lainnya, membuka lebih banyak gerbang ke operator telekomunikasi lain, menawarkan harga yang lebih menarik, dan menyediakan layanan *billing* yang lebih baik;
   - memperkuat Plasa TELKOM, pusat layanan pelanggan, sebagai titik penjualan untuk layanan TELKOM;
   - mengembangkan dan memperluas bisnis Sambungan Langsung Internasional;

- meningkatkan jaringan akses telepon tidak bergerak kabel untuk menyediakan kemampuan pita lebar; dan
- mendirikan Divisi Akses sebagai bagian unit bisnis terpisah pada akhir tahun 2009 untuk mengembangkan dan memperkuat bisnis akses TELKOM.

b. Menggabungkan & meningkatkan bisnis jaringan tidak bergerak nirkabel dan mengelola portofolio nirkabel

Perusahaan menawarkan layanan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis CDMA dengan mobilitas terbatas menggunakan merek dagang "TELKOMFlexi". TELKOM berencana untuk terus memperluas jaringan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA di seluruh divisi regional. Dibandingkan dengan jaringan telepon tidak bergerak kabel, jaringan tidak bergarak nirkabel berbasis-CDMA pada umumnya lebih cepat dan lebih mudah dibangun, dan memberikan fleksibilitas serta mobilitas yang lebih besar kepada pelanggan. TELKOM yakin bahwa pembangunan jaringan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis-CDMA dan bisnis TELKOMFlexi akan memberikan keunggulan kompetitif kepada TELKOM dalam menghadapi liberalisasi dan meningkatkan persaingan di pasar sambungan telepon tidak bergerak. Kami juga mengembangkan program pemakaian bersama infrastruktur (*sharing joint infrastructure program*) antara TELKOMFlexi dan Telkomsel untuk mempercepat pembangunan jaringan telepon tidak bergerak nirkabel dan memberikan lebih banyak nilai bagi TELKOMGroup.

Untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola bisnis akses tidak bergerak nirkabel (FWA), TELKOM mengembangkan entitas bisnis terpisah dalam perusahaan untuk dapat lebih responsif dalam bereaksi terhadap pasar. TELKOM juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan akuisisi atau konsolidasi bisnis dalam rangka peningkatan dan pertumbuhan bisnis FWA kedepan jika terdapat peluang bisnis yang menguntungkan.

c. Investasi pada jaringan pita lebar

Perusahaan bermaksud menumbuhkan bisnis pita lebar dan akses internet dengan, antara lain:

- meningkatkan investasi di infrastruktur pita lebar TELKOM untuk jaringan kabel dan nirkabel (seperti DSL, MSAN, FTTx dan HSPA);
- fokus pada upaya mempertahankan dan meraih pelanggan yang memiliki tuntutan tinggi atas layanan data dengan menawarkan harga yang kompetitif untuk layanan data dan internet kecepatan tinggi (termasuk layanan bernilai-tambah) dan *full* IP VPN, dan memperluas *backbone* TELKOM serta teknologi akses jaringan;
- memberikan kepada pelanggan pilihan akses internet yang lebih luas seperti melalui teknologi *hotspot* nirkabel dan *bundling* layanan akses internet dengan produk TELKOMFlexi dan produk Telkomsel;
- mengembangkan dan menawarkan layanan bernilai-tambah dan produk baru, seperti layanan korporasi terintegrasi untuk bank dan pelanggan korporasi lainnya; dan
- memperluas jangkauan dan kualitas *internet protocol backbone* untuk meningkatkan kapasitas *traffic* data dan internet.

d. Mengintegrasikan solusi enterprise dan berinvestasi di *wholesale*

Dalam upayanya untuk meningkatkan nilai kontribusi dari bisnis korporasi, TELKOM membentuk tiga strategi bisnis yang mempertahankan bisnis inti dengan secara selektif memilih investasi di bidang akses dan konektivitas (seperti IP VPN, *frame relay*, sambungan sewa, dll) dengan tetap fokus kepada pelanggan strategis, memanfaatkan sepenuhnya potensi pelanggan TELKOMGroup, serta memperluas ruang lingkup penawaran dan kemampuan untuk tetap bertumpu pada pertumbuhan peluang di masa mendatang.

e. Mengintegrasikan Next Generation Network

Sebagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan layanan serta menekan biaya, TELKOM menerapkan teknologi jaringan generasi berikutnya atau NGN (*platform* berdasarkan IP) di seluruh TELKOMGroup dengan mengintegrasikan jaringan inti NGN untuk kabel tidak bergerak dan yang bergerak serta mengembangkan jaringan akses *Metro Ethernet*.

f. Mengembangkan layanan teknologi informasi, bisnis media dan edutainment dan industri-industri yang memiliki kedekatan

TELKOM memutuskan untuk mengubah usahanya tidak hanya menjadi perusahaan terkemuka di bidang telekomunikasi, tetapi juga mencari peluang pendapatan baru dengan mengembangkan industri yang memiliki kedekatan. Transformasi bisnis ini disebut dengan TIME (Telekomunikasi, Informasi, Media, dan *Edutainment*) ekspansi ini juga menawarkan peluang pertumbuhan baru yang signifikan serta meningkatkan kemampuan bisnis utama. Bersamaan dengan ini, TELKOM telah berhasil dalam tindakan korporasi sebagai berikut:

- pada tahun 2008, Metra, anak perusahaan TELKOM dengan kepemilikan penuh, menutup akuisisi sebesar 80% saham PT Sigma Cipta Caraka (SIGMA), yang merupakan pemimpin di bidang layanan TI di Indonesia terutama layanan keuangan dan perbankan;
- pada bulan Juni 2009, Metra, anak perusahaan TELKOM dengan kepemilikan penuh, telah berhasil mengakuisisi 49% saham PT Infomedia Nusantara, yang merupakan pemimpin di bidang informasi, komunikasi, dan data perusahaan dalam industri telekomunikasi di Indonesia khususnya di direktori informasi, *contact center*, dan layanan konten. Kemudian, kepemilikan saham PT Infomedia Nusantara menjadi 49% dimiliki oleh Metra dan 51% dimiliki oleh TELKOM;

- sampai akhir tahun 2009, PT Telekomunikasi Indonesia Internasional (Telkom Internasional), anak perusahaan TELKOM dengan kepemilikan penuh, telah membeli saham SCICOM, perusahaan *call center* global yang berlokasi di Malaysia, sebanyak 15,86%; dan
- perusahaan baru di bawah Metra dibentuk pada bulan April 2009, yang disebut Metra-Net, portal, *platform* aplikasi *ecommerce* dan *mobile* serta perusahaan konten/*entertaiment* yang berlokasi di Indonesia.

Selain itu, TELKOM melalui Telkom Internasional telah memperkuat infrastruktur internasional dengan menggunakan kabel fiber optik bawah laut dan menjadi anggota konsorsium AAG dengan *landing point* di seluruh Asia dan Amerika.

g. Meningkatkan Sinergi antara TELKOM dan Telkomsel

Perusahaan berupaya meningkatkan sinergi dengan Telkomsel dan meningkatkan fasilitas dan informasi, memadukan sumber daya dan meningkatkan koordinasi. Sumber daya ini mencakup jaringan, pemasaran, dukungan infrastruktur (seperti teknologi informasi, logistik, pengembangan sumber daya manusia dan pengadaan) serta produk dan layanan (seperti pengembangan produk baru, pengemasan/*bundling* layanan dan interkoneksi). Contoh khususnya mencakup:

- berbagi lokasi dan menara BTS, fasilitas mekanik dan elektrikal secara agresif untuk mengembangkan jangkauan TELKOMFlexi;
- pada tahun 2009, Telkomsel menggunakan jaringan *Metro Ethernet* TELKOM sebagai *mobile backhaul* untuk lebih dari 900 *nodes* yang dimiliki oleh Telkomsel dalam mendukung penetrasi layanan pita lebar bergerak. Kami berharap bahwa sinergi ini akan terus berlanjut untuk menyediakan *mobile backhaul* berdasarkan IP untuk lebih dari 4.000 *nodes* di tahun 2010;
- memanfaatkan basis pelanggan gabungan TELKOMGroup untuk saling memberikan produk yang relevan satu sama lain (seperti menawarkan layanan TELKOMSLI 007 kepada pelanggan Telkomsel dengan keuntungan khusus dan kampanye promosi bersama);
- meningkatkan kualitas layanan TELKOMSLI 007 untuk pengguna telepon seluler baik pelanggan Telkomsel maupun pengguna *roaming* internasional dengan menyediakan tambahan sambungan *signaling* langsung ke mitra *roaming* internasional Telkomsel;
- menyediakan skema harga interkoneksi untuk TELKOMSLI 007 dan layanan VoIP 01017 yang menguntungkan TELKOM dan Telkomsel. Dengan memanfaatkan skema ini, Telkomsel dapat menyediakan kepada pelanggan berbagai layanan SLI dan VoIP dengan harga terjangkau yang akan meningkatkan trafik TELKOMSLI dan VoIP;
- kegiatan promosi dan pemasaran bersama untuk kondisi tertentu yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat tambahan bagi TELKOMGroup;
- memanfaatkan sambungan distribusi yang tersedia untuk memperbaiki layanan dan kegiatan penjualan kepada pelanggan (seperti petugas *customer service officer* bersama); dan
- berbagi fasilitas lainnya seperti fasilitas pelatihan, fasilitas penelitian dan pengembangan.

h. Mempertahankan Keunggulan Telkomsel di Industri Seluler

Kami berkeyakinan bahwa dari semua aktivitas yang dijalani, bisnis seluler memberikan peluang terbesar bagi pertumbuhan pendapatan. Kami menyediakan layanan seluler melalui Telkomsel, pemimpin pasar dalam bisnis seluler di Indonesia. Berdasarkan data statistik industri pada tanggal 31 Desember 2009, Telkomsel diperkirakan memiliki pangsa pasar sekitar 49% dari pasar seluler secara keseluruhan dan mempertahankan posisinya sebagai operator berlisensi seluler GSM tingkat nasional terbesar di Indonesia. Kami bermaksud mengembangkan lebih lanjut bisnis Telkomsel antara lain dengan menawarkan tarif yang kompetitif dan melakukan promosi, layanan nilai tambah untuk produk dan layanan, dan mengembangkan kapasitas dan jangkauan jaringan Telkomsel. Kami meyakini bahwa 35% saham SingTel Mobile di Telkomsel dapat memperbesar kemampuan Telkomsel untuk mengakses perkembangan teknologi dan keahlian pemasaran SingTel Mobile dalam bisnis seluler dan meningkatkan peluang kerjasama di antara Telkomsel dan SingTel Mobile dalam mengembangkan produk baru, sehingga memperkuat dan membuat posisi Telkomsel lebih baik lagi dalam menghadapi persaingan dari operator telepon seluler lain.

Unsur-unsur utama dalam strategi bisnis Telkomsel terdiri dari:

- memanfaatkan pemasaran, operasional dan sinergi jaringan dengan TELKOM dan berbagi praktik terbaik dan *know-how* dengan SingTel Mobile;
- memperbesar kapasitas dan memperluas jangkauan pada tingkat kualitas yang telah ditentukan untuk menangani pertumbuhan pelanggan;
- mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dengan terus menerus menyelaraskan karakteristik dan fitur penawaran layanan Telkomsel dengan berkembangnya kebutuhan pelanggan retail dan pelanggan korporat, meningkatkan produk dan portofolio layanan (termasuk layanan GPRS, EDGE, 3G dan HSPA), memperluas kapasitas jaringan dan memperbaiki kualitas layanan;
- memastikan bahwa Telkomsel memiliki infrastruktur IT yang dapat memenuhi visi dan misi, dengan fokus khusus pada bidang-bidang seperti penagihan, penyampaian layanan, dan layanan kepada pelanggan; dan

- mencapai tingkat layanan setara dengan penyedia layanan seluler kelas dunia melalui *call center footprint* dan sasaran berorientasi layanan.

LAYANAN KEPADA PELANGGAN

A. TELKOM

TELKOM menyediakan layanan kepada pelanggan melalui:

- *Walk-in customer service points*. Plasa TELKOM menyediakan kenyamanan dan akses yang lengkap kepada pelanggan TELKOM yang mencakup permintaan informasi mengenai produk, layanan dan keluhan, aktivasi layanan, penagihan kepada pelanggan, pembayaran, penangguhan akun, fitur layanan dan promosi pemasaran. Sampai dengan 31 Desember 2009, Perusahaan memiliki 753 *customer service point*. Selain itu Perusahaan juga memiliki 44 Plasa TELKOM yang digunakan bersama dengan GraPARI sebagai pusat layanan pelanggan Telkomsel. Sementara Telkomsel memiliki 11 GraPARI yang digunakan bersama dengan Plasa TELKOM. Sejak bulan Juni 2006, Perusahaan telah memperluas layanannya di *customer service point* yang mencakup layanan pembayaran elektronik melalui *Electronic Data Capture* yang menggunakan di kurang lebih 101 terminal;
- *Call centers* dan internet. TELKOM mengoperasikan *call center* di Medan, Jakarta dan Surabaya, dimana pelanggan menghubungi nomor panggil "147" untuk berbicara langsung dengan operator layanan yang telah dilatih menangani permintaan dan keluhan pelanggan serta untuk memberikan informasi terkini mengenai hal-hal seperti tagihan, promosi, dan fitur layanan. Pelanggan korporasi di lokasi tertentu diberi nomor bebas pulsa tambahan "08001TELKOM" ("08001835566"). Pelanggan juga dapat mengakses *directory services* dengan dipungut biaya. Kami mempromosikan penggunaan *call center*, SMS, dan internet pada *walk-in customer service point* untuk pelanggan ritel. Untuk pelanggan korporasi, kami menyediakan *call center* utama yang berlokasi di Jakarta dan didukung dengan *call center* cabang yang berlokasi di 6 kota (Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar);
- Layanan *enterprise* dan tim *account management* (AM). Untuk fokus pada pelanggan korporasi yang memberi kontribusi lebih dari Rp50 juta pada pendapatan bulanan TELKOM. Perusahaan membentuk Divisi Enterprise di Jakarta pada bulan Agustus 2004, Perusahaan menyediakan tim *Account Manager* (AM) kepada pelanggan korporasi, yang masing-masing terdiri dari *account manager* yang didukung oleh personil dari unit operasional yang bersangkutan, untuk memberikan *point of contact* tersendiri untuk seluruh kebutuhan komunikasi pelanggan, termasuk solusi komunikasi terpadu. Sejak bulan Agustus 2004, TELKOM juga telah membagi layanan korporasi dan tim AM menjadi enam segmen, yaitu: (i) Keuangan dan Perbankan, (ii) Pemerintah, Tentara & Polisi, (iii) Manufaktur, (iv) Pertambangan & Konstruksi, (v) Kawasan Industri & Perdagangan dan (vi) Perdagangan & Pelayanan. Selain itu, pengelolaan pelanggan juga dikelompokkan berdasarkan kontribusi pendapatan sebagai berikut: cluster-1 untuk pelanggan dengan pendapatan di atas Rp500 juta, cluster-2 untuk pelanggan dengan pendapatan di atas Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta, cluster-3 pelanggan dengan pendapatan di atas Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ini, divisi layanan korporasi bekerja memadukan berbagai penawaran produk dan layanan dalam upaya menghasilkan solusi total telekomunikasi, termasuk layanan telekomunikasi suara, layanan multimedia dan layanan otomatisasi kantor dan pemantauan serta kontrol jaringan tertentu. Perusahaan juga telah menetapkan AM team serupa di tingkat regional yang berfokus pada korporasi yang beroperasi di wilayah tertentu di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2009, Divisi Enterprise *Service Center* TELKOM memiliki 598 AM tingkat nasional dan regional yang mencakup Divisi I sampai VII;
- *Layanan Carrier and interconection* dan tim Account Management (AM). TELKOM menawarkan layanan kepada pelanggan untuk operator telekomunikasi berlisensi lainnya ("OLO") melalui tim AM di Divisi Carrier and Interconnection Service yang terdiri dari 50 AM untuk menangani kelompok pelanggan sesuai lisensi yang mereka miliki;
- Program Jaminan Tingkat Layanan. Perusahaan memiliki program jaminan tingkat layanan untuk pelanggan sambungan telepon tidak bergerak sejak bulan Juni 2002 dan telah menerapkan program jaminan tingkat layanan

Kami berkeyakinan bahwa dari semua aktivitas yang dijalani, bisnis seluler memberikan peluang terbesar bagi pertumbuhan pendapatan. Kami menyediakan layanan seluler melalui Telkomsel, pemimpin pasar dalam bisnis seluler di Indonesia

untuk TELKOMFlexi dan Speedy sejak bulan Agustus 2006. Program tersebut memberikan jaminan tingkat layanan pada tingkat minimum tertentu terkait dengan, antara lain, pemasangan sambungan baru, pemulihan sambungan yang terputus, dan keluhan atas tagihan, dan memberikan kompensasi non-tunai, seperti langganan gratis untuk jangka waktu tertentu, yang diberikan kepada pelanggan apabila tingkat layanan minimum tersebut tidak terpenuhi; dan

- Indeks Kepuasan Pelanggan atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) dan Indeks Loyalitas Pelanggan atau *Customer Loyalty Index* (CLI). Agar dapat memahami tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan, TELKOM bekerja sama dengan perusahaan survei independen melakukan riset untuk mendapatkan indeks kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan menggunakan metode *Top Two Boxes*. Pada tahun 2009, indeks CSI TELKOM untuk segmen pelanggan korporasi adalah 82,3% dan indeks CLI-nya adalah 80,8%.

B. TELKOMSEL

Telkomsel menyediakan pelayanan untuk pelanggan melalui:

- Pusat Layanan Pelanggan GraPARI. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, Telkomsel memiliki 63 pusat layanan pelanggan GraPARI ("Pusat GraPARI"). Pusat GraPARI Telkomsel menyediakan akses yang nyaman dan lengkap untuk layanan pelanggan Telkomsel. Pusat GraPARI menangani informasi produk dan layanan, permintaan dan keluhan serta umumnya terfokus pada aktivasi layanan, tagihan, pembayaran, penangguhan akun, fitur layanan, jangkauan jaringan, SLI, informasi *roaming,* dan promosi pemasaran;
- Outlet Layanan Gerai HALO. Outlet layanan Gerai HALO adalah gerai layanan yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Sampai dengan 31 Desember 2009, Telkomsel memiliki 271 outlet layanan Gerai HALO;
- Caroline. "Caroline" atau *Customer Care on-Line*, adalah layanan telepon bebas-pulsa 24 jam. Pelanggan Telkomsel dapat berbicara langsung dengan operator layanan yang terlatih untuk menangani permintaan dan keluhan pelanggan dan memberikan informasi terkini mengenai hal-hal seperti tagihan, pembayaran, promosi, dan fitur layanan; dan
- Anita. "Anita", atau Aneka Informasi dan Tagihan, adalah layanan SMS yang tersedia hanya untuk pelanggan KartuHALO Telkomsel. Pelanggan dapat menggunakan sambungan telepon Anita untuk mendapatkan informasi mengenai tagihan selain informasi mengenai penggunaan melalui SMS.

PENJUALAN, PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

A. TELKOM

Perusahaan mendistribusikan dan menjual produk dan layanan utamanya, termasuk layanan telepon tidak bergerak nirkabel, tetapi tidak termasuk layanan telepon seluler, melalui saluran distribusi utama berikut ini:

- *Walk-in customer service points*. Pelanggan memiliki akses ke produk dan layanan tertentu dalam *walk-in customer service point* ini;
- Tim *Account Management (AM)*. Tim *AM* mempromosikan produk dan layanan TELKOM dengan cara yang terpadu untuk pelanggan bisnis dan operator telekomunikasi berlisensi lainnya;
- Warung telekomunikasi umum. Perusahaan telah mendirikan warung telekomunikasi umum ("wartel") di seluruh Indonesia bersama dengan pelaku bisnis skala kecil. Pelanggan dapat mengakses layanan telekomunikasi dasar, termasuk telepon lokal, SLJJ dan internasional, mengirim faksimile, mengakses internet dan membeli kartu telepon serta paket perdana, dan *voucher* TELKOMFlexi. Perusahaan secara umum memberikan potongan harga kepada wartel tersebut sebesar 30% dibandingkan dengan tarif telepon pelanggan. Wartel beroperasi secara non-eksklusif dan juga dapat menyediakan produk dan layanan operator lain;
- Dealer resmi dan gerai retail. Tersebar di seluruh Indonesia dan terutama menjual kartu telepon dan langganan, paket perdana, dan voucher TELKOMFlexi. Dealer independen dan gerai retail membayar untuk seluruh produk yang mereka terima dengan potongan harga, beroperasi secara non-eksklusif, dan juga dapat menjual produk dan layanan opertor lain;
- Situs web. Melalui situs web TELKOM, pelanggan dapat memperoleh informasi mengenai produk dan layanan utama dari TELKOM dan mendapatkan akses ke produk multimedia; dan
- Telepon Umum. Pelanggan dapat melakukan panggilan lokal melalui telepon umum.

Program komunikasi pemasaran TELKOM mencakup penggunaan iklan cetak dan televisi, layanan untuk pelanggan dan personil distribusi, infrastruktur dan kampanye promosi khusus untuk memperkuat merek dagang, meningkatkan profil dan mendidik masyarakat umum mengenai TELKOM dan produk serta layanannya. TELKOM terus mengembangkan program komunikasi pemasaran untuk mempromosikan seluruh bisnis utamanya, karena TELKOM tengah berupaya mengembangkan diri menjadi penyedia telekomunikasi dengan layanan lengkap.

B. TELKOMSEL

Telkomsel menjual layanan seluler melalui sambungan distribusi utama berikut ini:

(i) pusat GraPARI;
(ii) *outlet* layanan Gerai HALO;
(iii) jaringan dealer resmi yang terutama menjual kartu SIM prabayar dan *voucher*;
(iv) gerai bersama dengan Plasa TELKOM dan PT Pos Indonesia; dan
(v) gerai lainnya seperti bank dan toko foto.

Dealer mandiri dan gerai lain membayar untuk seluruh produk yang mereka terima seperti paket perdana dan *voucher* prabayar dengan potongan harga. Dealer mandiri menjual layanan seluler Telkomsel secara non-eksklusif dan juga dapat menjual produk dan layanan operator seluler lain.

Telkomsel memasarkan produk dan layanan KartuHALO kepada kelompok sasaran tertentu yang terpusat pada pengguna akhir korporasi, dan untuk para profesional yang cenderung menghasilkan tingkat penggunaan yang lebih tinggi, dan dengan demikian akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Telkomsel telah membentuk tim akun korporasi khusus untuk memasarkan layanannya kepada pelanggan korporasi skala-besar dan untuk mengelola hubungan berkelanjutan dengan klien. Produk dan layanan prabayar ditargetkan pada basis pelanggan yang jauh lebih luas.

Telkomsel memasang iklan melalui berbagai media untuk *branding* dan promosi strategis. Selain itu, Telkomsel menerapkan metode pemasaran seperti sisipan tagihan dan tayangan *point-of-sale* untuk menargetkan program, *event* dan promosi pada segmen pasar tertentu. Strategi pemasaran Telkomsel mencakup analisis pasar yang berkelanjutan untuk lebih memahami pelanggan yang menjadi sasaran dan untuk memperoleh umpan-balik dari pelanggan. Telkomsel juga melaksanakan analisis dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperkenalkan layanan baru agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang telah ada dan untuk menarik pelanggan baru.

TAGIHAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Untuk layanan telepon tidak bergerak kabel dan layanan ADSL Speedy, pelanggan TELKOM ditagih secara bulanan sesuai dengan divisi regional tempat mereka berada, meskipun mereka dapat meminta tagihan gabungan dari beberapa wilayah regional. Proses penagihan terkomputerisasi di setiap wilayah. Kami saat ini menyediakan layanan tagihan untuk Indosat dalam hubungannya dengan layanan SLI Indosat dengan membebankan biaya tetap untuk setiap tagihannya.

Proses pembayaran sudah tersentralisasi untuk layanan telepon tidak bergerak nirkabel dan layanan non teleponi (akses data dan internet, layanan jaringan, layanan transponder, dll).

Pembayaran dapat dilakukan di wilayah terkait, melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang telah ditetapkan, di kantor pos dan bank yang bertindak sebagai agen penagih serta di daerah tertentu dengan setoran langsung melalui transfer dari bank atau melalui debet otomatis, melalui bank dan *internet banking*.

Untuk pelanggan retail, pembayaran yang melewati jatuh tempo tiga bulan atau lebih, diharuskan melakukan pembayaran di *customer service point* TELKOM. Untuk pelanggan korporasi, terdapat ketentuan khusus mengenai periode pembayaran dan dituangkan dalam kontrak antara TELKOM dan pelanggan. Pelanggan dapat membayar tagihannya secara bulanan, dua bulanan, kuartalan atau bahkan tahunan.

Apabila pembayaran tidak diterima pada saat tanggal jatuh tempo tagihan, maka pelanggan akan diberi peringatan melalui panggilan telepon otomatis dan surat peringatan, serta diterapkannya biaya keterlambatan dan meningkatnya pemblokiran pada panggilan. Layanan akan dihentikan apabila tidak dilakukan pembayaran tiga bulan sejak tanggal jatuh tempo. Setelah layanan diputus, maka pelanggan dapat memperoleh kembali layanannya setelah melakukan seluruh pembayaran yang tertunggak, termasuk pembayaran biaya keterlambatan dan dengan melengkapi permohonan baru.

PENGELOLAAN PIUTANG PELANGGAN

A. TELKOM

TELKOM tidak menerima deposit dari pelanggan. Kecuali pemerintah, polisi dan militer, pelanggan yang menunggak dikenakan biaya keterlambatan, pemblokiran panggilan, dan pada akhirnya, pemutusan layanan setelah kurang lebih tiga bulan menunggak. Karena jumlah tagihan bulanan untuk rata-rata pelanggan tidak signifikan dan pelanggan dikenakan biaya pemasangan kembali, biaya penggunaan yang telah lewat tempo dan semua biaya keterlambatan pada saat pelanggan bermaksud berlangganan kembali, maka tidak ada keuntungan bagi pelanggan untuk tidak membayar tagihan yang terhutang. Selain itu, Perusahaan mengevaluasi calon pelanggan untuk sambungan telepon tidak bergerak dengan memeriksa kartu identitas dan laporan tagihan listrik dan dengan mengunjungi kediaman calon pelanggan. Dengan demikian, Perusahaan yakin bahwa tertagihnya piutang dapat dipastikan.

Telkomsel juga melaksanakan analisis dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperkenalkan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang telah ada dan untuk menarik pelanggan baru

Dalam kebijakan akun pelanggan, akun pelanggan ritel pribadi dihentikan apabila pelanggan gagal melakukan pembayaran untuk tiga bulan berturut-turut. Dalam hal pelanggan non ritel yang melebihi jumlah tagihan tertentu. Perusahaan mengevaluasi tingkat keberhasilan penagihan secara individual, kecuali untuk HANKAM, Kepolisian dan Militer. Untuk kategori ini, Perusahaan akan melakukan pemutusan jika lebih dari 25% piutang tersebut belum dibayar dalam jangka waktu tujuh sampai 12 bulan dari tanggal jatuh tempo,jika lebih dari 50% piutang tersebut belum dibayar dalam jangka waktu antara 13 dan 24 bulan, dan jika 100% piutang tersebut belum dibayar dalam jangka waktu lebih dari 24 bulan.

B. TELKOMSEL

Telkomsel menagih pelanggan pascabayar KartuHALO setiap bulan sesudah pemakaian berdasarkan: (i) jumlah menit penggunaan untuk layanan seluler; (ii) layanan nilai-tambah yang dapat dikenakan biaya yang digunakan selama jangka waktu yang bersangkutan; dan (iii) biaya langganan untuk layanan dasar dan layanan lain. Pilihan Paket yang tersedia bagi pelanggan adalah: HALOKeluarga, HALOBebas, dan HALOHybrid. HALOKeluarga diperuntukkan bagi keluarga karena biaya langganan bulanan dan tarif panggilannya lebih murah untuk anggota keluarga yang termasuk dalam daftar. Pelanggan pascabayar dapat memilih di antara empat pilihan di HALOBebas: (a) tarif khusus untuk panggilan ke sepuluh nomor favorit di dalam jaringan Telkomsel; (b) 150 SMS gratis per bulan; (c) pembebasan biaya langganan bulanan; atau (d) tarif tetap dalam lingkup nasional. HALOHybrid adalah layanan pascabayar yang dapat diubah menjadi layanan prabayar kapanpun pelanggan menghendaki atau sampai mencapai batas penggunaan.

Telkomsel menawarkan kepada pelanggan pascabayar KartuHALO berbagai pilihan pembayaran, termasuk pembayaran tunai, dengan cek, kartu kredit, setoran langsung melalui transfer telepon atau debet otomatis melalui bank, dan perusahaan kartu kredit yang berpartisipasi. Pembayaran dapat dilakukan di pusat GraPARI Telkomsel, ATM yang telah ditunjuk atau melalui *over-the-counter facility* (sebagian besar di kantor pos dan bank yang mempunyai perjanjian dengan Telkomsel).

Telkomsel menerbitkan tagihan kepada para pelanggan non-korporasi pada salah satu dari lima siklus penagihan. Perusahaan menerbitkan tagihan kepada setiap pelanggan pada siklus penagihan tiap bulan. Apabila pembayaran tidak diterima pada jatuh tempo tagihan, maka pelanggan akan diberi peringatan melalui panggilan telepon otomatis atau SMS dan pelanggan tidak diperbolehkan melakukan panggilan keluar atau menerima panggilan roaming masuk. Apabila tidak ada pembayaran atas jumlah tagihan dalam waktu satu bulan sejak tanggal

jatuh tempo dari tagihan yang bersangkutan, maka pelanggan selanjutnya tidak diperbolehkan menerima seluruh panggilan masuk. Apabila pembayaran tidak diterima dalam waktu dua bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, maka nomor pelanggan ditutup, selanjutnya Telkomsel terus mengupayakan penagihan dan dapat meminta bantuan instansi penagih utang. Setelah nomor pelanggan ditutup, pelanggan hanya dapat berlangganan kembali setelah membayar tunggakan dan mengajukan permohonan baru. Telkomsel tidak membebankan biaya atau bunga atas keterlambatan.

ASURANSI

TELKOM dan anak Perusahaan mengasuransikan aset tetap yang nilainya signifikan tidak termasuk tanah, untuk seluruh industri atau aset, peralatan elektronik dan risiko tertentu akibat gempa bumi, termasuk kebakaran, pencurian dan gempa bumi. Aset kami yang diasuransikan dengan skema "*sum insured basis*" dengan spesifik untuk "*first loss basis*" untuk kerugian per kejadian. Kebijakan ini juga mencakup terganggunya aktivitas bisnis secara temporer. Kami juga melakukan asuransi untuk satelit TELKOM-1 dan TELKOM-2 secara terpisah. Manajemen kami meyakini bahwa cakupan asuransi kami berlaku konsisten sesuai dengan praktek bisnis di Indonesia.

MEREK DAGANG, HAK CIPTA DAN PATEN

TELKOM telah mendaftarkan sejumlah hak kekayaan intelektual yang terdiri dari merek dagang, hak cipta dan paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hak kekayaan intelektual TELKOM meliputi (i) merek dagang untuk nama perseroan, logo dan layanan tertentu (ii) hak cipta program-program komputer dan hasil riset tertentu, dan (iii) paten untuk inovasi produk dan layanan. Melindungi hak kekayaan intelektual tersebut sangat penting bagi pertumbuhan bisnis TELKOM.

Tabel Nomor Pendaftaran Paten

No.	Nomor Pendaftaran Paten	Paten	Status
1	P00200900009	*Flexi Personal Info*	Pemeriksaan Substantif
2	P00200900379	*Social Networking*-dengan menggunakan layanan nilai tambah PSTN	Pemeriksaan Substantif
3	P00200900679	Sistem Pendaftaran dan Keamanan dengan menggunakan RFID	Terdaftar di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI)
4	P00200900680	*Flexi Chatting*	Terdaftar di Ditjen HAKI
5	P00200900658	*Text Insertion* melalui *SMS*	Terdaftar di Ditjen HAKI
6	P00200900284	*ONU Security Instrument*	Terdaftar di Ditjen HAKI

Tabel Nomor Pendaftaran Hak Cipta

No.	Nomor Pendaftaran Hak Cipta	Hak Cipta	Status
1	C00200P9004711	*Sistem Activity-Based Pricing (ABP)* untuk Manajemen Data Tarif dan Simulasi Perhitungan Tarif dengan menggunakan *Web-Based*	Terdaftar di Ditjen HAKI
2	C00200P9004712	Aplikasi Pengawasan Rumah	Terdaftar di Ditjen HAKI
3	C00200901819	Penilaian Teknologi: Sistem Keamanan Paket Data pada jaringan Flexi	Pemeriksaan Substantif
4	C00200P9004713	Sistem Diseminasi Informasi berbasis *VIPO*	Terdaftar di Ditjen HAKI

Pembahasan dan Analisis

Manajemen

TINJAUAN DAN PROSPEK OPERASI DAN KEUANGAN

Pembahasan dan analisis berikut mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan Konsolidasian ini disajikan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang dalam beberapa hal berbeda dengan U.S. GAAP. Lihat Catatan 52 dan 53 Laporan Keuangan Konsolidasian untuk penyesuaian dengan U.S. GAAP.

TINJAUAN HASIL USAHA

TELKOM adalah penyedia utama layanan telekomunikasi lokal, domestik, dan internasional di Indonesia, serta penyedia layanan telepon seluler terkemuka melalui kepemilikan mayoritas Perusahaan pada anak perusahaan, Telkomsel. Visi kami adalah menjadi perusahaan InfoComm terkemuka dikawasan regional melalui penyediaan berbagai layanan komunikasi. Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan memiliki kurang lebih 105,1 juta pelanggan yang terdiri dari 8,4 juta sambungan telepon tidak bergerak kabel dan 15,1 juta sambungan telepon tidak bergerak nirkabel serta Telkomsel memiliki 81,6 juta pelanggan telepon seluler. Perusahaan juga menyediakan beragam layanan komunikasi lain, termasuk layanan interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data dan layanan terkait komunikasi internet, sewa transponder satelit, sirkit langganan, jaringan pintar dan layanan terkait, televisi kabel dan layanan *VoIP*.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan memiliki kurang lebih 105,1 juta satuan sambungan telepon yang terdiri dari 8,4 juta sambungan telepon tidak bergerak kabel dan 15,1 juta sambungan telepon tidak bergerak nirkabel serta Telkomsel memiliki 81,6 juta pelanggan telepon seluler.

Hasil usaha Perusahaan selama tiga tahun untuk periode 2007 sampai 2009 mencerminkan pertumbuhan pada pendapatan usaha. Pada periode 2007 sampai 2009, pertumbuhan pendapatan usaha dikontribusi oleh pendapatan seluler. Pertumbuhan pendapatan seluler terutama dicerminkan dari pertumbuhan jumlah pelanggan seluler. Dari 2008 ke 2009, pertumbuhan pendapatan operasi dikontribusikan oleh pendapatan seluler dan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika.

Hasil usaha Perusahaan dari tahun 2007 hingga 2009 juga menunjukkan pertumbuhan beban usaha yang signifikan. Pertumbuhan beban usaha dipicu oleh beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi, beban penyusutan serta beban umum dan administrasi. Pertumbuhan beban penyusutan dan beban usaha, pemeliharaan dan beban jasa telekomunikasi terutama disebabkan oleh penambahan BTS dan TRX baru Telkomsel, dan peningkatan kapasitas jaringan untuk mendukung peningkatan jumlah pelanggan. Pertumbuhan beban umum dan administrasi terutama disebabkan peningkatan amortisasi *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya dan juga beban penagihan.

PENINGKATAN PENDAPATAN SELULER DAN PELANGGAN DENGAN PENURUNAN ARPU

Pendapatan telepon seluler mengalami pertumbuhan sebesar 7,4% dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dan 11,9% dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Pelanggan seluler meningkat sebesar 25,0% dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dan meningkat sebesar 36,4% dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Pendapatan Telkomsel dari jasa telepon seluler (biaya pemakaian, biaya abonemen, biaya aktifasi, dan fitur) mencakup sekitar 42,1% dari total pendapatan usaha konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dibandingkan dengan 41,7% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, dan 38,1% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.

Pertumbuhan pendapatan dan pelanggan didorong oleh pertumbuhan permintaan layanan seluler di Indonesia, seiring dengan upaya Perusahaan untuk menarik pelanggan baru dan perluasaan serta peningkatan kapasitas jaringan. Meskipun perilaku penggunaan oleh pelanggan baru sangat bervariasi tergantung paket harga yang ditawarkan dalam periode tertentu serta paket harga yang ditawarkan oleh kompetitor, pendapatan usaha dari layanan seluler tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pelanggan terutama disebabkan oleh kombinasi dari tarif rata-rata yang lebih rendah karena persaingan dan peningkatan penetrasi kepada pelanggan menengah ke bawah. Faktor ini menyebabkan penurunan ARPU, dengan ARPU campuran bulanan yang menurun dari sekitar Rp80.000 pada tahun 2007 menjadi Rp59.000 pada tahun 2008 dan Rp48.000 pada tahun 2009.

Seiring dengan pertumbuhan pasar seluler, persaingan ketat terjadi antar operator seluler, terutama pada segmen prabayar. Para operator seluler juga bersaing dalam tingkat yang lebih sempit operator sambungan telepon tidak bergerak nirkabel, seiring dengan berkembangnya jumlah layanan tersebut. Lihat "Faktor-Faktor Risiko - Risiko Terkait dengan TELKOM dan Anak Perusahaan - Persaingan di Sektor Telekomunikasi Dapat Mempengaruhi Bisnis TELKOM."

PENURUNAN PENDAPATAN TELEPON TIDAK BERGERAK KABEL

Pendapatan telepon tidak bergerak kabel menurun sebesar 13,2% dari Rp9.617,3 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp8.344,8 miliar pada tahun 2008 dan 10,5% dari Rp8.344,8 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp7.463,0 miliar pada tahun 2009.

TELKOM meyakini bahwa pendapatan telepon tidak bergerak kabel menurun disebabkan peningkatan pemakaian dan penurunan tarif layanan seluler dan telepon tidak bergerak nirkabel dan juga peningkatan penetrasi dari pelanggan seluler di Indonesia. Layanan seluler dan telepon tidak bergerak nirkabel meningkatkan kenyamanan pengguna bahkan untuk keadaan tertentu ke sesama pengguna dalam satu provider dikenakan tarif yang lebih rendah dibandingkan tarif panggilan telepon tidak bergerak kabel ke pengguna dari provider lain. Walaupun demikian, TELKOM memperkirakan telepon tidak bergerak termasuk telepon tidak bergerak kabel akan tetap memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan usaha TELKOM. Kecenderungan penurunan pendapatan telepon tidak bergerak diperkirakan akan terus terjadi.

Sebagai bagian dari strategi perusahaan, TELKOM sedang mencari upaya untuk mengoptimalisasi bisnis telepon tidak bergerak melalui berbagai cara, termasuk meningkatkan efisiensi biaya, mengembangkan layanan sambungan internasional telepon tidak bergerak, meningkatkan nilai tambah layanan telepon tidak bergerak kabel serta mempercepat peningkatan penetrasi telepon tidak bergerak dengan belanja modal per satuan sambungan yang lebih rendah melalui penggunaan teknologi telepon tidak bergerak nirkabel dan meningkatkan jaringan akses telepon tidak bergerak kabel dan infrastruktur yang telah ada menuju infrastruktur NGN dengan kemampuan pita lebar. Sejak 2009, TELKOM meluncurkan *Fixed Business Improvement Program* ("FBIP") atau program peningkatan telepon tidak bergerak yang memberikan promosi pada pelanggan telepon tidak bergerak yang telah ada dan menawarkan kepada pelanggan berbagai paket tagihan tetap bulanan untuk panggilan lokal dan SLJJ sampai dengan volume panggilan tertentu. Paket tagihan tetap ini ditawarkan pada pelanggan berdasarkan data historis volume pemakaian pelanggan tersebut.

TREN TELEPON TIDAK BERGERAK NIRKABEL

Pendapatan segmen telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM relatif stabil yaitu Rp3.146,4 miliar pada tahun 2007, Rp3.297,8 miliar pada tahun 2008 dan Rp3.336,0 miliar di tahun 2009. Pada segmen ini, pendapatan data, internet dan layanan teknologi informatika meningkat secara signifikan sebesar 39,7% dari tahun 2008 sampai 2009 dan 10,1% dari tahun 2007 sampai 2008. Namun demikian, pendapatan dari hasil segmen telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM mengalami penurunan, dari Rp1.518,1 miliar di tahun 2007 menjadi Rp1.203,4 miliar di tahun 2008 dan Rp279,4 miliar pada tahun 2009. Walaupun terjadi peningkatan jumlah pelanggan yang signifikan selama periode tersebut, penurunan ini terjadi terutama disebabkan oleh tarif rata-rata yang lebih rendah akibat persaingan yang ketat dan penurunan pendapatan pemakaian telepon tidak bergerak nirkabel.

Bisnis telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM menghadapi persaingan dari peningkatan jumlah operator, termasuk Indosat dan PT Bakrie Telecom, serta layanan seluler, SMS, *VoIP* dan e-mail. Persaingan pasar telepon tidak bergerak nirkabel semakin ketat, dengan peluncuran program-program pemasaran yang semakin menarik dan kreatif dari setiap operator. Selain itu aktivitas telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM menghadapi keterbatasan frekuensi *bandwidth* disebabkan tidak disediakannya frekuensi *bandwidth* baru oleh pemerintah untuk keperluan ekspansi, di daerah padat penduduk, telepon tidak bergerak nirkabel telah menggunakan semua frekuensi *bandwidth* yang telah dialokasikan untuk TELKOM. Akibatnya, kapasitas untuk layanan suara, data dan internet telepon tidak bergerak nirkabel di daerah yang padat penduduknya menjadi sangat terbatas. Hal ini membatasi kemampuan kami untuk bersaing di daerah-daerah tersebut.

Walaupun demikian, TELKOM meyakini masih ada peluang-peluang lain di pasar telepon tidak bergerak nirkabel. Untuk itu kami terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan data dan internet telepon tidak bergerak nirkabel serta memperluas jaringan untuk melayani area-area baru. TELKOM berencana untuk terus mengembangkan secara selektif jaringan telepon tidak bergerak nirkabel berbasis CDMA. Dibandingkan dengan jaringan telepon tidak bergerak kabel, jaringan berbasis CDMA pada umumnya lebih cepat dan mudah untuk dibangun serta menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar bagi pelanggan.

PENURUNAN PENDAPATAN INTERKONEKSI

Pendapatan interkoneksi-bersih memberikan kontribusi sekitar 11,9% terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009, berbanding dengan 14,5% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 dan 16,2% untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007. Pendapatan interkoneksi-bersih menurun sebesar 13,3% dari Rp8.790,8 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp7.621,9 miliar pada tahun 2009 dan menurun sebesar 8,9% dari Rp9.651,3 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp8.790,8 miliar pada tahun 2008.

Tren penurunan pendapatan interkoneksi terutama disebabkan penerapan ketentuan baru interkoneksi. Mulai 1 Januari 2007, pemerintah menerapkan ketentuan baru interkoneksi berbasis biaya untuk semua jaringan telekomunikasi dan operator layanan. Dalam skema baru ini, operator jaringan yang menerima panggilan akan dibebani biaya interkoneksi berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah, yang mensyaratkan operator untuk menagih panggilan berdasarkan beban atas panggilan tersebut. Tagihan interkoneksi ini harus dihitung dan dilaporkan kepada Ditjen Postel setiap tahun untuk memperoleh pengesahan dalam bentuk Daftar Penawaran Interkoneksi atau *Reference Interconnection Offer* ("RIO"). Sebagai akibatnya, TELKOM, termasuk Telkomsel, membuat penyesuaian dengan menurunkan tarif pada Desember 2007 dan April 2008. TELKOM memperkirakan penurunan tarif akan terus terjadi. Ketentuan baru interkoneksi berbasis biaya juga menyediakan keterbukaan dalam biaya interkoneksi yang memungkinkan operator untuk mencari rute panggilan yang paling efisien dengan menggunakan perangkat lunak agar beban interkoneksi dapat ditekan. Sebagai tambahan, banyak operator seluler pada tahun-tahun belakangan ini mempromosikan secara gencar tarif yang sangat rendah untuk panggilan yang dilakukan sesama pelanggan dalam satu provider. Selama panggilan ini tidak melalui jaringan TELKOM, maka TELKOM tidak menerima pendapatan interkoneksi dari panggilan semacam ini. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan interkoneksi secara umum pada industri telekomunikasi Indonesia.

PENINGKATAN PADA PENDAPATAN DATA, INTERNET DAN JASA TEKNOLOGI INFORMATIKA

Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika memberikan kontribusi sebesar 28,6% terhadap jumlah pendapatan usaha konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, dibandingkan 24,2% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 24,7% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007. Pendapatan Perusahaan dari layanan data, internet dan jasa teknologi informatika meningkat sebesar 25,8% dari 2008 ke 2009 dan meningkat sebesar 0,2% dari 2007 ke 2008. Peningkatan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika pada tahun 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa SMS sebesar 8,8% dan peningkatan pendapatan jasa internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika, tertama DSL dan layanan pita lebar bergerak sebesar 60,8%. Sebagai bagian dari transformasi TELKOM menuju bisnis TIME dan tujuan perusahaan untuk menumbuhkan bisnis *new wave*, TELKOM tetap mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan dari bisnis tersebut.

BEBAN OPERASI, PEMELIHARAAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi TELKOM meningkat sebesar Rp2.364,6 miliar atau 19,4% dari Rp12.217,7 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp14.582,3 miliar pada tahun 2009 dan meningkat sebesar Rp2.627,1 miliar atau 27,4% dari Rp9.590,6 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp12.217,7 miliar pada tahun 2008. Peningkatan ini terutama terkait dengan pengembangan kapasitas jaringan Telkomsel sejalan dengan pertumbuhan basis pelanggan serta peningkatan aset tetap guna pembangunan telepon tidak bergerak nirkabel. Pelanggan Telkomsel mengalami peningkatan dari 47,9 juta pelanggan pada posisi 31 Desember 2007 menjadi 65,3 juta pelanggan pada posisi 31 Desember 2008, dan 81,6 juta pelanggan pada posisi 31 Desember 2009. Sedangkan layanan telepon tidak bergerak nirkabel TELKOM tumbuh dari 6,3 juta sambungan pada posisi 31 Desember 2007 menjadi 12,7 juta sambungan pada posisi 31 Desember 2008 dan 15,1 juta sambungan pada posisi 31 Desember 2009.

ASET TIDAK BERWUJUD

Aset tidak berwujud terdiri dari aset tidak berwujud yang berasal dari anak perusahaan dan penggabungan usaha, (lihat Catatan 2d, 2j, 3, 13 dan 36 dari Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM), lisensi dan perangkat lunak komputer. Aset tidak berwujud diakui jika kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomi pada masa yang akan datang dari aset tersebut dan biaya

perolehannya dapat diukur secara andal. Aset tidak berwujud dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan penurunan nilai (jika ada). Aset tidak berwujud diamortisasi selama umur manfaatnya. Perusahaan melakukan estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas aset tidak berwujud pada tanggal neraca. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali.

Pada tahun 2006, Telkomsel memperoleh lisensi untuk mengoperasikan jaringan 3G. Telkomsel harus membayar uang muka (*up-front fee*) dan Biaya Hak Penggunaan ("BHP") selama sepuluh tahun mendatang. Uang muka dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa hak pengoperasian lisensi 3G. Amortisasi diakui sejak aset tersebut tersedia untuk digunakan.

Berdasarkan interpretasi manajemen atas persyaratan lisensi dan konfirmasi tertulis dari Dirjen Postel, diyakini bahwa lisensi dapat dikembalikan setiap waktu tanpa adanya kewajiban finansial untuk membayar sisa BHP. Berdasarkan kenyataan tersebut, Telkomsel memperoleh hak untuk mengoperasikan jaringan 3G atas dasar lisensi 3G dengan membayar iuran tahunan. Oleh karena itu, Telkomsel mengakui biaya BHP tahunan sebagai beban pada saat terjadi.

RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN DAN BEBERAPA KEPUTUSAN AKUNTANSI YANG BARU

Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan beberapa keputusan akuntansi yang baru dapat ditemukan pada Catatan 2 dan 51 Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

PENDAPATAN USAHA TELKOM

Tabel berikut menunjukkan pendapatan usaha TELKOM, yang dikelompokkan sesuai dengan produk dan jasa utama TELKOM selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Setiap item dinyatakan dalam persentase dari total pendapatan usaha:

Tabel Pendapatan Usaha TELKOM

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Usaha							
Telepon							
Tidak bergerak	11.001,2	18,5	9.730,3	16,0	8.644,9	13,4	917,2
Seluler	22.638,1	38,1	25.332,0	41,7	27.201,8	42,1	2.886,1
Interkoneksi							
Pendapatan	12.705,9	21,3	12.054,3	19,9	10.551,2	16,3	1.119,5
Beban	(3.054,6)	(5,1)	(3.263,5)	(5,4)	(2.929,3)	(4,5)	(310,8)
Bersih	9.651,3	16,2	8.790,8	14,5	7.621,9	11,8	808,7
Data, Internet dan jasa teknologi Informatika	14.684,1	24,7	14.712,8	24,2	18.506,2	28,6	1.963,5
Jaringan	707,4	1,2	1.079,5	1,8	1.218,0	1,9	129,2
Jasa telekomunikasi lainnya	757,9	1,3	1.044,5	1,7	1.403,8	2,2	148,9
Jumlah Pendapatan Usaha	59.440,0	100,0	60.689,9	100,0	64.596,6	100,0	6.853,6

Pendapatan Telepon Tidak Bergerak

Pendapatan telepon tidak bergerak selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut, yang setiap item dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

Tabel Pendapatan Telepon Tidak Bergerak

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Telepon Tidak Bergerak							
Percakapan Lokal dan SLJJ	7.023,0	11,8	5.738,0	9,5	4.774,1	7,4	506,3
Pendapatan Abonemen Bulanan	3.700,6	6,2	3.668,0	6,0	3.508,4	5,4	372,0
Pendapatan Pasang Baru	123,7	0,2	130,0	0,2	91,5	0,1	9,7
Kartu Telepon	1,0	-	11,7	-	35,4	0,1	3,8
Lain-lain	152,9	0,3	182,6	0,3	235,5	0,4	25,0
Jumlah	11.001,2	18,5	9.730,3	16,0	8.644,9	13,4	917,2

Pendapatan Telepon Seluler

Pendapatan telepon seluler selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009 sebagai berikut, untuk setiap item dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

Tabel Pendapatan Telepon Seluler

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Telepon Seluler							
Pendapatan Pemakaian	21.990,3	36,8	24.138,0	39,8	26.071,4	40,4	2.766,2
Pendapatan Abonemen Bulanan	204,7	0,6	186,1	0,3	423,5	0,7	44,9
Pendapatan Jasa Penyambungan	130,4	0,2	285,0	0,5	223,8	0,3	23,8
Fitur	312,6	0,5	722,9	1,2	483,1	0,7	51,2
Jumlah	22.638,1	38,1	25.332,0	41,7	27.201,8	42,1	2.886,1

Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut, yang setiap item dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

Tabel Pendapatan Interkoneksi

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Interkoneksi							
Pendapatan	12.705,9	21,4	12.054,3	19,9	10.551,2	16,4	1.119,5
Beban	(3.054,6)	(5,1)	(3.263,5)	(5,4)	(2.929,3)	(4,5)	(310,8)
Jumlah - Bersih	9.651,3	16,2	8.790,8	14,5	7.621,9	11,8	808,7

Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika

Pendapatan data, intenet dan jasa teknologi informatika selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut, yang setiap item dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

Tabel Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika							
SMS	11.224,4	18,9	9.653,6	15,9	10.499,4	16,3	1.113,9
Internet, Komunikasi Data dan Jasa Teknologi Informatika	3.232,9	5,4	4.841,1	8,0	7.785,5	12,1	826,0
VoIP	198,3	0,3	180,5	0,3	184,5	0,3	19,6
e-business	28,5	-	37,5	0,1	36,7	0,1	3,9
Jumlah	14.684,1	24,7	14.712,8	24,2	18.506,2	28,6	1.963,5

Pendapatan Jaringan

Pendapatan jaringan selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut, yang setiap item dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

Tabel Pendapatan Jaringan

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Jaringan							
Sewa Transponder Satelit	233,9	0,4	387,7	0,6	475,0	0,7	50,4
Sewa Sirkit	473,5	0,8	691,8	1,2	743,0	1,2	78,8
Jumlah	707,4	1,2	1.079,5	1,8	1.218,0	1,9	129,2

Pendapatan Layanan Telekomunikasi Lainnya

Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya untuk tiga tahun sejak 2007 sampai dengan 2009 disajikan dibawah ini dimana setiap item di nyatakan dalam pesentase dari pendapatan usaha.

Tabel Pendapatan Layanan Telekomunikasi Lainnya

	Years Ended December 31,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya							
Customer Premise Equipment ("CPE") and Terminal	-	-	380.5	0.6	721.1	1.1	76,5
Directory Assistance	329.9	0.6	333.6	0.5	340.1	0.5	36,1
Pendapatan PBH	114.2	0.2	122.0	0.2	29.5	-	3,1
Amortisasi pendapatan ditangguhkan	313.8	0.5	204.1	0.3	111.8	0,2	11,9
Lain-lain	-	-	4.4	0.0	201.4	0,3	21,4
Jumlah	757.9	1.3	1,044.5	1.7	1,403.8	2.2	148,9

BEBAN USAHA TELKOM

Tabel berikut menampilkan beban usaha TELKOM selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut, yang setiap item dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

Tabel Beban Usaha TELKOM

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Beban Usaha							
Penyusutan	9.440,5	15,9	11.069,6	18,2	12.565,9	19,5	1.333,2
Karyawan	8.494,9	14,3	9.116,6	15,0	8.533,2	13,2	905,4
Operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi	9.590,6	16,1	12.217,7	20,1	14.582,3	22,6	1.547,2
Umum dan Administrasi	3.672,2	6,2	3.628,7	6,0	4.052,7	6,3	430,0
Pemasaran	1.769,1	3,0	2.349,7	3,9	2.259,5	3,5	239,7
Jumlah Beban Usaha	32.967,3	55,5	38.382,3	63,2	41.993,5	65,0	4.455,5

Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi

Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi untuk tiga tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut, dimana setiap item dinyatakan dalam prosentase dari pendapatan usaha:

Tabel Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi							
Operasi dan pemeliharaan	5.415,8	9,1	5.905,3	9,7	7.480,2	11,6	793,7
Beban pemakaian frekuensi radio	1.138,5	1,9	2.400,3	4,0	2.784,4	4,3	295,5
Beban hak penyelenggaraan dan kewajiban pelayanan universal	1.026,3	1,7	1.095,1	1,8	1.136,8	1,8	120,6
Beban pokok penjualan pesawat telepon, kartu telepon, kartu SIM dan RUIM	582,1	1,0	1.101,5	1,8	1.142,0	1,8	121,2
Beban Pokok Jasa Teknologi Informatika	-	-	105,7	0,2	181,2	0,3	19,2
Listrik, air dan gas	481,7	0,8	558,4	0,9	724,1	1,1	76,8
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	236,3	0,4	232,4	0,4	266,4	0,4	28,3
Asuransi	342,7	0,6	366,5	0,6	312,3	0,5	33,1
Sewa sirkit dan CPE	298,7	0,5	383,3	0,6	474,2	0,7	50,3
Perjalanan	50,2	0,1	50,1	0,1	60,8	0,1	6,5
Lain-lain	18,4	-	19,0	-	19,7	-	2,1
Jumlah		16,1	12.217,7	20,1	14.582,3	22,6	1.547,2

Beban Karyawan

Beban karyawan selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut, yang setiap item dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

Tabel Beban Karyawan

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Beban Karyawan							
Gaji dan tunjangan	2.884,1	4,9	2.956,4	4,9	3.056,3	4,7	324,3
Cuti, insentif dan tunjangan lainnya	2.488,3	4,2	2.242,0	3,7	2.335,4	3,6	247,8
Program Pendi	-	-	788,2	1,3	1.043,6	1,6	110,7
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	723,2	1,2	901,8	1,5	331,1	0,5	35,1
Beban pensiun berkala bersih	859,5	1,4	706,5	1,2	625,8	1,0	66,4
PPh Karyawan	1.511,2	2,5	1.128,4	1,9	674,4	1,0	71,6
Beban LSA dan terminasi LSA	(359,8)	(0,6)	35,3	0,1	116,6	0,2	12,4
Perumahan	219,7	0,4	215,3	0,4	207,5	0,3	22,0
Beban Imbalan pasca kerja lainnya	84,7	0,1	83,6	0,1	81,5	0,1	8,6
Pengobatan	28,1	-	10,3	-	18,7	-	2,0
Imbalan karyawan lainnya	13,6	-	16,3	-	20,0	-	2,1
Lain-lain	42,3	0,1	32,5	0,1	22,4	-	2,4
Jumlah	8.494,9	14,3	9.116,6	15,0	8.533,2	13,2	905,4

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut, yang setiap item dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

Tabel Beban Umum dan Administrasi

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Beban Umum dan Administrasi							
Jasa Profesional	156,9	0,3	204,9	0,3	184,5	0,3	19,6
Beban Penagihan	598,6	1,0	583,9	1,0	717,8	1,1	76,2
Amortisasi *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya	1.154,0	1,9	1.243,6	2,0	1.390,5	2,2	147,5
Pelatihan, pendidikan dan rekruitmen	222,7	0,4	241,4	0,4	204,7	0,3	21,7
Perjalanan	254,1	0,4	238,3	0,4	223,2	0,3	23,7
Keamanan dan *screening*	236,0	0,4	258,7	0,4	265,4	0,4	28,2
Sumbangan sosial dan umum	237,4	0,4	141,8	0,2	220,6	0,3	23,4
Sewa Kendaraan	103,0	0,2	87,0	0,1	66,2	0,1	7,0
Alat tulis dan cetakan	79,9	0,1	72,0	0,1	64,6	0,1	6,9
Rapat	88,9	0,1	88,0	0,1	76,4	0,1	8,1
Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang	500,8	0,8	398,0	0,7	573,7	0,9	60,9
Penelitian dan pengembangan	6,7	-	9,8	-	5,9	-	0,6
Lain-lain	33,2	0,1	61,3	0,1	59,2	0,1	6,3
Jumlah	3.672,2	6,1	3.628,7	6,0	4.052,7	6,2	430,0

Beban Pemasaran

Beban pemasaran selama tiga tahun dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut, yang setiap item dinyatakan dalam persentase dari pendapatan usaha:

Tabel Beban Pemasaran

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,						
	2007		2008		2009		2009
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	US$ (juta)
Beban Pemasaran							
Iklan	1.300,7	2,2	1.876,3	3,1	1.724,0	2,7	182,9
Edukasi Pelanggan	424,8	0,7	416,5	0,7	437,2	0,7	46,4
Lain-lain	43,6	0,1	56,9	0,1	98,2	0,2	10,4
Jumlah	1.769,1	3,0	2.349,7	3,9	2.259,5	3,5	239,7

HASIL USAHA
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2008

A. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha meningkat sebesar Rp3.906,8 miliar, atau 6,4%, dari Rp60.689,8 miliar dalam tahun 2008 menjadi Rp64.596,6 miliar pada tahun 2009. Peningkatan pada pendapatan usaha pada 2009 terutama disebabkan oleh peningkatan dari pendapatan seluler, data, internet dan jasa teknologi informatika, dan jasa telekomunikasi lainnya yang diimbangi dengan penurunan pendapatan telepon tidak bergerak dan interkoneksi.

1. Pendapatan Sambungan Telepon Tidak Bergerak

   Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak menurun sebesar Rp1.085,4 miliar, atau 11,2%, dari Rp9.730,3 miliar pada 2008 menjadi Rp8.644,9 miliar pada 2009. Penurunan pada pendapatan sambungan telepon tidak bergerak terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan layanan telepon tidak bergerak kabel dan telepon tidak bergerak nirkabel. Pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak kabel turun sebesar Rp881,8 miliar, atau 10,5%, dari Rp8.344,8 miliar pada 2008 menjadi Rp7.463,0 miliar pada 2009. Pendapatan telepon tidak bergerak nirkabel turun sebesar Rp203,7 miliar, atau 14,7%, dari Rp1.385,5 miliar pada 2008 menjadi Rp1.181,8 miliar pada 2009.

   Penurunan pendapatan telepon tidak bergerak kabel terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan percakapan lokal dan SLJJ sebesar 21,1% dari Rp4.559,9 miliar pada 2008 menjadi Rp3.598,9 miliar pada 2009. Penurunan pada pendapatan telepon tidak bergerak nirkabel terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sambungan lokal dan jarak jauh dalam negeri sebesar 21,7% dari Rp1.016,9 miliar pada 2008 menjadi Rp796,2 miliar pada 2009.

2. Pendapatan Telepon Seluler

   Pendapatan telepon seluler meningkat sebesar Rp1.869,8 miliar, atau 7,4%, dari Rp25.332,0 miliar pada 2008 menjadi Rp27.201,8 miliar pada 2009, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan pemakaian dan fitur. Pendapatan pemakaian meningkat sebesar Rp1.933,4 miliar, atau 8,0% dari Rp24.138,0 miliar pada 2008

menjadi Rp26.071,4 miliar pada 2009, yang disebabkan oleh pertumbuhan pelanggan seluler dan *minute of usage*.

Peningkatan pendapatan seluler terutama disebabkan oleh peningkatan pelanggan Telkomsel sebesar 25,0% dari 65,3 juta pelanggan pada 2008 menjadi 81,6 juta pelanggan pada 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pelanggan pascabayar dan prabayar yang tumbuh masing-masing sebesar 4,9% dan 25,6% pada tahun 2009.

Sebagai hasil tingkat pertumbuhan pelanggan prabayar yang lebih tinggi, proporsi pelanggan prabayar terhadap total jumlah pelanggan meningkat dari 97,0% pada 2008 menjadi 97,5% pada 2009. Dengan adanya peningkatan persentase jumlah pelanggan prabayar tersebut terhadap total jumlah pelanggan, ARPU campuran bulanan menurun dari sekitar Rp59.000 pada tahun 2008 menjadi sekitar Rp48.000 pada tahun 2009. Jumlah *minute of usage* meningkat 44,5%, dari 90,2 miliar menit pada 2008 menjadi 130,3 miliar menit pada 2009.

3. Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi-bersih menurun sebesar Rp1.168,9 miliar, atau 13,3%, dari Rp8.790,8 miliar pada 2008 menjadi Rp7.621,9 miliar pada 2009. Pendapatan interkoneksi-bersih terdiri dari pendapatan interkoneksi dari sambungan telepon tidak bergerak dan pendapatan interkoneksi dari jaringan seluler Telkomsel. Pendapatan interkoneksi termasuk sambungan langsung internasional *incoming* dari layanan SLI (TIC-007).

Pendapatan interkoneksi seluler menurun sebesar Rp1.023,4 miliar, atau 13,0%, dari Rp7.900,4 miliar pada 2008 menjadi Rp6.877,0 miliar pada 2009, terutama karena menurunnya pendapatan percakapan *outgoing* (lokal dan SLJJ) dari telepon tidak bergerak kabel ke seluler. Pendapatan interkoneksi internasional turun sebesar Rp214,1 miliar, atau 27,4%, dari Rp780,6 miliar pada 2008 menjadi Rp566,5 miliar pada 2009. Pendapatan interkoneksi lainnya meningkat sebesar Rp68,7 miliar, atau 62,6%, dari Rp109,7 miliar pada 2008 menjadi Rp178,4 miliar pada 2009.

Pendapatan interkoneksi-bersih memberikan kontribusi sebesar 11,9% terhadap total pendapatan usaha konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dibandingkan 14,5% untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008.

4. Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika

Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika meningkat sebesar Rp3.793,4 miliar, atau 25,8%, dari Rp14.712,8 miliar pada 2008 menjadi Rp18.506,2 miliar pada 2009. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan layanan SMS, internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika.

Pendapatan SMS meningkat sebesar Rp845,8 miliar atau 8,8% dari Rp9.653,6 miliar pada 2008 menjadi Rp10.499,4 miliar pada 2009. Pendapatan layanan internet, komunikasi data dan teknologi informatika meningkat sebesar Rp2.944,4 miliar, atau 60,8% dari Rp4.841,1 miliar pada 2008 menjadi Rp7.785,5 miliar pada 2009 terutama karena peningkatan usaha pemasaran untuk mendorong peningkatan penjualan atas layanan data dan internet terutama pelanggan Speedy pada 2009. Pelanggan Speedy meningkat sebesar 77,5% dari 645.000 pelanggan pada 2008 menjadi sekitar 1.145.000 pelanggan pada 2009.

5. Pendapatan Jaringan

Pendapatan jaringan meningkat sebesar Rp138,5 miliar, atau 2,8% dari Rp1.079,5 miliar di 2008 menjadi Rp1.218,0 miliar pada 2009, terutama disebabkan oleh peningkatan sewa sirkit dan peningkatan pada pendapatan sewa transponder satelit.

Pendapatan sewa sirkit meningkat sebesar Rp51,2 miliar atau 7,4% dari Rp691,8 miliar pada 2008 menjadi Rp743,0 miliar pada 2009. Pendapatan sewa transponder satelit meningkat sebesar Rp87,3 miliar, atau 22,5%, dari Rp387,7 miliar pada 2008 menjadi Rp475,0 miliar pada 2009.

6. Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya

Pada tahun 2009, pendapatan TELKOM dari jasa telekomunikasi lainnya meningkat sebesar Rp359,3 miliar, atau 34,4%, dari Rp1,044.5 miliar pada 2008 menjadi Rp1.403,8 miliar pada 2009. Peningkatan pendapatan ini terutama berasal dari pendapatan CPE (*Customer Premises Equipment*) dan pendapatan TV berbayar.

B. Beban Usaha

Jumlah beban usaha meningkat sebesar Rp3.611,2 miliar, atau 9,4% dari Rp38.382,3 miliar pada 2008 menjadi Rp41.993,5 miliar pada 2009. Kenaikan jumlah beban usaha terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi, beban umum dan administrasi, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1. Beban Penyusutan

Beban penyusutan meningkat sebesar Rp1.496,9 miliar, atau 13,5%, dari Rp11.069,0 miliar pada 2008 menjadi Rp12.565,9 miliar pada 2009. Peningkatan beban penyusutan terutama disebabkan oleh pembangunan BTS Telkomsel sebanyak 4.120 unit pada 2009, peningkatan kapasitas stasiun transmisi dan penerima, peralatan *switching*, jaringan pintar dan peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur jaringan (jaringan transmisi. *backbone* dan jaringan akses).

2. Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi

Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp2.364,6 miliar, atau 19,4%, dari Rp12.217,7 miliar pada 2008 menjadi Rp14.582,3 miliar pada 2009. Peningkatan beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi terutama disebabkan oleh:

- beban operasi dan pemeliharaan meningkat sebesar Rp1.574,9 miliar, atau 26,7%, dari Rp5.905,3 miliar pada 2008 menjadi Rp7.480,2 miliar pada 2009, yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas BTS Telkomsel yang mendukung peningkatan pelanggan dari 65,3 juta pelanggan pada tahun 2008 menjadi 81,6 juta pelanggan pada tahun 2009. Telkomsel juga meningkatkan kapasitas stasiun transmisi dan penerima, *switching* serta peralatan jaringan pintar.
- beban listrik, air dan gas meningkat sebesar Rp165,7 miliar atau 29,7% dari Rp558,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp724,1 miliar pada tahun 2009, terutama disebabkan meningkatnya jumlah BTS seluler dan telepon tidak bergerak nirkabel serta kenaikan tarif listrik;
- beban pemakaian frekuansi radio meningkat sebesar Rp384,3 miliar atau 16,0% dari Rp2.400,3 miliar pada 2008 menjadi Rp2.784,6 miliar pada 2009, disebabkan oleh peningkatan jumlah total BTS (Flexi dan Telkomsel). BTS Flexi tumbuh sebesar 36,7% dari 4.054 unit pada 2008 menjadi 5.543 unit pada 2009, sementara BTS Telkomsel tumbuh sebesar 15,3% dari 26.872 unit pada 2008 menjadi 30.992 unit pada 2009; dan
- beban pokok jasa teknologi informatika meningkat sebesar Rp75,5 miliar atau 71,4%, dari Rp105,7 miliar pada 2008 menjadi Rp181,2 miliar pada 2009, yang disebabkan oleh meningkatnya beban integrasi sistem perangkat keras.

3. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar Rp424,0 miliar, atau 11,7%, dari Rp3.628,7 miliar pada 2008 menjadi Rp4.052,7 miliar pada 2009, yang disebabkan oleh:

- peningkatan karena bertambahnya penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang sebesar Rp175,7 miliar, atau 44,1%;
- peningkatan amortisasi *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya sebesar Rp146,9 miliar atau 11,8%;
- peningkatan beban penagihan Rp133,9 miliar, atau 22,9%; dan
- peningkatan sumbangan sosial dan umum sebesar Rp78,8 miliar, atau 55,6%, dari Rp141,8 miliar pada 2008 menjadi Rp220,6 miliar pada 2009, terutama disebabkan meningkatnya program kemitraan.

4. Beban Pemasaran

Beban pemasaran menurun sebesar Rp90,2 miliar, atau 3,8%, dari Rp2.349,7 miliar pada 2008 menjadi Rp2.259,5 miliar pada 2009, terutama disebabkan oleh penurunan beban iklan sebesar Rp152,3 miliar, atau 8,1%.

5. Beban Karyawan

Beban karyawan menurun sebesar Rp583,4 miliar, atau 6,4%, dari Rp9.116,6 miliar pada 2008 menjadi Rp8.533,2 miliar pada 2009. Penurunan beban karyawan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dan penurunan beban pajak penghasilan karyawan. Penurunan beban karyawan dijelaskan sebagai berikut:

- beban imbalan kesehatan pascakerja berkala bersih menurun sebesar Rp570,7 miliar, atau 63,3%, dari Rp901,8 miliar pada 2008 menjadi Rp331,1 miliar pada 2009, terutama disebabkan penurunan beban bunga;
- pajak penghasilan (PPh) karyawan menurun sebesar Rp454,0 miliar, atau 40,2%, dari Rp1.128,4 miliar pada 2008 menjadi Rp674,4 miliar pada 2009, terutama disebabkan karena penurunan tarif pajak dan melebarnya lapisan penghasilan kena pajak, serta penurunan jumlah pegawai dari 30.213 orang di tahun 2008 menjadi 28.750 orang di tahun 2009; dan
- beban pensiun berkala bersih menurun sebesar Rp80,7 miliar, atau 11,4% dari Rp706,5 miliar pada 2008 menjadi Rp625,8 miliar pada 2009, terutama disebabkan oleh peningkatan pengembalian yang diharapkan dari aset program pensiun berdasarkan perhitungan aktuaria.

Penurunan ini diimbangi dengan kenaikan pada:

- program pensiun dini (pendi) meningkat sebesar Rp255,4 miliar atau 32,4%, dari Rp788,2 miliar pada 2008 menjadi Rp1.043,6 miliar pada 2009, yang disebabkan penerapan program pensiun dini pada 2009;
- beban penghargaan masa kerja (LSA) dan terminasi penghargaan masa kerja (LSA) meningkat sebesar Rp81,3 miliar, atau 230,2%, dari Rp35,3 miliar pada 2008 menjadi Rp116,6 miliar pada 2009, terutama disebabkan oleh dimulainya pemberian tunjangan cuti besar di Telkomsel pada tahun 2009 dan biaya untuk tunjangan tersebut dimasukan ke dalam beban;
- cuti, insentif dan tunjangan lainnya meningkat sebesar Rp93,4 miliar, atau 4,2%, dari Rp2.242,0 miliar pada 2008 menjadi Rp2.335,4 miliar pada 2009, terutama disebabkan oleh kenaikan beban insentif yang sejalan dengan kenaikan performansi keuangan; dan
- gaji dan tunjangan terkait lainnya meningkat sebesar Rp99,8 miliar, atau 3,4% dari Rp2.956,4 miliar pada 2008 menjadi Rp3.056,3 miliar pada

2009, terutama disebabkan oleh kenaikan gaji pegawai walaupun diimbangi dengan penurunan jumlah pegawai.

C. Laba Usaha dan Marjin Usaha

Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba usaha meningkat sebesar Rp295,6 miliar, atau 1,3% dari Rp22.307,5 miliar pada 2008 menjadi Rp22.603,1 miliar pada 2009. Sementara itu, pendapatan usaha meningkat sebesar Rp3.906,8 miliar atau 6,4%. Marjin usaha TELKOM sedikit menurun dari 36,8% pada 2008 menjadi 35,0% pada 2009.

D. (Beban) Penghasilan Lain-Lain

Beban lain-lain menurun sebesar Rp1.740,8 miliar, atau 87,3%, dari Rp1.994,7 miliar pada 2008 menjadi Rp253,9 miliar pada 2009, terutama disebabkan oleh keuntungan selisih kurs - bersih meningkat sebesar Rp2.586,7 miliar, atau 160,3% dari rugi sebesar Rp1.613,8 miliar pada 2008 menjadi keuntungan sebesar Rp972,9 miliar pada 2009, terutama disebabkan oleh apresiasi Rupiah yang diakibatkan oleh laba translasi atas pinjaman dalam mata uang Dolar AS.

E. Laba Sebelum Pajak dan Marjin Laba Sebelum Pajak

Sebagai hasil dari hal-hal yang dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp2.036,5 miliar, atau 10,0% dari Rp20.312,8 miliar pada 2008 menjadi Rp22.349,3 miliar pada 2009. Marjin laba sebelum pajak meningkat dari 34,6% pada 2008 menjadi 35,3% pada 2009.

F. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan meningkat sebesar Rp733,4 miliar, atau 13,0%, dari Rp5.639,7 miliar pada 2008 menjadi Rp6.373,1 miliar pada 2009, sejalan dengan peningkatan laba sebelum pajak pada 2009.

G. Hak Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan

Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan meningkat sebesar Rp590,5 miliar, atau 14,6%, dari Rp4.053,6 miliar pada 2008 menjadi Rp4.644,1 miliar pada 2009, terutama karena meningkatnya kinerja keuangan Telkomsel.

H. Laba Bersih

Sebagai hasil dari penjelasan di atas, laba bersih perusahaan meningkat sebesar Rp712,6 miliar, atau 6,7%, dari Rp10.619,5 miliar pada 2008 menjadi Rp11.332,1 miliar pada 2009.

I. Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp4.675,6 miliar, atau 13,6%, dari Rp34.314,1 miliar pada 2008 menjadi Rp38.989,7 miliar pada 2009. Peningkatan jumlah ekuitas terutama disebabkan oleh laba bersih sebesar Rp11.332,1 miliar pada 2009, diimbangi dengan dividen tunai sebesar Rp5.840,7 miliar dan akuisisi 49% saham Infomedia sebesar Rp439,4 miliar.

J. Saldo Laba Ditahan

Saldo laba ditahan meningkat sebesar Rp4.967,2 miliar, dari Rp31.500,0 miliar per 31 Desember 2008 menjadi Rp36.467,2 miliar per 31 Desember 2009, yang disebabkan oleh laba bersih sebesar Rp11.332,1 miliar pada 2009, yang diimbangi dengan pengakuan dividen tunai sebesar Rp5.840,7 miliar.

TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2008, DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2007

A. Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha meningkat sebesar Rp1.249,8 miliar atau 2,1% dari Rp59.440 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp60.689,8 miliar pada tahun 2008. Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan dari pendapatan seluler, jaringan dan jasa telekomunikasi lainnya.

1. Pendapatan Sambungan Telepon Tidak Bergerak

   Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak menurun sebesar Rp1.270,9 miliar atau 11,6% dari Rp11.001,2 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp9.730,3 miliar pada tahun 2008. Penurunan pendapatan sambungan telepon tidak bergerak terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari layanan telepon tidak bergerak kabel. Pendapatan telepon tidak bergerak kabel menurun sebesar Rp1.272,6 miliar atau 13,2% dari Rp9.617,3 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp8.344,8 miliar pada tahun 2008. Pendapatan telepon tetap nirkabel sebaliknya meningkat sebesar Rp1,6 miliar atau 0,1%. dari Rp1.383,9 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp1.385,5 miliar pada tahun 2008.

   Penurunan pendapatan telepon tidak bergerak kabel terutama disebabkan penurunan pada pendapatan sambungan jarak jauh dalam negeri sebesar 18,0% dari Rp5.562,3 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp4.559,9 miliar pada tahun 2008. Peningkatan pada pendapatan telepon tetap nirkabel terutama disebabkan pertumbuhan sebesar 45,7% pada produksi pulsa telepon seluler dari 9,3 miliar menit pada tahun 2007 menjadi 13,6 miliar menit pada tahun 2008.

2. Pendapatan Telepon Seluler

   Pendapatan telepon seluler meningkat sebesar Rp2.693,9 miliar atau 11,9% dari Rp22.638,1 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp25.332,0 miliar pada tahun 2008 terutama disebabkan karena meningkatnya biaya *air time* dan biaya fitur. Biaya *air time* meningkat sebesar Rp1.869,1 miliar atau 8,6% dari Rp21.823,2 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp23.692,3 miliar pada tahun 2008 yang dipengaruhi peningkatan pada jumlah pelanggan seluler dan jumlah menit yang digunakan.

Seorang *Customer Service* sedang mencoba layanan Telkomsel My Pulau, yaitu layanan jejaring sosial yang memiliki fitur unik seperti: *social status integrator, my interest*, dan *my buys.*

Pendapatan jasa penyambungan meningkat sebesar Rp154,5 miliar atau 118,5% dari Rp130,4 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp284,9 miliar pada tahun 2008. Pendapatan fitur meningkat sebesar Rp410,2 miliar atau 131,2% dari Rp312,7 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp722,9 miliar pada tahun 2008. Pendapatan abonemen bulanan meningkat sebesar Rp260,1 miliar atau 69,9% dari Rp371,8 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp631,9 miliar pada tahun 2008, terutama karena adanya peningkatan jumlah pelanggan KartuHALO.

Peningkatan pendapatan seluler terutama disebabkan oleh peningkatan pelanggan Telkomsel sebesar 36,4% dari 47,9 juta pelanggan pada tahun 2007 menjadi 65,3 juta pelanggan pada tahun 2008. Peningkatan jumlah pelanggan ini karena terjadinya peningkatan pelanggan bersih sebesar 41,5% dari 12,3 juta pelanggan pada tahun 2007 menjadi 17,4 juta pelanggan pada tahun 2008. Pelanggan pascabayar tumbuh sebesar 1,4% menjadi 1,9 juta pelanggan, sedangkan pelanggan prabayar meningkat sebesar 37,8% menjadi 63,4 juta pelanggan per tanggal 31 Desember 2008.

Tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dari pelanggan prabayar menyebabkan komposisi pelanggan prabayar terhadap total jumlah pelanggan meningkat dari 96,0% pada tahun 2007 menjadi 97,0% pada tahun 2008. Dengan adanya peningkatan persentase jumlah pelanggan prabayar tersebut terhadap total jumlah pelanggan, ARPU campuran bulanan menurun dari sekitar Rp80.000 pada tahun 2007 menjadi sekitar Rp59.000 pada tahun 2008. ARPU untuk SMS/*non-voice* pelanggan pascabayar menurun dari sekitar Rp49.000 pada tahun 2007 menjadi sekitar Rp40.000 pada tahun 2008. Menit pemakaian meningkat 257% dari 25,2 miliar menit di tahun 2007 menjadi 90,2 miliar menit di tahun 2008.

3. Pendapatan Interkoneksi

Pendapatan interkoneksi-bersih menurun sebesar Rp860,5 miliar atau 8,9% dari Rp9.651,3 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp8.790,8 miliar pada tahun 2008. Pendapatan interkoneksi-bersih terdiri dari pendapatan interkoneksi sambungan telepon tidak bergerak kami dan pendapatan interkoneksi dari jaringan seluler Telkomsel. Pendapatan interkoneksi termasuk sambungan langsung international incoming dari layanan SLI (TIC-007).

Pendapatan interkoneksi seluler bersih menurun Rp834,4 miliar atau 9,6% dari Rp8.734,8 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp7.900,4 miliar pada tahun 2008, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan panggilan keluar (lokal dan SLJJ) dari telepon tidak bergerak kabel beralih ke seluler. Pendapatan interkoneksi internasional bersih meningkat sebesar Rp85,9 miliar atau 12,4% dari Rp694,7 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp780,6 miliar pada tahun 2008. Pendapatan interkoneksi

lain juga mengalami penurunan sebesar Rp112,1 miliar atau 50,5% dari Rp221,8 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp109,7 miliar pada tahun 2008.

Pendapatan interkoneksi-bersih memberikan kontribusi 14,4% terhadap total pendapatan usaha konsolidasian untuk tahun 2008 dibandingkan 16,2% untuk tahun 2007.

4. Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika

Pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika naik sebesar Rp28,7 miliar atau 0,2% dari Rp14.684,1 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp14.712,8 miliar di tahun 2008. Peningkatan pendapatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan internet, komunikasi data dan jasa teknologi informatika.

Pendapatan internet, komunikasi data, dan jasa teknologi infoematika meningkat sebesar Rp1.608, 2 miliar, atau 49,7% dari Rp 3.232,9 miliar di tahun 2007 menjadi Rp 4.481,1 di tahun 2008. Hal tersebut terutama disebabkan karena peningkatan usaha pemasaran untuk mendorong peningkatan penjualan terhadap layanan data, internet dan layanan teknologi informatika, terutama pelanggan Speedy pada tahun 2008 dan peningkatan pendapatan VPN serta kontribusi dari anak perusahaan (SIGMA). Pelanggan *Speedy* meningkat 167,6% dari sekitar 241.000 pada tahun 2007 menjadi 645.000 pada tahun 2008 (tidak termasuk jumlah pelanggan untuk tujuan *trial* & pendidikan sekitar 205.000). Pendapatan VPN meningkat sebesar 76,1% dari Rp393,3 miliar di tahun 2007 menjadi Rp692,5 miliar di tahun 2008.

Peningkatan ini mengimbangi penurunan pendapatan dari SMS sebesar Rp1.570,7 miliar atau 14,0% dari Rp11.224,3 miliar di tahun 2007 menjadi Rp9.653,6 miliar di tahun 2008 terutama karena penurunan tarif SMS yang signifikan di Telkomsel. meskipun trafik SMS meningkat 58% dari 49,5 miliar pada tahun 2007 menjadi 78,0 miliar pada tahun 2008.

5. Pendapatan Jaringan

Pendapatan jaringan meningkat sebesar Rp372,1 miliar atau 52,6% dari Rp707,4 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp1.079,5 miliar pada tahun 2008 terutama disebabkan oleh peningkatan layanan transponder satelit dan sewa sirkit.
Pendapatan sewa transponder satelit meningkat sebesar Rp153,8 miliar atau 65,7% dari Rp233,9 miliar di tahun 2007 menjadi Rp387,7 miliar pada tahun 2008. Pendapatan sirkit langganan meningkat sebesar Rp218,3 miliar atau 46,1% dari Rp473,5 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp691,8 miliar pada tahun 2008 karena meningkatnya jumlah operator telekomunikasi yang menggunakan jaringan TELKOM.

6. Pendapatan Jasa Telekomunikasi Lainnya

Pendapatan dari jasa telekomunikasi lainnya meningkat sebesar Rp286,5 miliar atau 37,8% dari Rp758,0 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp1.044,5 miliar pada tahun 2008, terutama disebabkan oleh program *bundling* terminal Flexi.

B. Beban Usaha

Jumlah beban usaha meningkat sebesar Rp5.415,0 miliar atau 16,4% dari Rp32.967,3 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp38.382,3 miliar pada tahun 2008. Peningkatan total beban usaha terutama disebabkan oleh meningkatnya beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi, beban penyusutan, beban pemasaran, dan beban pegawai, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah.

1. Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa Telekomunikasi

Beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi meningkat sebesar Rp2.627,1 miliar atau 27,4% dari Rp9.590,6 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp12.217,7 miliar pada tahun 2008. Peningkatan beban operasi. pemeliharaan dan jasa telekomunikasi terutama disebabkan oleh:

- beban pemakaian frekuensi radio meningkat sebesar Rp1.261,8 miliar dari Rp1.138,5 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp2.400,3 miliar pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 110,8%, yang disebabkan oleh peningkatan jumlah BTS Telkomsel dan TELKOM. Jumlah BTS TELKOM meningkat sebesar 112,1% dari 1.911 unit pada tahun 2007 menjadi 4.054 unit pada tahun 2008. Jumlah BTS Telkomsel meningkat sebesar 28,8% dari 20.858 unit pada tahun 2007 menjadi 26.872 unit pada tahun 2008;
- peningkatan beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp489,5 miliar atau 9,0%, dari Rp5.415,8 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp5.905,3 miliar pada tahun 2008 yang disebabkan oleh meningkatnya kapasitas jaringan Telkomsel yang mendukung peningkatan jumlah pelanggan dari 47,9 juta pada tahun 2007 menjadi 65,3 juta pelanggan pada tahun 2008. Telkomsel juga meningkatkan kapasitas stasiun transmisi, stasiun penerima, switching, dan peralatan jaringan pintar; dan
- beban pokok penjualan pesawat telepon, kartu telepon, kartu SIM dan RUIM meningkat Rp519,5 miliar, dari Rp582,1 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp1.101,5 miliar pada tahun 2008.

2. Beban Penyusutan

Beban penyusutan meningkat sebesar Rp1.629,1 miliar atau 17,3% dari Rp9.440,5 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp11.069,6 miliar pada tahun 2008. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh penambahan jumlah BTS Telkomsel sebanyak 6.014 unit pada tahun 2008, peningkatan kapasitas stasiun transmisi dan penerima, switching dan

peralatan jaringan pintar dan juga peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur jaringan (jaringan transmisi. backbone dan jaringan akses).

3. Beban Pemasaran

Beban pemasaran meningkat sebesar Rp580,6 miliar atau 32,8% dari Rp1.769,1 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp2.349,7 miliar pada tahun 2008. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban iklan sebesar Rp575,6 miliar atau 44,3%.

4. Beban Karyawan

Beban karyawan meningkat sebesar Rp621,8 miliar atau 7,3% dari Rp8.494,9 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp9.116,6 miliar pada tahun 2008. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan beban pensiun dini dan peningkatan beban penghargaan masa kerja. Peningkatan beban karyawan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- beban pensiun dini naik sebesar Rp788,2 miliar karena adanya pelaksanaan program pensiun dini pada tahun 2008;
- beban penghargaan masa kerja (LSA) dan terminasi penghargaan masa kerja (LSA) meningkat sebesar Rp395,1 miliar dari (Rp359,8) miliar pada tahun 2007 menjadi Rp35,3 miliar pada tahun 2008;
- beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih yang meningkat Rp178,6 miliar atau 24,7%, dari Rp723,2 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp901,8 miliar di 2008; dan
- gaji dan tunjangan lainnya yang meningkat sebesar Rp72,3 miliar, atau 2,5%, dari Rp2.884,1 miliar di tahun 2007 menjadi Rp2.956,4 miliar pada 2008;

Peningkatan ini sebagian diimbangi oleh penurunan di:

- cuti, insentif dan tunjangan lainnya yang menurun sebesar Rp246,3 miliar atau 9,9% dari Rp2.488,3 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp2.242,0 miliar pada tahun 2008;
- beban pensiun berkala bersih yang menurun sebesar Rp153,0 miliar atau 17,8% dari Rp859,5 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp706,5 miliar pada tahun 2008, terutama disebabkan menurunnya beban persiapan pensiun dini; dan
- pajak penghasilan (PPh) pendapatan karyawan yang menurun sebesar Rp382,7 miliar atau 25,3% dari Rp1.511,2 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp1.128,4 miliar pada tahun 2008.

5. Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi menurun sebesar Rp43,5 miliar atau 1,2% dari Rp3.672,2 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp3.628,7 miliar pada tahun 2008, yang disebabkan oleh:

- penurunan beban penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang sebesar Rp102,9 miliar atau 20,5%;
- penurunan beban sumbangan sosial dan umum sebesar Rp95,5 miliar atau 40,2% dari Rp237,4 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp141,8 miliar pada tahun 2008 yang terutama disebabkan oleh penurunan realisasi program kemitraan dan penurunan beban audit.

Penurunan tersebut diimbangi sebagian oleh:

- peningkatan beban amortisasi *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya sebesar Rp89,6 miliar atau 7,8% dari Rp1.154,0 pada tahun 2007 menjadi Rp1.243,6 miliar pada tahun 2008;
- peningkatan beban jasa profesional sebesar Rp48,0 miliar atau 30,6% dari Rp156,9 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp204,9 miliar pada tahun 2008 yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban konsultan manajemen sebesar 42,7%; dan
- peningkatan beban keamanan dan screening sebesar Rp22,7 miliar, atau 9,6% dari Rp236,0 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp258,8 miliar pada tahun 2008 yang terutama disebabkan oleh peningkatan gaji petugas keamanan.

C. Laba Usaha dan Marjin Usaha

Laba usaha menurun sebesar Rp4.165,2 miliar atau 15,7% dari Rp26.472,7 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp22.307,5 miliar pada tahun 2008. Sementara itu pendapatan usaha meningkat sebesar Rp1.249,8 miliar, atau 2,1%. Marjin usaha Perusahaan sedikit menurun dari 44,5% pada tahun 2007 menjadi 36,8% pada tahun 2008.

D. (Beban) Penghasilan Lain-lain

Beban lain-lain meningkat sebesar Rp1.117,6 miliar atau 127,4% sebesar Rp877,1 miliar pada tahun 2007 menjadi beban sebesar Rp1.994,7 miliar pada tahun 2008, terutama yang disebabkan oleh:

- kerugian selisih kurs - bersih meningkat sebesar Rp1.319,0 miliar atau 447,5% dari rugi bersih Rp294,8 miliar pada tahun 2007 menjadi rugi bersih sebesar Rp1.613,8 miliar pada tahun 2008, terutama disebabkan oleh depresiasi Rupiah yang mengakibatkan rugi translasi pada pinjaman dalam mata uang Dolar AS; dan
- beban bunga meningkat sebesar Rp145,7 miliar atau 10,1% dari Rp1.436,2 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp1.581,8 miliar pada tahun 2008, terutama karena meningkatnya hutang bank jangka pendek dan pinjaman jangka menengah Telkomsel.

E. Laba Sebelum Pajak dan Marjin Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak menurun sebesar Rp5.282,8 miliar atau 20,6% dari Rp25.595,7 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp20.312,8 miliar pada tahun 2008 terutama disebabkan oleh peningkatan rugi selisih kurs sebesar Rp1.319,0 miliar. Marjin laba sebelum pajak menurun dari 43,1% pada tahun 2007 menjadi 33,5% pada tahun 2008.

F. Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan menurun sebesar Rp2.288,1 miliar atau 28,9% dari Rp7.927,8 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp5.639,7 miliar pada tahun 2008, sejalan dengan menurunnya pendapatan sebelum pajak pada tahun 2008.

G. Hak Minoritas Atas Laba Bersih Anak Perusahaan

Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan menurun sebesar Rp757,2 miliar atau 15,7% dari Rp4.810,8 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp4.053,6 miliar pada tahun 2008, terutama disebabkan karena menurunnya kinerja keuangan Telkomsel.

H. Laba Bersih

Akibat hal-hal yang dibahas di atas, laba bersih perusahaan menurun sebesar Rp2.237,5 miliar atau 17,4% dari Rp12.857,0 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp10.619,5 miliar pada 2008. Marjin laba bersih menurun dari 21,6% pada 2007 menjadi 17,5% pada tahun 2008.

I. Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp565,5 miliar atau 1,7% dari Rp33.748,6 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp34.314,1 miliar pada tahun 2008, terutama disebabkan oleh laba bersih sebesar Rp10.619,5 miliar pada tahun 2008, yang dikurangi dengan dividen tunai sebesar Rp8.034,5 miliar. Per tanggal 31 Desember 2008, TELKOM telah membeli kembali Saham Seri B yang diterbitkan dan beredar sebanyak 490,5 juta lembar, yang merupakan 2,4% dari saham yang diterbitkan dan beredar dengan jumlah nilai pembelian sebesar Rp4.264,1 miliar (termasuk biaya broker dan kustodian). Hal-hal tersebut berkontribusi terhadap penurunan ekuitas sebesar Rp2.087,5 miliar.

J. Saldo Laba Ditahan

Saldo laba ditahan meningkat sebesar Rp2.585,0 miliar dari Rp28.915,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi Rp31.500,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2008, yang disebabkan karena laba bersih sebesar Rp10.619,5 miliar pada tahun 2008 dan dikurangi dividen tunai sebesar Rp8.034,5 miliar.

Rp 2.764 miliar

Rencana investasi TELKOM pada bisnis New Wave untuk tahun 2010 sebesar Rp2.764 miliar

Tabel Hasil Operasi Berdasarkan Segmen

	Tahun yang berakhir 31 Desember,			
	2007	2008	2009	2009
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	US$ (juta)
Sambungan Kabel Tidak Bergerak				
Hasil Segmen				
Pendapatan Usaha Eksternal	20.246,2	20.154,6	19.533,2	2.072,5
Pendapatan Usaha Antar Segmen	942,2	1.316,0	2.736,3	290,3
Jumlah Pendapatan Segmen	21.188,4	21.470,6	22.269,5	2.362,8
Beban Usaha Segmen	(16.253,8)	(17.780,9)	(18.935,0)	(2009,0)
Hasil Segmen	4.934,6	3.689,7	3.334,5	353,8
Penyusutan dan Amortisasi	(3.403,8)	(3.432,4)	(3.409,6)	(361,8)
Amortisasi *Goodwill* dan Aset tak berwujud lainnya	(1.067,4)	(1.196,9)	(1.274,5)	(135,2)
Beban Non-Kas lain-lain	(397,3)	(335,4)	(461,3)	(48,9)
Sambungan Nirkabel Tidak Bergerak				
Hasil Segmen				
Pendapatan Usaha Eksternal	3.221,2	3.271,4	3.283,5	348,4
Pendapatan Usaha Antar Segmen	(74,7)	26,4	52,5	5,6
Jumlah Pendapatan Segmen	3.146,5	3.297,8	3.336,0	354,0
Beban Usaha Segmen	(1.628.3)	(2.094.4)	(3.056,6)	(324,3)
Hasil Segmen	1.518,1	1.203,4	279,4	29,6
Penyusutan dan Amortisasi	(343,3)	(408,5)	(631,0)	(67,0)
Amortisasi *Goodwill* dan Aset tidak berwujud lainnya	–	-	(6,1)	(0,7)
Seluler				
Hasil Segmen				
Pendapatan Usaha Eksternal	35.574,7	36.878,1	41.376,4	4.390,1
Pendapatan Antar Segmen	1.042,4	272,7	159,4	16,9
Jumlah Pendapatan Segmen	36.617,1	37.150,9	41.535,8	4.407,0
Beban Usaha Segmen	(16.796,4)	(20.404,5)	(22.800,9)	(2.419,2)
Hasil Segmen	19.820,6	16.746,4	18.735,0	1.987,8
Penyusutan dan Amortisasi	(5.685,4)	(7.207,6)	(8.513,2)	(903,3)
Amortisasi *Goodwill* dan Aset tak berwujud lainnya	(86,6)	(46,7)	(109,4)	(11,6)
Beban Non-Kas lain-lain	(101,7)	(54,9)	(108,3)	(11,5)
Lain-lain				
Hasil Segmen				
Pendapatan Usaha Eksternal	398,0	385,6	403,6	42,8
Pendapatan Usaha Antar Segmen	264,8	346,2	325,3	34,5
Jumlah Pendapatan Segmen	662,8	731,8	728,9	77,3
Beban Usaha Segmen	(610,4)	(642,7)	(744,7)	(79,0)
Hasil Segmen	52,4	89,1	(15,9)	(1,7)
Penyusutan dan Amortisasi	(51,0)	(56,0)	(30,5)	(3,2)
Amortisasi *Goodwill* dan Aset tak berwujud lainnya	-	-	(0,5)	(0,1)
Beban Non-Kas lain-lain	(1,8)	-	(4,1)	(0,4)

HASIL SEGMEN

TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008

Segmen Sambungan Kabel Tidak Bergerak

Pendapatan segmen sambungan kabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp798,9 miliar atau 3,7% dari Rp21.470,6 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp22.269,5 miliar pada tahun 2009. Peningkatan pendapatan segmen ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika sebesar Rp1.142,6 miliar terutama karena meningkatnya pendapatan koneksi internet dari layanan akses pita lebar. Kenaikan tersebut juga berkontribusi terhadap kenaikan jasa telekomunikasi lainnya sebsar Rp308,9 miliar. Peningkatan pendapatan layanan pada segmen telepon kabel tidak bergerak ini diimbangi oleh penurunan pendapatan percakapan telepon kabel tidak bergerak sebesar Rp957,3 miliar karena menurunnya volume panggilan, dan penurunan pendapatan dari interkoneksi sebesar Rp1.136,8 miliar.

Beban segmen sambungan kabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp1.154,1 miliar, atau 6,5% dari Rp17.780,9 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp18.935,0 miliar pada tahun 2009, terutama disebabkan karena peningkatan pada beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp143,1 miliar atau 8,4%, beban umum dan administrasi sebesar Rp112,6 miliar, atau 8,9% dan amortisasi dari aset tidak berwujud sebesar Rp111,0 miliar atau 9,3%.

Segmen Sambungan Nirkabel Tidak Bergerak

Pendapatan segmen sambungan nirkabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp38,2 miliar, atau 1,2%, dari Rp3.297,8 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp3.336,0 miliar pada tahun 2009, terutama disebabkan peningkatan pendapatan data dan internet sambungan nirkabel tidak bergerak sebesar Rp220,9 miliar, atau 39,7% dan meningkatnya pendapatan interkoneksi sambungan nirkabel tidak bergerak sebesar Rp67,4 miliar, atau 5,2%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pelanggan sambungan nirkabel tidak bergerak sebesar 18,9% dari 12,7 juta pelanggan pada akhir tahun 2008 menjadi 15,1 juta pelanggan pada akhir tahun 2009.

Beban segmen sambungan nirkabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp962,2 miliar atau 45,9%, dari Rp2.094,4 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp3.056,6 miliar pada tahun 2009, terutama karena meningkatnya beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp590,2 miliar, beban pemasaran sebesar Rp252,9 miliar, dan beban penyusutan sebesar Rp222,6 miliar dari tahun 2008 sampai dengan 2009.

Segmen Seluler

Pendapatan segmen seluler meningkat sebesar Rp4.385,0 miliar, atau 11,8%, dari Rp37.150,9 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp41.535,8 miliar pada tahun 2009, terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan percakapan seluler sebesar Rp3.504,3 miliar sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan Telkomsel sebesar 25,0% dari 65,3 juta pelanggan pada akhir tahun 2008 menjadi 81,6 juta pelanggan pada akhir tahun 2009.

Beban segmen seluler meningkat sebesar Rp2.396,4 miliar, atau 11.7%, dari Rp20.404,5 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp22.800,9 miliar pada tahun 2009, terutama karena meningkatnya beban operasi, pemeliharaan dan jasa telekomunikasi sebesar Rp777,8 miliar, beban depresiasi sebesar Rp1.276,6 miliar dan beban umum dan administrasi sebesar Rp241,5 miliar yang sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan seluler Telkomsel dari 65,3 juta pelanggan pada akhir tahun 2008 menjadi 81.6 juta pelanggan pada akhir tahun 2009 serta meningkatnya BTS Telkomsel dari 26,872 unit pada akhir tahun 2008 menjadi 30.992 unit pada akhir tahun 2009.

Segmen Lain-lain

Pendapatan segmen lain-lain menurun sebesar Rp2,9 miliar, atau 0,4%, dari Rp731,8 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp728,9 miliar pada tahun 2009, disebabkan oleh menurunnya pendapatan layanan *call center* Infomedia sebesar Rp13,8 miliar.

Beban segmen lain-lain meningkat sebesar Rp102,0 miliar, atau 15,9%, dari Rp642,7 miliar pada tahun 2008 menjadi Rp744,7 miliar pada tahun 2009, terutama karena meningkatnya beban karyawan sebesar Rp112,0 miliar dan beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp53,2 miliar.

TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2008 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007

Segmen Sambungan Kabel Tidak Bergerak

Pendapatan segmen sambungan kabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp282,2 miliar atau 1,3% dari Rp21.188,4 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp21.470,6 miliar pada tahun 2008. Peningkatan pendapatan segmen ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan data, internet dan jasa teknologi informatika sebesar Rp1.543,6 miliar terutama karena meningkatnya pendapatan koneksi internet dari layanan pita lebar. Kenaikan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan jasa jaringan sebesar Rp348,7 miliar dan pendapatan jasa telekomunikasi lainnya sebesar Rp396,8 miliar. Peningkatan pendapatan layanan pada segmen sambungan kabel tidak bergerak ini diimbangi oleh penurunan pendapatan percakapan sambungan kabel tidak bergerak sebesar Rp1.226,2 miliar karena menurunnya volume panggilan, dan penurunan pendapatan dari interkoneksi bersih sebesar Rp323,8 miliar.

Beban segmen sambungan kabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp1.527,1 miliar, atau 9,4% dari Rp16.253,8 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp17.780,9 miliar pada tahun 2008, terutama disebabkan karena peningkatan pada beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp544,1 miliar atau 46,5%, beban karyawan sebesar Rp619,3 miliar, atau 9,5% dan beban pemasaran sebesar Rp159,0 miliar, atau 37,4%.

Segmen sambungan Nirkabel Tidak Bergerak

Pendapatan segmen sambungan nirkabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp151,4 miliar atau 4,8% dari Rp3.146,4 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp3.297,8 miliar pada tahun 2008 yang disebabkan oleh

meningkatnya pendapatan interkoneksi sambungan nirkabel tidak bergerak sebesar Rp80,6 miliar atau 6,6%, kenaikan sebesar Rp51,2 miliar atau 10,1% pada pendapatan data, internet dan layanan teknologi informatika dan pendapatan panggilan segmen sambungan kabel tidak bergerak nirkabel sebesar Rp19,4 miliar atau 1,4%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pelanggan telepon tidak bergerak nirkabel sebesar 100,0% dari 6,4 juta sst pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi 12,7 juta sst pada tanggal 31 Desember 2008.

Beban segmen sambungan nirkabel tidak bergerak meningkat sebesar Rp466,1 miliar atau 28,6% dari Rp1.628,3 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp2.094,4 miliar pada tahun 2008, terutama karena meningkatnya beban operasi dan pemeliharaan sebesar Rp247,5 miliar, beban pemasaran sebesar Rp134,9 miliar dan beban penyusutan sebesar Rp65,1 miliar dari tahun 2007 ke tahun 2008.

Segmen Seluler

Pendapatan segmen seluler meningkat sebesar Rp533,9 miliar atau 1,5% dari Rp36.617,0 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp37.150,9 miliar pada tahun 2008, terutama disebabkan karena peningkatan pendapatan percakapan seluler sebesar Rp2.694,0 miliar yang sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan Telkomsel sebesar 36,4% dari 47,9 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi 65,3 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2008.

Beban segmen seluler meningkat sebesar Rp3.608,1 miliar atau 21,5% dari Rp16.796,4 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp20.404,5 miliar pada tahun 2008, terutama karena meningkatnya beban operasi, pemeliharaan dan layanan telekomunikasi dan beban penyusutan masing-masing sebesar Rp1.850,7 miliar dan Rp1.538,8 miliar serta beban pemasaran sebesar Rp287,5 miliar, yang sejalan dengan peningkatan jumlah pelanggan seluler Telkomsel dari 47,9 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi 65,3 juta pelanggan pada tanggal 31 Desember 2008 serta meningkatnya BTS Telkomsel dari 20.858 unit pada tanggal 31 Desember 2007 menjadi 26.872 unit pada tanggal 31 Desember 2008.

Segmen Lain-lain

Pendapatan segmen lain-lain meningkat sebesar Rp69,0 miliar atau 10,4% dari Rp662,8 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp731,8 miliar pada tahun 2008, yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan layanan call center Infomedia sebesar Rp77,2 miliar.

Beban segmen lain-lain meningkat sebesar Rp32,3 miliar atau 5,3% dari Rp610,4 miliar pada tahun 2007 menjadi Rp642,7 miliar pada tahun 2008, terutama karena meningkatnya beban karyawan sebesar Rp27,3 miliar dan beban umum dan administrasi sebesar Rp16,5 miliar.

RINGKASAN PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA INDONESIA GAAP DAN US GAAP

Lihat Catatan 52 Laporan Keuangan Konsolidasian.

LIKUIDITAS DAN SUMBER-SUMBER PERMODALAN

TINJAUAN

2009

Sumber-sumber pendanaan pada tahun 2009, berasal dari:

1. kas dari aktifitas operasi sebesar Rp29.715,6 miliar;
2. pinjaman dari konsorsium beberapa bank (BNI dan BRI) sebesar Rp2.700 miliar; dan
3. fasilitas pinjaman jangka menengah dari sindikasi bank (Mandiri, BCA, BNI, BRI, ANZ, BII, OCBC Indonesia dan OCBC NISP) sebesar Rp7.550 miliar.

Pada tahun 2009, kebutuhan likuiditas dan sumber permodalan selain berasal dari modal kerja dan untuk pembayaran dividen dan pajak, terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- belanja modal untuk jaringan yang sudah terpasang dan jaringan baru dan untuk infrastruktur *backbone*;
- penambahan 49% kepemilikan TELKOM di Infomedia
- pembayaran kewajiban terkait dengan hutang yang ada saat ini termasuk pinjaman penerusan, pinjaman jangka pendek dan pembayaran KSO (MGTI, PT Bukaka Singtel International ("BSI")); dan
- pembayaran kontribusi untuk program pensiun dan program imbalan kesehatan pascakerja.

2010

TELKOM memperkirakan bahwa likuiditas dan kebutuhan sumber pendanaan, selain berasal dari modal kerja dan untuk pembayaran dividen dan pajak, setidaknya terdiri dari:

- belanja modal untuk infrastruktur jaringan dan *backbone* yang sudah ada maupun baru meliputi jaringan transmisi *backbone* pada lingkar JaKa2LaDeMa (Jakarta, Kalimantan, Sulawaesi, Denpasar dan Mataram), Jasuka Ring (Jawa, Sumatera dan Kalimantan), kabel laut JDM (Jember-Denpasar-Mataram), Sulka Ring (Sulawesi dan Kalimantan), PALAPA Ring, Sangata-Toweli Ring, Asia Amerika Gateway ("AAG"), ekspansi akses jaringan tidak bergerak nirkabel, ekspansi kabel laut SUB (Surabaya-Ujung Pandang-Banjarmasin), proyek satelit TELKOM-3, penambahan segmen stasiun bumi, jaringan transmisi serat optik, pembangunan *softswitch*, instalasi dan peningkatan sambungan telepon tidak bergerak dan peningkatan kapasitas layanan seluler melalui Telkomsel;
- pembayaran kewajiban terkait dengan hutang yang ada saat ini termasuk pinjaman penerusan dan pinjaman jangka pendek;
- pembayaran kontribusi untuk program pensiun manfaat pasti dan program imbalan kesehatan pascakerja;
- pembayaran tetap bulanan kepada MGTI sesuai dengan perjanjian yang sudah diperbaharui dan dinyatakan kembali untuk KSO IV, sejak Januari 2004 dan akan berakhir pada tahun 2010; dan
- pembayaran tetap bulanan kepada PT Bukaka Singtel Internasional ("BSI") sesuai dengan perjanjian yang sudah diperbaharui dan dinyatakan kembali untuk KSO VII, sejak Oktober 2006 dan akan berakhir pada tahun 2010.

TELKOM memperkirakan sumber-sumber pendanaan pada tahun 2010 berasal dari:

1. kas dari kegiatan operasi;
2. fasilitas pinjaman baru dan pendanaan dari pemasok;
3. pencairan fasilitas pinjaman yang sedang berjalan dan fasilitas pinjaman jangka menengah. Pada 31 Desember 2009 kami mempunyai fasilitas yang sedang berjalan sejumlah Rp1.250 miliar yang belum dicairkan atau belum semuanya dicairkan dan tambahan pinjaman jangka menengah yang mungkin dapat dicairkan sejumlah Rp35 miliar. Kami telah mencairkan sebagian fasilitas-fasilitas tersebut sebelum jatuh temponya pada 31 Desember 2009. Di samping itu pada tanggal 2 Maret 2010 Telkomsel menyepakati fasilitas pinjaman dengan Finnish Export Credit Ltd sebesar 250 juta Dolar AS untuk pembelian perangkat jaringan dan layanan, dan pada tanggal 26 Maret 2010 Perusahaan menandatangani perjanjian dengan The Japan Bank for International Cooperation untuk fasilitas pinjaman sebesar 35,93 juta Dolar AS dan 23,96 juta Dolar AS dalam kaitan perjanjian dengan Konsorsium NSW-Fujitsu untuk proyek JaKa2LaDeMa; dan
4. kami juga berencana mengeluarkan obligasi dengan denominasi Rupiah di tahun 2010 dengan total nilai lebih dari Rp1 triliun.

TELKOM tidak merencanakan untuk mencari sumber pendanaan lain selama tahun 2010.

Kemampuan TELKOM untuk memperoleh fasilitas pinjaman baru serta masuk ke pasar modal Indonesia tergantung pada pemulihan ekonomi global serta pasar keuangan dan pasar utang Indonesia. TELKOM tidak dapat memastikan bahwa akan memperoleh pinjaman dengan ketentuan yang sesuai dengan keinginan TELKOM. Walaupun krisis penyaluran kredit tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap TELKOM atau kesehatan perbankan Indonesia seperti yang terjadi pada bank-bank dan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan negara lainnya, krisis keuangan global mempunyai dampak yang signifikan pada beberapa sektor ekonomi Indonesia serta stabilitas pasar keuangan Indonesia pada tahun 2008 dan 2009. Kemungkinan berulangnya krisis kredit dan keuangan atau dampak lanjutan dari krisis tersebut di masa mendatang akan mempengaruhi Indonesia dan mempengaruhi kemampuan TELKOM untuk memperoleh pendanaan bank dan masuk ke pasar modal atau setidaknya berdampak pada meningkatkan biaya dalam memperoleh pendanaan tersebut.

Pada tahun 2010 TELKOM memperkirakan berlanjutnya kecenderungan penurunan pendapatan telepon tetap kabel dan penyesuaian lanjutan dari tarif interkoneksi berbasis biaya akan menghasilkan penurunan pendapatan interkoneksi, meskipun demikian, TELKOM memperkirakan penurunan tersebut setidaknya dapat ditutupi dengan peningkatan pendapatan di area lain, seperti bisnis *new wave.* Lihat "Tinjauan Hasil Usaha".

ARUS KAS BERSIH

Tabel berikut menyajikan informasi yang berhubungan dengan arus kas konsolidasi Perusahaan, seperti yang disajikan dalam (dan dipersiapkan dalam basis yang sama) pada Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI

Sumber likuiditas TELKOM yang utama pada beberapa tahun terakhir adalah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi masing-masing sebesar Rp27.727,3 miliar pada tahun 2007, Rp24.316,3 miliar pada tahun 2008 dan Rp29.715,6 miliar (3.152,8 juta Dolar AS) pada tahun 2009.

Tabel Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi

	Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember,			
	2007	2008	2009	2009
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	US$ (juta)
Arus Kas Bersih:				
Dari kegiatan operasi	27.727,3	24.316,3	29.715,6	3.152,8
Dari kegiatan investasi	(15.138,9)	(16.545,7)	(21.828,9)	(2.316,1)
Dari kegiatan pendanaan	(10.957,0)	(11.348,4)	(6.652,7)	(705,9)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	1.631,4	(3.577,8)	1.234,0	130,8
Dampak perubahan kurs tukar terhadap kas dan setara kas	193,6	327,0	(318,5)	(33,8)
Kas dan setara kas pada awal tahun	8.315,8	10.140,8	6.889,9	731,0
Kas dan setara kas pada akhir tahun	10.140,8	6.889,9	7.805,5	828,2

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pada tahun 2009 dibandingkan 2008, arus kas bersih dari kegiatan operasional meningkat sebesar Rp5.399,3 miliar atau 22,2%, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari pendapatan usaha. Peningkatan arus kas operasional disebabkan oleh:

- peningkatan penerimaan kas dari layanan seluler sebesar Rp2.734,1 miliar atau 10,6%;
- peningkatan penerimaan kas dari data, internet dan jasa teknologi informatika sebesar Rp1.898,1 miliar atau 12,8%; dan
- peningkatan penerimaan kas dari layanan telepon lainnya sebesar Rp711,9 miliar atau 38,5%.

Salah satu pengunjung pameran Mega Bazaar 2009 sedang mencoba layanan internet gratis di stand Telkom.

Seorang pelanggan sedang mencoba layanan BlackBerry *services* dari Telkomsel.

Peningkatan di atas diimbangi oleh hal-hal sebagai berikut:

- penurunan penerimaan kas dari layanan telepon tidak bergerak sebesar Rp714,9 miliar atau 7,8%; dan
- penurunan penerimaan dari layanan interkoneksi bersih sebesar Rp1.158,5 miliar atau 13,2%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007

Pada tahun 2008 dibandingkan 2007, arus kas bersih dari kegiatan operasional menurun sebesar Rp3.411,0 miliar atau 12,3%, terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran untuk beban operasional. Penurunan arus kas operasional juga disebabkan oleh:

- penurunan penerimaan kas dari layanan telepon tidak bergerak sebesar Rp1.821,4 miliar atau 16,6%;
- penurunan penerimaan kas dari layanan interkoneksi bersih sebesar Rp870,0 miliar atau 9,0% yang terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan interkoneksi seluler; dan
- peningkatan pembayaran kas untuk beban operasi sebesar Rp3.024,5 miliar atau 12,8%.

Penurunan di atas diimbangi oleh hal-hal sebagai berikut:

- peningkatan penerimaan kas dari bisnis seluler sebesar Rp2.961,8 miliar atau 13,0%;
- peningkatan penerimaan dari layanan lainnya sebesar Rp725,7 miliar atau 64,6%.

ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN INVESTASI

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar Rp15.138,9 miliar, Rp16.545,7 miliar dan Rp21.828,9 miliar (2.316,1 juta Dolar AS) masing-masing untuk tahun 2007, 2008 dan 2009. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama digunakan untuk belanja modal.

Selain kas dan bank, TELKOM menginvestasikan sebagian besar dari kelebihan kasnya dalam bentuk deposito berjangka. Sejak 14 Mei 2004 TELKOM juga menginvestasikan sebagian dari kelebihan uang kasnya dalam bentuk reksadana berbasis mata uang Rupiah dan surat berharga lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2009 total penyertaan sementara yang jatuh tempo senilai Rp359,5 miliar (38,1 juta Dolar AS) dalam bentuk reksadana dan surat berharga lainnya.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008.

Dibandingkan dengan tahun 2008, arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2009 meningkat sebesar Rp5.283,2 miliar atau 31,9%, terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran kas sebesar Rp4.615,6 miliar atau 29,1% untuk pembelian aset tetap.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007.

Dibandingkan dengan tahun 2007, arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2008 meningkat sebesar Rp1.406,9 miliar atau 9,3%, terutama disebabkan oleh peningkatan sebesar Rp807,0 miliar atau 5,4% sehubungan untuk pembelian aset tetap.

ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN PENDANAAN

Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan masing-masing berjumlah Rp10.957,0 miliar, Rp11.348,4 miliar dan Rp6.652,7 miliar (705,9 juta Dolar AS) pada tahun 2007, 2008 dan 2009. Selama tiga tahun terakhir aliran kas bersih dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan pinjaman, pembayaran kewajiban dan pembayaran dividen tunai. Pada tahun 2009, arus kas dari aktivitas pendanaan menurun sebesar Rp4.695,8 miliar atau 41,4% terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran dividen sebesar Rp1.668,6 miliar, penurunan pembayaran dividen kepada pemegang saham minoritas di anak perusahaan sebesar Rp901,4 miliar, peningkatan hasil pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.103,6 miliar dan tidak adanya pembelian saham kembali (*treasury stock*) pada tahun 2009 dibandingkan dengan pembelian saham kembali tahun 2008 sebesar Rp2.087,5 miliar.

Penurunan tersebut diimbangi dengan peningkatan pembayaran pinjaman jangka panjang sebesar Rp1,804.2 milyar dan peningkatan pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar Rp463,7 miliar.

PEMBAYARAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pada posisi 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, masing-masing berkisar 27,8%, 22,3% dan 22,3% komposisi kewajiban lancar perusahaan (terdiri dari kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun dan hutang bank jangka pendek) adalah dalam mata uang asing, terutama Dolar AS. Arus kas TELKOM dalam mata uang Rupiah yang digunakan untuk pembayaran kewajiban jangka panjang secara signifikan dipengaruhi oleh apresiasi Rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 2009, dibandingkan dengan depresiasi Rupiah yang terjadi tahun 2008 dan apresiasi Rupiah pada tahun 2007.

Pada tahun 2007, 2008 dan 2009, TELKOM melakukan pembayaran kewajiban lancarnya masing-masing sebesar Rp6.241,5 miliar, Rp5.982,3 miliar dan Rp7.180,9 miliar (761,9 juta Dolar AS). Arus kas keluar pada tahun 2009 terutama digunakan untuk pembayaran:

- pinjaman jangka pendek sebesar Rp118,5 miliar;
- pinjaman jangka panjang sebesar Rp6.669,6 miliar;
- wesel bayar sebesar Rp123,9 miliar; dan
- sewa pembiayaan sebesar Rp268,9 miliar.

REKENING *ESCROW*

Lihat Catatan 14 Laporan Keuangan Konsolidasian.

MODAL KERJA

Modal kerja bersih, merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek berjumlah Rp(12,375.8) miliar pada tanggal 31 Desember 2008 dan Rp(10,531.4) miliar ((1,117.4) juta Dolar AS) pada 31 Desember 2009. Penurunan modal kerja bersih terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas dan biaya dibayar di muka serta penurunan hutang dagang. Hal ini diimbangi dengan peningkatan hutang pajak, kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun dan penurunan pajak dibayar di muka.

Kami memperkirakan bahwa defisit modal kerja akan terus berlanjut yang disebabkan oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk aliran kas dari aktivitas operasi dan pinjaman bank. Lihat "Likuiditas dan Sumber-Sumber Permodalan - Tinjauan - 2010".

ASET LANCAR

Aset lancar berjumlah Rp14,622.3 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 dan Rp16,186.0 miliar (1,717.4 juta Dolar AS) pada tanggal 31 Desember 2009, mencerminkan terjadinya peningkatan sebesar Rp1.563,7 miliar atau 10,6% yang terutama disebabkan oleh:

- peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp915,5 miliar atau 13,3% dari Rp6.889,9 miliar pada 31 Desember 2008 menjadi Rp7.805,5 miliar pada 31 Desember 2009;
- peningkatan beban dibayar dimuka sebesar Rp620,7 miliar atau 33,1% dari Rp1.875,8 miliar pada 31 Desember 2008 menjadi Rp2.496,5 miliar pada 31 Desember 2009;
- peningkatan dalam penyertaan sementara sebesar Rp92,5 miliar atau 34,6%, dari Rp267,0 miliar pada 31 Desember 2008 menjadi Rp359.5 miliar pada 31 Desember 2009; dan
- peningkatan piutang usaha-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp59,8 miliar atau 11.0%, dari Rp545,0 miliar pada 31 Desember 2008 menjadi Rp604,8 miliar pada 31 Desember 2009.

Peningkatan tersebut di atas diimbangi dengan penurunan pajak dibayar dimuka sebesar Rp425,9 miliar atau 52,9% dari Rp805,6 miliar pada 31 Desember 2008 menjadi Rp379,7 miliar pada 31 Desember 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, dan 2009 komposisi aset lancar terutama dalam mata uang asing masing-masing sekitar 19,2%, 21,2% dan 17,9%, terutama dalam Dolar AS, Euro, dan Yen Jepang. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing pada tahun-tahun tersebut mempengaruhi nilai aset lancar perusahaan.

PIUTANG USAHA

Untuk rincian piutang usaha tercantum dalam catatan 5 Laporan Keuangan Konsolidasian.

DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNANYA

Untuk rincian Lihat Catatan 8 Laporan Keuangan Konsolidasian.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek posisi per tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp26.998,2 miliar dan Rp26.717,4 miliar yang merupakan penurunan sebesar Rp280,8 miliar atau 1,0%, terutama disebabkan karena penurunan kewajiban jangka pendek dalam mata uang Rupiah. Penurunan ini berasal dari penurunan hutang dagang kepada pihak ketiga dan diimbangi dengan kenaikan pada hutang pajak dan hutang jangka yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Aset lancar berjumlah Rp14.622,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2008 dan Rp16,186.0 miliar (1,717.4 juta Dolar AS) pada tanggal 31 Desember 2009

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN
Untuk rincian lihat Catatan 19a Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Untuk rincian lihat Catatan 16 Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

STRUKTUR MODAL
Struktur modal TELKOM per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Modal

	Jumlah (dalam Rp miliar)	Porsi (%)
Kewajiban	22.238,9	36,32
Jangka Pendek	7.673,1	12,53
Jangka Panjang	14.565,8	23,79
Modal	38.989,7	63,68
Total Modal Yang Investasikan	61.228,6	100,00

Secara umum, Perusahaan mengambil pendekatan kualitatif terhadap struktur modal dan tingkat hutang. Berdasarkan perjanjian sindikasi TELKOM dengan BNI dan BRI tanggal 16 Juni 2009, TELKOM dipersyaratkan untuk mempertahankan rasio hutang terhadap ekuitas tidak lebih dari 2,0 dan rasio *debt service coverage* (EBITDA dibagi total hutang yang jatuh tempo dalam satu tahun ditambah bunga bank) lebih dari 1,25. Sampai dengan 31 Desember 2009, rasio hutang perusahaan terhadap ekuitas adalah 0,6 dengan cakupan rasio *debt service coverage* 3,87, mengindikasikan kemampuan yang tinggi untuk membayar hutang. Tingkat hutang tersebut dipicu oleh rencana TELKOM untuk mengembangkan perusahaan dan strategi perusahaan yang baru. Dalam menentukan tingkat hutang perusahaan yang optimal, TELKOM juga mempertimbangkan rasio hutang perusahaan dengan mengacu pada industri telekomunikasi regional.

KEWAJIBAN
Saldo kewajiban konsolidasian (terdiri dari kewajiban jangka panjang, kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, hutang bank jangka pendek, dan nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan) pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, tercantum pada tabel berikut:

Tabel Saldo Kewajiban Konsolidasian

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,			
	2007	2008	2009	2009
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	US$ (juta)
Rupiah Indonesia	9.876,4	14.642,4	18.548,7	1.968,0
Dolar AS [1]	4.922,9	4.209,4	2.513,0	266,5
Yen Jepang[2]	1.099,6	1.489,3	1.177,2	124,8
Euro[3]	100,9	-	-	-
Jumlah	15.999,8	20.341,1	22.238,9	2.359,4

(1) Jumlah pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs Rp9.399, Rp10.950 dan Rp9.430 = 1 Dolar AS, yang merupakan nilai jual Reuters untuk Dolar Amerika Serikat pada setiap tanggal tersebut.

(2) Jumlah pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs Rp83,0, Rp121,2 dan Rp102,2 = 1 Yen Jepang, merupakan nilai tukar beli untuk Yen Jepang pada setiap tanggal tersebut.

(3) Jumlah pada tanggal 31 Desember 2007, 2008 dan 2009, masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs Rp13.769,5, Rp15.429,0 dan Rp13.590,5 = 1 Euro, merupakan nilai tukar beli untuk Euro pada setiap tanggal tersebut.

Dari seluruh kewajiban pada tanggal 31 Desember 2009, pembayaran dijadwalkan akan dilakukan pada tahun 2010, 2011 dan 2012-2024 masing-masing sebesar Rp7.633,6 milyar, Rp4.795,9 milyar dan Rp9.769,8 milyar. Telkomsel dijadwalkan membayar sebesar Rp5.013,6 miliar pada tahun 2010, Rp2.764,4 miliar pada tahun 2011 dan Rp3.633,3 miliar pada tahun 2012-2014. Infomedia dijadwalkan membayar sebesar Rp22,8 miliar, Rp0,5 miliar dan Rp1,6 miliar masing-masing pada tahun 2010, 2011, dan 2012-2014. Untuk informasi lebih lengkap mengenai kewajiban TELKOM dan Telkomsel, lihat Catatan 18-23 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Pada dua tahun terakhir, rasio hutang terhadap ekuitas (DER) di bawah 0,6 dan *interest coverage ratio* (EBIT/*interest expense*) antara 11 hingga 14 kali, menunjukan kemampuan TELKOM untuk memenuhi kewajiban hutang Perusahaan.

KEWAJIBAN DARI AKUISISI BISNIS DAN HARGA PEMBELIAN OPSI
Untuk rincian penjelasan lihat Catatan 3 Laporan Keuangan Konsolidasian.

BELANJA MODAL
Sampai dengan 31 Desember 2009, belanja modal TELKOM sebesar Rp19.160,6 miliar (2.031,9 juta Dolar AS), lebih kecil Rp4.964,6 miliar dari anggaran belanja modal sebesar.

Untuk tujuan perencanaan, TELKOM mengelompokkan kategori belanja modal berdasarkan kategori yang sejalan dengan pengelompokan pendapatan dan biaya:

- *Optimizing Legacy*, terdiri dari sambungan nirkabel tidak bergerak dan sambungan kabel tidak bergerak (berbasis teknologi non-NGN).
- *New Wave*, terdiri dari *broadband, soft switch* (teknologi berbasis NGN), komunikasi data dan TI, aplikasi dan konten.
- Infrastruktur, terdiri dari transmisi *backbone*, *Metro and Regional Metro Junction* ("RMJ"), dan IP *backbone* dan sistem satelit.
- Unit pendukung, terdiri dari sistem pendukung, dan seluruh unit pendukung.

Pengelompokan tersebut mencerminkan keterkaitan antara belanja modal dengan pendapatan dan beban operasi.

Dari total Rp19.160,6 miliar, Telkomsel mempergunakan belanja modal sebesar Rp12.672,6 miliar (1.343,9 juta Dolar AS) untuk infrastruktur jaringan dan investasi lainnya serta belanja modal anak perusahaan lainnya sebesar Rp836,4 miliar (88,7 juta Dolar AS) pada tahun 2009.

Tabel berikut ini berisi realisasi dan rencana kebutuhan belanja modal untuk periode dimaksud, termasuk kebutuhan belanja modal untuk Telkomsel dan beberapa anak perusahaan yang dikonsolidasi lainnya:

Tabel Realisasi dan Rencana Kebutuhan Belanja Modal

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,				
	2007[1]	2008[1]	2009[1]	2010[2]	2011[3]
	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)	Rp (miliar)
TELKOM (Induk Perusahaan)					
Optimizing Legacy (Sambungan kabel tidak bergerak dan sambungan nirkabel tidak bergerak)	1.915,9	2.637,6	1.913,3	422,0	428,1
New Wave (pita lebar, *softswitch*, *datacom*, TI dan lainnya)	615,7	1.560,2	1.311,5	2.764,0	3.057,5
Infrastruktur (*backbone*, metro, RMJ, IP dan sistem satelit)	794,3	1.689,1	2.207,9	2.431,0	2.446,0
Pendukung	182,2	199,8	218,9	202,0	183,4
Subtotal untuk TELKOM (induk Perusahaan)	3.508,1	6.086,7	5.651,6	5.819,0	6.115,0
Anak Perusahaan TELKOM :					
Telkomsel	12.132,2	15.915,0	12.672,6	13.946,0	12.843,0
Lainnya	139,8	242,6	836,4	826,0	1.474,5
Subtotal untuk anak perusahaan	12.272,0	16.157,6	13.509,0	14.772,0	14.317,5
Jumlah untuk TELKOM (konsolidasian)	15.780,1	22.244,3	19.160,6	20.591,0	20.432,5

(1) Jumlah untuk tahun 2007, 2008 dan 2009 adalah pengeluaran modal yang diakui berdasarkan barang yang diterima.

(2) Jumlah untuk tahun 2010 adalah anggaran belanja modal terencana yang termasuk dalam anggaran TELKOM dan dapat disesuaikan baik ke atas atau ke bawah.

(3) Jumlah untuk tahun 2011 adalah proyeksi belanja modal dan realisasi belanja modal dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksinya.

Realisasi belanja modal masa yang akan datang mungkin berbeda dengan jumlah yang tercantum pada tabel di atas yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada perekonomian Indonesia, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, Euro dan mata uang lainnya, ketersediaan dari pemasok atau sumber pendanaan lainnya, teknis atau masalah lainnya dalam memperoleh atau instalasi peralatan serta apabila TELKOM memasuki lini bisnis baru.

INVESTASI YANG DIRENCANAKAN PADA TAHUN 2010

Pada tahun 2010, TELKOM berencana melakukan investasi pada *legacy, new wave*, infrastruktur dan pendukung dengan jumlah mencapai Rp5.819,0 miliar.

Rencana Investasi pada Optimalisasi Bisnis *Legacy*

Rencana investasi untuk optimalisasi bisnis *legacy* pada tahun 2010 berjumlah Rp422,0 miliar, yang akan dipergunakan untuk:

- investasi dalam jaringan akses telepon nirkabel CDMA, termasuk MSC, BSC, BTS, menara BTS, layanan nilai tambah dan seluruh fasilitas pendukung yang berhubungan dengan jaringan akses telepon tidak bergerak nirkabel;
- investasi dalam infrastruktur akses untuk jaringan telepon tidak bergerak termasuk pengembangan dan peningkatan kualitas kabel tembaga; dan
- investasi stasiun bumi, termasuk perluasan layanan VSAT dan *Intermediate Data Rate* (IDR) dan mengganti beberapa perangkat yang sudah usang.

Rencana Investasi pada Bisnis *New Wave*

Rencana investasi pada bisnis *new wave* untuk tahun 2010 sebesar Rp2.764,0 miliar, yang akan dipergunakan untuk:

- investasi jaringan pita lebar, termasuk peningkatan kapasitas IP DSLAM, pengoprasian *Multi Service Access Network* ("MSAN"), modernisasi jaringan akses dan perluasan kabel serat optik untuk *Remote* IP DSLAM, *Gigabit-Passive Optical Network* ("GPON"), peningkatan kualitas jaringan akses, *Broadband Remote Access Server*, dan investasi juga dialokasikan untuk penggantian dan perluasan jaringan pita lebar nirkabel ("BWA");
- investasi komunikasi data, termasuk pengoprasian akses IP VPN (xDSL *based* dan *inverse multiplexing* ("IMUX") *based*) dan akses *metro ethernet* untuk layanan berbasis *ethernet* (E-Line dan E-LAN); dan
- investasi TI, aplikasi dan konten, termasuk investasi sistem informasi untuk menyempurnakan dan meningkatkan kemampuan sistem pendukung TI, *billing systems, operating support system* ("OSS"), *customer care and billing system* ("CCBS"), *Service Delivery Platform* ("SDP"), layanan nilai tambah internet untuk layanan komersial seperti B2B *e-commerce access*, NGN *platform services* serta konten dan aplikasi pita lebar.

Rencana Investasi pada Infrastruktur

Rencana investasi pada infrastruktur untuk tahun 2010 berjumlah Rp2.431,0 miliar, yang akan digunakan untuk investasi pada infrastruktur transmisi termasuk jaringan transmisi serat optik, perluasan jaringan transmisi *backbone* di Jawa, Sumatera dan Kalimantan (Jasuka), dan sistem kabel laut di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Mataram ("JaKa2LaDeMa"). Investasi dalam jumlah yang cukup besar untuk investasi pada satelit TELKOM-3.

Rencana Investasi pada Unit Pendukung

Rencana investasi pada unit pendukung untuk tahun 2010 berjumlah Rp202,0 miliar yang akan dipergunakan untuk:

- investasi pada TELKOM's *Center Unit* termasuk *Research & Development Center ("RDC"), Maintenance Center, Learning Center, dan Supply Center;*
- investasi fasilitas pendukung termasuk bangunan (untuk operasi dan peralatan), *power supply*, piranti pengukuran jaringan, dan fasilitas kantor; dan
- anggaran *standby*/kontinjensi untuk mendukung dinamika pasar *High End Market* dan konsumen *wholesale*, jaringan telepon tidak bergerak nirkabel dan akses pita lebar nirkabel ("BWA").

Sumber-Sumber Pendanaan

Seperti halnya beberapa BUMN di Indonesia, TELKOM mengandalkan pendanaan dari Pemerintah dalam bentuk pinjaman penerusan (*two-step loan*) dan pola bagi hasil dengan investor untuk pendanaan investasi aset tetap. Namun, pada beberapa tahun terakhir TELKOM mendanai investasinya dari arus kas yang berasal dari operasi dan pinjaman dari bank-bank komersial. Sebagai tambahan, pada beberapa tahun terakhir, TELKOM memenuhi kebutuhan pendanaannya dari pasar surat utang dan pendanaan dari pemasok. Sumber pendanaan TELKOM pada tahun 2010, utamanya diharapkan berasal dari kegiatan operasi perusahaan, hutang bank, pendanaan dari pemasok serta pencairan fasilitas bank yang telah tersedia dan wesel jangka menengah. Kami juga berencana menerbitkan obligasi Rupiah sejumlah lebih dari Rp1 triliun. Lihat "Likuiditas dan Sumber-Sumber Permodalan - Tinjauan".

BAGI HASIL

Untuk rincian penjelasan lihat Catatan 45 Laporan Keuangan Konsolidasian.

KEJADIAN LUAR BIASA

Selama tahun 2009, tidak terjadi kejadian luar biasa yang material.

KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN, PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang direkonsiliasi dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat (U.S. GAAP), mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Manajemen secara berkala mengevaluasi estimasi dan pertimbangan termasuk estimasi masa manfaat dan nilai tercatat aset tetap dan aset tidak berwujud, perhitungan atas cadangan piutang, beban pensiun dan imbalan pascakerja lain, pajak penghasilan dan kontinjensi hukum. Manajemen membuat estimasi dan pertimbangan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain yang relevan. Untuk pembahasan yang lengkap atas penggunaan estimasi dan pertimbangan serta kebijakan akuntansi yang signifikan lainnya, lihat Catatan 2 pada Laporan Keuangan Konsolidasian. Realisasi dari estimasi tersebut dapat berbeda dengan asumsi dan kondisi yang berbeda. TELKOM percaya bahwa kebijakan akuntansi yang signifikan di bawah ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi dan kompleks, atau area suatu asumsi dan estimasi menjadi signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU

Penyisihan piutang ragu-ragu merupakan estimasi terbaik Perusahaan atas jumlah kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang. Besarnya cadangan piutang tersebut diakui pada Laporan Laba Rugi dalam beban usaha dan beban umum dan administrasi. Perusahaan menentukan cadangan piutang ragu-ragu berdasarkan pengalaman penghapusan pada masa lampau. Perusahaan mengevaluasi penyisihan piutang ragu-ragunya secara bulanan. Piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari untuk pelanggan ritel sepenuhnya disisihkan dan piutang yang telah jatuh tempo untuk pelanggan non-ritel yang melebihi jumlah tertentu dievaluasi tingkat ketertagihannya secara individual. Saldo piutang dihapuskan dari neraca setelah semua cara penagihan dilakukan namun kemungkinan tertagihnya sangat kecil. Perusahaan tidak memiliki eksposur kredit di luar neraca yang terkait dengan pelanggan (*off-balance sheet credit exposure*).

NILAI TERCATAT ASET TETAP, *GOODWILL* DAN ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA

TELKOM menggunakan estimasi masa manfaat aset tetap, *goodwill* (*goodwill* diamortisasi berdasarkan PSAK tapi tidak diamortisasi berdasarkan prinsip U.S GAAP), dan aset tidak berwujud lainnya untuk menentukan beban penyusutan dan amortisasi yang dicatat selama suatu periode laporan. Masa manfaat aset ditaksir pada saat perolehan aset dan berdasarkan pada pengalaman masa lalu untuk aset yang sejenis dengan mengantisipasi teknologi atau perubahan-perubahan lain dan, dalam hal hak atas pengoprasian aset tidak berwujud, selama sisa jangka waktu perjanjian KSO. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali karena antara lain, perubahan teknologi, perubahan yang signifikan di bidang hukum dan bisnis, kompetisi yang tidak diperkirakan, perubahan kondisi industri atau kerusakan, masa manfaat aset diperpendek yang menyebabkan peningkatan beban penyusutan dan amortisasi pada masa mendatang atau perubahan ini menyebabkan pengakuan penurunan nilai aset. TELKOM mengkaji adanya penurunan nilai aset secara periodik, apabila terdapat kejadian yang mengindikasikan terjadinya penurunan nilai aset selama sisa masa manfaat aset. Penilaian atas waktu dan/atau jumlah penurunan nilai tersebut merupakan suatu pertimbangan yang signifikan. Di dalam menguji penurunan nilai aset, TELKOM menggunakan arus kas yang didiskontokan sebagai dasar bagi manajemen untuk mengestimasi operasi di masa datang.

Estimasi terpenting yang digunakan TELKOM dalam memproyeksikan arus kas masa depan, adalah estimasi harga yang akan datang, jumlah jaringan akses yang akan dimiliki, serta tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai kini dari arus kas masa depan yang diproyeksikan. Harga dari jasa yang dijual TELKOM dibebankan berdasarkan peraturan pemerintah. Jumlah jaringan akses yang dimiliki TELKOM di masa depan akan tergantung pada kemampuan TELKOM untuk menyediakan pendanaan guna membangun jaringan akses yang baru.

TELKOM dan anak perusahaannya melakukan *review* dan mengevaluasi nilai sisa dan masa pakai aset tetap setidaknya setiap tahun keuangan berakhir. Jika nilai sisa dan masa pakai berbeda dari perkiraan sebelumnya, maka perubahan tersebut diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi. TELKOM dan anak perusahaannya juga melakukan review dan evaluasi terhadap metode depresiasi yang digunakan setidaknya setiap akhir tahun keuangan. Bila ada perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi untuk keuntungan ekonomi di masa depan yang terdapat dalam aset, maka metode berubah dan perubahan itu diperhitungkan dalam perubahan estimasi akuntansi.

Pada tahun 2006, Telkomsel diberikan lisensi 3G. Telkomsel diharuskan membayar uang muka (*up-front fee*) dan iuran tahunan Biaya Hak Penggunaan (BHP) untuk sepuluh tahun ke depan setelah memperoleh lisensi 3G. Uang muka dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa lisensi pengoperasian 3G (10 tahun). Amortisasi dimulai sejak aset tersebut siap untuk digunakan. Berdasarkan interpretasi manajemen Telkomsel terhadap ketentuan ijin tersebut dan konfirmasi tertulis dari Dirjen Postel, manajemen berkeyakinan bahwa ijin tersebut dapat dikembalikan setiap saat tanpa adanya kewajiban finansial untuk membayar sisa BHP. Berdasarkan fakta tersebut, manajemen Telkomsel berpendapat bahwa dalam memperoleh hak untuk menggunakan lisensi 3G tersebut dengan cara melakukan pembayaran secara tahunan. Oleh karena itu, Telkomsel mengakui BHP sebagai beban pada saat terjadinya.

PENSIUN DAN MANFAAT PENSIUN

TELKOM mempunyai komitmen untuk membayar pensiun dan manfaat pensiun lainnya kepada para karyawan dan mantan karyawan yang telah mencapai usia 56 tahun. Biaya dan kewajiban bersih dari tunjangan dihitung sesuai dengan nilai saat ini dari estimasi manfaat atas layanan yang akan dibebankan di masa mendatang yang telah diterima oleh karyawan sebagai imbalan jasanya pada saat ini dan periode sebelumnya, dikurangi nilai wajar aset program pensiun dan disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuaria yang belum diakui dan beban pensiun masa lalu yang belum diakui, tergantung dari beberapa faktor yang ditentukan berdasarkan aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menetapkan laba atau rugi aktuaria bersih untuk pensiun dan imbalan pascakerja termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program pensiun dan tingkat diskonto. Dalam hal menghitung rencana imbalan kesehatan pascakerja, digunakan perkiraan tingkat pertumbuhan biaya kesehatan. Perubahan atas asumsi tersebut akan berdampak pada pencatatan laba atau rugi aktuaria bersih atas biaya pensiun dan imbalan pascakerja.

TELKOM menggunakan informasi berupa imbal hasil jangka panjang aktual berupa data historis dan estimasi imbal hasil investasi jangka panjang masa depan dari referensi eksternal, ke dalam kondisi saat ini dan ekspektasi alokasi aset guna menetapkan ekspektasi imbal hasil pada aset-aset program pensiun.

Pada setiap akhir tahun, TELKOM menetapkan tingkat diskonto yang tepat, guna merepresentasikan tingkat suku bunga yang seharusnya digunakan pada penentuan nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pensiun dan manfaat pasca pensiun. TELKOM menggunakan imbal hasil dari Obligasi Pemerintah Indonesia mengingat tidak tersedianya pasar bagi obligasi korporasi berkualitas tinggi yang memiliki masa jatuh tempo yang mendekati masa jatuh tempo kewajiban tersebut. Per tanggal 31 Desember 2009, tingkat diskonto yang ditetapkan TELKOM adalah 10,75%. Akibat sangat terbatasnya instrumen surat utang berkualitas tinggi di Indonesia serta terbatasnya kemampuan untuk mengestimasi tingkat suku bunga, maka kami meyakini bahwa imbal hasil dari Obligasi Pemerintah Indonesia dapat merepresentasikan tingkat diskonto yang paling tepat untuk mengukur nilai kini dari kewajiban-kewajiban manfaat pada akhir tahun. Perubahan dari tingkat diskonto yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dari kondisi ekonomi Indonesia maupun akan mempengaruhi pengakuan kewajiban pensiun serta manfaat pasca pensiun yang sebagai konsekuensinya dapat secara signifikan mempengaruhi posisi finansial dan hasil usaha TELKOM.

Perkiraan tingkat biaya kesehatan ditetapkan dengan cara membandingkan data masa lalu antara kenaikan biaya kesehatan aktual dengan tingkat inflasi pada umumnya dalam perekonomian Indonesia dan pola pemanfaatan fasilitas kesehatan. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa biaya kesehatan aktual tumbuh rata-rata sebesar 6% di atas tingkat inflasi pada umumnya. Proyeksi biaya kesehatan TELKOM berturut-turut sebesar 8% dan 8% pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2009. Lihat Catatan 42 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Pertumbuhan biaya kesehatan diasumsikan berdampak signifikan pada besarnya rencana biaya kesehatan. Perubahan satu persen dari tingkat pertumbuhan beban kesehatan, akan berdampak seperti pada tabel berikut:

Tabel Dampak Perubahan Satu Persen dari Tingkat Pertumbuhan Beban Kesehatan

	Kenaikan 1%	Penurunan 1%
Dampak pada beban jasa dan beban bunga	139.740	(114.015)
Dampak pada akumulasi kewajiban imbalan kesehatan pascakerja	1.128.733	(926.535)

Asumsi lainnya termasuk harapan hidup dari karyawan, tingkat pertumbuhan kompensasi dan sisa rata-rata masa kerja.

Beban pensiun dini diakui pada saat TELKOM berkomitmen untuk memberi imbalan pensiun dini yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan TELKOM agar karyawan terdorong untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela. TELKOM berkomitmen untuk melakukan pensiun dini jika dan hanya jika TELKOM telah memiliki rencana pensiun dini formal yang tidak dapat dibatalkan dan rencana tersebut tanpa kemungkinan yang realistis untuk ditarik.

PAJAK PENGHASILAN

TELKOM mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan aset dan kewajiban untuk pelaporan keuangan dan pengakuan jumlah untuk tujuan pajak penghasilan. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer pengurang pajak sepanjang laba kena pajak akan tersedia di masa yang akan datang sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan atau aset pajak tangguhan tersebut akan dapat direalisasikan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia pada tanggal laporan tahunan ini, dividen yang didistribusikan oleh TELKOM kepada para pemegang saham dengan kepemilikan saham minimum 25% dan mempunyai bisnis selain dari *holding company*, maka tidak merupakan subyek pajak, karena laba penjualan saham sudah merupakan subyek pajak yang berlaku pada perhitungan pajak badan normal. Selama TELKOM berkomitmen untuk tetap melakukan investasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan saham minimum sebesar 25% dan mempunyai bisnis lain selain daripada *holding company*, serta pembagian dividen dari perusahaan afiliasi kepada TELKOM sesuai dengan kriteria tersebut di atas, bukan merupakan objek pajak, maka TELKOM tidak perlu mencatat kewajiban pajak tangguhan terkait dengan laba ditahan dari perusahaan afiliasi tersebut.

Perubahan tujuan untuk mempertahankan investasi/kondisi lainnya mungkin dapat menyebabkan TELKOM tidak dapat merealisasikan bagian dalam laba ditahan perusahaan afiliasi, yang memungkinkan TELKOM dapat menggunakan tingkat pajak 0% untuk pembagian dividen. Setiap perubahan di masa datang kepemilikan dapat berdampak pada pengakuan kewajiban pajak tangguhan dan akan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian TELKOM.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal neraca konsolidasian. Apabila tarif pajak berubah, maka TELKOM akan menyesuaikan aset dan kewajiban pajak tangguhan yang dibebankan ke dalam beban pajak penghasilan pada periode perubahan untuk mencerminkan tarif pajak yang berlaku pada saat pengembalian pajak tangguhan.

TRANSAKSI SEWA

Sewa diklasifikasikan menjadi sewa guna usaha (*finance lease*) atau sewa-menyewa biasa (*operating lease*) yang didasarkan pada substansinya dan bukan berdasarkan bentuk kontrak. Aset tetap yang berasal dari sewa guna usaha diakui jika sewa guna usaha mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang tidak terkait dengan kepemilikan. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha dinyatakan dengan jumlah yang setara dengan nilai wajar aset yang disewakan atau, jika lebih rendah, nilai saat ini dari pembayaran sewa minimum. Jika terdapat penambahan beban langsung pada Perusahaan dan Anak Perusahaan maka penambahan tersebut diperlakukan sebagai aset. Pembayaran sewa minimum akan dialokasikan antara biaya pembiayaan dan pengurang kewajiban berjalan. Biaya pembiayaan akan dialokasikan terhadap masing-masing periode selama masa sewa agar dapat memberikan suku bunga berkala yang tetap atas saldo sisa kewajiban. Sewa kontinjensi akan diperlakukan sebagai beban dalam periode terjadinya beban tersebut.

KONTINJENSI HUKUM

Sampai dengan tanggal laporan tahunan ini, TELKOM terlibat dalam beberapa permasalahan hukum dan telah mengakui atas dasar estimasi, jumlah kemungkinan biaya penyelesaian dari kasus-kasus tersebut. Estimasi biaya tersebut berdasarkan konsultasi dengan konsultan hukum dan melalui penilaian strategi litigasi dan penyelesaian hukum. Meskipun TELKOM percaya bahwa pengakuan tersebut telah memadai, namun kejadian yang akan datang atau perubahan kondisi akan mengharuskan TELKOM melakukan penyesuaian yang akan dibebankan pada Laporan Laba Rugi Konsolidasian TELKOM di masa yang akan datang. Lihat Catatan 48 Laporan Keuangan Konsolidasian.

RISET DAN PENGEMBANGAN SERTA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perusahaan melakukan investasi untuk meningkatkan produk dan layanan. Pengeluaran yang telah dilakukan mencapai sekitar Rp6,7 miliar, Rp9,8 miliar dan Rp5,9 miliar (0,6 juta Dolar AS) masing-masing untuk tahun 2007, 2008 dan 2009. Pada tahun 2009, pengeluaran dilakukan untuk riset dan pengembangan *video conferencing*, SMS, sistem CMS, lab CDMA, sistem pengukuran, dan pengembangan konten lainnya.

INFORMASI TREN

Sejumlah perkembangan telah terjadi dan mungkin dapat berdampak secara material di masa yang akan datang terhadap hasil operasi, kondisi keuangan dan belanja modal. Lihat Pembahasan dan Analisis Manajemen - Tinjauan Hasil Usaha di bawah sub judul "Peningkatan Pendapatan Seluler dan Pelanggan dengan Penurunan ARPU", "Tren Telepon Tidak Bergerak Nirkabel", "Penurunan Pendapatan Interkoneksi dan Peningkatan Pendapatan Data, Internet dan Jasa Teknologi Informatika".

Perkembangan/tren lain termasuk:

- Pengembangan portofolio bisnis informasi, media dan *edutainment*. Di samping kenaikan pendapatan dari komunikasi data dan jasa teknologi informasi, terutama dari layanan pita lebar, sebagai bagian dari transformasi ke bisnis TIME, TELKOM terus mencari peluang untuk menambah pendapatan dengan perluasan ke industri yang berdekatan. Lihat "Strategi Perusahaan" serta "Risiko terkait dengan TELKOM dan anak perusahaan — Kegagalan kami dalam mengantisipasi perubahan teknologi atau mempengaruhi transformasi bisnis dan organisasi dapat memberikan dampak negatif terhadap usaha TELKOM". Dalam kaitannya dengan strategi ini TELKOM telah mengaquisisi sejumlah bisnis terkait dalam beberapa tahun terakhir ini, dan TELKOM

berharap aktivitas akuisisi ini akan berlanjut pada masa yang akan datang; dan

- Penurunan jumlah karyawan. TELKOM telah melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode tahun 2005 sampai 2009, jumlah karyawan (tidak termasuk karyawan anak perusahaan) berkurang dengan pertumbuhan rata-rata tahunan negatif 4,8% dan jumlah karyawan pada tahun 2007, 2008 dan 2009 masing-masing sebanyak 32.465, 30.213, dan 28.750 karyawan. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan dari program *multi-exit* khususnya program pensiun dini selama periode 2005 sampai dengan 2009, yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola biaya karyawan. Perusahaan mengurangi jumlah karyawan untuk meningkatkan efisiensi sebagai upaya dari manajemen agar unggul dalam teknologi. Perusahaan akan melaksanakan upgrade infrastruktur dimasa yang akan datang temasuk integrasi dan perluasan jaringan *Next Generation Network* ("NGN"), akan semakin meningkatkan efisiensi lebih lanjut termasuk beban operasi. Perusahaan merencanakan akan terus melanjutkan pengurangan pegawai dalam beberapa tahun mendatang.

TELKOM meyakini bahwa persaingan di antara para operator seluler akan berlanjut pada tahun 2010, namun demikian persaingan tidak akan seketat pada beberapa tahun terakhir yang menyebabkan pengurangan tarif secara signifikan dan kemungkinan terjadinya pengurangan belanja modal oleh operator lain.

PENGATURAN TRANSAKSI DI LUAR NERACA

Kewajiban dan kontinjensi TELKOM dijelaskan pada Catatan 48 dari Laporan Keuangan Konsolidasian dan diringkas dalam Tabel Pengungkapan Kewajiban Kontraktual di bawah ini. Selain dari itu, pada tanggal 31 Desember 2009 perusahaan tidak mempunyai pengaturan transaksi di luar neraca yang kemungkinan mempunyai dampak material pada Laporan Keuangan Konsolidasian baik di masa kini maupun yang akan datang terhadap kondisi keuangan, pendapatan atau beban, hasil usaha, likuiditas, belanja modal dan sumber-sumber pendanaan.

KEWAJIBAN KONTRAKTUAL

Tabel berikut menyajikan informasi tentang kewajiban kontraktual pada tanggal 31 Desember 2009.

Tabel Pengungkapan Dalam Bentuk Tabel Untuk Kewajiban Kontraktual

Kewajiban Kontraktual	Jatuh Tempo Pembayaran				
	Jumlah (Rp miliar)	Kurang dari 1 tahun (Rp miliar)	1-3 tahun (Rp miliar)	3-5 tahun (Rp miliar)	Lebih dari 5 tahun (Rp miliar)
Pinjaman Jangka Pendek[1][6]	43,8	43,8	-	-	-
Hutang Jangka Panjang[2][6]	20.505,4	6.255,8	7.752,6	4.843,7	1.653,3
Kewajiban Sewa Guna Usaha	360,3	152,2	179,4	28,7	-
Bunga atas Pinjaman Jangka Pendek, Hutang Jangka Panjang dan Kewajiban Sewa Guna Usaha[7]	4.592,4	1.775,1	1.861,8	616,8	338,7
Operating Leases[4]	1.648,4	1.447,0	164,2	35,9	1,3
Kewajiban Pengadaan yang Tidak Bersyarat[5]	9.026,2	9.026,2	-	-	-
Nilai Perolehan Penggabungan Usaha yang Ditangguhkan	1.329,4	1.221,3	108,1	-	-
Jumlah	37.505,9	19.921,4	10.066,1	5.525,1	1.993,3

(1) Terkait dengan pinjaman jangka pendek yang diperoleh dari Bank Ekonomi, CIMB Niaga, dan BSM, lihat Catatan 18 pada Laporan Keuangan Konsolidasian;
(2) Lihat Catatan 19-23 pada Laporan Keuangan Konsolidasian;
(3) Terkait dengan sewa guna usaha untuk instalasi dan peralatan transmisi, kendaraan bermotor, perangkat pemrosesan dan perangkat kantor untuk jaringan telekomunikasi TELKOMFlexi;
(4) Terkait dengan sewa komputer, kendaraan bermotor, tanah, gedung, peralatan kantor dan sirkit;
(5) Terkait dengan komitmen TELKOM kepada pemasok untuk pembelian peralatan dan infrastruktur telekomunikasi;
(6) Tidak termasuk yang terkait dengan komitmen kontraktual/kewajiban beban bunga; dan
(7) Lihat "Faktor-Faktor Risiko - Tabel Risiko Suku Bunga".

Lihat Catatan 47 Laporan Keuangan Konsolidasian untuk rincian kewajiban kontraktual di atas. Sebagai tambahan dari kewajiban kontraktual diatas, pada tanggal 31 Desember 2009, TELKOM memiliki kewajiban jangka panjang untuk pensiun, imbalan kesehatan pascakerja dan penghargaan masa kerja. TELKOM mengalokasikan Rp990,0 miliar untuk imbalan kesehatan pascakerja dan Rp485,3 miliar untuk program pensiun manfaat pasti untuk tahun 2010. Lihat Catatan 40 dan 42 pada Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

Informasi Keuangan Tambahan

INFORMASI KEUANGAN
LAPORAN KONSOLIDASI DAN INFORMASI KEUANGAN LAIN

Lihat "Laporan Keuangan Konsolidasian" yang terdapat dalam lampiran Laporan Tahunan ini.

KASUS HUKUM MATERIAL

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan perselisihan tanah, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan praktik kartel SMS. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Perusahaan dan anak perusahaan mencadangkan sebesar Rp95.054 juta pada tanggal 31 Desember 2009.

Berikut disampaikan penjelasan tentang kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh TELKOM dan atau anak perusahaan.

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") melalui suratnya tanggal 5 Desember 2007 memberitahu Telkomsel bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kasus No. 07/KPPU-L/2007 tanggal 19 November 2007 berkaitan dengan transaksi kepemilikan silang oleh Temasek Holdings dan praktik monopoli oleh Telkomsel, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan antara lain:

  - Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 25.1.b Undang-Undang tersebut;
  - Telkomsel telah melanggar pasal 17.1 Undang-Undang tersebut;
  - Memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya untuk melepaskan kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    - Maksimum kepemilikan untuk masing-masing pembeli adalah 5%;
    - Pembeli tidak memiliki hubungan dengan Temasek Holdings;
  - Telkomsel diharuskan membayar denda sebesar Rp25.000 juta dan memerintahkan Telkomsel untuk menghentikan praktik pengenaan tarif yang tinggi dan menurunkan tarif paling sedikit sebesar 15% dari tarif yang berlaku.

  Pada tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri telah mengumumkan keputusannya dan menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

  - Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 25.1.b Undang-Undang tersebut;
  - Telkomsel telah melanggar pasal 17.1 Undang-Undang tersebut;
  - Memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel atau mengurangi kepemilikannya menjadi 50% pada masing-masing perusahaan dalam batas waktu dua belas bulan sejak tanggal keputusan ini final dan mengikat secara hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    - Maksimum kepemilikan untuk masing-masing pembeli adalah 10%;
    - Pembeli tidak memiliki hubungan dengan Temasek Holdings;
  - Telkomsel harus membayar denda sebesar Rp15 miliar; dan
  - Pengadilan Negeri tidak menyetujui keputusan KPPU mengenai perintah untuk menurunkan tarif tersebut karena KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif tersebut.

  Pada tanggal 22 Mei 2008, Telkomsel telah mengajukan keberatan hukum kepada Mahkamah Agung ("MA"). Pada tanggal 9 September 2008, MA mencabut keputusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan salah satu kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel. Pada tanggal 14 Mei 2009, Telkomsel mengajukan uji materil ke MA atas keputusan tersebut. Sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini, belum ada keputusan yang diperoleh dari upaya pengajuan uji materiil tersebut.

- Sekelompok pelanggan Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama) yang berdomisili di Bekasi, Tangerang, dan berbagai wilayah lainnya, diwakili oleh Penasehat Hukum, telah mengajukan gugatan hukum class-action di Pengadilan Negeri terhadap Telkomsel, TELKOM, Indosat, Pemerintah, Temasek Holdings, dan perusahaan terafiliasi tertentu ("Pihak Tergugat"). Pihak Tergugat didakwa telah menerapkan tarif yang terlalu tinggi dari tarif sewajarnya, tarif tersebut dapat berdampak buruk terhadap pelanggan tersebut.

  Pada tanggal 8 Juli 2008, gugatan hukum *class-action* ke Pengadilan Negeri Bekasi terhadap Telkomsel, telah ditolak dan kasus tersebut telah ditutup.

  Pada tanggal 14 Agustus 2008, berdasarkan keputusan pengadilan, gugatan hukum *class-action* di Tangerang dan wilayah lainnya dikonsolidasi menjadi satu kasus, untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Pelanggan di berbagai wilayah lainnya keberatan atas keputusan tersebut dan mengajukan keberatan hukum ke MA. Pada tanggal 21 Januari 2009, dalam keputusannya No. 01K/Pdt.Sus/2009, MA menyetujui tuntutan para pelanggan, oleh karena itu, gugatan hukum class-action diproses secara terpisah di pengadilan masing-masing. Berdasarkan ketetapan MA tersebut, pengesahan ini dianggap telah dieksekusi dan pada tanggal 6 Oktober 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa pemeriksaan terhadap kasus ini dapat dilanjutkan.

- TELKOM, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi lainnya sedang diperiksa oleh KPPU dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 17 Juni 2008, KPPU menyatakan bahwa TELKOM, Telkomsel, dan beberapa operator lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan denda kepada Perusahaan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18.000 juta dan Rp25.000 juta.

  Sehubungan dengan Keputusan KPPU tanggal 17 Juni 2008, TELKOM dan Telkomsel telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Bandung, masing-masing pada tanggal 11 Juli 2008 dan 14 Juli 2008. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan tahunan ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.

  TELKOM dan Telkomsel meyakini bahwa hasil investigasi atau keputusan pengadilan dalam kasus-kasus tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap kondisi keuangan Perusahaan dan anak Perusahaan. Lihat Catatan 48 pada Laporan Keuangan Konsolidasian.

KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal 11 Januari 2010, para pemegang saham TII menyetujui keikutsertaan TII dalam konsorsium Kabel Laut South East Asia-Japan Cable System (SJC) dan *extended capacity* ke Amerika Serikat dengan total investasi sebesar 45,2 juta Dolar AS.

Pada tanggal 22 Januari 2010, Telkomsel memperoleh sertifikat persetujuan untuk paket 2 dan 7 setelah dilakukan uji kelayakan operasi terkait dengan ijin prinsip Telkomsel untuk menyediakan jaringan tetap lokal di bawah program KPU. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2010 dan 28 Januari 2010, Telkomsel memperoleh ijin operasi untuk menyediakan jaringan tetap lokal dibawah program KPU di daerah-daerah yang dicakup oleh perjanjian antara Telkomsel dan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP"). institusi yang didirikan oleh Menkominfo. Lisensi berlaku sampai

berakhirnya masa perjanjian, dapat diperpanjang tergantung hasil evaluasi. Lihat Catatan 46h pada Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

Pada tanggal 25 Januari 2010, Metra telah menandatangani Conditional Sales Purchase Agreement ("CSPA") dengan para pemegang saham PT Administrasi Medika ("Ad Medika") untuk membeli 75% saham beredar Ad Medika. Selanjutnya, pada tanggal 25 Februari 2010, Metra menandatangani *Sales Purchase Agreement ("SPA")* dengan para pemegang saham Ad Medika atas transaksi pembelian saham sebesar Rp128,25 miliar.

Pada tanggal 27 Januari 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan *class-action* oleh beberapa pelanggan tertentu di berbagai wilayah lainnya.

Pada tanggal 28 Januari dan 12 Februari 2010, Telkomsel menerima klaim atas pengembalian pajak untuk tahun fiskal 2008 masing-masing sebesar Rp439 miliar dan Rp4,2 miliar.

Pada 2 Februari 2010, fasilitas pinjaman dari OCBC NISP dan OCBC Indonesia masing-masing sejumlah Rp250.000 juta (lihat catatan 22n Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM) dan Rp100.000 juta (lihat catatan 22m Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM), telah dilakukan pencairan oleh TELKOM.

Pada tanggal 3 Februari 2010, TII melakukan tambahan pembelian saham Scicom sejumlah 3.042.400 lembar saham dengan nilai transaksi sebesar 0,42 juta Dolar AS (setara dengan Rp3.905 juta) sehingga tingkat kepemilikan TII di Scicom meningkat menjadi 17,01%.

Pada tanggal 3 Februari 2010, Telkomsel menandatangani beberapa perjanjian untuk pemeliharaan serta pengadaan peralatan dan jasa terkait:

- *Next Generation Convergence IP RAN Rollout and Technical Support* dengan PT Packet System Indonesia dan Huawei Tech; dan
- *Next Generation Convergance Core Transport Rollout and Technical Support* dengan PT Datacraft Indonesia dan Huwei Tech.

Perjanjian berlaku sampai dengan:

- Tiga tahun setelah tanggal efektif; dan
- Tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

Telkomsel dapat memperpanjang perjanjian untuk periode tidak lebih dari dua tahun.

Pada tanggal 8 Februari 2010, Telkomsel menandatangani perjanjian pengembangan *Online Charging System and Service Control Point System Solutions* dengan Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions. Perjanjian ini akan berlanjut hingga:

- Tanggal pada saat 5 tahun setelah tanggal efektif perjanjian; dan
- Tanggal ketika pemesanan pembelian terakhir dalam lingkup perjanjian ini berakhir atau habis masa berlakunya untuk suatu pemesanan pembelian yang diterbitkan sebelum tanggal kadaluwarsa dalam periode 5 tahun.

Pada tanggal 2 Maret 2010, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman dengan Finnish Export Credit Ltd. sebesar 250 juta Dolar AS. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk pembelian peralatan dan jasa Nokia Siemens Network.

Pada tanggal 3 Maret 2010, Pengadilan Pajak mengumumkan persetujuan atas sebagian besar keberatan Telkomsel atas PPN untuk tahun fiskal 2004 dan 2005 sebesar 215 miliar. Tetapi sampai dengan tanggal penerbitan laporan tahunan ini, Telkomsel belum menerima keputusan resmi dari Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 26 Maret 2010, dalam kaitan perjanjian Perusahaan dengan Konsorsium NSW-Fujitsu untuk kapasitas Ring proyek JaKa2LaDeMa, Perusahaan menandatangani perjanjian untuk pinjaman dari Japan Bank for International Coorperation, yang merupakan perpanjangan tangan internasional dari Japan Finance Corporation untuk fasilitas pinjaman senilai 59,89 juta Dolar AS yang digunakan untuk pembelian layanan dan perangkat telekomunikasi dari Konsorsium NSW-Fujitsu. Fasilitas tersebut terdiri dari Fasilitas A dan B yang berjumlah 35,93 juta Dolar AS dan 23,96 juta Dolar AS. Fasilitas ini dibayar kembali dalam 10 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak tanggal fasilitas digunakan. Pinjaman melalui fasilitas ini memiliki tingkat suku bunga sebesar 4,56% dan tingkat rata-rata LIBOR selama enam bulan di tambah 0,70% per tahunnya serta tidak memiliki jaminan. sampai dengan tanggal dikeluarkannya laporan tahunan ini, fasilitas ini belum dapat digunakan.

MEMORANDUM DAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perusahaan ("Anggaran Dasar") telah didaftarkan sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") No. 40 Tahun 2007 dan disetujui sesuai Keputusan Menteri No. C2-7468.HT.01.04. TH.97 tahun 1997 dan selanjutnya sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU.46312.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah didaftarkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 2008, Lampiran Berita Negara No. 20155.

Sesuai pasal 3, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi serta informasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan yang semestinya untuk menjaga dan meningkatkan jaringan telekomunikasi dan informasi.

Sesuai UUPT, TELKOM memiliki Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi tersebut terpisah dan tidak ada individu yang dapat menjadi anggota keduanya. Setiap Direktur menerima bonus apabila TELKOM melampaui target keuangan dan operasional tertentu yang jumlahnya ditentukan oleh para pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Lihat "Tata Kelola Perusahaan - Informasi yang Berkaitan dengan Penerapan Good Corporate Governance ("GCG")". Dalam Anggaran Dasar dinyatakan

bahwa setiap transaksi yang melibatkan benturan kepentingan antara Perusahaan dan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang sahamnya harus mendapat persetujuan dalam RUPS, suatu persetujuan memerlukan lebih dari lima puluh persen suara pemegang saham independen.

Direksi bertanggung jawab memimpin dan mengelola Perusahaan sesuai maksud dan tujuan perusahaan, mengendalikan, menjaga dan mengelola aset Perusahaan.

Anggaran Dasar tidak mencantumkan persyaratan apapun bagi Direksi untuk (i) pensiun pada usia tertentu atau (ii) memiliki suatu atau sejumlah tertentu saham Perusahaan. Hak, preferensi dan batasan yang menyertai setiap jenis saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

- **hak atas dividen.** Dividen harus dibayar sesuai kondisi keuangan TELKOM dan sesuai keputusan para pemegang saham dalam RUPS, yang juga menentukan besaran dan waktu pembayaran dividen;
- **hak suara.** Setiap pemegang saham mempunyai hak satu suara pada RUPS;
- **hak mendapatkan bagian atas laba Perusahaan.** Lihat hak atas dividen;
- **hak mendapatkan bagian atas kelebihan pada saat likuidasi.** Para pemegang saham berhak atas kelebihan pada saat likuidasi sesuai proporsi kepemilikan sahamnya dengan ketentuan nilai nominal Saham Biasa yang dimiliki sudah disetor penuh;
- **ketentuan pembelian kembali.** Tidak ada ketentuan mengenai pembelian kembali saham dalam Anggaran Dasar. Namun, sesuai Pasal 30 UUPT, TELKOM dapat membeli kembali maksimum 10% dari saham yang telah ditempatkan dan beredar;
- **ketentuan dana cadangan.** Laba ditahan hingga minimum 20% dari modal yang ditempatkan Perusahaan, harus disisihkan untuk menutup kemungkinan kerugian yang diderita Perusahaan. Apabila jumlah dana cadangan lebih besar 20% dari modal yang ditempatkan Perusahaan, maka RUPS dapat memberi wewenang kepada Perusahaan untuk menggunakan kelebihan dana tersebut sebagai dividen;
- **kewajiban untuk peningkatan modal dari waktu ke waktu.** Para pemegang saham Perusahaan dapat diminta untuk membeli saham baru di Perusahaan dari waktu ke waktu. Hak tersebut harus ditawarkan kepada para pemegang saham sebelum ditawarkan kepada pihak ketiga dan dapat dialihkan atas opsi pemegang saham. Direksi TELKOM diberi wewenang untuk menawarkan saham baru kepada pihak ketiga dalam hal pemegang saham yang ada tidak dapat atau tidak bersedia membeli saham baru tersebut; dan
- **ketentuan yang membedakan antara pemegang saham yang ada atau calon pemegang saham yang disebabkan karena pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang substansial.** Anggaran Dasar tidak mencantumkan ketentuan tersebut.

Untuk mengubah hak para pemegang saham, diperlukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar yang terkait. Setiap perubahan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan dari pemegang saham "Seri A" Dwiwarna dan pemegang saham lain atau kuasanya yang secara bersama mewakili sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh suara yang hadir pada RUPS.

RUPS hanya boleh diadakan setelah Perusahaan menyampaikan pemberitahuan seperti yang disyaratkan. Pemberitahuan harus diumumkan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar dalam bahasa Indonesia dan satu surat kabar dalam bahasa Inggris yang memiliki peredaran luas di Indonesia. Jangka waktu pemberitahuan akan diadakannya RUPS Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") adalah 14 hari (tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat). Kuorum untuk RUPS dan RUPSLB adalah para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% modal saham beredar dari Perusahaan. Dalam hal kuorum tidak tercapai, harus diadakan rapat berikutnya, tanpa harus menyampaikan pemberitahuan. Pada RUPS dan RUPSLB, kuorum untuk rapat adalah para pemegang saham yang mewakili sepertiga (1/3) modal saham yang beredar dari Perusahaan. Dalam hal kuorum tidak tercapai pada rapat kedua, maka RUPS dan RUPSLB dapat diadakan, suatu kuorum untuk rapat tersebut akan ditentukan oleh Ketua Bapepam-LK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para pemegang saham dapat memberikan suara melalui kuasa. Seluruh keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan mayoritas, kecuali Anggaran Dasar mensyaratkan mayoritas yang lebih besar. Anggaran Dasar tidak mencantumkan batasan apapun atas hak setiap orang untuk memiliki saham Perusahaan. Peraturan pasar modal Indonesia tidak mencantumkan batasan apapun atas hak setiap orang, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, untuk memiliki saham di suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Setiap pengambilalihan TELKOM harus mendapat persetujuan dari pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan mayoritas yang mewakili setidaknya tiga per empat (3/4) dari seluruh saham pada rapat umum pemegang saham yang harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Setiap Direktur dan Komisaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK berkenaan dengan kepemilikan saham serta perubahan kepemilikan saham

Tidak ada ketentuan lain dalam Anggaran Dasar yang berdampak memperlambat, menangguhkan atau mencegah perubahan kendali atas TELKOM.

Setiap Direktur dan Komisaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK berkenaan dengan kepemilikan saham serta perubahan kepemilikan saham di Perusahaan dan kewajiban ini juga berlaku untuk para pemegang saham yang memiliki kepemilikan 5% atau lebih atas modal yang disetor dari Perusahaan. TELKOM yakin bahwa Anggaran Dasar tidak berbeda signifikan dari yang umum berlaku di Indonesia untuk perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. TELKOM juga yakin bahwa ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar yang terkait dengan perubahan modal TELKOM tidak lebih ketat dari yang disyaratkan oleh hukum Indonesia.

RANGKUMAN PERBEDAAN SIGNIFIKAN ANTARA PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN INDONESIA DAN STANDAR TATA KELOLA PERUSAHAAN NYSE

Berikut ini diuraikan secara ringkas rangkuman umum mengenai perbedaan signifikan antara praktik tata kelola perusahaan di Indonesia dan yang disyaratkan oleh standar pencatatan New York Stock Exchange ("NYSE") untuk perusahaan Amerika yang tercatat di NYSE.

TINJAUAN HUKUM INDONESIA

Perusahaan publik Indonesia diwajibkan untuk mematuhi dan memenuhi praktik tata kelola perusahaan yang telah berlaku. Persyaratan dan standar praktik tata kelola perusahaan untuk perusahaan publik diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas yang telah diperbaharui oleh Undang-undang Perseroan Terbatas ("UUPT") No. 40 tahun 2007; Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"); Undang-Undang No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara; Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M.MBU/2002 mengenai Pelaksanaan Praktik Tata Kelola Perusahaan; Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia (Peraturan Bapepam-LK); dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Selain persyaratan berdasarkan undang-undang tersebut, Anggaran Dasar perusahaan publik umumnya menyertakan ketentuan-ketentuan yang mengatur praktik tata kelola perusahaan.

Seperti undang-undang Amerika Serikat, undang-undang Indonesia mengharuskan perusahaan publik mematuhi dan memenuhi standar praktik tata kelola perusahaan yang lebih ketat dari yang diterapkan pada perusahaan milik swasta. Perlu diperhatikan bahwa di Indonesia, istilah "perusahaan publik" belum tentu merujuk pada perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek. Sesuai UUPM, perusahaan yang tidak tercatat dapat dianggap perusahaan publik dan tunduk pada undang-undang dan peraturan yang mengatur perusahaan publik, apabila perusahaan tersebut memenuhi atau melampaui persyaratan modal dan persyaratan pemegang saham yang berlaku untuk perusahaan terbuka.

Pada tanggal 30 November 2004, Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance ("KNKG") berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. KEP-49/M.EKONOM/1/TAHUN 2004. Pendirian tersebut merupakan revitalisasi Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan ("KNTKP") yang didirikan pada tahun 1999. Tujuan dari KNKG adalah meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia dan untuk memberi saran kepada Pemerintah tentang hal-hal yang terkait dengan data kelola, baik di sektor korporasi dan publik.

Hasilnya, KNKG merumuskan Kode Tata Kelola Perusahaan 2006 ("Kode") yang merekomendasikan standar tata kelola perusahaan yang lebih ketat untuk perusahaan-perusahaan Indonesia, seperti pembentukan komite audit independen, komite nominasi dan remunerasi oleh Dewan Komisaris, serta peningkatan lingkup kewajiban pengungkapan perusahaan-perusahaan Indonesia. Meskipun KNKG merekomendasikan agar Kode diterapkan oleh Pemerintah sebagai dasar reformasi hukum, namun sampai dengan tanggal laporan tahunan ini, Pemerintah belum menerbitkan peraturan yang sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut.

KOMPOSISI DIREKSI INDEPENDEN

Standar pencatatan NYSE mensyaratkan bahwa Direksi perusahaan yang tercatat di Amerika Serikat harus terdiri dari mayoritas direktur independen dan bahwa komite tertentu harus terdiri dari para direktur independen. Seorang Direktur memenuhi syarat sebagai independen hanya apabila dewan dengan tegas memutuskan bahwa Direktur tidak memiliki hubungan material dengan perusahaan, baik secara langsung atau tidak langsung.

Tidak seperti halnya perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat, manajemen perusahaan Indonesia terdiri dari dua lembaga dengan status yang sama, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Pada umumnya Direksi bertanggung jawab atas kegiatan bisnis rutin perusahaan dan diberi wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, sementara Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab mengawasi Direksi dan berdasarkan UUPT Indonesia diberi mandat untuk memberikan saran kepada Direksi.

Berkenaan dengan Dewan Komisaris, UUPT mengharuskan Dewan Komisaris perusahaan publik memiliki setidaknya dua anggota. Meskipun UUPT tidak mengatur mengenai komposisi Dewan Komisaris, namun Peraturan Pencatatan No. 1A yang dikeluarkan oleh BEI menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 30% dari anggota Dewan Komisaris perusahaan publik (seperti TELKOM) harus independen.

Mengenai Direksi, dalam UUPT diatur bahwa Direksi memiliki wewenang untuk mengelola operasi rutin perusahaan dan setidaknya dua anggota, yang masing-masing harus memenuhi persyaratan kualifikasi minimum yang ditetapkan dalam UUPT. Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M.MBU/2002 menyatakan sekurang-kurangnya 20% anggota Direksi harus merupakan anggota yang tidak terafiliasi.

Dengan adanya perbedaan antara peran anggota Direksi di perusahaan Indonesia dan mitranya di perusahaan Amerika Serikat, undang-undang Indonesia tidak mengharuskan independensi anggota Direksi tertentu juga tidak mengharuskan dibentuknya komite tertentu yang sepenuhnya beranggotakan direktur independen.

KOMITE-KOMITE

Standar pencatatan NYSE mensyaratkan bahwa perusahaan yang tercatat di Amerika Serikat harus memiliki komite audit, komite tata kelola perusahaan dan komite kompensasi. Masing-masing komite tersebut harus terdiri atas direktur independen dan mendapatkan pengakuan tertulis yang membahas hal-hal spesifik yang terdapat pada standar pencatatan.

UUPT tidak mengharuskan perusahaan publik Indonesia membentuk setiap komite yang ditetapkan dalam standar pencatatan NYSE. Namun, Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 dan Peraturan Pencatatan No. 1A yang dikeluarkan oleh BEI mengharuskan Dewan Komisaris perusahaan publik tercatat (seperti TELKOM) membentuk komite yang akan mengawasi proses audit perusahaan (komite ini harus diketuai oleh anggota Dewan Komisaris Independen).

TELKOM memiliki komite audit yang terdiri dari enam anggota: dua Komisaris independen dan empat anggota yang tidak berafiliasi dengan TELKOM. Peraturan pencatatan NYSE yang diterapkan sesuai Peraturan 10A-3 berdasarkan *Exchange Act* mengharuskan emiten swasta asing dengan saham yang tercatat di NYSE memiliki komite audit yang terdiri dari para direktur independen. Namun, sesuai Peraturan tersebut, emiten swasta asing dikecualikan dari persyaratan independensi apabila (i) pemerintah atau bursa efek negara asal mengharuskan perusahaan memiliki komite audit; (ii) komite audit terpisah dari Direksi dan memiliki anggota dari dalam maupun dari luar Direksi; (iii) anggota komite audit tidak dipilih oleh manajemen dan tidak ada pejabat eksekutif perusahaan yang menjadi anggota komite audit; (iv) pemerintah atau bursa efek negara asal memiliki persyaratan untuk komite audit yang independen dari manajemen perusahaan; dan (v) komite audit bertanggung jawab atas penunjukan, retensi dan pengawasan pekerjaan auditor eksternal. TELKOM dikecualikan dari hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Seksi 303A Penegasan Tertulis Tahunan yang diajukan ke NYSE. Standar pencatatan NYSE dan *charter* Komite Audit TELKOM bersama-sama bertujuan untuk menetapkan sistem pengawasan akuntansi perusahaan yang independen dari manajemen dan memastikan independensi auditor. Namun, tidak seperti persyaratan yang ditetapkan dalam standar pencatatan NYSE, Komite Audit TELKOM tidak memiliki tanggung jawab langsung atas penunjukan, kompensasi dan retensi auditor eksternal TELKOM. Komite Audit TELKOM hanya dapat merekomendasikan penunjukan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris dan keputusan Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan dari pemegang saham.

Dewan Komisaris TELKOM memiliki komite nominasi dan remunerasi, Komite tersebut diberi tugas untuk merumuskan kriteria pemilihan dan prosedur pencalonan untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

PENGUNGKAPAN BERKENAAN DENGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Standar pencatatan NYSE mengharuskan perusahaan Amerika Serikat untuk mengambil dan menempatkan pada situs web mereka, pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan. Pedoman tersebut, antara lain, harus mencantumkan: standar kualifikasi direktur, tanggung jawab direktur, hubungan direktur dengan manajemen dan penasihat independen, kompensasi direktur, orientasi dan pendidikan yang berkelanjutan bagi direktur, suksesi manajemen serta evaluasi kinerja tahunan. Selain itu, CEO perusahaan Amerika Serikat harus menyatakan kepada NYSE setiap tahunnya bahwa ia tidak menemukan adanya pelanggaran apapun oleh perusahaan terhadap standar pencatatan tata kelola perusahaan NYSE. Sertifikasi harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham. Tidak ada persyaratan pengungkapan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mirip dengan standar pencatatan NYSE yang diuraikan di atas. Namun, Undang-Undang Pasar Modal pada umumnya mengharuskan perusahaan publik Indonesia mengungkapkan jenis informasi tertentu kepada para pemegang saham dan Bapepam-LK, khususnya informasi yang berkenaan dengan perubahan kepemilikan saham perusahaan publik dan fakta material yang bisa mempengaruhi keputusan para pemegang saham dalam mempertahankan kepemilikan sahamnya di perusahaan publik tersebut.

KODE ETIK DAN PERILAKU BISNIS

Standar pencatatan NYSE mengharuskan setiap perusahaan yang tercatat di Amerika Serikat untuk mengambil dan menempatkan di situs web perusahaannya, kode etik dan perilaku bisnis bagi Direksi, pejabat dan karyawannya. Tidak ada persyaratan serupa berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, perusahaan diharuskan menyampaikan laporan berkala ke SEC, termasuk TELKOM, harus mengungkapkan dalam laporan tahunan tentang penerapan peraturan etika untuk pejabat keuangan senior perusahaan. Meskipun persyaratan mengenai isi peraturan etika sesuai peraturan SEC tidak identik dengan yang ditetapkan dalam standar pencatatan NYSE, namun terdapat kemiripan yang signifikan. Berdasarkan peraturan SEC, kode etika harus dirancang untuk mendorong: (a) perbuatan yang jujur dan etis, termasuk penanganan benturan kepentingan antara hubungan pribadi dan profesional; (b) pengungkapan yang lengkap, wajar, tepat dan tepat waktu dalam laporan dan dokumen yang diajukan kepada atau diserahkan kepada SEC; (c) kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku; (d) mempercepat pelaporan internal mengenai pelanggaran terhadap peraturan; dan (e) pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya, para pemegang saham harus diberikan akses ke salinan fisik atau

elektronik dari kode tersebut. Lihat "Tata Kelola Perusahaan - Budaya Korporasi Dan Etika Bisnis - Kode Etik".

KONTRAK MATERIAL

KAPASITAS RING JAWA-KALIMANTAN, KALIMANTAN-SULAWESI, DENPASAR-MATARAM ("JAKA2LADEMA") DENGAN KONSORSIUM NSW-FUJITSU

Pada tanggal 30 Desember 2008, TELKOM membuat kesepakatan dengan Konsorsium NSW-Fujitsu untuk pengadaan dan instalasi kabel laut yang menghubungkan jaringan antar pulau besar di Indonesia melalui jaringan Kapasitas Ring proyek Jaka2LaDeMa. Nilai pengadaan tersebut adalah sebesar 106,5 juta Dolar AS (tidak termasuk PPN).

Untuk rincian komitmen kontrak TELKOM lainnya yang signifikan lihat Catatan 47a di Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

PENGENDALIAN NILAI TUKAR

INFORMASI NILAI TUKAR

Tabel berikut memuat nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berdasarkan kurs tengah pada akhir setiap bulan untuk jangka waktu yang bersangkutan. Kurs tengah Rupiah dihitung berdasarkan kurs jual dan beli Bank Indonesia.

Sertifikasi harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan pada pemegang saham

Tabel Informasi Nilai Tukar

Kalender	Pada akhir periode	Rata-rata[1]	Tertinggi[2]	Terendah[2]
	(Rp per US$1)			
2005	9.830	9.711	10.800	9.133
Kuartal Pertama	9.480	9.276	9.520	9.133
Kuartal Kedua	9.713	9.548	9.755	9.435
Kuartal Ketiga	10.310	10.006	10.800	9.735
Kuartal Keempat	9.830	9.992	10.300	9.735
2006	9.020	9.167	9.795	8.720
Kuartal Pertama	9.075	9.304	9.795	9.030
Kuartal Kedua	9.300	9.107	9.520	8.720
Kuartal Ketiga	9.235	9.121	9.245	9.030
Kuartal Keempat	9.020	9.134	9.228	9.020
2007	9.419	9.136	9.479	8.672
Kuartal Pertama	9.118	9.099	9.225	8.950
Kuartal Kedua	9.054	8.973	9.120	8.672
Kuartal Ketiga	9.137	9.246	9.479	8.990
Kuartal Keempat	9.419	9.234	9.434	9.045
2008	10.950	9.691	12.400	9.051
Kuartal Pertama	9.217	9.260	9.486	9.051
Kuartal Kedua	9.225	9.264	9.376	9.179
Kuartal Ketiga	9.378	9.216	9.470	9.063
Kuartal Keempat	10.950	11.023	12.400	9.555
2009	9.400	10.398	12.065	9.293
Kuartal Pertama	11.575	11.631	12.065	10.863
Kuartal Kedua	10.225	10.531	11.620	9.985
Kuartal Ketiga	9.681	10.002	10.255	9.580
Kuartal Keempat	9.400	9.471	9.685	9.293
September	9.681	9.901	10.155	9.580
Oktober	9.545	9.483	9.685	9.293
November	9.480	9.470	9.610	9.348
Desember	9.400	9.458	9.505	9.400
2010				
Januari	9.365	9.275	9.408	9.130
Februari	9.335	9.348	9.413	9.280
Maret	9.115	9.174	9.313	9.070

(1) Rata-rata dari nilai tukar tengah yang diumumkan oleh Bank Indonesia berlaku untuk jangka waktu yang bersangkutan.

(2) Nilai atas dan bawah ditentukan berdasarkan nilai tukar tengah harian yang diumumkan oleh Bank Indonesia selama jangka waktu yang berlaku. Sumber: Bank Indonesia

Nilai tukar yang digunakan untuk translasi aset dan kewajiban moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing adalah nilai beli dan jual yang dipublikasikan oleh Reuters pada tahun 2007, 2008 and 2009. Nilai tukar untuk beli dan jual yang dipublikasikan oleh Reuters untuk aset dan

kewajiban moneter masing – masing sebesar Rp9.389 dan Rp9.399 per Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2007, Rp10.850 dan Rp10.950 per Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2008 dan Rp9.420 dan Rp9.430 per Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2009.

Penyajian laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam Rupiah. Translasi Rupiah ke dalam Dolar AS dimaksudkan demi kemudahan dalam membaca dan dikonversikan menggunakan nilai tukar rata-rata beli dan jual Rp9.425 per Dolar AS seperti yang dipublikasikan oleh Reuters pada tanggal 31 Desember 2009.

Pada tanggal 8 April 2010, nilai tukar beli dan jual Dolar AS berdasarkan Reuters masing-masing sebesar Rp9.035 dan Rp9.065 per Dolar AS.

VALUTA ASING

Kontrol Valuta Asing dihapuskan pada tahun 1971 dan Indonesia saat ini menerapkan sistem valuta asing liberal yang memungkinkan aliran bebas valuta asing. Transaksi modal termasuk pengiriman modal, laba, dividen dan bunga, bebas dari kontrol pertukaran. Bagaimanapun, beberapa peraturan mempunyai dampak terhadap sistem nilai tukar. Misalnya, hanya bank yang diberi wewenang untuk melakukan transaksi atas valuta asing dan melaksanakan transaksi pertukaran terkait dengan import dan ekspor barang. Selain itu, bank-bank Indonesia (termasuk cabang bank asing di Indonesia) diharuskan melapor ke Bank Indonesia (Bank Sentral Indonesia) setiap transfer dana yang melebihi 10.000 Dolar AS. Sebagai perusahaan milik Negara, TELKOM, berdasarkan ketetapan Ketua Team Koordinasi Pinjaman Komersial Luar Negeri ("PKLN"), diharuskan mendapatkan persetujuan dari PKLN sebelum mendapatkan pinjaman komersial asing dan harus menyerahkan laporan berkala kepada PKLN selama jangka waktu pinjaman.

Bank Indonesia berwenang menerbitkan mata uang Rupiah dan bertanggung jawab untuk mempertahankan stabilitas Rupiah. Sebelum tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia mempertahankan stabilitas Rupiah melalui kebijakan batas atas dan bawah nilai tukar (*trading band policy)* yang merupakan dasar bagi Bank Indonesia untuk memasuki pasar valuta asing dan membeli atau menjual Rupiah, apabila diperlukan, ketika perdagangan dalam Rupiah melampaui harga jual dan beli yang diumumkan oleh Bank Indonesia setiap harinya. Pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia mengakhiri kebijakan kebijakan batas atas dan bawah (*trading band policy*) yang secara efektif membebaskan Rupiah mengambang terhadap mata uang lain. Sejak tanggal itu, Rupiah mengalami depresiasi signifikan terhadap mata uang negara lain.

Selama 25 tahun terakhir, Rupiah telah mengalami devaluasi tiga kali terhadap Dolar AS. Penyesuaian ke bawah ini terjadi pada bulan November 1978, ketika nilai tukar diselaraskan kembali dari Rp415 menjadi Rp623 terhadap Dolar AS; pada bulan Maret 1983, ketika nilai tukar naik dari Rp703 menjadi Rp970 terhadap Dolar AS; dan pada bulan September 1986, ketika nilai tukar jatuh dari Rp1.134 menjadi Rp1.644 terhadap Dolar AS. Antara waktu devaluasi 1986 dan 14 Agustus 1997, nilai Rupiah secara bertahap disesuaikan ke bawah terhadap Dolar AS sebesar kurang lebih 4% setiap tahunnya. Sejak rezim mengambang bebas diberlakukan pada bulan Agustus 1997, fluktuasi Rupiah terjadi signifikan. Selama tahun 2009, nilai rata-rata Rupiah terhadap Dolar AS adalah sebesar Rp10.398. dengan nilai tertinggi dan terendah, masing-masing sebesar Rp12.065 dan Rp9.293.

PERPAJAKAN

Berikut ini adalah ikhtisar pajak penghasilan Indonesia dan Amerika Serikat yang berisi uraian mengenai konsekuensi pajak Indonesia dan US Federal terhadap pembelian, kepemilikan dan penjualan ADS atau saham biasa. Para investor harus berkonsultasi dengan penasihat pajak mereka mengenai konsekuensi pajak Indonesia dan US Federal terhadap pembelian, kepemilikan dan penjualan ADS atau saham biasa.

PERPAJAKAN INDONESIA

Berikut ini adalah ikhtisar konsekuensi pajak Indonesia atas kepemilikan dan pelepasan saham biasa atau ADS kepada perorangan bukan penduduk atau perusahaan asing yang memiliki saham biasa atau ADS (Pemegang bukan penduduk). Sebagaimana yang digunakan dalam kalimat sebelumnya, "perorangan bukan penduduk" adalah warga negara asing yang secara fisik tidak berada di Indonesia selama-lamanya 183 hari atau lebih selama jangka waktu dua belas bulan, selama jangka waktu tersebut perorangan bukan penduduk menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS dan "perusahaan asing" adalah badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan atau terorganisasi berdasarkan hukum yurisdiksi selain Indonesia dan tidak memiliki tempat berbisnis tetap atau menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia selama tahun pajak Indonesia tempat badan usaha non-Indonesia tersebut menerima penghasilan sehubungan dengan kepemilikan atau pelepasan saham biasa atau ADS. Dalam menentukan kedudukan perorangan atau badan, yang dipertimbangkan adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian pajak berganda yang berlaku, Indonesia merupakan salah satu pihak yang berpartisipasi.

Dividen

Dividen yang diumumkan oleh Perusahaan dari laba ditahan dan dibagikan kepada pemegang saham bukan warga negara Indonesia terkait dengan saham biasa atau ADS terkena kewajiban pemotongan pajak penghasilan (*withholding tax*) di Indonesia yang, pada tanggal laporan tahunan ini, dikenakan tarif sebesar 20% atas jumlah pembagian (dalam hal dividen tunai) atau atas bagian proporsional dari para pemegang saham dari nilai pembagian. Tarif yang lebih rendah yang ditetapkan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda dapat diberlakukan dengan ketentuan bahwa penerima adalah pemilik manfaat dari dividen dan telah menyerahkan kepada Perusahaan (dengan salinan yang ditembuskan kepada Kantor Pelayanan Pajak Indonesia tempat Perusahaan terdaftar) Surat Keterangan Domisili Pajak yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau pihak yang ditetapkannya, dari yurisdiksi tempat pemegang saham bukan warga Negara Indonesia berkedudukan

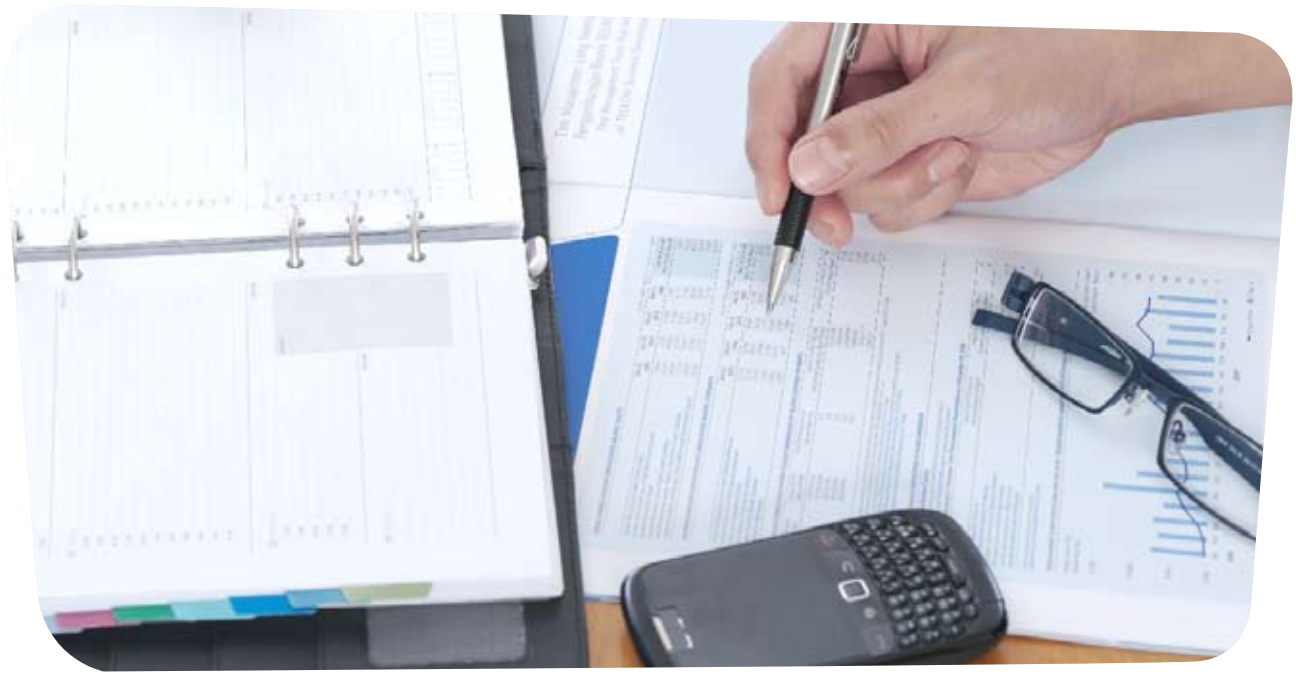

(Surat Keterangan Domisili). Indonesia telah mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan sejumlah negara termasuk Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Malaysia, Belanda, Singapura, Swedia, Swiss, Inggris dan AS. Berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara AS-Indonesia, pengenaan potongan pajak penghasilan atas dividen, bagi pemegang saham yang tidak memiliki hak suara lebih dari 25%, dikurangi menjadi 15%.

Capital Gains

Penjualan atau pengalihan Saham Biasa melalui BEI merupakan subyek pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi. Pialang yang melakukan transaksi diwajibkan memotong pajak tersebut. Kepemilikan saham pihak pendiri atau penjualan atau pengalihan saham pihak pendiri melalui BEI, berdasarkan peraturan pajak Indonesia yang berlaku saat ini, dapat terkena tambahan pajak penghasilan yang bersifat final 0,5%.

Dengan diberlakukannya peraturan pelaksanaan, perkiraan penghasilan bersih yang diterima atau masih akan diterima dari penjualan aset bergerak di Indonesia, yang dapat mencakup saham biasa yang tidak tercatat di bursa efek Indonesia atau ADS, oleh pemegang saham bukan warga Negara Indonesia (kecuali penjualan aset berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia) dapat terkena pemotongan pajak penghasilan di Indonesia dengan tarif 20% dari estimasi penghasilan bersih. Pada tahun 1999, Departemen Keuangan mengeluarkan keputusan yang menyatakan perkiraan penghasilan bersih untuk penjualan saham yang diterima oleh wajib pajak bukan penduduk di perusahaan non-publik sebesar 25% dari harga jual, yang menghasilkan tarif pemotongan pajak penghasilan efektif sebesar 5% dari harga penjualan. Pajak ini merupakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final dan kewajiban membayar terletak di pihak pembeli (apabila merupakan wajib pajak Indonesia) atau Perusahaan (apabila pembeli adalah wajib pajak bukan penduduk). Pembebasan dari pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di perusahaan non-publik dapat diberikan kepada penjual saham yang bukan warga negara Indonesia tergantung ketentuan dari perjanjian penghindaran pajak berganda yang bersangkutan. Agar mendapat manfaat dari pembebasan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang bersangkutan, penjual bukan penduduk harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili Pajak kepada pembeli atau Perusahaan dan kepada Kantor Pajak Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas pembeli atau Perusahaan (apabila pembeli adalah wajib pajak bukan penduduk).

Dalam hal pembeli atau pialang Indonesia, berdasarkan undang-undang pajak Indonesia, diharuskan memotong pajak atas pembayaran harga beli untuk Saham Biasa atau ADS, maka pembayaran tersebut dapat dibebaskan dari pemotongan pajak penghasilan Indonesia atau pajak penghasilan Indonesia lainnya berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku, Indonesia merupakan salah satu pihak (termasuk perjanjian penghindaran pajak berganda AS-Indonesia). Namun, kecuali untuk penjualan atau pengalihan saham di perusahaan non publik, peraturan pajak saat ini di Indonesia tidak menetapkan prosedur khusus untuk meniadakan kewajiban pembeli atau pialang Indonesia untuk memotong pajak dari hasil penjualan tersebut. Agar dapat memperoleh manfaat dari perjanjian penghindaran pajak berganda, pemegang saham bukan warga negara Indonesia mungkin dapat meminta pengembalian dari Kantor Pajak Indonesia dengan mengajukan permohonan tertentu yang disertai dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pihak perpajakan yang berwenang atau pihak yang ditunjuknya, dari yurisdiksi tempat Pemegang saham bukan warga negara Indonesia berkedudukan.

Meterai
Setiap dokumen yang dibuat dalam transaksi Saham Biasa di Indonesia, dokumen tersebut akan digunakan sebagai bukti di Indonesia, harus diberi meterai Rp6.000. Pada umumnya, meterai terhutang pada saat dokumen ditandatangani.

PERTIMBANGAN TERTENTU MENGENAI PAJAK PENGHASILAN FEDERAL AMERIKA SERIKAT
Menurut persyaratan-persyaratan terkait praktik menurut Internal Revenue Service, saran pajak apapun dalam komunikasi ini (termasuk lampiran-lampiran apapun) tidak dimaksud untuk digunakan, dan tidak dapat dipakai untuk tujuan (i) menghindari denda yang dikenakan oleh U.S. Internal Revenue Code, atau (ii) mempromosikan, memasarkan atau merekomendasikan hal-hal terkait perpajakan kepada orang lain.

Di bawah ini adalah ikhtisar beberapa konsekuensi pajak penghasilan AS yang berhubungan dengan akuisisi, kepemilikan dan pengalihan ADS atau Saham Biasa oleh pemegang saham warga Amerika (seperti keterangan di bawah) yang memegang ADS atau Saham Biasa mereka sebagai *capital asset* (umumnya, harta yang dimiliki sebagai investasi) di bawah Internal Revenue Code ("Tax Code"). Ikhtisar ini berdasarkan hukum federal AS tentang pajak penghasilan yang berlaku, yang dapat diartikan secara berbeda atau dapat berubah, kemungkinan dengan dampak retroaktif.

Ringkasan berikut tidak mendiskusikan semua aspek pajak penghasilan federal AS yang mungkin penting bagi investor tertentu dalam kaitan dengan situasi investasi individual, termasuk investor yang terkena aturan pajak khusus (misalnya institusi keuangan, perusahaan asuransi, *broker-dealers,* kemitraan dan mitra mereka, serta organisasi yang mendapat pembebasan pajak (termasuk yayasan pribadi), pemegang saham yang non AS, investor yang akan memegang ADS atau Saham Biasa sebagai bagian dari straddle, lindung nilai, konversi, penjualan konstruktif atau transaksi terpadu lain untuk tujuan pajak penghasilan AS, atau para investor yang memiliki mata uang selain Dolar Amerika, mereka mungkin tunduk pada aturan pajak yang sangat berbeda dengan apa yang diringkas di bawah ini. Di samping itu, ringkasan berikut tidak membahas konsekuensi perpajakan non AS tingkat negara bagian, lokal atau negara. Tiap pemegang saham diminta untuk berkonsultasi dengan penasehat pajak mereka berkenaan dengan konsekuensi pajak penghasilan dan pajak lainnya baik perpajakan lokal, negara bagian, federal di Amerika Serikat maupun non Amerika Serikat berkaitan dengan investasi mereka pada ADS atau saham biasa.

Untuk keperluan rangkuman berikut, seorang pemegang saham AS adalah pemilik ADS atau saham biasa yang untuk keperluan pajak federal AS, (i) seorang warga negara atau penduduk AS, (ii) sebuah perusahaan atau entitas lain yang diperlakukan sebagai perusahaan untuk keperluan pajak penghasilan federal AS, didirikan atau dijalankan di bawah hukum AS atau salah satu negara bagian atau sub divisi politik, (iii) suatu estate yang penghasilannya tercakup dalam pendapatan kotor untuk keperluan pajak penghasilan AS tanpa memperdulikan darimana sumbernya atau (iv) suatu perserikatan (A) yang administrasinya tunduk pada pengawasan utama pengadilan AS dan yang mempunyai satu atau lebih orang AS yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan semua keputusan penting perserikatan tersebut atau (B) yang sebaliknya dipilih untuk diperlakukan sebagai orang AS dibawah peraturan pajak.

Jika suatu kemitraan adalah pemilik ADS atau Saham Biasa,perlakuan pajak dari kemitraan secara umum akan tergantung pada status kemitraan dan kegiatannya. Untuk keperluan pajak penghasilan di federal AS, orang AS pemegang ADS akan diperlakukan sebagai pemilik bersangkutan saham biasa yang diwakili oleh ADS.

Tentang Klasifikasi Ambang PFIC
Suatu perusahaan non AS seperti TELKOM akan diperlakukan sebagai perusahaan investasi asing pasif (suatu PFIC), untuk keperluan pajak penghasilan federal AS, jika 75% atau lebih dari pendapatan kotornya terdiri dari tipe tertentu penghasilan pasif atau 50% atau lebih asetnya adalah pasif. Berdasarkan pendapatan dan aset perusahaan kini, TELKOM meyakini bahwa TELKOM tidak harus diklasifikasikan sebagai PFIC. Oleh karena status PFIC ditentukan oleh fakta intensif yang dibuat secara tahunan, tidak ada jaminan bahwa Perusahaan tidak atau tidak akan diklasifikasikan sebagai PFIC. Diskusi di bawah ini tentang "Dividen" dan "Penjualan atau pengalihan lainnya atas ADS atau Saham Biasa" ditulis dengan dasar bahwa TELKOM tidak akan diklasifikasikan PFIC untuk keperluan pajak penghasilan federal AS.

Dividen
Setiap pembagian tunai yang dibayar oleh TELKOM dari keuntungan dan laba sebagaimana ditentukan oleh prinsip-prinsip pajak penghasilan federal AS, akan dikenakan pajak sebagai penghasilan dividen dan akan dimasukkan dalam penghasilan kotor pemegang saham AS pada saat diterima. Penerima penghasilan dividen yang bukan perusahaan pada umumnya akan dikenakan pajak penghasilan dividen dari suatu "perusahaan asing yang memenuhi persyaratan" (*qualified*) dengan tingkat pajak federal pada maksimum 15% pajak federal AS dibandingkan tingkat pajak marjinal yang diterapkan pada penghasilan biasa mengingat terpenuhinya persyaratan periode kepemilikan tertentu. Suatu perusahaan non AS (yang bukan PFIC) pada umumnya dianggap sebagai perusahaan asing yang *qualified* (i) jika ia memenuhi syarat untuk menerima manfaat suatu perjanjian pajak lengkap dengan AS yang ditentukan memuaskan oleh Secretary of Treasury AS untuk tujuan perjanjian ini dan yang mencakup program pertukaran informasi atau (ii) berkenaan dengan dividen apapun yang dibayar oleh perusahaan atas saham (atau ADS yang didukung oleh saham tersebut) yang siap diperdagangkan di suatu bursa efek yang mapan di AS. Saat ini terdapat suatu perjanjian pajak yang berlaku antara AS dan Indonesia yang telah ditentukan sesuai untuk tujuan ini oleh Secretary of Treasury dan Perseroan yakin dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat-manfaat perjanjian tersebut. Di samping itu, oleh karena ADS tercatat di NYSE, suatu bursa efek yang terkemuka di AS, maka ADS tersebut dianggap mudah diperdagangkan di NYSE.

Jumlah pembagian tunai dalam Rupiah harus sama dengan nilai Dolar AS sebagaimana Rupiah pada tanggal kuitansi distribusi, tanpa memperhatikan apakah Rupiah sudah ditukar ke dalam Dolar AS pada saat itu. Keuntungan atau kerugian, jika ada, diakui pada kesempatan berikutnya baik penjualan, konversi atau pengalihan lain rupiah pada umumnya merupakan sumber pendapatan atau kerugian biasa. Dividen yang diterima dari ADS atau Saham Biasa secara umum tidak akan memenuhi pengurangan dividen yang diterima yang diperbolehkan untuk Perseroan.

Dividen secara umum diperlakukan sebagai pendapatan dari sumber-sumber asing untuk keperluan kredit pajak asing AS. Pemegang saham AS mungkin memenuhi syarat, dengan sejumlah pembatasan yang rumit, untuk mengajukan klaim kredit pajak asing berkenaan dengan pemotongan pajak asing yang dikenakan atas dividen yang diterima karena ADS atau Saham Biasa. Pemegang saham AS yang memilih tidak mengajukan klaim kredit pajak asing untuk pajak asing yang dipotong, mungkin saja mengajukan klaim pengurangan, untuk keperluan pajak penghasilan federal AS, berkenaan dengan pemotongan tersebut, tetapi hanya dalam satu tahun yang pemegang saham memilih melakukannya untuk semua pajak penghasilan asing yang dikreditkan.

Penjualan atau Pengalihan Lainnya atas ADS atau Saham Biasa

Pemegang saham AS secara umum mengetahui keuntungan atau kerugian modal (*capital gain or loss*) dari penjualan atau pengalihan lainnya atas ADS atau Saham Biasa dalam jumlah yang sama dengan selisih antara jumlah yang terealisasi pada saat pengalihan terjadi dengan basis pajak yang telah disesuaikan bagi pemegang saham untuk ADS atau Saham Biasa tersebut. Suatu keuntungan ataupun kerugian modal bersifat jangka panjang apabila ADS atau Saham Biasa telah dimiliki selama lebih dari satu tahun dan umumnya akan menjadi sumber keuntungan atau kerugian AS untuk keperluan kredit pajak asing AS. Pengurangan dari kerugian modal harus memenuhi kriteria tertentu.

Konsekuensi Perusahaan Investasi Asing Pasif (PFIC)

Jika Perseroan diklasifikasikan sebagai PFIC pada suatu tahun pajak, pemegang saham AS tunduk pada aturan-aturan khusus yang umumnya dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapuskan manfaat-manfaat penangguhan pajak penghasilan federal AS yang oleh pemegang saham AS dapat diperoleh dari investasinya di suatu perusahaan non AS yang tidak membagikan semua labanya pada basis saat ini. Pada kejadian seperti ini, pemegang saham AS mungkin tunduk pada tingkat pajak penghasilan biasa atas (i) keuntungan yang diakui pada penjualan ADS atau saham biasa dan (ii) kelebihan distribusi yang dibayarkan karena ADS atau saham biasa (umumnya merupakan pembagian yang melebihi 125% dari rata-rata pembagian tahunan yang TELKOM bayarkan selama tiga tahun pajak sebelumnya). Di samping itu, pemegang saham AS akan dikenakan bunga atas keuntungan atau pembagian berlebih tersebut. Akhirnya tingkat maksimum 15% terhadap dividen Perseroan tidak akan dikenakan jika Perseroan merupakan atau dikategorikan sebagai PFIC. Setiap pemegang saham AS didorong untuk berkonsultasi dengan penasihat pajaknya berkenaan dengan potensi konsekuensi pajak atas kepemilikan jika perseroan diklasifikasikan sebagai PFIC, demikian juga pilihan-pilihan tertentu yang mungkin tersedia untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensi tersebut.

Cadangan Pajak Penghasilan dan Persyaratan Pelaporan Informasi

Cadangan pajak penghasilan dan persyaratan pelaporan informasi AS pada umumnya berlaku untuk beberapa pembayaran kepada beberapa pemegang saham non-korporasi. Pelaporan informasi pada umumnya berlaku terhadap pembayaran dividen dan hasil dari penjualan atau pelunasan saham biasa yang didapat dalam wilayah AS atau oleh pembayar pajak AS atau pihak AS yang bertindak sebagai perantara pemegang saham biasa (selain "penerima yang dibebaskan," termasuk perusahaan, penerima pembayaran yang bukan orang AS yang dapat memperlihatkan sertifikasi yang dibutuhkan dan beberapa orang tertentu lainnya). Suatu pihak pembayar pajak akan diwajibkan untuk menahan cadangan pajak penghasilan dari setiap pembayaran dividen, atau hasil dari penjualan atau pelunasan dari ADS atau Saham Biasa dalam teritori AS atau oleh pembayar AS atau perantara AS kepada pemegang saham, selain penerima yang dikecualikan, jika pemegang saham tersebut gagal untuk memberikan nomor wajib pajak yang benar atau tidak dapat memenuhi pengecualian dari kewajiban pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan adalah 28% sampai dengan tahun 2010.

Cadangan pajak penghasilan bukanlah pajak tambahan dan mungkin saja dikembalikan kepada kewajiban pajak pendapatan Negara AS bagi pemegang saham AS atau, apabila dalam hal melebihi kewajibannya, maka akan dikembalikan oleh Kantor Pajak AS atau *Internal Revenue Service* ("IRS") apabila klaim untuk pengembalian uang telah disampaikan kepada IRS. Salinan dari informasi pajak atau klaim untuk pengembalian uang dari pembayaran pajak yang disampaikan oleh pemegang saham non-AS kepada IRS mungkin disediakan oleh IRS, berdasarkan perjanjian tertentu atau perjanjian lainnya untuk pertukaran informasi, bagi otoritas perpajakan dari Negara tempat pemegang saham non-AS bertempat tinggal.

Tata Kelola Perusa

haan

TATA KELOLA PERUSAHAAN

TELKOM wajib mematuhi peraturan Bapepam-LK dan SEC. Selain itu, kami menerapkan dan berupaya menjunjung tinggi kebijakan dan praktik tata kelola perusahaan berdasarkan *international best practices* serta Pedoman Pelaksanaan tata kelola Perusahaan Indonesia ("*Good Corporate Governance*") yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* di Indonesia. Sebagai sebuah perusahaan publik, kami menyadari bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan lebih dari sekedar mematuhi peraturan, namun merupakan kewajiban yang harus dilakukan demi melindungi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam rangka berupaya mempertahankan pertumbuhan usaha dalam industri komunikasi dan informasi yang sangat kompetitif.

Keberhasilan TELKOM dalam implementasi *Good Corporate Governance* tercermin dalam berbagai penghargaan yang telah diterima oleh Perusahaan. Penghargaan tersebut antara lain adalah:

- "*Most Trusted Companies based on Corporate Governance Perception Index Assessment*" dan "*Trusted Company based on Investor and Analyst's Assessment Survey*" dari *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang bekerja sama dengan majalah SWA (Desember 2009); dan
- "*Best Good Corporate Governance – Non Financial Sector*" dari majalah *Business Review* dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) (Mei 2009).

Dalam rangka menjaga transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengembangkan, menerapkan, serta meningkatkan struktur dan prosedur tata kelola guna memastikan bahwa *good corporate governance* diterapkan di perusahaan. TELKOM berkomitmen untuk melaksanakan *good corporate governance* secara konsisten agar senantiasa dapat memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan dan menjaga kepercayaan dari para pemegang saham dan masyarakat.

TELKOM berkomitmen melaksanakan *good corporate governance* secara konsisten agar senantiasa dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menjaga kepercayaan dari para pemegang saham dan masyarakat

Direksi telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 29 Tahun 2007 yang secara komprehensif mengatur dan memperbaiki pelaksanaan tata kelola perusahaan. Kebijakan ini berisikan berbagai ketentuan untuk memastikan agar setiap transaksi yang dilakukan, baik internal maupun eksternal, telah dilakukan dengan memperhatikan etika dan sesuai dengan praktik tata kelola perusahaan yang benar.

Prinsip-prinsip utama yang membentuk kerangka program *good corporate governance* TELKOM adalah:

- Pelaksanaan etika bisnis yang baik;
- Kebijakan dan prosedur kerja yang efektif;
- Penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko;
- Pengawasan internal, kebijakan dan prosedur pengendalian yang ketat;
- Kepemimpinan dan pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas dengan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pemisahan tugas;
- Memperkuat sumber daya guna meningkatkan kapabilitas dan kompetensi karyawan;
- Pengelolaan sistem manajemen kinerja; dan
- Insentif bagi pelaksanaan kinerja terbaik, yang diimbangi dengan penegakan hukum yang benar atas peristiwa pelanggaran yang terjadi.

Sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di NYSE, TELKOM wajib mematuhi ketentuan *Sarbanes Oxley Act* tahun 2002 ("SOA") serta peraturan pelaksanaannya. Beberapa peraturan SOA yang relevan dengan bisnis kami, adalah peraturan (i) SOA Seksi 404 yang mensyaratkan manajemen TELKOM untuk bertanggung jawab atas dilakuknanya dan dipeliharanya pengendalian internal terhadap pelaporan finansial ("ICOFR") yang memadai, agar dapat memberikan jaminan yang cukup terkait dengan keandalan pelaporan keuangan Peusahaan dan persiapan penerbitan laporan keuangan yang selaras dengan PSAK. TELKOM dan anak perusahaan telah melaksanakan asesmen dan audit terhadap efektivitas atas rancangan dan implementasi ICOFR, yang terintegrasi dalam proses audit laporan keuangan. (ii) SOA seksi 302, yang mensyaratkan manajemen TELKOM untuk bertanggung jawab terhadap pembuatan, pemeliharaan dan evaluasi efektifitas prosedur dan pengendalian pengungkapan yang didesain untuk memastikan bahwa informasi yang harus diungkap dalam laporan sesuai *Exchange Act*, dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam periode waktu yang tersedia, dan informasi tersebut diakumulasikan dan dikomunikasikan kepada manajemen TELKOM termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, sesuai keperluan, agar dapat segera mengambil keputusan terkait dengan pengungkapan yang diperlukan. Penjelasan tentang asesmen yang dilakukan manajemen terhadap prosedur dan pengendalian pengungkapan ICOFR dan pengungkapan yang terkait dapat dilihat pada "Prosedur dan Pengendalian". TELKOM juga harus tunduk pada aturan SEC dan Bapepam-LK tentang independensi anggota komite audit.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pencapaian tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance)* di TELKOM merupakan bagian yang penting dari upaya perusahaan untuk menjadikan perusahaan yang berdaya saing tinggi dan terjamin kelangsungan bisnisnya, sesuai dengan visi TELKOM, yaitu "menjadi perusahaan InfoComm terkemuka di kawasan regional."

Tekad TELKOM dalam menjalankan *good corporate governance* tertuang dalam kerangka GCG TELKOM.

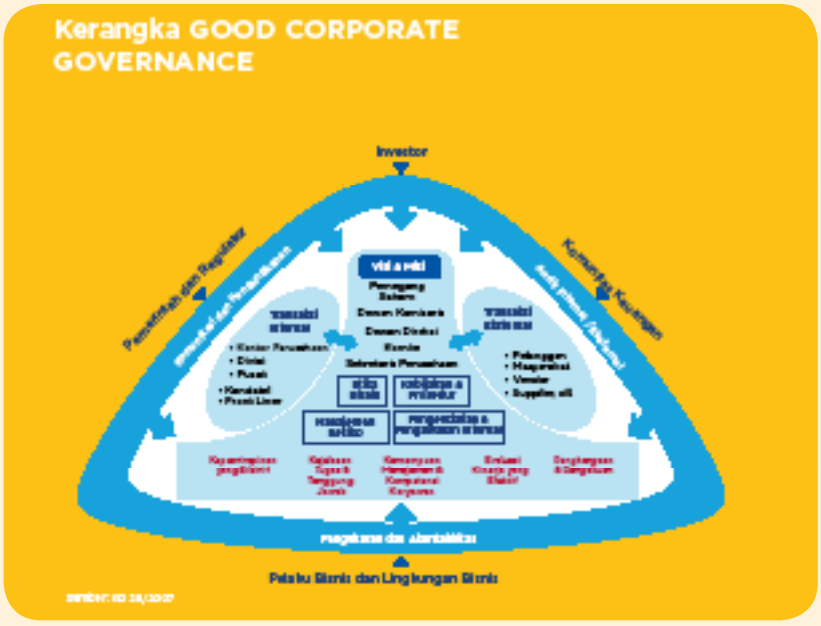

TELKOM sebagai Perusahaan publik, menyadari bahwa para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang menuntut Perusahaan agar menjalankan setiap transaksi (internal dan eksternal) sesuai dengan prosedur, kebijakan, hukum, dan *best practice* yang berlaku. Hal inilah yang dituntut dari TELKOM oleh para investor, pemerintah dan regulator, pelaku bisnis dan komunitas keuangan.

Unsur utama yang berperan dalam mewujudkan GCG, yaitu:

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Dewan Komisaris;
- Direksi;
- Komite-komite yang ada; dan
- *Corporate Secretary*.

Penerapan good corporate governance tercermin antara lain dalam:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk unit pendukung dan komite-komite;
- Pelaksanaan sistem manajemen risiko berdasarkan the *Comitee Of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission ("COSO") Enterprise Risk Management*;
- Pelaksanaan sistem pengendalian internal berdasarkan *COSO Internal Control Framework*;
- Penyampaian *management statement* oleh CEO dan CFO terhadap efektivitas ICOFR berdasarkan hasil penilaian yang dlakukan secara independen oleh auditor internal;
- Penilaian auditor eksternal terhadap efektivitas pengendalian internal dan pelaporan keuangan; dan
- Evaluasi kinerja dan akuntabilitas melalui *Performance Assessment System*.

ORGANISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), baik RUPS Tahunan ("RUPST") maupun RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") merupakan lembaga tertinggi di perusahaan. Lembaga tersebut adalah forum utama tempat pemegang saham menggunakan hak dan wewenangnya terhadap manajemen perusahaan.

Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan yang lengkap dan informasi yang akurat mengenai agenda yang akan dibahas dalam RUPS, agar dapat turut serta dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. TELKOM juga melindungi hak pemegang saham agar dapat melaksanakan haknya berdasarkan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham diperlakukan dengan setara (*equal treatment*) dan mempunyai kedudukan yang seimbang terhadap Perseroan. Pemerintah selaku pemegang saham pengendali wajib memperhatikan tanggung jawabnya pada saat menggunakan pengaruhnya terhadap manajemen Perseroan, baik pada saat penggunaan hak suara maupun dalam hal lainnya.

Pada saat RUPST atau RUPSLB, para pemegang saham menggunakan hak suaranya secara langsung maupun lewat kuasa. Hak tersebut antara lain untuk menunjuk dan memberhentikan Dewan Komisaris atau Direksi, menetapkan jumlah remunerasi dan tunjangan Komisaris serta Direksi, menilai kinerja perusahaan tahun buku yang ditelaah, menentukan penggunaan laba perusahaan termasuk dividen dan merubah Anggaran Dasar. RUPS juga memiliki kewenangan untuk mengesahkan laporan tahunan. Pemerintah sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna, memiliki hak khusus untuk menyetujui rencana merger, akuisisi, divestasi atau likuidasi Perseroan melalui RUPST atau RUPSLB. RUPST wajib dilaksanakan setahun sekali, sementara RUPSLB dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.

RUPST terakhir diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2009 di Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham pengendali Perusahaan dan pemegang Saham Biasa yang mewakili 16.870.942.248 saham atau 85,77% dari seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah. Rapat tersebut membahas dan memutuskan hal-hal berikut ini:

1. menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun fiskal 2008, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;
2. menyetujui laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun fiskal 2008 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan pembebasan tuntutan (*acquittal and discharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
3. menetapkan laba bersih Rp10.619 miliar dari tahun fiskal 2008;
4. menetapkan besaran remunerasi (terdiri dari gaji dan bonus) bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun fiskal 2009;
5. menunjuk KAP Haryanto Sahari & Rekan (sejak 8 Maret 2010 berubah nama menjadi KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, *a member firm of PricewaterhouseCoopers global network*) sebagai auditor independen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan untuk tahun fiskal 2009, termasuk audit ICOFR, dan menunjuk auditor independen untuk mengaudit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun fiskal 2009;
6. menyetujui perpanjangan masa kerja para anggota Dewan Komisaris dengan Tanri Abeng menjabat sebagai Komisaris Utama dan Arif Arryman serta P. Sartono sebagai Komisaris Independen sejak RUPST tahun fiskal 2009; dan
7. menerima Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER05/MBU/2008 tertanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum atas Pembelian Barang dan Jasa bagi Perusahaan BUMN.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris, dipimpin oleh Komisaris Utama, bertanggung jawab terhadap pengawasan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris didukung oleh beberapa komite.

Dewan Komisaris tidak memiliki wewenang untuk menjalankan pengelolaan Perusahaan, kecuali dalam situasi tertentu, apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara karena suatu sebab. Saat ini, Dewan Komisaris TELKOM terdiri dari Komisaris utama dan empat Komisaris, dua di antaranya merupakan Komisaris independen. Profil anggota Dewan Komisaris terdapat pada halaman 184.

Rapat Dewan Komisaris harus diadakan sekurang-kurangnya setiap bulan sekali atau pada setiap waktu jika dianggap perlu oleh salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari salah satu atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya sepersepuluh saham TELKOM yang beredar dengan hak suara yang sah. Kuorum untuk seluruh rapat Dewan Komisaris adalah lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili kuasa yang diberikan kepada salah satu Komisaris yang hadir pada rapat tersebut.

Keputusan dalam rapat Dewan Komisaris didasarkan atas mufakat. Apabila mufakat tidak dapat dicapai, maka didasarkan pada suara mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir atau yang mewakili pada rapat. Apabila jumlah suara berimbang, maka keputusan yang diajukan harus ditolak.

Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan sekali dalam tiap dua minggu.

Lingkup dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, termasuk perencanaan dan pengembangan, operasi dan anggaran, kepatuhan terhadap Anggaran Dasar Perusahaan dan pelaksanaan keputusan RUPS. Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan RUPS dan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam memberikan saran dan pendapat kepada RUPST mengenai pelaporan keuangan tahunan, rencana pengembangan perusahaan, penunjukan kantor akuntan publik sebagai auditor dan hal-hal penting lainnya. Selain itu, Dewan Komisaris juga diwajibkan untuk mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan, mengikuti perkembangan perusahaan, dan jika ada gejala yang menunjukkan perusahaan sedang dalam masalah, maka Dewan Komisaris akan segera meminta Direksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh.

Tanggung jawab utama lainnya dari Dewan Komisaris adalah memastikan program pelaksanaan tata kelola perusahaan sudah diterapkan dan terpelihara dengan baik.

Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris serta komite-komite berikut ini:

a. Komite Audit;
b. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
c. Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko.

Jika dipandang perlu, Dewan Komisaris dapat meminta masukan dan bantuan dari penasihat profesional.

Tabel Penugasan dan Kegiatan Dewan Komisaris

Komisaris	Penugasan dan kegiatan terkait
Tanri Abeng (Komisaris Utama)	Selain menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau juga mengetuai Komite Nominasi dan Remunerasi.
P. Sartono (Komisaris Independen)	Beliau merupakan anggota Komite Audit dan Komite Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan Risiko, serta menjabat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi.
Arif Arryman (Komisaris Independen)	Beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan anggota Komite Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan Risiko.
Mahmuddin Yasin (Komisaris)	Beliau mengetuai Komite Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan Risiko dan menjabat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
Bobby A.A. Nazief (Komisaris)	Beliau juga menjabat Wakil Pimpinan Komite Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan Risiko dan salah satu anggota Komite Audit.

Dewan Komisaris dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris, Yuki Indrayadi, yang fungsi utamanya untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yuki Indrayadi, yang mempunyai pengalaman di pasar modal dan perencanaan korporat, memegang gelar sarjana di bidang Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), gelar Master dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) bidang Teknik dari Katholieke Universiteit Leuven, Belgia. Beliau sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak 1 Oktober 2008. Alamat resmi Dewan Komisaris adalah Gedung Grha Citra Caraka, Lantai 5, Jalan Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710, Indonesia.

DIREKSI

Direksi dipilih dan diberhentikan berdasarkan keputusan pemegang saham. Untuk dapat dipilih, calon Direktur harus diajukan oleh pemegang saham Dwiwarna Seri A. Setiap Direktur diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal pengangkatan, kecuali jika masa jabatan akhir jatuh bukan pada hari kerja. Jika hal itu terjadi, maka masa akhir jabatan jatuh pada hari berikutnya, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam RUPST atau RUPSLB untuk memberhentikan Direktur pada setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Direksi terdiri dari delapan Direktur, yaitu:

- Rinaldi Firmansyah, Direktur Utama ("CEO");
- Sudiro Asno, Direktur Keuangan ("CFO");
- Faisal Syam, Direktur Human Capital & General Affairs;
- I Nyoman G Wiryanata, Direktur Konsumer;
- Ermady Dahlan, Direktur Network & Solution (Pejabat pelaksana "COO");
- Arief Yahya, Direktur Enterprise & Wholesale;
- Indra Utoyo, Direktur IT & Supply ("CIO"); dan
- Prasetio, Direktur Compliance & Risk Management.

Tanggung jawab utama Direksi adalah untuk memimpin dan mengelola operasi perusahaan dan mengendalikan serta mengelola aset-aset TELKOM dengan pengawasan dari Dewan Komisaris.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, Direksi memiliki hak dan wewenang untuk mengambil tindakan untuk dan atas nama perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan atas hal atau kejadian apapun, dengan pihak lain. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir karena alasan apapun, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, atau apabila Wakil Direktur

Utama berhalangan hadir, karena alasan apapun, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi.

Rapat Direksi dapat diadakan bilamana dianggap perlu atas permintaan satu atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya sepersepuluh atau lebih dari jumlah saham biasa yang beredar. Rapat Direksi dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari setengah dari anggota Direksi hadir atau diwakili dengan sah secara hukum dalam rapat tersebut. Setiap anggota Direksi yang hadir memiliki satu suara (dan satu suara untuk setiap Direktur lainnya yang diwakili).

Keputusan rapat Direksi berdasarkan atas mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilaksanakan berdasarkan atas pengambilan suara mayoritas dari anggota Direksi yang hadir.

Lingkup dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direktur Utama
   Lingkup dan Tanggung Jawab:

   - memimpin dan mengelola perusahaan sejalan dengan tujuan dan target perusahaan.
   - memperbaiki tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan.
   - mempertahankan dan mengelola, serta menjaga aset-aset perusahaan. dan
   - bertanggung jawab terhadap manajemen dan kepemilikan, termasuk kesepakatan dengan pihak ketiga.

2. Direktur Keuangan
   Lingkup dan Tanggung Jawab:

   - menerapkan fungsi korporat terkait dengan Direktorat Keuangan.
   - bertanggung jawab melaksanakan fungsi keuangan terpusat, termasuk mengelola fungsi operasi keuangan di seluruh unit usaha perusahaan, melalui *financial center*, serta memastikan pengendalian seluruh kegiatan investasi anak perusahaan.

3. Direktur Human Capital & General Affairs
   Lingkup dan Tanggung Jawab:

   - mengelola Direktorat Human Capital & General Affairs.
   - mengelola sumber daya manusia di seluruh unit usaha melalui Human Resources Center dan memastikan pengendalian di unit usaha Corporate Services lainnya, Support Services serta Enterprise Service, termasuk Human Resources Center ("HR Center"), Learning Center ("LEC"), Management Consultant Center ("MCC"), Community Development Center ("CDC") serta dana pensiun dan lembaga lainnya.

4. Direktur Network & Solution
   Lingkup dan Tanggung Jawab:

   - mengelola operasional dan mengelola infrastruktur dan layanan di sektor jaringan dan solusi;.
   - mengelola unit usaha lain, termasuk Divisi Infratel, dan layanan pendukung seperti Research & Development Center ("RDC"), Maintenance Service Center ("MSC"), dan Supply Center ("SUC").

5. Direktur Konsumer
   Lingkup dan Tanggung Jawab:

   - melaksanakan fungsi manajemen penyediaan *delivery channels* dan layanan konsumen bagi bisnis konsumer.
   - mengelola *delivery channel* dan layanan konsumen bagi bisnis, termasuk unit lain seperti Divisi TELKOMFlexi ("DTF").

6. Direktur Enterprise & Wholesale
   Lingkup dan Tanggung Jawab:

   - menerapkan fungsi manajemen di sektor *delivery channel* dan layanan konsumen di Direktorat Enterprise dan Wholesale.
   - melaksanakan *delivery channel* dan layanan konsumen untuk korporat dan bisnis *wholesale*, yang termasuk unit-unit seperti Divisi Enterprise Service ("DIVES") dan Divisi Carrier and Interconnection Services ("CIS").

7. Direktur Information Technology & Supply
   Lingkup dan Tanggung Jawab:

   - bertanggung jawab terhadap teknologi informasi dan *supply management* di Direktorat Information Technology & Supply.
   - mengelola Information Service Center, Supply Center dan Divisi Multimedia.

8. Direktur Compliance & Risk Management
   Lingkup dan Tanggung Jawab:

   - mengelola kepatuhan, pelaksanaan hukum dan manajemen risiko di Direktorat Compliance & Risk Management.
   - mengelola unit Legal & Compliance dan Manajemen Resiko Perusahaan.

KOMITE DAN UNIT PENDUKUNG

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite Audit

Komite Audit menjalankan tugas berdasarkan mandat *Audit Committee Charter* (yang telah diamandemen) sesuai Keputusan Dewan Komisaris No. 20 KEP/DK/2006 tertanggal 11 September 2006. *Audit Committee Charter* dievaluasi secara berkala dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen

untuk memastikan kepatuhan perusahaan dengan peraturan Bapepam-LK dan SEC serta peraturan terkait lainnya. Selama tahun 2009, perusahaan tidak melakukan perubahan atas *Audit Committee Charter* tersebut.

Audit Committee Charter secara garis besar memuat tujuan, fungsi dan tanggung jawab Komite Audit. Berdasarkan *charter* ini tanggung jawab Komite Audit adalah:

- mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan atas nama Dewan Komisaris;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang penunjukan auditor eksternal untuk dimintakan persetujuan dalam RUPS;
- mendiskusikan dengan auditor internal dan eksternal mengenai seluruh lingkup dan rencana audit mereka;
- mendiskusikan laporan keuangan konsolidasian TELKOM serta efektifitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan ("ICOFR");
- mengadakan rapat secara berkala dengan auditor internal dan eksternal, tanpa kehadiran manajemen, untuk membahas hasil evaluasi mereka atas pengendalian internal TELKOM serta kualitas pelaporan keuangan TELKOM secara keseluruhan; dan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh Dewan Komisaris, khususnya dalam bidang yang terkait dengan akuntansi dan keuangan.

Peraturan Bapepam-LK tentang Komite Audit mensyaratkan bahwa Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang anggota, satu di antaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, sementara dua anggota lainnya harus merupakan pihak yang independen, minimal salah satu diantaranya memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan. Agar memenuhi syarat independen sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, anggota eksternal Komite Audit:

- Tidak boleh memiliki keterkaitan dengan akuntan publik Indonesia yang terdaftar yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit kepada perusahaan dalam satu tahun sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit;
- Bukan sebagai karyawan perusahaan dalam satu tahun sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit;
- Tidak boleh memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, saham TELKOM; dan
- Tidak boleh memiliki hubungan bisnis apapun yang terkait dengan bisnis Perusahaan.

Pada 31 Desember 2009, Komite Audit terdiri dari tujuh anggota: (i) Arif Arryman (Ketua); (ii) Salam (Sekretaris); (iii) P. Sartono (Komisaris Independen); (iv) Bobby A.A. Nazief (Komisaris); (v) M. Ghazali Latief; (vi) Sahat Pardede; dan (vii) Jarot Kristiono. Sehubungan dengan adanya ketentuan Bapepam tentang pembatasan masa jabatan Komite Audit, M. Ghazali Latief mengakhiri masa tugas sebagai anggota Komite Audit per tanggal 1 Maret 2010.

Profil ringkas dari masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Arif Arryman – Ketua/Anggota
Arif Arryman adalah Ketua Komite Audit dan bertanggung jawab untuk memberikan arahan, koordinasi dan monitor pelaksanaan tugas tiap anggota Komite Audit.

Salam - Sekretaris/Anggota
Salam merupakan akuntan bersertifikat dan berpengalaman dalam bidang *auditing*, akuntasi, dan keuangan. Antara tahun 1974 dan 1989, beliau bekerja sebagai karyawan di Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan, AVP Divisi Pengembangan Usaha PT Rajawali Wirabhakti Utama, Kepala Corporate Control Unit PT Pabrik Rokok Cap Bentoel dan Direktur Keuangan PT Telekomindo Primakarya. Beliau meraih gelar sarjana bidang akuntansi dari Institut Ilmu Keuangan Jakarta.

Salam bertugas memfasilitasi pelaksanaan tugas anggota Komite Audit, melakukan korespondensi, menyiapkan dokumentasi, membuat laporan perubahan *Audit Charter*, serta mengkoordinasikan proses seleksi auditor independen.

P. Sartono - Anggota
P. Sartono bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap tata kelola perusahaan dan memantau peraturan pasar modal dan perundangan lainnya yang terkait operasi perusahaan.

Bobby A.A. Nazief - Anggota
Bobby A.A. Nazief bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap teknologi informasi perusahaan.

Sahat Pardede - Anggota
Sahat Pardede adalah akuntan publik bersertifikat dan Managing Partner di Kantor Akuntan Publik Ghazali, Sahat & Rekan. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dan keahlian di bidang audit dan memiliki pengetahuan luas dalam bidang akuntansi keuangan dan pengendalian internal sesuai dengan SOA Seksi 404. Pada tahun 1981 hingga 2000, beliau merupakan karyawan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beliau meraih gelar sarjana bidang akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta dan meraih gelar Master bidang Business Administration dari Universitas Saint Mary di Halifax, Kanada. Sahat Pardede bertugas untuk mengawasi dan memantau proses *integrated audit* dan konsolidasi pelaporan keuangan, termasuk penerapan standar akuntansi dan efektivitas ICOFR.

Jarot Kristiono - Anggota
Sebelum menjadi anggota Komite Audit TELKOM, Jarot Kristiono sebagai Ketua Unit Internal Audit PT Koneba Persero, perusahaan BUMN energi, menjabat AVP Internal Audit di Badan Restrukturisasi Perbankan Indonesia dan AVP Internal Audit di Panin Bank, Jakarta. Beliau meraih gelar sarjana bidang teknik sipil dari Institut Teknologi

Bandung dan meraih gelar Master bidang Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia di Jakarta. Jarot Kristiono bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, termasuk pengawasan dan pemantauan penanganan pengaduan.

Komite Audit dapat menunjuk konsultan independen atau profesional untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Komite Audit juga menerima dan menangani pengaduan dan melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Ahli Keuangan Komite Audit

Dewan Komisaris telah menetapkan Sahat Pardede, selaku anggota independen Komite Audit Perusahaan, memenuhi kualifikasi sebagai Ahli Keuangan Komite Audit sebagaimana dinyatakan dalam butir 16A Form 20-F, sebagaimana dinyatakan dalam peraturan 10A-3 dalam *Exchange Act*. Sahat Pardede telah menjadi anggota Komite Audit sejak Februari 2004. Sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit, dan sampai saat ini, beliau masih sebagai Akuntan Publik Bersertifikat di Indonesia dan menyediakan jasa audit dan jasa keuangan lainnya terhadap sejumlah perusahaan swasta dan lembaga publik. Beliau merupakan Akuntan Publik Bersertifikat dan juga merupakan anggota Institut Akuntan Publik Indonesia.

Pengecualian dari Aturan Baku bagi Perusahaan yang Sahamnya Terdaftar di AS bagi Komite Audit

Sesuai hukum Indonesia, Perusahaan memiliki struktur dua dewan (*two tiers system*) yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Fungsi manajemen eksekutif dilaksanakan oleh Direksi, sedangkan tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan operasi dan manajemen perusahaan dan memberikan saran kepada Direksi.

Sesuai peraturan Bapepam—LK, tentang Komite Audit Perusahaan wajib memiliki setidaknya tiga orang anggota Komite Audit, salah satunya adalah Komisaris Independen, yang bertindak sebagai Komite Audit, sedangkan dua anggota lainnya harus pihak independen yang salah satunya mempunyai keahlian akuntansi dan/atau keuangan.

TELKOM mengacu pada pengecualian umum dari peraturan 10A-3(c)(3) dari *Exchange Act* mengenai komposisi Komite Audit, Perusahaan meyakini bahwa acuan pada pengecualian umum tersebut tidak akan memberikan dampak sebaliknya secara material pada kemampuan Komite Audit untuk bertindak independen. Kami yakin bahwa maksud dari pembatasan bahwa tiap anggota Komite Audit adalah anggota Direksi atau Dewan Komisaris, sebagaimana yang berlaku, dan harus independen, adalah untuk memastikan bahwa Komite Audit bebas dari pengaruh manajemen dan dapat menyediakan forum yang terpisah dari manajemen sehingga auditor dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat melakukan pembahasan secara lugas. Peraturan Komite Audit yang dikeluarkan Bapepam-LK menetapkan bahwa setiap anggota Komite Audit harus independen. Peraturan Komite Audit yang dikeluarkan Bapepam-LK juga mensyaratkan bahwa paling sedikit dua anggota Komite Audit, yaitu anggota eksternal independen, tidak hanya independen terhadap manajemen tapi juga terhadap Dewan Komisaris dan Direksi serta Perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu kami yakin bahwa standar yang ditetapkan dalam Peraturan Komite Audit yang dikeluarkan Bapepam-LK cukup efektif untuk memastikan kemampuan Komite Audit untuk bertindak independen.

Laporan Komite Audit

Berikut ini adalah laporan kegiatan Komite Audit selama tahun 2009:

Independensi Auditor

Komite Audit telah mereview dan membahas dengan Auditor Independen (KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan, *a member firm of PricewaterhouseCoopers global network*- "PwC") yang bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai kesesuaian dari laporan keuangan konsolidasian dan daftar-daftar terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan Amerika Serikat, tidak hanya penilaian terhadap kualitas tetapi juga akseptabilitas dari prinsip akuntansi yang diterapkan Perusahaan dan hal-hal yang menurut standar *auditing* mengenai komunikasi dengan Komite Audit, standar dari P*ublic Company Accounting Oversight Board*, peraturan Bapepam-LK dan *Securities and Exchange Commission* serta peraturan lain yang berlaku, harus didiskusikan dengan Komite Audit. Selain itu, Komite Audit juga mendiskusikan dengan PwC tentang independensi Kantor Akuntan Publik dari manajemen Perusahaan dan dari Perusahaan sendiri termasuk hal-hal yang ada dalam surat PwC seperti yang diwajibkan menurut Peraturan PCAOB 3526, *Communication with Audit Committee Concerning Independence* (menggantikan *Independence Standard Board No.1, Independence Discussion with Audit Committee*) dan mempertimbangkan pengaruh dari jasa-jasa non-audit dari Kantor Akuntan Publik. Komite Audit telah menerima surat dari PwC yang memberikan penjelasan, seperti yang diwajibkan menurut Peraturan PCAOB 3526, mengenai semua hubungan antara PwC dengan Perusahaan yang menurut pertimbangan profesional mereka dapat dianggap mengganggu independensi. PwC telah mendiskusikan independensinya dengan Komite Audit dan telah memberikan konfirmasi melalui suratnya bahwa, menurut pertimbangan profesional mereka, PwC adalah independen terhadap Perusahaan.

Integrated Audit

- Komite Audit telah mereview laporan manajemen mengenai hasil evaluasi manajemen terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan dan laporan PwC mengenai efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Komite Audit telah membahas dengan manajemen dan PwC mengenai *significant deficiencies* yang diidentifikasi selama proses evaluasi dan proses audit dan rencana manajemen untuk meremediasi kelemahan-kelemahan pengendalian internal tersebut.

- Komite Audit telah membahas dengan internal auditor perusahaan dan PwC mengenai seluruh lingkup dan rencana audit mereka. Komite Audit telah mengadakan rapat-rapat dengan internal auditor dan PwC, tanpa kehadiran manajemen, untuk membahas hasil pemeriksaan mereka, hasil evaluasi mereka terhadap pengendalian internal Perusahaan termasuk pengendalian internal atas pelaporan keuangan serta kualitas pelaporan keuangan Perusahaan secara keseluruhan.

Komite Audit juga telah mereview dan mendiskusikan Laporan Keuangan Konsolidasian dan daftar-daftar yang terkait dalam Laporan Tahunan (Form 20-F) dengan manajemen Perusahaan, termasuk diskusi mengenai kualitas dan akseptabilitas dari prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan, kelayakan accounting judgement yang signifikan, dan kecukupan pengungkapan dalam laporan konsolidaian. Manajemen telah mengkonfirmasikan kepada Komite Audit bahwa laporan keuangan konsolidasian tersebut: (i) merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disajikan dengan penuh integritas serta obyektif; dan (ii) telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan tersebut, Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris telah menyetujui agar laporan keuangan konsolidasian auditan dan daftar-daftar terkait serta evaluasi manajemen terhadap efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan untuk disertakan ke dalam *Annual Report on Form 20-F* yang akan dilaporkan oleh Perusahaan kepada Bapepam-LK dan *Securities and Exchange Commission*.

Whistleblower

- Komite telah menyusun prosedur untuk menerima dan menangani pengaduan yang berkaitan dengan masalah akuntansi, pengendalian internal dan auditing, termasuk prosedur untuk menjaga kerahasiaan dan pengaduan tanpa nama terhadap pelaporan akuntansi yang dipertanyakan atau masalah audit sesuai dengan peraturan 10A-3(b)(3) pada Exchange Act.

- Berkaitan dengan manajemen risiko perusahaan, Komite audit juga mengawasi dan memonitor risiko kecurangan dan risiko-risiko pelaporan keuangan yang berdampak material pada pelaporan keuangan.

Sepanjang tahun 2009, Komite Audit telah mengadakan rapat 25 kali pertemuan. Rapat ini diselenggarakan sesuai dengan persyaratan Piagam Komite Audit dan bertujuan

untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi tiap anggota dan bagi Komite Audit. Jumlah pertemuan dan tingkat kehadiran anggota Komite adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Rapat Komite Audit

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat kehadiran	Prosentase kehadiran
Arif Arryman	25	21	84%
Salam	25	25	100%
P. Sartono	25	20	80%
Bobby A.A. Nazief	25	20	80%
M. Ghazali Latief	25	24	96%
Sahat Pardede	25	24	96%
Jarot Kristiono	25	25	100%

Jakarta, 1 Maret 2010

Arif Arryman
Ketua Komite Audit

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 003/KEP/DK/2005 tertanggal 21 April 2005 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tujuan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah untuk melaksanakan, mengatur dan menegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sejalan dengan proses pencalonan posisi strategis dalam manajemen dan menetapkan besaran remunerasi bagi Direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi ini bertugas untuk:

- mengembangkan sistem nominasi dan pemilihan bagi posisi strategis dalam perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran dan independensi;
- membantu Dewan Komisaris dalam memilih kandidat bagi posisi strategis di Perusahaan, yaitu satu level di bawah direktur, sebagaimana juga direktur dan komisaris pada anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan kontribusi mencapai 30% atau lebih terhadap pendapatan konsolidasian Perusahaan, seperti Telkomsel. Khusus untuk Telkomsel, rekomendasi Komite disampaikan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan
- merumuskan sistem remunerasi bagi Direksi berdasarkan perhitungan kewajaran dan kinerjanya.

Pada 31 Desember 2009, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari tiga anggota:

- **Tanri Abeng - Ketua/Komisaris**
  Tanri Abeng merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan bertanggung jawab terhadap pemberian arahan dan koordinasi pelaksanaan tugas Komite.

- **P. Sartono – Komisaris Independen & Sekretaris**
  P. Sartono merupakan Sekretaris sekaligus anggota Komite, bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengelola dokumentasi komite, serta mengkoordinasikan isu-isu terkait dengan nominasi dan remunerasi dengan pihak manajemen dan pihak eksternal yang independen.

- **Mahmuddin Yasin – Komisaris**
  Mahmuddin Yasin merupakan salah satu anggota Komite dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan masukan yang berasal dari pemegang saham pengendali terkait dengan isu-isu nominasi dan remunerasi.

Tampak luar gerai layanan pelanggan Telkom (Plasa Telkom) yang telah menggunakan *corporate identity* yang baru

Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berikut ini adalah laporan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2009:

Nominasi

Komite ini bertugas sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 004/KEP/DK/2005 tertanggal 12 Juli 2005 terkait dengan penunjukan posisi strategis di Perusahaan, yaitu:

- mengisi posisi yang berada setingkat di bawah Direksi perusahaan atau direksi pada anak perusahaan, Direksi harus berkonsultasi dengan Dewan Komisaris;
- sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, mengisi posisi Direktur dan Komisaris dalam anak perusahaan yang terkonsolidasi yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian sebesar 30% atau lebih, Direktur perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Sebelum persetujuan tertulis diberikan, Dewan Komisaris mewakili pemegang saham Dwiwarna seri A diharuskan berkonsultasi dengan pemegang saham Dwiwarna seri A, sebulan sebelumnya.

Sepanjang tahun 2009, Komite telah menyampaikan masukan terkait dengan usulan pencalonan beberapa posisi strategis, termasuk dua Direktur dari Telkomsel, Executive General Manager Divisi Infrastruktur Telekomunikasi, Divisi Enterprise Service, Divisi Akses dan Divisi TELKOMFlexi serta posisi Senior General Manager pada Maintenance Service Center.

Remunerasi

Pada tahun 2009, Komite telah mengambil inisiatif untuk menghentikan pemberlakuan skema penetapan insentif triwulanan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan bahwa insentif tersebut seharusnya menjadi bagian dari perhitungan bonus tahunan. Selain itu, Komite ini juga menyusun revisi atas skema ketentuan bagi penetapan santunan purna jabatan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang dilaporkan dalam RUPST tanggal 20 Juni 2008. Revisi tersebut mengurangi jumlah santunan purna jabatan bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Baik inisiatif maupun revisi tersebut yang saat ini telah diterapkan Perusahaan, mencerminkan kesadaran tinggi dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai kondisi ekonomi global pada tahun 2009 yang dapat berdampak pada kinerja usaha Perusahaan dan karenanya dilakukan peningkatan efisiensi biaya dimulai dari Direksi maupun Dewan Komisaris.

Selama tahun 2009, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 15 kali.

Tabel Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Prosentase Kehadiran
Tanri Abeng	15	15	100%
P. Sartono	15	15	100%
Mahmuddin Yasin	15	12	80%

Jakarta, 10 Februari 2010

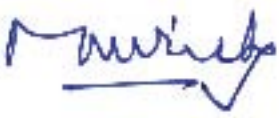

Tanri Abeng
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko

Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko atau "KEMPR" (sebelumnya Komite Pengkajian Perencanaan dan Risiko) dibentuk dengan mengacu pada Keputusan Dewan Komisaris No. 02/KEP/DK/2009/RHS tanggal 26 Februari 2009 yang merupakan perubahan terhadap Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KEP/DK/2006 tanggal 19 Mei 2006.

Tujuan pembentukan KEMPR di antaranya untuk melakukan evaluasi atas usulan rencana jangka panjang perusahaan serta usulan rencana kerja anggaran tahunan Perusahaan dan menyampaikan rekomendasi terkait kepada Dewan Komisaris. Komite ini juga bertanggung jawab terhadap pemantauan pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan. Komite ini juga bertugas memberikan hasil evaluasi yang komprehensif dan masukan yang penting guna memenuhi tanggung jawabnya dalam membantu Dewan Komisaris berkaitan dengan pemantauan proses pelaksanaan bisnis Perusahaan, penganggaran belanja modal, serta penerapan manajemen risiko Perusahaan.

Lingkup tugas dari KEMPR adalah untuk:

- menyampaikan laporan evaluasi atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan atau *Corporate Strategic Skenario* ("CSS") dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP") yang diajukan oleh Direksi sesuai jadwal yang ditentukan dari Dewan Komisaris;
- menyampaikan laporan evaluasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan CSS dan RKAP serta penerapan manajemen risiko perusahaan;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan CSS dan RKAP;
- memberikan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko; dan
- menjaga kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.

Pada tanggal penyusunan laporan ini, KEMPR terdiri dari delapan anggota.

- **Mahmuddin Yasin - Ketua/Anggota**
  Beliau sebagai Ketua KEMPR dan bertanggung jawab memberikan arahan, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan tugas dari seluruh anggota komite.

- **Bobby A.A. Nazief – Wakil Ketua/Anggota**
  Beliau sebagai Wakil Ketua KEMPR yang bersama dengan Ketua KEMPR, bertanggung jawab memberikan arahan, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan tugas anggota Komite. Beliau juga bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pencapaian Rencana Anggaran Belanja Tahunan ("RKAP") dan realisasi belanja modal (CAPEX), di samping juga melakukan pengawasan dan pemantauan proses transformasi perusahaan menuju bisnis *new wave*.

- **Ario Guntoro – Sekretaris/Anggota**
  Lingkup tugas mencakup pelaksanaan koordinasi seluruh tugas Komite dan penjadwalan pelaksanaan kerja Komite, serta melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap pencapaian CSS dan CAPEX. Ario Guntoro merupakan seorang profesional dengan pengalaman luas di bidang keuangan, investasi, dan perbankan. Setelah berkecimpung di sektor perbankan swasta nasional mulai dari 1994 hingga 1999, sebagai *corporate officer* dan *Branch Manager*, beliau bekerja untuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mulai dari 1999 hingga 2004, dengan jabatan terakhir *Assistant Vice President* Divisi HIPA, dan sebelum bergabung ke dalam KEMPR pada tahun 2004 beliau staf khusus PT (Persero) PPA. Ario Guntoro meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993.

- **P. Sartono - Anggota**
  Bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap tata kelola perusahaan dan pemantauan terhadap kepatuhan pada peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan, khususnya dalam pelaksanaan program kerja perusahaan dan penyusunan rencana jangka panjang perusahaan.

- **Arif Arryman – Anggota**
  Bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penerapan kebijakan perusahaan terkait dengan pengembangan usaha anak-anak perusahaan dan pertumbuhan usaha un-organik melalui merger dan akuisisi.

- **Adam Wirahadi – Anggota**
  Tugas utamanya adalah untuk memantau penerapan tata kelola perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, mengkaji dampak atas penerapan peraturan terhadap kegiatan usaha Perusahaan, memantau penerapan manajemen risiko perusahaan, dan mengkaji aspek kepatuhan hasil kerja Komite dan keputusan Dewan Komisaris.

  Sebelum bergabung dengan KEMPR pada tahun 2003, yang bersangkutan bekerja di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (1999-2000), menjadi periset di NGO mengenai tata kelola (2001-2003) dan analis regulasi bagi sebuah perusahaan konsultan lingkungan usaha (2001-2003). Selain itu juga merupakan staf ahli di DPR RI mulai dari 2001 hingga 2002 dan juga terlibat dalam penyusunan RUU pada Kementerian Perdagangan (2001) dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (2002). Adam Wirahadi meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi (1998) dan Hukum (2007) dari Universitas Indonesia.

- **Widuri Meintari Kusumawati - Anggota**
  Tugas utamanya adalah melakukan penilaian terhadap usulan RKAP yang diajukan manajemen dan memantau pelaksanaannya di samping memantau pertumbuhan usaha anak perusahaan. Sebelum bergabung dengan KEMPR pada tahun 2004, Widuri M Kusumawati bekerja di Kementerian Keuangan (2000-2003) dan di sebuah bank swasta dalam negeri (2003-2004). Widuri M Kusumawati merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000 dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi.

- **Rama Kumala Sari - Anggota**
  Tugas utamanya adalah memantau dan melakukan evaluasi aspek legal atas usulan tindakan tertentu Direksi yang memerlukan persetujuan dewan Komisaris dan memantau perkembangan kasus hukum yang melibatkan perusahaan, serta melaksanakan tugas tambahan terkait dengan pelaporan Komite. Sebelum bergabung dengan KEMPR pada tahun 2006, Rama Kumala Sari merupakan staf Dewan Komisaris sejak tahun 2004. Rama Kumala Sari meraih gelar sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran (2004) dan gelar Magister Kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2009).

Seluruh anggota Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko (kecuali Mahmuddin Yasin, Bobby A.A. Nazief, Arif Arryman dan P. Sartono) merupakan anggota eksternal dan bersifat independen.

Laporan Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko

Sepanjang tahun 2009, KEMPR melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi RKAP 2009, anggaran belanja modal (CAPEX) dalam RKAP 2009, kinerja manajemen, analisa investasi pada anak perusahaan dan implementasi CSS periode berjalan dan usulan CSS tahun 2010-2014. KEMPR melakukan penelaahan komprehensif atas RKAP tahun 2009 dan usulan RKAP untuk tahun 2010, serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.

Kegiatan Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko dalam tahun 2009:

a) *Corporate Strategic Scenario* ("CSS")

CSS untuk periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pengembangan *Corporate Annual Message* ("CAM") pada tahun 2010 dan RKAP 2010. CSS periode 2010-2014 memperkenalkan TIME (*Telecommunication, Information, Media, Edutainment*), yang merupakan portofolio usaha baru perusahaan. Selama penyusunan CSS periode 2010-2014, KEMPR dan Manajemen melakukan serangkaian rapat yang membahas sejumlah topik, termasuk: tujuan strategis CSS, perbaikan inisiatif strategis, menetapkan arah usaha dan proyeksi keuangan. Pada CSS periode 2010-2014, strategi tingkat korporasi didasarkan pada 10 inisiatif strategis, dalam pengembangannya didasarkan pada strategi tingkat usaha. Komite memperbaharui asumsi makro ekonomi, melakukan kajian terhadap penerapan program CSS periode 2009-2013, dan memperbaiki struktur CSS dengan menerapkan analisa kesenjangan antara strategi perusahaan dan arah usaha.

Penyusunan CSS untuk periode 2010-2014 juga mempertimbangkan kondisi eksternal seperti persaingan di antara para operator yang semakin ketat, pertumbuhan global yang lebih rendah, dan peraturan yang cenderung berpihak pada kompetitor baru. Aspek internal diperhatikan, termasuk isu-isu seperti penganggaran belanja modal (Capex), optimalisasi jaringan *legacy* dan struktur organisasi.

Pada level implementasi, KEMPR melakukan penelaahan dan pemantauan terhadap program transformasi perusahaan, berdasarkan laporan dan rapat dengan *Project Management Office* ("PMO").

b) Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP")

Dalam menjalankan RKAP 2010, Dewan Komisaris menginstruksikan kepada Direksi untuk menerapkan langkah-langkah penting, termasuk:

- mempertahankan daya saing produk dan layanan, khususnya untuk produk-produk utama Perusahaan;
- meningkatkan bisnis *new wave* untuk mengkompensasi penurunan bisnis *legacy*;
- mengembangkan bisnis baru terkait dengan portofolio bisnis informasi, media dan *edutainment*;
- mengendalikan biaya melalui program penghematan biaya; dan
- mengoptimalkan keuangan perusahaan melalui pengelolaan kas dengan meminimalkan risiko.

c) Memantau Penerapan *Enterprise Risk Management* ("ERM")

KEMPR bertugas melakukan pemantauan terhadap penerapan ERM pada tahun 2009 termasuk melakukan pembahasan tentang manajemen risiko dan rencana mitigasi risiko terkait dengan penerapan RKAP 2009 dan pembahasan tentang aspek risiko dari RKAP 2010.

d) Tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris ("CA")

Selama tahun 2009, KEMPR melakukan kajian terhadap hal-hal berikut:

- rencana Direksi untuk pembubaran dan penutupan PT Napsindo;
- persetujuan atas rencana akuisisi dalam proyek Nirwana;
- usulan penambahan modal PT Telkom Indonesia International ("TII");
- usulan penambahan modal bagi PT Metra untuk mengembangkan perusahaan baru di bisnis portal; dan
- usulan penambahan modal bagi PT Metra terkait rencana akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki oleh PT Elnusa pada PT Infomedia.

Selama tahun 2009, Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko mengadakan rapat sebanyak 91 kali.

Tabel Jumlah Rapat Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Risiko

Nama	Jumlah rapat 91* kali				Tingkat kehadiran	Prosentase Kehadiran
	CSS	RKAP	ERM	CA		
Mahmuddin Yasin	12	61	6	12	80	88
Bobby A.A. Nazief	12	61	6	12	85	93
Arif Arryman	12	61	6	12	65	71
P. Sartono	12	61	6	12	85	93
Ario Guntoro	12	61	6	12	91	100
Adam Wirahadi	12	61	6	12	91	100
Widuri Meintari	12	61	6	12	91	100
Rama Kumala Sari	12	61	6	12	91	100

*) Angka ini menunjukkan jumlah *item* agenda yang dibahas dalam rapat KEMPR selama tahun 2009, terkait dengan perbedaan cara penghitngan jumlah rapat yang dibuat Komite

Jakarta, 10 Februari 2010

Mahmuddin Yasin
Ketua KEMPR

KOMITE DIREKSI

Direksi secara kolektif bertanggung jawab pada seluruh kegiatan operasi, termasuk membuat struktur pengendalian internal, memastikan implementasi fungsi audit internal pada seluruh aktivitas manajemen dan mengambil tindakan yang didasarkan pada temuan audit internal dan kesesuaiannya dengan kebijakan dan petunjuk Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh beberapa komite eksekutif.

Komite Eksekutif dibentuk oleh Direksi dan diperlukan untuk menentukan atau menyetujui kebijakan yang meliputi inisiatif bisnis. Direksi telah membentuk delapan komite eksekutif. Kewenangan Anggota Komite Eksekutif melekat pada posisi (*ex officio*) dan tidak dapat didelegasikan.

Komite Eksekutif memiliki hak-hak dan tanggung jawab sebagai berikut:

- mengambil keputusan terhadap perjanjian transaksi atau inisiatif bisnis untuk mempercepat proses pengambilan keputusan sejalan dengan *good corporate governance* dan prinsip kehati-hatian; dan
- mengembangkan strategi, arahan dan kebijakan yang terkait dengan bisnis dan manajemen risiko.

Ketua, wakil ketua dan anggota Komite Eksekutif tidak independen, namun merupakan karyawan TELKOM. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Eksekutif dapat memanggil sumber-sumber yang independen untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya.

Komite-komite yang membantu Direksi

Komite-komite Eksekutif adalah Komite yang dibentuk oleh Direksi melalui Keputusan Direksi, yang diberikan kewenangan untuk menyetujui dan menetapkan kebijakan/kegiatan operasional yang memerlukan persetujuan 2 (dua) Direktur atau lebih, atau yang merupakan eskalasi dari satu atau beberapa Direktur.

Komite Eksekutif yang berhubungan dengan penerapan GCG adalah:

a. Komite Etika & SDM adalah Komite Eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menetapkan kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan dan penegakan *Good Corporate Governance*, etika perusahaan dan disiplin pegawai. Komite ini diketuai oleh Direktur Utama dan beranggotakan Direktur HCGA, Direktur Keuangan, Direktur Compliance & Risk Management dan VP HR Policy atau VP Organization Development.
b. Komite *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah Komite Eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menetapkan kebijakan/kegiatan operasional terkait CSR;
c. Komite Regulasi adalah Komite Eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menetapkan rancangan/usulan regulasi dan *corporate position* atas isu regulasi;
d. Komite Pengelolaan Anak Perusahaan adalah Komite Eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk:

    1) memberikan persetujuan atau menetapkan rencana strategis, arah dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan bisnis dan pengelolaan risiko di Anak Perusahaan;
    2) memberikan persetujuan transaksional dan/atau inisiatif-inisiatif bisnis yang terkait dengan Anak Perusahaan, dalam rangka percepatan proses pengambilan keputusan dengan menerapkan praktik pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan prinsip kehati-hatian;
    3) memberikan persetujuan atas usulan tindakan Direksi Anak Perusahaan yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan sebagai pemegang saham Anak Perusahaan;
    4) memberikan persetujuan atas rencana *corporate action* yang akan dijalankan di Anak Perusahaan, seperti penambahan dan pengurangan modal (emisi saham baru/*capital injection*/*equity call*/divestasi) di Anak Perusahaan, merger & akuisisi;
    5) memberikan persetujuan atas usulan agenda RUPS Anak Perusahaan yang diajukan secara tertulis oleh Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham yang berdasarkan ketentuan Angaran Dasar Anak Perusahaan berhak mengajukan agenda RUPS Anak Perusahaan yang akan dibahas dalam RUPS Anak Perusahaan;
    6) memberikan persetujuan atas rencana keputusan RUPS Anak Perusahaan yang akan disampaikan oleh wakil/kuasa Perusahaan sebagai pemegang saham dalam RUPS Anak Perusahaan, termasuk menetapkan penggunaan laba bersih Anak Perusahaan, menetapkan komponen dan besaran remunerasi dan/atau kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, yang berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan memerlukan persetujuan Perusahaan sebagai pemegang saham; dan
    7) melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang berasal dari luar Perusahaan.

e. Komite Risiko, Kepatuhan dan *Revenue Assurance* adalah Komite Eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menetapkan kebijakan/inisiatif pengelolaan risiko antara lain:

    1) Menetapkan *risk profile* dan *risk appetite* perusahaan;
    2) Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko dan kepatuhan;
    3) Mengeliminasi proses bisnis yang tidak efisien, penguatan pengendalian internal dan mitigasi risiko;
    4) Mengawasi efektivitas proses *Revenue Assurance*; dan
    5) Merekomendasikan pencegahan maupun perbaikan potensi kobocoran pada siklus pendapatan.

Komite eksekutif lainnya yang tidak terkait langsung dengan penerapan GCG adalah Komite *Costing, Tariff, Pricing & Marketing*, Komite *Treasury*, Keuangan dan Akuntansi (disingkat Komite *Treasury* & Keuangan) dan Komite Produk, Infrastruktur dan Investasi (disingkat Komite Investasi).

INVESTOR RELATIONS/ CORPORATE SECRETARY

Dipimpin oleh seorang Vice President (VP) di bawah Direktur Keuangan, Investor Relations/Corporate Secretary ("IRCS") bertanggung jawab terhadap hubungan perusahaan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan. IRCS juga membantu manajemen dengan menyediakan informasi yang dapat diandalkan serta akurat mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan hukum dan *good corporate governance*. VP IRCS bertugas sebagai perantara yang menghubungkan TELKOM dengan pihak-pihak eksternal, termasuk pemegang saham/investor. Selain itu juga membantu Direksi dalam segala urusannya. Di antara fungsi utama VP IRCS adalah membina hubungan pemegang saham dan program pengembangan investor, meningkatkan kualitas dari informasi Perusahaan, menyediakan laporan-laporan berkala dalam rangka memenuhi kewajiban rutin mengenai kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai tindakan korporasi. VP Investor Relation/Corporate Secretary adalah Agus Murdiyatno.

Agus Murdiyatno, 40 tahun, bergabung dengan TELKOM sebagai Direktur dan Chief Operating Officer PT Sigma Cipta Caraka pada bulan Juni 2009. Pada 1 November 2009, beliau ditunjuk sebagai VP Investor Relations/ Corporate Secretary. Beliau memulai karirnya sebagai auditor keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1990. Pada tahun 1996, beliau bergabung dengan Coopers & Lybrand's Jakarta Office sebagai Senior Information Systems Auditor. Pada tahun 1997, beliau bergabung dengan Excelcom, perusahaan seluler terkemuka di Jakarta, sebagai Revenue Assurance Manager and Information Systems Audit Manager. Pada 1998, beliau bergabung dengan KPMG, beliau bertanggung jawab untuk mengelola risiko teknologi dan jasa audit internal. Pada tahun 2003, beliau memulai karir konsultannya saat bergabung dengan Divisi Konsultan Manajemen Ernst & Young, beliau dipromosikan sebagai Direktur Eksekutif Business Risk Services pada tahun 2006. Beliau memperoleh gelar sarjana akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntasi Negara, Jakarta, dan juga memiliki sertifikasi sebagai *Certified Information Systems Auditor* dan *Certified Internal Auditor*.

TELKOM sangat memberi perhatian pada dua prinsip penting GCG, akuntabilitas dan transparansi. Melalui unit IRCS dan unit Pemasaran, TELKOM secara berkelanjutan berupaya untuk memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan diupayakan akurat, jelas, tepat dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan integritas pasar dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Di bawah ini daftar aktivitas keterbukaan dan koordinasi kami selama tahun fiskal 2009:

Tabel Aktivitas Keterbukaan dan Koordinasi

Aktivitas Transparansi Informasi	Jumlah Aktivitas	Tanggal
*Conference Call** untuk laporan kinerja	3	13 Mei; 7 Agustus; 5 November 2009
Pertemuan Analis/Investor	129	Januari-Desember 2009
Paparan Publik	2	12 Mei; 2-3 Desember 2009
RUPST	1	12 Juni 2009
Press release	20	13, 23 Januari; 11, 12, 14, 28 Mei; 3, 16, 18 Juni, 3, 31 Juli; 4, 19 Agustus; 30 Oktober; 3, 20 November; 4, 28, 31 Desember 2009
Konferensi Investor	7	16-20 Maret; 25-26 Maret; 19, 21-22 Mei; 5, 18-20 November; 3 Desember 2009
Roadshow	3	9-11 Agustus; 9-13 November 2009
Kunjungan Investor	1	11 November 2009
Pengumuman Koran:		
a. RUPST	1	16 Juni 2009
b. Laporan Keuangan	3	11 Mei; 31 Juli; 30 Oktober 2009
c. Dividen Interim	2	27 Juli; 29 Desember 2009
d. Edaran	1	2 Juli 2009

*) *Conference Call* adalah forum pertemuan antara Direksi TELKOM dengan para Investor, dalam dan luar negeri, untuk melaporkan hasil laporan keuangan triwulanan melalui media elektronik, yaitu *teleconference*, *Conference Call* biasanya dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya laporan triwulanan dalam bentuk Info Memo.

Pengungkapan informasi perusahaan dapat diakses melalui website TELKOM http://www.telkom.co.id.

INTERNAL AUDIT

Unit Internal Audit ("IA") berperan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas aktivitas bisnis perusahaan. Untuk tujuan itu, seperti diatur dalam peraturan pasar modal yang berlaku, IA bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Guna menguatkan peran dan tanggung jawab tersebut, Piagam Internal Audit telah mendeskripsikannya secara jelas dengan berpedoman pada standar profesi Internal Audit internasional yaitu *The International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors ("IIA").

Sebagai perwujudan komitmen terhadap Internal Audit *Charter* tersebut, IA selama tahun 2009 telah menuntaskan beberapa agenda yang meliputi: penguatan posisi Internal Audit, penajaman proses aktivitas Internal Audit dan pemberdayaan SDM-nya.

Penguatan posisi IA merupakan aktivitas strategis dalam rangka memformulasikan kontribusi peran Internal Audit terhadap penyelenggaraan bisnis perusahaan. Aktivitas ini dilakukan melalui perumusan ulang visi, misi dan strategi serta tujuan IA ke depan. Visi dikembangkan dalam rangka pengawalan terhadap bisnis perusahaan, sedang misi menegaskan fungsi utama IA sebagai *business assurance* dan *internal consulting services*. Adapun strategi dan tujuan IA diterjemahkan dalam program kegiatan audit/non audit tahunan sebagai perwujudan pemahaman IA terhadap arah bisnis Perusahaan. Perumusan di atas secara garis besar tertuang di dalam *Master Plan* IA periode 2009-2014.

Penajaman aktivitas IA–agenda kedua–diarahkan pada komitmen bahwa misi IA dapat terselenggara secara metodologis, artinya tahapan kegiatan audit dan *internal consulting* yang meliputi tahap pelaksanaan dan monitoring hasil tindak lanjut merupakan proses terstandarisasi dan terukur. Untuk tujuan ini, pada tahap persiapan audit, metodologi audit berbasis risiko atau *Risk-Based Audit* menjadi pedoman utama yang menekankan bahwa penentuan *auditable units* didasarkan pada tingkat risiko proses bisnis unit tersebut, makin tinggi risiko makin harus diaudit. Oleh karena itu, pada setiap perencanaan audit hal pertama yang diperhatikan adalah tingkat risiko sasaran audit tersebut, baik didasarkan kepada *risk register* maupun *professional judgement*. Guna memfasilitasi paradigma *Risk-Based Audit* tersebut, IA sejak awal tahun 2009 telah dilengkapi dengan sebuah alat manajemen yaitu *Audit Management Systems* (AMS) yang merupakan sebuah sistem aplikasi untuk mendokumentasikan pelaksanaan audit berbasis risiko secara *online*.

Tahap selanjutnya dari penajaman aktivitas IA adalah tahap pelaksanaan yang meliputi kegiatan *business assurance* melalui audit dan *internal consulting services*. Audit dilakukan untuk memastikan bahwa risiko-risiko bisnis yang mungkin terjadi dapat segera diatasi melalui pengendalian yang efektif. Jika ditemukan ketidakefektifan pada pengendalian suatu proses bisnis dan atau risiko yang di luar kendali, maka dilakukan *substantive test*, yaitu pengujian lanjut objek audit guna mendalami akar permasalahannya. Dengan alasan itu, pada tahun 2009, audit yang dilakukan mencakup area-area bisnis yang berisiko tinggi seperti proses penerbitan laporan keuangan per triwulan, proses pengungkapan (*disclosure*) lainnya yang bersifat penting. Juga, efektivitas dan kecukupan pelaksanaan pengendalian internal atas laporan keuangan (*Internal Control over Financial Reporting*/ICOFR) sebagai konsekuensi TELKOM *listing* di BEI maupun NYSE, audit manajemen atau audit operasional lainnya yang dipandang berisiko tinggi. TELKOM telah menjalani audit ICOFR setiap tahun sejak 2006. Berbagai tantangan teratasi untuk menghilangkan *material weakness* yang TELKOM dapatkan pada pelaporan keuangan tahun 2008. Kami telah menjalani audit ICOFR setiap tahun sejak 2006. Berbagai tantangan diatasi dalam rangka menghilangkan penilaian *material weakness* yang kami dapatkan pada pelaporan keuangan 2008. Di samping itu, IA memiliki peran penting dalam mekanisme *whistleblower*, yang merupakan domain Komite Audit dan Executive Investigative Committee (ECI), tempat Kepala IA sebagai sekretaris ECI. Mekanisme *whistleblower* berfungsi untuk mengakomodasi setiap pengungkapan '*whistleblowing*' oleh karyawan untuk diteruskan kepada manajemen. Pada gilirannya, jika Komite Audit dan ECI menilai bahwa umpan balik *whistleblower* perlu diselidiki lebih lanjut, IA akan mengambil tindakan untuk menindaklanjuti sebagai bagian dari tugas audit.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan audit dan menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya melakukan pengendalian internal bagi para *auditee*, secara periodik mereka melakukan *Control Self Assessment* (CSA). Secara periodik, IA melakukan evaluasi terhadap hasil CSA untuk mengukur tingkat kecukupannya.

Tahap selanjutnya adalah kegiatan *internal consulting services*. Kegiatan ini merupakan misi baru IA pada tahun 2009. Pada pelaksanaannya, jasa konsultasi internal diarahkan pada pengawalan untuk penyelenggaraan operasional perusahaan, termasuk proses *risk assessment* khususnya dalam pemetaan unit bisnis yang berisiko tinggi dan *Group Financial Reporting Risk* (GFRR). Tindakan ini lebih merupakan *pre-emptive solution* sebagai antisipasi agar penyelenggaraan bisnis tetap mengindahkan rambu-rambu peraturan yang berlaku.

Hasil-hasil kegiatan di atas dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit yang kemudian hasil-hasil itu pun akan diinformasikan kepada *auditee* guna ditindaklanjuti dan menjadi perbaikan proses bisnis.

Untuk memastikan bahwa hasil audit dan *internal consulting* memperoleh respon yang memadai dari *auditee*, maka dilakukan upaya *monitoring* tindak lanjut. Tindak lanjut di lapangan dilakukan oleh *auditee* yang kemudian dimonitor oleh IA. Untuk hal ini, tindak lanjut dibatasi pada area-area proses bisnis yang signifikan dengan target waktu penyelesaian yang disepakati bersama. Selama tahun 2009, fokus lain IA adalah *monitoring* tindak lanjut atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh External Auditor pada tahun 2008. Aktivitas *monitoring* ini didokumentasikan dalam AMS, sehingga setiap tindakan terdokumentasikan dengan baik.

Untuk memberdayakan *human capital* IA, program ketiga yang dilakukan adalah pada tataran penyiapan tenaga auditor yang memiliki kompetensi untuk dapat berperan sesuai dengan lingkup kegiatan IA. Untuk hal itu, IA telah mengupayakan kompetensi-kompetensi kunci tersebut

Dua orang petugas pelayanan sedang menunjukkan cara aktivasi layanan BlackBerry melalui menu *browser* *303# di pusat pelayanan pelanggan Mobilife

dengan usaha belajar berkesinambungan (*continuous learning*) bagi para auditor. Hal ini ditempuh melalui pelatihan, pemagangan, seminar, workshop dan sertifikasi profesi auditor.

Sejak tahun 2007, IA dipimpin oleh Tjatur Purwadi, SE, MM, karyawan perseroan yang telah meniti karir panjang pada bidang teknis operasional. Kemudian yang bersangkutan ikut aktif menyusun dan membenahi sistem akuntansi perseroan sehingga mengantarkannya pada posisi Vice President of Financial & Logistics Policy sebelum memangku jabatan Head of Internal Audit.

PROSEDUR DAN PENGENDALIAN INTERNAL

Berdasarkan ketentuan Bapepam, kami diwajibkan untuk melaporkan sistem prosedur pengendalian internal yang kami lakukan untuk mencapai tata kelola usaha yang baik.

Prosedur dan pengendalian yang kami terapkan mengacu pada COSO *Internal Control framework*, COSO *Enterprise Risk Management Framework*, dan COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technology*), khusus untuk pengendalian internal di bidang Teknologi Informasi.

Dengan berpedoman pada COSO *Internal Control framework*, pengendalian internal yang dipergunakan untuk menjamin keandalan laporan keuangan, antara lain diterapkan pada tingkat pengendalian (*level of control*) berikut:

- Tingkat Pengendalian Entitas (*Entity Level Control*);
- Tingkat Pengendalian Transaksi (*Transactional Level Control*); dan
- Pengendalian Teknologi Informasi (IT *Control*)

Dalam proses perancangannya, pengendalian ditentukan berdasarkan risiko, risiko dikelola untuk menghindari kesalahan dan kecurangan (*fraud*) yang berakibat *misstatement* terhadap laporan keuangan. Hal ini tidak hanya terbatas pada risiko laporan keuangan, kontrol juga diterapkan untuk risiko lain, termasuk risiko bisnis dan operasi.

Tindakan *Entity Level Control* yang telah dilakukan meliputi:

- Formulasi kebijakan dan implementasi ICOFR dan pengendalian pengungkapan sesuai dengan SOA Seksi 404 (Penilaian ICOFR) dan Seksi 302 (Sertifikasi Direksi), Audit Standard No. 5, meliputi TELKOM dan anak perusahaan konsolidasi melalui Keputusan Direksi No. 13 tahun 2009;
- Membangun komitmen pengelolaan perusahaan sesuai etika melalui tata kelola yang baik dengan cara penerapan etika bisnis, mencegah benturan kepentingan, *whistleblower*, penerapan *risk management* di setiap unit bisnis, penerapan program *fraud*, pakta integritas, dan lain-lain;
- Menyelenggarakan asesmen risiko rutin dan *risk profiling* sebagai *early detection system*; dan
- Melakukan berbagai audit untuk menjamin efektivitas dari penerapan *Entity Level Control*.

Tindakan *Transactional Level Control* yang telah dilakukan meliputi:

- Merancang bisnis proses denngan menggunakan *risk based control* dan menerapkan pemisahan kewenangan berdasarkan prinsip *segregation of duties;*
- Memberlakukan disiplin kerja sesuai ketentuan bisnis proses;

- Memperbaiki/*redesign* bisnis proses secara rutin untuk memastikan agar konsisten dengan perubahan kebijakan dan organisasi, tuntutan bisnis dan temuan audit; dan
- Melakukan berbagai audit untuk menjamin efektivitas dari penerapan *Transactional Level Control*.

Tindakan *IT based control* yang telah dilakukan meliputi:

- *IT Entity Level Control* – memformulasikan kebijakan IT dan *master plan* guna menegakkan *IT Governance*;
- *IT General Control* – menjamin perkembangan dan perubahan dalam operasi dan aplikasi IT dapat terus dilakukan sejalan dengan ketentuan *IT Governance*; dan
- *Application Control* – menjamin bahwa penggunaan aplikasi telah sesuai dengan pengaturan otorisasi dan hak akses, seperti manajemen *password*, *end user computing, audit trail*, dan lain lain.

Sebagai perusahaan yang tercatat di NYSE, TELKOM harus tunduk pada ketentuan *Exchange Act*, TELKOM harus patuh terhadap aturan tertentu Sarbanes-Oxley Act dan regulasi terkait dalam *Exchange Act* serta the Foreign Corrupt Practices Act tahun 1977.

Pembahasan mengenai bagaimana kami dapat memenuhi persyaratan ketentuan Sarbanes-Oxley dapat dilihat pada halaman 134 seksi "Struktur Tata Kelola Perusahaan".

BUDAYA KORPORASI DAN ETIKA BISNIS

Untuk mengantisipasi tantangan pada lingkungan bisnis kami dan menjaga keunggulan kompetitif, kami mulai melakukan proses perubahan. Kami mungkin salah satu pelaku perubahan tunggal terbesar dalam sejarah industri telekomunikasi. Perubahan kami menyentuh empat aspek operasi: transformasi bisnis, transformasi infrastruktur, transformasi organisasi, dan transformasi sumber daya manusia dan budaya.

Transformasi budaya dimulai dengan perubahan identitas *brand*, yang dicapai melalui perubahan logo. Perubahan ini sejalan dengan perkembangan portofolio bisnis kami TIME. Pernyataan *brand positioning* TELKOM dalam transformasi ini adalah "*Life Confident*", yang ditunjukkan melalui Nilai kami (*Expertise, Empowering, Assured, Progressive and Heart*) dan semboyan kami "*The World in Your Hands*".

Pada saat melakukan transformasi budaya, kami tetap menggunakan pedoman budaya The TELKOM Way 135 dan program Inisiatif Strategi.

KODE ETIK

TELKOM memiliki kode etik sejalan dengan ketentuan SOA bagian 406. Kode Etik kami berlaku pada Presiden Direktur, Direktur Keuangan (posisi yang setara dengan *Chief Executive Officer* dan *Chief Financial Officer*), Komisaris, Direktur dan pejabat kunci lainnya serta seluruh karyawan. Anda dapat melihat kode etik TELKOM pada *website* kami http://www.telkom.co.id/about-telkom/business-ethics. Setiap perubahan dan pengesampingan terhadap kode etik juga akan diinformasikan di *website* TELKOM.

KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFOMASI KEBIJAKAN SDM

Kebijakan sumber daya manusia TELKOM dikomunikasikan dan disebarkan dalam banyak cara termasuk secara elektronik antara lain melalui pertemuan Indonet, *portal website*, surat elektronik dan *memo intranet*.

PENGENDALIAN PENGELOLAAN SDM

Pada tahun 2009, TELKOM melakukan upaya untuk mengukur efektivitas program HR. Hasil nilai efektivitas kami adalah %.

SURVEY OPINI KEPUASAN KARYAWAN TELKOM ("TEOS")

Kami melakukan survei TEOS secara *online* pada Oktober 2009 melalui *Portal Intranet*. Berdasarkan hasil survei tahun 2008, Indeks Kepuasan Karyawan ("ESI") sebesar 75,87% dan nilai untuk Indeks Ketidakpuasan Karyawan (EDI) sebesar 7,37%.

Nilai kategori tertinggi ESI adalah Penghargaan sebesar 78,45%, sementara yang terendah adalah 75,47% untuk kategori Karir dan Promosi. Nilai EDI terendah sebesar 4,8% untuk kategori Penghargaan, sementara nilai yang tertinggi adalah 9,32% untuk Karir dan Promosi.

INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ("GCG")

Implementasi *good corporate governance* yang pertama di TELKOM ditandai dengan penerapan budaya perusahaan "ARTI", yang selanjutnya diperbaharui menjadi budaya "TELKOM Way 135" pada tahun 2003. Selanjutnya, perumusan kebijakan penerapan GCG yang dituangkan dalam kebijakan Direksi Nomor KD.04/HK620/CTG-20/2005 tanggal 31 Januari 2005. Pada saat yang bersamaan dengan perumusan kebijakan ini, dirumuskan juga Panduan Etika Bisnis di TELKOM dalam kebijakan Direksi Nomor KD.05/PR180/CTG-00/2005. Panduan penerapan GCG dan Etika Bisnis ini diubah kembali dalam keputusan Direksi Nomor KD.29/PS100/CA-20/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang pedoman GCG, dan KD.43/PR180/SDM-30/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang penyempurnaan pedoman Etika Bisnis.

KOMUNIKASI DAN PENGUNGKAPAN

Pedoman pengungkapan Informasi kepada Publik sesuai SOA section 302 diatur dalam Buku 2 Keputusan Direksi KD.13 tahun 2009. Pedoman ini berisikan sistem pengendalian pengungkapan yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh informasi yang diungkapkan kepada para pemegang saham/investor, pemangku kepentingan dan otoritas pasar modal, telah dikumpulkan, diperiksa, dicatat, diproses, diikhtisarkan, dan disampaikan secara tepat waktu dan akurat.

Mekanisme penyusunan dan *review disclosure* menggunakan jenjang sub-representasi karena tiap pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan bekerja sama untuk melakukan *review disclosure* secara bersama-sama bertanggung jawab kepada *certifying officer/approver* untuk memastikan bahwa semua

informasi yang material telah diungkapkan oleh Perusahaan kepada pemegang saham, investor, publik dan para *stakeholder* secara konsisten, akurat, lengkap, dan patuh terhadap regulasi eksternal maupun internal Perusahaan dan wajib menyediakan dokumentasi yang jelas dan lengkap serta tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi sebagai bukti pelaksanaan proses penyusunan dan *review disclosure*.

Manajemen TELKOM dengan partisipasi Direktur Utama dan Direktur Keuangan bertangung jawab terhadap pengadaan, pemeliharaan, dan evaluasi prosedur dan pengendalian pengungkapan. Untuk membantu manajemen, Perseroan membentuk *Disclosure Committee* sebagai bagian dari mekanisme sistem pengendalian dan pengungkapan perusahaan. Dalam *Disclosure Committee*, keanggotaannya terdiri dari koordinator, wakil koordinator, kepala, anggota inti, anggota, anggota eksternal, *Quality Assurance Reviewer, Reviewer* atas kepatuhan, dan sekretaris. Tugas, hak dan tanggung jawab Komite, termasuk prosedur kerja, ditinjau secara berkala untuk menilai dan memastikan efektivitas dan komunikasi dari proses pengungkapannya.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk kegiatan-kegiatan berikut ini: (i) membeli atau menjual efek perusahaan melalui bursa dalam jumlah melebihi yang ditentukan oleh Dewan Komisaris; (ii) melakukan investasi atau divestasi kepemilikan di badan usaha lain selain melalui bursa saham dan dalam jumlah melebihi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; (iii) menetapkan, mengalihkan hak atau melepas anak perusahaan; (iv) mengalihkan, memperdagangkan, menjual atau mengakuisisi bagian suatu usaha; (v) melakukan perjanjian lisensi, kontrak manajemen atau perjanjian sejenis dengan entitas lain atau kontrak manajemen; (vi) menjual atau melakukan divestasi aset tetap dalam jumlah melebihi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris (vii) menghapuskan piutang macet atau barang tidak produktif yang nilainya melebihi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; (viii) mengikatkan Dewan Komisaris sebagai penjamin dalam jumlah melebihi yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris; (ix) menjamin atau memperpanjang pinjaman jangka menengah/panjang atau pinjaman jangka pendek yang tidak merupakan praktik bisnis normal yang melebihi jumlah yang ditetapkan. Di samping itu, transaksi selain yang disebutkan di atas senilai 10% pendapatan TELKOM atau lebih atau senilai 20% ekuitas pemegang saham atau lebih atau sebesar yang ditentukan oleh peraturan pasar modal Indonesia yang mengharuskan adanya persetujuan pemegang saham melalui RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa.

Dalam menjalankan kewajibannya, Direksi wajib mengutamakan kepentingan perusahaan. Anggaran Dasar Perusahaan menyebutkan bahwa Direksi TELKOM dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) menempati posisi sebagai direktur di BUMN lain atau BUMD atau perusahaan swasta atau posisi lain yang mengendalikan suatu perusahaan; (ii) menempati posisi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada suatu BUMN; (iii) menempati posisi struktural atau fungsional di suatu lembaga/institusi pemerintah pusat atau pemerintah daerah; (iv) menempati posisi yang berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan, sebagai anggota pengurus suatu partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau kepala/wakil kepala daerah; dan/atau (v) menempati posisi lain yang mungkin menyebabkan benturan kepentingan dengan perusahaan dan/atau dengan hukum dan peraturan yang berlaku baik secara langsung atau tidak langsung.

Di samping itu Anggaran Dasar Perusahaan juga melarang Direksi yang memiliki benturan kepentingan untuk bertindak mewakili TELKOM dalam urusan yang terkandung benturan kepentingan tersebut. Dalam hal ini TELKOM dapat diwakili oleh salah satu anggota Direksi lain dengan persetujuan Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka TELKOM dapat diwakili oleh Dewan Komisaris atau salah satu anggota Dewan Komisaris yang diangkat melalui rapat Dewan Komisaris.

Setiap direktur diangkat untuk masa jabatan yang dimulai sejak tanggal pemilihannya melalui RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa, 5 tahun, dan apabila hari berakhirnya masa jabatan tersebut jatuh pada hari libur maka masa jabatan berakhir pada hari kerja berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS Tahunan untuk memberhentikan setiap direktur sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan. Jika karena suatu alasan terjadi kekosongan suatu posisi Direksi, maka posisi kosong tersebut harus telah diputuskan pada RUPS Tahunan terdekat yang akan datang. Apabila posisi tersebut masih terbuka dan penggantinya belum ditemukan, salah satu anggota direksi lain akan ditunjuk berdasarkan keputusan rapat direksi untuk mengisi posisi direktur tersebut dengan jurisdiksi dan kewenangan yang sama. Apabila karena suatu alasan terjadi seluruh posisi Direksi kosong maka Dewan Komisaris akan mengambil alih sementara semua kegiatan manajemen. Dalam waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari semenjak kekosongan terjadi maka diselenggarakan RUPS untuk mengisi kekosongan tersebut.

Tidak satupun baik anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris mempunyai kepentingan yang signifikan baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan yang menjalankan bisnis serupa dengan bisnis TELKOM.

Tidak satupun baik anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris mempunyai kontrak layanan dengan TELKOM atau salah satu anak perusahaan yang memberikan manfaat setelah berakhirnya masa jabatan.

Rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2009, TELKOM telah menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi.

Tabel Rapat Dewan Komisaris (14 Kali Rapat di Tahun 2009)

Dewan Komisaris	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Tanri Abeng	Komisaris Utama	14 dari 14
P. Sartono	Komisaris Independen	14 dari 14
Arif Arryman	Komisaris Independen	11 dari 14
Mahmuddin Yasin	Komisaris	10 dari 14
Bobby A.A. Nazief	Komisaris	14 dari 14

Tabel Rapat Direksi (47 Kali Rapat di Tahun 2009)

Direksi	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Rinaldi Firmansyah	Direktur Utama/CEO	45 dari 47
Arief Yahya	Direktur Enterprise & Wholesale	44 dari 47
Sudiro Asno	Direktur Keuangan	45 dari 47
Faisal Syam	Direktur Human Capital & General Affair	46 dari 47
Ermady Dahlan	Direktur Network & Solution	45 dari 47
I Nyoman G. Wiryanata	Direktur Konsumer	44 dari 47
Prasetio	Direktur Compliance & Risk Management	45 dari 47
Indra Utoyo	Direktur IT & Supply	44 dari 47

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Rapat yang Dihadiri
Tanri Abeng	Komisaris Utama	16 dari 16
P. Sartono	Komisaris Independen	16 dari 16
Arif Arryman	Komisaris Independen	15 dari 16
Mahmuddin Yasin	Komisaris	15 dari 16
Bobby A.A. Nazief	Komisaris	16 dari 16
Rinaldi Firmansyah	Direktur Utama/CEO	15 dari 16
Arief Yahya	Direktur Enterprise & Wholesale	11 dari 16
Sudiro Asno	Direktur Keuangan	16 dari 16
Faisal Syam	Direktur Human Capital & General Affair	16 dari 16
Ermady Dahlan	Direktur Network & Solution	13 dari 16
I Nyoman G. Wiryanata	Direktur Konsumer	13 dari 16
Prasetio	Direktur Compliance & Risk Management	13 dari 16
Indra Utoyo	Direktur IT & Supply	13 dari 16

Kompensasi

Setiap anggota komisaris berhak atas sejumlah kompensasi bulanan dan tunjangan-tunjangan. Mereka juga berhak mendapatkan tantiem berdasarkan kinerja dan pencapaian perusahaan, yang besarannya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Komisaris juga mendapatkan tunjangan pada saat mereka berhenti dari posisinya.

Setiap direktur berhak atas gaji bulanan dan tunjangan lain (termasuk tunjangan pensiun). Di samping itu Direktur juga mendapatkan bagian tantiem atas kinerja dan pencapaian perusahaan yang besarannya ditentukan oleh pemegang saham dalam RUPS. Bonus dan insentif dianggarkan setiap tahun berdasarkan rekomendasi Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum diusulkan kepada pemegang saham dalam forum RUPST.

Proses Penentuan Remunerasi Dewan Komisaris

- **Pembayaran remunerasi**
  Remunerasi Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan formula yang juga dipakai untuk penentuan gaji Direksi. Besarnya nilai yang dibayarkan mengacu pada persentase gaji Direktur Utama sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. S326/SMBU/2002 tertanggal 3 Mei 2002 dan disetujui oleh RUPST. Remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan RUPST yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2009.
- **Tunjangan dan Fasilitas**
  Tunjangan dan fasilitas untuk Dewan Komisaris mengacu pada hasil telaah konsultan independan yang juga dipakai untuk menentukan formula tunjangan dan fasilitas bagi direksi. Dewan Komisaris, sesuai mandat RUPST pada 30 Juli 2004, melaporkan hasil telaah konsultan independen kepada pemegang saham Dwiwarna untuk mendapatkan persetujuan, atas formula yang telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2003 tersebut.

Penentuan tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris berlaku sejak 1 Januari 2003 kemudian dilaporkan dalam RUPST pada tanggal 30 Juli

2004. Sesuai peraturan yang berlaku, remunerasi, tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dilaporkan kepada otoritas pasar modal.

Proses Penentuan Remunerasi Direksi

- **Gaji**
  Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab membuat formula gaji Direksi yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Formula yang telah ditelaah oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan disetujui oleh rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut kemudian diajukan kepada RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan.

- **Tunjangan dan Fasilitas**
  Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 9 Mei 2003, Dewan Komisaris ditugaskan untuk menentukan besarnya tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dengan mengacu pada hasil telaah konsutan independen. Setelah hasil telaah independen tersebut dibahas dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyusun formula yang berlaku sejak 1 Januari 2003. Besarnya tunjangan dan gaji Direksi yang ditentukan oleh Dewan Komisaris tersebut kemudian dilaporkan kepada pemegang saham Dwiwarna dalam RUPS tahunan pada tanggal 30 Juli 2005. Penentuan tunjangan dan fasilitas bagi Direksi berlaku sejak tahun fiskal 2003 dan akan diajukan kembali untuk tahun fiskal 2010.

Sesuai peraturan yang berlaku maka gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dilaporkan kepada otoritas pasar modal dan Pemegang Saham Dwiwarna.

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris di Tahun 2009 (Dalam Juta Rupiah)

Komisaris	Honorarium	Tunjangan	Asuransi	Tunjangan Lainnya	Jumlah
Tanri Abeng	900,0	2.048,8	-	734,8	3.683,6
Arif Arryman	810,0	1.843,9	-	713,8	3.367,7
P. Sartono	810,0	1.843,9	-	653,8	3.307,7
Mahmuddin Yasin	810,0	1.843,9	-	683,8	3.337,7
Bobby A.A. Nazief	810,0	522,5	-	653,8	1.986,3
Anggito Abimanyu	-	1.169,8	-	-	1.169,8

Tabel Remunerasi Direksi di Tahun 2009 (Dalam Juta Rupiah)

Direksi	Gaji	Tunjangan	Asuransi	Tunjangan Lainnya	Jumlah
Rinaldi Firmansyah	1.800,0	4.097,7	1,5	1.328,0	7.227,2
Faisal Syam	1.620,0	3.687,9	1,5	1.225,5	6.534,9
Sudiro Asno	1.620,0	3.687,9	1,5	1.210,9	6.520,3
Ermady Dahlan	1.620,0	3.687,9	1,5	1.212,0	6.521,4
I Nyoman G. Wiryanata	1.620,0	3.687,7	1,5	1.186,9	6.496,1
Arief Yahya	1.620,0	3.687,9	1,5	1.224,0	6.533,4
Indra Utoyo	1.620,0	3.687,9	1,5	1.211,0	6.520,4
Prasetio	1.620,0	3.687,9	1,5	1.217,7	6.527,1

Kepemilikan Saham

Setiap direktur dan komisaris secara individual memiliki kurang dari satu persen saham biasa perusahaan. Hanya dua Direktur yang memiliki saham biasa perusahaan. Pada saat tanggal 31 Desember 2009, Ermady Dahlan memiliki 17.604 saham dan Indra Utoyo memiliki 5.508 saham.

Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2009, kami melaksanakan beberapa program pelatihan tata kelola perusahaan, termasuk Pelatihan *Good Corporate Governance for Executive*, untuk para anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan	Program	Lokasi	Tanggal
Tanri Abeng	*National Seminar & Indonesian Quality Awards* 2009	Jakarta	25 November 2009
	Corporate Governance Training for Executives	Jakarta	30 Desember 2009
Arif Arryman	*IFRS Seminar in Asia*	Jepang	3-5 Maret 2009
	1st Meeting of Asian-Oceanian (Accounting) Standards Setter Group	Malaysia	3-5 Nopember 2009
	Corporate Governance Training for Executives	Jakarta	30 Desember 2009
P. Sartono	*Corporate Governance Training for Executives*	Jakarta	30 Desember 2009
Mahmuddin Yasin			
Bobby A.A. Nazief	*ITU Telecom World 2009*	Swiss	5-9 Oktober 2009
	Corporate Governance Training for Executives	Jakarta	30 Desember 2009

Peningkatan Kompetensi Direksi

Anggota Dewan	Program	Lokasi	Tanggal
Rinaldi Firmansyah	*Implementation Content 2.0*	Jakarta - Indonesia	3 Februari 2009
	Mobile World Congress 2009	Barcelona - Spanyol	16-18 Februari 2009
	IFRS In Asia	Jepang	2-6 Maret 2009
	Corporate Social Responsibility	Jakarta - Indonesia	5-6 Maret, 2009
	Future Business Technology & HC Development	Jakarta - Indonesia	23 Maret 2009
	Sharing Session "ICT & Regulation Update"	Jakarta - Indonesia	29 Maret 2009
	Building Culture of Passion	Jakarta - Indonesia	1 April 2009
	Service Delivery Platform Senior Leader	Jakarta - Indonesia	3 Juni 2009
Arief Yahya	*Implementation Content 2.0*	Jakarta - Indonesia	3 Februari 2009
	Complete Introduction Mergers & Acquisitions	Singapura	26-27 Februari 2009
	Corporate Social Responsibility	Jakarta - Indonesia	5-6 Maret 2009
	Future Business Technology & HC Development	Jakarta - Indonesia	23 Maret 2009
	Sharing Session "ICT & Regulation Update"	Jakarta - Indonesia	29 Maret 2009
	Building Culture of Passion	Jakarta - Indonesia	1 April 2009
	Service Delivery Platform Senior Leader	Jakarta - Indonesia	3 Juni 2009
	Communic Asia	Singapura	16 19 Juni 2009
	Merger Week: Creating Value Through Strategic Acquisition & Alliances	Illinois - AS	25-30 Oktober 2009
	Good Corporate Governance for Executive	Jakarta - Indonesia	30 Desember 2009
Ermady Dahlan	*Implementation Content 2.0*	Jakarta - Indonesia	3 Februari 2009
	Corporate Social Responsibility	Jakarta - Indonesia	5-6 Maret 2009
	Future Business Technology & HC Development	Jakarta - Indonesia	23 Maret 2009
	Sharing Session "ICT & Regulation Update"	Jakarta - Indonesia	29 Maret 2009
	Building Culture of Passion	Jakarta - Indonesia	1 April 2009
	Service Delivery Platform Senior Leader	Jakarta - Indonesia	3 Juni 2009
	Communic Asia	Singapura	16-19 Juni 2009
	Good Corporate Governance for Executive	Jakarta - Indonesia	30 Desember 2009

Peningkatan Kompetensi Direksi

Anggota Dewan	Program	Lokasi	Tanggal
Faisal Syam	*Implementation Content 2.0*	Jakarta - Indonesia	3 Februari 2009
	Future Busines Technology & HC Development	Jakarta - Indonesia	23 Maret 2009
	Sharing Session "ICT & Regulation Update"	Jakarta - Indonesia	29 Maret 2009
	Building Culture of Passion	Jakarta - Indonesia	1 April 2009
	UNI APRO Professional Service & Manager Self service	Tokyo - Jepang	21 April 2009
	Service Delivery Platform Senior Leader	Jakarta - Indonesia	3 Juni 2009
	Communic Asia	Singapura	16 19 Juni 2009
	Good Corporate Governance for Executive	Jakarta - Indonesia	30 Desember 2009
I Nyoman G. Wiryanata	*Implementation Content 2.0*	Jakarta - Indonesia	3 Februari 2009
	Corporate Social Responsibility	Jakarta - Indonesia	5 6 Maret 2009
	Future Business Technology & HC Development	Jakarta - Indonesia	23 Maret 2009
	Sharing Session "ICT & Regulation Update"	Jakarta - Indonesia	29 Maret 2009
	Building Culture of Passion	Jakarta - Indonesia	1 April 2009
	Service Delivery Platform Senior Leader	Jakarta - Indonesia	3 Juni 2009
	Consumer Marketing Strategy	Illinois - AS	27 September; 2 Oktober 2009
	Good Corporate Governance for Executive	Jakarta - Indonesia	30 Desember 2009
Indra Utoyo	*Implementation Content 2.0*	Jakarta - Indonesia	3 Februari 2009
	Mobile World Congress 2009	Barcelona - Spanyol	16-18 Februari 2009
	Corporate Social Responsibility	Jakarta - Indonesia	5 6 Maret 2009
	Future Business Technology & HC Development	Jakarta - Indonesia	23 Maret 2009
	Sharing Session "ICT & Regulation Update"	Jakarta - Indonesia	29 Maret 2009
	Building Culture of Passion	Jakarta - Indonesia	1 April 2009
	Service Delivery Platform Senior Leader	Jakarta - Indonesia	3 Juni 2009
	Telco 2.0 Executive Brainstorming	London - Inggris	4-5 November 2009
Prasetio	*Implementation Content 2.0*	Jakarta - Indonesia	3 Februari 2009
	Building Culture of Passion	Jakarta - Indonesia	1 April 2009
	Corporate Social Responsibility	Jakarta - Indonesia	5-6 Maret 2009
	Future Business Technology & HC Development	Jakarta - Indonesia	23 Maret 2009
	Sharing Session "ICT & Regulation Update"	Jakarta - Indonesia	29 Maret 2009
	Service Delivery Platform Senior Leader	Jakarta - Indonesia	3 Juni 2009
	Communic Asia	Singapura	16-17 Juni 2009
	Advanced Risk Management	Philladelphia - AS	6-13 Desember 2009
	Good Corporate Governance for Executive	Jakarta - Indonesia	30 Desember 2009
Sudiro Asno	*Implementation Content 2.0*	Jakarta - Indonesia	3 Februari 2009
	Building Culture of Passion	Jakarta - Indonesia	1 Maret 2009
	IFRS In Asia	Jepang	2 6 Maret 2009
	Corporate Social Responsibility	Jakarta - Indonesia	5 6 Maret 2009
	Future Business Technology & HC Development	Jakarta - Indonesia	23 Maret 2009
	Sharing Session "ICT & Regulation Update"	Jakarta - Indonesia	29 Maret 2009
	Service Delivery Platform Senior Leader	Jakarta - Indonesia	3 Juni 2009
	Communic Asia	Singapura	18 19 Juni 2009
	Good Corporate Governance for Executive	Jakarta - Indonesia	30 Desember 2009

MENUJU PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG LEBIH BAIK

TI SEBAGAI INSTRUMEN YANG MEMFASILITASI PELAKSANAAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bisnis informasi, TELKOM senantiasa berusaha untuk memanfaatkan seluas mungkin penggunaan teknologi dalam pengelolaan perusahaan Pada tahun 2009 hampir seluruh titik dalam *value-chain* perusahaan telah terintegrasi dalam jaringan teknologi informasi. Selain untuk pengoperasian jaringan seluruh infrastruktur alat produksi, semua aspek penting dalam manajemen perusahaan seperti Keuangan, Logistik, Sumber Daya Manusia termasuk juga pelayanan kepada Karyawan, Pelanggan, Pemasok dan *stakeholders* lainnya telah memanfaatkan jaringan teknologi informasi TELKOM.

Manajemen TELKOM yakin bahwa penerapan Teknologi Informasi (TI) secara luas dalam perusahaan akan secara langsung meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan menjadi lebih baik lagi, karena disamping akan mendorong terselenggaranya prinsip pokok transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran juga akan memudahkan sosialisasi, pengawasan dan pemberlakuannya (*enforcement*).

Pembentukan Pengendalian Umum TI dan Pengendalian Aplikasi melalui *assesment* risiko telah memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan TI sebagai faktor pendukung dan instrumen yang memfasilitasi usaha TELKOM, pada saat ini maupun di masa pendatang.

Selanjutnya pada tahun 2009, majalah tengah bulanan Warta Ekonomi dalam rangka *e-Company Award* 2009 telah memberikan penghargaan kepada TELKOM sebagai *best of the best* dari semua kategori yang dilombakan. Dalam program itu, telah diadakan penelitian atas 102 perusahaan dari berbagai katagori meliputi:

- *IT Governance* bobot 20%
- *IT Leadership* bobot 15%
- *IT Inovation* bobot 30%
- *Business Performance* bobot 35%

Paperless HR Management

Menyadari luasnya cakupan pelayanan internal, baik dari sisi geografis, jumlah personil maupun permasalahannya, TELKOM telah menerapkan sistem TI yang bersifat *paperless office*. Langkah ini membuahkan efektivitas dan akuntabilitas manajemen yang lebih baik. Selain itu, penetapan sistem TI ini mampu menghemat hingga 80% dalam penyimpanan, dan 80% dalam pengiriman serta mempercepat dokumen sampai di tujuan dari 2 – 4 hari menjadi rata-rata hanya dalam 30 menit.

System portal internal yang dikenal sebagai POINT *(Paperless Office Internal)* dapat diakses oleh seluruh karyawan dengan identitas elektronik dan *password* pribadi. Sistem teknologi melayani hampir seluruh kebutuhan serta hak karyawan dalam bekerja, sehingga karyawan tidak mungkin melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa membuka POINT, karena seluruh instruksi, beban pekerjaan dan nota dinas telah disalurkan melalui intranet.

Semua permintaan maupun instruksi untuk perjalanan dinas, database, informasi mengenai rekan kerja untuk tugas yang sama serta uraian kerja hanya bisa diakses melalui POINT. Pelayanan atas hak cuti, gaji, data karyawan, penghargaan dan hukuman serta penilaian individu juga disalurkan melalui POINT. Bahkan kewajiban untuk absensi dan kewajiban untuk membaca dokumen penting disalurkan melalui POINT. Pesan Direktur Utama, *teleconference* dan sebagian pelatihan serta *test* termasuk pelatihan mengenai *Good Corporate Governance* juga dilakukan melalui POINT.

Dengan pemanfaatan TI secara luas, penggunaan kertas pun menurun secara signifikan sedangkan pemanfaatan jalur telekonferensi dimaksimalkan. Melalui program ini, kami juga turut serta dalam berkontribusikan terhadap lingkungan yang lebih hijau sehingga emisi karbon dapat dikurangi akibat berkurangnya pohon yang ditebang untuk dibuat kertas dan memangkas biaya perjalanan untuk mengadakan pertemuan tatap muka.

Partisipasi karyawan dalam sosialisasi dan *test* mengenai GCG, *Fraud*, Gratifikasi dan *Whistleblower* pada tahun 2009 adalah 94,75%. Hasil test rata-rata pemahaman karyawan terhadap isu-isu ini adalah:

- GCG 76,53%
- *Fraud* 79,48%
- Gratifikasi 98,30%
- *Whistleblower* 94,95%

Jenis pertanyaan yang digunakan dalam rangka melakukan *assessment* terhadap pemahaman ini terbagi dalam 2 kategori: untuk staff (Band 4 – 7), seluruh pertanyaan disajikan dalam bentuk *multiple choice*, and untuk *executive* (Band 1 – 3) beberapa pertanyaan dibuat dalam bentuk studi kasus. Pemahaman karyawan pada *level staff* rata-rata adalah 78.33%, atau sedikit lebih tinggi dari pemahaman *level executive* dengan nilai rata-rata 78,13%.

Pengembangan Karir, Organisasi dan Suksesi

Manajemen TELKOM sangat menaruh perhatian kepada pengembangan karir karyawan dan berusaha menyelenggarakan program pengembangan karir karyawan dengan menjunjung tinggi azas *accountability, fairness* dan transparansi. TELKOM telah membentuk sebuah unit *career development*. Tugas pokok unit ini secara umum adalah, memastikan terselenggaranya pengembangan kompetensi untuk pengisian posisi-posisi eksekutif (strategis) dan pengembangan karyawan berbakat (*talent*) sejalan dengan strategi pengembangan SDM perusahaan. Kegiatan utama dari unit ini adalah menyiapkan dan menyediakan karyawan berpotensi untuk menduduki suatu posisi strategis dan menjamin dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan. Dalam pengembangan karir karyawan yang berpotensi,

Telkom menggunakan IT untuk membantu melaksanakan Tata Kelola Perusahaan secara terpadu

unit ini sekalipun secara organisatoris bertanggung jawab kepada Direktur HC&GA, namun dalam menjalankan fungsinya memiliki wewenang penuh dan bebas dari intervensi direksi.

Sumber pengisian jabatan kunci dalam perusahaan berasal dari sebuah *talent-pool* yang berisi kurang lebih 50 orang calon pimpinan TELKOM yang memiliki potensi, performansi dan kompetensi yang sangat baik. Manajemen TELKOM telah menerbitkan KR. 136/PS000/COPB0011000/2009 tertanggal 13 Maret 2009 sebagai pedoman pembentukan *pool* ini. Identifikasi karyawan yang masuk dalam *talent pool* berdasarkan seleksi administrasi, *track record* dan kompetensi karyawan, sedangkan penyaluran *talent pool* untuk mengisi jabatan yang diperlukan perusahaan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Kinerja karyawan;
- Kompetensi dengan pengukuran 360° (atasan, bawahan dan rekan sejawat) serta kesesuaian dengan jabatan yang akan diisi;
- Penyiapan atas dasar *Assessment Center;* dan
- Data-data pendukung lain.

Proses akhir penetapan pejabat tersebut adalah proses Sidang Jabatan, yang proses dan pengambilan keputusannya diatur dengan pedoman KD. 06/PS180/COPB0011000/2009 tertanggal 13 Maret 2009. Proses akhir inilah satu-satunya dari rangkaian proses yang penetapannya berdasarkan subyektivitas para anggota dewan jabatan yang ditunjuk sebagai *ex-oficio*, sedangkan proses lainnya berjalan dengan mekanisme yang obyektif, transparan dan *fair*.

Proses yang obyektif (tanpa Sidang Jabatan) maupun intervensi Direksi inipun telah dipakai dalam proses suksesi Direksi TELKOM. Ketika pemegang saham mayoritas TELKOM meminta daftar calon Direksi Direksi, maka unit inilah yang ditugaskan untuk mengusulkan daftar nama langsung ke Kantor Meneg BUMN.

e-Procurement

Pelaksanaan fungsi-fungsi logistik mengacu pada prinsip *good corporate governance*, khususnya prinsip pokok, yaitu transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan. Pengadaan dilakukan secara terpusat (*one gate policy*), sekalipun proses fisik bisa berada di daerah. Sejak tahun 2004, sebagian pengadaan TELKOM telah diselenggarakan secara elektronik dengan sistem *e-auction*, dengan menggunakan paket *software* "Jalintrade."

Jalintrade mengorganisasikan proses tender dan negosiasi dengan bantuan komputer. Panitia tender menetapkan persyaratan dan kriteria-kriteria pemilihan tahapan administrasi maupun teknis dan memasukkannya ke dalam sistem, kemudian komputer yang akan memilih para calon pemasok yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, seluruh peserta tender megikuti proses negosiasi harga. Selanjutnya sistem akan memilih pemenang tender, berdasarkan metode pembobotan atau harga yang termurah.

Manfaat utama dari penyelenggaraan *e-auction* adalah untuk mempercepat proses tender yang biasanya dilakukan dalam beberapa minggu menjadi kurang dari satu jam.

Pemasok selain mendapatkan manfaat dari kecepatan arus barang atau jasa, juga mendapatkan harga yang wajar, dan bebas dari biaya-biaya tender yang tidak diperlukan, karena prosesnya tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Dengan sistem *e-auction*, TELKOM mendapatkan harga yang wajar dengan biaya pengadaan yang minimal, dan mengendalikan kepatuhan kepada aturan dan persyaratan tender.

Pada tahun 2009, telah dilakukan 1.321 proses *e-auction* yang meliputi pengadaan barang dan jasa.

TRANSFORMASI MANAJEMEN

Sesuai mandat dari Rencana Jangka Panjang TELKOM yang tertuang pada dokumen *Corporate Strategic Scenario*, TELKOM bertekad untuk melaksanakan 10 *strategic initiatives* secara konsisten, teratur, hati-hati, terprogram, memiliki tingkat kepastian yang tinggi serta mampu dimonitor dengan baik. Pada tahun 2009, telah berhasil diidentifikasi 165 program aksi penting yang harus diambil, sebagai berikut:

- 25 aksi dalam bisnis *Legacy;*
- 18 aksi dalam *Wireless;*
- 20 aksi dalam *Pita Lebar;*
- 20 aksi dalam *Enterprises;*
- 14 aksi dalam *New Generation Networks;*
- 11 aksi dalam *Information Technologies Services;*
- 18 aksi dalam *Media dan Edutainment;*
- 14 aksi dalam *Streamlining;*
- 17 aksi dalam *Business Alignment*; dan
- 8 aksi dalam *Transformation Culture.*

Untuk mempercepat terlaksananya proses transformasi melalui keputusan Direksi No. SK 633/2008 dibentuklah sebuah *Task Force* "TELKOM *Transformation Team*", dengan keanggotaan yang luas yang mencakup semua Direktorat. Tim bertugas memetakan seluruh program aksi berdasarkan aspek *accountability* dan *capability*-nya, aspek koordinasi dan kontrol serta aspek *reward* dan *compensation*-nya. Dari hasil pemetaan, tim kemudian menetapkan dari 165 program aksi dipilih pelaksanan 56 program aksi, khususnya untuk dilaksanakan pada tahun 2009. Tim dilengkapi dengan program aplikasi komputer yang dinamakan "*transformer*" yang dirancang khusus untuk pengelolaan proses transformasi ini secara *on-line*. "*Transformer*" akan menampilkan status pelaksanaan transformasi dari setiap program aksi, setiap initiatives dan status gabungan seluruh transformasi dalam angka persen (%) secara *on-line*.

Tiap program aksi memiliki satu unit tugas dan satu Direktur yang bertindak sebagai pemimpin program tersebut. "*Transformer*" akan mengolah seluruh program aksi secara transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengacu pada kriteria-kriteria berikut:

- *High likelihood*, program aksi memiliki tingkat kepastian yang tinggi;
- Dampak yang signifikan bagi perusahaan; dan
- *High urgency.*

Transformer akan membuat peringkat dan peta terhadap seluruh program aksi yang diobservasi. Selanjutnya, lima program aksi utama akan diberikan prioritas tinggi dan langsung ditempatkan di bawah pengawasan Direksi.

MANAJEMEN RISIKO

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tata kelola perusahaan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, TELKOM sejak tahun 2006 telah memanfaatkan proses manajemen risiko.

Dalam menerapkan manajemen risiko, TELKOM telah membangun visi pengelolaan risiko yang ditanamkan sebagai bagian budaya dari proses bisnis operasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami akan memfokuskan pada misi untuk menjadikan manajemen risiko selayaknya seorang teman terpercaya dalam tiap unit usaha.

Agar dapat mencapai visi dan misi tersebut, kami menyusun tahapan (*milestones*) penerapan manajemen risiko dalam lima fase, yaitu:

Fase I – 2006	:	Pemetaan kebijakan dan proses bisnis;
Fase II – 2007	:	Ketersediaan kebijakan di seluruh proses bisnis;
Fase III – 2008	:	Menjadikan pengelolaan risiko sebagai hal yang penting dalam setiap proses;
Fase IV – 2009	:	Memastikan penerapan manajemen risiko yang ketat; dan
Fase V – 2010	:	Menjadikan manajemen risiko sebagai bagian budaya Perusahaan.

Dalam rangka menerapkan visi dan misi TELKOM dalam program aksi, program korporat dan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko yang telah dibangun atas tiga inisiatif utama:

- Penilaian dan mitigasi risiko;
- Penghapusan proses bisnis; dan
- Peningkatan kebijakan.

Pada tahun 2009, sesuai dengan *milestones,* program ditujukan untuk menjadikan penerapan manajemen risiko yang ketat.

Penilaian dan Mitigasi Risiko

Terdapat dua sasaran utama dalam melaksanakan penilaian risiko, yakni penilaian risiko pelaporan keuangan dan penilaian risiko Perusahaan.

Penilaian risiko pelaporan keuangan meliputi penilaian risiko yang bertujuan untuk membentuk *key control* dalam rangka menentukan lingkup kegiatan audit, seperti yang dipersyaratkan PCAOB *Auditing Standard* No. 5.

Penilaian atas risiko perusahaan ditujukan untuk memastikan risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan Perusahaan, telah dapat ditekan. Risiko perusahaan terdiri dari empat kategori: risiko strategis, risiko operasional, risiko keuangan dan risiko pasar.

Risiko strategis merupakan risiko yang terjadi akibat faktor-faktor eksternal (misalnya faktor regulasi, perubahan teknologi, politik) ataupun risiko dalam inisiatif strategis yang diambil perusahaan tersebut (seperti transformasi bisnis atau merger dan akuisisi).

Risiko operasional merupakan risiko yang muncul dari proses internal atau ketangguhan alat produksi terhadap faktor eksternal, seperti risiko kegagalan alat produksi, risiko pengembangan infrastruktur atau risiko terkait dengan kebocoran pada pendapatan.

Risiko keuangan merupakan risiko yang terkait dengan perubahan atau volatilitas dalam nilai tukar rupiah, suku bunga, atau likuiditas.

Risiko pasar merupakan risiko yang terkait dengan kegagalan pada produk yang diluncurkan atau risiko yang muncul akibat penurunan tarif atau dinamika pasar global.

Kami memantau kemajuan terhadap upaya mitigasi seluruh risiko dengan unit-unit kerja terkait. Risiko atas tingkat kepentingan tertentu dibahas saat rapat Direksi atau Komite Eksekutif. Direktorat Compliance & Risk Management selalu menyampaikan laporan mengenai manajemen risiko secara teratur kepada Komite Evaluasi dan Pemantauan Risiko.

Proses Penghapusan Bisnis yang tidak Efisien

Penerapan manajemen risiko membutuhkan penilaian risiko dan efisiensi proses bisnis yang signifikan.

Setiap tahun, kami melakukan telaah perbaikan usaha. Upaya perbaikan usaha ini dilakukan guna memperoleh masukan dan temuan dari lapangan, termasuk merespon temuan dari hasil audit tahun lalu.

Peningkatan kebijakan

Setelah memfokuskan pada risiko kepatuhan selama tahun 2007 dan 2008, kami mengubah kebijakan manajemen risiko perusahaan pada tahun 2009 dengan lebih berkonsentrasi pada percepatan pengambilan keputusan, inisiatif bisnis, hubungan dengan pihak ketiga (perwakilan serikat kerja) dan mengelola bisnis non-organik.

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan Unit-unit bisnis TELKOM dan penerapan inisiatif bisnis non-organik, dengan menegakkan prinsip kehati-hatian melalui penerapan prinsip "*six eyes*".

MANAJEMEN KELANGSUNGAN USAHA

TELKOM menyusun *Disaster Recovery Plan System* untuk memastikan kelanjutan operasional dari jaringan komunikasi dan TI yang diperlukan bagi manajemen, sehingga kelangsungan operasional dan manajemen tetap terpelihara bahkan di saat terjadi bencana. Pada tahun 2009, kami memfasilitasi simulasi penanganan bencana di beberapa wilayah (Padang, Jakarta) untuk bencana alam dan musibah banjir.

Revenue Assurance

Memastikan arus pendapatan yang konstan adalah bagian dari proses bisnis kami. Kami mencatat ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal, yang dapat mengancam transaksi usaha dan pendapatan. Salah satu ancaman terhadap pendapatan tersebut adalah kebocoran dalam proses transaksi yang dapat terjadi sejak transaksi dilakukan sampai pendapatan tersebut dicatat. Untuk mengelola ancaman dimaksud, kami telah menerapkan program jaminan pendapatan yang dituangkan dalam keputusan Direksi Nomor KD. 08/HK.290/COP-D0031000/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Kebijakan *Revenue Assurance*. Program ini meliputi manajemen risiko kebocoran pendapatan dengan mengelola kelompok pendapatan dari berbagai sektor, termasuk pengembangan produk, *pre-sales/sales*, peraturan yang mengikat, jaringan, perantara, peringkat/tagihan, penagihan dan akuntansi.

PENGELOLAAN *FRAUD*

Guna menghindari risiko penyimpangan keuangan, kami setiap tahun melakukan penilaian terhadap pelaksanaan ICOFR, termasuk penilaian atas risiko penyimpangan.

Direksi TELKOM telah menerbitkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Anti *Fraud* (KD. 70/2006) yang kemudian diperbaharui dengan KD No. 43/2008. Direksi TELKOM juga telah menerbitkan pedoman untuk melaksanakan *Fraud Risk Assessment* dengan KR. 03/2007. Keputusan-keputusan tersebut melengkapi Keputusan Direksi yang lain seperti Etika Bisnis (KD.05/2005 dan KD.43/2006), GCG (KD. 29/2007), Larangan Melakukan Gratifikasi (KD. 67/2006), *Charter* Direksi (KD. 22/2007) dan *Whistleblower* (KD. 48/2006). Bila kemudian terjadi kecurangan Direksi TELKOM juga telah menyiapkan Pedoman untuk penindakan yang tertuang pada Komite Investigasi (KD. 22/2008) dan Peraturan Disiplin (KD. 41/2008).

Untuk mempercepat terlaksananya proses transformasi dibentuklah sebuah *Task Force* "TELKOM *Transformation Team*", dengan keanggotaan yang luas yang mencakup semua Direktorat

Sejak tahun 2007, kami telah melaksanakan *Fraud Risk Assessment* secara tahunan. Kegiatan ini termasuk pelaporan keuangan, siklus pengadaan dan aset tetap, siklus pendapatan non-POTS dan pendapatan ITSL pada tahun 2007. *Assesment* dilakukan juga di tahun 2008 dan tahun 2009.

ETIKA BISNIS TELKOM

Program etika bisnis Perusahaan dikembangkan dari sumber-sumber internal. Identifikasi prinsip-prinsip etika ini dimulai pada tahun 1989 sebagai prinsip "321" yang selanjutnya disesuaikan menjadi prinsip "Patriot 135". Penyusunan prinsip dimaksud berdasarkan kepada keputusan Direksi Nomor KD. 05/PR180/CTG00/2005 tanggal 31 Januari 2005, yang kemudian diubah kembali menjadi KD. 43/PR.180/SDM30/2006 pada tanggal 27 Juli 2006.

Seluruh karyawan diwajibkan membaca dokumen etika bisnis melalui fasilitas *online*. Setiap tahun sejak tahun 2007, TELKOM telah mewajibkan seluruh karyawan untuk menandatangani pernyataan mengenai kehendak mereka untuk menerapkan etika bisnis sebagai sarana untuk penyegaran konsep tersebut. Sementara itu, uji pengetahuan dilakukan setiap tahun sejak 2006. Bagi karyawan yang ditugaskan di perusahaan patungan yang menemui kesulitan dalam mengakses TI TELKOM, di sediakan layanan dalam bentuk *off line* (dalam bentuk *hard copy*). Tujuan pelaksanaan uji pengetahuan tentang etika bisnis secara tahunan ini adalah:

- untuk mengingatkan karyawan mengenai etika bisnis sebagai pedoman standar dalam bertingkah laku;
- untuk memantau kesiapan karyawan secara teratur dalam memenuhi kebijakan etika bisnis yang merupakan suatu hal yang bersifat wajib bagi seluruh karyawan; dan
- memantau tingkat pemahaman kebijakan etika bisnis dan kebijakan terkait lainnya.

Penerapan kebijakan etika bisnis selama tahun 2009 melibatkan 22.357 karyawan atau 97,45% dari total karyawan kami. Hasil yang diperoleh dalam uji coba pemahaman etika bisnis ini rata-rata 76,53%.

PAKTA INTEGRITAS

TELKOM telah menyelenggarakan program Pakta Integritas sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Direksi No. 36 tahun 2009. Manajemen telah berupaya lebih besar untuk terlaksananya tata kelola yang baik sehingga tetap mempertahankan pertumbuhan. Upaya-upaya tersebut terutama berkaitan dengan upaya untuk mencegah *self-dealing* (tindakan yang memperkaya diri sendiri atau pihak lain) yang berdampak signifikan terhadap keuangan perusahaan, terutama dalam bidang pengadaan dan kemitraan.

Bagaimanapun, Kesepakatan Integritas tidak terbatas pada isu-isu yang terkait dengan pengadaan barang dan kemitraan, tapi bertujuan untuk memfasilitasi proses terkait yang sudah dibentuk, melalui penguatan atas hal-hal berikut:

- etika bisnis, termasuk moral integritas;
- langkah untuk mencegah konflik kepentingan;
- larangan melakukan gratifikasi;
- larangan *insider trading*;
- langkah yang memastikan kerahasiaan informasi; dan
- upaya untuk memastikan integritas layanan.

WHISTLEBLOWER

Mekanisme *Whistleblower* menampung dan menjamin keamanan karyawan yang menyampaikan keluhan atau laporan tindak pelanggaran. Laporan ditangani oleh Komite Audit, yang kemudian memeriksa dan apabila dipandang perlu akan melalukan tindakan investigasi lebih lanjut. Hasil investigasi akan dilaporkan dan dinilai oleh Komite Eksekutif Investigasi. Selanjutnya bila penanganan lebih lanjut atas laporan karyawan tersebut diperlukan, maka Internal Audit akan menindaklanjuti sebagai bagian dari kegiatan audit. Fungsi dan peran dari unit-unit tersebut dijelaskan dalam KD. 48/HK260/RIC-33/2006 tertanggal 6 September 2006 dan KD. 13/HK000/COP D0051000/2009 tertanggal 20 April 2009.

HUBUNGAN DENGAN *STAKEHOLDERS*

Komitmen TELKOM untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan para *stakeholders*nya terbukti dengan diperolehnya penghargaan sebagai "*Best of the Best*" perusahaan tahun 2009, pada majalah Warta Ekonomi tanggal 7 Desember 2009. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil survei atas 986 responden. Secara keseluruhan, TELKOM terpilih sebagai "*the best company*" dari segi pemberian gaji dan manfaat untuk karyawan. TELKOM juga dianggap sebagai perusahaan terbaik di industrinya serta dipersepsikan sebagai perusahaan besar, terkenal, dan memiliki manajemen yang baik.

Program etika bisnis Perusahaan dikembangkan dari sumber-sumber internal. Identifikasi prinsip-prinsip etika ini dimulai pada tahun 1989 sebagai prinsip "321" yang selanjutnya disesuaikan menjadi prinsip "Patriot 135"

Hubungan dengan Karyawan

Secara rutin perusahaan melakukan survei kepuasan karyawan, sehingga perusahaan dapat menerima masukan langsung dari karyawan untuk dapat meningkatkan pelayanannya. Hasil dari survei tingkat kepuasan karyawan pada tahun 2009 mencapai 75,87%.

Hubungan dengan *Supplier*

Selain Pelanggan dan Karyawan, TELKOM menganggap bahwa *supplier* termasuk salah satu *stakeholders* yang sangat penting, sehingga hubungan yang sehat antara TELKOM dengan *vendor*-nya harus tetap dipelihara dan ditingkatkan. Komitmen TELKOM untuk maju bersama dengan *supplier*-nya dalam kerja sama yang sederajat dan saling menguntungkan. Dengan tidak kurang dari Rp41.993 miliar beban usaha diluar belanja pegawai dan Rp19.161 miliar *capital expenditure*, TELKOM membutuhkan *supplier* yang bermutu dan dapat diandalkan.

Pada bulan April tahun 2009, telah diadakan survei terhadap para pemasok TELKOM. Tujuan dari survei ini adalah untuk:

- mengetahui *level partnership* & tingkat performansi *partnering* TELKOM;
- mengetahui harapan *supplier*;
- mengetahui hubungan komitmen mitra dengan performansi *partnering* TELKOM; dan
- merumuskan bahan-bahan untuk menentukan langkah-langkah *partnering* dengan mitra.

Survei kepuasaan mitra ini menjangkau sebanyak 125 responden dan 49 pemasok TELKOM. Sasaran survei adalah mencari *gap* antara *expected performance* dengan *actual performance* sedang cakupan bidang objek survei adalah:

- *quality*, dengan indikator spesifikasi produk, sumber daya manusia dan *quality control*;
- *cost*, dengan indikator *price* dan pembayaran;
- *delivery*, dengan indikator proses dan update informasi;
- *flexibility*, dengan indikator keterbukaan informasi dan fleksibilitas terhadap proses; dan
- *responsiveness* dengan indikator kebutuhan *supplier* dan tersedianya *contact person*.

Analisa Hasil Survei secara garis besar digambarkan sebagai berikut:

Peneliti menemukan bahwa kelima variabel yakni *Quality, Cost, Delivery, Flexibility dan Responsiveness*, menurut para pemasok paling kuat derajat kepentingannya bagi mereka. Sedangkan kepuasan para pemasok untuk kelima bidang tersebut umumnya cukup puas, kecuali untuk *cost* yang tidak terlalu puas. Para pemasok mengharapkan kriteria harga yang termurah dalam proses pengadaan TELKOM tidak menjadi faktor yang dominan.

Lebih lanjut peneliti menyimpulkan beberapa pokok pikiran dalam proses pengadaan sebagai berikut:

- TELKOM agar mengutamakan keterbukaan informasi dan mempertimbangkan kembali pertimbangan dari aspek harga pada proses pengadaan;
- TELKOM harus memperat hubungan dengan pemasoknya, dengan menerapkan kebijakan yang berbeda untuk seluruh jajaran fungsional maupun manajerial;
- TELKOM harus meningkatkan kinerjanya pada aspek *delivery* khususnya untuk indikator *updating* informasi; dan
- Peneliti menyarankan agar TELKOM selalu meng-*update* informasi mengenai *supplier*-nya dan membuat satu sistem yang terintegasi yang berisi informasi mengenai pengadaan, antara lain salah satunya adalah informasi adanya *contact person* dari perusahaan-perusahaan *supplier*.

Laporan Kinerja Pemasok

Melalui surat VP Supply Planning and Control No. Tel.101/LG 000/COP-E0022000/2009 tanggal 28 April 2009, TELKOM mulai mengadakan evaluasi terhadap para pemasok. Evaluasi terpusat ini menyeragamkan kriteria dan metode penilaian *supplier* di seluruh perusahaan. Program ini ditujukan untuk memperkuat kemitraan dengan pemasok, juga untuk meningkatkan kualitas mereka, memfasilitasi penyelesaian poyek tepat waktu, mempercepat fungsi-fungsi logistik dan meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pemilihan pemasok.

Evaluasi berdasarkan rekaman pemasok atas kualitas, harga, *delivery* & layanan (QCDS) selama proses pengadaan, konstruksi, dan pasca konstruksi. Evaluasi diadakan secara '*real-time*' atas pencapaian terhadap perencanaan (kurva-S), adanya keluhan, dan pengisian kuesioner.

ASSESSMENT CENTER

Setiap kader pimpinan TELKOM wajib mengikuti proses *assessment center* yang meliputi simulasi beban kerja maksimum, untuk membantu penilai dalam mengevaluasi bakat dan kemampuan kepemimpinan kandidat. Simulasi beban kerja dirancang khusus sesuai spesifikasi pekerjaan yang diperlukan.

Sistem *Assessment Center* ini terbukti handal, dan telah dipergunakan oleh beberapa institusi lain seperti ITB dan Merpati, dalam rangka melakukan proses seleksi kepemimpinan.

AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku 2009 sudah diaudit oleh PwC. Penunjukan auditor independen untuk tahun buku 2009 dilakukan sesuai prosedur penunjukan yang berlaku dengan memperhatikan independensi dan kualifikasi auditor independen.

BIAYA DAN JASA AUDITOR EKSTERNAL

Tabel berikut menyajikan ringkasan tagihan yang disampaikan PwC untuk tahun 2007, 2008 dan 2009, berturut-turut:

Tabel Biaya Auditor

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember,		
	2007	2008	2009
	(dalam jutaan Rp)		
Biaya Audit	53.500,0	51.000,0	49.640,0
Biaya pajak	-	-	332(2)
Semua biaya lainnya	275,6(1)	-	500

(1) biaya yang dibayarkan untuk pelatihan audit standar No. 5 (AS5) yang dilaksanakan oleh PwC (tidak termasuk PPN 10%).

(2) biaya yang dibayarkan untuk layanan tax compliance untuk TII yang diberikan oleh PWC, belum termasuk pajak pertambahan nilai 10%.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PRE-APPROVAL KOMITE AUDIT

TELKOM menerapkan kebijakan dan prosedur *pre-approval* yang mensyaratkan bahwa semua jasa non-audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk sebagai auditor independen, sebagaimana ditetapkan dalam *Charter* Komite Audit, harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Komite Audit. Berdasarkan *Charter* tersebut, jasa non-audit yang diperkenankan dapat dilaksanakan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk sebagai auditor independen dengan ketentuan bahwa: (a) Direksi harus menyerahkan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian jasa non-audit yang akan dilaksanakan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk sebagai auditor independen; dan (b) Komite Audit akan memutuskan apakah jasa non-audit yang diajukan akan mempengaruhi independensi kantor akuntan publik yang ditunjuk sebagai auditor independen atau akan menimbulkan benturan kepentingan.

Konsisten dengan Seksi 10(i) (1) (B) dari *Exchange Act* paragraf (c) (7) (i) (C) Rule 2-01 dari Regulation S-X yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang tersebut, *Audit Committee Charter* memberikan pengecualian untuk persyaratan *pre-approval* atas jasa non-audit yang diperkenankan (x) jika jumlah seluruh biaya jasa non-audit tersebut tidak lebih dari lima persen dari jumlah biaya audit yang dibayarkan TELKOM kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk sebagai auditor independen selama tahun buku, jasa tersebut diberikan atau (y) jasa yang diajukan tidak dianggap sebagai jasa non-audit pada saat kontrak untuk melaksanakannya ditandatangani. Selain dari kedua hal tersebut, pelaksanaan jasa non-audit harus disetujui lebih dulu oleh seorang anggota Komite Audit yang telah mendapat pelimpahan wewenang untuk memberikan *pre-approval* dari Komite Audit atau langsung oleh Komite Audit.

KETERSEDIAAN DOKUMEN

TELKOM menyampaikan laporan, termasuk laporan tahunan dalam *Form 20-F* dan informasi lain di SEC berdasarkan peraturan dan regulasi SEC yang berlaku untuk emiten swasta asing. Seluruh bahan yang dilaporkan TELKOM sebagai exhibit pada laporan tahunan pada *Form 20-F* kepada *US Securities and Exchange Commission* tersedia di kantor Perusahaan di Gedung Grha Citra Caraka lantai 5, Jl. Gatot Subroto Kav.52, Jakarta 12710, Indonesia.

PENGENDALIAN DAN PROSEDUR

PENGENDALIAN DAN PROSEDUR PENGUNGKAPAN

Di bawah pengawasan dan peran serta manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, manajemen melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan prosedur pengungkapan Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Rules 13a-15(e) dan 15d-15(e) Securities *Exchange Act* tahun 1934 (selanjutnya disebut "*Exchange Act*"), pada tanggal 31 Desember 2009. Berdasarkan evaluasi ini, Direktur Utama dan Direktur Keuangan Perusahaan menyimpulkan bahwa, pada tanggal 31 Desember 2009, pengendalian dan prosedur pengungkapan Perusahaan adalah efektif. Pengendalian dan prosedur

TELKOM telah melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan dengan menggunakan kriteria dalam *Internal Control Integrated Framework*

pengungkapan Perusahaan termasuk, tanpa dibatasi, pengendalian dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dipersyaratkan untuk diungkapkan di dalam laporan yang disampaikan atau diajukan berdasarkan *Exchange Act* telah dicatat, diproses, dirangkum dan dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan format SEC, dan bahwa informasi tersebut dikumpulkan dan disampaikan kepada manajemen Perusahaan, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, sebagaimana layaknya, untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu atas pengungkapan yang dipersyaratkan.

LAPORAN TAHUNAN MANAJEMEN MENGENAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara memadai, sebagaimana didefinisikan dalam *Exchange Act* Rules 13a-15(f) dan 15d-15(f). Pengendalian internal atas pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dirancang oleh, atau di bawah pengawasan Direktur Utama dan Direktur Keuangan, dan dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan untuk keperluan eksternal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan termasuk kebijakan dan prosedur yang: (1) berkaitan dengan pengelolaan pencatatan secara rinci, akurat, dan wajar yang mencerminkan transaksi dan pelepasan aset perusahaan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi dicatat secara semestinya untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan bahwa pendapatan dan biaya perusahaan diterima dan dikeluarkan hanya berdasarkan kewenangan manajemen dan direksi perusahaan; dan (3) memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencegahan atau deteksi secara tepat waktu dalam hal perolehan, penggunaan atau pelepasan aset perusahaan yang tidak sah yang dapat memberikan dampak material terhadap Laporan Keuangan.

Karena keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, pengendalian internal atas pelaporan keuangan mungkin tidak dapat mencegah atau mendeteksi terjadinya salah saji. Di samping itu, proyeksi atas evaluasi efektivitas pada masa mendatang mengandung risiko bahwa pengendalian mungkin menjadi tidak memadai karena perubahan kondisi, atau karena tingkat kepatuhan terhadap kebijakan atau prosedur mungkin menurun.

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009. Dalam melakukan penilaian ini, Manajemen menggunakan kriteria dalam *Internal Control Integrated Framework* yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)*. Berdasarkan hasil penilaian ini, manajemen menyimpulkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2009, pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan telah efektif.

LAPORAN ATESTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (sebelumnya dikenal sebagai KAP Haryanto Sahari & Rekan), *a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*, sebagaimana dinyatakan dalam laporan mereka yang terdapat pada Laporan Keuangan Konsolidasian TELKOM.

PERUBAHAN PADA PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN

Tidak ada perubahan signifikan terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan selama tahun buku terakhir yang dapat mempengaruhi secara material atau berpotensi mempengaruhi secara material pengendalian internal atas pelaporan keuangan Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan atas proses pengendalian internal, melakukan *review* secara detail serta memantau prosedur dan pengendalian atas pelaporan keuangan untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan *Sarbanes-Oxley Act* dan peraturan terkait yang dikeluarkan oleh SEC. Perusahaan akan mencurahkan segenap sumber daya untuk meningkatkan pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara berkesinambungan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam bisnis TIME, kami berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi ini bagi kualitas hidup sehingga kami dapat tumbuh bersama dengan masyarakat. Kami memenuhi komitmen ini melalui beberapa cara, termasuk mengorganisasi rangkaian aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* – CSR).

Program kesejahteraan sosial kami mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga eksternal. Sejak tahun 2006, mengacu pada *Global Reporting Initiative* (GRI) G3, kami menyampaikan *Sustainability Report* mengenai kegiatan CSR TELKOM. Dalam tiga tahun berturut-turut, 2007, 2008 dan 2009, kami memperoleh penghargaan sebagai *Best Sustainability Award* dari *Indonesian Sustainability Report Award*. Kami terus melaksanakan misi tersebut dengan aktif berpartisipasi dalam:

- menciptakan masyarakat dengan pendidikan yang lebih baik melalui pendidikan teknologi *InfoComm*;
- meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan
- menjaga keseimbangan lingkungan.

MENGEMBANGKAN MASYARAKAT INFORMASI

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik lainnya, penetrasi internet di Indonesia masih rendah. Salah satu ciri mayarakat maju adalah bagaimana mengambil keuntungan dari aplikasi TI. TI telah menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan kita. Kami percaya bahwa sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pengembangan TI. Kami berbagi tanggung jawab untuk mengembangkan bangsa melalui pemberdayaan masyarakat informasi, khususnya pada

kalangan muda. Melalui program CSR, kami secara konsisten mengambil peran utama dalam mengembangkan kualitas pendidikan untuk masyarakat umum dengan menyediakan akses pada layanan informasi melalui internet dan memfasilitasi penciptaan komunitas berbasis informasi.

Program Santri Indigo

Melalui program ini, kami telah memilih, sebagai salah satu target, pengembangan pendidikan teknologi di antara pelajar atau santri, yang belajar di sekolah *Islamic boarding schools*, atau pesantren. Sekolah Islam diakui pemerintah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Saat ini, Sekolah Islam tidak hanya menjadi tempat untuk mempelajari Islam namun juga untuk pelajaran umum, sehingga para santri saat ini memiliki pendidikan alternatif sebelum memasuki pendidikan tinggi.

Program Santri Indigo, yang dimulai sejak tahun 2007, menyediakan pelatihan internet bagi 630 santri, guru dan pengelola pesantren, dengan jumlah peserta tiap tahun:

- 2007: 75 peserta;
- 2008: 355 peserta; dan
- 2009: 200 peserta.

Minat para peserta Santri Indigo tinggi, yang dicerminkan pada terus meningkatnya jumlah peserta tiap tahunnya. Survei menunjukkan bahwa:

- 87,4% peserta tertarik pada materi yang disampaikan;
- 98.6% peserta merasa bahwa pengetahuan mereka bertambah melalui internet;
- 91% peserta merasa materi pelatihan tepat dengan kebutuhannya;
- 99% peserta menyatakan program pelatihan ini penting; dan
- hanya 36% peserta telah memperoleh pelatihan yang sama.

Pada saat ini, secara garis besar terdapat lima masukan penting untuk peningkatan program tersebut:

- program terlalu pendek, kurang cukup waktu dalam pelaksanaannya;
- kecepatan internet kurang tinggi;
- waktu istirahat diperlukan untuk mengurangi tekanan dan kelelahan;
- program ini harus disebarkan lebih luas bagi santri;
- fasilitator menggunakan jargon “tingkat tinggi”.

Bagimu Guru Kupersembahkan

Guru merupakan salah satu pilar paling penting dalam sistem pendidikan. Para guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, namun juga moral dan etika. Jika para guru

sangat profesional, mereka dapat menyampaikan pengetahuan berkualitas pada anak didiknya saat mengajar. Guru saat ini memainkan peran vital. Selain menjadi panutan yang memimpin dan mengarahkan para siswa, guru juga sebagai fasilitator, koordinator, dan komunikator. Guru juga harus kreatif dan inovatif. Peran mereka mendampingi dan memotivasi siswa agar siap menghadapi masa depan.

Pada tahun 2007, TELKOM mencanangkan "Bagimu Guru Kupersembahkan", sebuah program yang ditujukan untuk:

- meningkatkan pengetahuan guru sehingga mereka dapat lebih percaya diri dan dihargai oleh para siswanya;
- memotivasi guru agar bangga pada profesi mulianya;
- membantu guru memahami bahwa kualitas siswanya tergantung lebih jauh lagi pada para guru; dan
- menciptakan "Generasi Baru" pada guru Indonesia, yang lebih berkualitas, percaya diri dan bermotivasi tinggi.

Program ini berlokasi di 14 kota besar di Jawa dan melibatkan guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Jumlah guru yang berpartisipasi dalam program ini adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Partisipasi Guru

Tahun	Jumlah guru yang berpartisipasi
2007	500
2008	450
2009	250

Indigo

Kami membagi tanggung jawab sosial dengan mengembangkan komunitas digital yang sejalan guna mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Pada 23 Oktober 2009, kami menyelenggarakan Penghargaan Indigo (*Indonesia Digital Community*), yang meliputi:

- *Indigo Fellow Award*
- *Indigo Fellowship Award*
- TELKOM *Smart Campus* (TeSCA) *Award*
- *Indigo Music Award*
- *Moslem Song and Music Lyric Competition*

Indigo *Fellow Award*

Penghargaan ini diberikan kepada pemain dan inisiator industri kreatif digital, khususnya pada bidang permainan, pendidikan dan hiburan, musik dan industri animasi di Indonesia. Pemenang penghargaan ini diharapkan menjadi panutan bagi orang lain dalam industri kreatif. Terdapat 30 pemenang yang dibagi dalam empat kategori: *Digital Inventor, Digital Leader, Digital Academic* dan *Digitalpreneur*.

Indigo *Fellowship Award*

Penghargaan ini diberikan pada individu atau kelompok yang berhasil mengembangkan ide kreatif digital dan mendesain sesuatu yang berguna bagi masyarakat umum serta mendorong perkembangan *digitalpreneur* baru dalam industri. Terdapat lebih dari 700 ide kreatif dan desain dari seluruh tingkat masyarakat kreatif di Indonesia yang dinilai. Lima pemenang dipilih untuk ide kreatif terbaik dan 11 pemenang untuk disain kreatif. Mereka tidak hanya menerima penghargaan namun juga pelatihan, modal usaha dan konsultasi.

TELKOM *Smart Campus* (TeSCA) *Award*

Penghargaan bagi universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya yang dapat mengembangkan dan memberdayakan *Information and Communication* (ICT) di kampus. Program *Smart Campus* dimulai sejak tahun 2006 dengan misi membangun lembaga pendidikan tinggi sebagai pusat peningkatan komunitas digital dan lembaga lainnya. Penghargaan TESCA diberikan dalam berbagai kategori termasuk universitas, lembaga institut/politeknik, akademi dan Universitas Islam, juga penghargaan khusus TESCA untuk kepemimpinan ICT dan Inkubator *Digitalpreneur*.

Indigo *Music Award*

Penghargaan ini, diberikan bagi artis dari berbagai jenis musik, yang telah diterima secara luas oleh masyarakat, sebagai refleksi atas penjualan lagu dalam bentuk *Ring Back Tone* (RBT) seluler. Para artis juga memainkan peran penting dalam tumbuhnya industri musik digital di Indonesia. Penilaian penghargaan ini didasarkan pada jumlah penggunaan RBT dalam satu tahun. Para pemenang dikategorikan dalam Artis Pria Terbaik, Artis Wanita Terbaik, Band Terbaik, Duo/Trio Terbaik, Artis Pop Terbaik, Artis Rock Terbaik, Jazz/*Contemporary* Terbaik, Dangdut Terbaik, Musik Religi Terbaik, Artis terbaik tahun Ini dan Artis Pendatang Baru Terbaik.

TELKOM terpilih sebagai *"the best company"* dari segi pemberian gaji dan manfaat untuk karyawan

kompetisi lagu dan lirik musik islami
Penghargaan bagi pencipta dan pembuat lirik lagu Islami, dilakukan pada Ramadhan 2009. Sekitar 600 lagu disampaikan oleh masyarakat, 24 di antaranya yang terpilih diberikan penghargaan.

Speedy Tour d'Indonesia
Sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan, kami berinisiatif menyelenggarakan lomba balap sepeda '*Speedy Tour d'Indonesia*'.

Speedy Tour d'Indonesia, yang diselenggarakan bersama dengan PB ISSI, organisasi yang bertanggungjawab mengembangkan olah raga bersepeda di Indonesia, dengan perjalanan antara Jakarta dan Denpasar. *The Speedy Tour d'Indonesia* merupakan agenda dari Union Cycliste Internationale (UCI) dan merupakan *tour* bersepeda terbesar di Indonesia. Pada tahun keduanya, *Speedy Tour d'Indonesia* merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendorong perkembangan olahraga di Indonesia, khususnya bersepeda. *Speedy Tour d'Indonesia* tahun 2009 diselenggarakan sejak 23 November 2009 hingga 3 Desember 2009, menempuh jarak 1.440 km. *The Speedy Tour d'Indonesia* 2009 diikuti oleh 10 tim domestik dan internasional dari Iran, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia, Kazakhstan, Rusia dan Australia.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Pada tahun 2009, kami meneruskan Program Kemitraan, yang dimulai sejak tahun 2001, dan Program Bina Lingkungan, yang dimulai sejak tahun 2003.

Program Kemitraan menyalurkan dana untuk mitra binaan di seluruh Indonesia dalam bentuk modal kerja dan pinjaman investasi. Pada tahun 2009, Program Kemitraan menyalurkan Rp153,6 miliar bagi 6,799 mitra binaan. Sebagian besar dana diberikan kepada usaha kecil (Rp27,4 miliar), diikuti Rp32,9 miliar untuk sektor jasa dan Rp77,9 miliar untuk sektor perdagangan. Kami juga secara aktif menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada mitra binaan dalam aspek promosi dan pemasaran.

Pada tahun 2009, Program Bina Lingkungan menyalurkan Rp10,5 miliar pada berbagai aktivitas, termasuk bantuan bencana; pendidikan dan pelatihan, termasuk program *e Learning, Smart Campus* dan *Internet Goes to School and Teacher Training Programs*; program kesehatan masyarakat, pengembangan dan rehabilitasi fasilitas umum; dan pendampingan aktivitas keagamaan. Program Bina Lingkungan ini didanai oleh Dana TELKOM-CSR-Philantropy.

Penyaluran dana Program Bina Lingkungan pada tahun 2009 dioptimalkan menjadi Rp10,5 miliar dari target Rp4,8 miliar, yang dicapai melalui dana CSR Philantrophy TELKOM melalui:

- pendekatan pada tahap pengembangan program;
- orientasi penyaluran dana diperluas lebih pada isu lingkungan khususnya pada pelestarian alam, melalui program "Menanam Satu Juta Pohon";
- program Lingkungan lebih terarah dan terfokus pada aktivitas ICT melalui pendidikan internet (*Internet Goes To School, Education for Tomorrow, Broadband Learning Center, Telematics Workshop* dan ICT Lab) di seluruh divisi regional; dan
- melanjutkan program pelatihan guru seperti Sinergi Republika dan Yayasan Al Falah.

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Komunikasi antar pelanggan merupakan pilar utama dan bisnis layanan komunikasi. Sejalan dengan misi kami, memastikan bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik, nyaman, produk berkualitas dan harga yang bersaing sangat penting bagi kelanjutan bisnis Perusahaan. Kualitas layanan yang baik, ketersediaan suku cadang dan layanan purna jual adalah kekuatan utama kami. Dengan alasan tersebut, kami selalu mempertimbangkan perlindungan konsumen, termasuk penanganan keluhan atau laporan pelanggan tidak hanya sebagai bagian dari CSR, namun merupakan bagian yang menyeluruh dalam proses produksi Perusahaan. Secara lebih spesifik, penanganan keluhan pelanggan merupakan tugas dan tanggung jawab Direktorat Konsumer.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menyalurkan dana untuk mitra binaan di seluruh Indonesia dalam bentuk modal kerja dan pinjaman investasi.

Untuk perlindungan konsumen dan calon pelanggan, TELKOM memberikan jaminan layanan melalui berbagai upaya, antara lain:

- menjamin kualitas dan keamanan produk/layanan dengan cara memastikan bahwa proses pengambilan keputusan untuk meluncurkan produk/layanan sudah sesuai dengan standar pengembangan produk/layanan (STARPRO) dan analisis 8 IC (*Internal Capabilities*) yang dilakukan sebelum produk/layanan tersebut diluncurkan kepada pelanggan dan masyarakat;
- memegang prinsip agar sedapat mungkin, produk/layanan bernilai tinggi dan mampu menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya serta mendorong perekonomian;
- selalu menjaga kode etik dalam penjualan produk (penjualan langsung) dan promosi;
- menerapkan praktik periklanan yang beretika dengan mempertimbangkan peraturan pada kode etik periklanan di Indonesia;
- memastikan bahwa produk dan layanan purna jual dapat secara mudah tersedia bagi publik;
- mendukung penerapan prinsip-prinsip dan praktek persaingan yang sehat; dan
- selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Kami berkomitmen untuk mendukung prinsip keadilan melalui penerapan kompensasi yang adil dengan diberlakukannya SLG ("*Service Level Guarantee*", Garansi Purna Jual). Ini adalah pemberian kompensasi kepada pelanggan jika standar layanan tidak terpenuhi. Hal ini diatur dalam KD DIRJASA No. C.tel.1758/YN000/JAS-53/04 tahun 2004 dan KD ND.C000 No. C.Tel.18/4N000/KNS-24/06 tahun 2006.

Komitmen kami telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Pada tanggal 9 April 2009, Plasa TELKOM dianugerahi Penghargaan CCSL (*Center for Customer Satisfaction & Loyalty*) untuk kategori *Best Service Point*. Pada tanggal 9 Mei 2009, kami mendapatkan *Gold Award* dari ICCA (*Indonesia Contact Center Association*) untuk kategori *The Best Contact Center Operation* dan *The Best Contact Center Business Contribution*.

Petugas *Customer Service* Plasa Telkom melayani pelanggan yang sedang bertanya tentang seputar produk Telkom di salah satu *lounge* plasa Telkom yang baru

SDM TELKOM: Sumber Daya Terbaik

TELKOM MEMBERDAYAKAN DAN MENGELOLA SDM

Dalam beberapa tahun terakhir ini, kami melakukan perubahan mendasar dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia ("SDM") dengan cara mengubah konsep *human resources* menjadi *human capital*. TELKOM melihat bakat karyawan (keterampilan individu, pengetahuan, sikap, kecerdasan, keahlian, pengalaman, kelayakan, kemampuan, kesesuaian, wewenang, pelatihan, pendidikan, kreativitas dan nilai tambah lainnya) sebagai aset perusahaan untuk mendorong pembentukan sebuah organisasi pembelajaran.

Kinerja TELKOM selama ini sangat tergantung dari kualitas dan profesionalisme karyawannya. Agar dapat terus menciptakan nilai, kami melakukan proses penggeseran paradigma pengelolaan SDM untuk menyelaraskan kembali karyawannya agar dapat berpartisipasi dalam bisnis *new wave* yang terus tumbuh. Dengan mengacu kepada Rencana Induk *Human Capital*, upaya transformasi SDM difokuskan untuk mengarahkan transformasi bisnis menuju bisnis *new wave* melalui perencanaan SDM, termasuk pengembangan kompetensi dan pengelolaan keahlian.

Pada tahun 2009, kami memusatkan perhatian untuk mengawal transformasi bisnis yang mengarah kepada bisnis *new wave* sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk *Human Capital*. Di dalam Rencana Induk tersebut terdapat arahan bagi perencanaan SDM yaitu penekanan pada rekrutasi dan peningkatan kompentensi yang selaras dengan bisnis *new wave* serta penerapan program pensiun dini untuk mengurangi kompetensi yang tidak relevan dengan bisnis *new wave*. Di samping itu, TELKOM melakukan transformasi organisasi untuk mendukung bisnis *new wave* antara lain dengan membentuk Divisi TELKOM Flexi ("DTF") yang independen. Dalam pengelolaan SDM, TELKOM telah membangun pengelolaan keahlian, direktori kompetensi dan kebijakan pengembangan kompetensi yang mengarah kepada tercapainya tujuan perusahaan dalam bisnis *new wave*.

Tujuan perubahan konsep dari *human resources* ke *human capital* adalah untuk memberikan kesempatan berkarir yang lebih luas bagi karyawan yang berkinerja baik, sehingga kualitas dan profesionalisme karyawan dapat dikembangkan. Dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis, TELKOM telah mengubah cara berpikir dalam pengelolaan SDM dengan menjadikan departemen SDM sebagai Penjaga Nilai ("*Guard of Value*") yang mempunyai lima peran utama (ahli administratif, karyawan yang unggul, agen perubahan, *partner bisnis* strategis dan kepemimpin SDM). Dengan melakukan hal tersebut, maka kami berharap agar semangat dan loyalitas karyawan dapat meningkat sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan.

Tujuan perubahan konsep dari SDM ke *Human Capital* adalah untuk memberikan kesempatan berkarir yang lebih luas bagi karyawan yang berkinerja baik

PROFIL SDM

A. TELKOM

Jumlah Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2009, karyawan TELKOM dan anak perusahaan berjumlah 28.750 orang, terdiri dari 23.154 karyawan TELKOM dan 5.596 karyawan anak perusahaan.

Tabel di bawah ini menguraikan rincian karyawan TELKOM berdasarkan posisinya pada tanggal 31 Desember 2009:

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Posisi

	Jumlah karyawan TELKOM per 31 Desember 2009	Jumlah karyawan anak perusahaan TELKOM per 31 Desember 2009
Manajemen Senior	155	224
Manajemen Madya	2.537	597
Pengawas	10.021	1.020
Lainnya	10.441	3.755
Total	23.154	5.596

Pada tanggal 31 Desember 2008, karyawan TELKOM dan anak perusahaan TELKOM berjumlah 30.213 orang, terdiri dari 25.016 karyawan TELKOM dan 5.197 karyawan anak perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2007, karyawan TELKOM dan anak perusahaan TELKOM berjumlah 32.465 orang, terdiri dari 25.361 karyawan TELKOM dan 7.104 karyawan anak perusahaan.

Grafik Jumlah Pegawai TELKOM Mengalami Penurunan Dari Tahun Ke Tahun

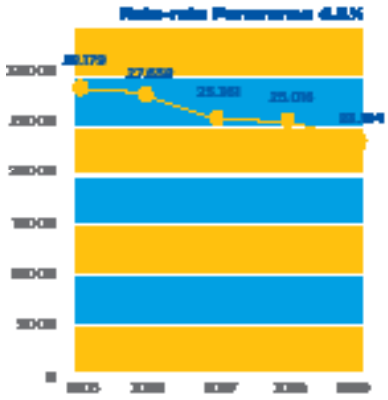

Dalam rentang waktu 2005-2009, TELKOM mengalami penurunan jumlah karyawan (tidak termasuk karyawan anak perusahaan) dengan rata-rata tingkat penurunan sebesar 4,8% per tahun. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan TELKOM dalam melakukan program *multi-exit* terutama program pensiun dini selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

Pada tahun 2009, terdapat pengurangan karyawan TELKOM (tidak termasuk anak perusahaan) sebanyak 1.862 orang atau sebesar 7,4%, terutama disebabkan oleh program pensiun dini yang telah direvitalisasi dan juga disebabkan oleh pensiun normal, pengunduran diri atas permintaan sendiri, meninggal dunia dan lain-lain. Manajemen yakin bahwa secara umum TELKOM memiliki hubungan baik dengan para karyawan TELKOM dan dengan serikat karyawan.

B. PROFIL KARYAWAN TELKOM (TIDAK TERMASUK ANAK PERUSAHAAN)

1. Tingkat Pendidikan

Komposisi karyawan TELKOM berdasarkan tingkat pendidikan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Grafik Profil Karyawan TELKOM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

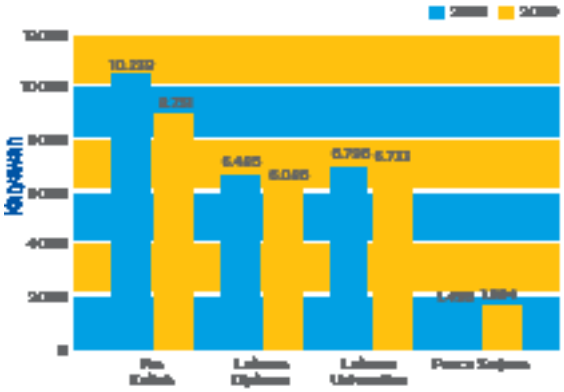

- Pra kuliah sebanyak 8.751 orang (37,8%);
- Lulusan (D1-D3) sebanyak 6.086 orang (26,3%);
- Lulusan universitas sebanyak 6.733 orang (29,1%);
- Pasca Sarjana sebanyak 1.584 orang (6,8%).

Tabel Tingkat Pendidikan

	2008		2009	
	Karyawan	%	Karyawan	%
Pra Kuliah	10.239	40,9	8.751	37,8
Lulusan Diploma	6.485	25,9	6.086	26,3
Lulusan Universitas	6.796	27,2	6.733	29,1
Pasca Sarjana	1.496	6,0	1.584	6,8
Jumlah	25.016	100,0	23.154	100,0

Dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2008, komposisi karyawan TELKOM berdasarkan tingkat pendidikan mengalami perubahan pada tahun 2009. Terdapat penurunan persentase karyawan yang berpendidikan pra kuliah, kenaikan persentase karyawan yang berpendidikan lulusan diploma (D1, D2 dan D3) dan lulusan universitas serta pasca sarjana. Hal ini menegaskan kesuksesan kebijakan perekrutan karyawan yang kami lakukan saat ini dan program pensiun dini bagi karyawan.

Grafik Perubahan Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan Dari 2008 Ke 2009

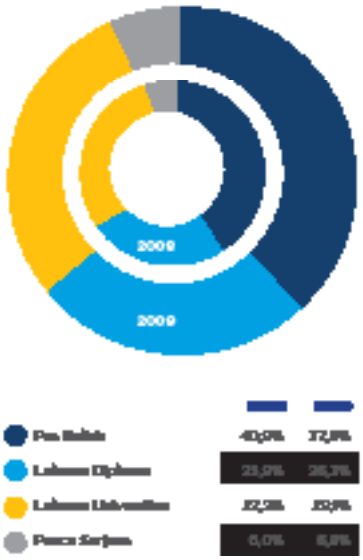

2. Usia

Pada tahun 2009, karyawan yang berusia 45 tahun atau lebih merupakan kelompok usia yang jumlahnya terbesar di antara karyawan kami, yaitu sebanyak 13.710 orang (59,2%), sedangkan untuk usia 31-45 tahun berjumlah 8.470 orang (36,6%), dan untuk usia di bawah 30 tahun sebanyak 974 orang (4,2%) dari seluruh total karyawan TELKOM.

Grafik Profil Karyawan TELKOM Berdasarkan Usia

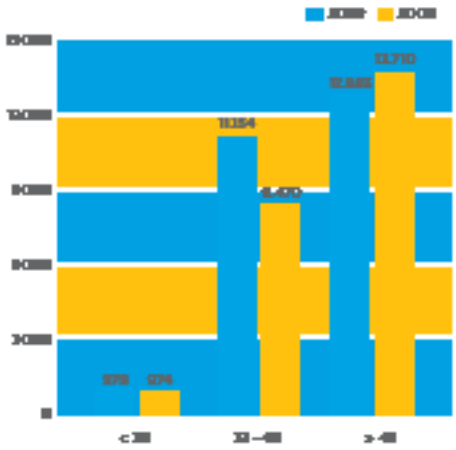

Grafik Perubahan Komposisi Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia

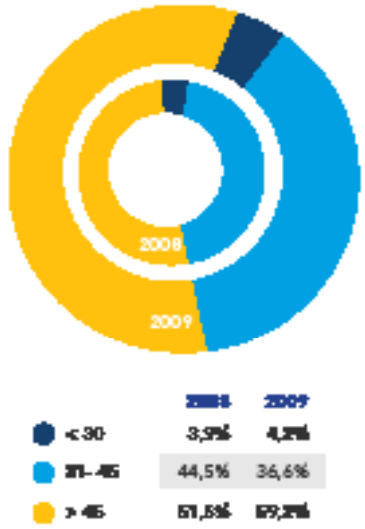

Tabel Kelompok umur

	2008		2009	
	Karyawan	%	Karyawan	%
<30	979	3,9	974	4,2
31 -45	11.154	44,6	8.470	36,6
>45	12.883	51,5	13.710	59,2
Total	25.016	100,0	23.154	100,0

PENGUKURAN SDM

Untuk mengukur kinerja karyawan, TELKOM menggunakan *Competency Based Human Resources Management* ("CBHRM"). CBHRM telah kami gunakan sejak tahun 2004 yang pada awalnya digunakan untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya.

Pada tahun 2007, CBHRM telah digunakan secara penuh untuk mengukur kinerja karyawan, menentukan tingkat gaji dan membangun kompetensi. Berdasarkan hal tersebut, kami memperbarui direktori kompetensi dan membangun sebuah *Master Plan* untuk memberikan arah bagi pengembangan SDM kami untuk periode 2008-2012.

Pada tahun 2009, kebijakan CBHRM telah mencakup beberapa bidang, antara lain:

- Pengembangan Kompetensi: dilakukan pemutakhiran Direktori Kompetensi agar dapat mendukung aplikasi *assessment tool,* kemudian dilakukan juga evaluasi terhadap aplikasi *assessment tool* tersebut dan pembaharuan panduan pengembangan kompetensi yang sejalan dengan transformasi perusahaan menjadi perusahaan InfoComm;
- Manajemen Karir: dilaksanakannya *job tender* dan *fit and proper test* untuk posisi tertentu dengan memperhitungkan kecocokan profil;
- Manajemen Kinerja: dilakukan evaluasi dan pengembangan terhadap aplikasi *assessment tool* dengan penambahan sistem pengukuran kompetensi 360°, yang keduanya ditujukan untuk membangun kompetensi dengan tujuan mengurangi penilaian sendiri dan menambah penilaian oleh atasan.

PENGEMBANGAN SDM

Pengembangan SDM TELKOM disesuaikan dengan strategi bisnis yang didasarkan pada *Corporate Strategic Scenario* ("CSS"), *Master Plan for Human Capital* ("MPHC"), *Training Needs Analysis* ("TNA"), transformasi organisasi serta pertumbuhan keuangan perusahaan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan karyawan di tahun 2009 difokuskan kepada:

- Pengembangan kepemimpinan. pembinaan karyawan yang berpotensi sebagai pemimpin dan berkinerja tinggi yang telah menunjukkan komitmen untuk memberikan yang terbaik dan berwawasan global;
- Mendukung pencapaian *corporate strategic goals*. Dengan mengacu pada CSS dan *business plan* unit bisnis terkait;
- Mengurangi kesenjangan kompetensi karyawan, melalui evaluasi kompetensi berbasis penilaian CBHRM.

Program pengembangan kepemimpinan disediakan dalam berbagai program:

- Kepemimpinan Tingkat Dasar (*Supervisory Leadership Fundamental, Supervisory Leadership Functional*);
- Kepemimpinan Tingkat Menengah (Suspim 135 B, *Public Leadership* untuk Manajemen Madya); dan
- Kepemimpinan Tingkat Senior (Suspim 135 A, *Functional Leadership, Commander Training, Public Leadership* untuk Manajemen Senior).

Pada tahun 2009, program pengembangan kompetensi diberikan kepada 39,637 karyawan yang terdiri dari program pengembangan kepemimpinan untuk 1,121 karyawan, program pengembangan fungsional untuk 38,372 karyawan, dan program pengembangan bakat untuk 144 karyawan.

Program pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kompetensi karyawan di bidang teknologi, pemasaran & manajemen telekomunikasi, informasi bisnis dan pengembangan *new wave* sejalan dengan visi kami menjadi *market leader* dalam bidang *InfoComm*. Berbagai kerja sama dengan lembaga terkemuka yang terkait dengan industri kami telah dilakukan untuk mendukung program pelatihan baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.

TELKOM berhasil meraih peringkat ketiga *Most Admired Knowledge Enterprise* (MAKE) *Award* Indonesia

Pada tahun 2009, kami mengalokasikan dana Rp116,9 miliar untuk pelatihan dan pendidikan, atau rata-rata sebesar Rp2,95 juta per karyawan, berdasarkan jumlah karyawan yang menjalani pelatihan di tahun 2009, yang mencapai total 39.637 peserta dari total tenaga kerja perusahaan 23.154 karyawan.

Upaya lain untuk mengembangkan sumber daya manusia dilakukan melalui *Knowledge Management*, yaitu suatu fasilitas bagi setiap karyawan untuk bertukar ide, konsep dan informasi melalui artikel yang dapat diakses oleh semua karyawan.

The Dunamis Organization Service mengakui bahwa kami telah berhasil menerapkan fasilitas tersebut dalam mengelola perusahaan. Pada tanggal 15 Juli 2008, kami berhasil meraih peringkat ketiga *Most Admired Knowledge Enterprise* ("MAKE") *Award* Indonesia, dan kami merupakan salah satu nominator dalam *MAKE Award* tingkat Asia pada tanggal 15 Oktober 2009 di Korea Selatan.

TELKOM terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM-nya dimasa mendatang melalui program perekrutan karyawan yang terarah dan strategis sesuai target yang dikembangkan oleh *Assessment Service Center* dan *Talent Pool*.

PROMOSI DAN MUTASI

Selama tahun 2009, telah dilakukan promosi terhadap 1.804 karyawan dan mutasi sebanyak 1.132 karyawan. Pelaksanaan promosi dilakukan dengan mengunakan metode *Assessment Tool* dan *Job Tender*.

PENINGKATAN PELAYANAN SDM

Media employee relations dan *Human Resources Care Center* ("HRCC") senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hal-hal dan masalah terkait dengan karyawan dapat ditangani dan dikomunikasikan secara efektif. Media tersebut diluncurkan pada bulan Oktober 2007.

Di samping itu, kami juga mengembangkan *website Human Capital & General Affairs* yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara pembuat kebijakan, pengelola SDM dan karyawan. *Website* ini memberi akses kepada karyawan untuk mencari kebijakan-kebijakan serta informasi lainnya yang terkait dengan SDM serta melakukan tanya jawab seputar permasalahan yang terkait dengan kebijakan SDM dan pelaksanaannya.

Pada tahun 2009, TELKOM mengembangan layanan-layanan SDM berbasis TI yang meliputi, Sasaran Kerja Individu ("SKI") *online,* absensi *online,* Surat Perintah Perjalanan Dinas ("SPPD") *online*, cuti *online, career online*, dan *Training Need Analisys* ("TNA") *online*.

DUKUNGAN TI UNTUK KOMUNIKASI INTERNAL

Dalam mendukung media komunikasi internal, TELKOM menyediakan berbagai aplikasi TI, seperti proses otomatisasi bisnis perusahaan baik berupa nota dinas elektronik, *virtual meeting, shared files, online surveys,* dan intranet.

AKTIVITAS EKSTRAKURIKULER KARYAWAN

Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, TELKOM mendukung aktivitas ekstrakurikuler karyawannya baik dalam bidang budaya, olahraga dan keagamaan. Selain itu, aktifitas tersebut juga mengikutsertakan karyawan dan keluarganya, termasuk aktivitas seperti kompetisi pembacaan Al-Quran, paduan suara gereja dan Utsawa Dharma Gita dan kegitan olah raga.

PENSIUN DINI

Pada bulan Desember 2009, kami menawarkan program pensiun dini ("Pendi") kepada seluruh karyawan. Kami menawarkan program ini dengan

tujuan untuk membuat lingkungan bisnis yang lebih efektif dan kompetitif. Program ini ditawarkan secara sukarela bagi karyawan yang memenuhi persyaratan (contoh: pendidikan, usia, jabatan, dan kinerja). Dana sebesar Rp1.028 miliar telah dibayarkan kepada 1.336 karyawan yang mengikuti program ini pada tanggal 31 Januari 2010.

PENGELOLAAN HUBUNGAN KARYAWAN

Pada bulan Mei 2000, karyawan TELKOM membentuk serikat bernama "Serikat Karyawan TELKOM" atau "Sekar". Pada bulan Mei 2006, beberapa karyawan TELKOM membentuk serikat lain bernama "Serikat Pekerja" atau "SP" sebagai alternatif di luar Sekar. Pembentukan Sekar dan SP adalah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 mengenai ratifikasi Konvensi ILO No. 87 tahun 1948 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak membentuk organisasi. Keanggotaan pada serikat tidak wajib sifatnya. TELKOM meyakini bahwa hubungannya dengan Sekar dan SP cukup baik. Namun, tidak ada jaminan bahwa kegiatan serikat pekerja tidak akan berubah atau memberi dampak material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan prospek TELKOM.

Pengelolaan hubungan kerja karyawan diatur melalui Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") III tanggal 17 Juli 2007 yang memuat hak dan kewajiban Perusahaan, karyawan dan Sekar.

Manajemen dan Sekar belum dapat menyepakati rumusan "*uniformula*" yang diusulkan dalam draft PKB IV. Yang menjadi akar permasalahannya adalah "perbedaan pemahaman implementasi Pasal 35 ayat 4 dari PKB III." Pada intinya, pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan ("BPK") dengan tarif 2 kali THT berakhir pada 1 Januari 2009 dan mulai 1 Februari 2009 akan diberikan Manfaat Pensiun ("MP") dengan azas *uniformula* yang besarannya ditetapkan atas kesepakatan antara Manajemen dan Sekar. Akibatnya, sampai saat ini belum adanya rumusan yang pasti terhadap pembayaran Manfaat Pensiun dengan azas *Uniformula* (Pasal 35 ayat 4 PKB III). Manajemen memberikan Bantuan Manfaat Pensiun Sekaligus ("BMPS") sebagai solusi dari Manfaat Pensiun bagi karyawan yang pensiun mulai 1 Februari 2009. Sejak Desember 2009, program pembayaran BMPS telah direalisasikan terhadap lebih dari 111 orang pensiunan TELKOM yang pengajuannya telah diproses.

Remunerasi Yang Kompetitif

Karyawan TELKOM menerima gaji pokok dan gaji terkait dengan tunjangan, bonus dan berbagai tunjangan, termasuk program pensiun dan program pelayanan kesehatan pasca kerja, tunjangan kesehatan untuk mereka sendiri dan beberapa anggota keluarga intinya, bantuan perumahan dan tunjangan tertentu lainnya, termasuk yang terkait dengan kinerja unit.

Bonus dianggarkan terlebih dahulu dan diberikan pada tahun berikutnya ketika bonus tersebut diakui *(accrued).* Selama lima tahun terakhir, jumlah bonus tahunan berkisar antara Rp186,4 miliar sampai Rp391,3 miliar. Bonus tahun 2009 akan diberikan kepada seluruh karyawan setelah selesainya audit laporan keuangan tahun 2009. Besarnya bonus akan ditentukan dan disetujui pada RUPS 2010 sebelum dibagikan kepada seluruh karyawan sesuai tingkat posisi masing-masing. Untuk menjaga agar remunerasi tetap kompetitif, TELKOM secara periodik melakukan *salary survey* baik untuk tingkat top manajemen ataupun karyawan. TELKOM merupakan anggota tetap kelompok perusahaan yang mengikuti pergerakan gaji sesuai dengan harga pasar.

Usia pensiun untuk seluruh karyawan TELKOM adalah 56 tahun. TELKOM mensponsori dua program pensiun; (i) manfaat pasti diperuntukkan untuk karyawan tetap yang direkrut sebelum tanggal 1 Juli 2002 dan (ii) program pensiun iuran pasti untuk semua pegawai tetap lainnya.

Program Pensiun Manfaat Pasti

Besarnya pensiun untuk program pensiun manfaat pasti didasarkan atas masa kerja, tingkat gaji pada saat pensiun dan dapat dialihkan kepada tanggungan jika karyawan tersebut meninggal. Sumber utama dana pensiun adalah iuran dari karyawan dan TELKOM. Karyawan yang berpartisipasi dalam program berkontribusi sebesar 18% dari gaji pokok (sebelum bulan Maret 2003, tingkat kontribusi karyawan adalah sebesar 8,4%) dan TELKOM memberikan kontribusi sisanya dari jumlah yang diperlukan untuk mendanai program. Dalam program pensiun manfaat pasti, manfaat pensiun minimum untuk pensiunan sekitar Rp425.000 per bulan. Kontribusi TELKOM untuk dana pensiun sebesar Rp700,2 miliar, Rp889,1 miliar dan Rp889,1 miliar, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007, 2008, dan 2009.

Program Pensiun Iuran Pasti

Program Pensiun Iuran Pasti disediakan untuk karyawan tetap yang direkrut pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Pegawai mempunyai pilihan di antara berbagai yayasan dana pensiun yang diakui dalam program ini. Kontribusi tahunan Perusahaan untuk Program Pensiun Iuran Pasti ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji peserta dengan jumlah sebesar Rp2.196,0 juta, Rp3.001,2 juta dan Rp3.841,4 juta, masing-masing pada tahun 2007, 2008 dan 2009.

Karyawan Perusahaan yang telah memenuhi masa jabatan tertentu berhak menerima penghargaan sejumlah uang kontan yang dibayarkan pada saat karyawan yang dimaksud mengakhiri masa jabatan atau pada saat pensiun.

TELKOM juga menyediakan manfaat kesehatan pasca pensiun untuk seluruh karyawan yang pensiun, termasuk istri atau suami dan anak mereka. Ada dua jenis pendanaan untuk manfaat kesehatan pasca pensiun: (i) untuk karyawan yang dipekerjakan sebelum tanggal 1 Nopember 1995 dan telah 20 tahun

bekerja, manfaat tersebut didanai oleh Yayasan Kesehatan TELKOM ("Yakes"); (ii) untuk semua karyawan tetap lainnya, sejak Agustus tahun 2008 manfaat tersebut akan diberikan dalam bentuk tunjangan asuransi oleh TELKOM. Kontribusi TELKOM untuk program yang didanai Yakes adalah sebesar Rp900,0 miliar, Rp1.100,8 miliar dan Rp1.101,5miliar, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, 2008, dan 2009. Kontribusi TELKOM untuk program yang diberikan dalam bentuk asuransi sejak tahun 2009 berjumlah Rp22,8 miliar.

TELKOM *EMPLOYEE REWARD* (TER)

Perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan atau unit yang berprestasi dalam rangka meningkatkan prestasi dan produktivitas pegawai. Penghargaan ini disebut TELKOM *Employee Reward* yang meliputi penghargaan keagamaan, penghargaan prestasi individu, dan penghargaan prestasi unit.

Sejak Oktober 2008, TELKOM melakukan perubahan kebijakan terhadap pemberian *reward* yaitu tidak hanya diberikan kepada internal TELKOM, tapi juga diberikan kepada pihak eksternal dan komunitas seperti *Corporate Social Responsibility* ("CSR") *award, Healthiest Family Award, Best Tactical Innovator Award, Champion Award* dan *Best Regional Office Award.*

PENGELOLAAN SAHAM PEGAWAI TELKOM (ESOP)

Program utama ESOP antara lain melayani transaksi jual beli saham ESOP. Pada saat TELKOM *go public* pada tanggal 14 Nopember 1995, jumlah saham TELKOM sebanyak 116.666.475 lembar dimiliki oleh 43.218 pegawai. Pada tanggal 31 Desember 2009, 14.316.126 lembar saham TELKOM dimiliki oleh 11.775 pegawai dan pensiunan TELKOM.

PENGELOLAAN KESEHATAN KARYAWAN

TELKOM memberikan layanan kesehatan bagi karyawannya melalui Yayasan Kesehatan ("Yakes") TELKOM. Aktivitas utama Yakes adalah menyelenggarakan kebutuhan kesehatan karyawan dan pensiunan beserta keluarga intinya.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009, Yakes TELKOM memiliki fasilitas pelayanan sebanyak 947 layanan kesehatan yang terdiri dari 17 sarana pelayanan kesehatan dan 930 fasilitas kesehatan yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan mitra kesehatan, seperti dokter, spesialis kesehatan, rumah sakit, apotik, klinik, laboratorium, optik dan lainnya.

Karyawan dan pensiunan TELKOM beserta keluarganya yang menjadi peserta Yakes berjumlah 149.707 orang pada akhir tahun 2009, menurun sejumlah 9.644 orang dibandingkan pada akhir tahun 2008. Penurunan ini terjadi karena telah berakhirnya masa keanggotaan Yakes yang disebabkan karena karyawan yang bersangkutan meninggal atau umur progresif di luar batas usia yang telah ditetapkan.

Keselamatan, Kesehatan Dan Keamanan Lingkungan Kerja (K3)

Pada tahun 2009 pengelolaan K3 tetap fokus pada penanganan *zero accident*. Penilaian K3 ini dilakukan setiap tahun dan sekarang masih dalam proses penyelesaian untuk tahun 2010.

Untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan lingkungan keamanan karyawan TELKOM maupun orang lain yang beraktivitas di lingkungan operasi TELKOM dan untuk pengamanan terhadap sumber produksi, proses produksi, alat produksi dan lingkungan kerja. TELKOM menetapkan seluruh kebijakan K3 dengan tujuan untuk mencapai tingkat kecelakaan kerja nihil (*zero accident standard*). Pengelolaan K3 dilakukan berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan dan aturan K3 Dinas Tenaga Kerja setempat melalui Pengawasan oleh Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Pada tahun 2009, survei K3 diselenggarakan bersamaan dengan survei TEOS. Survei K3 tersebut merupakan survei pertama yang dilakukan untuk mengetahui apakah lingkungan kerja karyawan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan. Berdasarkan hasil survei, pengukuran K3 TELKOM memperoleh skor 77,72% yang dikategorikan sebagai "Cukup Baik".

Keberhasilan kami dalam pengelolaan K3 tercermin dengan kami terimanya *Zero Accident and Golden Flag Award*. Pencapaian *zero accident* dan sertifikat *golden flag* tahun 2009 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan dengan tahun 2008. Skor *zero accident* meningkat 23% sedangkan *golden flag* meningkat 200%. Hal ini menggambarkan peningkatan kesadaran karyawan dan *senior leader* akan pentingnya pencegahan kerugian akibat tindakan dan kondisi yang tidak aman.

TELKOM memberikan penghargaan kepada karyawan atau unit yang berprestasi dalam rangka meningkatkan prestasi dan produktivitas pegawai

Sejarah Perusahaan

TELKOM, perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah, merupakan perusahaan penyedia layanan telepon tidak bergerak terkemuka di Indonesia. Sementara itu, anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai TELKOM, PT Telekomunikasi Seluler ("Telkomsel"), merupakan perusahaan operator layanan telepon seluler yang terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan beragam layanan telekomunikasi lainnya, termasuk interkoneksi, jaringan, data, internet, serta layanan terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan jaringan telekomunikasi yang handal serta layanan telekomunikasi dan informasi berkualitas tinggi.

Sejarah TELKOM berawal pada tahun 1856, tepatnya tanggal 23 Oktober 1856, yaitu pada saat pengoprasian telegrap elektromagnetik pertama di Indonesia yang menghubungkan antara Batavia (Jakarta) dengan Buitenzorg (Bogor) oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Selanjutnya pada tahun 1884, pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan swasta yang menyediakan layanan pos dan telegrap domestik dan kemudian layanan telegrap internasional. Layanan telepon mulai diperkenalkan tahun 1882. Sampai dengan 1906, layanan telepon disediakan oleh perusahaan swasta dengan lisensi pemerintah selama 25 tahun. Pada 1906, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk lembaga pemerintah untuk mengendalikan seluruh layanan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada 1961, sebagian besar dari layanan ini dialihkan kepada perusahaan milik negara. Pada 1965 pemerintah memutuskan pemisahan layanan pos dan telekomunikasi ke dalam dua perusahaan milik negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi.

Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi dibagi menjadi dua perusahaan milik negara, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang bergerak sebagai penyedia layanan telekomunikasi domestik dan internasional serta PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("PT INTI") yang bergerak sebagai pembuat perangkat telekomunikasi. Pada tahun 1980, bisnis telekomunikasi internasional diambil alih oleh PT Indonesian Satellite Corporation ("Indosat") yang baru saja dibentuk saat itu.

Selanjutnya pada 1991, Perumtel mengalami perubahan status, yaitu menjadi perseroan terbatas milik negara dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, atau TELKOM. Sebelum

tahun 1995, operasi bisnis TELKOM dibagi ke dalam dua belas wilayah operasi, yang dikenal sebagai wilayah telekomunikasi atau witel. Setiap witel bertanggung jawab penuh terhadap seluruh aspek bisnis di wilayahnya masing-masing, mulai dari penyedia layanan telepon hingga manajemen dan keamanan properti.

Pada tahun 1995, TELKOM merombak keduabelas witel menjadi tujuh divisi regional (Divisi I Sumatera; Divisi II Jakarta dan sekitarnya; Divisi III Jawa Barat; Divisi IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta; Divisi V Jawa Timur; Divisi VI Kalimantan; dan Divisi VII Indonesia bagian Timur) serta satu Divisi Network. Berdasarkan beberapa kesepakatan dengan mitra Kerja Sama Operasi ("KSO"). TELKOM menyepakati pengalihan hak untuk mengoperasikan lima dari tujuh divisi regional (Divisi Regional I, III, IV, VI dan VII) kepada konsorsium swasta. Dengan kesepakatan tersebut, mitra KSO akan mengelola dan mengoperasikan divisi regional untuk periode waktu tertentu, melaksanakan pembangunan sambungan telepon tidak bergerak dalam jumlah yang telah ditetapkan dan pada akhir periode kesepakatan, mengalihkan fasilitas telekomunikasi yang telah dibangun kepada TELKOM dengan kompensasi yang besarnya telah disepakati. Pendapatan dari KSO akan dibagi antara TELKOM dan mitra KSO.

Setelah krisis ekonomi Asia melanda Indonesia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, beberapa mitra KSO mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada TELKOM. TELKOM dalam hal ini mengakuisisi mitra-mitra KSO di Divisi Regional I, III dan VI serta menyesuaikan isi kesepakatan KSO dengan mitra-mitranya di Divisi Regional IV dan VII untuk memperoleh hak pengawasan pengambilan keputusan-keputusan keuangan dan operasional di regional yang bersangkutan.

Pada tanggal 14 Nopember 1995, Pemerintah melakukan penjualan saham TELKOM melalui penawaran saham perdana (*Initial Public Offering*) di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (keduanya telah melebur menjadi Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2007). Saham TELKOM juga tercatat di NYSE dan LSE dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS") dan ditawarkan pada publik di Bursa Efek Tokyo dalam bentuk *Public Offering Without Listing*. TELKOM saat ini merupakan salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia, dengan nilai kapitalisasi diperkirakan mencapai sekitar Rp190.512,0 miliar per 31 Desember 2009. Pemerintah memiliki hak 52,47% dari keseluruhan saham TELKOM yang dikeluarkan dan beredar. Pemerintah juga memegang saham Dwiwarna TELKOM, yang memiliki hak suara khusus dan hak veto atas hal-hal tertentu.

Kemudian pada tahun 1999, industri telekomunikasi mengalami perubahan signifikan. Undang-undang Telekomunikasi No. 36 (Undang-Undang Telekomunikasi) yang berlaku efektif pada bulan September 2000 merupakan pedoman yang mengatur reformasi industri telekomunikasi, termasuk liberalisasi industri, memfasilitasi masuknya pemain baru dan menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Reformasi yang dilakukan Pemerintah kemudian menghapus kepemilikan bersama TELKOM dan Indosat di sebagian besar perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kompetitif. Hasilnya, pada tahun 2001 TELKOM mengakuisisi 35,0% saham Indosat di Telkomsel yang menjadikan total saham TELKOM di Telkomsel menjadi sebesar 77,7%. sementara Indosat mengambil alih 22,5% saham TELKOM di Satelindo dan 37,7% saham TELKOM di Lintasarta. Pada tahun 2002, TELKOM menjual 12,7% sahamnya di Telkomsel kepada Singapore Telecom Mobile Pte Ltd ("SingTel Mobile") sehingga kepemilikan saham TELKOM di Telkomsel berkurang menjadi 65,0%.

Berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi, pada tanggal 1 Agustus 2001, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif TELKOM sebagai satu-satunya penyelenggara layanan telepon tidak bergerak di Indonesia dan Indosat sebagai satu-satunya penyelenggara layanan Sambungan Langsung Internasional ("SLI"). Hak eksklusif TELKOM sebagai penyedia jasa sambungan telepon lokal maupun sambungan langsung jarak jauh internasional akhirnya dihapuskan

pada bulan Agustus 2002 dan Agustus 2003. Pada tanggal 7 Juni 2004, TELKOM mulai meluncurkan layanan sambungan langsung international tidak bergerak. Pada 2005, TELKOM meluncurkan satelit TELKOM-2 untuk menggantikan seluruh layanan transmisi satelitnya yang telah dilayani oleh satelit TELKOM sebelumnya, yaitu Palapa B-4. Selain itu, untuk menjadi transmisi *backbone* TELKOM, satelit TELKOM-2 akan mendukung jaringan telekomunikasi nasional untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi di pedesaan dan multimedia. Oleh karenanya, TELKOM telah meluncurkan delapan satelit (termasuk Palapa-A1), yaitu Palapa-A2 (1997-1985), Palapa-B1 (1983-1992), Palapa B2P (1987-1996), Palapa-B2R (1990-1999), Palapa-B4 (1992-2004), TELKOM-1 (1999-2008). Seluruh satelit tersebut telah menjadi bagian sejarah pertelekomunikasian Indonesia.

Untuk memelihara dan mempertahankan pertumbuhan kami di lingkungan industri yang kompetitif, TELKOM bertransformasi dari perusahaan *InfoComm* menjadi perusahaan TIME (Telekomunikasi, Informasi, Media, *Edutainment*) dengan mempertahankan bisnis *legacy* dan mengembangkan bisnis *new wave*. *New* TELKOM telah diperkenalkan kepada publik pada tanggal 23 Oktober 2009 bertepatan dengan ulang tahun TELKOM ke-153 yang menghadirkan *tagline* baru '*the world in your hand*' dan *positioning* baru '*Life Confident*'. Dengan logo barunya, TELKOM berkomitmen untuk memberikan ke seluruh pelanggan TELKOM kepercayaan diri untuk menjalani kehidupan yang mereka pilih, sesuai dengan cara dan waktu mereka.

Struktur Bisnis dan Organisasi

INFORMASI MENGENAI ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

ANAK PERUSAHAAN KONSOLIDASIAN

Lihat Catatan 1d Laporan Keuangan Konsolidasian

PERUSAHAAN ASOSIASI NON –KONSOLIDASI

Kepemilikan Langsung

PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom")

Patrakom didirikan pada bulan September 1995 dan sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Tahunan ini, sahamnya dimiliki oleh TELKOM (40%), PT Elnusa (40%) dan PT Tanjung Mustika (20%). Patrakom menyediakan layanan komunikasi satelit ("VSAT") dan layanan serta fasilitas terkait kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan.

PT Citra Sari Makmur ("CSM")

CSM didirikan pada bulan Pebruari 1986 dan sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini, pemegang sahamnya adalah TELKOM (25%), PT Tigatra Media (38,29%) dan Media Trio (L) Inc. Malaysia (36,71%), CSM didirikan di Indonesia dan menyediakan layanan telekomunikasi terkait dengan aplikasi VSAT dan teknologi telekomunikasi lainnya, serta fasilitas terkait.

PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN")

PSN didirikan pada bulan Juli 1991 dan sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Tahunan ini, mayoritas sahamnya dimiliki oleh Magic Alliance Labuan Limited (24,06%), lalu sisanya TELKOM (22,38%) Bank of New York (9,97%), Pulsa Labuan Limited (3,95%), Skaisnetindo Teknotama (1,83%), PT Trinur Cakrawala (3,75%), Hughes Space and Communications International (3,71%), Telesat Canada (3,71%) dan lainnya (26,64%). PSN menyediakan layanan sewa transponder satelit dan komunikasi berbasis satelit ke negara-negara Asia Pasifik. PSN melaksanakan penawaran saham perdana atas saham biasa dan mencatatkan sahamnya di NASDAQ pada bulan Juni 1996, tetapi keluar dari pencatatan pada tanggal 6 Nopember 2001 sehubungan dengan kegagalannya memenuhi persyaratan tertentu NASDAQ *National Market Listing*.

Sebagai bagian dari perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2003 antara TELKOM dan Centralindo Pancasakti Cellular ("CPSC"). TELKOM berhak menerima kepemilikan CPSC sebesar 21,12% di PSN dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal perjanjian ditandatangani. Selama waktu tersebut, seluruh hak CPSC sehubungan dengan saham tersebut diberikan kepada TELKOM. TELKOM menerima saham CPSC di PSN pada tanggal 9 Agustus 2004, sehingga meningkatkan hak kepemilikan perusahaan di PSN menjadi 43,69%. Pada tahun 2005, hak kepemilikan TELKOM di PSN terdilusi menjadi 35,5% sebagai hasil dari program konversi *debt to-equity* oleh PSN. Pada tahun 2006, hak kepemilikan TELKOM di PSN terus berkurang menjadi 22,38% sebagai akibat dari penerbitan saham baru tambahan kepada para pemegang saham baru.

TELKOM telah memiliki 40% saham Patracom, 25% saham CSM, 22,38% saham PSN dan pada sejumlah perusahaan lainnya

Sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini, TELKOM sedang mengevaluasi biaya dan keuntungan terkait dengan peningkatan kepemilikan TELKOM di PSN untuk mengembangkan layanan berbasis satelit ritel seperti seluler melalui satelit dan untuk mendukung program pemerintah untuk menyediakan sambungan telekomunikasi ke daerah-daerah terpencil.

PT Batam Bintan Telekomunikasi ("BBT")

BBT didirikan pada bulan Juni 1996 dan pada tanggal laporan tahunan ini disusun, TELKOM menguasai (5%) sahamnya dan Batamindo Investment (95%). BBT menyediakan layanan telekomunikasi sambungan kabel tidak bergerak di Kawasan Industri Batamindo di Muka Kuning, Pulau Batam dan Bintan Beach International Resort serta Kawasan Industri Bintan di Pulau Bintan.

PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia ("Bangtelindo")

Bangtelindo didirikan pada bulan Desember 1993 di Indonesia. Para pemegang saham Bangtelindo terdiri dari TELKOM (2,11%), Dana Pensiun TELKOM (54,23%) dan pihak lain (43,66%). Kegiatan usaha utama Bangtelindo adalah menyediakan jasa konsultasi untuk pemasangan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi.

Kepemilikan Tidak Langsung

Bridge Mobile Pte. Ltd.

Pada tanggal 3 Nopember 2004, Telkomsel bersama enam operator seluler internasional lain di Asia Pasifik mendirikan Bridge Mobile Pte. Ltd. (Singapura), suatu perusahaan yang bergerak dalam penyediaan layanan seluler regional di Wilayah Asia Pasifik.

Telkomsel sebelumnya menguasai 14,29% sahamnya. Pada tahun 2005, hak kepemilikan Telkomsel di Bridge Mobile Pte. Ltd. berkurang menjadi 12,5% sebagai akibat dari dikeluarkannya saham oleh Bridge Mobile Pte. Ltd. ke pemegang saham baru, yaitu Hong Kong CSL Limited.

Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani tanggal 18 Juni 2007, pihak-pihak terkait telah menyetujui bergabungnya SK Telecom Co., Ltd dan Advanced Info Service Public Company Limited sebagai pemegang saham Bridge Mobile yang baru. Pada tahun 2007, hak kepemilikan Telkomsel atas Bridge Mobile Pte. Ltd. menurun menjadi 10,81%.

Pada tahun 2007, Telkomsel telah membayar untuk tambahan hak kepemilikan saham sebesar 1.200.000 Dolar AS (setara dengan Rp11.069 juta).

Sampai dengan 31 Desember 2007 dan 2008, kontribusi Telkomsel yang mewakili hak kepemilikan 10% adalah sebesar 2.200.000 Dolar AS (Rp20.360 juta).

Scicom ("MSC") Bhd

Scicom merupakan perusahaan penyedia jasa *contact centre* yang didirikan di Malaysia. Pada tanggal 31 Desember 2007, TII membeli 2.475.100 saham Scicom atau 0,9% dari total saham perusahaan tersebut.

Pada tahun 2008, TII kembali membeli 23.524.900 saham Scicom atau 8,88%. Hingga tanggal penyusunan Laporan Tahunan ini, TII telah menguasai 26.000.000 saham Scicom atau mewakili 9,80% total saham dengan nilai transaksi mencapai 3,42 juta Dolar AS (setara dengan Rp30.961 juta).

Pada tahun 2009, TII membeli tambahan 16.081.800 saham Scicom dengan nilai transaksi sebesar 1.973 juta Dolar AS (setara dengan Rp18.760 juta), sehingga kepemilikan saham TII di Scicom meningkat menjadi 15,86%.

Pada tanggal 3 Februari 2010, TII membeli lagi 3.042.400 saham Scicom dengan nilai transaksi sebesar 0,42 juta Dolar AS (setara dengan Rp3.905 juta), sehingga kepemilikan saham TII di Scicom meningkat menjadi 17,01%.

PT Mandara Selular Indonesia ("MSI"), sebelumnya disebut PT Mobile Selular Indonesia ("Mobisel")

Pada tanggal 13 Januari 2006, TELKOM menjual seluruh hak kepemilikannya di MSI kepada pihak ketiga, yaitu *Twinwood Venture Limited*. Keuntungan yang diperoleh tidak signifikan pada laporan pendapatan konsolidasian perusahaan.

Struktur Organisasi TELKOM

Struktur organisasi TELKOM terdiri dari Corporate Office Group, yang terdiri dari Direktorat Human Capital & General Affairs, Direktorat Keuangan, Direktorat Information Technology & Supply, Direktorat Compliance & Risk Management, Unit Strategic Investment & Corporate Planning, Internal Audit Department, Corporate Affairs dan Corporate Communications Department. Sementara itu, Business Operations Group terdiri dari Direktorat Konsumer, Direktorat Enterprises & Wholesale dan Direktorat Network & Solution.

Direktorat Keuangan memfokuskan pada pengelolaan keuangan Perusahaan, mengelola operasi keuangan secara terpusat. Tugas ini dibebankan kepada Unit Finance Center. Direktorat Human Capital & General Affairs memfokuskan pada manajemen sumber daya manusia Perusahaan, mengelola fungsi dan operasional sumber daya manusia secara terpusat melalui Unit Human Resources Center.

Direktorat IT, di bawah Chief Information Officer (CIO), terfokus pada manajemen TI perusahaan serta *supply management* dan Information Service Center dan Supply Center. Kemudian Direktorat Compliance & Risk Management terfokus pada kepatuhan, manajemen hukum dan risiko manajemen Perusahaan.

Sementara itu, Direktorat Network & Solution terfokus pada pengembangan infrastruktur dan manajemen jasa selain itu mengarahkan operasional Divisi Infrastruktur Telekomunikasi, Divisi Multimedia, Divisi TELKOM Flexi, Research and Development Center dan Maintenance Service Center. Direktorat Konsumer terfokus pada pengelolaan pelayanan bagi segmen pasar ritel serta pengelolaan tujuh divisi regional.

Sementara itu, Direktorat Enterprise & Wholesale terfokus pada pengelolaan jalur pelayanan bagi segmen pasar *enterprise & wholesale* serta pengelolaan Divisi Enterprise Service dan Divisi Carrier & Interconnection Service.

Agar tercapai sinergi antara TELKOM dengan anak-anak perusahaannya, pada bulan April 2009, beberapa posisi strategis dibentuk. Posisi tersebut adalah Senior Vice President (SVP) yang langsung melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama TELKOM. Direktur Utama anak perusahaan tertentu secara bersamaan ditunjuk sebagai SVP yang terkait dengan sektor industri: seluler, *IT & adjacent*, dan bisnis internasional sebagai portofolio Perusahaan.

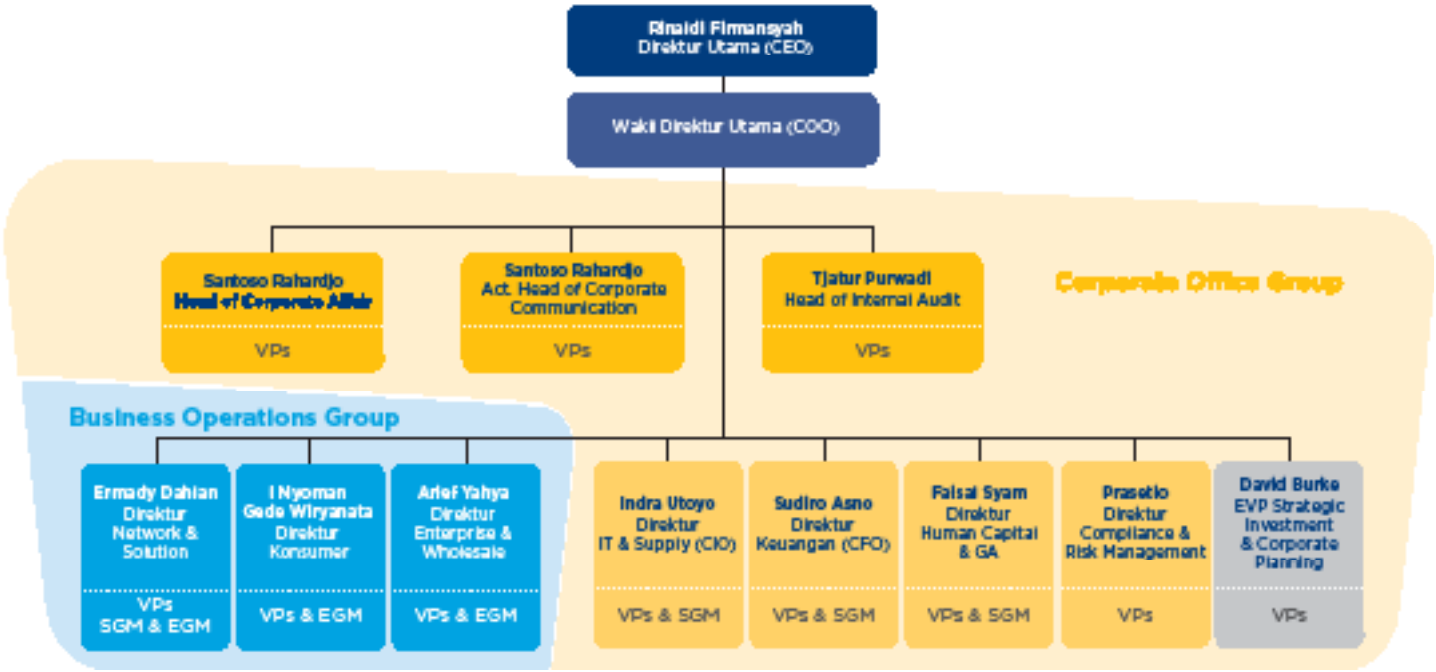

Untuk mempercepat dan memastikan proses pengambilan keputusan yang efektif, Direksi didukung oleh Komite Eksekutif, yang terdiri dari: Komite Etika, SDM & Organisasi; Komite *Costing, Tariff, Pricing & Marketing*; Komite *Corporate Social Responsibility*; Komite Regulasi; Komite *Disclosure*; Komite Pengelolaan Anak Perusahaan; Komite Produk, Infrastruktur dan Investasi; Komite Treasury, Keuangan dan Akuntansi; dan Komite Risiko. Penjelasan mengenai Komite Eksekutif dapat merujuk pada halaman 148.

Fondasi organisasi TELKOM dirancang dan dibangun untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang dengan fokus pada pemenuhan tingkat kepuasan pelanggan, pembangunan infrastruktur *cutting-edge*, penyediaan layanan berkualitas dan pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten.

P. SARTONO

P. Sartono, 65 tahun, menjabat Komisaris Independen TELKOM sejak tanggal 21 Juni 2002. Beliau menjadi karyawan TELKOM pada tahun 1972 dan menjabat sebagai *Corporate Secretary* sejak tahun 1992 hingga 1995, sebelum akhirnya pensiun di tahun 2000. Selama bekerja di TELKOM, beliau juga pernah menjabat berbagai posisi di Direktorat Jenderal Pos dan Komunikasi sejak tahun 1973 hingga 1985 dan menjabat sebagai Presiden Direktur PT Telekomindo Primabhakti tahun (1995-1998). Beliau menyandang gelar Sarjana dalam bidang hukum dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Management (Marketing) dari IPWI Jakarta. *Master of Law* dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM di Jakarta.

BOBBY A.A. NAZIEF

Bobby A.A. Nazief, 50 tahun, telah menjabat Komisaris TELKOM sejak 19 September 2008. Beliau juga menjabat Penasihat Senior TI bagi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, beliau pernah menjabat Penasihat Senior TI bagi Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Direktur Pusat Ilmu Komputer, Universitas Indonesia. Beliau juga dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Beliau meraih gelar PhD di bidang Ilmu Komputer dari Universitas Illinois di Urbana-Champaign.

TANRI ABENG

Tanri Abeng, 68 tahun, menjabat Komisaris Utama TELKOM sejak tanggal 10 Maret 2004. Sebelumnya beliau menjabat beberapa posisi penting, termasuk Komisaris PT Sepatu BATA sejak tahun 1989 hingga 1998, Presiden Direktur (1980-1991) dan Komisaris Utama (1991-1998) PT Multi Bintang Indonesia, Presiden Direktur PT Bakrie dan Brothers (1991-1998) dan Komisaris Utama PT British American Tobacco Indonesia (1993-1998). Sebagai anggota MPR RI sejak tahun 1993 hingga 1999 dan menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara sejak tahun 1998 hingga 1999. Menyandang gelar sarjana dari Universitas Hasanuddin, gelar Master of Business Administration dari State University of New York, Buffalo dan menyelesaikan Advanced Management Program di Claremont Graduate School di Los Angeles.

Profil Dewan Komisaris

MAHMUDDIN YASIN

Mahmuddin Yasin, 55 tahun, menjabat Komisaris TELKOM sejak 29 Juni 2007. Beliau merupakan Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi Kementerian BUMN setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Privatisasi BUMN dan Deputi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN"). Selain itu menjabat sebagai Komisaris Utama PT Socfin Indonesia sejak 11 April 2005 dan Komisaris Utama PT Pupuk Sriwijaya sejak 8 Juli 2004. Pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Rumah Sakit Kanker Dharmais (2001-2003) dan Komisaris PT Indo Farma, Tbk (2002-2003). Setelah berhasil meraih gelar sarjana dalam bidang Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, beliau berhasil meraih gelar MBA dari Washington University, St. Louis, USA.

ARIF ARRYMAN

Arif Arryman, 54 tahun, menjabat Komisaris Independen TELKOM sejak tanggal 21 Juni 2002. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank BNI Tbk selama empat tahun (2001-2005) dan sebagai penasihat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Beliau juga pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan dan saat ini juga menjabat sebagai komisaris independen PT Semen Gresik, Tbk. Arif Arryman meraih gelar sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung; gelar master dalam bidang Engineering dari Asia Institute of Technology, Bangkok, Thailand; Diplome d'Etude Approfondie dalam bidang Ekonomi dari Universite Paris-IX Dauphine, Perancis; dan gelar doctor dalam bidang Ekonomi dari Université Paris-IX Dauphine, Perancis.

Tabel Anggota Komisaris TELKOM sampai dengan 31 Desember 2009

Nama	Usia Per 31 Desember 2009	Jabatan	Sejak
Tanri Abeng	68	Komisaris Utama	10 Maret 2004
P. Sartono	65	Komisaris Independen	21 Juni 2002
Arif Arryman	54	Komisaris Independen	21 Juni 2002
Bobby A. A. Nazief	50	Komisaris	19 September 2008
Mahmuddin Yasin	55	Komisaris	29 Juni 2007

ERMADY DAHLAN

Ermady Dahlan, 57 tahun, diangkat sebagai Direktur Konsumer TELKOM pada tanggal 28 Februari 2007. Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris yang berlaku efektif 1 Maret 2008, beliau ditunjuk kembali untuk menduduki jabatan Direktur Network & Solution. Bergabung dengan TELKOM sejak tahun 1973, beliau pernah dipercaya menduduki posisi Executive General Manager Divisi Regional II (Jakarta). Beliau menyandang gelar dalam Bidang Telekomunikasi dari Akademi Telekomunikasi Nasional, Bandung.

RINALDI FIRMANSYAH

Rinaldi Firmansyah, 50 tahun, diangkat sebagai Direktur Utama TELKOM sejak tanggal 28 Februari 2007. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan TELKOM (2004-2007). Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bahana Securities (2003-2004), Presiden Direktur PT Bahana Securities (2001-2003), Komisaris dan Kepala Komite Audit PT Semen Padang pada tahun 2003. Setelah berhasil menyandang gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung, beliau meraih gelar MBA dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta. Beliau juga memiliki sertifikasi *Chartered Financial Analyst* ("CFA").

Profil Direksi

SUDIRO ASNO

Sudiro Asno, 53 tahun, diangkat sebagai Direktur Keuangan TELKOM sejak tanggal 28 Februari 2007. Sejak bergabung dengan TELKOM tahun 1985, beliau telah menduduki beberapa posisi di Direktorat Keuangan TELKOM sebelum akhirnya menjabat sebagai Senior General Manager di Finance Center. Beliau menyandang gelar Sarjana Ekonomi dalam Bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung.

I NYOMAN G WIRYANATA

I Nyoman G. Wiryanata, 51 tahun, diangkat sebagai Direktur Network & Solution TELKOM pada tanggal 28 Februari 2007. Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris yang berlaku efektif 1 Maret 2008, beliau ditunjuk kembali untuk menduduki jabatan Direktur Konsumer. Sejak bergabung dengan TELKOM tahun 1983, beliau pernah menjabat beberapa posisi di berbagai departemen termasuk menjabat sebagai Executive General Manager di Divisi Regional I (Sumatera). Beliau menyandang gelar sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Surabaya dan gelar Master dalam *Business Administration* dari Institut Manajemen Prasetya Mulya.

Tabel Anggota Direksi TELKOM sampai dengan 31 Desember 2009

Nama	Usia per 31 Desember 2009	Jabatan	Sejak
Rinaldi Firmansyah	50	Direktur Utama	28 Februari 2007
Sudiro Asno	53	Direktur Keuangan	28 Februari 2007
Faisal Syam	54	Direktur Human Capital & General Affairs	28 Februari 2007
I Nyoman G Wiryanata	51	Direktur Konsumer	1 Maret 2008
Ermady Dahlan	57	Direktur Network & Solution	1 Maret 2008
Arief Yahya	49	Direktur Enterprise & Wholesale	24 Juni 2005
Prasetio	50	Direktur Compliance & Risk Management	28 Februari 2007
Indra Utoyo	48	Direktur Information Technology & Supply	28 Februari 2007

FAISAL SYAM

Faisal Syam, 54 tahun, diangkat sebagai Direktur Human Capital & General Affair TELKOM sejak 28 Februari 2007. Bergabung dengan TELKOM sejak tahun 1983, dan beliau pernah menjabat beberapa posisi di berbagai departemen termasuk Senior General Manager Human Resource Center. Beliau menyandang gelar Sarjana Matematika dari Universitas Sumatera Utara dan gelar MM dari Sekolah Tinggi Manajemen Bandung ("STMB").

PRASETIO

Prasetio, 50 tahun, menjabat sebagai Direktur Compliance & Risk Management sejak 28 Februari 2007. Beliau bergabung dengan TELKOM tahun 2006 sebagai Executive Vice President Risk Management, Legal & Compliance. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Chief Financial Officer di PT Merpati Nusantara Airlines sampai tahun 2005. Sempat bergabung dengan Bank BNI sebagai penasehat Direktur Utama pada tahun 2004. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Airlangga, gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Gadjah Mada, dan Asian Institute Management, Manila, Kellog University of Chicago, Illinois, serta The Wharton School of Management, University of Pennsylvania, Philadelphia.

ARIEF YAHYA

Arief Yahya, 49 tahun, menjabat sebagai Direktur Enterprise & Wholesale TELKOM sejak 24 Juni 2005. Sejak bergabung dengan TELKOM tahun 1986, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Regional V (Jawa Timur) dan Kepala Divisi Regional VI (Kalimantan). Beliau menyandang gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung dan gelar Master dalam *Telecommunications Engineering* dari University of Surrey.

INDRA UTOYO

Indra Utoyo, 48 tahun, diangkat sebagai Direktur IT & Supply TELKOM pada tanggal 28 Februari 2007. Bergabung dengan TELKOM sejak tahun 1986 dan sebelumnya menjabat sebagai Senior General Manager Information System Center. Beliau menyandang gelar sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung dan gelar Master dalam *Communication and Signal Processing* dari Imperial College of Science, *Technology and Medicine*, University of London.

Jajaran Manajemen Senior

Santoso Rahardjo
Head of Corporate Affair

Tjatur Purwadi
Head of Internal Audit

David Burke
EVP Strategic Investment & Corporate Planning

Joddy Hernady
VP Corporate Strategic Planning

Honesty
VP Strategic Business Development

Eddie Wibawa
VP Business Portfolio & Synergy

Budhi Santoso
VP Business Performance Evaluation

Ahmad Kordinal
VP Corporate Office Support

Eddy Kurnia
VP Public and Marketing Communication

Herdy Rosadi Harman
VP Regulatory Management

Johni Girsang
VP Product Owner Audit IA

Mohammad Nuhin
VP Delivery Channel Audit

Hery Bowopoernomo
VP General Services IA

David Bangun
VP Infrastructure & Service Planning

Anie Sulistiani Soendjojo
VP Network Operation

Dwi Sasongko Purnomo
VP Tariff

Budi Siswanto Muljadi
VP Enterprise

Syarif Syarial Ahmad
VP Wholesale

Arief Musta'in
VP Product Management

Teni Agustini
VP Marketing & Customer Care

Bagyo Nugroho
VP Sales

Sutoto
VP Supply Planning & Control

Halim Sulasmono
VP IT Policy

Syamsul Bahri
VP Asset Management

Ikhsan
VP System Risk Management

Teddy Tedja Permana
VP Legal & Compliance

Michael Gatut Awantoro
VP Business Effectiveness

Djaka Sundan
VP Organization Development

Wien Aswantoro Waluyo
VP Industrial Relation

Martinus Wisnu Adji
VP Financial & Logistic Policy

Teguh Wahyono
VP Management Accounting

Ofan Sofwan
VP Treasury & Tax Management

Sunarto
VP Financial Accounting

Agus Murdiyatno
VP Investor Relation / Corporate Secretary

Mas'ud Khamid
EGM Divisi West Consumer Service

Tri Djatmiko
EGM Divisi East Consumer Service

Slamet Riyadi
EGM Divisi Business Service

Abdus Somad Arief
EGM Divisi Enterprise Service

Tutut Arief Bahtiar
EGM Divisi Carrier & Interconnection Service

Edy Irianto
EGM Divisi Infrastruktur Telekomunikasi

Muhammad Awaluddin
EGM Divisi Access

Ruslan Rustam
EGM Divisi Multimedia

Triana Mulyatsa
EGM Divisi TELKOMFlexi

Otong Iip
SGM Finance Center

Nilawati Djuanda
SGM Maintenance Service Center

Mustapa Wangsaatmadja
SGM Research & Development Center

Judi Rifajantoro
SGM Information Service Center

Ketut Suwirya Kardha
SGM Supply Center

Alini Gilang
SGM HR Center

Rizkan Chandra
SGM Learning Center

Deddy Kurniadi
Pgs. Head of Management Consulting Center

Freddy Triani
Koordinator Project Management Office

Produk dan Layanan

Selain melalui restrukturisasi perusahaan, kami melaksanakan transformasi bisnis melalui sejumlah tahapan lainnya, di antaranya pengembangan usaha yang ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang dapat menyediakan peluang yang signifikan pada waktu yang sama. Sebagai operator telekomunikasi terpadu, kami telah melakukan pengembangan usaha yang berbasis pada telepon tidak bergerak kabel, telepon tidak bergerak nirkabel, seluler, data & internet serta *network* & interkoneksi untuk memenuhi kebutuhan seluruh segmen pelanggan, baik pelanggan biasa, pelanggan korporasi, ataupun operator telekomunikasi berlisensi lainnya.

Keberhasilan pengembangan usaha yang telah dilakukan memungkinkan kami dalam mensinergikan seluruh potensi yang dimiliki sehingga dapat memposisikan diri sebagai penyedia total solusi kepada para pelanggan dan memperkuat posisi kami dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat. TELKOM Group telah memainkan sinergi dalam berbagai kegiatan pemasaran dan promosi.

TELKOM Group menawarkan lebih dari 200 produk dan layanan yang dikelompokkan berdasarkan portofolio bisnis. Produk dan layanan kami dapat dikelompokkan sebagai berikut: sambungan telepon tidak bergerak kabel, sambungan telepon tidak bergerak nirkabel, seluler, data & internet dan *network* & interkoneksi.

SAMBUNGAN TELEPON TIDAK BERGERAK KABEL

TELKOMLokal. TELKOMLokal adalah layanan untuk panggilan antar pelanggan tetap, dalam jarak kurang dari 30 km atau di dalam satu wilayah (*boundary*) lokal. Tarif yang dikenakan adalah tarif telepon lokal, yaitu Rp250 per pulsa.

TELKOMSLJJ. TELKOMSLJJ, panggilan SLJJ (Sambungan Langsung Jarak Jauh), adalah layanan telepon jarak jauh dalam wilayah Indonesia. Nomor pemanggil dan nomor yang dipanggil berbeda wilayah kode area. Biaya

penggunaannya tergantung pada jarak, waktu dan tanggal panggilan itu dilakukan.

TELKOMSLI-007. Sebelumnya layanan ini, dijuluki dengan TELKOM International Call ("TIC") 007, sesuai dengan saat diluncurkan pada bulan Juni 2004. Pada bulan Mei 2006, kami mengubah namanya menjadi TELKOMSLI-007. TELKOM SLI-007 adalah layanan jasa komunikasi antar negara dengan menggunakan kode akses 007. Layanan ini juga dilengkapi dengan panggilan melalui bantuan operator dengan memutar nomor akses 107.

TELKOMSpeedy. Speedy Broadband Access merupakan layanan internet pita lebar yang memanfaatkan teknologi *Asymmetric Digital Subscriber Line* ("ADSL") dengan kecepatan tinggi hingga 3 Mbps (*downstream*). Speedy menyediakan layanan data, *multimedia* dan telepon/fax secara bersamaan (simultan) dengan hanya menggunakan saluran telepon kabel yang sudah ada.

SAMBUNGAN TELEPON TIDAK BERGERAK NIRKABEL

TELKOMFlexi. TELKOMFlexi adalah layanan telekomunikasi suara dan data yang berbasis nirkabel dengan teknologi CDMA (*Code Division Multiple Access*) 2000-IX. Layanan ini terbatas pada satu kode area tertentu (*limited mobility*) dalam arti pelanggan hanya dapat menggunakannya dalam sebuah kode area tertentu. Biaya pemakaiannya mengacu pada tarif telepon rumah (PSTN TELKOM). TELKOMFlexi menawarkan tiga layanan dasar: suara, SMS dan data dengan kecepatan rendah. Layanan bernilai tambah juga tersedia seperti *Ring Back Tone* (RBT).

Salah satu keunggulan TELKOMFlexi adalah kualitas suara yang jernih dan radiasi yang rendah serta jenis terminal yang bisa digunakan pelanggan beragam mulai dari terminal *mobile* maupun terminal *fixed*. Pelanggan yang menggunakan perangkat *mobile* dapat memilih layanan pascabayar (FLEXIClassy) dan prabayar (FLEXITrendy), sementara untuk pelanggan yang menggunakan perangkat *fixed* dapat menggunakan *Fixed Wireless Terminal* (FWT) untuk mengakses FLEXIHome yang berbasis sistem ESN (*Non Sim Card*).

Salah satu produk TELKOMFlexi yang paling kompetitif adalah FLEXICombo yang memungkinkan pelanggan memiliki dua sampai tiga nomor dalam satu kartu sehingga memberikan mobilitas antar kota. FLEXICombo merupakan pengembangan layanan dari FLEXIClassy dan FLEXITrendy yang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sering menggunakan layanan roaming.

Pada bulan November 2008, kami mengimplementasikan FKIOSK yaitu sistem yang memungkinkan TELKOMFlexi dapat menyediakan layanan *voucher electronic (e-voucher)*. Selanjutnya prosentase penjualan *e-voucher* akan ditingkatkan sehingga dapat melebihi penjualan *voucher* fisik.

Pada Mei 2009 kami meluncurkan layanan yang sangat dibutuhkan pelanggan yaitu *Long SMS* (LMS), yang sebelumnya pelanggan TELKOMFlexi hanya dapat mengirimkan SMS dengan panjang maksimal 160 karakter.

Dengan adanya layanan LMS maka pelanggan TELKOMFlexi kini dapat mengirimkan SMS setara dengan 6 × 160 karakter.

DATA DAN INTERNET

TELKOMGlobal-01017. TELKOMGlobal-01017 merupakan layanan premium panggilan *VoIP* internasional yang memanfaatkan jaringan internet dengan kode akses 01017 untuk panggilan ke lebih dari 253 kode negara tujuan. Tarif layanan ini adalah 76,9% dari tarif SLI untuk semua negara dan tidak mengenal *timeband* (tarif flat untuk setiap waktu). Layanan TelkomGlobal 01017, tidak memerlukan perangkat tambahan untuk mengakses dan hanya dengan metode *one stage dialing*.

TELKOMSave. TELKOMSave adalah layanan panggilan jarak jauh dan panggilan internasional *VoIP* standar, sejenis dengan TELKOMGlobal- 01017. TELKOMSave merupakan layanan yang menggunakan metode *dialing* dua tahap. Agar dapat melakukan panggilan internasional atau panggilan jarak jauh, pelanggan terlebih dahulu harus memutar nomor akses, memasukkan nomor PIN, selanjutnya memutar nomor tujuan. Tarif layanan yang dikenakan adalah 69% dari tarif SLI. Pelanggan pascabayar dan prabayar dapat memanfaatkan layanan ini.

TELKOMNet Instan. TELKOMNet Instan merupakan layanan akses internet *dial-up* tanpa perlu berlangganan dan khusus dirancang dengan konsep yang mudah dan sederhana untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas. Dalam menggunakan layanan ini, pelanggan cukup mengakses konfigurasi koneksi internet di komputer dan mengisi *dial number* dengan 0809 8 9999 Pada saat *login*, pelanggan cukup mengisi *user name*: telkomnet@instan dan *password*: telkom. Biaya pemakaian dibebankan berdasarkan lama waktu pemakaian dan biaya pemakaian tersebut disatukan dengan tagihan penggunaan telepon.

plasa.com (www.plasa.com). Layanan *portal web* kami yang menyajikan layanan informasi serta komunitas internet berbahasa Indonesia dengan fokus layanan pada komunitas pendidikan nasional.

plasa.com memiliki beberapa layanan portal di antaranya: layanan *email* gratis, *online web forum, online classified ads services, online blogging* untuk *netters, electronic cards services, online webchat services dan IRC-like webchat, online messaging services, RSS news clips* dan Komunitas Sekolah Indonesia ("KSI").

Kartu i-VAS. Untuk mendukung para pengguna internet, kami mengeluarkan kartu *Internet Value Added Service* ("i-VAS") yang merupakan alat pembayaran (*micropayment*) prabayar untuk mengakses berbagai konten atau layanan internet.

Kartu i-VAS ini ditujukan untuk menjadi alat pembayaran *online* terpercaya yang dapat memfasilitasi proses pembayaran dengan nilai nominal yang tidak terlalu besar dan tidak bisa menggunakan kartu kredit.

Ventus. Ventus merupakan layanan bernilai tambah dan konvergensi antara *email* dan sistem seluler (*mobile*) atau lebih dikenal dengan istilah *mobile push email* yang memungkinkan pengguna seluler melakukan *relay email* yang umumnya dihubungkan via *desktop* dan laptop di alihkan ke *smartphone* (telepon seluler) atau telepon PDA. Melalui Ventus, pemilik *account email* dapat menerima atau mengirim pesan elektronik, tidak hanya melalui SMS melainkan dapat melalui terminal telepon seluler atau PDA.

Ventus termasuk layanan multimedia untuk Penyedia Jasa Aplikasi ('PJA"), kami berfungsi sebagai sistem *relay* atas berbagai sistem *e-mail* yang dimiliki pelanggan atau sistem *e-mail* yang kami kelola bagi pengguna akhir. Sebagai penyedia jasa aplikasi, kepada pelanggan kami akan memungut biaya sewa atas pemakaian aplikasi Ventus secara bulanan ditambah dengan biaya kilobyte atas pemakaian layanan GPRS atau PDN yang disediakan oleh operator seluler atau nirkabel. Ventus juga dapat digunakan oleh perusahaan yang mengoperasikan sistem *e-mail* sendiri sebagai sebuah aplikasi vital dan gabungan dalam menunjang kegiatan bisnis.

JARINGAN DAN INTERKONEKSI

TELKOMIntercarrier. TELKOMIntercarrier merupakan layanan interkoneksi untuk penyelenggara jasa dan jaringan lainnya (*other licensed operator*/OLO). TELKOMIntercarrier menyediakan layanan interkoneksi domestik dan internasional, layanan satelit, penyewaan jaringan (*leased line*), penggunaan bersama akan infrastruktur dan fasilitas, layanan data dan layanan akses jaringan.

TELKOMVision. TELKOMVision merupakan *brand name* dari PT Indonusa Telemedia, anak perusahaan kami yang bergerak di bidang TV berbayar. Layanan yang diberikan TELKOMVision terdiri dari TV kabel, akses internet cepat dan TV satelit.

TV kable menggunakan *Hybrid Fiber Coaxial* ("HFC"), suatu teknologi yang menggabungkan dua *physical access* yaitu serat optik dan kabel *coaxial*. Saluran TV premium seperti HBO, Cinemax dan Star Movie juga disediakan dalam satu paket dasar tanpa harus menambah biaya sewa bulanan.

Pelanggan TELKOMVision dapat menggunakan layanan internet pita lebar dengan kecepatan tinggi (30 Mbps *downstream* dan 512 Kbps *upstream*), tanpa batas waktu dan tanpa tagihan pulsa tambahan. Dengan menyediakan kabel modem *Data Over Cable Service Interface Specification* ("DOCSIS") 1.0, pelanggan sudah dapat tersambung dengan jaringan TELKOMNet melalui Divisi Multimedia kami.

Selain melalui jaringan kabel, TELKOMVision juga melayani TV Satelit *Direct to Home* ("DTH") yang menggunakan infrastruktur satelit TELKOM, yaitu satelit TELKOM-1 dan TELKOM-2 dengan teknologi perpanjangan *C-band* dengan tambahan perangkat berupa parabola mini dan dekoder.

SELULER

Telkomsel merupakan penyedia layanan telekomunikasi seluler dengan teknologi GSM dan 3G. Melalui penawaran serangkaian produknya, seperti kartuHALO, *sim*PATI dan Kartu As, Telkomsel menawarkan layanan pascabayar dan layanan prabayar. Para pelanggan dan pengguna Telkomsel mendapatkan beragam fitur, aplikasi dan layanan bernilai tambah (*value added service*), termasuk SMS, WAP, GPRS, MMS, Wi-Fi, *roaming internasional, mobile banking*, CSD dan EDGE. Seluruh fitur layanan tersebut didukung oleh jangkauan sinyal yang luas dan tarif yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan komunikasi dan multimedia.

kartuHALO. kartuHALO diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 dan merupakan kartu pascabayar yang paling banyak digunakan. Pada akhir tahun 2009 kami memiliki 2 (dua) juta pelanggan kartuHALO. Dengan pangsa pasar sekitar 38,2% dari pelanggan pascabayar, kartuHALO tetap menjadi pemimpin pasar pada segmen ini. kartuHALO memiliki tiga pilihan layanan, yaitu HALOkeluarga untuk paket layanan keluarga, HALObebas yang menawarkan sejumlah paket termasuk tarif khusus untuk panggilan ke 10 nomor favorit, gratis 150 SMS per bulan, gratis biaya abonemen dan tarif flat nasional serta HALOHybrid yang merupakan layanan pascabayar yang dapat diubah kapanpun menjadi layanan prabayar sewaktu-waktu atau sampai batas penggunaan telepon dicapai.

*sim*PATI. Produk ini merupakan kartu prabayar pertama dan terpopuler di Asia dan merupakan produk Telkomsel yang paling sukses. Perbedaan dengan layanan prabayar operator lainnya adalah *sim*PATI memberikan jasa *roaming* internasional dan bebas *roaming* nasional/domestik. Keunggulan kompetitif lain dari *sim*PATI adalah fitur keamanannya (bebas dari penyadapan dan penggandaan), kemudahan akses serta harga yang terjangkau. Seluruh pelanggan *sim*PATI akan mendapat nilai layanan yang optimal dan berkesinambungan akan penggunaan kartu tersebut.

Kartu AS. Diluncurkan pada tahun 2004 dan produk ini merupakan kartu prabayar yang murah dan terjangkau. Kartu AS dapat digunakan di seluruh Indonesia dengan tarif percakapan yang sangat kompetitif.

Peta Daerah Operasional

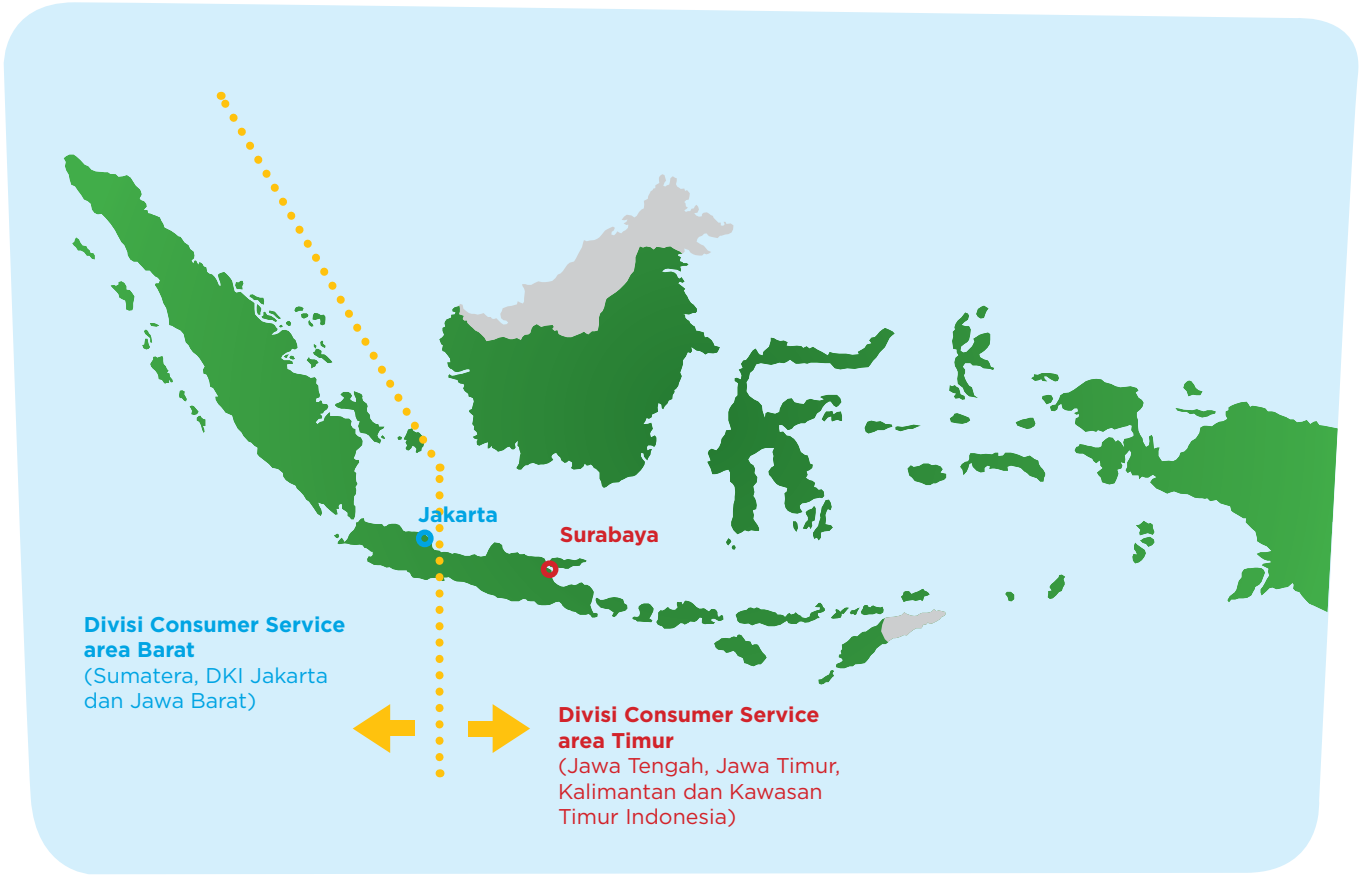
Jakarta
Surabaya
Divisi Consumer Service area Barat
(Sumatera, DKI Jakarta dan Jawa Barat)
Divisi Consumer Service area Timur
(Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia)

Aset Tetap

Kecuali untuk hak kepemilikan yang diberikan kepada perorangan di Indonesia, hak atas tanah dipegang oleh negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Agraria No. 5/1960. Peruntukan tanah dilaksanakan melalui hak atas tanah, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Pemegang hak atas tanah menikmati penggunaan penuh tanah untuk jangka waktu yang dinyatakan, dan dapat diperbaharui serta diperpanjang. Hampir dalam setiap hal, hak atas tanah dapat diperdagangkan dengan bebas dan dapat digadaikan sebagai jaminan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Sampai dengan 31 Desember 2009, Kami, tidak termasuk anak perusahaan, memiliki hak guna tanah atas 2.452 properti. Kami memegang hak guna bangunan resmi untuk mayoritas tanah dan bangunannya. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, jangka waktu awal maksimum untuk hak guna bangunan adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk tambahan 20 tahun. Sebagian besar tanah dan bangunan Kami digunakan untuk menampung peralatan untuk penyediaan operasi telekomunikasi termasuk sentral telepon, stasiun transmisi dan peralatan radio gelombang mikro. Tidak ada satupun dari properti kami yang dihipotikkan. Kami tidak melihat adanya persoalan lingkungan yang dapat berdampak pada penggunaan properti TELKOM.

Alamat Perusahaan

KANTOR PUSAT

GKP TELKOM
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 1108, 452 7252
Fax : (62-22) 720 3247

DEPARTEMEN CORPORATE COMMUNICATIONS
Gedung Grha Citra Caraka, Lantai 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 52
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 521 5109
Fax. : (62-21) 522 0500

DIVISI CONSUMER SERVICE BARAT
Gedung Grha Citra Caraka, Lantai 4
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 52
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 521 5100, 521 5105
Fax. : (62-21) 520 2733

DIVISI CONSUMER SERVICE TIMUR
Jl. Ketintang No. 156
Surabaya 60231
Tel. : (62-31) 828 6000, 828 6250
Fax. : (62-31) 828 6080

DIVISI BUSINESS SERVICE
Jl. S. Parman Kav. 8, Lantai 2,
Jakarta Barat 11440
Tel : (62-21) 564 6500
Fax. : (62-21) 565 2800

DIVISI ACCES (DIVA)
Gedung Grha Citra Caraka, Lantai 7
Jl. Jendral Gatot Subroto No. 52
Jakarta 12710
Tel : (62 – 21) 529 0348, 520 3939
Fax. : (62 – 21) 522 1300

DIVISI INFRATEL
Gedung Grha Citra Caraka, Lantai M
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 52
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 522 1500
Fax. : (62-21) 522 9600

DIVISI ENTERPRISE SERVICES
Gedung Chase Plaza, Lantai 22
Jl. Sudirman Kav.21
Jakarta 12910
Tel. : (62-21) 386 6600, 386 0068
Fax. : (62-21) 386 8400

UNIT CORPORATE CUSTOMER
Jl. Kebon Sirih Kav. 10-12
Jakarta Pusat 10110
Tel. : (62-21) 386 6006
Fax. : (62-21) 380 5800

DIVISI MULTIMEDIA
Menara Multimedia, Lantai 17
Jl. Kebon Sirih No. 12
Jakarta 10110
Tel. : (62-21) 386 0500
Fax. : (62-21) 386 0300

DIVISI TELKOMFLEXI
Grha Flexi
Jl. Kebon Sirih Raya No. 36
Jakarta 10110
Tel. : (62-21) 344 7070
Fax. : (62-21) 344 0707

MAINTENANCE SERVICE CENTER
GKP TELKOM, Lantai 4
Jl. Japati No.1
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 4120, 452 4129
Fax. : (62-22) 452 4125

TELKOM LEARNING CENTER
Jl. Gegerkalong Hilir No. 47
Bandung 40152
Tel. : (62-22) 201 4508, 201 4441
Fax. : (62-22) 201 4429

TELKOM SUPPLY CENTER
GKP TELKOM, Lantai 6
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 6170
Fax. : (62-22) 720 6583

RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER
Jl. Gegerkalong Hilir No. 47
Bandung 40152
Tel. : (62-22) 457 4784
Fax. : (62-22) 457 1171, 201 3505

INFORMATION SYSTEM CENTER
GKP TELKOM, Lantai 4
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 4228
Fax. : (62-22) 720 1890 – (62-22) 452 1549

DIVISI CARRIER AND INTERCONNECTION SERVICES
Menara Jamsostek, Lantai 10
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 38
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 5291 7007
Fax. : (62-21) 5289 2080

MANAGEMENT CONSULTING CENTER
Jl. Cisanggarung No. 2
Bandung 40115
Tel. : (62-22) 452 1620, 452 1549
Fax. : (62-22) 721 7473

TELKOM COMMUNITY DEVELOPMENT CENTER
GKP TELKOM, Lantai 8
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 8219
Fax. : (62-22) 452 8206

ASSESSMENT SERVICE CENTER
GKP TELKOM, Lantai 3
Jl. Japati No. 1
Bandung 40133
Tel. : (62-22) 452 3359, 452 3360
Fax. : (62-22) 452 3344, 452 3355

ANAK PERUSAHAAN

PT TELEKOMUNIKASI SELULER
Wisma Mulia
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 42
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 524 0811 ext. 11520/11556
Fax. : (62-21) 529 06123

PT INFOMEDIA NUSANTARA
Jl. R.S. Fatmawati No. 77-81
Jakarta Selatan 12150
Tel. : (62-21) 720 1221
Fax. : (62-21) 720 1226

PT INDONUSA TELEMEDIA
Gedung Pusyantel, Lantai 3
Jl. Prof. Dr. Supomo No. 139, Tebet
Jakarta Selatan
Tel. : (62-21) 829 8800
Fax. : (62-21) 831 7400

PT GRHA SARANA DUTA
Jl. Kebon Sirih No. 10-12
Jakarta Pusat 10110
Tel. : (62-21) 380 0900/901
Fax. : (62-21) 348 30655

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL
Menara Jamsostek, Lantai 24
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38
Jakarta 12710
Tel. : (62-21) 2995 2300
Fax. : (62-21) 5296 2358

PT MULTIMEDIA NUSANTARA
The East Tower, Lantai 37
Jl. Lingkar Mega Kuningan
Kav E3/2 No. 1
Jakarta Selatan 12950
Tel. : (62-21) 521 0123
Fax. : (62-21) 521 0124

PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI
Gedung Grha Pratama, Lantai 5
Jl. M.T. Haryono Kav. 15
Jakarta 12810
Tel. : (62-21) 8370 9592/93
Fax. : (62-21) 8370 9591

PT PRAMINDO IKAT NUSANTARA
Gedung Plaza Kuningan Annex, Lantai 7 Suite 702
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C11-C14
Jakarta Selatan 12940
Tel. : (62-21) 520 2560
Fax. : (62-21) 529 2156

PERUSAHAAN ASSOSIASI

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
Wisma Indocement, Lantai 2
Jl. Jendral Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12910
Tel. : (62-21) 251 2147
Fax. : (62-21) 251 0436

Jl. Markisah, Batamindo Industrial Park
Batam 29433
Tel. : (62-770) 612 300
Fax. : (62-770) 612 200

PT CITRA SARI MAKMUR
Chase Plaza, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, No. 70-71
Jakarta 12910
Tel. : (62-21) 520 8311
Fax. : (62-21) 570 4656

PT FINNET INDONESIA
Menara Bidakara, Lantai 21
Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta 12870
Tel. : (62-21) 829 9999
Fax. : (62-21) 828 1999

PT PASIFIK SATELIT NUSANTARA
Gedung Kantor Taman
A9 Unit C3 & C4
Jl. Mega Kuningan Raya Lot 8/9 No. 9
Jakarta 12950
Tel. : (62-21) 576 2292
Fax. : (62-21) 576 4181

PT PATRA TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Jl. Pringgodani 2 No. 33
Alternatif Cibubur
Depok 16954
Tel. : (62-21) 845 4040
Fax. : (62-21) 845 7610

PT PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Jl. Mangga No. 4
Bandung 40114
Tel. : (62-22) 721 6282
Fax. : (62-22) 720 2596

PT SIGMA CITRA CARAKA
Menara DEA, Lantai 8
Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat IX
Kav. E43 No. 1
Tel. : (62-21) 576 2150
Fax. : (62-21) 576 2155

ARIAWEST INTERNATIONAL FINANCE B.V
Equity Trust Co. Nv.
Strawinskylaan 3105,
Atrium 7th Floor
1077 ZX Amsterdam
The Netherlands
Tel. : (31-20) 406 44 65
Fax. : (31-20) 642 76 75

PT BALEBAT DEDIKASI PRIMA
Jl. Veteran II No. 17 Teluk Pinang
Ciawi
Bogor 16720
Tel. : (62-251) 824 3338
Fax. : (62-251) 824 2552,
824 7761

SCICOM BHD
Business Office
Scicom (MSC) Berhad
Menara TA One, 25th Floor
22, Jalan P. Ramlee
50250 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel. : (60-3) 2162 1088
Fax. : (60-3) 2164 9820

PT Administrasi Medika
Gedung Arthaloka, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav.2
Jakarta 10220
Tel. : (62-21) 579 33299
Fax. : (62-21) 579 33266

BADAN PENDUKUNG PASAR MODAL DAN PROFESI
KUSTODIAN (BIRO ADMINISTRASI EFEK)

PT DATINDO ENTRYCOM
Jl. Jendral Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Tel. : (62-21) 5709009
Fax. : (62-21) 5708914

DEPOSITORY CENTRAL EFEK

PT. KUSTODIAN SAHAM EFEK INDONESIA
Gedung Jakarta Stock Exchange
Menara 1, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman, Kav.52-53
Jakarta, 12190
Tel. : (62-21) 5299 1004, 5299
1005, 5299 1006
Fax. : (62-21) 5299 1129

AGEN PEMERINGKAT

PT PEFINDO
Setiabudi Atrium, Lantai 8
Suite 809-810
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 62,
Jakarta 12920
Tel. : (62-21) 521 0077
Fax. : (62-21) 521 0078

CUSTODIAN BANK OF ADS

THE BANK OF NEW YORK MELLON DEPOSITARY RECEIPTS
101 Barclay Street
22nd Floor West
New York, NY 10286
Tel. : (1-212) 815 8162
Fax. : (1-212) 571 3050

AUDITOR EKSTERNAL

KAP TANUDIREDJA, WIBISANA & REKAN, A MEMBER FIRM OF PRICEWATERHOUSECOOPERS GLOBAL NETWORK (“PwC”)
Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav X7 No.6
Jakarta 12940
Tel. : (62-21) 521 2901
Fax. : (62-21) 5290 5555/ 5050

Lampiran

3G
Istilah umum untuk teknologi telekomunikasi seluler generasi ketiga. 3G menawarkan sambungan ke telepon seluler dengan kecepatan tinggi, yang memungkinkan *video conference* dan aplikasi lainnya dapat mengakses Internet melalui sambungan pita lebar. Dengan 3G, pelanggan dapat terhubung ke internet dari laptop dengan menggunakan telepon seluler dan kabel data atau menggunakan *PC card*.

ADS
American Depositary Share (yang juga dikenal dengan " ADR "), adalah sertifikat yang diperdagangkan di pasar sekuritas Amerika Serikat (seperti *New York Stock Exchange*) yang merepresentasikan sejumlah saham asing. Satu ADS TELKOM mewakili 40 saham Seri B TELKOM.

ARPU
Average Revenue Per User berfungsi sebagai statistik evaluasi terhadap jumlah pelanggan dari suatu operator jaringan. ARPU dihitung dengan membagi jumlah pendapatan (termasuk pendapatan kotor interkoneksi) untuk jangka waktu tertentu dengan menghitung rata-rata jumlah pelanggan, pada suatu periode tertentu tidak termasuk untuk layanan telepon seluler, biaya koneksi, pendapatan interkoneksi, pendapatan roaming internasional di luar pelanggan dan diskon dealer.

ATM
Asynchronous Transfer Mode adalah mode transfer yang disusun dalam bentuk sel-sel. Maksud asinkronus adalah pengulangan sel yang mengandung informasi dari pengguna tidak perlu periodik.

B2B
Business-to-Business Electronic Commerce adalah suatu teknologi yang memungkinkan lingkungan aplikasi memfasilitasi pertukaran informasi bisnis dan otomatisasi transaksi komersial yang didisain untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan interaksi antar mitra bisnis.

BACKBONE
Jaringan telekomunikasi utama yang terdiri dari fasilitas *switching* dan transmisi yang menghubungkan beberapa node akses jaringan. *Link* transmisi antara node dan fasilitas *switching* itu termasuk didalamnya *microwave*, kabel bawah laut, satelit, serat optik dan teknologi transmisi lainnya.

BANDWIDTH
Pita lebar, merujuk pada kapasitas link komunikasi.

BEI
Merujuk pada Bursa Efek Indonesia.

BRTI
Merujuk pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

BSC
Base Station Controller (BSC) adalah perangkat yang bertanggungjawab malakukan pengalokasan sinyal radio ke *mobile station*, melakukan administrasi frekuensi dan mengatur serah terima antar BTS-BTS yang berada dibawah kendalinya.

BSS
Base Station Subsystem (BSS) adalah bagian jaringan telepon seluler yang bertanggungjawab menangani lalu-lintas (*traffic*) dan pensinyalan antara telepon bergerak dengan *network switching subsystem* (NSS). BSS terdiri atas dua bagian yakni Base Transceiver Station (BTS) dan Base Station Controller (BSC).

BTS
Base Transceiver Station merujuk pada perangkat yang memancarkan dan menerima sinyal telefoni radio ke dan dari sistem telekomunikasi lain.

C BAND
C Band adalah bagian dari spektrum electromagnet gelombang mikro pada kisaran jelajah antara 4 sampai dengan 8 GHz. C Band merupakan pita frekuensi pertama yang diperuntukkan bagi komunikasi komersial antar bumi – satelit. Pada umumnya satelit C Band menggunakan 3,7 GHz-4,2 GHz untuk *downlink* (dari satelit ke bumi) dan 5,925 GHz-6,425 GHz untuk *uplink* (dari bumi ke satelit).

CBHRM
Competency Based Human Resource Management (CBHRM) merujuk pada pola pendekatan di dalam *system* pengelolaan sumber daya manusia dengan mendasarkan pada keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu secara efektif.

CDMA
Code Division Multiple Access adalah teknologi jaringan spektrum luas pita lebar.

DCS
Digital Communication System adalah sistem telepon seluler yang menggunakan teknologi GSM yang beroperasi dalam pita frekuensi 1800 MHz.

DEPKEU
Merujuk pada Departemen Keuangan

DEPKOMINFO
Merujuk pada Departemen Komunikasi dan Informasi, Pada bulan Februari tanggung jawab atas regulasi telekomunikasi tersebut dipindahkan dari Menhub.

DIRJEN POSTEL
Merujuk pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

DLD
Merujuk pada layanan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) seperti panggilan telepon jarak jauh dan layanan sirkis sewa.

DOWNLINK
Merujuk pada bagian penerimaan satelit yang menyebar dari satelit ke bumi.

DSL
Digital Subscriber Line adalah teknologi yang memungkinkan penggabungan beberapa layanan, yaitu suara, data dan gambar bergerak untuk dikirimkan melalui jaringan telepon tembaga.

DTH
Pemancaran satelit secara *Direct-to-Home* atau DTH adalah pemancaran sinyal televisi dari satelit geostasioner berdaya pancar kuat ke antena piringan kecil dan penerima satelit di rumah-rumah penduduk di bumi.

DUAL BAND
Mengacu pada kemampuan handset dan jaringan seluler untuk dapat beroperasi di dua frekuensi seperti frekuensi GSM 900 dan frekuensi 1800.

E-BUSINESS
Merujuk pada solusi bisnis elektronik yang mencakup layanan pembayaran elektronik, pusat data internet dan konten serta solusi aplikasi.

ERLANG
Merujuk pada satuan pengukuran trafik telepon yang sama dengan percakapan satu jam.

FTTX
(*Fiber to the X*) adalah terminologi generik untuk arsitektur jaringan pita lebar yang menggunakan serat optik untuk mengganti seluruh atau sebagian jaringan tembaga yang biasa digunakan pada sambungan akhir ke pelanggan. Terminologi generik ini digunakan sebagai generalisasi beberapa konfigurasi penggelaran serat optik seperti: *fiber to the home* (FTTH), *fiber to the node* (FTTN), *fiber to the building* (FTTB).

FIXED LINE
Mengacu pada Link Transmisi nirkabel lokal menggunakan seluler, microwave, atau teknologi radio untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal.

FWL
Fixed Wire Line (sambungan telepon tidak bergerak) merujuk pada telepon tidak bergerak kabel.

FWA
Fixed Wireless Access (telepon tidak bergerak nirkabel) merujuk pada link transmisi nirkabel lokal yang menggunakan teknologi seluler, gelombang mikro atau radio untuk menghubungkan link pelanggan di lokasi yang tetap ke sentral lokal.

FRAME RELAY
Packet-switching protocol (pesan dibagi menjadi paket-paket sebelum dikirim) untuk menghubungkan perangkat pada jaringan komputer yang membentang pada daerah geografis yang relatif luas.

GATEWAY
Peralatan yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan berbasis paket (*IP*) menuju jaringan berbasis sirkuit (PSTN).

GPRS
General Packet Radio Service adalah teknologi data packet switching yang memungkinkan informasi dikirim dan diterima pada jaringan mobile dan hanya menggunakan jaringan bila terdapat data yang harus dikirim.

GSM
Global System for Mobile Telecommunication adalah standar Eropa untuk telepon seluler digital.

HSPA
High Speed Packet Access adalah sekumpulan protokol telefoni bergerak yang memperpanjang dan memperbaiki kinerja protokol UMTS eksisting. Standar selanjutnya, Akses Paket berkecepatan tinggi yang telah ditingkatkan, Evolved High Speed Packet Access (HSPA+), adalah standar pita lebar nirkabel dalam *3GPP release 7*. HSPA ini menggunakan arsitektur *IP-centric* yang lebih sederhana untuk jaringan bergerak dan tanpa melalui sebagian besar dari peralatan *legacy*. HSPA+ memberikan kecepatan puncak 42 Mbits/detik untuk *downlink* dan 22 Mbits/detik untuk *uplink*.

INSYNC2014
INSYNC2014 yang merupakan singkatan dari Indonesia Synchronized 2014, master plan kami di bidang infrastruktur, layanan dan operasi yang menyediakan peningkatan solusi teknologi dalam pemenuhan kebutuhan gaya hidup khususnya kualitas layanan multimedia dengan harga yang bersaing. Mengacu pada master plan ini, kami telah meluncurkan berbagai layanan dan infrastruktur telekomunikasi yang berbasis teknologi NGN.

INFUSION 2008
Infusion 2008 adalah program kami dalam transformasi sistem bisnis perusahaan yang berbasis IT untuk menuju perusahaan kelas dunia. Infusion 2008 yang mentransformasikan sistem bisnis terpadu berbasis IT akan menjadi sarana yang memadukan dan mensinergikan lintas organisasi maupun group untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

IP
Internet Protocol, suatu metode atau protokol tempat data yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya melalui internet.

IP DSLAM
Internet Protocol Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Sebuah DSLAM memfasilitasi sambungan telepon untuk membuat koneksi yang lebih cepat ke internet. DSLAM adalah perangkat jaringan yang terletak di dekat lokasi pelanggan, yang menghubungkan sambungan pelanggan digital kepada backbone internet berkecepatan tinggi dengan menggunakan teknik *multiplexing*.

ISDN
Integrated Services Digital Network adalah jaringan yang menyediakan konektivitas digital end-to-end dan memungkinkan terwujudnya transmisi suara, data dan video dalam waktu bersamaan dan menghasilkan konektivitas internet kecepatan tinggi.

JARINGAN DATA PAKET
Jaringan data paket adalah jaringan komunikasi yang memecah dan menggabungkan data untuk dikirimkan dalam bentuk segmen-segmen yang dinamakan paket. yang selanjutnya diarahkan secara terpisah.

JARINGAN PINTAR
Jaringan telekomunikasi yang tidak bergantung pada layanan yang fungsi logic dikeluarkan dari switch dan ditempatkan dalam node komputer yang didistribusikan di seluruh jaringan. Dengan demikian tersedia sarana untuk mengembangkan dan mengontrol layanan dengan lebih efisien sehingga layanan telefoni baru atau yang canggih dengan cepat dapat diperkenalkan.

KAPASITAS SENTRAL LOKAL
merujuk pada jumlah sambungan keseluruhan di sentral lokal yang terhubung dan tersedia untuk hubungan ke instalasi luar.

KBPS
Kilobits per second adalah ukuran kecepatan transmisi sinyal digital yang dinyatakan dalam ribuan bit per detik.

KSO
Kerja Sama Operasi atau Pola Kerja Sama Operasi adalah jenis pola Bangun, operasi dan transfer yang unik dengan konsorsium mitra tempat konsorsium melakukan investasi pada dan mengoperasikan fasilitas TELKOM di divisi regional. Mitra konsorsium tempat TELKOM sebelumnya menjadi mitra yang dimiliki oleh operator internasional dan perusahaan domestik swasta atau, disisi lain TELKOM telah mengakuisisi mitra konsorsium. Sejak akuisisi yang dilakukan oleh TELKOM terhadap KSO VII pada bulan Oktober 2006, TELKOM tidak lagi melakukan skema kerjasama operasi dengan para mitra KSO.

LAN
Local Area Network adalah jaringan komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk memungkinkan berbagi informasi. Biasanya, LAN mencakup lokasi terbatas, contohnya dalam sebuah gedung.

LIS
Lines In Service, merujuk pada sambungan yang menghasilkan pendapatan yang terhubung ke pelanggan, termasuk telepon berbayar, tetapi tidak termasuk pelanggan telepon seluler atau sambungan yang digunakan dalam lingkup internal kami.

MASA KSO
Merujuk pada masa yang tercantum pada Perjanjian KSO

MENEG BUMN
Meneg BUMN adalah singkatan dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang sekarang berubah menjadi Menteri BUMN.

MHZ
Megahertz adalah satuan ukuran frekuensi. 1 MHz sama dengan satu juta siklus per detik.

MMS
Multimedia Messaging Services layanan yang memungkinkan pelanggan mengirimkan satu pesan multimedia atau Multimedia Message (MM) ke pelanggan penerima.

MODERN LICENSE
Lisensi operasi, disebutkan dalam Undang-Undang Telekomunikasi, yang menggantikan lisensi operasi yang saat ini ada untuk laynan telekomunikasi dasar.

MSAN
Multi Service Access Network atau Jaringan Layanan Multi Akses merupakan generasi ketiga dari teknologi *Optical Access Network* ("OAN") dan merupakan *platform single* yang mampu mendukung teknologi akses tradisional yang sudah digelar secara luas, disamping juga mampu mendukung teknologi baru, MSAN berfungsi sebagai gateway menuju inti NGN. MSAN memungkinkan TELKOM memberikan layanan triple play yaitu menyalurkan layanan high speed internet access (HSIA), *Voice packet* dan layanan *IPTV* secara bersamaan melalui infrastruktur yang sama.

NGN

Next Generation Network adalah istilah umum yang merujuk pada jaringan berbasis paket yang mampu menyediakan layanan-layanan termasuk layanan telekomunikasi, dan dapat memanfaatkan berbagai tingkatan pita lebar, teknologi *transport* yang memungkinkan penerapan kualitas layanan, dan dalam fungsi-fungsi terkait layanan yang terpisah dari teknologi terkait *transport* utama. NGN memungkinkan dalam suatu jaringan membawa berbagai tipe informasi dan layanan (suara, data, dan berbagai jenis media seperti video) yang dikemas menjadi paket-paket seperti dalam teknolgi internet. NGN umumnya dibangun mengelilingi protokol internet.

NODE B

BTS untuk jaringan 3G W-CDMA/ UMTS.

NSS
Network Switching Subsystem adalah bagian utama dari sistem GSM. NSS menangani fungsi *switching*, *mobility management* dan mengatur komunikasi antara *mobile phone* jaringan telepon lain.

OLO
Other Licensed Operator (OLO) yang merujuk pada operator selain TELKOM

PANGGILAN LOKAL
Panggilan di antara pelanggan di wilayah penomoran yang sama tanpa diperlukan nomor kode wilayah.

PEMERINTAH
Merujuk pada Pemerintah Republik Indonesia

PENDAPATAN MINIMUM TELKOM
Pendapatan minimum yang didapat setiap bulannya dari pembayaran setiap unit KSO kepada TELKOM sesuai dengan Perjanjian KSO.

PERANGKAT LUAR
Peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk menghubungkan lokasi pelanggan dengan sentral lokal

POLA BAGI HASIL ATAU PBH
Jenis skema pola build, operate, transfer (bangun, operasi, dan transfer) antara TELKOM dan perusahaan swasta domestik. Berdasarkan skema ini, perusahaan swasta melakukan investasi pada fasilitas telekomunikasi yang dioperasikan oleh TELKOM.

PEMANFAATAN KAPASITAS
Merujuk pada rasio sambungan terpakai terhadap kapasitas sentral lokal atau sambungan terpasang

PERJANJIAN KSO
merujuk pada perjanjian, yang diubah dari waktu ke waktu, yang mengatur operasi jaringan di wilayah KSO yang bersangkutan untuk periode KSO.

PPLT
Merujuk pada program penyediaan dan pengembangan layanan telekomunikasi yang didirikan oleh TELKOM untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertentu yang tidak terdapat layanan telekomunikasi.

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
Jenis rencana program pensiun yang di dalamnya perusahaan menjajnjikan manfaat bulanan kepada pensiunan mengacu pada rumus berdasarkan sejarah penghasilan pegawai, masa kerja dan usia dan tidak berdasarkan keuntungan investasi. "Pasti" mengandung arti bahwa rumus perhitungan kontribusi perusahaan dapat diketahui sejak awal.

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI
Merujuk pada tipe rencana pensiun yaitu program pensiun yang jumlah kontribusi tahunan perusahaan sudah ditentukan. Para perserta program diberikan rekening pribadi dan manfaat yang didapatnya berdasarkan jumlah yang disetorkan ke rekening tersebut (melalui kontribusi perusahaan dan jika mungkin kontribusi peserta) ditambah keuntungan investasi atas dana di rekening tersebut. Hanya bagian kontribusi perusahaan saja yang tetap, sedangkan bagian keuntungan investasi berfluktuasi.

PSTN
Public Switched Telephone Network adalah jaringan telepon yang dioperasikan dan dipelihara oleh TELKOM.

RAS
Remote Access Services adalah paduan perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan akses jarak jauh terhadap alat atau informasi yang tersimpan di jaringan perangkat TI. Server RAS adalah computer khusus yang menggabungkan berbagai saluran komunikasi.

RIO
(Dokumen Penawaran Interkoneksi) adalah istilah regulasi yang mencakup semua fasilitas, termasuk tarif Interkoneksi fasilitas teknik, dan persoalan administrasi yang di tawarkan oleh sebuah operator telekomunikasi lainnya untuk akses interkoneksi.

RUIM
Removable User Identity Module adalah *smart card* (kartu cerdas) yang didesain untuk disisipkan ke dalam telepon tetap nirkabel yang secara unik mengidentifikasi langganan jaringan CDMA dan yang mengandung data yang terkait dengan pelanggan seperti nomor telepon, rincian layanan dan memori untuk menyimpan pesan.

SAMBUNGAN TIDAK BERGERAK
Merujuk pada sambungan tidak bergerak kabel atau sambungan tidak bergerak nirkabel.

SAMBUNGAN TERPASANG
Merujuk pada sambungan yang terpasang secara lengkap ke titik distribusi dan siap untuk disambungkan ke pelanggan.

SELULER TIDAK BERGERAK
Merujuk pada teknologi tidak bergerak nirkabel yang menggunakan konfigurasi jaringan seluler biasa untuk menghubungkan pelanggan yang berada di lokasi tetap ke sentral lokal.

SENTRAL JARAK JAUH
Sentral yang memiliki fungsi menghubungkan satu sentral telepon ke sentral telepon lain, yang dapat berupa sentral lokal atau sentral trunk.

SERAT OPTIK
Merujuk pada kabel yang menggunakan serat optik dan teknologi laser, berkas cahaya yang memodulasi yang merupakan data ditransmisi melalui filamen kaca tipis.

SIM ATAU SIM CARD
Subscriber Identity Module adalah *smart card* yang didisain untuk disisipkan ke dalam telepon seluler yang secara unik mengidentifikasi langganan jaringan GSM dan yang berisi data yang terkait dengan pelanggan seperti nomor telepon, rincian layanan dan memori untuk menyimpan pesan.

SIRKIT SEWA
Line transmisi telekomunikasi khusus yang menghubungkan satu titik fixed ke titik fixed lain, yang disewa dari operator untuk penggunaan eksklusif.

SISTEM DUOPOLI
Sistem yang hanya mengijinkan dua operator nasional, yang di Indonesia adalah TELKOM dan Indosat, untuk menyediakan layanan telekomunikasi sambungan telepon tidak bergerak termasuk sambungan langsung jarak jauh dan internasional.

SLI
Merujuk pada Sambungan Langsung Internasional (SLI) adalah layanan yang memungkinkan pelanggan melakukan panggilan internasional tanpa bantuan atau campur tangan operator dari suatu terminal telepon.

SLJJ
Merujuk pada Sambungan Langsung Jarak Jauh atau Domestic Long Distance.

SMS
Short Messaging Service (Layanan Pesan Singkat), yaitu teknologi yang memungkinkan pertukaran pesan teks antara telepon seluler dan antara telepon tidak bergerak nirkabel dapat terwujud.

SOA
The Sarbanes–Oxley Act (SOA) 2002, yang juga dikenal sebagai '*Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act'* dan '*Corporate and Auditing Accountability and Responsibility Act'* dan biasa disebut sebagai Sarbanes–Oxley, Sarbox atau SOA adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini dinamakan demikian merujuk pada pengusulnya yakni Senator Paul Sarbanes dan Michael G. Oxley.

STASIUN BUMI
adalah antena serta perangkat terkait yang digunakan untuk menerima atau memancarkan sinyal telekomunikasi melalui satelit.

SWITCH
adalah perangkat mekanik, listrik atau elektronik yang membuka atau menutup sirkit, menyambung atau memutus sambungan listrik, atau memilih sambungan atau sirkit, yang digunakan untuk me'route' trafik dalam jaringan telekomunikasi.

SOFTSWITCH
Peralatan sentral di dalam jaringan telepon yang menghubungkan panggilan dari satu telepon ke telepon lainnya melalui peranti lunak yang menjalankan komputer. Sebelumnya, tugas ini dijalankan oleh mesin dengan papan sambungan yang digunakan sebagai penghubung antar panggilan.

T.I.M.E
T.I.M.E adalah singkatan dari Telecoomunication, Information, Media dan Edutainment.

TINGKAT PEMUTUSAN
Pengukuran dari jumlah pelanggan yang tidak menggunakan produk dan layanan TELKOM dalam waktu yang ditentukan.

TRANSPONDER SATELIT
Perangkat *relay* radio yang dipasang pada satelit yang menerima sinyal dari bumi dan memperkuat serta memancarkannya kembali ke bumi.

TRANSMISI GELOMBANG MIKRO
Transmisi yang terdiri dari gelombang elektromagnetik dalam spektrum frekuensi radio di atas 890 juta siklus per detik dan di bawah 20 miliar siklus per detik.

UMTS
Universal Mobile Telephone System adalah salah satu dari sistem telepon bergerak generasi ketiga (3G) yang dikembangkan dalam kerangka kerja IMT-2000 ITU.

UNIT KSO
Merujuk pada divisi regional yang sebelumnya dikelola dan dioperasikan TELKOM sesuai dengan Perjanjian KSO.

USO
Universal Service Obligation (Kewajiban Pelayanan Universal) adalah kewajiban layanan yang disyaratkan oleh Pemerintah pada seluruh penyedia layanan telekomunikasi untuk tujuan penyediaan layanan umum di Indonesia.

VoIP
Voice over Internet Protocol adalah cara mengirim informasi suara dengan menggunakan Protokol Internet.

VPN
Virtual Private Network adalah koneksi jaringan pribadi yang aman, yang dibangun di atas infrastruktur yang dapat diakses oleh umum, seperti Internet atau jaringan telepon umum. VPN biasanya menggunakan kombinasi enkripsi, sertifikat digital, otentikasi pengguna yang ketat dan kontrol akses tertentu untuk memberikan keamanan pada trafik yang dibawanya. Biasanya menyediakan konektivitas untuk banyak mesin di balik gateway atau firewall.

VPN FRAME RELAY
Layanan VPN yang menggunakan jaringan frame relay.

VPN IP
Layanan komunikasi data *any to any connection* berbasis *IP Multi Protocol Label Switching* (MPLS). Layanan ini terhubung dengan sistem sekuritas data, L2TP dan IPSec. Kecepatannya tergantung dengan kebutuhan pelanggan mulai dari 64 kbps hingga 2 Mbps.

VSAT
Very Small Aperture Terminal adalah antena yang relatif kecil, biasanya berdiameter 1,5 sampai 3,0 meter, yang ditempatkan di persil pengguna dan digunakan untuk komunikasi dua-arah melalui satelit.

WAP
Wireless Application Protocol adalah standar umum dan terbuka untuk jaringan komunikasi yang memungkinkan pengguna telepon seluler mengakses dan berinteraksi dengan layanan informasi mobile seperti e-mail, situs web, informasi keuangan, perbankan *online*, informasi dan *entertainment* (*infotainment*), *game* dan pembayaran mikro.

WI-MAX
Atau *Worldwide Interopeability for Microwave Access* adalah teknologi telekomunikasi yang menyediakan transmisi data secara nirkabel dengan menggunakan berbagai metode transmisi dari sambungan point-to-point ke akses internet portable.

WILL
Lingkaran Lokal Nirkabel atau Wireless Local Loop (WILL) adalah sarana penyediaan fasilitas lingkaran lokal (koneksi fisik dari lokasi pelanggan ke titik keberadaan *carrier* atau POP) nirkabel, yang memperbolehkan carrier untuk menyediakan lingkaran lokal dengan pita lebar keseluruhan kurang lebih1 Gbps atau lebih per daerah jangkauan. WILL sangat efektif terutama di wilayah berbatu-batu atau lembab.

Referensi Silang Form 20-F

Item	Hal-hal yang di persyaratkan dalam Form 20-F	Nomor Halaman
ITEM 1.	Identitas Direksi, Manajemen Senior dan Penasihat	N/A
ITEM 2.	Statistik Penawaran dan Perkiraan Jadwal	N/A
ITEM 3.	Informasi Utama	
	3. A Data Keuangan Tertentu	6-12, 94-99
	3. B Kapitalisasi dan Hutang	N/A
	3. C Alasan Penawaran dan Penggunaan Hasil Penawaran	N/A
	3. D Faktor Risiko	56-63
ITEM 4.	Informasi Tentang Perusahaan	
	4. A Sejarah dan Pengembangan Perusahaan	
	4. B Tinjauan Bisnis	69-89
	4. C Struktur Bisnis dan Organisasi	180-183
	4. D Aset Tetap	116-117
ITEM 4A.	Komentar Staff yang belum selesai	N/A
ITEM 5.	Tinjauan dan Prospek Operasi dan Keuangan	
	5. A Tinjauan Hasil Usaha	91-110
	5. B Likuiditas dan Sumber Permodalan	110-118
	5. C Riset dan Pengembangan, Kekayaan Intelektual	118
	5. D Informasi Tren	118-119
	5. E Pengaturan Transaksi di Luar Neraca	119
	5. F Pengungkapan Dalam Bentuk Tabel untuk Kewajiban Kontraktual	119
ITEM 6.	Direktur, Manajemen Senior dan Karyawan	
	6. A Direksi dan Manajemen Senior	186-190, 148-151
	6. B Kompensasi	154
	6. C Tata Kelola Pengurus	132-169,
	6. D Karyawan	170-177
	6. E Kepemilikan Saham	155
ITEM 7.	Pemegang Saham Mayoritas dan Transaksi Pihak Terkait	
	7. A Pemegang Saham Mayoritas	18-21
	7. B Transaksi Pihak Terkait	21
	7. C Kepentingan dari Ahli dan Penasehat Hukum	N/A
ITEM 8.	Informasi Keuangan	
	8. A Laporan Konsolidasi dan Informasi Keuangan Lainnya	121 FS
	8. B Perubahan Signifikan	122

Item	Hal-hal yang di persyaratkan dalam Form 20-F	Nomor Halaman
ITEM 9.	Penawaran dan Pencatatan	
	9. A Rincian Penawaran dan Pencatatan	13
	9. B Rencana Distribusi	N/A
	9. C Pasar	16-17
	9. D Menjual Pemegang Saham	N/A
	9. E Dilusi	N/A
	9. F Pengeluaran dan Penerbitan	N/A
ITEM 10.	Informasi Tambahan	
	10. A Kapital Saham	N/A
	10. B Memorandum dan Anggaran Dasar	123-125
	10. C Kontrak Material	127
	10. D Pengendalian Nilai Tukar	127-128
	10. E Perpajakan	128-131
	10. F Agen Pembayar dan Dividen	N/A
	10. G Laporan dari Ahli	N/A
	10. H Ketersediaan Dokumen	164
	10. I Informasi Anak Perusahaan	N/A
ITEM 11.	Pengungkapan Kualitatif dan Kuantitatif tentang Risiko Pasar	64-67
ITEM 12.	Diskripsi dari Sekuritas Selain Sekuritas Ekuitas	N/A
ITEM 13.	Wanprestasi, Keterlambatan dan Penundaan Pembayaran Dividen	N/A
ITEM 14.	Modifikasi Material terhadap Hak Pemegang Saham dan Penggunaan	N/A
ITEM 15.	Prosedur dan Kendali	151-152
ITEM 16.	Cadangan	
	16. A Ahli Keuangan Komite Audit	139
	16. B Kode Etik	152
	16. C Layanan dan Biaya Akuntan Utama	164
	16. D Pengecualian dari Standar Pencatatan untuk Komite Audit	139
	16. E Pembelian Sekuritas Ekuitas oleh Penerbit dan Pembelian Terafiliasi	N/A
	16. F Perubahan Akuntan Publik	N/A
	16. G Tata Kelola Perusahaan	132-169
ITEM 17.	Laporan Keuangan	N/A
ITEM 18.	Laporan Keuangan	205
ITEM 19.	Lampiran	

Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6

No	Hal yang Dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. X.K.6	Hlmn	Seksi tempat Keterangan Terdapat
1	Ikhtisar Keuangan Penting (perbandingan selama lima tahun buku).	6	Ikhtisar Keuangan
2	Informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam dua tahun buku terakhir.	13	Ikhtisar Saham Biasa
3	Harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus.	15	Harga Saham Per Kwartal
4	Laporan Dewan Komisaris	32	Lap. Komisaris Utama
5	Laporan Direksi	36	Lap. Direktur Utama
6	Profil Perusahaan		
	a. Nama dan alamat perusahaan	195	Alamat Perusahaan
	b. Riwayat singkat perusahaan	178	Sejarah Perusahaan
	c. Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan	191-193	Produk dan Layanan
	d. Struktur organisasi dalam bentuk bagan	180-183	Strukur Bisnis & Organisasi
	e. Visi dan misi perusahaan	23	Visi, Misi, Tujuan, Inisiatif Strategis
	f. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	184-185	Profil Dewan Komisaris
	g. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Direksi	186-189	Profil Direksi
	h. Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya	170-177	SDM TELKOM
7	Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya	18	Komposisi Pemegang Saham
	a. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih	18	Komposisi Pemegang Saham
	b. Direktur dan komisaris yang memiliki saham	155	Kepemilikan Saham
	c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5%	18	Komposisi Pemegang Saham
8	Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut.	181-183	Informasi Mengenai Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi
9	Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek tempat saham perusahaan dicatatkan	13-15	Ikhtisar Saham Biasa
10	Kronologis pencatatan efek lainnya dan peringkat efek		
11	Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek	197	Alamat Perusahaan
12	Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal	197	Alamat Perusahaan
14	Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan	196	Alamat Perusahaan
15	Analisis dan Pembahasan Manajemen	90-122	Pembahasan dan Analisis Manajemen
16	Tata kelola perusahaan		
	a. Dewan Komisaris		
	• Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris	153	Kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi

Referensi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.6

No	Hal yang Dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. X.K.6	Hlmn	Seksi tempat Keterangan Terdapat
	• Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi	154	Proses Penentuan Renumerasi
	• Anggota Dewan Komisaris	135-136	Dewan Komisaris
	• Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris	153-154	Rapat-Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
	b. Direksi		
	• Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi	153	Kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi
	• Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi	154-155	Proses Penentuan Renumerasi Direksi
	• Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota direksi	153-154	Rapat-Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
	• Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi	155	Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi Bagi Dewan Komisaris & Direksi
	c. Komite Audit		
	• Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit	137-139	Komite dan Unit Pendukung
	• Uraian tugas dan tanggung jawab	136-138	Tabel Penugasan dan Kegiatan Dewan Komisaris
	• Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran setiap anggota komite audit	141	Tabel Jumlah Rapat Komite Audit
	• Laporan singkat pelaksanaa kegiatan komite audit	140	Laporan Komite Audit
	d. Komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan:	148-149	Komite Direksi
	e. Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;	149-151	Investor Relations/ Corporate Secretary
	• Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat sekretaris perusahaan	149	Investor Relation/ Corporate Secretary
	• Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan	149	Investor Relations/ Corporate Secretary
	f. Uraian mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan internal	150-151	Internal Audit
	g. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan	168	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
	h. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan	121-122	Kasus Hukum Material
	i. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko tersebut	160-162	Manajemen Risiko
	j. Penjelasan tentang tempat/alamat yang dapat dihubungi pemegang saham atau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan	149	Investor Relations/ Corporate Secretary/ Alamat Perusahaan
17	Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan		
18	Laporan keuangan yang telah diaudit		
19	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris	206	Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Halaman ini sengaja
dikosongkan

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Tahunan

Laporan Tahunan 2009

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah ditanda tangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi

DEWAN KOMISARIS

Tanri Abeng
Komisaris Utama

P. Sartono
Komisaris Independen

Arif Arryman
Komisaris Independen

Bobby A.A. Nazief
Komisaris

Mahmuddin Yasin
Komisaris

DIREKSI

Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama / CEO

Sudiro Asno
Direktur Keuangan / CFO

Ermady Dahlan
Direktur Network & Solution / COO

Faisal Syam
Direktur Human Capital & General Affairs

Arief Yahya
Direktur Enterprise & Wholesale

Prasetio
Direktur Compliance & Risk Management

I Nyoman G Wiryanata
Direktur Konsumer

Indra Utoyo
Direktur Information Technology & Supply / CIO

GM

Telkom Indonesia

Surat Pernyataan Direksi
mengenai Tanggung Jawab Direksi untuk

Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) 31 Desember 2009 dan 2008
serta tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007
Perusahaan Perseroan (Persero) P. T. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Atas nama Direksi, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Rinaldi Firmansyah
   Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Cibitung I No.22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon : (022) 452 7101
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Sudiro Asno
   Alamat Kantor : Jl. Japati No.1 Bandung 40133
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Ranca Kendal No. 8A, Bandung
   Nomor Telepon : (022) 452 7201
   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas persiapan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian P. T. Telekomunikasi Indonesia Tbk;

2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah dipersiapkan dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

3. a. Seluruh informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan ini telah diungkapkan secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 April 2010

METERAI TEMPEL 6000

Rinaldi Firmansyah
Direktur Utama

Sudiro Asno
Direktur Keuangan

Kantor Perusahaan
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
Jl. Japati No.1, Bandung 40133

T (022) - 452 7101
F (022) - 4214313

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2009 DAN 2008
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2009, 2008, DAN 2007

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

31 DESEMBER 2009 DAN 2008
SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2009, 2008, DAN 2007

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan Konsolidasian	
Neraca Konsolidasian ……..	1-3
Laporan Laba Rugi Konsolidasian ……..	4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian ……	5-7
Laporan Arus Kas Konsolidasian..……..	8-9
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian ……..	10-177

Kantor Akuntan Publik
Tanudiredja, Wibisana & Rekan

A member firm of

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6
Jakarta 12940 - INDONESIA
P.O. Box 2473 JKP 10001
Tel : +62 21 5212901
Fax : +62 21 52905555/52905050
www.pwc.com

A100408003/DC2/CAW/I/2010.A

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan standar yang ditetapkan *Public Company Accounting Oversight Board (United States)*. Standar-standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta hasil usaha dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 and 2007, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia berbeda secara signifikan dalam hal-hal tertentu dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. Informasi mengenai perbedaan dan pengaruhnya disajikan dalam Catatan 52 atas laporan keuangan konsolidasian.

JAKARTA,
8 April 2010

Chrisna A. Wardhana, CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik No. 04.1.0943

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Catatan	2009	2008
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c,2e,4,43	7.805.460	6.889.945
Penyertaan sementara	2c,2f,43	359.507	267.044
Piutang usaha	2c,2g,5,36,43		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp93.483 juta di tahun 2009 dan Rp81.196 juta di tahun 2008		604.768	544.974
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp1.180.067 juta di tahun 2009 dan Rp1.122.709 juta di tahun 2008		3.184.916	2.964.795
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp9.517 juta di tahun 2009 dan Rp9.194 juta di tahun 2008	2c,2g,43	128.025	108.874
Persediaan - setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar Rp72.174 juta di tahun 2009 dan Rp64.849 juta di tahun 2008	2h,6,36	435.244	511.950
Beban dibayar di muka	2c,2i,7,43	2.496.539	1.875.773
Tagihan restitusi pajak	2s,37	666.351	569.954
Pajak dibayar di muka	2s,37	379.732	805.594
Aset lancar lainnya	2c,8,43	125.482	83.407
Jumlah Aset Lancar		16.186.024	14.622.310
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan jangka panjang - bersih	2f,9	151.553	169.253
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp72.534.162 juta di tahun 2009 dan Rp61.917.333 juta di tahun 2008	2k,2l,3,10, 18,19,22	76.053.966	70.589.590
Aset tetap Pola Bagi Hasil - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp181.917 juta di tahun 2009 dan Rp249.707 juta di tahun 2008	2m,11,33,45	365.931	476.654
Pensiun dibayar di muka	2i,2r,40	497	97
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	2c,2k,2o,12, 28,43,47	2.234.288	2.159.688
Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp7.570.659 juta di tahun 2009 dan Rp6.324.335 juta di tahun 2008	2d,2j,3,13,36	2.428.280	3.187.808
Rekening *escrow*	2c,14,43	44.114	50.850
Aset pajak tangguhan - bersih	2s,37	94.953	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		81.373.582	76.633.940
JUMLAH ASET		**97.559.606**	**91.256.250**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Catatan	2009	2008
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hutang usaha	2c,15,43		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		1.759.468	1.376.146
Pihak ketiga		8.084.199	10.793.238
Hutang lain-lain		3.162	11.959
Hutang pajak	2s,37	1.749.789	739.688
Hutang dividen	2v	405.175	-
Beban yang masih harus dibayar	2c,16,34, 40,43	4.103.964	4.093.632
Pendapatan diterima di muka	2q,17	2.827.156	2.742.123
Uang muka pelanggan dan pemasok		111.356	141.132
Hutang bank jangka pendek	2c,18,43	43.850	46.000
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2l,19,43	7.629.295	7.054.233
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		26.717.414	26.998.151
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban pajak tangguhan - bersih	2s,37	3.343.201	2.904.873
Pendapatan Pola Bagi Hasil ditangguhkan	2m,11,45	187.544	299.324
Kewajiban penghargaan masa kerja	2c,2r,41,43	212.518	102.633
Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja	2c,2r,42,43	1.801.776	2.570.720
Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	2c,2r,40,43	808.317	1.141.798
Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Kewajiban sewa pembiayaan	2l,10,19	208.088	337.780
Pinjaman penerusan - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2c,19,20,43	3.094.110	3.949.431
Wesel bayar	2c,19,21,43	68.777	-
Hutang bank	2c,19,22,43	11.086.688	7.495.144
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	19,23	108.079	1.458.545
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		20.919.098	20.260.248
HAK MINORITAS	24	10.933.347	9.683.780

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	Catatan	2009	2008
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp250 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B			
Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B	1c,25	5.040.000	5.040.000
Tambahan modal disetor	2u,26	1.073.333	1.073.333
Modal saham yang diperoleh kembali - 490.574.500 lembar saham di tahun 2009 dan 2008	2u,27	(4.264.073)	(4.264.073)
Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	2d,28	478.000	360.000
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	2f	385.595	385.595
Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	2f	18.136	(19.066)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2f	230.995	238.319
Selisih transaksi akuisisi kepemilikan minoritas pada anak perusahaan	1d,2d	(439.444)	-
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya		15.336.746	10.557.985
Belum ditentukan penggunaannya		21.130.459	20.941.978
Jumlah Ekuitas		38.989.747	34.314.071
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**97.559.606**	**91.256.250**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009, 2008, DAN 2007
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data per saham dan per ADS)

	Catatan	2009	2008	2007
PENDAPATAN USAHA				
Telepon	2q,29			
Tidak bergerak		8.644.867	9.730.257	11.001.211
Seluler		27.201.827	25.332.028	22.638.065
Interkoneksi	2c,2q,30,43			
Pendapatan		10.551.205	12.054.314	12.705.911
Beban		(2.929.260)	(3.263.560)	(3.054.604)
Bersih		7.621.945	8.790.754	9.651.307
Data, internet, dan jasa teknologi informatika	2q,31	18.506.158	14.712.758	14.684.135
Jaringan	2c,2q,32,43	1.218.013	1.079.475	707.374
Jasa telekomunikasi lainnya	2m,2q,11, 33,45	1.403.825	1.044.512	757.919
Jumlah Pendapatan Usaha		64.596.635	60.689.784	59.440.011
BEBAN USAHA				
Penyusutan	2k,2l,2m, 10,11,12	12.565.928	11.069.575	9.440.476
Karyawan	2c,2r,16,34, 40,41,42,43	8.533.157	9.116.634	8.494.890
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	2c,2q,35,43	14.582.285	12.217.685	9.590.596
Umum dan administrasi	2g,2h,2q,5, 6,13,36	4.052.664	3.628.686	3.672.194
Pemasaran	2q	2.259.460	2.349.729	1.769.147
Jumlah Beban Usaha		41.993.494	38.382.309	32.967.303
LABA USAHA		**22.603.141**	**22.307.475**	**26.472.708**
(BEBAN) PENGHASILAN LAIN-LAIN				
Pendapatan bunga	2c,43	462.169	671.834	518.663
Bagian (rugi) laba bersih perusahaan asosiasi	2f,9	(29.715)	20.471	6.637
Beban bunga	2c,43	(2.000.023)	(1.581.818)	(1.436.165)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	2p	972.947	(1.613.759)	(294.774)
Lain-lain - bersih		340.769	508.605	328.584
Beban lain-lain - bersih		(253.853)	(1.994.667)	(877.055)
LABA SEBELUM PAJAK		**22.349.288**	**20.312.808**	**25.595.653**
(BEBAN) MANFAAT PAJAK	2s,37			
Pajak kini		(6.029.701)	(5.823.558)	(7.233.874)
Pajak tangguhan		(343.375)	183.863	(693.949)
		(6.373.076)	(5.639.695)	(7.927.823)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI		**15.976.212**	**14.673.113**	**17.667.830**
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI - Bersih	24	**(4.644.072)**	**(4.053.643)**	**(4.810.812)**
LABA BERSIH		**11.332.140**	**10.619.470**	**12.857.018**
LABA PER SAHAM DASAR	2w,38			
Laba bersih per saham		576,13	537,73	644,08
Laba bersih per ADS (40 saham Seri B per ADS)		23.045,20	21.509,20	25.763,20

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2009, 2008, DAN 2007
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Catatan	Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	Laba (rugi) belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Selisih transaksi akuisisi kepemilikan minoritas pada anak perusahaan	Saldo laba		Jumlah ekuitas
										Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo, 1 Januari 2009		5.040.000	1.073.333	(4.264.073)	360.000	385.595	(19.066)	238.319	-	10.557.985	20.941.978	34.314.071
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	2f	-	-	-	-	-	37.202	-	-	-	-	37.202
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi	2f,9	-	-	-	-	-	-	(6.745)	-	-	-	(6.745)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan anak perusahaan	1d,2b	-	-	-	-	-	-	(579)	-	-	-	(579)
Akuisisi 49% kepemilikan Infomedia	1d,2d	-	-	-	-	-	-	-	(439.444)	-	-	(439.444)
Kompensasi atas terminasi dini Hak eksklusif	28	-	-	-	118.000	-	-	-	-	-	-	118.000
Dividen kas	2v,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.840.708)	(5.840.708)
Penentuan penyisihan cadangan umum	39	-	-	-	-	-	-	-	-	4.778.761	(4.778.761)	-
Dividen interim	2v,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(524.190)	(524.190)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.332.140	11.332.140
Saldo, 31 Desember 2009		**5.040.000**	**1.073.333**	**(4.264.073)**	**478.000**	**385.595**	**18.136**	**230.995**	**(439.444)**	**15.336.746**	**21.130.459**	**38.989.747**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2009, 2008, DAN 2007
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Catatan	Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	(Rugi) laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Saldo laba		Jumlah ekuitas
									Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo, 1 Januari 2008		5.040.000	1.073.333	(2.176.611)	270.000	385.595	11.237	230.017	6.700.879	22.214.129	33.748.579
Rugi belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	2f	-	-	-	-	-	(30.303)	-	-	-	(30.303)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi	2f,9	-	-	-	-	-	-	8.487	-	-	8.487
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan anak perusahaan	1d, 2b	-	-	-	-	-	-	(185)	-	-	(185)
Kompensasi atas terminasi dini hak eksklusif	28	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	90.000
Dividen kas	2v,39	-	-	-	-	-	-	-	-	(8.034.515)	(8.034.515)
Penentuan penyisihan cadangan umum	39	-	-	-	-	-	-	-	3.857.106	(3.857.106)	-
Modal saham yang diperoleh kembali - harga perolehan	2u,27	-	-	(2.087.462)	-	-	-	-	-	-	(2.087.462)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	10.619.470	10.619.470
Saldo, 31 Desember 2008		**5.040.000**	**1.073.333**	**(4.264.073)**	**360.000**	**385.595**	**(19.066)**	**238.319**	**10.557.985**	**20.941.978**	**34.314.071**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2009, 2008, DAN 2007
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Catatan	Modal saham	Tambahan modal disetor	Modal saham yang diperoleh kembali	Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali	Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi	Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Saldo laba		Jumlah ekuitas
									Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo, 1 Januari 2007		5.040.000	1.073.333	(952.211)	180.000	385.595	8.865	227.669	1.803.397	20.302.041	28.068.689
Laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual	2f	-	-	-	-	-	2.372	-	-	-	2.372
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi	2f,9	-	-	-	-	-	-	2.348	-	-	2.348
Kompensasi atas terminasi dini hak eksklusif	28	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	90.000
Dividen kas	2v,39	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.082.050)	(5.082.050)
Penentuan penyisihan cadangan umum	39	-	-	-	-	-	-	-	4.897.482	(4.897.482)	-
Dividen kas interim	2v,39	-	-	-	-	-	-	-	-	(965.398)	(965.398)
Modal saham yang diperoleh kembali - harga perolehan	2u,27	-	-	(1.224.400)	-	-	-	-	-	-	(1.224.400)
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	-	12.857.018	12.857.018
Saldo, 31 Desember 2007		**5.040.000**	**1.073.333**	**(2.176.611)**	**270.000**	**385.595**	**11.237**	**230.017**	**6.700.879**	**22.214.129**	**33.748.579**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2009, 2008, DAN 2007
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	2009	2008	2007
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Penerimaan kas dari pendapatan usaha			
Telepon			
Tidak bergerak	8.451.263	9.166.209	10.987.600
Seluler	27.109.711	25.682.026	22.720.191
Interkoneksi - bersih	7.593.197	8.751.684	9.621.688
Data, internet, dan jasa teknologi informatika	18.032.677	14.828.097	14.822.515
Kerja Sama Operasi	-	-	3.797
Jasa lainnya	2.560.121	1.848.260	1.122.607
Jumlah penerimaan kas dari pendapatan usaha	63.746.969	60.276.276	59.278.398
Pembayaran kas untuk beban usaha	(27.693.555)	(26.637.184)	(23.612.680)
Pengembalian kas kepada pelanggan	(32.519)	(1.168)	(18.876)
Kas yang dihasilkan dari operasi	36.020.895	33.637.924	35.646.842
Penerimaan bunga	471.965	659.450	514.524
Pembayaran bunga	(2.089.844)	(1.429.781)	(1.470.328)
Pembayaran pajak penghasilan	(5.035.463)	(8.551.296)	(6.963.766)
Penerimaan tagihan restitusi pajak	348.021	-	-
Arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi	**29.715.574**	**24.316.297**	**27.727.272**
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil dari penjualan penyertaan sementara dan pencairan deposito berjangka yang jatuh tempo	24.820	28.676	11.804
Pembelian penyertaan sementara dan penempatan deposito berjangka	(80.081)	(158.582)	(84.444)
Hasil dari penjualan aset tetap	12.465	3.598	39.105
Hasil dari klaim asuransi	-	11.159	10.626
Pembelian aset tetap	(20.479.460)	(15.863.840)	(15.056.802)
Penurunan uang muka pembelian aset tetap	74.850	224.291	15.710
Kenaikan uang muka, aset lainnya, dan rekening escrow	(101.432)	(112.127)	(61.590)
Kas bersih dibayar dari transaksi penggabungan usaha	-	(287.403)	-
Pembelian aset tidak berwujud	(663.702)	(366.887)	-
Pembelian kepemilikan minoritas pada anak perusahaan	(600.154)	-	-
Penerimaan dividen kas	2.575	3.637	510
Pembelian penyertaan jangka panjang	(18.760)	(28.249)	(13.782)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi	**(21.828.879)**	**(16.545.727)**	**(15.138.863)**

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
P.T. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2009, 2008, DAN 2007
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

	2009	2008	2007
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pembayaran dividen kas	(6.364.898)	(8.033.511)	(6.047.431)
Pembayaran dividen kas kepada pemegang saham minoritas anak perusahaan	(2.831.023)	(3.732.401)	(3.693.137)
Hasil dari pinjaman jangka pendek	117.673	54.235	1.130.435
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(118.529)	(582.195)	(1.233.333)
Hasil wesel jangka menengah	70.000	-	-
Pembayaran wesel jangka menengah	-	-	(465.000)
Hasil dari pinjaman jangka panjang	9.536.558	8.433.000	5.119.000
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(6.669.574)	(4.865.401)	(3.317.415)
Pembayaran untuk pembelian kembali saham yang telah diterbitkan	-	(2.087.462)	(1.224.400)
Pembayaran wesel bayar	(123.927)	(200.813)	(199.365)
Pembayaran hutang sewa pembiayaan	(268.944)	(333.888)	(26.392)
Penarikan obligasi	-	-	(1.000.000)
Arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	**(6.652.664)**	**(11.348.436)**	**(10.957.038)**
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.234.031	(3.577.866)	1.631.371
DAMPAK PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(318.516)	327.020	193.584
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	6.889.945	10.140.791	8.315.836
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**7.805.460**	**6.889.945**	**10.140.791**
INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS			
Aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi arus kas:			
Akuisisi aset tetap yang dibiayai dengan hutang usaha	7.334.958	9.919.055	5.133.224
Akuisisi aset tetap melalui sewa pembiayaan	38.388	693.341	17.993

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perusahaan") pada mulanya merupakan bagian dari *"Post en Telegraafdienst"*, yang didirikan pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884.

Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero").

Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indonesia ("BAPEPAM-LK") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik serta dalam rangka penambahan maksud dan tujuan Perusahaan, berdasarkan akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 27 tanggal 15 Juli 2008 dan pemberitahuan atas perubahan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat No. AHU.46312.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.20155.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

i. Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan atau menjual, menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundangan-undangan yang berlaku.
ii. Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan atau menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
iii. Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
iv. Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pemanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1989 mengenai Telekomunikasi, yang berlaku sejak tanggal 1 April 1989, badan usaha Indonesia diizinkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar dalam bentuk kerja sama dengan Perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 mengenai penyelenggaraan telekomunikasi mengatur lebih lanjut bahwa kerja sama yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sebuah perusahaan patungan, kerja sama operasi, atau kontrak manajemen dan bahwa badan usaha yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri harus menggunakan jaringan telekomunikasi badan penyelenggara tersebut. Jika jaringan telekomunikasi tersebut tidak tersedia, Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kerja sama dilakukan dalam bentuk perusahaan patungan yang dapat membangun jaringan telekomunikasi yang diperlukan. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Republik Indonesia ("MPPT") melalui dua surat keputusan yang keduanya tertanggal 14 Agustus 1995, menegaskan kembali status Perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri.

Kegiatan Perusahaan dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri, meliputi telepon, teleks, telegram, satelit, sirkit langganan, surat elektronik, dan jasa komunikasi bergerak dan seluler. Pada tahun 1995, Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan para mitra usaha dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian sarana telekomunikasi di lima dari tujuh divisi regional ("Divre") melalui pola Kerja Sama Operasi ("KSO"), dalam rangka:

(1) mempercepat pembangunan sarana telekomunikasi,
(2) menjadikan Perusahaan sebagai operator bertaraf internasional, dan
(3) meningkatkan teknologi, pengetahuan, dan keahlian para karyawannya.

Pada mulanya, Perusahaan memperoleh hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa jaringan tetap lokal dan jaringan tetap nirkabel (*local wireline* dan *fixed wireless*) untuk jangka waktu minimum 15 tahun dan hak eksklusif untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sambungan langsung jarak jauh dalam negeri ("SLJJ") untuk jangka waktu minimum 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1996. Hak eksklusif tersebut juga termasuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk dan atas nama Perusahaan melalui KSO. Pemberian hak tersebut tidak mempengaruhi hak Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dalam negeri lainnya.

Pada tahun 1999, Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menerbitkan Undang-Undang No. 36 mengenai Telekomunikasi, yang berlaku efektif pada bulan September 2000. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kegiatan telekomunikasi meliputi:

(1) Jaringan telekomunikasi,
(2) Jasa telekomunikasi, serta
(3) Telekomunikasi khusus.

Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi diizinkan untuk menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Sedangkan telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Instansi Pemerintah, dan badan hukum selain penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi ini melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, dan diharapkan dapat membuka jalan menuju liberalisasi pasar. Sehubungan dengan Undang-Undang ini, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 yang mengatur mengenai pembebanan biaya interkoneksi kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi asal sehubungan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi melalui dua penyelenggara jaringan telekomunikasi atau lebih.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi ("DJPT") No. 05/HMS/JP/VIII/2000 tanggal 1 Agustus 2000 dan ralat atas siaran pers tersebut, No. 1718/UM/VIII/2000 tanggal 2 Agustus 2000, masa hak eksklusif yang diberikan kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi jaringan tetap lokal dan SLJJ telah dipersingkat masing-masing dari masa berakhir periode pada Desember 2010 menjadi Agustus 2002 dan dari Desember 2005 menjadi Agustus 2003. Sebagai gantinya, Pemerintah diharuskan membayar kompensasi kepada Perusahaan (Catatan 12 dan 28). Sesuai siaran pers Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 31 Juli 2002, ditetapkan bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2002, Pemerintah mengakhiri hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara jaringan jasa lokal dan SLJJ. Pada tanggal 1 Agustus 2002, PT Indonesian Satellite Corporation Tbk ("Indosat") diberikan lisensi untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi lokal dan SLJJ.

Perusahaan telah memperoleh izin komersial untuk menyelenggarakan jasa Sambungan Langsung Internasional ("SLI") berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia ("Menhub") No. KP. 162 tahun 2004 pada tanggal 13 Mei 2004.

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan

1. Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan-keputusan yang dibuat pada (i) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris No. 27 tanggal 15 Juli 2008 oleh Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM.; (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris No. 16 tanggal 19 September 2008 oleh notaris yang sama; dan (iii) RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris No. 22 tanggal 12 Juni 2009 oleh notaris yang sama, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Komisaris Utama	Tanri Abeng	Tanri Abeng
Komisaris	Bobby A.A Nazief	Bobby A.A Nazief
Komisaris	Mahmuddin Yasin	Mahmuddin Yasin
Komisaris Independen	Arif Arryman	Arif Arryman
Komisaris Independen	Petrus Sartono	Petrus Sartono
Direktur Utama	Rinaldi Firmansyah	Rinaldi Firmansyah
Wakil Direktur Utama/*Chief Operating Officer* ("COO")	* (lihat Catatan di bawah)	* (lihat Catatan di bawah)
Direktur Keuangan	Sudiro Asno	Sudiro Asno
Direktur Jaringan dan Solusi	Ermady Dahlan	Ermady Dahlan
Direktur *Enterprise* dan *Wholesale*	Arief Yahya	Arief Yahya
Direktur Konsumer	I Nyoman Gede Wiryanata	I Nyoman Gede Wiryanata
Direktur *Compliance* dan *Risk Management*	Prasetio	Prasetio
Direktur Teknologi Informasi	Indra Utoyo	Indra Utoyo
Direktur *Human Capital* dan *General Affairs* ("HCGA")	Faisal Syam	Faisal Syam

*COO dirangkap oleh Direktur Jaringan dan Solusi di tahun 2009 dan 2008

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan (lanjutan)

1. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris kepada Direktur Utama No. 125/SRT/DK/2008/RHS tanggal 25 Juli 2008, Dewan Komisaris setuju untuk melakukan penunjukkan COO, di samping tugas dalam jabatannya sebagai Direktur Jaringan dan Solusi.

Berdasarkan RUPSLB Perusahaan, pada tanggal 19 September 2008, para pemegang saham Perusahaan setuju untuk mengangkat Bobby A.A. Nazief sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk mengisi jabatan yang kosong dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan untuk memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan RUPSLB pada tanggal 10 Maret 2004, yang seharusnya berakhir pada tanggal 10 Maret 2009 menjadi berakhir pada tanggal RUPST Perusahaan 2009. Berdasarkan RUPST Perusahaan, pada tanggal 12 Juni 2009, para pemegang saham Perusahaan setuju untuk memperpanjang masa jabatan Tanri Abeng, Arif Arryman, dan Petrus Sartono sampai dengan RUPSLB Perusahaan berikutnya.

2. Karyawan

Jumlah karyawan Perusahaan dan anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah 28.750 orang dan 30.213 orang.

c. Penawaran umum efek Perusahaan

Jumlah saham Perusahaan sesaat sebelum penawaran umum perdana ("*Initial Public Offering"* atau "IPO") adalah 8.400.000.000, yang terdiri dari 8.399.999.999 saham Seri B dan 1 saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 14 November 1995, Pemerintah menjual saham Perusahaan yang terdiri dari 933.333.000 saham baru Seri B dan 233.334.000 saham Seri B milik Pemerintah kepada masyarakat melalui IPO, dan selanjutnya didaftarkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya), dan penawaran dan pencatatan di Bursa Efek New York ("NYSE") dan Bursa Efek London ("LSE") atas 700.000.000 saham Seri B milik Pemerintah dalam bentuk *American Depositary Shares* ("ADS"). Terdapat 35.000.000 ADS dan masing-masing ADS mewakili 20 saham Seri B pada saat itu.

Pada bulan Desember 1996, Pemerintah menjual saham Perusahaan sebanyak 388.000.000 saham Seri B dan selanjutnya pada tahun 1997, Pemerintah membagikan 2.670.300 saham Seri B sebagai insentif bagi para pemegang saham Perusahaan yang tidak menjual sahamnya selama satu tahun terhitung sejak tanggal IPO. Pada bulan Mei 1999, Pemerintah kembali menjual 898.000.000 saham Seri B.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek Perusahaan (lanjutan)

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada RUPST Perusahaan tanggal 16 April 1999, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan yang berasal dari kapitalisasi sebagian tambahan modal disetor melalui pembagian saham bonus sejumlah 746.666.640 lembar saham. Pembagian saham bonus kepada para pemegang saham Perusahaan dilakukan pada bulan Agustus 1999. Pada tanggal 16 Agustus 2007, Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diamandemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tidak berdampak terhadap penawaran umum efek Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah menjual 1.200.000.000 saham atau 11,9% dari jumlah saham Seri B yang beredar. Pada bulan Juli 2002, Pemerintah kembali menjual 312.000.000 saham atau 3,1% dari jumlah saham Seri B yang beredar.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 26 tanggal 30 Juli 2004, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pemecahan saham Perusahaan untuk Seri A Dwiwarna dan Seri B dari 1 menjadi 2. Untuk 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp500 dipecah menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp250 dan 1 saham Seri B dengan nilai nominal Rp250. Jumlah modal saham dasar Perusahaan setelah pemecahan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 39.999.999.999 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 79.999.999.999 saham Seri B, dan jumlah modal saham ditempatkan Perusahaan meningkat dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 10.079.999.639 saham Seri B menjadi 1 saham Seri A Dwiwarna dan 20.159.999.279 saham Seri B. Setelah pemecahan saham, setiap ADS mewakili 40 saham Seri B.

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perusahaan tanggal 21 Desember 2005, RUPST Perusahaan tanggal 29 Juni 2007, dan RUPST Perusahaan tanggal 20 Juni 2008, para pemegang saham Perusahaan menyetujui masing-masing rencana tahap I, II, dan III untuk pembelian kembali saham Seri B (Catatan 27).

Pada tanggal 31 Desember 2009, seluruh saham Seri B Perusahaan telah dicatatkan pada BEI dan 44.718.251 ADS telah dicatatkan pada NYSE dan LSE (Catatan 25).

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Perusahaan mengkonsolidasi laporan keuangan anak perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan kepemilikan mayoritas (Catatan 2b dan 2d):

(i) Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung:

Anak perusahaan/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2009	2008	2009	2008
PT Telekomunikasi Selular (**"Telkomsel"**), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi - operator fasilitas telekomunikasi dan jasa telepon seluler menggunakan teknologi *Global System for Mobile Communication* ("GSM")/26 Mei 1995	1995	65	65	59.227.177	51.629.761
PT Multimedia Nusantara (**"Metra"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa telekomunikasi multimedia/ 9 Mei 2003	1998	100	100	1.536.361	764.395
PT Telekomunikasi Indonesia International (**"TII"**) (dahulu PT Aria West International (**"AWI"**)), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi/ 31 Juli 2003	1995	100	100	1.373.824	1.091.175
PT Pramindo Ikat Nusantara (**"Pramindo"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa dan pembangunan telekomunikasi/ 15 Agustus 2002	1995	100	100	1.117.061	1.342.460
PT Infomedia Nusantara (**"Infomedia"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa data dan informasi - menyediakan jasa informasi telekomunikasi dan jasa informasi lainnya dalam bentuk cetak dan media elektronik, dan jasa *call center*/ 22 September 1999	1984	100 (termasuk melalui 49% kepemilikan oleh Metra)	51	578.591	592.518
PT Dayamitra Telekomunikasi (**"Dayamitra"**), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi/ 17 Mei 2001	1995	100	100	381.326	404.804
PT Indonusa Telemedia (**"Indonusa"**), *Jakarta, Indonesia*	TV berlangganan dan jasa konten/ 7 Mei 1997	1997	100 (termasuk melalui 1,25% kepemilikan oleh Metra)	100 (termasuk melalui 1,25% kepemilikan oleh Metra)	201.759	132.634

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(i) ***Anak perusahaan dengan kepemilikan langsung:*** (lanjutan)

Anak perusahaan/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh Perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2009	2008	2009	2008
PT Graha Sarana Duta (**"GSD"**), *Jakarta, Indonesia*	Penyewaan kantor dan manajemen gedung dan jasa pemeliharaan, konsultan sipil, dan pengembang/ 25 April 2001	1982	99,99	99,99	178.841	166.205
PT Napsindo Primatel Internasional (**"Napsindo"**), *Jakarta, Indonesia*	Telekomunikasi - menyediakan *Network Access Point* (NAP), *Voice Over Data* (VOD), dan jasa terkait lainnya/ 29 Desember 1998	1999; berhenti beroperasi pada tanggal 13 Januari 2006	60	60	4.910	4.910

(ii) ***Anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung:***

Anak perusahaan/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh anak perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2009	2008	2009	2008
PT Sigma Cipta Caraka ("**Sigma**"), *Tangerang, Indonesia*	Jasa teknologi informatika - implementasi dan integrasi sistem, *outsourcing*, dan pemeliharaan lisensi dan peranti lunak/ 1 Mei 1987	1988	80 (melalui 80% kepemilikan oleh Metra)	80 (melalui 80% kepemilikan oleh Metra)	460.560	320.818
PT Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd., *Singapura*	Telekomunikasi/ 6 Desember 2007	2008	100 (melalui 100% kepemilikan oleh TII)	100 (melalui 100% kepemilikan oleh TII)	188.796	36.415
PT Balebat Dedikasi Prima (**"Balebat"**), *Bogor, Indonesia*	Percetakan/ 1 Oktober 2003	2000	65 (melalui 65% kepemilikan oleh Infomedia)	33,15 (melalui 65% kepemilikan oleh Infomedia)	76.440	73.829
PT Finnet Indonesia (**"Finnet"**), *Jakarta, Indonesia*	Data dan komunikasi perbankan/ 31 Oktober 2005	2006	60 (melalui 60% kepemilikan oleh Metra)	60 (melalui 60% kepemilikan oleh Metra)	49.992	22.885

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(ii) Anak perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung: (lanjutan)

Anak perusahaan/ domisili	Jenis usaha/ tanggal pendirian atau akuisisi oleh anak perusahaan	Tanggal operasi komersial	Persentase hak kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
			2009	2008	2009	2008
Telkomsel Finance B.V., (**"TFBV"**), *Amsterdam, The Netherlands*	Keuangan - didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan untuk meminjam, meminjamkan, dan mengumpulkan dana, termasuk menerbitkan obligasi, wesel bayar, atau instrumen hutang/ 7 Februari 2005	2005	65 (melalui 100% kepemilikan oleh Telkomsel)	65 (melalui 100% kepemilikan oleh Telkomsel)	8.465	10.061
PT Metra-Net (**"Metra-Net"**), *Jakarta, Indonesia*	Jasa portal multimedia/ 17 April 2009	2009	100 (melalui 100% kepemilikan oleh Metra)	-	6.198	-
Aria West International Finance B.V. (**"AWI BV"**), *The Netherlands*	Didirikan untuk memberikan jasa di bidang perdagangan dan keuangan/ 3 Juni 1996	1996; berhenti beroperasi pada tanggal 31 Juli 2003	100 (melalui 100% kepemilikan oleh TII)	100 (melalui 100% kepemilikan oleh TII)	623	1.640
Telekomunikasi Selular Finance Limited (**"TSFL"**), *Mauritius*	Keuangan - didirikan untuk mengumpulkan dana untuk pengembangan bisnis Telkomsel melalui penerbitan saham *debenture*, obligasi, hipotek, atau surat berharga lainnya/22 April 2002	2002	65 (melalui 100% kepemilikan oleh Telkomsel)	65 (melalui 100% kepemilikan oleh Telkomsel)	24	34

(a) Telkomsel

Pada tanggal 14 Februari 2006, Telkomsel mendapatkan lisensi *International Mobile Telecommunications-2000* ("IMT-2000") atau *3rd Generation Technology* ("3G") pada pita frekuensi 2,1 Gigahertz ("GHz") untuk periode 10 tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Menkominfo") No. 19/KEP/M.KOMINFO/2/2006. Lisensi dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi (Catatan 13 dan 47c.i). Penyediaan layanan 3G secara komersial telah dimulai sejak September 2006.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 101/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006, lisensi operasi Telkomsel diperbaharui dengan memberikan hak kepada Telkomsel untuk menyediakan: (i) Layanan telekomunikasi bergerak dengan pita frekuensi radio di 900 Megahertz ("MHz") dan 1800 MHz; (ii) Layanan telekomunikasi bergerak IMT-2000 dengan pita frekuensi radio di 2,1 GHz (3G); dan (iii) Layanan telekomunikasi dasar.

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(a) Telkomsel (lanjutan)

Lisensi tersebut di atas mengatur tentang hak dan kewajiban Telkomsel, termasuk sanksi-sanksi yang relevan. Lisensi tersebut memiliki masa berlaku tidak terbatas, yang akan dievaluasi secara tahunan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 213/DIRJEN//2008 tanggal 4 Agustus 2008, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ("Depkominfo") melalui DJPT memberikan Telkomsel izin prinsip untuk menyediakan Jasa Teleponi Internet (*Voice over Internet Protoco*l atau "VoIP"), dengan masa berlaku satu tahun bergantung pada uji layak operasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 226/DIRJEN/2009 tanggal 24 September 2009, Telkomsel mendapatkan lisensi operasi untuk menyediakan jasa VoIP di beberapa daerah. Lisensi tersebut memiliki masa berlaku tidak terbatas, yang akan dievaluasi setiap tahun atau setiap lima tahun.

Berdasarkan Surat Bank Indonesia ("BI") No. 10/632/DASP tanggal 12 Agustus 2008, pada tanggal 12 Agustus 2008 Telkomsel terdaftar sebagai penyedia jasa pengiriman uang dengan nomor registrasi 10/12/DASP/10 untuk menyediakan jasa pengiriman uang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009 tanggal 1 September 2009, Pemerintah memberikan Telkomsel tambahan lisensi IMT-2000 pada pita frekuensi 2,1 Gigahertz ("GHz") untuk periode 10 tahun sejak tanggal surat keputusan (Catatan 13iii dan 47c.i).

(b) Metra

Pada tanggal 21 Januari 2008, Perusahaan melakukan tambahan setoran modal kepada Metra sebesar Rp350.000 juta sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler ("RUPS Sirkuler") Metra pada tanggal 13 Desember 2007. Akuisisi Sigma telah diselesaikan dengan penandatanganan Amandemen Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 21 Februari 2008 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Februari 2008 ("tanggal penutupan").

Pada tanggal 3 Juli 2008, berdasarkan akta notaris Wahyu Nurani, S.H. No. 6 tanggal 3 Juli 2008, Metra telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJB) untuk melakukan pembelian 6.000.000 lembar saham Indonusa yang setara dengan 1,25% dari total kepemilikan dengan nilai transaksi sebesar Rp6.600 juta dari PT Datakom Asia ("Datakom").

Pada tanggal 17 Juli 2008, berdasarkan akta notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 133 tanggal 17 Juli 2008, Metra memperoleh dana untuk keperluan pembelian tersebut melalui *equity call* yang berasal dari penambahan modal ditempatkan Metra dari semula Rp412.250 juta menjadi Rp418.850 juta. Pada tanggal 17 Juli 2008, berdasarkan akta notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 134 tanggal 17 Juli 2008, Metra melakukan transaksi jual beli saham tersebut (Catatan 1d.g).

Berdasarkan RUPS Sirkuler Metra pada tanggal 23 Maret 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 64 tanggal 16 April 2009, para pemegang saham Metra menyetujui peningkatan modal dasar perseroan dari Rp418.850 juta menjadi Rp485.679 juta dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham. Dari modal dasar tersebut Rp34.829 juta disetor dengan cara konversi dari piutang Perusahaan kepada Metra. Selain itu, para pemegang saham Metra juga menyetujui pendirian anak perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa portal multimedia dan konten.

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(b) Metra (lanjutan)

Pada tanggal 29 Mei 2009, Metra telah menandatangani *Conditional Sales and Purchase Agreement* ("CSPA") dengan PT Elnusa Tbk ("Elnusa") untuk transaksi akuisisi 49% saham Infomedia dari Elnusa (Catatan 1d.e).

Berdasarkan RUPS Sirkuler Metra pada tanggal 24 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Wahyu Nurani, S.H. No. 8 tanggal 24 Juli 2009, para pemegang saham Metra menyetujui: (1) peningkatan modal dasar perseroan dari Rp1.000.000 juta menjadi Rp2.000.000 juta yang terbagi atas 200.000.000 lembar saham, dan (2) penambahan modal ditempatkan dari Rp485.679 juta menjadi Rp1.084.179 juta dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per saham yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan.

Pada tanggal 30 Juni 2009, berdasarkan akta notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. No. 25 tanggal 30 Juni 2009, Metra telah menandatangani Akta Jual Beli ("AJB") Saham untuk melakukan pembelian 205.800.000 lembar saham Infomedia atau 49% dari total kepemilikan dengan nilai transaksi sebesar Rp598.000 juta dari Elnusa. Pada tanggal 1 Juli 2009, Metra melakukan pembayaran nilai transaksi untuk pembelian 49% saham Infomedia dari Elnusa sebesar Rp598.000 juta (Catatan 1d.e).

Pada tanggal transaksi, Perusahaan merupakan pemegang saham mayoritas Infomedia, sehingga transaksi ini merupakan akuisisi kepemilikan minoritas pada anak perusahaan. Selisih antara nilai pembelian dengan nilai kepemilikan minoritas sebesar Rp439.444 juta dan dicatat sebagai "Selisih Transaksi Akuisisi Kepemilikan Minoritas pada Anak Perusahaan" pada akun ekuitas (Catatan 2d).

(c) TII

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan menyetujui penyesuaian atas pengalihan bisnis telekomunikasi internasional dari Perusahaan kepada TII menjadi pengelolaan dan pengembangan bisnis internasional berupa pola kemitraan jasa pelaksana pelayanan, sesuai dengan hasil Amandemen Ketiga Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan TII No. K.Tel.665/HK.820/UTA-00/2008 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis Internasional.

Pada tanggal 1 Juni 2009, berdasarkan Amandemen Ketiga dan Pengalihan terhadap Perjanjian Pengadaan & Pemasangan Proyek Batam Singapore Cable System ("BSCS"), Perusahaan mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya dalam Proyek BSCS kepada TII.

Pada tanggal 22 Oktober 2009, berdasarkan *Notice of Assignment Acceptance* kepada Komite Manajemen Asia America Gateway ("AAG") dan anggota konsorsium AAG, Perusahaan mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya dalam konsorsium AAG kepada TII.

Berdasarkan RUPS Sirkuler TII pada tanggal 22 Desember 2009, para pemegang saham TII menyetujui pengakuan hutang yang timbul dari pengalihan proyek pembangunan infrastruktur internasional (*on going project*) Perusahaan kepada TII yang terdiri dari proyek BSCS dan AAG sebesar Rp463.105 juta.

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(c) TII (lanjutan)

Berdasarkan RUPS Sirkuler TII pada tanggal 22 Desember 2009, yang dinyatakan dalam akta notaris Siti Safarijah, S.H. No. 12 tanggal 21 Januari 2010, yang kemudian ditegaskan kembali melalui Perjanjian Pengakuan Hutang dan Konversi Hutang Menjadi Penyertaan Saham antara Perusahaan dan TII pada tanggal 23 Desember 2009, para pemegang saham TII menyetujui: (1) penambahan modal ditempatkan sebesar Rp593.191 juta dengan mengeluarkan 5.203.427 saham baru; (2) pengeluaran keseluruhan saham baru yang akan ditempatkan dan disetor penuh oleh Perusahaan melalui konversi hutang menjadi penambahan modal disetor (*debt to equity swap*) sebesar Rp463.105 juta dan setoran tunai sebesar Rp130.086 juta; (3) peningkatan modal dasar dari Rp308.306 juta yang terbagi atas 2.704.440 lembar saham dengan nilai nominal Rp114.000 menjadi Rp2.052.000 juta yang terbagi atas 18.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp114.000.

Pada tanggal 28 Desember 2009, Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk peningkatan modal kepada TII sebesar Rp130.086 juta.

Pada tanggal 23 Desember 2009, Perusahaan menyetujui penghapusan Pendapatan Minimum Telkom ("*Minimum Telkom Revenue*" atau "MTR") dan bagian Perusahaan atas Pendapatan KSO yang Harus Dibagi ("*Distributable KSO Revenues*" atau "DKSOR"). Di samping itu proporsi pembagian pendapatan yang semula bagian TII adalah sebesar 70% dari DKSOR menjadi proporsional sebesar beban penyusutan atas aset TII yang dioperasikan di Divre III, berdasarkan hasil Amandemen Keempat atas Perjanjian KSO Telkom Divre III dengan TII No. K.Tel.222/HK.810/UTA-00/1995 tanggal 20 Oktober 1995. Amandemen ini berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai tanggal pengakhiran KSO pada 31 Desember 2010.

(d) Pramindo

Pada tanggal 7 Juli 2009, berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-32154.AH.01.02 tahun 2009 kepada Pramindo tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan perubahan penetapan kedudukan Pramindo yang semula berada di Medan menjadi di Jakarta.

(e) Infomedia

Berdasarkan RUPS Sirkuler Infomedia pada tanggal 5 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. No. 10 tanggal 5 Juni 2009, para pemegang saham Infomedia menyetujui: (1) kapitalisasi bagian saldo laba ditahan perseroan dalam bentuk pembagian dividen saham; (2) peningkatan modal dasar perseroan dari Rp100.000 juta menjadi Rp500.000 juta yang terbagi atas 1.000.000.000 lembar saham; dan (3) peningkatan modal disetor perseroan dari Rp40.000 juta menjadi Rp210.000 juta yang terbagi atas 420.000.000 lembar saham.

Berdasarkan AJB Saham antara Elnusa dan Metra pada tanggal 30 Juni 2009 yang dinyatakan dalam akta notaris Sjaaf De Carya Siregar, S.H. No. 25 tanggal 30 Juni 2009, para pihak menyetujui pemindahan hak atas saham milik Elnusa sejumlah 205.800.000 lembar saham kepada Metra (Catatan 1d.b).

1. UMUM (lanjutan)

d. Anak perusahaan (lanjutan)

(f) Dayamitra

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dayamitra telah menandatangani CSPA dengan para pemegang saham PT Solusindo Kreasi Pratama ("Solusindo") untuk membeli 66,7% saham beredar Solusindo pada tanggal 30 November 2009 dan selanjutnya untuk memesan saham yang diterbitkan oleh Solusindo pada tanggal penerbitan untuk mendapatkan kepemilikan 80% dengan nilai maksimal sebesar Rp624.366 juta.

Pada tanggal 4 Desember 2009, akuisisi kepemilikan mayoritas di Solusindo tidak dilanjutkan karena tidak terpenuhinya kondisi persyaratan yang ditetapkan dalam CSPA tersebut.

(g) Indonusa

Berdasarkan RUPS Sirkuler Indonusa pada tanggal 17 Juli 2008 yang dinyatakan dalam akta notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. No. 64 tanggal 25 Agustus 2008, para pemegang saham Indonusa menyetujui pemindahan hak atas saham milik Datakom sejumlah 6.000.000 lembar saham kepada Metra (Catatan 1d.b)

Sehubungan dengan pemindahan hak atas saham tersebut kepemilikan Perusahaan di Indonusa telah meningkat menjadi 100% (termasuk melalui 1,25% kepemilikan Metra).

e. Kewenangan penerbitan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi pada tanggal 8 April 2010.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ("GAAP Indonesia"). GAAP Indonesia berbeda dalam beberapa hal secara signifikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat ("U.S. GAAP"). Informasi terkait dengan sifat dan pengaruh perbedaan-perbedaan tersebut dijelaskan pada Catatan 52.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun dengan dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun dengan dasar harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang dicatat berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan.

Angka-angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam dan dibulatkan menjadi jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan anak perusahaannya dimana Perusahaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, atau Perusahaan memiliki kemampuan mengendalikan entitas walaupun penyertaan sahamnya lebih kecil atau sama dengan 50%. Anak perusahaan dikonsolidasi sejak tanggal ketika Perusahaan memperoleh pengendalian secara efektif dan tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal pelepasannya.

Seluruh saldo dan transaksi antar-perusahaan yang signifikan telah dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasian.

c. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang memiliki hubungan istimewa yang digunakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 7, mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

d. Akuisisi anak perusahaan

Akuisisi anak perusahaan dari pihak ketiga dicatat dengan metode pembelian. Harga perolehan akuisisi dialokasikan ke dalam aset dan kewajiban yang teridentifikasi dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal transaksi. Selisih harga perolehan dari bagian kepemilikan Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang teridentifikasi dicatat sebagai *goodwill,* dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang pada umumnya diperkirakan tidak lebih dari lima tahun, periode yang lebih panjang dari lima tahun diperkenankan apabila tidak lebih dari dua puluh tahun.

Perusahaan secara berkesinambungan mengevaluasi apakah terdapat suatu kejadian atau telah terjadi perubahan kondisi yang mengharuskan adanya perubahan terhadap estimasi sisa masa manfaat aset tidak berwujud dan *goodwill*, atau adanya indikasi penurunan nilai ("*impairment"*). Jika terdapat indikasi *impairment*, nilai aset tidak berwujud dan *goodwill* yang dapat terpulihkan (*recoverable*) ditentukan berdasarkan nilai diskonto dari estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari uang (*time value of money*) dan risiko spesifik dari aset terkait.

Pada bulan Juli 2004, Dewan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("DSAK") mengeluarkan PSAK 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" ("PSAK 38R"). Berdasarkan PSAK 38R, akuisisi dengan entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan nilai buku seperti metode penyatuan kepemilikan (*carryover basis*). Selisih harga pengalihan yang dibayar atau diterima dengan nilai buku historis terkait, setelah memperhitungkan dampak pajak penghasilan ("PPh") yang berlaku, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali" pada bagian ekuitas.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Akuisisi anak perusahaan (lanjutan)

Saldo "Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali" dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian ketika tidak terdapat lagi hubungan sepengendali antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Selisih yang timbul dari jumlah bayar dengan nilai tercatat hak minoritas yang didebitkan, diakui secara langsung di ekuitas dan disajikan sebagai "Selisih Transaksi Akuisisi Kepemilikan Minoritas pada Anak Perusahaan" (Catatan 1d.b).

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, dan semua deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan.

f. Penyertaan

i. Deposito berjangka

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan tetapi tidak lebih dari satu tahun disajikan sebagai penyertaan sementara.

ii. Penyertaan pada efek

Penyertaan pada efek yang tersedia untuk dijual (*available-for-sale*) dinyatakan sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual tidak diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan, tetapi dilaporkan sebagai komponen terpisah pada bagian ekuitas hingga terealisasi. Laba atau rugi yang telah direalisasi atas efek yang tersedia untuk dijual dicatat pada laporan laba rugi konsolidasian dan dihitung berdasarkan metode identifikasi khusus. Penurunan nilai efek yang tersedia untuk dijual di bawah harga perolehannya yang bersifat non-temporer dan dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian.

iii. Penyertaan pada perusahaan asosiasi

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan di mana Perusahaan memiliki 20% sampai dengan 50% hak suara, dan dimana Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan tetapi bukan dalam bentuk kendali atas kebijakan keuangan dan operasi, dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ini, Perusahaan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan asosiasi secara proporsional sejak tanggal pengaruh signifikan dimiliki hingga tanggal berakhirnya pengaruh signifikan tersebut. Ketika bagian Perusahaan atas rugi melebihi nilai tercatat dari perusahaan asosiasi, nilai tercatat penyertaan diturunkan hingga nihil dan pengakuan kerugian lebih lanjut dihentikan kecuali apabila Perusahaan menjamin kewajiban perusahaan asosiasi atau mempunyai komitmen untuk menyediakan dukungan keuangan kepada perusahaan asosiasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Penyertaan (lanjutan)

iii. Penyertaan pada perusahaan asosiasi (lanjutan)

Secara berkesinambungan, sekurang-kurangnya di setiap akhir tahun, Perusahaan dan anak perusahaan mengevaluasi nilai tercatat penyertaannya pada perusahaan asosiasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan adanya indikasi penurunan nilai selain penurunan nilai sementara adalah pencapaian tujuan dan tahapan rencana usaha termasuk proyeksi arus kas dan hasil dari aktivitas pendanaan yang direncanakan, kondisi keuangan dan prospek bisnis dari setiap perusahaan asosiasi, nilai wajar penyertaan dibandingkan dengan nilai tercatat penyertaan, lamanya nilai wajar penyertaan berada di bawah nilai tercatat penyertaan, dan faktor-faktor relevan lainnya. Penurunan nilai yang harus diakui diukur berdasarkan selisih lebih antara nilai tercatat penyertaan dengan nilai wajarnya. Nilai wajar ditentukan berdasarkan nilai terendah antara harga pasar (jika ada) dan nilai diskonto arus kas, atau teknik penilaian lain yang tepat.

Perubahan nilai penyertaan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan nilai ekuitas perusahaan asosiasi yang timbul dari transaksi ekuitas antara perusahaan asosiasi dengan pihak lain diakui sebagai bagian dari ekuitas dalam akun "Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi". Selisih yang sebelumnya langsung dikreditkan ke ekuitas sebagai dampak transaksi ekuitas di perusahaan asosiasi, dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian saat penyertaan dijual sesuai persentase kepemilikan yang dijual.

Mata uang fungsional PT Pasifik Satelit Nusantara ("PSN") dan PT Citra Sari Makmur ("CSM") adalah Dolar Amerika Serikat ("Dolar A.S."). Untuk tujuan pelaporan investasi tersebut dengan metode ekuitas, aset dan kewajiban kedua perusahaan ini pada tanggal neraca masing-masing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs rata-rata selama tahun tersebut. Selisih kurs akibat penjabaran diakui dan dilaporkan sebagai "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan" dalam bagian ekuitas.

iv. Penyertaan lainnya

Penyertaan pada perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar harga perolehannya dan hanya disesuaikan untuk penurunan nilai yang bersifat non-temporer atas setiap penyertaan. Penurunan nilai tersebut langsung dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu yang ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang. Piutang ragu-ragu dihapuskan dalam periode ketika piutang tersebut dipastikan tidak dapat ditagih.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Piutang usaha dan piutang lain-lain (lanjutan)

Penyisihan piutang ragu-ragu mencerminkan estimasi terbaik Perusahaan dan anak perusahaan atas jumlah kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang. Beban penyisihan tersebut dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi pada laporan keuangan konsolidasian. Perusahaan dan anak perusahaan menentukan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan pengalaman penghapusan pada masa lampau. Perusahaan dan anak perusahaan mengevaluasi penyisihan piutang ragu-ragunya secara bulanan. Piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari untuk pelanggan *retail* sepenuhnya disisihkan, dan piutang yang telah jatuh tempo untuk pelanggan non-*retail* yang melebihi jumlah tertentu dievaluasi tingkat ketertagihannya secara individual. Saldo piutang dihapuskan dari neraca setelah semua cara penagihan dilakukan namun kemungkinan tertagihnya sangat kecil.

h. Persediaan

Sejak 1 Januari 2009, Perusahaan dan anak perusahaan telah mengadopsi PSAK 14 (Revisi 2008) “Persediaan”, yang efektif untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009 dan diterapkan secara prospektif.

Persediaan terdiri dari komponen dan modul, yang kemudian dibebankan atau dialihkan ke aset tetap pada saat pemakaian. Persediaan juga termasuk kartu *Subscriber Identification Module* (“SIM”), kartu *Removable User Identity Module* (“RUIM”), dan vaucer prabayar yang dibebankan pada saat penjualan. Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih.

Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk komponen, kartu SIM, kartu RUIM, dan vaucer prabayar dan metode identifikasi khusus untuk persediaan modul.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

Penyisihan untuk persediaan usang ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan setiap jenis persediaan pada masa depan.

i. Beban dibayar di muka

Beban dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud terdiri dari aset tidak berwujud yang berasal dari akuisisi anak perusahaan/bisnis, lisensi, dan peranti lunak komputer. Aset tidak berwujud diakui jika Perusahaan dan anak perusahaan kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tidak berwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset tidak berwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset tidak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan dan anak perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tidak berwujud. Apabila nilai tercatat aset tidak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Pada tahun 2006, Telkomsel diberikan lisensi pengoperasian seluler bergerak 3G (Catatan 13.iii). Telkomsel diharuskan membayar uang muka (*up-front fee*) dan iuran tahunan biaya hak penggunaan ("BHP") selama sepuluh tahun (Catatan 47c.i). Uang muka (*up-front fee*) dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa lisensi pengoperasian seluler bergerak 3G (10 tahun). Amortisasi dimulai pada tahun 2006, sejak aset terkait dengan pengoperasian tersebut tersedia untuk digunakan.

Berdasarkan interpretasi manajemen terhadap ketentuan lisensi tersebut dan konfirmasi tertulis dari DJPT, lisensi tersebut dapat dikembalikan setiap saat tanpa adanya kewajiban finansial untuk membayar sisa iuran tahunan BHP. Oleh karena itu, Telkomsel mengakui iuran tahunan BHP sebagai beban pada saat terjadinya. Manajemen melakukan evaluasi atas keberlangsungan penggunaan lisensi tersebut setiap tahun.

k. Aset tetap - perolehan langsung

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari: (a) harga perolehan, (b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisinya, dan (c) estimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Setiap bagian aset tetap yang memiliki harga perolehan cukup signifikan terhadap biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Nilai residu dan masa manfaat aset tetap harus direview minimum setiap akhir tahun buku.

Aset tetap yang diperoleh secara langsung diakui berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap - perolehan langsung (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Prasarana bangunan	3-7
Peralatan sentral telepon	5-15
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	5-15
Peralatan dan instalasi transmisi	5-20
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3-15
Jaringan kabel	5-25
Catu daya	3-10
Peralatan pengolahan data	3-10
Peralatan telekomunikasi lainnya	5
Peralatan kantor	2-5
Kendaraan	5-8
Peralatan lainnya	5

Terkait dengan PSAK 16R, sejak 1 Januari 2008, Perusahaan telah mengubah estimasi masa manfaat serat optik (merupakan bagian dari jaringan kabel) dari 15 tahun menjadi 25 tahun. Perusahaan membebankan pengaruh atas perubahan estimasi manfaat tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008 oleh karena dianggap tidak material.

Perusahaan dan anak perusahaan secara periodik menelaah kemungkinan terjadinya penurunan nilai aset tetap, dimana terdapat kejadian dan kondisi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tidak dapat diperoleh kembali. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.

Suku cadang dan peralatan pemeliharaan dicatat sebagai persediaan dan diakui sebagai bagian dari laba atau rugi pada saat dikonsumsi. Suku cadang utama dan suku cadang siap pakai yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari 12 bulan dicatat sebagai bagian aset tetap.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan laba atau rugi yang timbul dari pelepasan atau penjualan aset tetap diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Peranti keras komputer tertentu tidak dapat dioperasikan tanpa ketersediaan peranti lunak komputer tertentu. Dalam kondisi tersebut, peranti lunak komputer dicatat sebagai bagian dari peranti keras komputer. Jika peranti lunak komputer berdiri sendiri dari peranti keras komputernya, peranti lunak komputer tersebut dicatat sebagai bagian dari aset tidak berwujud.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan yang signifikan dikapitalisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap - perolehan langsung (lanjutan)

Aset dalam pembangunan diakui sebesar harga perolehan hingga pembangunan selesai, yang kemudian direklasifikasi secara spesifik menjadi aset tetap yang terkait. Selama masa pembangunan yang membutuhkan waktu minimum 12 bulan untuk siap digunakan atau dijual, biaya pinjaman, yang termasuk di dalamnya beban bunga dan selisih kurs yang timbul untuk membiayai pembangunan aset, dikapitalisasi secara proporsional terhadap rata-rata nilai akumulasi pengeluaran selama periode tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika pembangunan selesai dan aset tetap siap untuk digunakan.

Peralatan yang untuk sementara tidak digunakan direklasifikasi sebagai peralatan yang tidak digunakan dalam operasi dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaatnya.

l. Aset tetap sewa pembiayaan

Sejak 1 Januari 2008, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK 30 (Revisi 2007) "Sewa" ("PSAK 30R"), yang efektif berlaku untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2008.

Berdasarkan PSAK 30R, klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi dan bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") 8, "Penentuan Apakah suatu Perjanjian Mengandung suatu Sewa dan Pembahasan Lebih Lanjut Ketentuan Transisi PSAK 30 (Revisi 2007)", mengharuskan Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK 30R secara retrospektif terhadap semua transaksi sewa sejak tanggal mulainya perjanjian terkait atau secara prospektif seolah-olah PSAK 30R berlaku sejak awal periode pelaporan. Perusahaan memutuskan untuk melakukan penerapan prospektif. Efek kumulatif dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008 karena dampak dari penerapan standar tersebut terhadap tahun-tahun sebelumnya tidak signifikan.

Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan kewajiban pada neraca sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan perusahaan dan anak perusahaan ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat ekonomisnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, diklasifikasikan sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Perjanjian Pola Bagi Hasil ("PBH")

Pendapatan PBH diakui sesuai dengan bagian yang menjadi hak Perusahaan sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Perusahaan mencatat aset PBH sebagai "Aset tetap PBH" (dengan mengkredit akun "Pendapatan PBH ditangguhkan" yang disajikan pada bagian kewajiban di neraca konsolidasian) sebesar biaya yang dikeluarkan mitra usaha sebagaimana disetujui dalam perjanjian antara Perusahaan dan mitra usaha. Aset tetap tersebut disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat masing-masing aset dengan menggunakan metode garis lurus (Catatan 2k).

Pendapatan ditangguhkan yang berkaitan dengan perolehan aset tetap PBH diamortisasi selama masa bagi hasil dengan menggunakan metode garis lurus.

Pada akhir masa bagi hasil, aset tetap PBH yang bersangkutan direklasifikasi ke akun "Aset tetap".

n. Kerja Sama Operasi ("KSO")

Pendapatan dari KSO mencakup amortisasi pendapatan dari pembayaran para mitra KSO yang ditangguhkan, Pendapatan Minimum Telkom ("*Minimum Telkom Revenue*" atau "MTR") dan bagian Perusahaan atas Pendapatan KSO yang Harus Dibagi ("*Distributable KSO Revenues*" atau "DKSOR").

Kompensasi yang diterima dari mitra KSO dicatat sebagai pendapatan dari pembayaran para mitra KSO yang ditangguhkan, setelah dikurangi dengan seluruh beban langsung yang berkaitan dengan perjanjian KSO dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan masa KSO yaitu 15 tahun sejak tanggal 1 Januari 1996.

MTR diakui setiap bulan berdasarkan perhitungan jumlah MTR yang diperjanjikan untuk tahun berjalan.

Bagian Perusahaan atas DKSOR diakui berdasarkan persentase bagian Perusahaan atas pendapatan KSO, setelah dikurangi MTR dan beban operasi Unit KSO, sesuai dengan perjanjian KSO.

Berdasarkan PSAK 39, "Akuntansi Kerja Sama Operasi" yang menggantikan paragraf 14 PSAK 35, "Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi", aset yang dibangun oleh mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan mitra KSO yang mengoperasikan aset tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO.

o. Beban tangguhan - hak atas tanah

Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan dan perpanjangan masa hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode hak atas tanah tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Penjabaran valuta asing

Mata uang fungsional Perusahaan dan anak perusahaan adalah Rupiah dan pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca konsolidasian, aset dan kewajiban moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs beli dan jual yang diterbitkan oleh *Reuters* pada tanggal neraca konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

	Perusahaan dan anak perusahaan			
	2009		2008	
	Beli	Jual	Beli	Jual
Dolar Amerika Serikat ("US$") 1	9.420	9.430	10.850	10.950
Euro1	13.574	13.591	15.284	15.429
Yen1	102,05	102,20	120,09	121,22

Laba atau rugi selisih kurs yang timbul, baik yang telah maupun yang belum direalisasi, dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali untuk selisih kurs yang timbul dari pinjaman selama pembangunan suatu aset tertentu yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi, dimana pinjaman dapat diatribusikan terhadap pembangunan aset tersebut (Catatan 2k).

q. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan sambungan telepon tidak bergerak

Pendapatan dari pemasangan sambungan telepon tidak bergerak diakui pada saat pemasangan selesai dan siap dipakai. Pendapatan dari pemakaian telepon diakui pada saat pelanggan memakai telepon tersebut. Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

ii. Pendapatan telepon seluler dan jaringan tetap nirkabel

Pendapatan dari jasa pasca bayar, yang terdiri dari pendapatan jasa penyambungan, penggunaan, dan biaya abonemen bulanan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan jasa penyambungan diakui pada saat penyambungan terjadi.
- Pendapatan pulsa dan biaya pemakaian atas jasa nilai tambah diakui berdasarkan penggunaan pelanggan.
- Biaya abonemen bulanan diakui sebagai pendapatan pada saat pelanggan berlangganan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

ii. Pendapatan telepon seluler dan jaringan tetap nirkabel (lanjutan)

Pendapatan dari jasa prabayar, yang terdiri dari penjualan kartu perdana (yang berisi kartu SIM untuk telepon seluler atau kartu RUIM untuk telepon nirkabel dan vaucer perdana) dan vaucer isi ulang diakui sebagai berikut:

- Penjualan kartu SIM dan RUIM diakui sebagai pendapatan pada saat kartu perdana tersebut diserahkan kepada distributor, penyalur, atau langsung kepada pelanggan.
- Penjualan vaucer pulsa isi ulang (baik digabungkan dalam paket perdana ataupun dijual secara terpisah) diakui pertama kali sebagai pendapatan diterima di muka dan secara proporsional diakui sebagai pendapatan berdasarkan jangka waktu dan jumlah panggilan yang berhasil dilakukan dan pemakaian jasa nilai tambah oleh pelanggan atau pada saat sisa pulsa pada vaucer prabayar telah habis masa berlakunya.
- Potongan promosi yang belum digunakan disajikan sebagai pengurang pendapatan diterima di muka.

Pendapatan dalam rangka *Universal Service Obligation atau* Kewajiban Pelayanan Universal (”KPU”) diakui saat akses telekomunikasi siap dan jasa tersebut diserahkan.

iii. Pendapatan interkoneksi

Pendapatan dari interkoneksi jaringan dengan penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan internasional diakui pada saat terjadinya berdasarkan perjanjian dan disajikan sebesar jumlah bersih setelah dikurangi beban interkoneksi.

iv. Pendapatan data, internet, dan jasa teknologi informatika

Pendapatan dari pemasangan (*set-up*) internet, komunikasi data, dan *e-Business* diakui pada saat pemasangan selesai. Pendapatan dari komunikasi data dan internet diakui berdasarkan pemakaian.

Pendapatan dari penjualan, instalasi dan implementasi peranti lunak dan perangkat keras komputer, jasa pemasangan jaringan data komputer, dan instalasi diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan atau instalasi perangkat.

Pendapatan dari jasa pengembangan peranti lunak komputer diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian.

v. Pendapatan jaringan

Pendapatan dari jaringan terdiri dari pendapatan dari sewa sirkit dan *transponder* satelit yang diakui pada periode saat jasa diberikan.

vi. Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya

Pendapatan jasa telekomunikasi lainnya terdiri dari penjualan jasa atau barang telekomunikasi lainnya. Pendapatan diakui pada saat jasa diterima atau barang diserahkan kepada pelanggan.

vii. Beban

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Imbalan kerja

i. Pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja

Kewajiban bersih Perusahaan berkaitan dengan pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi imbalan yang akan diperoleh karyawan di masa depan sehubungan dengan jasa di masa sekarang dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pensiun setelah disesuaikan dengan laba atau rugi aktuaria yang tidak diakui, dan biaya jasa lalu yang tidak diakui. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi dengan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban yang bersangkutan.

Laba atau rugi aktuaria yang timbul dari adanya penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi aktuaria, yang melebihi nilai tertinggi antara 10% dari nilai kini dari kewajiban imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program, dibebankan atau dikreditkan terhadap laporan laba rugi konsolidasian selama sisa masa kerja rata-rata karyawan yang bersangkutan. Biaya jasa lalu diakui jika telah menjadi hak (*vested*) atau diamortisasi selama periode *vesting*.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran secara rutin yang merupakan biaya bersih berkala untuk tahun iuran tersebut terutang dan dicatat sebagai biaya karyawan.

ii. Penghargaan masa kerja ("Long Service Awards" atau "LSA") dan cuti masa kerja ("*Long Service Leave" atau "LSL")*

Perusahaan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

Laba atau rugi aktuaria yang muncul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan asumsi aktuarial, dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian.

Kewajiban sehubungan dengan LSA dan LSL dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

iii. Pensiun dini ("Pendi")

Beban Pendi diakui pada saat Perusahaan berkomitmen untuk memberi imbalan Pendi yang timbul sehubungan dengan tawaran yang diajukan Perusahaan agar karyawan terdorong untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela. Perusahaan dianggap berkomitmen untuk melakukan Pendi jika, dan hanya jika, Perusahaan telah memiliki rencana Pendi formal yang tidak dapat dibatalkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Imbalan kerja (lanjutan)

iv. Masa persiapan pensiun ("MPP")

Karyawan Perusahaan memperoleh manfaat selama MPP, dimana karyawan mulai tidak aktif selama 6 bulan sebelum memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Selama masa MPP, karyawan masih akan menerima manfaat yang diberikan kepada karyawan aktif, termasuk, tetapi tidak terbatas pada gaji rutin, fasilitas kesehatan, libur tahunan, bonus, dan tunjangan lainnya. Manfaat yang diberikan kepada karyawan yang memasuki MPP dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

v. Imbalan pasca kerja lainnya

Karyawan memperoleh tunjangan persiapan pensiun dan tunjangan fasilitas perumahan terakhir pada saat memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Manfaat tersebut dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Laba atau rugi kurtailmen diakui apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah yang material yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material dari jasa yang diberikan karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

s. Pajak Penghasilan ("PPh")

Perusahaan dan anak perusahaan mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer aset dan kewajiban untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan dan anak perusahaan juga mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari manfaat pajak pada masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa depan cukup besar (*probable*). Aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan yang diharapkan tetap berlaku terhadap laba kena pajak untuk tahun-tahun dimana perbedaan temporer tersebut terpulihkan atau direalisasi.

PPh dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian, kecuali apabila pajak tersebut berkaitan dengan pos-pos yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas, misalnya selisih nilai transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali dan efek penyesuaian penjabaran mata uang asing untuk penyertaan tertentu di perusahaan asosiasi, dalam hal mana PPh-nya juga dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan kewajiban pajak kini dihitung sebesar jumlah yang diharapkan dapat diperoleh atau dibayar dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang telah ditetapkan pada setiap tanggal pelaporan.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan pajak, atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. PPh (lanjutan)

Aset dan kewajban pajak tangguhan disajikan saling hapus di neraca konsolidasian, kecuali aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini.

t. Instrumen derivatif

Transaksi derivatif diakui sesuai dengan PSAK 55, "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai" yang mensyaratkan bahwa semua instrumen derivatif diakui dalam laporan keuangan pada nilai wajarnya. Untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, PSAK 55 mensyaratkan beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi, termasuk adanya dokumentasi formal pada awal lindung nilai.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat lindung nilai, aset atau kewajiban terkait harus disesuaikan nilainya. Perubahan nilai wajar instrumen derivatif diakui pada laporan laba rugi konsolidasian atau laporan perubahan ekuitas konsolidasian tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari transaksi lindung nilai tersebut.

u. Modal saham yang diperoleh kembali

Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehannya sebagai "Modal Saham yang Diperoleh Kembali" dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pemegang saham. Harga pokok dari penjualan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali saham dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor".

v. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perusahaan diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perusahaan. Untuk dividen interim, Perusahaan mengakui sebagai kewajiban berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Laba per saham dan laba per ADS

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun tersebut. Laba bersih per ADS dihitung dengan mengalikan laba per saham dasar dengan 40, yaitu jumlah saham per ADS.

x. Informasi segmen

Informasi segmen Perusahaan dan anak perusahaan disajikan menurut segmen usaha. Segmen usaha adalah unit yang dapat dibedakan (*distinguishable unit*) yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Informasi segmen usaha konsisten dengan informasi operasi yang secara rutin dilaporkan kepada tingkat pengambil keputusan operasional tertinggi di Perusahaan.

y. Penggunaan taksiran

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan. Pos-pos signifikan yang terkait dengan taksiran dan asumsi antara lain termasuk, nilai tercatat aset tetap dan aset tidak berwujud, penyisihan untuk piutang, dan kewajiban yang berhubungan dengan imbalan karyawan. Hasil aktual dapat berbeda dari taksiran tersebut. Dalam menentukan beberapa taksiran, manajemen menggunakan tenaga ahli pihak ketiga sebagaimana dipersyaratkan. Dalam menggunakan tenaga ahli untuk membantu dengan model dan perhitungan, manajemen mereview asumsi dasar dan menilai perhitungan yang terkait kewajaran dalam konteks keadaan Perusahaan.

3. AKUISISI SIGMA

Pada tanggal 21 Februari 2008, Metra dan para pemegang saham Sigma, PT Sigma Citra Harmoni ("SCH") dan Trozenin Management Plc menandatangani Amandemen Perjanjian Jual Beli Saham dimana Metra mengakuisisi 80% saham Sigma dengan harga perolehan sebesar US$35,2 juta atau setara dengan Rp331.052 juta yang berlaku efektif pada tanggal 22 Februari 2008 ("tanggal penutupan") (Catatan 1d.b).

Sigma adalah perusahaan jasa teknologi informatika yang menyediakan peranti lunak untuk perusahaan perbankan, *multi finance*, dan manufaktur. Melalui akuisisi ini, Perusahaan memulai untuk memperluas jasanya pada industri-industri sejenis terutama jasa teknologi informatika dengan menggabungkan pengalaman Sigma dan basis konsumen korporasi Perusahaan. Goodwill dalam kaitannya dengan akuisisi ini terdiri terutama dari nilai wajar dari keahlian dan pengalaman dari tenaga kerja perusahaan yang diakuisisi.

Metra dan SCH setuju untuk mendukung Sigma melakukan IPO dalam periode 24 bulan dari tanggal penutupan. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut, SCH sebagai pemegang 20% saham Sigma, mempunyai opsi jual (*put option*) yang mengharuskan Metra membeli saham minoritas. Harga beli opsi tersebut yaitu nilai tertinggi antara harga per saham yang diperjualbelikan yang disesuaikan dengan tingkat bunga dan nilai wajar yang ditentukan oleh penilai independen.

3. AKUISISI SIGMA (lanjutan)

Akuisisi Sigma dicatat dengan menggunakan metode pembelian, dimana harga perolehan dialokasikan ke nilai wajar aset yang diperoleh dan kewajiban yang ditanggung. Alokasi harga perolehan adalah sebagai berikut:

	Rp
Aset dan kewajiban yang berasal dari akuisisi adalah sebagai berikut:	
Aset lancar	150.461
Aset tetap	86.886
Aset tidak lancar lainnya	29.686
Aset tidak berwujud	189.405
Kewajiban jangka pendek	(75.347)
Kewajiban jangka panjang	(37.570)
Kewajiban pajak tangguhan	(54.636)
Hak minoritas	(57.777)
Nilai wajar aset bersih yang diakuisisi	231.108
Goodwill	99.944
Jumlah harga perolehan	**331.052**
Dikurangi:	
Kas dan setara kas pada anak perusahaan yang diakuisisi	(43.649)
Arus kas keluar akibat akuisisi	**287.403**

Metra memperoleh kendali atas Sigma pada tanggal 22 Februari 2008 dan penilaian dilakukan oleh penilai independen dengan menggunakan saldo 28 Februari 2008, sebagai tanggal neraca terdekat. Hasil usaha konsolidasian Perusahaan meliputi hasil usaha Sigma terhitung sejak 1 Maret 2008. Aset tidak berwujud merupakan kontrak dan hubungan jangka panjang dengan konsumen, peranti lunak, dan merek dagang (Catatan 13).

4. KAS DAN SETARA KAS

	2009	2008
Kas	6.730	9.786
Bank		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")	200.611	108.701
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	146.575	177.306
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	15.096	7.949
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN")	5.581	68
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	46	40
PT Bank Pos Nusantara	7	189
	367.916	294.253
Mata uang asing		
Bank Mandiri	81.131	88.099
BNI	35.942	26.394
BRI	377	983
BSM	242	109
	117.692	115.585
Sub-jumlah	485.608	409.838
Pihak ketiga		
Rupiah		
ABN AMRO Bank ("AAB")	97.176	86.787
PT Bank Ekonomi Raharja Tbk ("Bank Ekonomi")	29.940	3.308
Deutsche Bank AG ("DB")	14.858	20.363
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	8.196	12.815
PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga") (dahulu PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Lippo Tbk)	5.570	8.229
PT Bank Bukopin Tbk ("Bank Bukopin")	3.830	5.600
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	1.497	-
PT Bank DKI	-	2.271
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	3.330	2.734
	164.397	142.107
Mata uang asing		
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC")	19.980	-
Deutsche Bank AG ("DB")	10.265	11.969
Citibank, N.A. ("Citibank")	8.874	10.223
Bank Ekonomi	5.789	3.267
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	1.313	1.454
	46.221	26.913
Sub-jumlah	210.618	169.020
Jumlah bank	696.226	578.858

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2009	2008
Deposito berjangka		
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Rupiah		
BRI	1.400.220	958.610
BNI	832.161	479.074
Bank Mandiri	344.309	412.531
BTN	270.000	455.725
BSM	3.000	10.000
	2.849.690	2.315.940
Mata uang asing		
BNI	1.065.477	992.813
BRI	557.664	217.000
Bank Mandiri	-	417.575
	1.623.141	1.627.388
Sub-jumlah	4.472.831	3.943.328
Pihak ketiga		
Rupiah		
BCA	660.700	-
PT Pan Indonesia Bank Tbk	395.300	55.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (“Bank Jabar”)	390.560	395.560
Bank Bukopin	237.980	305.030
PT Bank Muamalat Indonesia	127.000	108.550
Bank CIMB Niaga	116.817	202.760
PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”)	100.500	217.945
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”)	40.000	74.315
PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”) (dahulu PT Bank NISP Tbk)	30.000	20.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	24.000	13.000
Deutsche Bank AG (“DB”)	10.100	47.900
Bank Ekonomi	9.000	2.000
PT Bank Yudha Bhakti	2.500	5.700
PT Bank Syariah Mega Indonesia (“Bank Syariah Mega”)	2.500	2.000
PT Bank ICB Bumiputera, Tbk (dahulu PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk)	2.000	20.000
PT Bank Internasional Indonesia Tbk (“BII”)	-	155.000
PT Bank Mutiara Tbk (dahulu PT Bank Century Tbk)	-	70.000
PT Bank Permata Tbk	-	30.000
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	-	10.000
	2.148.957	1.734.760

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2009	2008
Deposito berjangka (lanjutan)		
Pihak ketiga (lanjutan)		
Mata uang asing		
BCA	480.716	228.198
Standard Chartered Bank ("SCB")	-	392.835
Bank Bukopin	-	2.180
	480.716	623.213
Sub-jumlah	2.629.673	2.357.973
Jumlah deposito berjangka	7.102.504	6.301.301
Jumlah	**7.805.460**	**6.889.945**

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Rupiah	4,00 % - 13,50%	1,75% - 13,75%
Mata uang asing	0,05% - 4,75%	0,01% - 5,25%

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana Perusahaan dan anak perusahaan melakukan penempatan dananya merupakan bank milik negara. Perusahaan dan anak perusahaan menempatkan sebagian besar kas dan setara kasnya di bank-bank tersebut karena mereka memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia dan secara keuangan dianggap aman karena dimiliki oleh negara.

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha sehubungan dengan jasa yang diberikan kepada pelanggan *retail* dan non-*retail*, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pelanggan

(i) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

	2009	2008
Instansi Pemerintah	553.656	550.204
CSM	57.797	40.401
Indosat	48.067	-
PT Patra Telekomunikasi Indonesia ("Patrakom")	17.869	23.332
PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta")	5.993	2.010
PT Graha Informatika Nusantara ("Gratika")	3.122	4.962
Koperasi Pegawai Telkom ("Kopegtel")	2.792	354
PSN	2.784	258
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	6.171	4.649
Jumlah	698.251	626.170
Penyisihan piutang ragu-ragu	(93.483)	(81.196)
Jumlah bersih	**604.768**	**544.974**

Piutang usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tertentu disajikan bersih setelah memperhitungkan kewajiban Perusahaan dan anak perusahaan kepada pihak yang sama berdasarkan hak untuk melakukan saling hapus yang disepakati oleh kedua belah pihak.

(ii) Pihak ketiga

	2009	2008
Pelanggan individual dan bisnis	3.997.063	3.623.066
Penyelenggara jasa telekomunikasi internasional luar negeri	367.920	464.438
Jumlah	4.364.983	4.087.504
Penyisihan piutang ragu-ragu	(1.180.067)	(1.122.709)
Jumlah bersih	**3.184.916**	**2.964.795**

b. Berdasarkan umur

(i) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

	2009	2008
Sampai dengan 6 bulan	416.630	461.226
7 sampai dengan 12 bulan	71.069	77.150
Lebih dari 12 bulan	210.552	87.794
Jumlah	698.251	626.170
Penyisihan piutang ragu-ragu	(93.483)	(81.196)
Jumlah bersih	**604.768**	**544.974**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan umur (lanjutan)

(ii) Pihak ketiga

	2009	2008
Sampai dengan 3 bulan	3.031.085	2.856.930
Lebih dari 3 bulan	1.333.898	1.230.574
Jumlah	4.364.983	4.087.504
Penyisihan piutang ragu-ragu	(1.180.067)	(1.122.709)
Jumlah bersih	**3.184.916**	**2.964.795**

c. Berdasarkan mata uang

(i) Pihak yang mempunyai hubungan istimewa

	2009	2008
Rupiah	672.053	612.492
Dolar A.S.	26.198	13.678
Jumlah	698.251	626.170
Penyisihan piutang ragu-ragu	(93.483)	(81.196)
Jumlah bersih	**604.768**	**544.974**

(ii) Pihak ketiga

	2009	2008
Rupiah	3.737.492	3.481.160
Dolar A.S.	627.487	606.344
Dolar Singapura	4	-
Jumlah	4.364.983	4.087.504
Penyisihan piutang ragu-ragu	(1.180.067)	(1.122.709)
Jumlah bersih	**3.184.916**	**2.964.795**

d. Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu

	2009	2008	2007
Saldo awal	1.203.905	1.100.456	784.789
Penambahan (Catatan 36)	561.162	387.155	490.374
Penghapusbukuan piutang tak tertagih	(491.517)	(283.706)	(174.707)
Saldo akhir	**1.273.550**	**1.203.905**	**1.100.456**

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

d. Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Kecuali untuk piutang dari Instansi Pemerintah, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang. Perusahaan dan anak perusahaan tidak mempunyai risiko kredit atas piutang yang terkait dengan pelanggan yang tidak dicerminkan di neraca konsolidasian (*off-balance sheet credit exposure*).

Piutang usaha tertentu anak perusahaan telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 22).

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

6. PERSEDIAAN

	2009	2008
Modul	233.819	171.643
Komponen	162.032	242.488
Kartu SIM, kartu RUIM, dan vaucer prabayar	111.567	162.668
Jumlah	507.418	576.799
Penyisihan persediaan usang		
Modul	(65.369)	(58.828)
Komponen	(6.795)	(6.021)
Kartu SIM, kartu RUIM, dan vaucer prabayar	(10)	-
Jumlah	(72.174)	(64.849)
Jumlah bersih	**435.244**	**511.950**

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Saldo awal	64.849	54.701	48.098
Penambahan (Catatan 36)	12.542	10.795	10.434
Penghapusbukuan persediaan	(5.217)	(647)	(3.831)
Saldo akhir	**72.174**	**64.849**	**54.701**

Komponen dan modul terdiri dari pesawat telepon, kabel, suku cadang instalasi transmisi, dan persediaan suku cadang lainnya.

Manajemen berpendapat bahwa saldo penyisihan cukup untuk menutup kerugian akibat dari penurunan nilai persediaan karena usang.

Persediaan tertentu anak perusahaan telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 22).

6. PERSEDIAAN (lanjutan)

Pada 31 Desember 2009, beberapa persediaan yang dimiliki oleh Perusahaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lain. Total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp89.184 juta (Catatan 43d.vii).

Beberapa persediaan yang dimiliki oleh anak perusahaan tertentu telah diasuransikan terhadap *all industrial risks* dan risiko kehilangan pada saat pengiriman dengan total nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp10.000 juta.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan tertentu yang mungkin dialami Perusahaan.

7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	2009	2008
Izin penggunaan frekuensi (Catatan 47c.iii)	1.723.010	1.061.871
Sewa	380.589	359.328
Gaji	338.492	405.025
Asuransi	3.769	8.047
Biaya penerbitan buku petunjuk telepon	1.671	2.133
Lain-lain	49.008	39.369
Jumlah	**2.496.539**	**1.875.773**

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

8. ASET LANCAR LAINNYA

Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, terdiri dari deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sebagai berikut:

		2009		2008	
	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
BNI					
Perusahaan	Rp	-	102.575	-	23.242
	US$	0,102	962	0,336	3.649
TII	US$	0,569	5.356	-	-
Telkomsel	Rp	-	-	-	34.632
Infomedia	Rp	-	-	-	200
Bank Mandiri					
Perusahaan	Rp	-	3.793	-	1.568
	US$	-	-	0,014	150
Metra	Rp	-	12.305	-	-
Infomedia	Rp	-	-	-	13.494
TII	US$	-	-	0,569	6.169

8. ASET LANCAR LAINNYA (lanjutan)

		2009		2008	
	Mata uang	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Mata uang asal (dalam jutaan)	Setara Rupiah
BRI					
Metra	Rp	-	347	-	-
Bank Ekonomi					
Metra	Rp	-	144	-	-
Bank Syariah Mega					
Dayamitra	Rp	-	-	-	300
Bank Mega					
Infomedia	Rp	-	-	-	3
Jumlah			**125.482**		**83.407**

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka milik Perusahaan dan anak perusahaan yang dijadikan jaminan untuk garansi bank kepada beberapa bank.

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

9. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

	2009					
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan	Bagian (rugi) laba	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Saldo akhir
Metode ekuitas:						
CSM	25,00	84.197	-	(33.175)	(6.745)	44.277
Patrakom	40,00	32.949	-	3.460	-	36.409
PSN	22,38	-	-	-	-	-
		117.146	-	(29.715)	(6.745)	80.686
Metode biaya:						
Scicom (MSC) Berhad ("Scicom")	15,86	30.961	18.760	-	-	49.721
Bridge Mobile Pte. Ltd. ("BMPL")	10,00	20.360	-	-	-	20.360
PT Batam Bintan Telekomunikasi ("BBT")	5,00	587	-	-	-	587
PT Pembangunan Telekomunikasi Indonesia ("Bangtelindo")	2,11	199	-	-	-	199
		52.107	18.760	-	-	70.867
		169.253	**18.760**	**(29.715)**	**(6.745)**	**151.553**

9. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

	2008						
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan	Bagian laba	Dividen	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Saldo akhir
Metode ekuitas:							
CSM	25,00	57.240	-	18.470	-	8.487	84.197
Patrakom	40,00	32.892	-	2.001	(1.944)	-	32.949
PSN	22,38	-	-	-	-	-	-
		90.132	-	20.471	(1.944)	8.487	117.146
Metode biaya:							
Scicom	9,80	2.712	28.249	-	-	-	30.961
BMPL	10,00	20.360	-	-	-	-	20.360
BBT	5,00	587	-	-	-	-	587
Bangtelindo	2,11	199	-	-	-	-	199
		23.858	28.249	-	-	-	52.107
		113.990	**28.249**	**20.471**	**(1.944)**	**8.487**	**169.253**

a. CSM

CSM bergerak dalam bidang penyediaan Sistem Komunikasi Stasiun Bumi Mikro (*"Very Small Aperture Terminal*" atau "VSAT"), jasa aplikasi jaringan, dan jasa konsultasi mengenai teknologi telekomunikasi dan sarana lain yang terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, nilai tercatat penyertaan di CSM sama dengan bagian Perusahaan dalam aset bersih CSM.

b. Patrakom

Patrakom bergerak dalam bidang penyediaan jasa sistem komunikasi satelit, jasa-jasa dan sarana terkait untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri perminyakan.

Berdasarkan hasil RUPST Patrakom pada tanggal 30 April 2008 yang dinyatakan dalam akta notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No. 235 tertanggal 30 April 2008, para pemegang saham Patrakom menyetujui pembagian dividen kas untuk 2007 sebesar Rp4.859 juta dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp607 juta. Bagian Perusahaan atas dividen tersebut sebesar Rp1.944 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, nilai tercatat penyertaan di Patrakom sama dengan bagian Perusahaan dalam aset bersih Patrakom.

c. PSN

PSN bergerak dalam bidang penyewaan *transponder* satelit dan penyelenggaraan jasa komunikasi berbasis satelit di wilayah Asia Pasifik. Bagian rugi Perusahaan dari PSN telah melebihi nilai penyertaannya sejak 2001, oleh karena itu nilai penyertaannya telah menjadi Rp nihil.

9. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. Scicom

Scicom bergerak dalam bidang penyediaan jasa *call center* di Malaysia. Pada 31 Desember 2008, kontribusi TII adalah sebesar US$3,42 juta (setara dengan Rp30.961 juta) mencerminkan 9,80% total kepemilikan TII pada Scicom.

Pada tahun 2009, TII melakukan tambahan pembelian saham Scicom sejumlah 16.081.800 lembar saham dengan nilai transaksi sebesar US$1,973 juta (setara dengan Rp18.760 juta) sehingga tingkat kepemilikan TII di Scicom meningkat menjadi 15,86%.

e. BMPL

BMPL (Singapore), suatu perusahaan asosiasi dari Telkomsel, bergerak dalam penyediaan jasa seluler regional di wilayah Asia Pasifik.

Pada 31 Desember 2009 dan 2008, kontribusi Telkomsel sebesar US$2.200.000 (Rp20.360 juta) mencerminkan 10% kepemilikan.

f. BBT

BBT bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak bergerak di Kawasan Industri Batamindo di Muka Kuning, Pulau Batam serta di *Bintan Beach International Resort* dan Kawasan Industri Bintan di Pulau Bintan.

g. Bangtelindo

Bangtelindo terutama bergerak dalam bidang penyediaan jasa konsultasi untuk pemasangan dan pemeliharaan sarana telekomunikasi.

Pada tanggal 5 Februari 2008, berdasarkan keputusan RUPSLB Bangtelindo yang dinyatakan dalam akta notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. No. 85 tanggal 30 Juni 2008, para pemegang saham Bangtelindo menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp1.200 juta dari pemegang saham PT Fokus Investama Mondial. Penambahan modal disetor ini mengakibatkan kepemilikan Perusahaan di Bangtelindo terdilusi menjadi 2,11%.

10. ASET TETAP

	1 Januari 2009	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2009
Harga perolehan:					
Aset tetap yang diperoleh sendiri					
Tanah	684.768	59.887	-	36.620	781.275
Bangunan	2.721.804	48.130	(3.810)	212.293	2.978.417
Prasarana bangunan	460.836	65.934	-	-	526.770
Peralatan sentral telepon	26.356.172	83.741	-	2.508.393	28.948.306
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	139.165	-	-	(118.449)	20.716
Peralatan dan instalasi transmisi	56.572.954	2.165.254	(36.713)	8.527.253	67.228.748
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	6.502.198	369.718	(10.540)	(65.997)	6.795.379
Jaringan kabel	21.857.982	1.848.996	(407)	(84.985)	23.621.586
Catu daya	5.838.258	311.784	(4.822)	1.223.501	7.368.721
Peralatan pengolahan data	7.184.767	257.806	(14.364)	174.656	7.602.865
Peralatan telekomunikasi lainnya	545.194	26.524	(536)	(94.477)	476.705
Peralatan kantor	678.640	58.794	(8.574)	(152.762)	576.098
Kendaraan	127.274	1.576	(117)	(18.517)	110.216
Peralatan lainnya	105.386	10.033	-	(12.109)	103.310
Aset dalam pembangunan:					
Bangunan	60.099	215.868	-	(186.041)	89.926
Prasarana bangunan	-	466	-	-	466
Peralatan sentral telepon	17.155	2.539.676	-	(2.508.243)	48.588
Peralatan dan instalasi transmisi	1.173.830	7.681.570	-	(8.496.838)	358.562
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	-	18.119	-	(18.119)	-
Jaringan kabel	384	14.565	-	(12.093)	2.856
Catu daya	13.131	1.285.359	-	(1.246.323)	52.167
Peralatan pengolahan data	427.698	830.352	-	(1.242.042)	16.008
Aset sewa pembiayaan					
Peralatan dan instalasi transmisi	284.978	3.788	-	-	288.766
Peralatan pengolahan data	236.240	30.027	-	(5.485)	260.782
Peralatan kantor	437.705	4.211	(194.019)	-	247.897
Kendaraan	56.998	362	(127)	3.987	61.220
Aset *customer premise equipment ("CPE")*	23.307	-	-	(1.529)	21.778
Jumlah	132.506.923	17.932.540	(274.029)	(1.577.306)	148.588.128
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:					
Aset tetap yang diperoleh sendiri					
Bangunan	1.351.589	146.061	(3.810)	(8.606)	1.485.234
Prasarana bangunan	323.910	57.318	-	308	381.536
Peralatan sentral telepon	15.926.334	2.605.313	-	(105.974)	18.425.673
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	135.327	543	-	(118.479)	17.391
Peralatan dan instalasi transmisi	19.220.612	5.894.350	(14.585)	(305.418)	24.794.959
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	2.732.847	474.600	(10.538)	(60.224)	3.136.685
Jaringan kabel	13.506.314	1.302.959	(390)	(120.283)	14.688.600
Catu daya	2.333.053	686.487	(3.983)	(83.430)	2.932.127
Peralatan pengolahan data	4.588.877	1.032.723	(14.325)	(512.855)	5.094.420
Peralatan telekomunikasi lainnya	462.208	11.132	(536)	(120.929)	351.875
Peralatan kantor	561.073	49.202	(5.680)	(139.304)	465.291
Kendaraan	108.049	5.902	(63)	(19.195)	94.693
Peralatan lainnya	94.866	4.492	-	(12.130)	87.228
Aset sewa pembiayaan					
Peralatan dan instalasi transmisi	207.323	19.870	-	-	227.193
Peralatan pengolahan data	60.162	54.262	-	2.116	116.540
Peralatan kantor	290.717	103.929	(194.018)	411	201.039
Kendaraan	11.640	17.713	(48)	(172)	29.133
Aset CPE	2.432	2.392	-	(279)	4.545
Jumlah	61.917.333	12.469.248	(247.976)	(1.604.443)	72.534.162
Nilai Buku Bersih	**70.589.590**				**76.053.966**

10. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari 2008	Akuisisi Sigma	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2008
Harga perolehan:						
Aset tetap yang diperoleh sendiri						
Tanah	561.348	26.678	95.599	-	1.143	684.768
Bangunan	2.557.804	17.091	40.502	(349)	106.756	2.721.804
Prasarana bangunan	403.498	2.226	54.004	-	1.108	460.836
Peralatan sentral telepon	24.293.139	-	72.635	-	1.990.398	26.356.172
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	156.036	-	959	-	(17.830)	139.165
Peralatan dan instalasi transmisi	44.758.386	-	2.750.067	(27.523)	9.092.024	56.572.954
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	5.979.626	-	632.731	-	(110.159)	6.502.198
Jaringan kabel	20.669.529	-	1.855.736	-	(667.283)	21.857.982
Catu daya	4.416.077	-	97.001	-	1.325.180	5.838.258
Peralatan pengolahan data	5.710.782	14.523	505.966	(23)	953.519	7.184.767
Peralatan telekomunikasi lainnya	637.020	2.186	31.043	-	(125.055)	545.194
Peralatan kantor	706.484	1.345	42.644	(768)	(71.065)	678.640
Kendaraan	156.192	1.161	14.411	(1.064)	(43.426)	127.274
Peralatan lainnya	109.784	-	4.502	-	(8.900)	105.386
Aset dalam pembangunan:						
Bangunan	86	-	160.163	-	(100.150)	60.099
Peralatan sentral telepon	83.740	-	1.972.192	-	(2.038.777)	17.155
Peralatan dan instalasi transmisi	2.525.030	-	9.391.458	-	(10.742.658)	1.173.830
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	3.557	-	-	-	(3.557)	-
Jaringan kabel	381	-	1.188	-	(1.185)	384
Catu daya	37.979	-	1.319.288	-	(1.344.136)	13.131
Peralatan pengolahan data	31.351	21.676	1.456.582	(6)	(1.081.905)	427.698
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	283.813	-	1.226	(61)	-	284.978
Peralatan pengolahan data	-	-	236.240	-	-	236.240
Peralatan kantor	-	-	578.439	(146.677)	5.943	437.705
Kendaraan	-	-	56.719	-	279	56.998
Aset *customer premise equipment ("CPE")*	-	-	23.307	-	-	23.307
Jumlah	114.081.642	86.886	21.394.602	(176.471)	(2.879.736)	132.506.923
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai:						
Aset tetap yang diperoleh sendiri						
Bangunan	1.207.216	-	131.566	-	12.807	1.351.589
Prasarana bangunan	257.862	-	64.906	-	1.142	323.910
Peralatan sentral telepon	13.562.557	-	2.422.407	-	(58.630)	15.926.334
Peralatan telegraf, teleks, dan komunikasi data	152.427	-	730	-	(17.830)	135.327
Peralatan dan instalasi transmisi	16.178.965	-	4.689.470	(9.236)	(1.638.587)	19.220.612
Satelit, stasiun bumi, dan peralatannya	2.373.355	-	440.331	-	(80.839)	2.732.847
Jaringan kabel	12.917.430	-	1.293.189	-	(704.305)	13.506.314
Catu daya	1.864.747	-	485.957	-	(17.651)	2.333.053
Peralatan pengolahan data	3.895.304	-	820.412	-	(126.839)	4.588.877
Peralatan telekomunikasi lainnya	575.458	-	14.216	-	(127.466)	462.208
Peralatan kantor	584.927	-	44.613	(409)	(68.058)	561.073
Kendaraan	147.055	-	4.984	(868)	(43.122)	108.049
Peralatan lainnya	100.437	-	3.329	-	(8.900)	94.866
Aset sewa pembiayaan						
Peralatan dan instalasi transmisi	188.094	-	19.229	(24)	24	207.323
Peralatan pengolahan data	-	-	58.557	-	1.605	60.162
Peralatan kantor	-	-	435.482	(146.677)	1.912	290.717
Kendaraan	-	-	11.524	-	116	11.640
Aset CPE	-	-	2.432	-	-	2.432
Jumlah	54.005.834	-	10.943.334	(157.214)	(2.874.621)	61.917.333
Nilai Buku Bersih	**60.075.808**					**70.589.590**

10. ASET TETAP (lanjutan)

a. (Rugi) laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap

	2009	2008	2007
Hasil penjualan aset tetap	12.465	3.598	39.105
Nilai buku bersih	(26.053)	(19.257)	(18.464)
(Rugi) laba dari pelepasan atau penjualan aset tetap	**(13.588)**	**(15.659)**	**20.641**

b. Perjanjian kepemilikan aset KSO

(i) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO VII dengan PT Bukaka Singtel International ("BSI"), hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO VII yang telah diakuisisi tetap berada di BSI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, nilai buku aset tetap ini masing-masing sebesar Rp818.138 juta dan Rp927.709 juta.

(ii) Sehubungan dengan perubahan dan pernyataan kembali perjanjian KSO IV dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia ("MGTI"), hak kepemilikan secara legal atas aset tetap di KSO IV yang telah diakuisisi tetap berada di MGTI sampai akhir masa KSO yaitu pada tanggal 31 Desember 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, nilai buku bersih aset tetap ini masing-masing sebesar Rp263.462 juta dan Rp510.347 juta.

c. Penurunan nilai aset dan klaim terkait

(i) Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Perusahaan mengoperasikan dua satelit, Telkom-1 dan Telkom-2, terutama sebagai *backbone* hubungan transmisi untuk jaringan milik Perusahaan sendiri serta untuk penyediaan jasa *up-linking* dan *down-linking* satelit stasiun bumi untuk para pengguna domestik dan internasional. Pada tanggal 31 Desember 2009, tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat satelit Perusahaan kemungkinan tidak dapat terpulihkan.

(ii) Pada tanggal 9 Juli 2008, terjadi banjir di Balikpapan dan sekitarnya, wilayah Divre VI Kalimantan, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsur-angsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak Juli 2008.

(iii) Pada tanggal 16 Agustus 2009, terjadi gempa bumi di Padang dan sekitarnya, wilayah Divre I Sumatera, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsur-angsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak Agustus 2009.

(iv) Pada tanggal 2 September 2009, terjadi gempa bumi di Tasikmalaya dan sekitarnya, wilayah Divre III Jawa Barat, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsur-angsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak September 2009.

(v) Pada tanggal 30 September 2009, terjadi gempa bumi di Padang dan sekitarnya, wilayah Divre I Sumatera, dan proses klaim asuransi penggantian aset tetap telah dibuat. Secara berangsur-angsur gedung dan perangkat-perangkat yang terkena dampak telah beroperasi kembali sejak Oktober 2009.

10. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain

(i) Tidak ada bunga pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun 2009, 2008, dan 2007.

(ii) Tidak ada rugi selisih kurs yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan untuk tahun 2009, 2008, dan 2007.

(iii) Pada tahun 2009, peranti lunak dan peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari prasarana dan peralatan penunjang) dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp1.163.657 juta direncanakan hanya akan digunakan sampai dengan tahun 2011, oleh karena itu, penyusutan dipercepat sampai dengan tahun 2011. Dampak percepatan penyusutan tersebut adalah tambahan beban penyusutan sebesar Rp27.653 juta yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

(iv) Pada tahun 2009, masa manfaat peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari peralatan penunjang) mengalami perubahan dari 10 tahun menjadi 5 tahun agar mencerminkan masa manfaat aset saat ini. Dampak percepatan penyusutan adalah sebesar Rp82.288 juta yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

(v) Pada tahun 2008, Perusahaan melakukan reklasifikasi peranti lunak Perusahaan yang sebelumnya dicatat di aset tetap ke aset tidak berwujud (Catatan 13).

(vi) Pada tahun 2008, peralatan tertentu Telkomsel (bagian dari prasarana) dengan nilai tercatat bersih sebesar Rp352.862 juta dan masa manfaat yang diharapkan sebelumnya lebih dari tahun 2010, hanya akan digunakan sampai tahun 2010. Sehubungan dengan perkembangan teknologi saat ini, peralatan tersebut hanya digunakan sampai dengan 31 Desember 2009. Sehingga, penyusutan peralatan tersebut dipercepat sampai dengan tanggal tersebut. Beban penyusutan dipercepat Telkomsel yang dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian pada tahun 2009 dan 2008 masing-masing adalah Rp230.412 juta dan Rp22.646 juta.

(vii) Sejak tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 31 Desember 2008, Telkomsel mengkapitalisasi aset tetap sebesar Rp8.260.648 juta yang selanjutnya mengalami penyesuaian harga sebesar US$107,05 juta berdasarkan perjanjian antara Telkomsel dan pemasoknya (Catatan 47a.ii). Dampak dari penyesuaian tersebut adalah pengurangan terhadap aset tetap yang dikapitalisasi sebesar Rp1.035.588 juta, kewajiban yang masih harus dibayar sebesar Rp1.172.198 juta dan penyusutan sebesar Rp47.868 juta yang dibebankan pada laporan keuangan konsolidasian tahun 2008.

(viii) Perusahaan dan anak perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan ("HGB") berjangka waktu 15-45 tahun yang akan habis masa berlakunya antara tahun 2010 hingga 2052. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak akan terdapat kesulitan untuk memperpanjang hak atas tanah pada saat berakhirnya hak tersebut.

(ix) Perusahaan diberikan hak untuk menggunakan beberapa bidang tanah tertentu oleh Depkominfo (dahulu Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Republik Indonesia ("DPPT")) dimana tanah-tanah tersebut tercatat atas nama DPPT dan Departemen Perhubungan Republik Indonesia. Pengalihan hak kepemilikan secara hukum atas tanah tersebut kepada Perusahaan masih dalam proses.

10. ASET TETAP (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

(x) Pada tanggal 31 Desember 2009, aset tetap milik Perusahaan dan anak perusahaan kecuali tanah, senilai Rp73.325.046 juta diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo"), PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, HSBC Insurance (Singapore) Pte, Ltd, PT Asuransi Mitra, PT Advis Terapan Proteksindo, dan PT Asuransi QBE POOL Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian, gempa bumi, dan risiko lainnya dengan nilai maksimum klaim kerugian sebesar Rp977.587 juta dan SGD6,42 juta, basis kerugian pertama Rp5.557.225 juta dan US$4 juta termasuk pemulihan kegiatan usaha sebesar Rp324.000 juta dengan *Automatic Reinstatement of Loss Clause*. Di samping itu, Telkom-1 dan Telkom-2 diasuransikan terpisah dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar US$28,48 juta dan US$47,14 juta. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

(xi) Pada tanggal 31 Desember 2009, tingkat penyelesaian aset dalam pembangunan sekitar 67,99% dari nilai kontrak dengan perkiraan tanggal penyelesaian antara April 2010 dan Februari 2011. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi penyelesaian aset dalam pembangunan.

(xii) Aset tetap tertentu anak perusahaan telah dijaminkan dalam beberapa perjanjian pinjaman (Catatan 18 dan 22).

(xiii) Perusahaan dan anak perusahaan memiliki komitmen berkaitan dengan sewa pembiayaan untuk peralatan dan instalasi transmisi, peralatan pengolahan data, peralatan kantor, kendaraan, dan Aset CPE dengan hak opsi untuk membeli aset-aset pembiayaan tertentu pada akhir masa sewa pembiayaan. Pembayaran sewa pembiayaan minimum di masa depan untuk aset sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Tahun	**2009**	**2008**
2009	-	324.279
2010	203.079	198.054
2011	136.979	126.331
2012	84.590	76.537
2013	28.163	24.079
Selanjutnya	2.828	553
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	455.639	749.833
Bunga	(95.391)	(161.135)
Nilai kini bersih atas pembayaran minimum sewa pembiayaan	360.248	588.698
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19a)	(152.160)	(250.918)
Bagian jangka panjang (Catatan 19b)	**208.088**	**337.780**

11. ASET TETAP POLA BAGI HASIL ("PBH")

	1 Januari 2009	Penambahan	Reklasifikasi	31 Desember 2009
Harga perolehan:				
Tanah	1.313	-	(46)	1.267
Bangunan	338	-	(338)	-
Peralatan sentral telepon	152.776	-	(59.786)	92.990
Peralatan dan instalasi transmisi	100.072	-	(56.689)	43.383
Jaringan kabel	461.315	-	(54.745)	406.570
Peralatan telekomunikasi lainnya	10.547	-	(6.909)	3.638
Jumlah	726.361	-	(178.513)	547.848
Akumulasi penyusutan:				
Tanah	926	64	(9)	981
Bangunan	61	20	(81)	-
Peralatan sentral telepon	69.899	11.014	(51.154)	29.759
Peralatan dan instalasi transmisi	53.282	8.674	(35.560)	26.396
Jaringan kabel	116.234	39.594	(33.743)	122.085
Peralatan telekomunikasi lainnya	9.305	279	(6.888)	2.696
Jumlah	249.707	59.645	(127.435)	181.917
Nilai Buku Bersih	**476.654**			**365.931**

	1 Januari 2008	Penambahan	Reklasifikasi	31 Desember 2008
Harga perolehan:				
Tanah	4.646	-	(3.333)	1.313
Bangunan	3.982	-	(3.644)	338
Peralatan sentral telepon	286.688	-	(133.912)	152.776
Peralatan dan instalasi transmisi	179.785	-	(79.713)	100.072
Jaringan kabel	583.353	-	(122.038)	461.315
Peralatan telekomunikasi lainnya	149.200	-	(138.653)	10.547
Jumlah	1.207.654	-	(481.293)	726.361
Akumulasi penyusutan:				
Tanah	2.935	181	(2.190)	926
Bangunan	2.435	195	(2.569)	61
Peralatan sentral telepon	169.663	23.906	(123.670)	69.899
Peralatan dan instalasi transmisi	90.141	12.428	(49.287)	53.282
Jaringan kabel	144.603	47.302	(75.671)	116.234
Peralatan telekomunikasi lainnya	92.786	24.124	(107.605)	9.305
Jumlah	502.563	108.136	(360.992)	249.707
Nilai Buku Bersih	**705.091**			**476.654**

Sesuai dengan perjanjian PBH, hak kepemilikan atas aset tetap PBH secara legal tetap berada di mitra usaha sampai dengan berakhirnya masa bagi hasil.

11. ASET TETAP PBH (lanjutan)

Pendapatan PBH ditangguhkan pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Nilai bruto	547.848	726.361	1.207.654
Akumulasi amortisasi:			
Saldo awal	(427.037)	(704.269)	(641.839)
Penambahan (Catatan 33)	(111.780)	(204.061)	(313.789)
Pengurangan	178.513	481.293	251.359
Saldo akhir	(360.304)	(427.037)	(704.269)
Jumlah bersih	**187.544**	**299.324**	**503.385**

12. UANG MUKA DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Uang muka dan aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 terdiri dari:

	2009	2008
Sewa dibayar di muka - setelah dikurangi bagian jangka pendek (Catatan 7)	987.179	890.132
Uang muka pembelian aset tetap	693.473	768.323
Kas yang dibatasi penggunaannya	222.485	102.526
Beban ditangguhkan Hak Penggunaan yang Tidak Dapat Dibatalkan (*Indefeasible Right of Use* atau "IRU")	142.741	154.096
Peralatan yang tidak digunakan dalam operasi - bersih	68.573	58.847
Biaya hak atas tanah ditangguhkan	61.939	125.663
Setoran jaminan	37.207	50.174
Lain-lain	20.691	9.927
Jumlah	**2.234.288**	**2.159.688**

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang diterima dari Pemerintah sebagai pembayaran kompensasi terminasi dini hak eksklusif untuk pendanaan pembangunan infrastruktur yang telah ditentukan (Catatan 1a dan 28) dan deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari satu tahun yang dijaminkan untuk garansi bank.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, peralatan yang tidak digunakan dalam operasi merupakan *Base Transceiver Station* (BTS) dan peralatan lainnya milik Perusahaan dan Telkomsel yang untuk sementara tidak digunakan dalam operasi tetapi direncanakan akan dipasang kembali. Beban penyusutan Telkomsel yang dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian pada tahun 2009 dan 2008 adalah masing-masing sebesar Rp37.035 juta dan Rp18.105 juta.

Biaya hak atas tanah ditangguhkan merupakan biaya untuk memperpanjang hak atas tanah, yang ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu hak atas tanah (Catatan 10d.viii).

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

13. *GOODWILL* DAN ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA

(i) Perubahan nilai tercatat *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	Goodwill	Aset tidak berwujud lainnya	Lisensi	Jumlah
Nilai tercatat bruto:				
Saldo, 31 Desember 2008	106.544	8.969.599	436.000	9.512.143
Penambahan:				
Peranti lunak Perusahaan	-	281.759	-	281.759
Wireless broadband Perusahaan	-	-	50.861	50.861
3G Telkomsel (Catatan 1d.a)	-	-	320.000	320.000
Peranti lunak Sigma	-	11.082	-	11.082
Pengurangan	-	(119.840)	-	(119.840)
Reklasifikasi	-	(57.066)	-	(57.066)
Saldo, 31 Desember 2009	106.544	9.085.534	806.861	9.998.939
Akumulasi amortisasi:				
Saldo, 31 Desember 2008	(17.048)	(6.202.180)	(105.107)	(6.324.335)
Beban amortisasi tahun berjalan (Catatan 36)	(4.325)	(1.327.904)	(58.229)	(1.390.458)
Pengurangan	-	119.093	-	119.093
Reklasifikasi	-	25.041	-	25.041
Saldo, 31 Desember 2009	(21.373)	(7.385.950)	(163.336)	(7.570.659)
Nilai Buku Bersih	**85.171**	**1.699.584**	**643.525**	**2.428.280**
Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi	20 tahun	6,84 tahun	9,63 tahun	

	Goodwill	Aset tidak berwujud lainnya	Lisensi	Jumlah
Nilai tercatat bruto:				
Saldo, 31 Desember 2007	-	8.419.906	436.000	8.855.906
Penambahan:				
Peranti lunak Perusahaan	-	341.146	-	341.146
Akuisisi Indonusa (Catatan 1d.b dan 1d.g)	6.600	-	-	6.600
Akuisisi Sigma (Catatan 3)	99.944	189.405	-	289.349
Peranti lunak Sigma	-	19.092	-	19.092
Peranti lunak GSD	-	50	-	50
Saldo, 31 Desember 2008	106.544	8.969.599	436.000	9.512.143
Akumulasi amortisasi:				
Saldo, 31 Desember 2007	-	(5.022.301)	(58.393)	(5.080.694)
Beban amortisasi tahun berjalan (Catatan 36)	(17.048)	(1.179.879)	(46.714)	(1.243.641)
Saldo, 31 Desember 2008	(17.048)	(6.202.180)	(105.107)	(6.324.335)
Nilai Buku Bersih	**89.496**	**2.767.419**	**330.893**	**3.187.808**
Rata-rata tertimbang jangka waktu amortisasi	5 tahun	7,05 tahun	9,33 tahun	

13. *GOODWILL* DAN ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA (lanjutan)

(ii) *Goodwill* timbul dari akuisisi Sigma tahun 2008 (Catatan 3) dan Indonusa tahun 2008 (Catatan 1d.b dan 1d.g). Sejak 1 Januari 2009, Perusahaan telah mengubah estimasi masa manfaat *goodwill* dari 5 tahun menjadi 20 tahun (Catatan 2d). Perusahaan membebankan pengaruh atas perubahan estimasi manfaat tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009. Aset tidak berwujud lainnya timbul dari akuisisi Dayamitra, Pramindo, TII, KSO IV, dan KSO VII, dan merupakan hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO.

(iii) Beban dibayar di muka yang dibayar Telkomsel di bulan Februari 2006 untuk lisensi 3G sebesar Rp436.000 juta diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama masa manfaat lisensi 3G. Pada tahun 2009, Pemerintah memberikan tambahan lisensi 3G kepada Telkomsel dengan *up front fee* sebesar Rp320.000 juta yang diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama 10 tahun (Catatan 1d.a, 2j, dan 43a.ii).

(iv) Pada tahun 2009, Perusahaan mendapatkan lisensi sebagai penyelenggara jaringan lokal tetap berbasis paket *switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*). Biaya ijin awal dicatat sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama masa manfaat lisensi yaitu 10 tahun.

(v) Sejak 1 Januari 2009, Perusahaan telah mengubah estimasi masa manfaat peranti lunak dari 5-10 tahun menjadi 3-5 tahun. Perusahaan membebankan pengaruh atas perubahan estimasi manfaat tersebut pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009.

(vi) Estimasi beban amortisasi tahunan aset tidak berwujud lainnya untuk setiap tahun sejak 1 Januari 2010 adalah kurang lebih sebesar Rp1.329.934 juta per tahun.

(vii) Pada tanggal 31 Desember 2009, terdapat indikasi penurunan nilai untuk aset tidak berwujud lainnya, tetapi berdasarkan evaluasi Perusahaan dan anak perusahaan, nilai yang dapat diperoleh kembali lebih tinggi daripada nilai bukunya.

14. REKENING *ESCROW*

Rekening *escrow* pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 terdiri dari:

	2009	2008
Bank Mandiri	44.004	49.557
Bank Danamon	2	1.185
Lain-lain	108	108
	44.114	**50.850**

Rekening *escrow* pada Bank Mandiri dibentuk sehubungan dengan Perjanjian Konsorsium Konstruksi dan Pemeliharaan (*Construction and Maintenance Agreement* atau ”C&MA”) Palapa Ring sebagai setoran awal 5% dari nilai ikatan (Catatan 47c.ii).

Rekening *escrow* pada Bank Danamon dibentuk sehubungan dengan kerja sama bagi hasil dalam pengoperasian peralatan telekomunikasi di Divre VII Kawasan Timur Indonesia.

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

15. HUTANG USAHA

	2009	2008
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		
Biaya hak penyelenggaraan	1.274.933	995.870
Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	270.051	57.956
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	214.484	322.320
Jumlah	1.759.468	1.376.146
Pihak ketiga		
Pembelian peralatan, barang, dan jasa	7.989.931	10.648.709
Hutang kepada penyelenggara telekomunikasi lainnya	65.464	59.460
Hutang sehubungan dengan PBH	28.804	85.069
Jumlah	8.084.199	10.793.238
Jumlah	**9.843.667**	**12.169.384**

Hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Rupiah	5.255.087	6.222.325
Dolar A.S.	4.332.095	4.633.457
Euro	243.667	1.308.456
Dolar Singapura	10.377	4.498
Ringgit Malaysia	1.501	-
Lain-lain	940	648
Jumlah	**9.843.667**	**12.169.384**

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2009	2008
Operasi, pemeliharaan, dan jasa telekomunikasi	1.519.993	1.546.701
Program pensiun dini (“Pendi”)	1.043.639	788.205
Gaji dan tunjangan	743.097	833.273
Umum, administrasi, dan pemasaran	596.512	634.086
Bunga dan beban bank	200.723	291.367
Jumlah	**4.103.964**	**4.093.632**

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR (lanjutan)

Beban yang masih harus dibayar untuk Pendi 2008, timbul dari Keputusan Direktur HCGA No. KR. 18/PS900/COP-B0011000/2008 tentang Pendi pada tanggal 19 Desember 2008 dan sebagaimana telah dikomunikasikan kepada seluruh karyawan pada tanggal yang sama. Perusahaan telah mengakui kewajiban berdasarkan jumlah karyawan yang berhak, berdasarkan tingkat jabatan, dan yang diharapkan mendaftar. Akrualisasi manfaat Pendi pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp788.205 juta dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008 (Catatan 34).

Beban yang masih harus dibayar untuk Pendi 2009, timbul dari Keputusan Direktur HCGA No. SK.704/PS940/HRC-60/2009 dan No. SK.18/PS940/HRC-60/2010 tentang Penetapan Peserta Pensiun Dini Tahun Anggaran 2009 masing-masing pada tanggal 23 Desember 2009 dan 15 Januari 2010 dan sebagaimana dikomunikasikan kepada seluruh karyawan pada tanggal 23 Oktober 2009. Perusahaan telah mengakui kewajiban berdasarkan jumlah karyawan yang berhak, berdasarkan tingkat jabatan, dan yang mendaftar. Akrualisasi manfaat Pendi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp1.028.639 juta dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009 (Catatan 34).

Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Infomedia No.IN/DEKOM/74000/09012 tanggal 23 Desember 2009 tentang Program Pensiun Dini, Infomedia telah mengakui kewajiban berdasarkan jumlah karyawan yang berhak, berdasarkan tingkat jabatan dan yang diharapkan mendaftar. Akrualisasi manfaat Pendi pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp15.000 juta dan telah dibebankan di laporan laba rugi konsolidasian (Catatan 34).

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

17. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

	2009	2008
Kartu pulsa prabayar	2.702.183	2.605.742
Jasa telekomunikasi lainnya	2.746	36.284
Lain-lain	122.227	100.097
Jumlah	**2.827.156**	**2.742.123**

18. HUTANG BANK JANGKA PENDEK

	2009	2008
Bank Ekonomi	22.650	11.000
Bank CIMB Niaga	12.200	35.000
PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")	9.000	-
Jumlah	**43.850**	**46.000**

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

a. Bank Ekonomi

Pada tanggal 14 Oktober 2008, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank Ekonomi sebesar Rp7.500 juta untuk keperluan modal kerja. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 13,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun dan dibayarkan selama 9 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2009. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha Sigma (Catatan 5). Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2008 sebesar Rp7.500 juta dan pada tanggal 2 Juli 2009, pinjaman telah dilunasi.

Pada tanggal 2 Desember 2008, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank Ekonomi sebesar Rp5.500 juta untuk keperluan modal kerja. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun dan dibayarkan selama 12 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 2 Desember 2009. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha Sigma (Catatan 5). Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2008 sebesar Rp3.500 juta dan pada tanggal 9 Oktober 2009, pinjaman telah dilunasi.

Pada tanggal 7 Agustus 2009, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank Ekonomi sebesar Rp35.000 juta untuk keperluan modal kerja. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,5% per tahun sampai dengan 13,50% per tahun dan dibayarkan selama 12 bulan sejak perjanjian ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp22.650 juta.

b. Bank CIMB Niaga

(i) Pada tanggal 25 April 2005, Balebat menandatangani perjanjian kredit yang terdiri dari fasilitas kredit yang dapat diperpanjang sebesar Rp800 juta dan fasilitas kredit investasi sebesar Rp1.600 juta (Catatan 22f.ii) dengan Bank CIMB Niaga. Atas perjanjian kredit ini telah dilakukan beberapa kali amandemen. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 28 Juli 2009, fasilitas kredit, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo masing-masing menjadi Rp15.000 juta, 14% per tahun, dan 29 Mei 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp7.200 juta dan Rp15.000 juta.

Pada tanggal 29 April 2008, Balebat mendapatkan tambahan Fasilitas Transaksi Khusus dan Fasilitas Rekening Koran masing-masing sebesar Rp5.000 juta dan Rp500 juta. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 28 Juli 2009, tingkat bunga masing-masing menjadi 14% per tahun dan 14,25% per tahun serta tanggal jatuh tempo masing-masing menjadi 29 Mei 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009 saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp5.000 juta dan Rp nihil dan pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp5.000 juta dan Rp nihil.

Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) milik Balebat.

18. HUTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

b. Bank CIMB Niaga (lanjutan)

(ii) Pada tanggal 18 Oktober 2005, GSD menandatangani dua perjanjian pinjaman jangka pendek dengan Bank CIMB Niaga dengan fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp12.000 juta dan Rp3.000 juta. Perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut telah beberapa kali diamandemen. Perubahan terakhir pada tanggal 23 Desember 2008 dengan penambahan fasilitas pinjaman menjadi Rp19.000 juta dengan tingkat bunga 15,50% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 18 Oktober 2009. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan aset tetap milik GSD yang berlokasi di Jakarta (Catatan 10). Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2008 sebesar Rp15.000 juta dan pada tanggal 10 Juli 2009, pinjaman telah dilunasi.

c. BSM

Pada tanggal 20 Agustus 2009, Balebat menandatangani fasilitas pinjaman yang dapat diperpanjang sebesar Rp15.000 juta dengan BSM, untuk keperluan modal kerja. Pinjaman tersebut diperoleh melalui prinsip syariah dengan tingkat estimasi pengembalian pinjaman 15,30% per tahun dan dijamin dengan aset tetap tertentu (Catatan 10), piutang (Catatan 5), persediaan (Catatan 6), asuransi, dan *letter of comfort*. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp9.000 juta.

19. JATUH TEMPO HUTANG JANGKA PANJANG

a. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

	Catatan	2009	2008
Hutang bank	22	5.826.347	5.014.766
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	23	1.221.287	1.297.857
Pinjaman penerusan (*two-step loans*)	20	423.983	490.692
Hutang sewa pembiayaan	10	152.160	250.918
Wesel	21	5.518	-
Jumlah		**7.629.295**	**7.054.233**

b. Bagian jangka panjang

		(Dalam miliaran Rupiah)					
	Catatan	Jumlah	2011	2012	2013	2014	Selanjutnya
Hutang bank	22	11.086,7	4.174,3	2.744,3	2.732,0	1.431,5	4,6
Pinjaman penerusan (*two-step loans*)	20	3.094,1	396,6	398,6	323,9	326,3	1.648,7
Hutang sewa pembiayaan	10	208,1	106,8	72,6	26,0	2,7	-
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	23	108,1	108,1	-	-	-	-
Wesel	21	68,8	10,1	28,7	-	30,0	-
Jumlah		**14.565,8**	**4.795,9**	**3.244,2**	**3.081,9**	**1.790,5**	**1.653,3**

20. PINJAMAN PENERUSAN (*TWO-STEP LOANS*)

Pinjaman penerusan adalah pinjaman tanpa jaminan yang diperoleh Pemerintah dari bank luar negeri yang kemudian diteruskan kepada Perusahaan. Pinjaman yang diperoleh hingga bulan Juli 1994 dicatat dan terhutang dalam Rupiah berdasarkan kurs pada tanggal penarikan pinjaman. Pinjaman yang diperoleh setelah bulan Juli 1994 terhutang dalam valuta asalnya dan laba atau rugi selisih kurs yang terjadi ditanggung oleh Perusahaan.

Rincian pinjaman penerusan yang diperoleh dari bank luar negeri pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	Suku bunga		Saldo	
Valuta	**2009**	**2008**	**2009**	**2008**
Dolar A.S.	4,00% - 6,67%	4,00% - 6,67%	1.316.827	1.735.859
Rupiah	9,65% - 10,30%	9,27% - 12,27%	1.024.080	1.214.911
Yen Jepang	3,10%	3,10%	1.177.186	1.489.353
Jumlah			3.518.093	4.440.123
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19a)			(423.983)	(490.692)
Bagian jangka panjang (Catatan 19b)			**3.094.110**	**3.949.431**

Pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan sarana penunjang telekomunikasi. Pinjaman ini akan dilunasi dalam angsuran semesteran dan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2024.

Pinjaman penerusan yang terhutang dalam Rupiah dikenakan berbagai tingkat bunga tetap atau tingkat bunga mengambang berdasarkan rata-rata suku bunga Sertifikat Bank Indonesia ("SBI") berjangka waktu tiga bulan selama 6 bulan terakhir sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran ditambah 1% per tahun, dan tingkat bunga mengambang yang dikenakan oleh peminjam ditambah 5,25% per tahun. Pinjaman penerusan yang terhutang dalam valuta asing dikenakan tingkat bunga tetap atau tingkat bunga mengambang yang dikenakan oleh peminjam ditambah 0,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman penerusan dan periode penarikan pinjaman penerusan tersebut telah berakhir.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

a. Rasio *projected net revenue to projected debt service* harus melebihi masing-masing 1,5:1 dan 1,2:1 untuk pinjaman penerusan yang berasal dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia ("ADB").
b. Pendanaan dari sumber internal (laba sebelum penyusutan dan beban bunga) harus melebihi masing-masing 50% dan 20% dari rata-rata jumlah pengeluaran barang modal tahunan untuk pinjaman yang masing-masing berasal dari Bank Dunia dan ADB.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

21. WESEL BAYAR

	2009
Wesel bayar jangka menengah (*Medium Term Notes* atau "MTN")	
Metra	30.000
Sigma	30.000
Finnet	10.000
Pembiayaan pemasok	
PT. ZTE Indonesia ("ZTE")	4.295
	74.295
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19a)	(5.518)
Bagian jangka panjang (Catatan 19b)	**68.777**

a. MTN Metra

Pada tanggal 9 Juni 2009, Metra mengadakan perjanjian dengan PT Bahana Securities ("Bahana Securities") (bertindak sebagai "Arranger") dan Bank Mega (bertindak sebagai Wali Amanat) untuk menerbitkan wesel bayar jangka menengah (*Medium Term Notes* atau "MTN") dengan total pokok hutang sebesar Rp50.000 juta. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") bertindak sebagai Agen Pembayar dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha dan modal kerja.

Penerbitan MTN dilaksanakan secara bertahap sebanyak-banyaknya dalam 4 (empat) tahap dengan jumlah total sebanyak-banyaknya Rp50.000 juta, masing-masing tahapan akan berjangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan. Tahap pertama yang telah diterbitkan sebesar Rp30.000 juta, akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2012.

Bunga atas MTN terhutang setiap triwulan sejak Tanggal Penerbitan sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok. Bunga MTN dihitung dengan menggunakan tingkat bunga mengambang, untuk tahun pertama sebesar 15,05%, untuk tahun kedua dan ketiga sebesar tingkat pengembalian rata-rata (*yield*) dari 3 (tiga) Surat Utang Negara yang memiliki sisa jangka waktu yang sama dengan waktu MTN tahun kedua dan ketiga ditambah dengan premi sebesar 4,02%. Pelunasan pokok masing-masing 10%, 20%, dan 70% pada ulang tahun pertama, kedua, dan ketiga Tanggal Penerbitan.

Metra memberikan jaminan dengan nilai minimal 40% dari nilai Pokok MTN yang masih terhutang. Maksimal 60% nilai pokok MTN yang masih terhutang tidak dijamin dan setiap saat diperlakukan sama (*pari passu*) dengan kewajiban Metra lainnya yang tidak dijamin. Metra dapat membeli kembali seluruh atau sebagian MTN pada saat kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo MTN.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan MTN, Metra diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to Equity* maksimal 1,5:1;
2. *EBITDA to Interest Ratio* minimum 2,5.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Metra memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

21. WESEL BAYAR (lanjutan)

b. MTN Sigma

Pada tanggal 16 Oktober 2009, Sigma mengadakan perjanjian dengan Bahana Securities (bertindak sebagai "Arranger") dan Bank Mega (bertindak sebagai Wali Amanat) untuk menerbitkan MTN dengan total pokok hutang sebesar Rp30.000 juta. KSEI bertindak sebagai Agen Pembayar dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha.

MTN diterbitkan dengan penempatan terbatas dalam 1 (satu) tahap dengan jumlah total sebanyak-banyaknya Rp30.000 juta dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan, yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2014.

Bunga atas MTN terhutang setiap semesteran sejak Tanggal Penerbitan sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok. Bunga MTN untuk tahun pertama sebesar 14,5% sejak tanggal penerbitan, untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima terhitung sejak Tanggal Penerbitan adalah rata-rata suku bunga SBI berjangka waktu satu bulan ditambah 800 basis poin premi, yang dihitung berdasarkan tingkat rata-rata suku bunga SBI berjangka waktu satu bulan selama 6 bulan terakhir pada saat penetapan bunga MTN.

MTN tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Sigma baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang MTN *pari passu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan MTN, Sigma diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to Equity* maksimal 2,5:1;
2. Hutang yang dibiayai dan EBITDA maksimal lima kali di tahun 2009, tiga setengah kali di tahun 2010 dan dua setengah kali di tahun 2011.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Sigma memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

c. MTN Finnet

Pada tanggal 16 Oktober 2009, Finnet mengadakan perjanjian dengan Bahana Securities (bertindak sebagai "Arranger") dan Bank Mega (bertindak sebagai Wali Amanat) untuk menerbitkan MTN dengan total pokok hutang sebesar Rp25.000 juta. KSEI bertindak sebagai Agen Pembayar dan Jasa Penitipan Kolektif (Kustodian). Dana yang diperoleh dari penerbitan MTN tersebut digunakan untuk investasi perangkat keras dan lunak, pembangunan proyek, dan pembayaran *bridging loan* untuk pelaksanaan proyek.

21. WESEL BAYAR (lanjutan)

c. MTN Finnet (lanjutan)

MTN direncanakan untuk diterbitkan dengan penempatan terbatas secara bertahap sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua) tahap dengan jumlah total sebanyak-banyaknya Rp25.000 juta dengan batas penerbitan terakhir adalah 17 (tujuh belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan MTN tahap pertama. Tahap pertama telah diterbitkan sebesar Rp10.000 juta, yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2012. Pelunasan pokok masing-masing 1% pada setiap bulan ke-7 sampai ke-12, masing-masing 2% pada setiap bulan ke-13 sampai ke-35, sisa pokok sebesar 48% pada tanggal 17 November 2012.

Bunga atas MTN terhutang setiap bulan sejak Tanggal Penerbitan sampai dengan Tanggal Pelunasan Pokok. Bunga MTN sebesar 16,25% per tahun.

MTN tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Finnet baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang MTN *pari passu* tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Finnet lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Finnet dapat membeli kembali seluruh atau sebagian MTN pada saat kapanpun sebelum tanggal jatuh tempo MTN.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan MTN, Finnet diharuskan untuk menaati semua pembatasan, termasuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

1. *Debt to Equity* maksimal 2,5:1;
2. *EBITDA to Interest Ratio* minimum 2,5.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Finnet memenuhi ketentuan mengenai rasio-rasio tersebut di atas.

d. Pembiayaan pemasok ZTE

Pada tanggal 10 Desember 2009, Perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan pemasok dengan ZTE. Fasilitas tanpa jaminan tersebut merupakan 85% dari nilai Berita Acara Serah Terima ("BAST") I Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan MSAN ALU dan Akses Sekunder Paket-2 .

Pinjaman ini dikenakan bunga tetap sebesar *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR") 6 bulan ditambah 2,50% per tahun (US$) yang akan dilunasi dalam 5 kali angsuran semesteran yang dimulai sejak bulan Desember 2009. Saldo pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar US$0,46 juta (setara dengan Rp4.295 juta).

22. HUTANG BANK

Rincian hutang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

		2009	2009		2008	
		2009	Saldo terhutang		Saldo terhutang	
Kreditur	**Mata uang**	**Jumlah fasilitas (dalam jutaan)**	**Mata uang asal (dalam jutaan)**	**Setara Rupiah**	**Mata uang asal (dalam jutaan)**	**Setara Rupiah**
The Export-Import Bank of Korea ("Korea Eximbank")	US$	124	35	332.605	59	643.693
Bank Mandiri	Rp	4.750.000	-	3.330.000	-	2.060.000
BCA	Rp	3.000.000	-	2.600.000	-	1.350.000
Citibank	Rp	500.000	-	200.000	-	500.000
BNI	Rp	3.500.000	-	1.550.000	-	2.710.000
Bank CIMB Niaga	Rp	33.496	-	25.301	-	30.697
Bank Bukopin	Rp	5.300	-	857	-	2.121
BRI	Rp	3.800.000	-	2.200.000	-	2.760.000
Bank Ekonomi	Rp	115.000	-	74.272	-	53.399
Sindikasi bank	Rp	5.100.000	-	5.100.000	-	2.400.000
PT ANZ Panin Bank ("ANZ Panin")	Rp	1.000.000	-	1.000.000	-	-
BII	Rp	500.000	-	500.000	-	-
PT Bank OCBC Indonesia ("OCBC Indonesia")	Rp	200.000	-	-	-	-
OCBC NISP	Rp	500.000	-	-	-	-
ABN Amro Bank N.V., Hong Kong ("AAB Hong Kong")	US$	318	-	-	-	-
Industrial and Commercial Bank of China Limited ("ICBC")	US$	266	-	-	-	-
Bank of China ("BoC")	US$	100	-	-	-	-
Jumlah				16.913.035		12.509.910
Hutang bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 19a)				(5.826.347)		(5.014.766)
Bagian jangka panjang (Catatan 19b)				**11.086.688**		**7.495.144**

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

a. Korea Eximbank

Pada tanggal 27 Agustus 2003, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Korea Eximbank dengan fasilitas sebesar US$124 juta yang digunakan untuk membiayai pengadaan Code Division Multiple Access ("CDMA") dari Konsorsium Samsung. Pinjaman tersebut dikenakan bunga, komitmen, dan biaya lainnya sebesar 5,68% per tahun. Pinjaman ini tidak dijamin dan dibayar dalam 10 kali angsuran semesteran setiap tanggal 30 Juni dan 30 Desember setiap tahunnya sejak Desember 2006.

22. HUTANG BANK (lanjutan)

b. Bank Mandiri

(i) Pada tanggal 24 Maret 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri untuk fasilitas sebesar Rp600.000 juta, yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,75% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp120.000 juta dan pada tanggal 29 Maret 2009, pinjaman telah dilunasi.

(ii) Pada tanggal 15 Agustus 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp350.000 juta, yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp70.000 juta dan pada tanggal 28 Maret 2009, pinjaman telah dilunasi.

(iii) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp500.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang suku bunga antar bank Jakarta *("Jakarta Interbank Offered Rate"* atau *"JIBOR")* berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 24 Juli 2007, perjanjian kredit diamandemen dengan menambah fasilitas kredit sebesar Rp200.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp140.000 juta dan Rp420.000 juta.

(iv) Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp750.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,17% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp150.000 juta dan Rp450.000 juta.

(v) Pada tanggal 23 Desember 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp1.300.000 juta. Pada tanggal 30 Desember 2008, pinjaman tersebut telah ditarik sebesar Rp1.000.000 juta dan sisanya sebesar Rp300.000 juta telah ditarik pada tanggal 30 Januari 2009. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu satu bulan ditambah 2,25% per tahun yang terhutang bulanan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp1.040.000 juta dan Rp1.000.000 juta.

(vi) Pada tanggal 3 Juli 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Bank Mandiri sebesar Rp2.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2009 sebesar Rp2.000.000 juta.

22. HUTANG BANK (lanjutan)

c. BCA

(i) Pada tanggal 16 Maret 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman dengan BCA sebesar Rp400.000 juta yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,75% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp80.000 juta dan pada tanggal 28 Maret 2009, pinjaman telah dilunasi.

(ii) Pada tanggal 15 Agustus 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BCA sebesar Rp350.000 juta yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp70.000 juta dan pada tanggal 28 Maret 2009, pinjaman telah dilunasi.

(iii) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BCA sebesar Rp500.000 juta, dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp200.000 juta dan pada tanggal 28 Desember 2009, pinjaman telah dilunasi.

(iv) Pada tanggal 14 Juli 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BCA untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp1.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu satu bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp600.000 juta dan Rp1.000.000 juta.

(v) Pada tanggal 3 Juli 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BCA untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2009 sebesar Rp2.000.000 juta.

22. HUTANG BANK (lanjutan)

d. Citibank

(i) Pada tanggal 21 Maret 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Citibank, cabang Jakarta untuk fasilitas sebesar Rp500.000 juta, yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,75% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp100.000 juta dan pada tanggal 28 Maret 2009, pinjaman telah dilunasi.

(ii) Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan Citibank, cabang Jakarta sebesar Rp500.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,09% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman yang terhutang masing-masing sebesar Rp200.000 juta dan dan Rp400.000 juta.

e. BNI

(i) Pada tanggal 15 Agustus 2006, Telkomsel menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman jangka menengah dengan BNI sebesar Rp300.000 juta, yang akan dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang berdasarkan suku bunga SBI berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp60.000 juta dan pada tanggal 28 Maret 2009, pinjaman telah dilunasi.

(ii) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BNI sebesar Rp500.000 juta, dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp200.000 juta dan pada tanggal 28 Desember 2009, pinjaman telah dilunasi.

(iii) Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BNI sebesar Rp750.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,17% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp150.000 juta dan Rp450.000 juta.

22. HUTANG BANK (lanjutan)

e. BNI (lanjutan)

(iv) Pada tanggal 14 Juli 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BNI untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp2.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu 1 bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp1.200.000 juta dan Rp2.000.000 juta.

(v) Pada tanggal 3 Juli 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BNI untuk fasilitas pinjaman sebesar Rp750.000 juta. Pada tanggal 9 Juli 2009, pinjaman tersebut telah ditarik sebesar Rp200.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,00% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2009 sebesar Rp200.000 juta.

f. Bank CIMB Niaga

(i) Pada tanggal 28 Desember 2004, Balebat mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank CIMB Niaga dengan jumlah fasilitas sebesar Rp2.200 juta untuk membiayai pembelian mesin ("Fasilitas Transaksi Khusus"). Fasilitas Transaksi Khusus dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2005. Fasilitas ini akan jatuh tempo 28 Juni 2010. Atas perjanjian kredit ini telah dilakukan beberapa kali amandemen. Berdasarkan amandemen terakhir pada tanggal 28 Juli 2009, tingkat bunga 14% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp183 juta dan Rp623 juta.

Pada tanggal 13 Juni 2006, Balebat juga mendapatkan tambahan fasilitas Rp2.000 juta untuk pembelian mesin cetak. Fasilitas ini akan jatuh tempo 30 Oktober 2011. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp888 juta dan pada tanggal 23 Juni 2009, pinjaman telah dilunasi.

Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) milik Balebat.

(ii) Sesuai penjelasan di Catatan 18b, pada tanggal 25 April 2005, Balebat menandatangani perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp2.400 juta termasuk fasilitas kredit investasi sebesar Rp1.600 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2009. Fasilitas kredit investasi dibayar dalam 48 kali angsuran bulanan dengan jumlah yang tidak sama terhitung sejak November 2005 sampai dengan Oktober 2009. Fasilitas kredit investasi dikenakan tingkat bunga 14% per tahun. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp335 juta dan pada tanggal 25 Oktober 2009, pinjaman telah dilunasi.

22. HUTANG BANK (lanjutan)

f. Bank CIMB Niaga (lanjutan)

(iii) Pada tanggal 29 Mei 2006, Infomedia menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank CIMB Niaga sebesar Rp18.500 juta untuk keperluan pendanaan investasi proyek *call center* dengan Telkomsel. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga 15% per tahun dan dijamin dengan piutang dari kontrak *call center* dengan Telkomsel senilai Rp23.125 juta sampai dengan jatuh tempo pinjaman 36 bulan setelah pencairan (Catatan 5). Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp3.680 juta dan pada tanggal 19 Juni 2009, pinjaman telah dilunasi.

(iv) Pada bulan Maret 2007, GSD menandatangani perjanjian pinjaman (transaksi pinjaman khusus ke-2) dengan Bank CIMB Niaga sebesar Rp20.000 juta yang dikenakan tingkat bunga 13% per tahun. Fasilitas dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan GSD (Catatan 10). Jangka waktu pinjaman 8 tahun diangsur dalam 33 kali angsuran triwulanan dan jatuh tempo pada bulan Mei 2015. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp17.700 juta dan Rp18.900 juta.

(v) Pada tanggal 23 November 2007, GSD menandatangani perjanjian pinjaman (transaksi pinjaman khusus ke-3) dengan Bank CIMB Niaga sebesar Rp8.000 juta yang dikenakan tingkat bunga 11% per tahun. Fasilitas dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan GSD (Catatan 10). Jangka waktu pinjaman 5 tahun diangsur dalam 60 kali angsuran bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2012. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp4.675 juta dan Rp6.271 juta.

(vi) Pada tanggal 28 Juli 2009, Balebat menandatangani perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp3.296 juta, yang akan jatuh tempo pada 28 November 2014. Pada tanggal 28 Agustus 2009, pinjaman tersebut telah ditarik sebesar Rp2.743 juta. Fasilitas kredit investasi dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan dengan jumlah yang tidak sama terhitung sejak 28 Desember 2009 sampai dengan 28 November 2014. Fasilitas kredit investasi dikenakan tingkat bunga 14% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap (Catatan 10), persediaan (Catatan 6), dan piutang usaha (Catatan 5) milik Balebat. Saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp2.743 juta.

g. Bank Bukopin

Pada tanggal 11 Mei 2005, Infomedia menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Bukopin untuk beberapa fasilitas kredit maksimum sebesar Rp5.300 juta untuk membiayai pembelian aset tetap. Pinjaman dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan dan dikenakan tingkat bunga masing-masing 15,00% per tahun pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Sebagian dari fasilitas ini, yakni sebesar Rp4.200 juta akan jatuh tempo pada bulan Juni 2010 dan sisanya sebesar Rp1.100 juta akan jatuh tempo pada bulan Desember 2010. Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap tertentu milik Infomedia (Catatan 10).

22. HUTANG BANK (lanjutan)

h. BRI

(i) Pada tanggal 15 Juni 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BRI sebesar Rp400.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp160.000 juta dan pada tanggal 28 Desember 2009, pinjaman telah dilunasi.

(ii) Pada tanggal 24 Oktober 2007, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BRI sebesar Rp2.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,17% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tahun 2008 pinjaman tersebut telah ditarik sepenuhnya. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp800.000 juta dan Rp1.600.000 juta.

(iii) Pada tanggal 28 Juli 2008, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BRI sebesar Rp1.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 5 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu satu bulan ditambah 1,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp600.000 juta dan Rp1.000.000 juta.

(iv) Pada tanggal 2 September 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BRI sebesar Rp800.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2009 sebesar Rp800.000 juta.

i. Bank Ekonomi

(i) Pada tanggal 7 Desember 2006, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp14.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun yang dibayar dalam 63 kali angsuran bulanan sejak tanggal 12 September 2007 dan berakhir 12 Desember 2012. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp9.062 juta dan Rp11.343 juta.

(ii) Pada tanggal 9 Maret 2007, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp13.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun yang dibayar dalam 60 kali angsuran bulanan sejak tanggal 12 Desember 2007 dan berakhir 12 Desember 2012. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp7.236 juta dan Rp9.056 juta.

22. HUTANG BANK (lanjutan)

i. Bank Ekonomi (lanjutan)

(iii) Pada tanggal 10 September 2008, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp33.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,50% per tahun sampai dengan 15,50% per tahun yang dibayar dalam 78 kali angsuran bulanan sejak tanggal 11 Maret 2009 dan berakhir 11 Maret 2015. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman atas fasilitas pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp30.153 juta dan Rp33.000 juta.

(iv) Pada tanggal 7 Agustus 2009, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp65.000 juta. Pada tanggal 17 September 2009, perjanjian diamandemen dengan mengubah fasilitas pinjaman menjadi Rp35.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,5% per tahun sampai dengan 13,5% per tahun yang dibayar dalam 36 kali angsuran bulanan yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2012. Pada tanggal 4 September 2009 dan 9 September 2009, pinjaman tersebut telah ditarik sebesar masing-masing Rp17.800 juta dan Rp4.700 juta. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2009 sebesar Rp20.935 juta.

(v) Pada tanggal 7 Agustus 2009, Sigma menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank Ekonomi sebesar Rp20.000 juta. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang antara 12,5% per tahun sampai dengan 15,5% per tahun yang dibayar dalam 48 kali angsuran bulanan yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2013. Pada tanggal 19 November 2009, pinjaman tersebut telah ditarik sebesar Rp7.000 juta. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2009 sebesar Rp6.886 juta.

Fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan milik Sigma yang berlokasi di Surabaya (Catatan 10) dan piutang usaha Sigma (Catatan 5) dan juga memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan Sigma untuk mendapatkan izin tertulis dari Bank Ekonomi sebelum menjadi penjamin atas hutang pihak ketiga, menjaminkan tanah tersebut ke bank lain atau pihak ketiga, menyewakan tanah tersebut ke pihak ketiga, menarik dana fasilitas kredit melebih batas maksimum, mengubah status hukum Sigma, membayar atau menyatakan dividen, dan membayar piutang pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Sigma memenuhi persyaratan tersebut di atas.

j. Sindikasi Bank

(i) Pada tanggal 29 Juli 2008, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman jangka panjang dengan sindikasi BNI, BRI, dan Bank Jabar (sindikasi bank) sebesar Rp2.400.000 juta yang akan dibayar dalam 8 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya masa ketersediaan. Bank BNI, yang bertindak sebagai agen fasilitas, membebankan bunga sebesar tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 1,2% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2013. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pokok pinjaman terhutang sebesar Rp2.400.000 juta.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk mentaati semua persyaratan atau batasan termasuk mempertahankan rasio keuangan dimana Perusahaan telah mentaatinya pada tanggal 31 Desember 2009, sebagai berikut:

1. Rasio hutang terhadap ekuitas tidak boleh melebihi 2:1.
2. Rasio *debt service coverage* harus melebihi dari 125%.

22. HUTANG BANK (lanjutan)

j. Sindikasi Bank (lanjutan)

(ii) Pada tanggal 16 Juni 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman jangka panjang dengan sindikasi BNI dan BRI (sindikasi bank) sebesar Rp2.700.000 juta yang akan dibayar dalam 8 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya masa ketersediaan. Bank BNI, yang bertindak sebagai agen fasilitas, membebankan bunga sebesar tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 2,45% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2014. Saldo pokok pinjaman terhutang pada 31 Desember 2009 sebesar Rp2.700.000 juta.

Sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, Perusahaan diharuskan untuk mentaati semua persyaratan atau batasan termasuk mempertahankan rasio keuangan dimana Perusahaan telah mentaatinya pada tanggal 31 Desember 2009, sebagai berikut:

1. Rasio hutang terhadap ekuitas tidak boleh melebihi 2:1.
2. Rasio *debt service coverage* harus melebihi dari 125%.

k. ANZ Panin

Pada tanggal 4 September 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan ANZ Panin sebesar Rp1.000.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 2,5% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan.

l. BII

Pada tanggal 15 September 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan BII sebesar Rp500.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,25% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan.

m. OCBC Indonesia

Pada tanggal 2 November 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan OCBC Indonesia sebesar Rp200.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,00% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Tidak ada fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2009.

n. OCBC NISP

Pada tanggal 2 November 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman jangka menengah dengan OCBC NISP sebesar Rp500.000 juta. Pinjaman dibayar dalam 9 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak berakhirnya periode ketersediaan fasilitas. Pinjaman dikenakan tingkat bunga mengambang JIBOR berjangka waktu tiga bulan ditambah 3,00% per tahun yang terhutang kuartalan dan tanpa jaminan. Tidak ada fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2009.

22. HUTANG BANK (lanjutan)

o. AAB Hong Kong

Pada tanggal 30 Desember 2009, sehubungan dengan perjanjian kemitraan dengan PT Ericsson Indonesia ("Ericsson Indonesia") dan Ericsson AB (Catatan 47a.ii), Telkomsel mengadakan perjanjian EKN-Backed Facility ("fasilitas") dengan AAB Hong Kong dan SCB ("Arrangers") berkaitan dengan penyediaan fasilitas sejumlah US$318 juta untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Ericsson.

Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas 1, 2, dan 3 masing-masing sebesar US$117 juta, US$106 juta, dan US$95juta.

Tingkat bunga per tahun atas fasilitas tersebut ditentukan berdasarkan tingkat bunga rata-rata LIBOR berjangka waktu enam bulan ditambah 0,2% per tahun dan SEK *Funding Cost* sebesar 0,62% per tahun dan tanpa jaminan. Bunga akan dibayarkan semesteran yang dimulai sejak tanggal fasilitas digunakan.

Tidak ada fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2009.

p. ICBC

Pada tanggal 30 Desember 2009, sehubungan dengan perjanjian kemitraan dengan Huawei International Pte.Ltd. ("Huawei International") dan PT Huawei Tech Investment ("Huawei Tech") (Catatan 47a.ii), Telkomsel mengadakan perjanjian Sinosure-*Backed Facility* ("fasilitas") dengan ICBC ("Arranger") berkaitan dengan penyediaan fasilitas sejumlah US$266 juta untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Huawei.

Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas 1 dan 2 masing-masing sebesar US$166 juta dan US$100 juta.

Tingkat bunga per tahun atas fasilitas tersebut ditentukan berdasarkan tingkat bunga rata-rata LIBOR berjangka waktu enam bulan ditambah 1,2% per tahun dan tanpa jaminan. Bunga akan dibayarkan semesteran yang dimulai sejak tanggal fasilitas digunakan.

Tidak ada fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2009.

q. BoC

Pada tanggal 30 Desember 2009, Telkomsel mengadakan perjanjian pinjaman jangka panjang BoC berkaitan dengan penyediaan fasilitas sejumlah US$100 juta untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari pemasok China.

Tingkat bunga per tahun atas fasilitas tersebut ditentukan berdasarkan tingkat bunga rata-rata LIBOR berjangka waktu enam bulan ditambah 2,55% per tahun dan tanpa jaminan. Bunga akan dibayarkan semesteran yang dimulai sejak tanggal fasilitas digunakan.

Tidak ada fasilitas yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2009.

Telkomsel tidak memberikan jaminan apa pun atas setiap pinjaman atau fasilitas kredit lainnya, kecuali deposito berjangka (Catatan 8 dan 46h). Persyaratan dari berbagai pinjaman antara Telkomsel dengan krediturnya dan penyedia dana, mengharuskan ketaatan terhadap sejumlah jaminan dan larangan termasuk persyaratan keuangan dan lainnya, diantaranya pembatasan atas jumlah dividen dan bentuk distribusi laba lainnya yang dapat berdampak buruk pada kemampuan Telkomsel untuk memenuhi persyaratan dari fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan dari perjanjian yang relevan juga meliputi klausul gagal bayar dan gagal bayar silang. Manajemen Telkomsel berpendapat tidak ada pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian.

23. NILAI PEROLEHAN PENGGABUNGAN USAHA YANG DITANGGUHKAN

Nilai perolehan yang ditangguhkan merupakan kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Saham Penjual TII atas akuisisi Perusahaan terhadap 100% saham TII, ke MGTI atas akuisisi Perusahaan terhadap KSO IV, dan ke BSI atas akuisisi Perusahaan terhadap KSO VII, dengan penjelasan sebagai berikut:

	2009	2008
Transaksi TII		
PT Aria Infotek	-	62.714
The Asian Infrastructure Fund	-	14.932
MediaOne International I B.V.	-	41.809
Dikurangi diskonto wesel bayar	-	(496)
	-	118.959
Transaksi KSO IV		
MGTI	835.298	1.838.388
Dikurangi diskonto	(33.876)	(146.074)
	801.422	1.692.314
Transaksi KSO VII		
BSI	568.524	1.094.209
Dikurangi diskonto	(40.580)	(149.080)
	527.944	945.129
Jumlah	1.329.366	2.756.402
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun - setelah dikurangi diskonto (Catatan 19a)	(1.221.287)	(1.297.857)
Bagian jangka panjang - setelah dikurangi diskonto (Catatan 19b)	**108.079**	**1.458.545**

a. Transaksi TII

Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan yang berasal dari transaksi TII merupakan wesel bayar tanpa bunga yang menjadi bagian dari harga perolehan atas akuisisi 100% saham TII (sebelumnya adalah mitra KSO Perusahaan di KSO III) pada tanggal 31 Juli 2003. Wesel bayar tersebut akan dibayarkan dalam 10 kali angsuran semesteran dalam jumlah tetap terhitung mulai tanggal 31 Juli 2004. Wesel bayar ini memiliki nilai nominal sebesar US$109,1 juta (setara dengan Rp927.272 juta) dan nilai kini pada tanggal penutupan sebesar US$92,7 juta (setara dengan Rp788.322 juta) pada tingkat diskonto sebesar 5,16%.

Pada tanggal 31 Desember 2008, wesel bayar yang masih terhutang, sebelum diskonto yang belum diamortisasi, sebesar US$10,9 juta (setara dengan Rp119.455 juta), dan pada tanggal 30 Januari 2009, wesel bayar telah dilunasi.

23. NILAI PEROLEHAN PENGGABUNGAN USAHA YANG DITANGGUHKAN (lanjutan)

b. Transaksi KSO IV

Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan yang berasal dari transaksi KSO IV merupakan saldo yang berasal dari akuisisi KSO IV oleh Perusahaan, berdasarkan amandemen dan pernyataan kembali perjanjian KSO yang dilakukan oleh Perusahaan dan MGTI pada tanggal 20 Januari 2004. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan memperoleh hak secara hukum untuk dapat mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional di KSO IV, Perusahaan menyetujui untuk membayar MGTI dengan nilai total pembelian berkisar US$390,7 juta (setara dengan Rp3.285.362 juta) yang merupakan nilai kini dari pembayaran bulanan dalam jumlah tetap (seluruhnya sebesar US$517,1 juta), yang harus dibayar kepada MGTI sejak Februari 2004 sampai dengan Januari 2011 dengan tingkat diskonto 8,3%, ditambah dengan biaya langsung dari penggabungan usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pembayaran bulanan yang masih harus dibayar kepada MGTI, sebelum dikurangi diskonto yang belum diamortisasi, masing-masing sebesar US$88,58 juta (setara dengan Rp835.298 juta) dan US$167,9 juta (setara dengan Rp1.838.388 juta).

c. Transaksi KSO VII

Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan yang berasal dari transaksi KSO VII merupakan saldo yang berasal dari akuisisi KSO VII oleh Perusahaan, berdasarkan amandemen dan pernyataan kembali perjanjian KSO yang dilakukan oleh Perusahaan dan BSI pada tanggal 19 Oktober 2006. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan memperoleh hak secara hukum untuk dapat mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional di KSO VII, Perusahaan menyetujui untuk membayar BSI dengan nilai total pembelian berkisar Rp1.770.925 juta yang merupakan nilai kini dari pembayaran bulanan dalam jumlah tetap (seluruhnya sebesar Rp2.359.230 juta), yang harus dibayar kepada BSI sejak Oktober 2006 sampai dengan Januari 2011 dengan tingkat diskonto 15%, ditambah dengan biaya langsung dari penggabungan usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo pembayaran bulanan yang masih harus dibayar kepada BSI, sebelum dikurangi diskonto yang belum diamortisasi, masing-masing sebesar Rp568.524 juta dan Rp1.094.209 juta.

24. HAK MINORITAS

	2009	2008
Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan:		
Telkomsel	10.868.407	9.460.506
Metra	57.670	59.500
Infomedia	7.270	163.774
Jumlah	**10.933.347**	**9.683.780**

	2009	2008	2007
Hak minoritas atas laba (rugi) anak perusahaan:			
Telkomsel	4.605.610	3.997.135	4.767.873
Metra	1.128	1.903	(2.628)
Infomedia	37.334	54.605	45.567
Jumlah	**4.644.072**	**4.053.643**	**4.810.812**

25. MODAL SAHAM

	2009		
Keterangan	**Jumlah saham**	**Persentase kepemilikan**	**Jumlah modal disetor**
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	-
Saham Seri B			
Pemerintah	10.320.470.711	52,47	2.580.118
The Bank of New York Mellon Corporation	1.788.730.056	9,09	447.183
Direksi (Catatan 1b):			
Ermady Dahlan	17.604	-	4
Indra Utoyo	5.508	-	1
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	7.560.200.900	38,44	1.890.050
Jumlah	19.669.424.780	100,00	4.917.356
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 27)	490.574.500	-	122.644
Jumlah	**20.159.999.280**	**100,00**	**5.040.000**

25. MODAL SAHAM (lanjutan)

	2008		
Keterangan	**Jumlah saham**	**Persentase kepemilikan**	**Jumlah modal disetor**
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	-	-
Saham Seri B			
Pemerintah	10.320.470.711	52,47	2.580.118
JPMCB US Resident (Norbax Inc.)	1.259.769.651	6,40	314.942
The Bank of New York Mellon Corporation (dahulu The Bank of New York Company, Inc.)	2.042.622.016	10,39	510.656
Direksi (Catatan 1b):			
Ermady Dahlan	17.604	-	4
Indra Utoyo	5.508	-	1
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.046.539.289	30,74	1.511.635
Jumlah	19.669.424.780	100,00	4.917.356
Modal saham yang diperoleh kembali (Catatan 27)	490.574.500	-	122.644
Jumlah	**20.159.999.280**	**100,00**	**5.040.000**

Perusahaan hanya menerbitkan 1 saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Pemerintah dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun, dan mempunyai hak veto dalam RUPS Perusahaan berkaitan dengan pengangkatan dan penggantian Dewan Komisaris dan Direksi, penerbitan saham baru, serta perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Saham Seri B memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal kepada seluruh pemegang Saham Seri B.

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR

	2009	**2008**
Hasil penjualan 933.333.000 saham di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995	1.446.666	1.446.666
Kapitalisasi menjadi 746.666.640 saham Seri B pada tahun 1999	(373.333)	(373.333)
Jumlah	**1.073.333**	**1.073.333**

27. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Perusahaan telah melakukan pembelian kembali saham Seri B tahap I, II, dan III berdasarkan keputusan para pemegang saham (Catatan 1c), dan pada saat kondisi pasar berpotensi krisis berdasarkan Ketentuan BAPEPAM-LK No. XI.B.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-401/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Perusahaan telah membeli kembali masing-masing 490.574.500 saham dari modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, masing-masing setara dengan 2,43% dari modal saham Seri B yang ditempatkan dan beredar, dengan total pembelian masing-masing sebesar Rp4.264.073 juta hingga 2009 dan 2008 (sudah termasuk biaya jasa perantara dan kustodian).

27. MODAL SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI (lanjutan)

Perusahaan merencanakan untuk mempertahankan, menjual, atau menggunakan saham yang diperoleh kembali untuk tujuan lain sesuai dengan ketentuan BAPEPAM-LK No. XI.B.2 dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mutasi saham yang dibeli kembali akibat dari program pembelian kembali saham adalah sebagai berikut:

	2009		2008	
	Jumlah saham	**Rp**	**Jumlah saham**	**Rp**
Saldo awal	490.574.500	4.264.073	244.740.500	2.176.611
Jumlah saham yang dibeli kembali	-	-	245.834.000	2.087.462
Saldo akhir	**490.574.500**	**4.264.073**	**490.574.500**	**4.264.073**

Selama periode dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan tidak melakukan pembelian kembali saham, sehingga harga beli per lembar untuk saham yang dibeli kembali untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008, adalah sebagai berikut:

	Rp	
	2009	**2008**
Rata-rata tertimbang	-	8.491
Minimum	-	4.857
Maksimum	-	10.155

Harga beli per lembar saham termasuk biaya jasa perantara. Sampai dengan tanggal neraca konsolidasian, tidak ada saham yang dibeli, kemudian dijual kembali.

28. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI DAN TRANSAKSI LAINNYA ENTITAS SEPENGENDALI

Saldo akun ini berjumlah Rp478.000 juta berasal dari terminasi dini hak eksklusif Perusahaan sebagai penyelenggara layanan sambungan tidak bergerak lokal dan jarak jauh dalam negeri. Seperti dijelaskan pada Catatan 1a, pada tanggal 15 Desember 2005, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Kompensasi Terminasi Dini Hak Eksklusifitas dengan Menkominfo - DJPT dan amandemennya pada tanggal 18 Oktober 2006. Berdasarkan perjanjian ini, Pemerintah menyetujui untuk membayar sebesar Rp478.000 juta, bersih setelah pajak, kepada Perusahaan secara bertahap selama lima tahun. Selain itu, Perusahaan diwajibkan oleh Pemerintah untuk menggunakan dana kompensasi ini untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, akumulasi pembangunan infrastruktur yang terkait masing-masing sebesar Rp416.773 juta dan Rp296.871 juta.

28. SELISIH TRANSAKSI RESTRUKTURISASI DAN TRANSAKSI LAINNYA ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Perusahaan telah menerima pembayaran dengan total masing-masing sejumlah Rp478.000 juta dan Rp360.000 juta terkait dengan kompensasi atas terminasi dini dari hak eksklusif yang dibayarkan tahunan oleh Pemerintah sejak 2005 sampai dengan 2008 masing-masing sebesar Rp90.000 juta dan terakhir pada tanggal 25 Agustus 2009 sebesar Rp118.000 juta. Perusahaan mencatat jumlah ini sebagai "Selisih transaksi restrukturisasi dan transaksi lainnya entitas sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas. Jumlah ini dicatat sebagai bagian dari ekuitas karena Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali atas Perusahaan.

29. PENDAPATAN TELEPON

	2009	2008	2007
Tidak bergerak			
Percakapan lokal dan SLJJ	4.774.075	5.738.004	7.022.997
Pendapatan abonemen bulanan	3.508.432	3.667.905	3.700.570
Pendapatan pasang baru	91.488	130.022	123.722
Kartu telepon	35.413	11.718	1.074
Lain-lain	235.459	182.608	152.848
Jumlah	8.644.867	9.730.257	11.001.211
Seluler			
Pendapatan pemakaian	26.071.376	24.138.015	21.990.296
Fitur	483.095	722.927	312.639
Pendapatan abonemen bulanan	423.511	186.134	204.711
Pendapatan jasa penyambungan	223.845	284.952	130.419
Jumlah	27.201.827	25.332.028	22.638.065
Jumlah Pendapatan Telepon	**35.846.694**	**35.062.285**	**33.639.276**

30. PENDAPATAN INTERKONEKSI

	2009	2008	2007
Pendapatan	10.551.205	12.054.314	12.705.911
Beban	(2.929.260)	(3.263.560)	(3.054.604)
Jumlah - Bersih	**7.621.945**	**8.790.754**	**9.651.307**

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006, menetapkan bahwa implementasi tarif interkoneksi berbasis alokasi biaya mulai diterapkan tanggal 1 Januari 2007 (Catatan 46).

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

31. PENDAPATAN DATA, INTERNET, DAN JASA TEKNOLOGI INFORMATIKA

	2009	2008	2007
Short Messaging Service ("SMS")	10.499.400	9.653.649	11.224.343
Internet, komunikasi data, dan jasa teknologi informatika	7.785.504	4.841.148	3.232.901
VoIP	184.523	180.458	198.358
e-Business	36.731	37.503	28.533
Jumlah	**18.506.158**	**14.712.758**	**14.684.135**

32. PENDAPATAN JARINGAN

	2009	2008	2007
Sewa sirkit	743.005	691.765	473.458
Sewa *transponder* satelit	475.008	387.710	233.916
Jumlah	**1.218.013**	**1.079.475**	**707.374**

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

33. PENDAPATAN JASA TELEKOMUNIKASI LAINNYA

	2009	2008	2007
Customer premise equipment ("CPE") dan Terminal	721.051	380.462	-
Directory assitance	340.087	333.602	329.941
Pendapatan PBH	29.511	121.991	114.189
Amortisasi pendapatan ditangguhkan (Catatan 11)	111.780	204.061	313.789
Lain-lain	201.396	4.396	-
Jumlah	**1.403.825**	**1.044.512**	**757.919**

34. BEBAN USAHA - KARYAWAN

	2009	2008	2007
Gaji dan tunjangan	3.056.273	2.956.440	2.884.111
Cuti, insentif, dan tunjangan lainnya	2.335.409	2.241.970	2.488.266
Program Pendi (Catatan 16)	1.043.639	788.205	-
PPh karyawan	674.426	1.128.437	1.511.160
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 40a)	625.776	706.453	859.531
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih (Catatan 42)	331.056	901.797	723.195
Perumahan	207.494	215.320	219.683
Beban LSA dan terminasi LSA (Catatan 41a,b)	116.562	35.300	(359.809)
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 40b)	81.468	83.569	84.726
Imbalan karyawan lainnya (Catatan 40c)	20.028	16.318	13.568
Pengobatan	18.674	10.343	28.180
Lain-lain	22.352	32.482	42.279
Jumlah	**8.533.157**	**9.116.634**	**8.494.890**

35. BEBAN USAHA - OPERASI, PEMELIHARAAN, DAN JASA TELEKOMUNIKASI

	2009	2008	2007
Operasi dan pemeliharaan	7.480.224	5.905.290	5.415.820
Beban pemakaian frekuensi radio (Catatan 47c.iii)	2.784.639	2.400.290	1.138.522
Beban pokok penjualan pesawat telepon, kartu telepon, SIM, dan RUIM	1.141.960	1.101.548	582.065
Beban hak penyelenggaraan dan Kewajiban Pelayanan Universal	1.136.751	1.095.077	1.026.277
Listrik, gas, dan air	724.069	558.375	481.659
Sewa sirkit dan CPE	474.196	383.340	298.661
Asuransi	312.317	366.547	342.723
Sewa kendaraan dan fasilitas pendukung	266.399	232.367	236.274
Beban pokok jasa teknologi informatika	181.237	105.740	-
Perjalanan	60.815	50.139	50.194
Lain-lain	19.678	18.972	18.401
Jumlah	**14.582.285**	**12.217.685**	**9.590.596**

Lihat Catatan 43 untuk rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

36. BEBAN USAHA - UMUM DAN ADMINISTRASI

	2009	2008	2007
Amortisasi *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya (Catatan 13)	1.390.458	1.243.641	1.154.005
Beban penagihan	717.844	583.871	598.606
Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang (Catatan 5d dan 6)	573.704	397.950	500.808
Keamanan dan *screening*	265.385	258.750	236.034
Perjalanan	223.153	238.282	254.126
Sumbangan sosial dan umum	220.582	141.850	237.379
Pelatihan, pendidikan, dan rekruitmen	204.734	241.425	222.670
Jasa profesional	184.546	204.854	156.844
Rapat	76.413	88.029	88.915
Sewa kendaraan	66.170	87.001	103.013
Alat tulis dan cetakan	64.644	71.965	79.929
Penelitian dan pengembangan	5.867	9.753	6.733
Lain-lain	59.164	61.315	33.132
Jumlah	**4.052.664**	**3.628.686**	**3.672.194**

37. PERPAJAKAN

a. Tagihan restitusi pajak

	2009	2008
Anak perusahaan		
PPh badan	449.902	5.484
PPh - termasuk bunga		
Pasal 21 - PPh pribadi	-	388
Pasal 23 - Penyerahan jasa	-	213.006
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	213	3.950
Pajak Pertambahan Nilai (”PPN”) - termasuk bunga	216.236	347.126
	666.351	**569.954**

b. Pajak dibayar di muka

	2009	2008
Perusahaan		
PPh badan	255.168	226.765
Anak perusahaan		
PPh badan	85.069	545.868
PPN	36.551	31.141
PPh		
Pasal 23 - Penyerahan jasa	2.473	1.820
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	471	-
	124.564	578.829
	379.732	**805.594**

c. Hutang pajak

	2009	2008
Perusahaan		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	6.121	-
Pasal 21 - PPh pribadi	51.377	75.125
Pasal 22 - Penyerahan barang dan impor	2.863	8.044
Pasal 23 - Penyerahan jasa	17.260	50.007
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	45.953	68.087
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	35.018	1.590
Pasal 29 - Kurang bayar PPh badan	27.232	-
PPN	170.899	107.007
	356.723	309.860

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Hutang pajak (lanjutan)

	2009	2008
Anak perusahaan		
PPh		
Pasal 4 (2) - Pajak final	16.349	9.868
Pasal 21 - PPh pribadi	28.285	43.384
Pasal 22 - Penyerahan barang dan impor	2	2
Pasal 23 - Penyerahan jasa	34.089	38.487
Pasal 25 - Angsuran PPh badan	317.087	11.582
Pasal 26 - PPh pribadi luar negeri	45.491	34.374
Pasal 29 - Kurang bayar PPh badan	781.696	84.917
PPN	170.067	207.214
	1.393.066	429.828
	1.749.789	**739.688**

d. Komponen beban (manfaat) pajak adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Kini			
Perusahaan	1.018.661	1.371.171	1.799.709
Anak perusahaan	5.011.040	4.452.387	5.434.165
	6.029.701	5.823.558	7.233.874
Tangguhan			
Perusahaan	202.999	(234.155)	225.287
Anak perusahaan	140.376	50.292	468.662
	343.375	(183.863)	693.949
	6.373.076	**5.639.695**	**7.927.823**

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. PPh badan dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai entitas yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak berlaku untuk perhitungan PPh badan di Indonesia).

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan dan beban PPh konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Laba sebelum pajak konsolidasian	22.349.288	20.312.808	25.595.653
Penambahan kembali eliminasi konsolidasian	8.471.649	7.622.667	8.990.643
Laba konsolidasian sebelum pajak dan eliminasi	30.820.937	27.935.475	34.586.296
Dikurangi: laba sebelum pajak anak perusahaan	(18.302.112)	(16.219.919)	(19.704.281)
Laba sebelum pajak Perusahaan	12.518.825	11.715.556	14.882.015
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(656.472)	(740.407)	(586.373)
	11.862.353	10.975.149	14.295.642
Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku	2.728.341	2.743.775	4.288.675
Penghasilan tidak kena pajak	(1.941.645)	(1.910.785)	(2.699.184)
Beban yang tidak dapat dikurangkan secara pajak	461.749	390.575	361.222
Kewajiban (aset) pajak tangguhan yang tidak dapat digunakan - bersih	-	1.993	(8.193)
Efek perubahan tarif terhadap kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih	42.577	(183.204)	-
Beban PPh badan	1.291.022	1.042.354	1.942.520
PPh ditanggung Pemerintah	(142.779)	-	-
Beban PPh final	73.417	94.662	82.476
Jumlah beban PPh - Perusahaan	1.221.660	1.137.016	2.024.996
Beban PPh - anak perusahaan	5.151.416	4.916.493	5.902.827
Efek perubahan tarif terhadap kewajiban pajak tanguhan anak perusahaan - bersih	-	(413.814)	-
Jumlah beban PPh konsolidasian	**6.373.076**	**5.639.695**	**7.927.823**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi laba kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Laba sebelum pajak Perusahaan	12.518.824	11.715.556	14.882.015
Dikurangi: penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(656.472)	(740.407)	(586.373)
	11.862.352	10.975.149	14.295.642

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. (lanjutan)

	2009	2008	2007
Perbedaan temporer:			
Amortisasi aset tidak berwujud	1.055.716	847.193	1.004.935
Penyusutan aset tetap	(372.240)	51.233	410.146
Penyisihan piutang ragu-ragu	410.341	285.661	342.288
Penyisihan beban karyawan	6.609	(241.304)	336.455
Penyusutan aset tetap PBH	74.798	108.136	131.911
Sewa pembiayaan	(12.642)	(49.982)	(19.777)
(Laba) rugi selisih kurs atas nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	(155.860)	252.457	79.548
Penyisihan persediaan usang	12.047	10.163	9.551
Amortisasi hak atas tanah	(4.084)	(3.837)	(2.644)
Penghapusan persediaan	(8.842)	(6.824)	(3.037)
Laba atas penjualan aset tetap	(20.658)	(7.282)	(11.723)
Amortisasi pendapatan PBH ditangguhkan	(101.680)	(180.944)	(194.151)
Penghapusan piutang	(367.292)	(323.234)	(223.583)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	(342.910)	(283.283)	47.184
LSA	(1.162)	15.284	(391.466)
Pembayaran nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	(1.163.695)	(958.050)	(877.202)
Penyisihan beban Pendi	240.433	788.206	(1.528.429)
Penyisihan lain-lain	53.635	(91.818)	111.729
Jumlah perbedaan temporer	**(697.486)**	**211.775**	**(778.265)**
Perbedaan tetap:			
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	318.439	891.404	714.736
Amortisasi diskonto wesel bayar	520	8.277	22.149
Restitusi pajak - bersih	(6.906)	(3.577)	(5.991)
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi dan anak perusahaan	(8.441.933)	(7.643.138)	(8.997.280)
Kompensasi terminasi dini hak eksklusifitas (Catatan 28)	620.779	-	-
Lain-lain	1.074.770	666.195	473.178
Jumlah perbedaan tetap	**(6.434.331)**	**(6.080.839)**	**(7.793.208)**
Laba kena pajak	**4.730.535**	**5.106.085**	**5.724.169**
Beban Pajak kini	1.088.023	1.276.509	1.717.233
PPh ditanggung Pemerintah (Catatan 28)	(142.779)	-	-
Beban Pajak final	73.417	94.662	82.476
Jumlah beban pajak kini - Perusahaan	1.018.661	1.371.171	1.799.709
Beban pajak kini - anak perusahaan	5.011.040	4.452.387	5.434.165
Jumlah pajak kini	**6.029.701**	**5.823.558**	**7.233.874**

Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan PPh Badan untuk tahun fiskal 2009 akan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Jumlah PPh badan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2007 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak

(i) Perusahaan

Perusahaan saat ini sedang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") untuk tahun fiskal 2008. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan masih dalam proses.

(ii) Telkomsel

Sehubungan dengan perhitungan kembali penyusutan menurut pajak untuk tahun fiskal 2006, Telkomsel mengakui lebih bayar atas pajak yang telah dilaporkan sebelumnya sebesar Rp12,5 miliar. Saat ini Telkomsel sedang diperiksa oleh DJP untuk tahun fiskal 2006. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pemeriksaan masih dalam proses.

Pada tahun 2007, Telkomsel menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas potongan pajak penghasilan, PPN, dan PPh badan termasuk denda untuk tahun fiskal 2004 dan 2005 sebesar Rp478 miliar. Kurang bayar pajak tersebut dilunasi melalui kompensasi potongan pajak penghasilan yang dibayar tahun 2006 sebesar Rp25 miliar dan pembayaran tunai sebesar Rp453 miliar. Pada tanggal 3 Januari 2008, Telkomsel mengajukan keberatan atas kurang bayar potongan pajak penghasilan dan PPN termasuk denda sebesar Rp408 miliar.

Selanjutnya, pada bulan Desember 2008, DJP menerima hasil keberatan sebesar Rp141 miliar. Pada Februari 2009, Telkomsel menerima jumlah tersebut dan imbalan bunga sebesar Rp39 miliar. Pada tanggal 23 Februari 2009, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatan PPN yang ditolak sebesar Rp215 miliar dan mengakui sebagai tagihan restitusi pajak (Catatan 37a). Sisa tagihan yang tidak diterima sebesar Rp52 miliar dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008 (Catatan 50k).

Pada tanggal 2 Oktober 2007, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas penolakan DJP terhadap keberatan Telkomsel untuk hasil pemeriksaan kurang bayar potongan PPh pasal 23 dan 26 untuk tahun fiskal 2002 sebesar Rp115 miliar.

Berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak pada bulan Desember 2008, keberatan Telkomsel diterima dan jumlah sebesar Rp115 miliar dapat diperoleh kembali. Pada bulan Februari 2009, Telkomsel mengakui jumlah yang diterima tersebut berikut imbalan bunga sebesar Rp52 miliar, setelah dikurangi kurang bayar berbagai jenis pajak.

Pada tanggal 25 Februari 2009, DJP mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung ("MA"), atas keputusan Pengadilan Pajak yang menerima permohonan banding Telkomsel untuk pengembalian sebesar Rp115 miliar. Telkomsel berkeyakinan bahwa keputusan Pengadilan Pajak tersebut sudah tepat. Pada tanggal 3 April 2009, Telkomsel mengajukan sanggahan ke MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, peninjauan kembali tersebut masih dalam proses.

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada tanggal 12 Februari 2009, Telkomsel menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") atas kurang bayar PPh pasal 25 untuk periode Desember 2008 sebesar Rp429 miliar (termasuk denda sebesar Rp8 miliar). Pada tanggal 3 Maret 2009, Telkomsel mengajukan keberatan dan memohon DJP untuk membatalkan STP tersebut. Pada tanggal 28 April 2009, DJP menolak keberatan yang diajukan. Oleh karena itu pada tanggal 28 Mei 2009, Telkomsel mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas penolakan DJP. Pada bulan Agustus 2009, Telkomsel membayar sebagian dari denda tersebut sebesar Rp4,2 miliar.

Pada tanggal 21 Desember 2009, Pengadilan Pajak menyetujui permohonan banding Telkomsel dan meminta DJP untuk membatalkan STP. Oleh karena itu, Telkomsel akan mengajukan permintaan pengembalian atas denda yang telah dibayar sebesar Rp4,2 miliar (Catatan 50e).

Pada tanggal 29 Desember 2009, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, Telkomsel menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") untuk tahun pajak 2008 sebesar Rp439 miliar (catatan 50e). Bagian yang ditolak oleh DJP sebesar Rp3 miliar dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2009.

g. Aset dan kewajiban pajak tangguhan

Rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2008	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian*)	31 Desember 2009
Perusahaan			
Aset pajak tangguhan:			
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	698.048	(362.639)	335.409
Penyisihan piutang ragu-ragu	259.195	9.232	268.427
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	275.741	(115.431)	160.310
Beban yang masih harus dibayar	31.877	4.362	36.239
Beban Pendi	220.698	36.462	257.160
Penyisihan beban karyawan	93.035	(8.316)	84.719
Sewa pembiayaan	22.034	(3.602)	18.432
Penyisihan persediaan usang	16.201	1.471	17.672
Jumlah aset pajak tangguhan	1.616.829	(438.461)	1.178.368
Kewajiban pajak tangguhan:			
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.570.559)	(79.641)	(1.650.200)
Hak atas tanah	(4.922)	(886)	(5.808)
Pendapatan PBH	(57.869)	13.273	(44.596)
Aset tidak berwujud	(573.918)	302.716	(271.202)
Jumlah kewajiban pajak tangguhan	(2.207.268)	235.462	(1.971.806)
Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih	(590.439)	(202.999)	(793.438)
Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan - bersih	(2.314.434)	(235.329)	(2.549.763)
Jumlah kewajiban pajak tangguhan - bersih	**(2.904.873)**	**(438.328)**	**(3.343.201)**
Jumlah aset pajak tangguhan anak perusahaan - bersih	**-**	**94.953**	**94.953**

***Termasuk penyesuaian akibat perubahan tarif pajak (Catatan 37h)**

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Aset dan kewajiban pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2007	(Dibebankan) dikreditkan ke laporan laba rugi konsolidasian*)	Akuisisi Sigma	31 Desember 2008
Perusahaan				
Aset pajak tangguhan:				
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	1.010.035	(311.987)	-	698.048
Penyisihan piutang ragu-ragu	306.329	(47.134)	-	259.195
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya berkala bersih	375.994	(100.253)	-	275.741
Beban yang masih harus dibayar	76.686	(44.809)	-	31.877
Beban Pendi	-	220.698	-	220.698
Penyisihan beban karyawan	172.071	(79.036)	-	93.035
Sewa pembiayaan	40.057	(18.023)	-	22.034
Penyisihan persediaan usang	15.891	310	-	16.201
Jumlah aset pajak tangguhan Perusahaan	1.997.063	(380.234)	-	1.616.829
Kewajiban pajak tangguhan:				
Perbedaan nilai buku aset tetap menurut akuntansi dan pajak	(1.848.201)	277.642	-	(1.570.559)
Hak atas tanah	(4.592)	(330)	-	(4.922)
Pendapatan PBH	(59.859)	1.990	-	(57.869)
Aset tidak berwujud	(909.005)	335.087	-	(573.918)
Jumlah kewajiban pajak tangguhan	(2.821.657)	614.389	-	(2.207.268)
Kewajiban pajak tangguhan Perusahaan - bersih	(824.594)	234.155	-	(590.439)
Kewajiban pajak tangguhan anak perusahaan - bersih	(2.209.506)	(50.292)	(54.636)	(2.314.434)
Jumlah kewajiban pajak tangguhan - bersih	**(3.034.100)**	**183.863**	**(54.636)**	**(2.904.873)**

***Termasuk penyesuaian akibat perubahan tarif pajak (Catatan 37h)**

Realisasi dari aset pajak tangguhan tersebut tergantung kepada kemampuan menghasilkan laba di masa depan. Meskipun tidak ada jaminan atas realisasi tersebut, Perusahaan dan anak perusahaan yakin bahwa kemungkinan besar aset pajak tangguhan tersebut akan terealisasi melalui pengurangan atas laba fiskal masa depan. Jumlah aset pajak tangguhan tersebut dipertimbangkan dapat direalisasi, namun bisa berkurang jika laba fiskal di masa depan lebih kecil dari pada yang diestimasikan.

Klaim kelebihan pembayaran PPh badan Telkomsel untuk tahun fiskal 2004 dan 2005 atas perhitungan ulang penyusutan aset tetap untuk keperluan perpajakan pada tahun 2006 sebesar Rp338 miliar tidak disetujui oleh DJP, sehingga Telkomsel melakukan pembalikan sebagian klaim terhadap kewajiban pajak tangguhannya. Penolakan tersebut menyebabkan PPh badan Telkomsel tahun 2006 menjadi lebih bayar Rp12,5 miliar yang merupakan bagian dari pajak dibayar di muka.

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan dan tiap anak perusahaan melaporkan pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri *(self-assessment)*. DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang diberlakukan terhadap tahun fiskal 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Pada tanggal 23 September 2008, Presiden Republik Indonesia dan Menkumham telah menandatangani dan mengundangkan Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Ke Empat atas Undang-Undang Pajak No. 7 tahun 1983 tentang PPh. Peraturan ini mengatur pengenaan tarif tunggal untuk perhitungan Pajak Badan sebesar 28% di tahun 2009 (dimana sebelumnya dihitung dengan tarif progresif dari 10% sampai 30%), dan 25% di tahun 2010. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Perusahaan dan anak perusahaan telah menghitung efek dari perubahan tarif atas perhitungan aset dan kewajiban pajak tangguhannya sesuai dengan estimasi realisasinya.

Selain perubahan tarif, dalam Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 juga diatur pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif tertinggi diberikan kepada perusahaan yang memenuhi syarat, yang tercatat dan memperdagangkan sahamnya di BEI yang memenuhi persyaratan bahwa paling sedikit 40% dari jumlah seluruh saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI dimiliki paling sedikit oleh 300 pemegang saham yang kepemilikannya masing-masing tidak boleh melebihi dari 5%. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan dalam waktu paling singkat 6 bulan dalam jangka waktu satu tahun fiskal. Perusahaan telah memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, sehingga berhak memperoleh insentif pengurangan tarif pajak tersebut dan telah diimplementasikan dalam penghitungan PPh badan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tujuan perhitungan beban dan kewajiban pajak penghasilan untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan periode 31 Desember 2009 dan 2008, Perusahaan menggunakan tarif pajak setelah memperhitungkan penurunan tarif pajak.

Saat ini, Perusahaan sedang diperiksa pajak untuk tahun fiskal 2008. Untuk tahun-tahun fiskal 2003 dan 2009 tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan untuk tahun-tahun fiskal lainnya, Perusahaan telah diperiksa pajak.

Saat ini, Telkomsel sedang diperiksa pajak untuk tahun-tahun fiskal 2006 dan 2008. Untuk tahun-tahun fiskal 2003 dan 2009 tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan untuk tahun-tahun fiskal lainnya, Telkomsel telah diperiksa pajak.

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Administrasi (lanjutan)

Pada tahun 2008, DJP telah mengeluarkan program *sunset policy* berupa pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun-tahun sebelumnya yang masih kurang bayar dengan imbalan dibebaskan dari sanksi administrasi dan tidak dilakukan pemeriksaan atas tahun fiskal tersebut, kecuali jika ditemukan bukti baru yang mengharuskan DJP melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Perusahaan dan Telkomsel telah memanfaatkan program *sunset policy* tersebut melalui pembetulan SPT. Perusahaan menyetor pajak kurang bayar untuk tahun fiskal 2003, 2005, dan 2006 masing-masing sebesar Rp1,9 miliar, Rp2,8 miliar, dan Rp2,4 miliar, dan Telkomsel untuk tahun fiskal 2003 sebesar Rp1,9 miliar. Selain itu, Perusahaan mendapatkan sertifikat dari DJP berupa pembebasan pemeriksaan pajak untuk tahun fiskal 2007 dan 2008, kecuali jika Perusahaan melaporkan SPT Lebih Bayar, maka pemeriksaan akan tetap dilakukan.

38. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar masing-masing sejumlah 19.669.424.780, 19.748.574.254, dan 19.961.721.772 pada tahun 2009, 2008, dan 2007.

Laba bersih per saham dasar masing-masing sejumlah Rp576,13, Rp537,73, dan Rp644,08 (nilai penuh) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007.

Perusahaan tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilusi.

39. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 41 tertanggal 20 Juni 2008, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk 2007 sebesar Rp7.071.360 juta atau Rp357,87 per lembar saham (Rp965.398 juta atau Rp48,45 per lembar saham dibagikan sebagai dividen kas interim di bulan November 2007), pembagian dividen kas spesial sebesar Rp1.928.553 juta, dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp3.857.106 juta.

Berdasarkan hasil RUPST Perusahaan yang dinyatakan dalam akta notaris A. Partomuan Pohan, S.H., LLM. No. 22 tertanggal 12 Juni 2009, para pemegang saham Perusahaan menyetujui pembagian dividen kas untuk 2008 sebesar Rp5.840.708 juta atau Rp296,94 per lembar saham dan menetapkan cadangan umum sebesar Rp4.778.761 juta.

Pada tanggal 18 November 2009, Perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen kas interim tahun buku 2009 sebesar Rp524.190 juta atau Rp26,65 per lembar saham kepada pemegang saham Perusahaan.

40. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA

	2009	2008	2007
Beban imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar			
Pensiun			
Perusahaan	410.209	775.657	1.054.097
Telkomsel	112.991	92.427	64.070
Beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar	523.200	868.084	1.118.167
Imbalan pasca kerja lainnya	209.183	210.345	195.061
Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan	75.934	63.369	41.315
Beban imbalan pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar	**808.317**	**1.141.798**	**1.354.543**
Beban imbalan pensiun dibayar di muka	**497**	**97**	**398**
Beban pensiun berkala bersih			
Perusahaan	570.608	643.618	796.442
Telkomsel	54.695	62.019	62.980
Infomedia	473	816	109
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 34)	**625.776**	**706.453**	**859.531**
Beban imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 34)	**81.468**	**83.569**	**84.726**
Imbalan karyawan lainnya (Catatan 34)	**20.028**	**16.318**	**13.568**

a. Pensiun

1. Perusahaan

   Perusahaan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti.

   Program pensiun imbalan pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja sebelum 1 Juli 2002. Imbalan pensiun yang dibayar dihitung berdasarkan gaji pokok pada saat mulai pensiun dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Telkom ("Dapen"). Karyawan yang ikut serta dalam program pensiun ini membayar kontribusi 18% (sebelum Maret 2003: 8,4%) dari gaji pokok ke dana pensiun. Pembayaran kontribusi Perusahaan ke dana pensiun untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah masing-masing sebesar Rp889.061 juta, Rp889.061 juta, dan Rp700.161 juta.

   Program pensiun iuran pasti diselenggarakan bagi karyawan tetap yang mulai bekerja pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002. Program ini dikelola oleh suatu Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK"). Kontribusi Perusahaan kepada DPLK dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan yang untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing adalah sebesar Rp3.841 juta, Rp3.001 juta, dan Rp2.196 juta.

40. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Pensiun (lanjutan)

1. Perusahaan (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban imbalan pensiun, perubahan aset program pensiun, status pendanaan program pensiun, dan nilai bersih yang tercatat pada neraca konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 untuk program pensiun imbalan pasti:

	2009	2008	2007
Perubahan kewajiban imbalan pensiun			
Kewajiban imbalan pensiun pada awal tahun	9.516.975	10.727.812	8.121.381
Beban jasa	284.090	282.134	441.174
Beban bunga	1.154.174	1.076.969	976.920
Kontribusi peserta program pensiun	44.476	44.593	43.396
Rugi(laba) aktuaria	1.207.375	(2.168.267)	794.376
Perkiraan pembayaran pensiun	(453.651)	(446.266)	(348.018)
Perubahan imbalan	-	-	698.583
Kewajiban imbalan pensiun pada akhir tahun	11.753.439	9.516.975	10.727.812
Perubahan aset program pensiun			
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	8.713.418	9.034.392	7.210.748
Perkiraan pengembalian atas aset program pensiun	1.030.829	930.835	788.583
Kontribusi pemberi kerja	889.061	889.061	700.161
Kontribusi peserta program pensiun	44.476	44.593	43.396
Laba (rugi) aktuaria	2.027.628	(1.773.654)	639.522
Perkiraan pembayaran pensiun	(405.231)	(411.809)	(348.018)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	12.300.181	8.713.418	9.034.392
Status pendanaan	546.742	(803.557)	(1.693.420)
Beban jasa lalu yang belum diakui	1.276.398	1.497.719	1.719.040
Laba aktuaria bersih yang belum diakui	(2.233.349)	(1.469.819)	(1.079.717)
Beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar	**(410.209)**	**(775.657)**	**(1.054.097)**

Pada tahun 2007, Perusahaan memberlakukan *uniformulation* imbalan pensiun yang sama bagi peserta sebelum 20 April 1992 dengan peserta sejak 20 April 1992 yang mulai diterapkan bagi karyawan yang akan pensiun terhitung 1 Februari 2009. Perubahan imbalan ini berdampak adanya penambahan kewajiban Perusahaan sebesar Rp698.583 juta yang akan diamortisasi selama 9,9 tahun hingga 2016.

Hasil aktual aset program adalah Rp2.692.233 juta, (Rp758.031) juta, dan Rp1.602.954 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007.

40. PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Pensiun (lanjutan)

1. Perusahaan (lanjutan)

Mutasi beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar selama tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar pada awal tahun	775.657	1.054.097	1.003.000
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan	570.608	643.618	796.442
Dibebankan kepada anak perusahaan berdasarkan perjanjian	1.425	1.460	-
Kontribusi pemberi kerja	(937.481)	(923.518)	(745.345)
Beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar pada akhir tahun	**410.209**	**775.657**	**1.054.097**

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, aset program pensiun sebagian besar terdiri dari obligasi Pemerintah dan obligasi korporasi. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, aset program pensiun termasuk penempatan pada saham Seri B yang diterbitkan Perusahaan masing-masing dengan nilai wajar Rp355.371 juta dan Rp273.591 juta yang merupakan 2,89% dan 3,21% dari keseluruhan aset program Dapen pada masing-masing tahun.

Penilaian aktuaria atas program pensiun imbalan pasti dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 40b) dilakukan berdasarkan perhitungan pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007, pada laporan tertanggal 30 Maret 2010, 31 Maret 2009, dan 31 Maret 2008 oleh PT Watson Wyatt Purbajaga ("WWP"), aktuaris independen yang berasosiasi dengan Towers Watson ("TW") (dahulu Watson Wyatt Worldwide). Asumsi dasar aktuaria yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Tingkat diskonto	10,75%	12%	10,25%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun	10,5%	11,5%	10%
Tingkat kenaikan kompensasi	8%	8%	8%

40. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Pensiun (lanjutan)

1. Perusahaan (lanjutan)

Komponen beban pensiun berkala bersih yang diakui adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Beban jasa	284.090	282.134	441.174
Beban bunga	1.154.174	1.076.969	976.920
Perkiraan pengembalian aset atas program pensiun	(1.030.829)	(930.835)	(788.583)
Amortisasi beban jasa lalu	221.321	221.321	191.358
Laba aktuaria yang diakui	(56.723)	(4.511)	(24.427)
Beban pensiun berkala bersih	572.033	645.078	796.442
Dibebankan kepada anak perusahaan berdasarkan perjanjian	(1.425)	(1.460)	-
Beban pensiun berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan (Catatan 34)	**570.608**	**643.618**	**796.442**

2. Telkomsel

Telkomsel menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi para karyawannya. Berdasarkan program ini, para karyawan berhak atas imbalan pensiun berdasarkan gaji dasar terakhir atau gaji bersih yang diterima dan masa kerja karyawan. Program pensiun ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya ("Jiwasraya"), perusahaan asuransi jiwa milik negara, di bawah suatu kontrak asuransi anuitas. Sampai dengan tahun 2004, kontribusi karyawan terhadap program ini adalah sebesar 5% dari gaji pokok bulanan dan kontribusi atas sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut ditanggung oleh Telkomsel. Mulai tahun 2005, kontribusi ditanggung sepenuhnya oleh Telkomsel.

Kontribusi Telkomsel ke Jiwasraya berjumlah Rp34.131 juta, Rp33.663 juta, dan Rp31.404 juta masing-masing untuk 2009, 2008, dan 2007.

Rekonsiliasi antara program pensiun yang tidak didanai dan jumlah kewajiban yang disajikan di neraca konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Kewajiban imbalan pensiun	(399.400)	(284.324)	(291.349)
Nilai wajar aset program pensiun	154.091	129.091	107.480
Yang tidak dilakukan pendanaan	(245.309)	(155.233)	(183.869)
Komponen yang tidak diakui di neraca konsolidasian:			
Beban jasa lalu yang belum diakui	754	869	983
Rugi aktuaria bersih yang belum diakui	131.564	61.937	118.816
Beban imbalan pensiun yang masih harus dibayar	**(112.991)**	**(92.427)**	**(64.070)**

40. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

a. Pensiun (lanjutan)

2. Telkomsel (lanjutan)

Komponen beban pensiun berkala bersih adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Beban jasa	33.948	37.295	32.553
Beban bunga	34.084	30.573	24.153
Perkiraan pengembalian aset program pensiun	(15.456)	(11.267)	(2.232)
Amortisasi beban jasa lalu	115	115	115
Rugi aktuaria yang diakui	2.004	5.303	8.391
Beban pensiun berkala bersih (Catatan 34)	**54.695**	**62.019**	**62.980**

Beban pensiun berkala bersih untuk program pensiun dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007, dengan laporan tertanggal masing-masing 8 Februari 2010, 12 Februari 2009, dan 25 Maret 2008 yang dilakukan oleh WWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar aktuaris independen berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Tingkat diskonto	10,5%	12%	10,5%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun	10,5%	12%	10,5%
Tingkat kenaikan kompensasi	8%	9%	8%

3. Infomedia

Infomedia menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti bagi karyawannya. Rekonsiliasi antara status pendanaan program pensiun dengan jumlah yang diakui dalam neraca konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Kewajiban imbalan pensiun	(7.013)	(5.119)	(5.688)
Nilai wajar aset program pensiun	7.510	5.216	6.086
Status pendanaan	497	97	398
Beban imbalan pensiun dibayar di muka	**497**	**97**	**398**

Beban pensiun berkala bersih Infomedia adalah sebesar Rp473 juta, Rp816 juta, dan Rp109 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 (Catatan 34).

40. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN PASCA KERJA LAINNYA (lanjutan)

b. Imbalan pasca kerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja lainnya dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan pada saat karyawan pensiun atau saat pemutusan hubungan kerja. Imbalan pasca kerja lainnya tersebut adalah Biaya Fasilitas Perumahan Terakhir (BFPT) dan Biaya Perjalanan Pensiun dan Purnabhakti (BPP).

Mutasi imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007:

	2009	2008	2007
Beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada awal tahun	210.345	195.061	131.317
Beban imbalan pasca kerja lainnya	81.468	83.569	84.726
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(82.630)	(68.285)	(20.982)
Total beban imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar pada akhir tahun	**209.183**	**210.345**	**195.061**

Komponen beban imbalan pasca kerja lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007:

	2009	2008	2007
Beban jasa	21.729	22.625	22.774
Beban bunga	46.159	41.934	43.968
Amortisasi beban jasa lalu	6.826	6.826	6.826
Rugi aktuaria yang diakui	6.754	12.184	11.158
Total beban imbalan pasca kerja lainnya - bersih (Catatan 34)	**81.468**	**83.569**	**84.726**

c. Kewajiban pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, Perusahaan dan anak perusahaan diharuskan untuk memberikan imbalan pensiun minimum, jika belum dipenuhi oleh program pensiun yang diselenggarakan, kepada para karyawannya yang mencapai usia pensiun. Jumlah tercatat kewajiban tambahan ini pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp75.934 juta dan Rp63.369 juta. Beban pensiun yang dibebankan adalah sebesar Rp20.028 juta, Rp16.318 juta, dan Rp13.568 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 (Catatan 34).

41. PENGHARGAAN MASA KERJA ("*LONG SERVICE AWARDS*" ATAU "LSA")

	2009	2008	2007
Kewajiban LSA			
Telkomsel	**212.518**	**102.633**	**74.520**
Beban LSA dan terminasi LSA			
Perusahaan	-	-	(391.467)
Telkomsel	116.562	35.300	31.658
Total beban LSA dan terminasi LSA (Catatan 34)	**116.562**	**35.300**	**(359.809)**

a. Perusahaan

Perusahaan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu. Penghargaan dapat diberikan saat karyawan mencapai masa kerja tertentu, atau saat pemutusan hubungan kerja.

Mutasi kewajiban LSA untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2007
Kewajiban LSA pada awal tahun	391.467
Beban LSA dan terminasi LSA (lihat Catatan di bawah dan Catatan 34)	(391.467)
Pembayaran LSA	-
Kewajiban LSA pada akhir tahun	**-**

Pada tahun 2007, sehubungan dengan adanya terminasi LSA, Perusahaan mengakui laba aktuaria sebesar Rp391.467 juta atas saldo kewajiban LSA pada tanggal 31 Desember 2006.

b. Telkomsel

Telkomsel memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai atau sejumlah hari cuti tertentu kepada karyawan yang telah memenuhi syarat masa kerja tertentu, termasuk LSA dan LSL. LSA diberikan saat karyawan mencapai kelipatan tahun tertentu atau saat pemutusan hubungan kerja. LSL dalam bentuk sejumlah hari cuti atau uang tunai, tergantung persetujuan manajemen, diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat masa kerja dan dengan usia minimum tertentu.

41. PENGHARGAAN MASA KERJA ("*LONG SERVICE AWARDS*" ATAU "LSA") (lanjutan)

b. Telkomsel (lanjutan)

Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penghargaan ini ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit,* sebesar Rp212.518 juta dan Rp102.633 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 (Catatan 43). Imbalan yang dibebankan adalah sebesar Rp116.562 juta, Rp35.300 juta, dan Rp31.658 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 (Catatan 34).

42. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kesehatan pasca kerja untuk semua karyawannya yang sudah bekerja sebelum tanggal 1 November 1995 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih pada saat pensiun, dan anggota keluarganya yang memenuhi syarat. Ketentuan untuk masa kerja selama 20 tahun ini tidak berlaku bagi karyawan yang memasuki masa pensiun sebelum tanggal 3 Juni 1995. Program ini tidak berlaku bagi karyawan yang mulai bekerja pada Perusahaan sejak tanggal 1 November 1995. Program jaminan kesehatan pasca kerja tersebut dikelola oleh Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom (Yakes").

Tabel berikut ini menyajikan mutasi kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja, perubahan aset program imbalan kesehatan pasca kerja, status pendanaan program imbalan kesehatan pasca kerja, dan jumlah bersih yang diakui dalam neraca konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007:

	2009	2008	2007
Perubahan kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja			
Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja pada awal tahun	5.855.224	8.925.612	6.985.343
Beban jasa	72.007	143.981	115.392
Beban bunga	686.767	903.498	735.427
(Rugi) laba aktuaria	816.312	(3.895.872)	1.273.013
Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(264.336)	(221.995)	(183.563)
Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja pada akhir tahun	**7.165.974**	**5.855.224**	**8.925.612**
Perubahan aset program			
Nilai wajar aset program pada awal tahun	4.018.693	3.376.172	2.253.261
Perkiraan pengembalian aset program	410.378	343.366	237.937
Kontribusi pemberi kerja	1.100.523	1.100.839	900.000
Laba (rugi) aktuaria	757.005	(579.689)	168.537
Perkiraan pembayaran imbalan kesehatan pasca kerja	(264.336)	(221.995)	(183.563)
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	6.022.263	4.018.693	3.376.172
Status pendanaan	(1.143.711)	(1.836.531)	(5.549.440)
(Laba) rugi aktuaria bersih yang belum diakui	(658.065)	(734.189)	2.780.517
Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar	**(1.801.776)**	**(2.570.720)**	**(2.768.923)**

Hasil aktual aset program adalah Rp368.640 juta, Rp244.272 juta, dan Rp256.309 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007.

42. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan)

Komponen beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Beban jasa	72.007	143.981	115.392
Beban bunga	686.767	903.498	735.427
Perkiraan pengembalian atas aset program	(410.378)	(343.366)	(237.937)
(Laba) rugi aktuaria yang diakui	(16.817)	198.523	110.313
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	331.579	902.636	723.195
Jumlah yang dibebankan ke anak perusahaan berdasarkan perjanjian	(523)	(839)	-
Total beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan (Catatan 34)	**331.056**	**901.797**	**723.195**

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, aset program meliputi saham Seri B yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan nilai wajar masing-masing sebesar Rp85.343 juta dan Rp61.665 juta.

Mutasi beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar pada awal tahun	2.570.720	2.768.923	2.945.728
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan (Catatan 34)	331.056	901.797	723.195
Jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan berdasarkan perjanjian	523	839	-
Kontribusi pemberi kerja	(1.100.523)	(1.100.839)	(900.000)
Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar pada akhir tahun	**1.801.776**	**2.570.720**	**2.768.923**

Penilaian aktuaria untuk program imbalan kesehatan pasca kerja dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007, pada laporan masing-masing tertanggal 30 Maret 2010, 31 Maret 2009, dan 31 Maret 2008 oleh WWP, aktuaris independen yang berasosiasi dengan TW. Asumsi dasar yang digunakan oleh aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Tingkat diskonto	10,75%	12%	10,25%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program	9,25%	9,25%	9%
Tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	10%	12%	14%
Tingkat pertumbuhan akhir beban kesehatan	8%	8%	8%
Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir	2012	2011	2011

42. IMBALAN KESEHATAN PASCA KERJA (lanjutan)

Peningkatan 1% pada perkiraan pertumbuhan beban kesehatan akan memberikan dampak sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Beban jasa dan beban bunga	968.212	879.993	1.257.360
Akumulasi kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja	8.294.707	6.721.722	10.569.613

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kebijakan Perusahaan mengatur bahwa penetapan harga atas transaksi-transaksi tersebut sama dengan transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Berikut adalah perjanjian/transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

a. Pemerintah

i. Perusahaan memperoleh pinjaman penerusan dari Pemerintah, pemegang saham mayoritas Perusahaan (Catatan 20).

Beban bunga atas pinjaman penerusan masing-masing berjumlah Rp247.944 juta, Rp172.895 juta, dan Rp288.646 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007. Beban bunga atas pinjaman penerusan mencerminkan 12,4%, 10,9%, dan 20,1% dari jumlah beban bunga pada masing-masing tahun.

ii. Perusahaan dan anak perusahaan membayar beban hak penyelenggaraan untuk jasa telekomunikasi yang diberikan dan beban pemakaian frekuensi radio kepada Depkominfo (sebelumnya DPPT).

Beban hak penyelenggaraan berjumlah Rp327.132 juta, Rp632.522 juta, dan Rp587.770 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 (Catatan 35), yang mencerminkan 0,8%, 1,6%, dan 1,8% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun. Beban pemakaian frekuensi radio berjumlah Rp2.784.639 juta, Rp2.400.290 juta, dan Rp1.138.522 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 (Catatan 35), yang mencerminkan 6,6%, 6,3%, dan 3,5% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

Telkomsel membayar *up front fee* untuk lisensi 3G sebesar Rp756.000 juta dan mencatat sebagai aset tidak berwujud (Catatan 13.iii).

iii. Mulai tahun 2005, Perusahaan dan anak perusahaan membayar beban Kewajiban Pelayanan Universal kepada Depkominfo sesuai dengan Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005.

Beban KPU adalah sebesar Rp809.619 juta, Rp462.555 juta, dan Rp438.507 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 (Catatan 35) yang mencerminkan 1,9%, 1,2%, dan 1,3% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

b. Remunerasi Komisaris dan Direktur

i. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan honor dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Dewan Komisaris. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp52.255 juta, Rp53.590 juta, dan Rp31.373 juta masing-masing untuk tahun 2009, 2008, dan 2007, yang mencerminkan 0,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

ii. Perusahaan dan anak perusahaan memberikan gaji dan fasilitas untuk keperluan tugas operasional Direksi. Jumlah tunjangan tersebut adalah Rp139.923 juta, Rp123.273 juta, dan Rp100.818 juta masing-masing untuk tahun 2009, 2008, dan 2007, yang mencerminkan 0,3% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

c. Indosat

Perusahaan memperlakukan Indosat sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa karena Pemerintah masih memiliki pengaruh signifikan atas kebijakan keuangan dan operasi Indosat terkait dengan hak untuk menunjuk satu Direktur dan satu Komisaris.

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada masyarakat.

Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

i. Perusahaan menyediakan jaringan lokal bagi pelanggan untuk melakukan atau menerima panggilan telepon internasional. Indosat menyediakan jaringan internasional bagi pelanggan, kecuali pelanggan di daerah perbatasan tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia. Jasa telekomunikasi internasional mencakup telepon, teleks, telegram, Sambungan Komunikasi Data Paket (SKDP), televisi, *teleprinter*, *Alternate Voice/Data Telecommunications* (AVD), *hotline*, dan *teleconferencing*.
ii. Perusahaan dan Indosat bertanggung jawab atas sarana telekomunikasi masing-masing.
iii. Pembuatan kuitansi tagihan dan penagihan kepada pelanggan, kecuali untuk sirkit langganan dan telepon umum yang berada di sentral gerbang internasional, dilakukan oleh Perusahaan.
iv. Perusahaan menerima kompensasi untuk jasa yang disebutkan dalam butir pertama di atas berdasarkan tarif interkoneksi yang ditetapkan oleh Menhub.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian interkoneksi dengan Indosat antara jaringan telepon tidak bergerak ("*Public Switched Telephone Network*" atau "PSTN") milik Perusahaan dan jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Indosat dalam rangka penyelenggaraan jasa Indosat Multimedia Mobile serta penyelesaian hak dan kewajiban interkoneksi terkait.

Perusahaan juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk interkoneksi jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Indosat dengan PSTN Perusahaan, yang memungkinkan pelanggan masing-masing perusahaan untuk melakukan panggilan domestik antara jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Indosat dan jaringan tidak bergerak Perusahaan, serta memungkinkan pelanggan Indosat untuk mengakses jasa SLI Perusahaan dengan menekan "007".

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

c. Indosat (lanjutan)

Perusahaan selama ini menangani pembuatan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan kepada pelanggan untuk Indosat. Indosat secara bertahap akan mengambil alih kegiatan tersebut dan melakukan sendiri penerbitan kuitansi tagihan dan melakukan penagihan secara langsung. Perusahaan menerima kompensasi dari Indosat yang dihitung sebesar 1% dari jumlah yang ditagih oleh Perusahaan terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, ditambah dengan beban pemrosesan tagihan yang ditetapkan sebesar jumlah tertentu untuk setiap data (*record*). Pada tanggal 11 Desember 2008, Perusahaan dan Indosat sepakat untuk memberlakukan tarif biaya layanan SLI, besaran tarif tersebut telah memperhitungkan besaran kompensasi penerbitan kuitansi tagihan dan penagihan. Kesepakatan ini berlaku efektif mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009, dan dapat diberlakukan sampai ada Berita Acara Kesepakatan baru.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan Indosat menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 8 tahun 2006 (Catatan 46). Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian dengan Indosat untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional kepada pelanggan jaringan bergerak seluler GSM. Hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

i. Jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Telkomsel dihubungkan dengan gerbang pertukaran internasional milik Indosat agar dapat melakukan atau menerima panggilan internasional.
ii. Jaringan telekomunikasi bergerak seluler GSM milik Telkomsel dan milik Indosat telah dihubungkan untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan oleh pelanggan dari kedua belah pihak.
iii. Atas interkoneksi ini, Indosat berhak atas sebagian pendapatan Telkomsel sebagai kompensasi atas jasa interkoneksi.
iv. Peralatan interkoneksi yang dipasang oleh salah satu pihak di lokasi milik pihak lain tetap merupakan milik pihak pemasang peralatan tersebut. Beban yang timbul sehubungan dengan pengadaan peralatan, pemasangan dan pemeliharaan ditanggung oleh Telkomsel.

Beban interkoneksi bersih Perusahaan dan anak perusahaan dari Indosat untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp69.586 juta, Rp14.957 juta, dan Rp280.018 juta yang mencerminkan masing-masing 0,1%, 0,02%, dan 0,5% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

Telkomsel juga mengadakan perjanjian atas penggunaan fasilitas telekomunikasi Indosat. Perjanjian yang dibuat tahun 1997 dan berlaku selama sebelas tahun tersebut, dapat diubah berdasarkan tinjauan tahunan dan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Beban atas penggunaan fasilitas tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp10.927 juta, Rp21.922 juta, dan Rp24.708 juta yang mencerminkan 0,03%, 0,1% dan 0,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

c. Indosat (lanjutan)

Perjanjian lainnya antara Telkomsel dan Indosat adalah sebagai berikut:

i. Perjanjian Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Kabel Jakarta-Surabaya ("*J-S Cable System*")

Pada tanggal 10 Oktober 1996, Telkomsel, Lintasarta, PT Satelit Palapa Indonesia ("Satelindo"), dan Indosat ("Pihak-pihak") mengadakan perjanjian pembangunan dan pemeliharaan Sistem Kabel J-S. Pihak-pihak telah membentuk komite manajemen yang terdiri atas seorang ketua dan seorang perwakilan dari setiap pihak yang terkait untuk mengarahkan pembangunan dan operasional sistem kabel. Pembangunan sistem kabel selesai pada tahun 1998. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel menanggung 19,325% dari jumlah biaya pembangunan. Beban operasi dan pemeliharaan dibagi berdasarkan formula yang telah disetujui bersama.

Bagian Telkomsel dalam beban operasi dan pemeliharaan adalah sebesar Rp1.223 juta, Rp467 juta, dan Rp379 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007.

ii. Perjanjian IRU (IRU *Agreement*)

Pada tanggal 21 September 2000, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Indosat mengenai penggunaan SEA-ME-WE 3 dan *tail link* di Jakarta dan Medan. Berdasarkan perjanjian, Telkomsel diberikan hak yang tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan kapasitas tertentu dari jaringan tersebut mulai tanggal 21 September 2000 hingga 20 September 2015 sebagai imbalan atas pembayaran di muka sejumlah US$2,7 juta (Catatan 12). Telkomsel juga dikenakan beban operasi dan pemeliharaan tahunan sebesar US$0,1 juta.

Pada tahun 1994, Perusahaan mengalihkan hak penggunaan sebidang tanah di Jakarta yang dimiliki Perusahaan kepada Satelindo, yang sebelumnya disewakan kepada Telekomindo. Berdasarkan perjanjian pengalihan, Satelindo diberi hak untuk menggunakan tanah tersebut selama 30 tahun dan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak mendirikan bangunan di atasnya. Hak kepemilikan atas tanah tersebut tetap berada pada Perusahaan. Satelindo setuju untuk membayar sejumlah Rp43.023 juta kepada Perusahaan untuk hak penggunaan tanah selama 30 tahun. Satelindo telah membayar sejumlah Rp17.210 juta pada tahun 1994 sementara sisanya sebesar Rp25.813 juta belum dibayar karena Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tidak dapat diperoleh sebagaimana disebutkan dalam perjanjian. Pada tahun 2000, Perusahaan dan Satelindo menyetujui alternatif penyelesaian dengan memperhitungkan pembayaran Satelindo di atas sebagai beban sewa sampai tahun 2006. Pada tahun 2001, Satelindo melakukan pembayaran tambahan sejumlah Rp59.860 juta sebagai beban sewa sampai tahun 2024. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, pembayaran di muka dari Satelindo ini disajikan di neraca konsolidasian sebagai "Uang muka pelanggan dan pemasok" .

Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada Indosat dan anak perusahaan, yaitu PT Indosat Mega Media, Lintasarta, dan PT Sistelindo Mitralintas. Saluran ini dapat digunakan perusahaan-perusahaan tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, atau jasa telekomunikasi lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp137.154 juta, Rp171.730 juta, dan Rp162.283 juta yang mencerminkan 0,2%, 0,3% dan 0,3% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

c. Indosat (lanjutan)

Lintasarta menggunakan transponder satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi Perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 sebesar Rp30.118 juta, Rp21.815 juta, dan Rp12.572 juta yang mencerminkan kurang dari 0,1% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Lintasarta (berlaku sampai dengan 31 Oktober 2010) dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("Artajasa") (berlaku sampai dengan bulan Mei 2008) (39,8% sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan Indosat) untuk pemakaian sistem jaringan komunikasi data. Beban pemakaian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp36.434 juta, Rp33.706 juta, dan Rp31.710 juta yang mencerminkan 0,1% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

d. Lain-lain

Transaksi dengan seluruh BUMN diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:

(i) Perusahaan menyediakan jasa telekomunikasi kepada Instansi Pemerintah di Indonesia, yang diperlakukan sebagaimana layaknya transaksi dengan pihak ketiga.

(ii) Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Instansi Pemerintah dan perusahaan asosiasi yaitu CSM, Patrakom, dan PSN untuk penggunaan *transponder* satelit atau kanal frekuensi satelit telekomunikasi Perusahaan. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp140.107 juta, Rp110.692 juta, dan Rp106.969 juta yang mencerminkan 0,2% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

(iii) Perusahaan menyediakan layanan sirkit langganan kepada perusahaan asosiasi, yaitu CSM, Patrakom, PSN, dan Gratika. Sirkit langganan ini dapat digunakan perusahaan asosiasi tersebut untuk hubungan telepon, telegraf, data, teleks, faksimili, dan jasa telekomunikasi lainnya. Pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp39.972 juta, Rp62.530 juta, dan Rp51.076 juta yang mencerminkan 0,1% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

(iv) Perusahaan membeli aset tetap termasuk jasa pembangunan dan pemasangan sarana dari sejumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa meliputi, diantaranya, PT Industri Telekomunikasi Indonesia ("INTI") dan Kopegtel. Pembelian yang dilakukan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut pada tahun 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp340.568 juta, Rp624.160 juta, dan Rp574.340 juta yang mencerminkan 1,7%, 3,9%, dan 3,8% dari jumlah pembelian aset tetap pada masing-masing tahun.

(v) INTI juga merupakan kontraktor dan pemasok utama yang menyediakan peralatan, termasuk jasa konstruksi dan instalasi bagi Telkomsel. Pembelian dari INTI pada tahun 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp103.822 juta, Rp124.929 juta, dan Rp113.738 juta yang mencerminkan 0,5%, 0,8%, dan 0,8% dari jumlah pembelian aset tetap pada masing-masing tahun.

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

(vi) Telkomsel mengadakan perjanjian dengan PSN untuk sewa jaringan transmisi PSN. Berdasarkan perjanjian yang dibuat tanggal 14 Maret 2001, jangka waktu sewa minimum adalah 2 tahun sejak pengoperasian jaringan transmisi dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini telah diperpanjang hingga 13 Maret 2011. Beban sewa untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp204.075 juta, Rp139.449 juta, dan Rp141.040 juta yang mencerminkan 0,5%, 0,4%, dan 0,4% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

(vii) Perusahaan dan anak perusahaan mengasuransikan aset tetap, persediaan, dan menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja bagi karyawannya pada Jasindo, PT Asuransi Tenaga Kerja, dan Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi milik negara. Premi asuransi tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp313.433 juta, Rp335.350 juta, dan Rp301.519 juta yang mencerminkan 0,7%, 0,9%, dan 0,9% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

(viii) Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai rekening giro dan deposito berjangka pada beberapa bank milik negara. Di samping itu, beberapa bank tersebut ditunjuk sebagai agen penagihan Perusahaan. Jumlah penempatan Perusahaan pada bank milik negara dalam bentuk rekening giro dan deposito berjangka, dan reksa dana masing-masing berjumlah Rp5.627.600 juta dan Rp4.844.497 juta pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, yang masing-masing mencerminkan 5,8% dan 5,3% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Pendapatan bunga yang diakui untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp195.266 juta, Rp310.561 juta, dan Rp272.442 juta yang mencerminkan 42,2%, 46%, dan 53% dari jumlah pendapatan bunga pada masing-masing tahun.

(ix) Perusahaan dan anak perusahaan melakukan pinjaman dari beberapa bank milik negara. Beban bunga dari pinjaman tersebut untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 masing-masing sebesar Rp1.047.067 juta, Rp710.338 juta, dan Rp157.008 juta, yang mencerminkan 52,4%, 44,9%, dan 10,9% dari jumlah beban bunga pada masing-masing tahun.

(x) Perusahaan menyewa bangunan, menyewa mobil, membeli barang dan jasa pembangunan, dan menggunakan jasa pemeliharaan dan kebersihan dari Kopegtel dan PT Sandhy Putra Makmur ("SPM"), anak perusahaan dari Yayasan Sandikara Putra Telkom - yayasan yang dikelola oleh Dharma Wanita Telkom. Beban yang timbul dari transaksi tersebut berjumlah Rp478.807 juta, Rp456.577 juta, dan Rp139.389 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008, dan 2007, yang mencerminkan 1,1%, 1,2%, dan 0,4% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

(xi) Perusahaan dan anak perusahaan (membayar) menerima (beban) pendapatan interkoneksi bersih dari PSN, dengan jumlah keseluruhan sebesar (Rp121) juta, (Rp1.910) juta, dan Rp1.422 juta masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007, yang mencerminkan kurang dari (0,01%), (0,01%), dan 0,01% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

d. Lain-lain (lanjutan)

(xii) Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Kopegtel, sehubungan PBH. Pada tahun 2009, 2008, dan 2007, bagian dari pendapatan yang harus dibagikan kepada Kopegtel adalah masing-masing sebesar Rp3.837 juta, Rp11.868 juta, dan Rp23.667 juta, yang mencerminkan 0,01%, 0,02%, dan 0,04% dari jumlah pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

(xiii) Telkomsel mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Patrakom dan CSM sehubungan dengan penggunaan jaringan transmisi mereka untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang. Beban sewa untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebesar Rp228.921 juta, Rp158.288 juta, dan Rp194.557 juta, yang mencerminkan 0,5%, 0,4%, dan 0,6% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

(xiv) Koperasi Pegawai Telkomsel ("Kisel") adalah koperasi yang didirikan oleh karyawan Telkomsel, bergerak dalam jasa penyewaan mobil, pencetakan dan distribusi tagihan pelanggan, penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang bermanfaat bagi Telkomsel. Untuk jasa-jasa ini, Kisel membebankan Telkomsel masing-masing sebesar Rp586.545 juta, Rp542.342 juta, dan Rp453.149 juta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007, yang mencerminkan 1,4% dari beban usaha pada masing-masing tahun. Telkomsel juga mengadakan perjanjian penyaluran dengan Kisel untuk pendistribusian kartu SIM dan vaucer pulsa isi ulang. Jumlah kartu SIM dan vaucer pulsa isi ulang yang dijual ke Kisel sebesar Rp2.229.207 juta, Rp2.086.739 juta, dan Rp1.786.697 juta pada tahun 2009, 2008, dan 2007, yang mencerminkan 3,5%, 3,4%, dan 3,0% dari pendapatan usaha pada masing-masing tahun.

(xv) Telkomsel mengadakan perjanjian pengadaan dengan Gratika, yang merupakan anak perusahaan dari Dapen untuk pemasangan dan pemeliharaan peralatan. Jumlah pengadaan untuk pemasangan peralatan sebesar Rp56.744 juta, Rp40.629 juta, dan Rp256.083 juta masing-masing untuk tahun 2009, 2008, dan 2007, yang mencerminkan 0,28%, 0,26%, dan 1,70% dari jumlah pembelian aset tetap pada masing-masing tahun. Jumlah pengadaan untuk pemeliharaan peralatan sebesar Rp51.992 juta, Rp34.570 juta, dan Rp52.612 juta masing-masing untuk tahun 2009, 2008, dan 2007, yang mencerminkan 0,12%, 0,09%, dan 0,16% dari jumlah beban usaha pada masing-masing tahun.

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

Saldo akun dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	2009		2008	
	Jumlah	**% terhadap jumlah aset**	**Jumlah**	**% terhadap jumlah aset**
a. Kas dan setara kas (Catatan 4)	**4.958.439**	**5,08**	**4.353.166**	**4,77**
b. Penyertaan sementara	**276.523**	**0,28**	**263.469**	**0,29**
c. Piutang usaha - bersih (Catatan 5)	**604.768**	**0,62**	**544.974**	**0,60**
d. Piutang lain-lain				
Bank milik negara (bunga)	9.065	0,01	31.391	0,03
Patrakom	4.688	0,01	4.724	0,01
Kopegtel	3.829	0,00	3.827	0,00
Instansi Pemerintah	278	0,00	2.448	0,00
Lainnya	217	0,00	233	0,00
Jumlah	**18.077**	**0,02**	**42.623**	**0,04**
e. Beban dibayar di muka (Catatan 7)	**1.733.277**	**1,78**	**1.076.592**	**1,18**
f. Aset lancar lainnya (Catatan 8)				
BNI	108.893	0,11	61.723	0,07
Bank Mandiri	16.098	0,02	21.381	0,02
BRI	347	0,00	-	-
Jumlah	**125.338**	**0,13**	**83.104**	**0,09**
g. Uang muka dan aset tidak lancar lainnya (Catatan 12)				
Bank Mandiri	124.378	0,13	91.984	0,10
BNI	98.107	0,10	2.404	0,00
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)	813	0,00	813	0,00
Jumlah	**223.298**	**0,23**	**95.201**	**0,10**
h. Rekening *escrow* (Catatan 14)	**44.004**	**0,05**	**49.557**	**0,05**

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

	2009		2008	
	Jumlah	**% terhadap jumlah kewajiban**	**Jumlah**	**% terhadap jumlah kewajiban**
i. Hutang usaha (Catatan 15)				
Instansi Pemerintah	1.280.700	2,69	1.005.052	2,12
Kopegtel	132.652	0,28	223.640	0,47
Indosat	63.233	0,13	22.095	0,05
Yakes	38.095	0,08	30.070	0,06
INTI	13.459	0,03	26.241	0,06
SPM	12.829	0,03	13.391	0,03
Gratika	8.138	0,02	8.661	0,02
CSM	1.012	0,00	1.007	0,00
Patrakom	690	0,00	-	-
PSN	1	0,00	541	0,00
Lain-lain	208.659	0,44	45.448	0,10
Jumlah	**1.759.468**	**3,70**	**1.376.146**	**2,91**
j. Beban yang masih harus dibayar (Catatan 16)				
Karyawan	1.786.736	3,75	1.621.478	3,43
Instansi Pemerintah dan bank milik negara	368.860	0,77	87.874	0,19
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)	22.802	0,05	21.019	0,04
Jasindo	-	-	93	0,00
Jumlah	**2.178.398**	**4,57**	**1.730.464**	**3,66**
k. Hutang bank jangka pendek (Catatan 18)				
BSM	**9.000**	**0,02**	**-**	**-**
l. Kewajiban LSA (Catatan 41)	**212.518**	**0,45**	**102.633**	**0,22**
m. Kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja (Catatan 42)	**1.801.776**	**3,78**	**2.570.720**	**5,44**
n. Kewajiban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya (Catatan 40)	**808.317**	**1,70**	**1.141.798**	**2,42**
o. Pinjaman penerusan (Catatan 20)	**3.518.093**	**7,39**	**4.440.123**	**9,40**
p. Wesel bayar (Catatan 21)	**70.000**	**0,15**	**-**	**-**
q. Hutang bank jangka panjang (Catatan 22)				
BNI	4.450.000	9,34	3.910.000	8,27
BRI	3.700.000	7,77	3.260.000	6,90
Bank Mandiri	3.330.000	6,99	2.060.000	4,36
Jumlah	**11.480.000**	**24,10**	**9.230.000**	**19,53**

44. INFORMASI SEGMEN

Perusahaan dan anak perusahaan memiliki tiga segmen usaha utama yang seluruhnya beroperasi di Indonesia, yaitu sambungan kabel tidak bergerak, sambungan nirkabel tidak bergerak, dan seluler. Segmen sambungan kabel tidak bergerak menyediakan jasa telepon lokal, SLJJ, dan internasional, dan jasa telekomunikasi lainnya (termasuk di antaranya sirkit langganan, teleks, *transponder*, satelit, dan VSAT), serta jasa pendukungnya. Segmen sambungan nirkabel tidak bergerak menyediakan jasa telekomunikasi berbasis CDMA yang menawarkan pelanggannya kemampuan untuk menggunakan pesawat telepon nirkabel dengan area terbatas (dalam kode wilayah lokal). Segmen seluler menyediakan jasa telekomunikasi dasar, khususnya jasa telekomunikasi seluler bergerak. Segmen usaha yang secara individu tidak melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan disajikan sebagai "Lain-lain", yang terdiri dari usaha buku petunjuk telepon dan pengelolaan gedung. *Goodwill* dialokasikan pada segmen sambungan kabel tidak bergerak.

Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antar segmen usaha dan dinilai sebesar nilai pasar.

	2009						
	Sambungan kabel tidak bergerak	Sambungan nirkabel tidak bergerak	Seluler	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Hasil segmen							
Pendapatan usaha eksternal	19.533.194	3.283.476	41.376.400	403.565	64.596.635	-	64.596.635
Pendapatan antar segmen	2.736.350	52.534	159.438	325.312	3.273.634	(3.273.634)	-
Jumlah pendapatan segmen	22.269.544	3.336.010	41.535.838	728.877	67.870.269	(3.273.634)	64.596.635
Beban usaha eksternal	(17.740.746)	(3.056.615)	(20.484.268)	(711.865)	(41.993.494)	-	(41.993.494)
Beban usaha antar segmen	(1.194.255)	-	(2.316.604)	(32.872)	(3.543.731)	3.543.731	-
Beban usaha segmen	(18.935.001)	(3.056.615)	(22.800.872)	(744.737)	(45.537.225)	3.543.731	(41.993.494)
Hasil segmen	3.334.543	279.395	18.734.966	(15.860)	22.333.044	270.097	22.603.141
Beban bunga							(2.000.023)
Pendapatan bunga							462.169
Kerugian selisih kurs - bersih							972.947
Penghasilan lain-lain - bersih							340.769
Beban PPh							(6.373.076)
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi							(29.715)
Laba sebelum hak minoritas							15.976.212
Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi							(4.644.072)
Laba bersih							11.332.140
Informasi lain							
Aset segmen	34.604.574	5.833.554	59.506.768	760.507	100.705.403	(3.297.350)	97.408.053
Investasi pada perusahaan asosiasi	131.193	-	20.360	-	151.553	-	151.553
Jumlah aset konsolidasian							97.559.606
Jumlah kewajiban konsolidasian	(20.146.997)	(2.034.217)	(28.469.997)	(281.061)	(50.932.272)	3.295.760	(47.636.512)
Pembelian barang modal	(3.615.766)	(1.612.519)	(12.663.266)	(40.989)	(17.932.540)	-	(17.932.540)
Penyusutan dan amortisasi	(3.409.595)	(631.032)	(8.513.246)	(30.472)	(12.584.345)	-	(12.584.345)
Amortisasi *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya	(1.274.455)	(6.133)	(109.375)	(495)	(1.390.458)	-	(1.390.458)
Beban non-kas lain-lain	(461.320)	-	(108.255)	(4.129)	(573.704)	-	(573.704)

44. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

	2008						
	Sambungan kabel tidak bergerak	Sambungan nirkabel tidak bergerak	Seluler	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Hasil segmen							
Pendapatan usaha eksternal	20.154.645	3.271.387	36.878.141	385.611	60.689.784	-	60.689.784
Pendapatan antar segmen	1.315.969	26.376	272.737	346.159	1.961.241	(1.961.241)	-
Jumlah pendapatan segmen	21.470.614	3.297.763	37.150.878	731.770	62.651.025	(1.961.241)	60.689.784
Beban usaha eksternal	(17.368.116)	(2.094.351)	(18.309.533)	(610.309)	(38.382.309)	-	(38.382.309)
Beban usaha antar segmen	(412.820)	-	(2.094.936)	(32.395)	(2.540.151)	2.540.151	-
Beban usaha segmen	(17.780.936)	(2.094.351)	(20.404.469)	(642.704)	(40.922.460)	2.540.151	(38.382.309)
Hasil segmen	3.689.678	1.203.412	16.746.409	89.066	21.728.565	578.910	22.307.475
Beban bunga							(1.581.818)
Pendapatan bunga							671.834
Kerugian selisih kurs - bersih							(1.613.759)
Penghasilan lain-lain - bersih							508.605
Beban PPh							(5.639.695)
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi							20.471
Laba sebelum hak minoritas							14.673.113
Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi							(4.053.643)
Laba bersih							10.619.470
Informasi lain							
Aset segmen	33.698.251	7.505.027	56.721.046	760.356	98.684.680	(7.597.683)	91.086.997
Investasi pada perusahaan asosiasi	148.893	-	20.360	-	169.253	-	169.253
Jumlah aset konsolidasian							91.256.250
Jumlah kewajiban konsolidasian	(22.867.802)	(1.925.062)	(29.708.639)	(341.793)	(54.843.296)	7.584.897	(47.258.399)
Pembelian barang modal	(4.364.760)	(1.937.644)	(15.370.866)	(62.478)	(21.735.748)	-	(21.735.748)
Penyusutan dan amortisasi	(3.432.407)	(408.467)	(7.207.604)	(55.952)	(11.104.430)	15.995	(11.088.435)
Amortisasi *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya	(1.196.927)	-	(46.714)	-	(1.243.641)	-	(1.243.641)
Beban non-kas lain-lain	(335.370)	-	(54.870)	-	(390.240)	-	(390.240)

	2007						
	Sambungan kabel tidak bergerak	Sambungan nirkabel tidak bergerak	Seluler	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Hasil segmen							
Pendapatan usaha eksternal	20.246.203	3.221.196	35.574.651	397.961	59.440.011	-	59.440.011
Pendapatan antar segmen	942.202	(74.741)	1.042.402	264.845	2.174.708	(2.174.708)	-
Jumlah pendapatan segmen	21.188.405	3.146.455	36.617.053	662.806	61.614.719	(2.174.708)	59.440.011
Beban usaha eksternal	(15.862.111)	(1.628.329)	(14.891.627)	(585.236)	(32.967.303)	-	(32.967.303)
Beban usaha antar segmen	(391.658)	-	(1.904.806)	(25.202)	(2.321.666)	2.321.666	-
Beban usaha segmen	(16.253.769)	(1.628.329)	(16.796.433)	(610.438)	(35.288.969)	2.321.666	(32.967.303)
Hasil segmen	4.934.636	1.518.126	19.820.620	52.368	26.325.750	146.958	26.472.708
Beban bunga							(1.436.165)
Pendapatan bunga							518.663
Kerugian selisih kurs - bersih							(294.774)
Penghasilan lain-lain - bersih							328.584
Beban PPh							(7.927.823)
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi							6.637
Laba sebelum hak minoritas							17.667.830
Hak minoritas yang tidak dapat dialokasi							(4.810.812)
Laba bersih							12.857.018

44. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

	2007						
	Sambungan kabel tidak bergerak	Sambungan nirkabel tidak bergerak	Seluler	Lain-lain	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasian
Informasi lain							
Aset segmen	31.817.778	6.915.758	44.931.330	662.712	84.327.578	(2.382.808)	81.944.770
Investasi pada perusahaan asosiasi	93.630	-	20.360	-	113.990	-	113.990
Jumlah aset konsolidasian							82.058.760
Jumlah kewajiban konsolidasian	(20.318.601)	(1.992.729)	(18.760.084)	(316.813)	(41.388.227)	2.382.808	(39.005.419)
Pembelian barang modal	(2.552.912)	(691.613)	(12.132.235)	(87.442)	(15.464.202)	-	(15.464.202)
Penyusutan dan amortisasi	(3.403.757)	(343.328)	(5.685.408)	(51.032)	(9.483.525)	22.661	(9.460.864)
Amortisasi *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya	(1.067.365)	-	(86.640)	-	(1.154.005)	-	(1.154.005)
Beban non-kas lain-lain	(397.261)	-	(101.732)	(1.815)	(500.808)	-	(500.808)

45. POLA BAGI HASIL ("PBH")

Perusahaan mengadakan perjanjian dengan beberapa mitra usaha secara terpisah berdasarkan perjanjian PBH yang dimaksudkan untuk membangun sambungan tidak bergerak, instalasi telepon umum kartu (termasuk pemeliharaannya), data dan jaringan internet, dan fasilitas pendukung telekomunikasi terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan memiliki 28 perjanjian PBH dengan 25 mitra usaha. Lokasi PBH paling banyak berada di Pekanbaru, Jawa Timur, Kalimantan, Makassar, Pare-pare, Manado, Denpasar, Mataram dan Kupang dengan periode penyelenggaraan antara 68 sampai dengan 172 bulan.

Berdasarkan perjanjian PBH, mitra usaha menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan sarana telekomunikasi. Setelah pembangunan selesai, Perusahaan mengelola dan mengoperasikan sarana telekomunikasi tersebut dan menanggung beban perbaikan dan pemeliharaan selama periode bagi hasil. Secara hukum, mitra usaha berhak atas aset tetap yang dibangun mitra usaha selama periode bagi hasil. Pada akhir setiap masa bagi hasil, mitra usaha akan mengalihkan kepemilikan atas sarana telekomunikasi tersebut kepada Perusahaan pada harga nominal tertentu.

Pada umumnya pendapatan yang diperoleh dari pelanggan untuk biaya pemasangan sambungan telepon menjadi hak mitra usaha sepenuhnya. Pendapatan dari pulsa telepon *outgoing* dan biaya bulanan pelanggan dibagi antara mitra usaha dan Perusahaan berdasarkan rasio tertentu yang telah disepakati.

Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan amandemen atas beberapa perjanjian PBH dengan memperpanjang periode PBH serta rasio PBH antara Perusahaan dengan mitra usaha.

Nilai buku bersih aset tetap PBH yang telah dialihkan menjadi aset tetap yang dimiliki sendiri pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp51.078 juta dan Rp120.301 juta (Catatan 11).

Pendapatan yang menjadi bagian mitra usaha adalah sebesar Rp145.145 juta, Rp331.525 juta, dan Rp423.880 juta masing-masing pada tahun 2009, 2008, dan 2007.

46. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI

Berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000, tarif penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi ditentukan oleh penyelenggara berdasarkan kategori tarif, struktur dan dengan mengacu pada formula batasan tarif jasa telekomunikasi tidak bergerak yang ditentukan oleh Pemerintah.

a. Tarif telepon tidak bergerak

Pemerintah telah mengeluarkan formula penyesuaian tarif baru yang diatur dalam Peraturan Menkominfo No. 15/Per/M.KOMINFO/4/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Jasa Teleponi Dasar Yang Disalurkan Melalui Jaringan Tetap.

Berdasarkan Peraturan tersebut, struktur tarif jasa teleponi dasar yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri dari:
- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaaan
- Biaya fasilitas tambahan

Berdasarkan Peraturan tersebut, Perusahaan menyesuaikan tarif yang berlaku sejak 1 Agustus 2008 sebagai berikut:
- Tarif lokal mengalami penurunan berkisar dari 2,5% hingga kenaikan 8,9%, tergantung pada penggunaan jasa dan segmen pelanggan
- Tarif SLJJ mengalami penurunan rata-rata berkisar dari 36,9% hingga kenaikan rata-rata 13,7%, tergantung pada penggunaan jasa dan segmen pelanggan
- Tarif SMS mengalami penurunan rata-rata berkisar dari 42,8% hingga 49,7%, tergantung pada penggunaan jasa dan segmen pelanggan

b. Tarif telepon seluler

Pada tanggal 7 April 2008, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tentang ”Tatacara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular” yang memberikan pedoman untuk menentukan tarif seluler dengan formula yang terdiri dari unsur biaya elemen jaringan dan biaya aktivitas layanan retail. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya No. 12/PER/M.KOMINFO/02/2006.

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 09/PER/M.KOMINFO/04/2008 tanggal 7 April 2008 bahwa tarif seluler terdiri dari:
- Tarif jasa teleponi dasar
- Tarif jelajah
- Tarif jasa multimedia,

dengan struktur sebagai berikut:
- Biaya aktivasi
- Biaya berlangganan bulanan
- Biaya penggunaan
- Biaya fasilitas tambahan.

Tarif dihitung berdasarkan jenis formula yang terdiri dari :
- Perhitungan biaya elemen jaringan (*network element cost*);
- Perhitungan biaya aktivitas layanan retail ditambah margin (*retail services activity cost plus margin*).

46. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

b. Tarif telepon seluler (lanjutan)

Biaya elemen jaringan dihitung dengan menggunakan Metode *Long Run Incremental Cost* (LRIC) *Bottom Up*. Penyelenggara dapat melakukan *de-average* biaya pengunaan jasa teleponi dasar dan menerapkan sistem pentarifan *bundling*, tidak melebihi jumlah dari tarif pungut dihitung dengan menggunakan metode tersebut di atas.

c. Tarif interkoneksi

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan dan seluruh penyelenggara jaringan menandatangani amandemen atas perjanjian kerja sama interkoneksi untuk jaringan tidak bergerak (lokal, SLJJ, dan internasional) dan jaringan bergerak dalam rangka implementasi kewajiban tarif berbasis biaya berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006. Amandemen ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2007.

Tarif interkoneksi Perusahaan dan anak perusahaan yang berlaku saat ini, berdasarkan Dokumen Penawaran Interkoneksi ("DPI") terbaru yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 205 tahun 2008 tanggal 11 April 2008, yang berlaku untuk periode satu tahun, tentang persetujuan terhadap DPI milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan pendapatan usaha (*Operating Revenues*) 25% atau lebih dari total pendapatan usaha seluruh penyelenggaraan telekomunikasi dalam segmentasi layanannya, adalah sebagai berikut :

(1) Sambungan tidak bergerak

a. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap lokal sebesar Rp73/menit.
b. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap domestik (panggilan lokal) sebesar Rp73/menit.
c. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan tetap domestik (panggilan jarak jauh) sebesar Rp203/menit.
d. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan tetap domestik sebesar Rp560/menit.
e. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp203/menit.
f. Tarif layanan terminasi lokal dari jaringan bergerak satelit sebesar Rp204/menit.
g. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp626/menit.
h. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak satelit sebesar Rp613/menit.
i. Tarif layanan terminasi domestik dari jaringan internasional sebesar Rp612/menit.
j. Tarif layanan originasi internasional dari jaringan tetap domestik ke penyelenggara jaringan tetap internasional sebesar Rp612/menit
k. Tarif layanan originasi lokal untuk panggilan jarak jauh dari jaringan tetap domestik ke penyelenggara jasa SLJJ sebesar Rp203/menit.
l. Tarif layanan transit lokal sebesar Rp69/menit.
m. Tarif layanan transit jarak jauh sebesar Rp295/menit.
n. Tarif layanan transit internasional sebesar Rp316/menit.

46. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

c. Tarif interkoneksi (lanjutan)

(2) Seluler

a.Tarif layanan terminasi lokal dan originasi lokal sebesar Rp261/menit.
b.Tarif layanan terminasi jarak jauh dan originasi jarak jauh sebesar Rp380/menit.
c.Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan bergerak seluler sebesar Rp493/menit.
d. Tarif layanan terminasi jarak jauh dari jaringan satelit sebesar Rp501/menit.
e. Tarif layanan terminasi internasional dan originasi internasional sebesar Rp498/menit.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, penyelesaian DPI baru masih dalam proses.

Berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 14/PER/M.KOMINFO/02/2009 tanggal 25 Februari 2009, interkoneksi antar operator diselesaikan melalui proses kliring trafik telekomunikasi. Fungsi kliring ditangani secara bersama-sama oleh operator-operator dibawah pengawasan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Pada tanggal 2 Maret 2009, 12 penyelenggara telekomunikasi dan PT Pratama Jaringan Nusantara ("PJN") menandatangani perjanjian pengoperasian Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi ("SKTT"). PJN ditetapkan untuk mengadakan proses kliring interkoneksi suara dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Tarif sebesar Rp0,4 per data percakapan (*call data record*),
- Untuk mendukung proses tersebut, PJN harus menyediakan SKTT dalam jangka waktu 6 bulan.

Perjanjian tersebut berlaku selama sepuluh tahun, dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian dari keduabelah pihak atau dapat dihentikan sebelum periode tersebut, tergantung pada antara lain, kemampuan PJN untuk:

- Menyediakan sistem dalam periode yang disebutkan di atas,
- Mengubah Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu satu bulan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, pengoperasian kliring interkoneksi suara sedang dalam tahap persiapan.

d. Tarif interkoneksi VoIP

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menhub No. KM. 23 tahun 2002, beban akses dan beban sewa jaringan untuk penyediaan layanan VoIP harus disepakati antara operator jaringan dan operator VoIP. Pada tanggal 11 Maret 2004, Menhub menerbitkan Keputusan No. 31 tahun 2004 yang menentukan bahwa tarif beban interkoneksi untuk VoIP akan ditetapkan oleh Menhub. Saat ini, Menkominfo belum menetapkan tarif beban interkoneksi VoIP yang baru. Sampai dengan ditetapkannya tarif yang baru tersebut, Perusahaan masih akan tetap menerima jumlah per menit yang telah disepakati untuk panggilan yang berasal dari atau diakhiri di jaringan sambungan tidak bergerak milik Perusahaan.

46. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

e. Tarif sewa jaringan

Melalui Peraturan Menteri No. 03/PER/M.KOMINFO/1/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Sewa Jaringan, pemerintah mengatur bentuk, jenis, struktur tarif, dan formula tarif layanan untuk sewa jaringan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melalui Kepdirjen Postel No. 115/Dirjen/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persetujuan Terhadap Dokumen Jenis Layanan Sewa Jaringan, Besaran Tarif sewa Jaringan, Kapasitas Tersedia Layanan Sewa Jaringan, Kualitas Layanan Sewa Jaringan, dan Prosedur Penyediaan Layanan Sewa Jaringan Tahun 2008 Milik Penyelenggara Dominan Layanan Sewa Jaringan, sebagai persetujuan atas usulan Perusahaan. Besaran biaya aktivasi sewa jaringan mulai Rp2.400.000. Besaran tarif pemakaian bulanan untuk lokal (di bawah 25 km) bervariasi mulai Rp1.750.000 hingga Rp88.650.000 tergantung pada kecepatan dan untuk pemakaian bulanan untuk jarak jauh (di atas 25 km) mulai Rp5.600.000 hingga Rp3.893.100.000 tergantung pada kecepatan.

f. Tarif warung telekomunikasi ("wartel")

Menhub menerbitkan Keputusan Menteri No. KM. 46 tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002 mengenai penyelenggaraan wartel yang digantikan oleh Peraturan Menkominfo No. PM.05/PER/M.KOMINFO/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 dimana Perusahaan berhak memperoleh maksimum 70% dari tarif dasar wartel atas percakapan dalam negeri dan maksimum 92% dari tarif dasar wartel atas percakapan internasional. Keputusan ini juga menentukan bahwa *airtime* dari operator seluler harus memberikan minimum 10% untuk pendapatan wartel.

g. Tarif jasa lainnya

Tarif sewa satelit dan jasa teleponi dan multimedia lainnya ditentukan oleh penyedia layanan dengan memperhitungkan berbagai pengeluaran dan harga pasar. Pemerintah hanya menetapkan formula tarif untuk layanan teleponi dasar. Tidak ada aturan untuk tarif atas jasa-jasa lainnya. Pada tanggal 1 April 2009, Perusahaan menurunkan tarif internet rata-rata 20% tergantung paket berlangganan.

h. Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU")

Menkominfo menerbitkan Peraturan No. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 tanggal 30 September 2005, yang mengatur kebijakan program KPU dan mengharuskan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi sebesar 0,75% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan beban interkoneksi) untuk pengembangan KPU. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009, besaran kontribusi diubah menjadi 1,25% dari pendapatan kotornya (dengan mempertimbangkan piutang tak tertagih dan/atau beban interkoneksi dan/atau beban koneksi).

Berdasarkan Surat Keputusan Menkominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tanggal 10 Oktober 2008 yang menggantikan Surat Keputusan Menkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2007 tanggal 13 April 2007 dan Surat Keputusan Menkominfo No. 38/Per/M.KOMINFO/9/2007 tanggal 20 September 2007, yang antara lain mengatur bahwa, dalam menyediakan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU), penyelenggara ditentukan melalui serangkaian proses seleksi oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan ("BTIP") yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tanggal 30 November 2006.

46. TARIF JASA TELEKOMUNIKASI (lanjutan)

h. Kewajiban Pelayanan Universal ("KPU") (lanjutan)

Pada tanggal 16 Januari 2009 dan 23 Januari 2009, Telkomsel ditunjuk sebagai pemenang tender oleh Pemerintah melalui BTIP, untuk menyediakan serta mengoperasikan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil (Program KPU) senilai Rp1,66 triliun, yang meliputi seluruh wilayah Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku, dan Papua. Telkomsel juga akan mendapatkan lisensi jaringan tetap lokal dan hak untuk menggunakan frekuensi radio pada pita frekuensi 2.390 MHz-2.400 MHz.

Selanjutnya, perjanjian telah diubah. Perubahan terakhir pada tanggal 29 Desember 2009, meliputi, antara lain:

- Relokasi dan tambahan lokasi tertentu,
- Perubahan harga menjadi Rp1,76 triliun,
- Memperpanjang periode pra-operasi menjadi 31 Januari 2010 dan 28 Februari 2010, dan periode operasi menjadi Maret dan April 2014.

Pada tanggal 18 Februari 2009 dan 16 Maret 2009, berdasarkan pada Keputusan No. 62/KEP/M.KOMINFO/02/2009 tanggal 18 Februari 2009 dan Keputusan No. 88/KEP/M.KOMINFO/02/2009 tanggal 16 Maret 2009, Menkominfo memberikan Telkomsel izin prinsip untuk mengoperasikan jaringan tidak bergerak di area cakupan Program KPU, yang bergantung uji layak operasi dalam jangka waktu 6 bulan. Izin ini dapat diperpanjang untuk tiga bulan berdasarkan evaluasi dari DJPT. Telkomsel telah mendapatkan sertifikat layak operasi untuk paket 1,3,dan 6. Uji layak operasi untuk paket 2 dan 7 telah selesai, dan selanjutnya, Telkomsel telah menerima sertifikat layak operasi untuk paket-paket tersebut (Catatan 50b).

47. IKATAN

a. Pembelian barang modal

Pada tanggal 31 Desember 2009, jumlah ikatan pembelian barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan dan instalasi peralatan sentral telepon, peralatan transmisi, dan jaringan kabel, adalah sebagai berikut:

Mata uang	Jumlah dalam mata uang asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Rupiah	-	3.178.135
Dolar A.S.	610	5.747.503
Euro	7	100.564
Jumlah		**9.026.202**

Jumlah di atas termasuk perjanjian-perjanjian signifikan berikut:

47. IKATAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(i) Perusahaan

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian	Jumlah nilai Kontrak	Nilai ikatan pada tanggal 31 Desember 2009
Perusahaan dan Konsorsium Huawei ("Huawei")	28 September 2007	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Speedy *Access* paket-3	US$19,2 juta dan Rp130.774 juta	Rp740 juta
Perusahaan dan PT Abhimata Citra Abadi	9 November 2007	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Metro Ethernet paket-1 di Divre IV dan Divre VII	Rp158.207 juta	Rp13.572 juta
Perusahaan dan PT Datacomm Diangraha	28 November 2007	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Metro Ethernet paket-2	Rp238.266 juta	Rp12.896 juta
Perusahaan dan Huawei Tech	31 Maret 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Metro Ethernet paket-3 di Divre V	Rp103.704 juta	Rp6.078 juta
Perusahaan dan PT Era Bangun Jaya	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber* Optik 2008 paket-3 Divre II	Rp103.615 juta	Rp6.949 juta
Perusahaan dan PT Telekomindo Primakarya ("Telekomindo")	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber* Optik 2008 paket-4 Divre III	Rp78.630 juta	Rp3.290 juta
Perusahaan dan Konsorsium G-Pas	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber* Optik 2008 paket-8 Divre VII	Rp113.281 juta	Rp21.208 juta
Perusahaan dan PT Konsorsium Jembo-Karteksi-Tridayasa	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Outside Plant Fiber Optik 2008 paket-9 Netre Sumbagut Area	Rp225.966 juta	Rp112.274 juta
Perusahaan dan Konsorsium G-Pas	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber* Optik 2008 paket-10 Netre Sumbagsel Area	Rp75.751 juta	Rp25.775 juta
Perusahaan dan Telekomindo	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber* Optik 2008 paket-11 Netre Sumbagsel	Rp128.719 juta	Rp10.128 juta
Perusahaan dan PT Brimbun Raya Indah ("Brimbun")	18 April 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Outside Plant Fiber* Optik paket-12 Netre Jakarta dan Jawa Barat	Rp137.542 juta	Rp3.863 juta
Perusahaan dan Huawei	12 Mei 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan untuk Proyek Ekspansi Sistem NSS, BSS, dan PDN di Divisi Divre I, II, III dan IV	US$134,2 juta dan Rp542.200 juta	US$1,9 juta dan Rp4,813 juta
Perusahaan dan PT Datacraft Indonesia	4 Desember 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Tera *Router* 2008 di Divre I, Divre II, dan Divre V	Rp96.868 juta	Rp2.053 juta

47. IKATAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

Pihak yang terkait dengan kontrak	Tanggal perjanjian	Bagian yang signifikan dari perjanjian	Jumlah nilai kontrak	Nilai ikatan pada tanggal 31 Desember 2009
Perusahaan dan PT Nokia Siemens Networks	5 Desember 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan *Softswitch* dan MSAN Modernisasi Divre V dan lokasi *trial* Bali dan Timika	Rp71.814 juta	Rp34.234 juta
Perusahaan dan Konsorsium NSW-Fujitsu	30 Desember 2008	Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Kapasitas *Ring* Proyek JaKa2LaDeMa	US$117,2 juta	US$109,4 juta
Perusahaan dan ISS Reshetnev	2 Maret 2009	Perjanjian Pengadaan Satelit Telkom-3	US$178,9 juta	US$169,4 juta
Perusahaan dan APT Satellite Company Limited	23 Maret 2009	Perjanjian Kerjasama Posisi Orbit 142E Derajat (*142E Degree Orbital Position Cooperation Agreement*)	US$18,5 juta	US$13,3 juta
Perusahaan dan Konsorsium Sansaine Huawei ("Sansaine Huawei")	27 Mei 2009	a. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-3	US$5,9 juta dan Rp68.578 juta	US$5,9 juta dan Rp68.578 juta
	15 Juni 2009	b. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-1	US$5,7 juta dan Rp54.368 juta	US$5,7 juta dan Rp54,368 juta
Perusahaan dan Konsorsium ZTE	2 Juni 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan MSAN ALU dan Akses Sekunder 2008 paket-2	US$9,1 juta dan Rp42.468 juta	US$7,7 juta dan Rp30.560 juta
Perusahaan dan PT Aldomaru	11 Juni 2009	Perjanjian Pengadaan Roll Out Infusion PL 2009	Rp63.761 juta	Rp34.271 juta
Perusahaan dan PT Dharma Kumala Utama	29 Juli 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan & Pemasangan Kabel Serat Optik Akses & RMJ Tahun 2009 Lokasi Jawa Tengah & Jawa Timur Paket-1	Rp63.465 juta	Rp51.447 juta
Perusahaan dan Konsorsium Sansaine Huawei	3 Agustus 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pemasangan *Softswitch* dan MSAN Modernisasi Divre I, Divre II, Divre III dan Divre IV	US$11,7 juta dan Rp15.173 juta	US$8,4 juta dan Rp10.754 juta
Perusahaan dan Sansaine Huawei	24 November 2009	Kontrak untuk Pengadaan & Pemasangan Proyek Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project (MKCS)	US$52,3 juta dan Rp114.949 juta	US$52,3 juta dan Rp114.949 juta
Perusahaan dan Konsorsium NEC - NSN	16 Desember 2009	Perjanjian Kerjasama untuk Pengadaan & Pemasangan Perluasan Kapasitas Ring JASUKA Backbone 2009	US$5,7 juta dan Rp85,441 juta	US$5,7 juta dan Rp85,441 juta
Perusahaan dan ZTE	21 Desember 2009	Perjanjian Kerjasama Pengadaan & Pemasangan Improvement & Upgrade Jawa Backbone 2009	Rp55.950 juta	Rp55.950 juta

47. IKATAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel

Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Motorola, Inc. dan PT Motorola Indonesia, Ericsson AB dan Ericsson Indonesia, Nokia Corporation dan PT Nokia Network ("Nokia Network"), dan Siemens AG sejak Agustus 2004, untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan serta jasa terkait yang terdiri dari:

- Perjanjian Perencanaan dan Pengerjaan Bersama (*Joint Planning and Process Agreement*)
- Perjanjian Penyediaan Peralatan ("*Equipment Supply Agreement*" atau "ESA")
- Perjanjian Jasa Teknik ("*Technical Service Agreement*" atau "TSA")
- Perjanjian Pengadaan Lokasi dan Rekayasa, Mekanik dan Sipil ("*Site Acquisition and Civil, Mechanical and Engineering Agreement*" atau "SITAC" dan "CME")

Perjanjian tersebut berisi daftar harga yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kewajiban Telkomsel untuk seluruh peralatan dan jasa-jasa terkait selama masa perjanjian, berdasarkan penerbitan *Purchase Orders* ("PO").

Perjanjian tersebut berlaku valid dan efektif untuk 3 tahun sejak penandatanganan, dengan ketentuan bahwa para pemasok dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam PO. Bila para pemasok gagal memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, Telkomsel dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.

Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak juga setuju bahwa biaya yang disebutkan dalam daftar harga juga akan berlaku untuk pengadaan peralatan dan jasa (ESA dan TSA) dan jasa (SITAC dan CME) yang diperoleh dari para pemasok antara tanggal 26 Mei 2004 dan tanggal efektif, kecuali untuk peralatan dan jasa yang diperoleh dari Siemens dengan TSA terkait dengan peralatan dan jasa pemeliharaan *Switching Sub System* (*"SSS"*) dan BSS Telkomsel yang diperoleh antara tanggal 1 Juli 2004 sampai dengan tanggal efektif. Harga akan ditinjau ulang secara kuartalan.

Pada bulan Agustus 2007, disebabkan oleh telah berakhirnya masa berlaku perjanjian tersebut di atas, berdasarkan surat dari Ericsson AB dan Ericsson Indonesia dan Nokia Siemens Network (yang saat ini mewakili Nokia Corporation, Nokia Network, dan Siemens AG), perusahaan-perusahaan tersebut menyetujui untuk:

- memperpanjang masa berlakunya perjanjian tersebut di atas sampai dengan perjanjian yang baru antara Telkomsel dan perusahaan-perusahaan lainnya ini telah dibuat dan
- sebelum tanggal berlakunya perjanjian yang baru secara efektif, secara retroaktif berlaku harga berdasarkan perjanjian yang baru (penyesuaian harga retroaktif) terhadap PO untuk pengadaan peralatan dan jasa BSS yang dikeluarkan oleh Telkomsel setelah 1 Juli 2007 dengan menggunakan daftar harga sebelumnya (Catatan 10d.vii).

47. IKATAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Selanjutnya, pada tanggal 17 April 2008, Telkomsel, Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Networks, Nokia Siemens Networks Oy, dan Nokia Siemens Network GmbH & Co. KG menandatangani perjanjian pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G (*Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements*). Perjanjian ini berlaku paling lambat sampai dengan:

- tiga tahun setelah tanggal efektifnya (17 April 2008, kecuali untuk beberapa PO tertentu yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2007 yang dimulai pada tanggal 15 Agustus 2007); atau
- tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

Untuk penyediaan jasa telekomunikasi berteknologi 3G, pada bulan September dan Oktober 2006, Telkomsel mengadakan perjanjian dengan Nokia Corporation dan Nokia Network, Ericsson AB dan Ericsson Indonesia; serta Siemens Network GmbH & Co. KG, untuk pembangunan jaringan (*Rollout Agreement*) dan Nokia Network, Ericsson Indonesia dan Siemens Network GmbH & Co. KG untuk perawatan dan pengoperasian jaringan (*Managed Operations Agreement and Technical Support Agreement*). Perjanjian tersebut berlaku efektif pada saat tanggal pelaksanaan oleh semua pihak terkait (tanggal efektif) sampai dengan tanggal yang paling akhir antara 31 Desember 2008 atau tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum 31 Desember 2008, dengan ketentuan bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam PO. Berdasarkan surat dari Telkomsel, Perjanjian Perawatan dan Pengoperasian dengan perusahaan-perusahaan tersebut berakhir pada tanggal 31 Maret 2008.

Pada tanggal 17 April 2008, Telkomsel, Ericsson Indonesia, dan PT Nokia Siemens Networks menandatangani TSA untuk dukungan teknik untuk Jaringan Kombinasi 2G dan 3G (*Combined 2G and 3G CS Core Network*). Perjanjian ini dimulai pada saat:

- berkaitan hanya dengan proyek bulan Agustus 2007 saja, pada tanggal jasa pengalihan (*transition-out*) telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Pengoperasian Jaringan 3G (*3G Managed Operations Agreement*);
- untuk proyek-proyek yang lain, pada Tanggal Efektif;

dan berlanjut sampai dengan tanggal yang paling akhir antara:

- tiga tahun setelah tanggal efektifnya; dan
- tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

47. IKATAN (lanjutan)

a. Pembelian barang modal (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

Pada bulan Juli dan Agustus 2008, Telkomsel mengadakan perjanjian uji-coba jaringan (*Network Trial Agreements* atau NTA) 2G BSS dan 3G UTRAN dengan PT Alcatel-Lucent Indonesia ("Alcatel"), ZTE, dan Huawei Tech sebagai peserta uji-coba ("*Trial Participants*"). Selanjutnya, pada September 2008, perjanjian dengan ZTE dan Huawei Tech telah diperpanjang. Perjanjian tersebut antara lain berisi:

- Penyediaan rancangan, pasokan, pengiriman, pemasangan, integrasi, dan pengawasan pelaksanaan dari 2G GSM BSS dan 3G UMTS *radio access network* dan jasa teknik untuk penyediaan sub-sistem dan jaringan tersebut oleh peserta uji-coba.
- Berdasarkan keputusan Telkomsel, peserta uji-coba harus mengalihkan kepemilikan kepada Telkomsel atas 2G GSM BSS dan 3G UMTS *radio access network* tertentu.

Pada bulan Maret dan Juni 2009, Telkomsel, Ericsson Indonesia, Ericsson AB, PT Nokia Siemens Indonesia, Nokia Siemens Networks Oy, Huawei International, Huawei Tech, dan ZTE menandatangani perjanjian pembangunan jaringan 2G BSS dan 3G UTRAN *Rollout* (*2G BSS and 3G UTRAN Rollout Agreements*) sebagai provisi dari 2G GSM BSS dan 3G UMTS *Radio Access Network*).

Berdasarkan perjanjian tersebut, pemasok harus menyediakan peralatan dan jasa terkait, termasuk antara lain:
- berpartisipasi dalam proses Perencanaan Bersama (*Joint Planning*),
- menyediakan Pekerjaan SITAC dan CME,
- menyediakan Lisensi peranti lunak.

Provisi peralatan dan jasa harus selaras dengan perjanjian lain seperti perjanjian pembangunan jaringan kombinasi 2G dan 3G (*Combined 2G and 3G CS Core Network Rollout Agreements*) tanggal 17 April 2008.

Selama berlakunya perjanjian tersebut, pemasok (kecuali Huawei International, Huawei Tech, dan ZTE) setuju untuk menyediakan vaucer, peralatan gratis, dan insentif komersial lainnya pada Telkomsel. Sebagian dari vaucer sebesar US$107,5 juta (setara dengan Rp1.172 miliar), disediakan pemasok sebagai penyesuaian harga yang tercantum dalam PO yang terbit sejak 1 Juli 2007 (Catatan 10d.vii).

Perjanjian ini berlaku paling lambat sampai dengan:
- tiga tahun setelah tanggal efektifnya; dan
- tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

Telkomsel dapat memperpanjang perjanjian untuk periode sampai dengan 12 bulan.

Sehubungan dengan berakhirnya periode uji coba (*Network Trial Agreements* atau NTA) 2G BSS dan 3G UTRAN dengan Alcatel, berdasarkan pada Perjanjian Penyelesaian pada tanggal 5 Februari 2010, Telkomsel setuju untuk memberikan kompensasi pada Alcatel sebesar US$7,2 juta (setara dengan Rp67,68 miliar) dan Rp18,4 miliar yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

47. IKATAN (lanjutan)

b. Perjanjian pinjaman dan fasilitas kredit lainnya

Telkomsel memiliki fasilitas jaminan dan bank garansi, fasilitas *standby letter of credit*, dan fasilitas nilai tukar mata uang asing sebesar US$3 juta dari SCB, Jakarta. Fasilitas-fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2010. Atas fasilitas-fasilitas ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, Telkomsel telah menggunakan fasilitas bank garansi sebesar Rp20.000 juta (setara dengan US$2,13 juta) untuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) 3G (Catatan 47c.i). Pinjaman yang berasal dari fasilitas ini dikenakan tingkat bunga *Singapore Interbank Offered Rate* ("SIBOR") ditambah 1,25% per tahun (US$). Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, tidak ada saldo pinjaman terutang atas fasilitas tersebut.

c. Lainnya

(i) Lisensi 3G

Mengacu pada Surat Keputusan Menkominfo No. 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 dan No. 268/KEP/M.KOMINFO/9/2009, (Catatan 1d.a dan 2j), Telkomsel diharuskan antara lain untuk:

1. Membayar iuran tahunan BHP yang dihitung berdasarkan formula tertentu selama jangka waktu lisensi (10 tahun). BHP tahun keempat untuk perolehan lisensi pertama dibayar pada bulan Maret 2009 dan tahun pertama untuk lisensi tambahan pada bulan September 2009 (Catatan 13iii). Komitmen yang timbul dari BHP pada tanggal 31 Desember 2009 dan sampai dengan berakhirnya lisensi dengan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan adalah sebagai berikut:

Tahun	Kurs BI (%)	Indeks (pengali)	Tarif penggunaan frekuensi radio	
			Lisensi sebelumnya	Lisensi tambahan
1	-	-	20% x HL	100% x HL
2	R1	I1 = (1 + R1)	40% x I1 x HL	100% x I1 x HL
3	R2	I2 = I1(1 + R2)	60% x I2 x HL	100% x I2 x HL
4	R3	I3 = I2(1 + R3)	100% x I3 x HL	100% x I3 x HL
5	R4	I4 = I3(1 + R4)	130% x I4 x HL	100% x I4 x HL
6	R5	I5 = I4(1 + R5)	130% x I5 x HL	100% x I5 x HL
7	R6	I6 = I5(1 + R6)	130% x I6 x HL	100% x I6 x HL
8	R7	I7 = I6(1 + R7)	130% x I7 x HL	100% x I7 x HL
9	R8	I8 = I7(1 + R8)	130% x I8 x HL	100% x I8 x HL
10	R9	I9 = I8(1 + R9)	130% x I9 x HL	100% x I9 x HL

Catatan:
Ri = *tingkat bunga rata-rata BI tahun sebelumnya*
Harga Lelang (HL) = *Rp160.000 juta*
Indeks = *penyesuaian atas harga tender untuk tahun berjalan*

BHP terhutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPT.

2. Menyediakan akses *roaming* untuk operator 3G lainnya.

3. Berkontribusi pada pengembangan Kewajiban Pelayanan Universal.

47. IKATAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(i) Lisensi 3G (lanjutan)

4. Membangun jaringan 3G yang meliputi setidaknya sejumlah propinsi berikut:

Tahun	Jumlah minimum provinsi
1	2
2	5
3	8
4	10
5	12
6	14

5. Menerbitkan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) setiap tahun dengan jumlah mana yang lebih tinggi antara Rp20.000 juta atau 5% dari biaya tahunan untuk dibayarkan pada tahun berikutnya. *Performance bond* ini akan dicairkan oleh Pemerintah jika Telkomsel tidak mampu untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas atau saat lisensi dibatalkan atau berakhir, atau jika Telkomsel memutuskan untuk mengembalikan lisensi secara sukarela.

(ii) Konsorsium Palapa Ring

Pada tanggal 10 November 2007, Perusahaan masuk kedalam Konsorsium Palapa Ring dengan menandatangi C&MA dengan 5 perusahaan lainnya. Konsorsium ini dibuat untuk membangun jaringan serat optik di 32 kota di kawasan Indonesia Timur dengan total investasi awal sekitar Rp2.070.336 juta. Melalui konsorsium ini Perusahaan akan memperoleh *bandwidth* sebesar 4 lambda dari total kapasitas sebesar 8,44 lambda (Catatan 14). Pada tahun 2008, 2 perusahaan mengundurkan diri, sehingga jumlah anggota Konsorsium Palapa Ring menjadi 4 termasuk Perusahaan.

(iii) Pemakaian frekuensi radio

Sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan telekomunikasi yang berlaku, operator diwajibkan untuk mendaftarkan stasiun radionya kepada DJPT untuk mendapatkan lisensi penggunaan frekuensi, kecuali stasiun radio yang menggunakan pita frekuensi 2.1 GHz (Catatan 47c.i). Biaya pemakaian frekuensi radio tersebut terhutang pada saat diterimanya Surat Pemberitahuan Pembayaran dari DJPT. Biaya ditentukan berdasarkan jumlah *carrier* ("TX") untuk Telkom dan *transceivers* ("TRXs") untuk Telkomsel yang terdaftar dari stasiun radio. Biaya untuk tahun 2010 akan ditentukan berdasarkan 46.763 TX dalam operasi pada tanggal 31 Desember 2009, dengan biaya berkisar dari Rp0,07 juta hingga Rp17,55 juta untuk tiap TX dan berdasarkan 296.295 TRXs dalam operasi pada tanggal 31 Desember 2009, dengan biaya berkisar dari Rp3,40 juta hingga Rp15,90 juta untuk tiap TRX (Catatan 7).

47. IKATAN (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

(iv) Apple, Inc

Pada tanggal 9 Januari 2009, Telkomsel menandatangani perjanjian dengan Apple, Inc untuk pembelian produk iPhone dan pemasaran kepada para pelanggan bekerjasama dengan pihak ketiga (PT Trikomsel OKE), serta penyediaan layanan jaringannya. Jumlah minimum kumulatif iPhone yang harus dibeli pada 31 Desember 2009, 2010, dan 2011 masing-masing sebesar 125.000, 300.000, dan 500.000 unit.

(v) Sewa Operasi

	Pembayaran sewa minimum			
	Jumlah	**Kurang dari 1 tahun**	**1-5 tahun**	**Lebih dari 5 tahun**
Sewa operasi	303.207	63.982	213.955	25.270

Sewa operasi merupakan perjanjian sewa kantor beberapa anak perusahaan yang tidak dapat dibatalkan.

48. KONTINJENSI

a. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perusahaan dan anak perusahaan telah menjadi tergugat dalam berbagai kasus hukum yang terkait dengan perselisihan tanah, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan praktik kartel SMS. Berdasarkan estimasi manajemen mengenai kemungkinan hasil penyelesaian dari kasus-kasus tersebut, Perusahaan dan anak perusahaan mencadangkan sebesar Rp95.054 juta pada tanggal 31 Desember 2009.

48. KONTINJENSI (lanjutan)

b. Pada tanggal 2 Januari 2006, Kantor Kejaksaan Agung mengadakan suatu pemeriksaan terhadap pelanggaran atas penyalahgunaan fasilitas telekomunikasi dalam hubungannya dengan penyediaan jasa VoIP, dimana satu mantan karyawan dan empat karyawan Perusahaan di KSO VII dijadikan tersangka. Hasil dari pemeriksaan tersebut, satu mantan karyawan dan dua karyawan Perusahaan didakwa di Pengadilan Negeri Makassar, dan dua karyawan lainnya didakwa di Pengadilan Negeri Denpasar untuk pelanggaran korupsi yang mereka lakukan di KSO VII.

Pada tanggal 29 Januari 2008, Pengadilan Negeri Makassar telah menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah. Jaksa penuntut umum telah mengajukan kasasi kepada MA terhadap penetapan Pengadilan Negeri tersebut.

Pada tanggal 3 Maret 2008, Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa para terdakwa bersalah dan menjatuhkan masing-masing tersangka hukuman berupa penjara selama satu tahun enam bulan dan satu tahun serta denda masing-masing Rp50 juta. Para terdakwa telah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tinggi Bali terhadap penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Pada tanggal 5 November 2008, Pengadilan Tinggi Bali menyatakan bahwa para terdakwa bersalah. Pada tanggal 16 Januari 2009, salah seorang terdakwa di Pengadilan Tinggi Bali mengajukan kasasi ke MA. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan kasasi atas kedua kasasi tersebut.

c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") melalui suratnya tanggal 5 Desember 2007, memberitahukan Telkomsel bahwa berdasarkan hasil penyelidikan kasus No. 07/KPPU-L/2007 tanggal 19 November 2007 berkaitan dengan transaksi kepemilikan silang oleh Temasek Holdings dan praktik monopoli oleh Telkomsel, sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelanggaran Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan antara lain:
   - Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 25.1.b Undang-Undang tersebut,
   - Telkomsel telah melanggar pasal 17.1 Undang-Undang tersebut,
   - Memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel dengan syarat-syarat sebagai berikut:
     - Jumlah maksimum persentase kepemilikan untuk masing-masing pembeli adalah 5%,
     - Pembeli tidak memiliki hubungan dengan Temasek Holdings.
   - Telkomsel diharuskan membayar denda sebesar Rp25.000 juta dan memerintahkan Telkomsel untuk menghentikan praktik pengenaan tarif yang tinggi dan menurunkan tarif paling sedikit sebesar 15% dari tarif yang berlaku.

48. KONTINJENSI (lanjutan)

c. (lanjutan)

Pada tanggal 9 Mei 2008, Pengadilan Negeri telah mengumumkan keputusannya dan menyimpulkan antara lain sebagai berikut:

- Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 25.1.b Undang-Undang tersebut,
- Telkomsel telah melanggar pasal 17.1 Undang-Undang tersebut,
- Memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan salah satu kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel atau mengurangi kepemilikannya menjadi 50% pada masing-masing perusahaan dalam batas waktu dua belas bulan dari tanggal keputusan ini telah menjadi final dan mengikat secara hukum syarat-syarat sebagai berikut:
  - Jumlah maksimum persentase kepemilikan untuk masing-masing pembeli adalah 10%,
  - Pembeli tidak memiliki hubungan dengan Temasek Holdings.
- Telkomsel diharuskan membayar denda sebesar Rp15 miliar,
- Pengadilan Negeri tidak menyetujui keputusan KPPU mengenai perintah untuk menurunkan tarif tersebut karena KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tarif tersebut.

Pada tanggal 22 Mei 2008, Telkomsel telah mengajukan kasasi kepada MA. Pada tanggal 9 September 2008, MA mencabut keputusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Temasek Holdings dan perusahaan afiliasinya yang terkait untuk melepaskan salah satu kepemilikannya di Indosat atau Telkomsel. Pada tanggal 14 Mei 2009, Telkomsel mengajukan peninjauan kembali ke MA atas keputusan tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan peninjauan kembali tersebut.

d. Pelanggan tertentu Telkomsel, Indosat, dan PT XL Axiata Tbk (dahulu PT Excelcomindo Pratama) yang berdomisili di Bekasi, Tangerang, dan berbagai wilayah lainnya, yang diwakili oleh Penasehat Hukum, mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class-action*) ke pengadilan untuk menggugat Telkomsel, Perusahaan, Indosat, Pemerintah, Temasek Holdings, dan perusahaan-perusahaan afiliasinya (”Para Pihak”). Para pihak digugat melakukan praktik pengenaan tarif tinggi yang berpotensi merugikan para pelanggan tersebut.

Pada tanggal 8 Juli 2008, gugatan perwakilan kelompok (*class-action*) ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk menggugat Telkomsel oleh beberapa pelanggan tertentu, telah ditolak dan kasus tersebut telah ditutup.

Pada tanggal 14 Agustus 2008, berdasarkan keputusan pengadilan, gugatan perwakilan kelompok (*class-action*) di Tangerang dan wilayah lainnya dikonsolidasi menjadi satu kasus. Pelanggan di berbagai wilayah lainnya keberatan atas keputusan tersebut dan mengajukan keberatan hukum ke MA. Pada tanggal 21 Januari 2009, dalam keputusannya No. 01K/Pdt.Sus/2009, MA menyetujui tuntutan para pelanggan, oleh karena itu, gugatan perwakilan kelompok (*class-action*) diproses secara terpisah pada masing-masing pengadilan (Catatan 50d).

Manajemen berkeyakinan bahwa Telkomsel telah mengenakan tarif sesuai dengan peraturan, sehingga gugatan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat.

48. KONTINJENSI (lanjutan)

e. Perusahaan, Telkomsel, beserta tujuh operator telekomunikasi domestik lainnya sedang diperiksa oleh KPPU dengan tuduhan melakukan praktik kartel SMS. Hasil dari pemeriksaan tersebut pada tanggal 17 Juni 2008, KPPU menyatakan bahwa Perusahaan, Telkomsel, dan beberapa operator lainnya terbukti melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan menjatuhkan denda kepada Perusahaan dan Telkomsel masing-masing sebesar Rp18.000 juta dan Rp25.000 juta.

Sehubungan dengan Keputusan KPPU tanggal 17 Juni 2008, Perusahaan dan Telkomsel telah mengajukan keberatan masing-masing ke Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing pada tanggal 14 Juli 2008 dan 11 Juli 2008.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada praktik kartel yang dilakukan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang berlaku. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, belum terdapat keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.

f. Pada tanggal 30 Maret 2010, Perusahaan memperoleh Surat Menkominfo No. 152/M.KOMINFO/03/2010 tanggal 26 Maret 2010 perihal penjelasan Perhitungan Biaya Hak Penggunaan ("BHP") Frekuensi Telkom Flexi dan Surat Tim Teknis Optimalisasi Penerimaan Negara Satuan Tugas Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") Sektor Telekomunikasi melalui Surat Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") No.S-71/OPN.TEKNIS.1.2.2/03/2010. Surat tersebut mengharuskan Perusahaan untuk melakukan pembayaran tambahan sehubungan dengan kewajiban historis biaya lisensi BHP Perusahaan dan menerapkan tambahan denda administratif. Perusahaan telah mengakui tambahan kewajiban BHP tersebut dalam laporan keuangan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan berpendapat denda tersebut seharusnya tidak berlaku. Perusahan sedang meninjau surat tersebut untuk menentukan tindakan yang harus diambil termasuk pertimbangan pengajuan keberatan ke Menkominfo tentang keputusan tersebut.

Atas kasus-kasus tersebut di atas, Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa hasil dari kelanjutan pemeriksaan atau keputusan pengadilan tersebut tidak akan membawa dampak material terhadap keuangan Perusahaan dan anak perusahaan.

49. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING

Saldo aset dan kewajiban moneter dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

	2009		2008	
	Valuta asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Valuta asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Aset				
Kas dan setara kas				
Dolar A.S.	185,71	1.747.751	180,47	1.963.730
Euro	38,35	518.321	27,60	425.647
Dolar Singapura	0,24	1.599	0,46	3.473
Yen Jepang	0,22	22	1,18	141
Ringgit Malaysia	0,03	95	0,03	108
Investasi sementara				
Dolar A.S.	7,52	70.834	8,00	86.800
Piutang usaha				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
Dolar A.S.	2,78	26.198	1,26	13.678
Pihak ketiga				
Dolar A.S.	66,64	627.487	55,86	606.344
Dolar Singapura	0,00	4	-	-
Piutang lain-lain				
Dolar A.S.	0,64	5.994	0,68	7.357
Pound sterling Inggris	0,06	916	0,01	193
Euro	0,01	198	0,01	184
Dolar Singapura	0,01	90	0,11	820
Aset lancar lainnya				
Dolar A.S.	0,67	6.318	0,94	10.190
Euro	-	-	0,01	87
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya				
Dolar A.S.	2,55	23.935	3,30	36.061
Dolar Singapura	-	-	0,07	495
Rekening *escrow*				
Dolar A.S.	4,67	44.004	4,57	49.557
Jumlah aset		**3.073.766**		**3.204.865**

49. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM VALUTA ASING (lanjutan)

	2009		2008	
	Valuta asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah	Valuta asing (dalam jutaan)	Setara Rupiah
Kewajiban				
Hutang usaha				
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa				
Dolar A.S.	6,81	63.981	0,64	6.974
Pihak ketiga				
Dolar A.S.	453,80	4.268.114	422,51	4.626.483
Euro	18,04	243.667	84,79	1.308.456
Dolar Singapura	1,55	10.377	0,59	4.498
Ringgit Malaysia	0,55	1.501	-	-
Pound sterling Inggris	0,06	873	0,04	573
Yen Jepang	0,51	52	0,51	62
Franc Swiss	0,00	15	0,0	13
Hutang lain-lain				
Dolar A.S.	0,05	515	0,05	510
Dolar Singapura	-	-	0,05	373
Biaya yang masih harus dibayar				
Dolar A.S.	10,55	99.468	55,34	605.947
Yen Jepang	41,09	4.199	43,83	5.313
Euro	-	-	16,63	256.595
Dolar Singapura	-	-	2,27	17.257
Uang muka pelanggan dan pemasok				
Dolar A.S.	1,14	10.748	1,76	19.244
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Dolar A.S.	125,52	1.183.553	135,87	1.487.742
Yen Jepang	767,90	78.479	767,90	93.085
Hutang jangka panjang				
Dolar A.S.	140,98	1.329.449	264,84	2.900.044
Yen Jepang	10.750,57	1.098.707	11.518,46	1.396.268
Jumlah kewajiban		**8.393.698**		**12.729.437**
Kewajiban bersih		**(5.319.932)**		**(9.524.572)**

Pada tanggal 31 Desember 2009 saldo (kewajiban) aset moneter bersih Perusahaan dan anak perusahaan dalam valuta asing sebesar (US$467,67 juta) dan Euro20,33 juta. Pada tanggal 31 Desember 2008 saldo kewajiban moneter bersih Perusahaan dan anak perusahaan dalam valuta asing sebesar US$625,93 juta dan Euro73,79 juta.

Aktivitas Perusahaan dan anak perusahaan membuka kemungkinan terhadap berbagai risiko keuangan termasuk dampak perubahan harga pasar surat hutang dan efek, nilai tukar mata uang asing, dan tingkat bunga.

Program manajemen risiko Perusahaan dan anak perusahaan secara keseluruhan memberikan perhatian pada sifat pasar uang yang tidak terduga dan berusaha untuk meminimalkan dampak yang berpotensi buruk terhadap kinerja Perusahaan dan anak perusahaan. Manajemen mempunyai kebijakan tertulis untuk manajemen risiko valuta asing yang sebagian besar melalui penempatan deposito berjangka dan lindung nilai untuk mengantisipasi risiko fluktuasi valuta asing untuk jangka waktu 3 sampai dengan 12 bulan.

Jika Perusahaan dan anak perusahaan melaporkan aset dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2009 menggunakan kurs tanggal 8 April 2010, laba selisih kurs yang belum terealisasi bertambah sebesar Rp193.018 juta.

50. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

a. Pada tanggal 11 Januari 2010, para pemegang saham TII menyetujui keikutsertaan TII dalam konsorsium Kabel Laut *South East Asia-Japan Cable System* (SJC) dan *extended capacity* ke Amerika Serikat dengan total investasi sebesar US$45,2 juta.

b. Pada tanggal 22 Januari 2010, Telkomsel memperoleh sertifikat layak operasi untuk paket 2 dan 7. Selanjutnya, masing-masing pada tanggal 25 Januari 2010 dan 28 Januari 2010, berdasarkan Keputusan No 39/KEP/M.KOMINFO/01/2010 dan No 41/KEP/M.KOMINFO/01/2010, Telkomsel memperoleh lisensi operasi untuk menyediakan jaringan tetap lokal dalam program Kewajiban Pelayanan Universal di daerah-daerah yang dicakup oleh perjanjian antara Telkomsel dan BTIP. Lisensi berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian, dapat diperpanjang tergantung hasil evaluasi (Catatan 46h).

c. Pada tanggal 25 Januari 2010, Metra telah menandatangani CSPA dengan para pemegang saham Administrasi Medika ("Ad Medika") untuk membeli 75% saham beredar Ad Medika. Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2010, Metra menandatangani *Sales Purchase Agreement* (SPA) dengan para pemegang saham Ad Medika atas transaksi pembelian saham tersebut sebesar Rp128.250 juta.

d. Pada tanggal 27 Januari 2010, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan perwakilan kelompok (*class-action*) oleh beberapa pelanggan tertentu di berbagai wilayah lainnya (Catatan 48d).

e. Pada tanggal 28 Januari dan 12 Februari 2010, Telkomsel menerima tagihan restitusi pajak untuk tahun fiskal 2008 masing-masing sebesar Rp439 miliar dan Rp4,2 miliar (Catatan 37f).

f. Pada tanggal 2 Februari 2010, Telkomsel menarik fasilitas pinjaman dari OCBC Indonesia dan OCBC NISP masing-masing sebesar Rp100.000 juta (Catatan 22m) dan Rp250.000 juta (Catatan 22n).

g. Pada tanggal 3 Februari 2010, TII melakukan tambahan pembelian saham Scicom sejumlah 3.042.400 lembar saham dengan nilai transaksi sebesar US$0,42 juta (setara dengan Rp3.905 juta) sehingga tingkat kepemilikan TII di Scicom meningkat menjadi 17,01 %.

h. Pada tanggal 3 Februari 2010, Telkomsel menandatangani perjanjian untuk pemeliharaan dan pengadaan peralatan dan jasa terkait:
   - *Next Generation Convergence IP RAN Rollout and Technical Support* dengan PT Packet Systems Indonesia dan Huawei Tech; dan
   - *Next Generation Convergence Core Transport Rollout and Technical Support* dengan PT Datacraft Indonesia dan Huawei Tech.

   Perjanjian dimulai pada saat tanggal efektif dan dan berlanjut sampai dengan tanggal yang paling akhir antara:
   - tiga tahun setelah tanggal efektifnya; dan
   - tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode tiga tahun.

   Telkomsel dapat memperpanjang perjanjian untuk periode tidak lebih dari dua tahun.

50. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

i. Pada tanggal 8 Februari 2010, Telkomsel menandatangani Perjanjian *Online Charging System and Service Control Points System Solution Development* dengan Amdocs Software Solutions Limited Liability Company dan PT Application Solutions.

Perjanjian dimulai pada saat tanggal efektif dan dan berlanjut sampai dengan tanggal yang paling akhir antara:

- lima tahun setelah tanggal efektifnya; dan
- tanggal PO terakhir sesuai perjanjian berakhir berkaitan dengan PO yang dikeluarkan sebelum berakhirnya perjanjian dalam periode lima tahun.

Telkomsel dapat memperpanjang perjanjian untuk periode tidak lebih dari tiga tahun.

j. Pada tanggal 2 Maret 2010, Telkomsel menandatangani perjanjian pinjaman dengan Finnish Export Credit Ltd. sebesar US$250 juta. Fasilitas ini digunakan untuk pengadaan peralatan dan jasa Nokia Siemens Network.

k. Pada tanggal 3 Maret 2010, Pengadilan Pajak mengumumkan persetujuan atas sebagian besar keberatan Telkomsel atas PPN untuk tahun fiskal 2004 dan 2005 sebesar Rp215 miliar (Catatan 37f). Tetapi, sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Telkomsel belum menerima keputusan resmi dari Pengadilan Pajak.

l. Pada tanggal 26 Maret 2010, sehubungan dengan perjanjian dengan Konsorsium NSW-Fujitsu (Catatan 47a.i), Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Japan Bank for International Cooperation, *the international arm of Japan Finance Corporation* berkaitan dengan penyediaan fasilitas sejumlah US$59,89 juta untuk pengadaan peralatan telekomunikasi dan jasa dari Konsorsium NSW-Fujitsu. Fasilitas tersebut terdiri dari fasilitas A dan B masing-masing sebesar US$35,93 juta dan US$23,96 juta. Fasilitas dibayar dalam 10 kali angsuran tetap semesteran dimulai 6 bulan sejak tanggal fasilitas digunakan. Tingkat bunga per tahun atas fasilitas tersebut masing-masing ditentukan sebesar 4,56% dan berdasarkan tingkat bunga rata-rata LIBOR berjangka waktu enam bulan ditambah 0,70% per tahun dan tanpa jaminan. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, tidak ada fasilitas yang digunakan.

51. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA

Standar Akuntansi Baru di Indonesia yang relevan terhadap Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

(i) PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan"

Pada bulan Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" yang menggantikan PSAK 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu". PSAK 50 (Revisi 2006) memberikan pedoman bagaimana mengungkapkan dan menyajikan instrumen keuangan pada laporan keuangan dan menentukan apakah instrumen keuangan adalah instrumen kewajiban atau ekuitas. PSAK 50 (Revisi 2006) digunakan untuk klasifikasi atas instrumen keuangan dari prespektif penerbitnya, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. PSAK 50 (Revisi 2006) melengkapi ketentuan pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diatur pada PSAK 55 (Revisi 2006). DSAK menunda pemberlakuan PSAK 50 (Revisi 2006) hingga 1 Januari 2010 berdasarkan surat DSAK No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 tentang, "Pengumuman Perubahan Tanggal Efektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)" tertanggal 30 Desember 2008. PSAK 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" diperkirakan tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(ii) PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"

Pada bulan Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang menggantikan PSAK 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". PSAK 55 (Revisi 2006) memberikan pedoman pengakuan, pengukuran, dan penghentian pengakuan aset keuangan dan kewajiban keuangan termasuk instrumen derivatif. PSAK 55 (Revisi 2006) juga memberikan pedoman pengakuan dan pengukuran kontrak penjualan dan pembelian item non-keuangan. DSAK menunda pemberlakuan PSAK 55 (Revisi 2006) hingga 1 Januari 2010 berdasarkan surat DSAK No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008 tentang, "Pengumuman Perubahan Tanggal Efektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)" tertanggal 30 Desember 2008. PSAK 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" diperkirakan tidak akan memiliki dampak yang signifikan terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian.

51. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA (lanjutan)

(iii) PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan"

Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" yang menggantikan PSAK (1998), "Penyajian Laporan Keuangan". PSAK 1 (Revisi 2009) menentukan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. PSAK 1 (Revisi 2009) mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum isi laporan keuangan dan mengharuskan Perusahaan dan anak perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lengkap yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, laporan Laba Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya, Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. PSAK 1 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" diperkirakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian dan pengungkapan yang terkait.

(iv) PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi"

Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi" yang menggantikan PSAK 5 (Revisi 2000), "Pelaporan Segmen". PSAK 5 (Revisi 2009) mengharuskan Perusahaan dan anak perusahaannya untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan konsolidasi untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis. PSAK 5 (Revisi 2009) memperluas definisi segmen operasi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan segmen operasi. PSAK 5 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi" terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(v) PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset"

Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset" yang menggantikan PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset". PSAK 48 (Revisi 2009) memberikan pedoman untuk mengidentifikasikan unit penghasil kas dan mengukur penurunan nilai aset. Suatu rugi penurunan nilai harus dicatat untuk suatu unit penghasil kas ketika jumlah terpulihkan dari unit tersebut lebih kecil dari nilai tercatatnya. Rugi penurunan nilai harus dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap *goodwill* yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut dan ke aset lain dari unit tersebut dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. PSAK 48 (Revisi 2009) mengharuskan perusahaan dan anak perusahaan untuk menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya untuk aset lain selain *goodwill* sudah tidak terdapat lagi. PSAK 48 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset" terhadap laporan keuangan konsolidasian.

51. STANDAR AKUNTANSI BARU DI INDONESIA (lanjutan)

(vi) PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"

Pada Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan" yang menggantikan PSAK 58 (Revisi 2003), "Operasi dalam Penghentian". PSAK 58 (Revisi 2009) memberikan pedoman pengklasifikasian dan pengukuran aset tersedia untuk dijual. Aset tersedia untuk dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya. PSAK 58 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai atau setelah 1 Januari 2011 dan diterapkan secara prospektif. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 58 (Revisi 2009), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan" terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(vii) ISAK 10 (Revisi 2009), "Program Loyalitas Pelanggan"

Pada Desember 2009, DSAK mengeluarkan ISAK 10 (Revisi 2009), "Program Loyalitas Pelanggan". ISAK 10 (Revisi 2009) memberikan pedoman untuk mencatat dan mengukur penghargaan kredit kepada pelanggan. ISAK 10 (Revisi 2009)mengharuskan imbalan tersebut diidentifikasi secara terpisah dan diukur dengan mengacu pada nilai wajarnya. ISAK 10 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK 10 (Revisi 2009), "Program Loyalitas Pelanggan" terhadap laporan keuangan konsolidasian.

(viii) Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan ("PPSAK") 1, "Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol"

Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PPSAK 1, "Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol". PPSAK 1 menghapus ketentuan yang ada pada PSAK 33, PSAK 35, dan PSAK 37. PPSAK 1 berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 dan diterapkan secara prospektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan, DSAK menganjurkan penyajian kembali laporan keuangan untuk periode yang berakhir sebelum periode sajian. Penerapan dini PPSAK 1 diperkenankan. Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan ("PPSAK") 1, "Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol" diperkirakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan laba rugi konsolidasian dan pengungkapan yang terkait.

(ix) PPSAK 5, "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 Dan 16, PSAK 55 (1999) Tentang Instrumen Derivatif Melekat Pada Kontrak Mata Uang Asing"

Pada bulan Desember 2009, DSAK mengeluarkan PPSAK 5, "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 Dan 16, PSAK 55 (1999) Tentang Instrumen Derivatif Melekat Pada Kontrak Mata Uang Asing". PPSAK 5 menghapus ketentuan yang ada pada ISAK 6 karena akuntansi untuk Instrumen Derivatif Melekat Pada Kontrak Mata Uang Asing telah menjadi ruang lingkup dalam PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006). PPSAK 5 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 dan diterapkan secara prospektif. PPSAK 5, "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 Dan 16, PSAK 55 (1999) Tentang Instrumen Derivatif Melekat Pada Kontrak Mata Uang Asing" diperkirakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan anak perusahaan, disusun berdasarkan GAAP Indonesia, yang berbeda secara signifikan dalam hal-hal tertentu dengan U.S. GAAP. Laporan arus kas konsolidasian beserta rekonsiliasi pada Catatan 53 disusun sesuai dengan *Statement of Financial Accounting Standard* ("SFAS") 95, *"Statement of Cash Flows"* ("SFAS 95", kini *Accounting Standard Codification* ("ASC") 230 *"Statement of Cash Flow"*). Uraian perbedaan-perbedaan dan pengaruhnya terhadap laba bersih dan ekuitas adalah sebagai berikut:

(1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP

a. Imbalan pemutusan kontrak kerja secara sukarela

Berdasarkan GAAP Indonesia, imbalan pemutusan kontrak kerja secara sukarela diakui sebagai kewajiban apabila Perusahaan telah menunjukkan komitmen untuk memberikan imbalan pemutusan kontrak kerja atas penawaran yang diberikan untuk mendorong minat karyawan untuk mengundurkan diri secara sukarela.

Berdasarkan U.S. GAAP, imbalan pemutusan kontrak kerja secara sukarela diakui sebagai kewajiban apabila karyawan telah menerima tawaran pemutusan kontrak kerja dan jumlah imbalan dapat diestimasi dengan andal.

b. Kapitalisasi selisih kurs ke aset dalam konstruksi

Berdasarkan GAAP Indonesia, laba atau rugi selisih kurs yang timbul dari pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan aset yang memenuhi syarat dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan dari suatu aset yang memenuhi syarat tersebut. Kapitalisasi laba rugi selisih kurs dihentikan pada saat pembangunan secara substansial telah selesai dan aset yang dibangun siap digunakan.

Berdasarkan U.S. GAAP, laba rugi selisih kurs langsung dikreditkan dan dibebankan pada laba atau rugi konsolidasian pada saat terjadinya.

c. Instrumen derivatif melekat

Perusahaan dan anak perusahaan melakukan perjanjian dengan pemasok yang mengharuskan pembayaran dengan menggunakan berbagai mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional dari kedua belah pihak.

Berdasarkan GAAP Indonesia, perjanjian yang mengharuskan pembayaran dalam mata uang asing yang berbeda dengan mata uang fungsional salah satu pihak atau pihak yang terkait dengan perjanjian dianggap tidak mengandung instrumen derivatif valuta asing melekat jika mata uang tersebut lazim digunakan dalam transaksi bisnis lokal.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

c. Instrumen derivatif melekat (lanjutan)

Berdasarkan US GAAP, tidak terdapat pengecualian yang sama dengan kondisi di atas untuk derivatif valuta asing sehubungan dengan kontrak yang didenominasi dalam mata uang yang lazim digunakan dalam transaksi bisnis lokal. Derivatif melekat harus diakui kecuali pembayaran kontrak utama atas harga barang atau jasa secara rutin didenominasi dalam mata uang yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka derivatif valuta asing melekat harus diakui secara terpisah.

d. Kapitalisasi biaya bunga ke aset dalam konstruksi

Berdasarkan GAAP Indonesia, aset tertentu yang memenuhi syarat atas kapitalisasi biaya bunga adalah aset yang membutuhkan waktu minimum 12 bulan untuk siap digunakan atau dijual. Apabila pinjaman digunakan secara khusus untuk memperoleh suatu aset tertentu, maka jumlah biaya bunga yang dikapitalisasi adalah seluruh biaya bunga yang timbul selama periode konstruksi tersebut dikurangi dengan pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut.

Berdasarkan U.S. GAAP, tidak ada batasan jangka waktu minimum pembangunan (misalnya minimum 12 bulan masa konstruksi) dimana biaya bunga dapat dikapitalisasi. Jumlah beban bunga yang dikapitalisasi ke aset yang memenuhi syarat adalah beban bunga selama masa konstruksi yang secara teoritis dapat dihindari apabila pengeluaran untuk aset tersebut tidak dilakukan. Beban bunga tersebut tidak harus berasal dari pinjaman yang digunakan secara khusus untuk memperoleh suatu aset tertentu. Jumlah beban bunga yang dikapitalisasi selama suatu periode ditentukan dengan menghitung tingkat bunga dikalikan dengan rata-rata akumulasi pengeluaran untuk aset tersebut selama periode tersebut. Pendapatan bunga yang timbul dari pinjaman yang tidak digunakan diakui langsung sebagai pendapatan pada laporan laba rugi konsolidasian.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

e. Pola Bagi Hasil ("PBH")

Berdasarkan GAAP Indonesia, aset tetap yang dibangun oleh mitra usaha berdasarkan PBH diakui sebagai aset tetap PBH oleh pihak yang akan menerima pengalihan kepemilikan aset tetap tersebut pada akhir masa bagi hasil, dengan akun tandingan pendapatan yang ditangguhkan. Aset tetap tersebut disusutkan selama masa manfaatnya, sedangkan pendapatan ditangguhkan diamortisasi selama masa bagi hasil. Perusahaan mencatat bagiannya atas pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi bagian mitra usaha.

Berdasarkan U.S. GAAP, PBH dicatat sama seperti sewa pembiayaan, dimana aset dan kewajiban PBH disajikan pada neraca konsolidasian. Semua pendapatan yang dihasilkan dari PBH diakui sebagai bagian pendapatan yang berasal dari operasi, sementara sebagian dari pendapatan yang merupakan bagian mitra usaha dicatat sebagai beban bunga dan disajikan sebagai pengurang atas kewajiban PBH.

f. Imbalan kerja

Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK 24 (Revisi 2004) dalam mencatat biaya imbalan pensiun, imbalan kesehatan pasca kerja, dan imbalan pasca kerja lainnya untuk tujuan pelaporan keuangan berdasarkan GAAP Indonesia.

Perbedaan perlakuan akuntansi untuk imbalan pensiun, imbalan kesehatan pasca kerja, dan imbalan pasca kerja lainnya antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP adalah sebagai berikut:

i. Biaya jasa lalu

Berdasarkan GAAP Indonesia, beban jasa lalu langsung diakui apabila karyawan telah berhak (*vested*) atau diamortisasi dengan menggunakan garis lurus selama periode rata-rata sampai dengan karyawan berhak memperoleh imbalan. Amortisasi dicatat sebagai komponen beban imbalan berkala bersih pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Berdasarkan U.S. GAAP, biaya jasa lalu (*vested and non-vested benefits*) ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama estimasi sisa masa kerja karyawan aktif dan jumlah yang diakui dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

f. Imbalan kerja (lanjutan)

ii. Kewajiban transisi untuk imbalan pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja

Berdasarkan GAAP Indonesia, kewajiban transisi diakui pada tanggal 1 Januari 2004, pada saat penerapan PSAK 24 (Revisi 2004).

Berdasarkan U.S. GAAP, kewajiban transisi yang timbul dari penerapan SFAS 87, "*Employers' Accounting for Pensions*" ("SFAS 87") pada tanggal 1 Januari 1992 dan SFAS 106, "*Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions*" ("SFAS 106") pada tanggal 1 Januari 1995 (keduanya kini ASC 715 *"Compensation Retirement Benefits"*), ditangguhkan; kewajiban dari penerapan SFAS 87 dan SFAS 106 kemudian diamortisasi secara sistematis masing-masing selama estimasi sisa masa kerja untuk karyawan aktif dan 20 tahun. Lebih lanjut, perbedaan tanggal penerapan menyebabkan perbedaan yang signifikan pada akumulasi laba rugi aktuaria yang belum diakui.

Pada bulan September 2006, Financial Accounting Standard Board ("FASB") mengeluarkan SFAS 158, *"Employers' Accounting for Defined Benefit Pension and Other Postretirement Plans - an amendment of FASB Statement No. 87, 88, 106* (kini ASC 715 *"Compensation Retirement Benefits"*)*and 132R"* ("SFAS 158"). SFAS 158 mensyaratkan pengakuan status pendanaan di neraca. Rugi aktuarial yang belum diakui, beban jasa lalu, dan kewajiban transisi diakui pada saldo akumulasi laba komprehensif lainnya bersih setelah pajak. Selanjutnya saldo tersebut akan diamortisasi dan dilaporkan sebagai komponen beban imbalan berkala bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian sesuai dengan SFAS 87, SFAS 106, dan SFAS 112.

g. Bagian laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi

Perusahaan dan anak perusahaan mencatat bagian atas laba atau rugi perusahaan asosiasi berdasarkan laporan keuangan perusahaan asosiasi yang telah disusun berdasarkan GAAP Indonesia.

Untuk tujuan pelaporan keuangan yang didasarkan pada U.S. GAAP, Perusahaan dan anak perusahaan mengakui pengaruh perbedaan antara U.S. GAAP dan GAAP Indonesia di tingkat perusahaan asosiasi pada akun investasi dan bagian laba atau rugi dan laba atau rugi komprehensif lainnya atas perusahaan asosiasi tersebut.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

h. Hak atas tanah

Di Indonesia, hak kepemilikan atas tanah ada pada Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Agraria No. 5 tahun 1960. Penggunaan atas tanah dilakukan melalui hak atas tanah, dimana pemegang hak menikmati penggunaan penuh atas tanah untuk masa yang telah ditentukan, dan dapat diperpanjang. Hak atas tanah pada umumnya dapat diperdagangkan dengan bebas dan dapat diagunkan sebagai jaminan atas pinjaman.

Berdasarkan GAAP Indonesia, kepemilikan tanah tidak disusutkan kecuali jika diperkirakan bahwa kecil kemungkinan pemegang hak dapat memperoleh perpanjangan atau pembaharuan atas hak tersebut.

Berdasarkan U.S. GAAP, harga atas tanah diamortisasi selama masa manfaat, yaitu masa kontrak penggunaan hak atas tanah, yang berkisar dari 15 sampai 45 tahun.

i. Pengakuan pendapatan

Berdasarkan GAAP Indonesia, pendapatan koneksi seluler, dan jaringan tetap nirkabel diakui pada saat sambungan terjadi (untuk jasa pasca bayar). Penjualan kartu perdana (*starter pack*) diakui sebagai pendapatan pada saat pengiriman kepada distributor, penyalur, atau pelanggan (untuk jasa pra bayar). Pendapatan dari jasa pemasangan baru sambungan telepon tidak bergerak diakui pada saat pemasangan. Pendapatan dari kartu telepon diakui pada saat Perusahaan menjual kartu-kartu tersebut.

Berdasarkan U.S. GAAP, pendapatan dari pemasangan sambungan baru dan biaya tambahan terkait, namun tidak melebihi pendapatan sambungan baru, ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan sepanjang estimasi periode hubungan dengan pelanggan. Pendapatan dari kartu telepon diakui pada saat digunakan atau jatuh tempo.

j. Amortisasi goodwill

Berdasarkan GAAP Indonesia, periode amortisasi goodwill tidak lebih dari lima tahun, namun periode amortisasi lebih panjang diperbolehkan, sepanjang tidak lebih dari 20 tahun, apabila terdapat dasar yang tepat.

Berdasarkan U.S. GAAP, *goodwill* tidak diamortisasi, melainkan diuji setiap tahun apakah telah mengalami penurunan nilai.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

k. Sewa pembiayaan

Sebelum tahun 2008, berdasarkan GAAP Indonesia aset sewa pembiayaan dikapitalisasi hanya jika semua kriteria berikut terpenuhi: (a) penyewa memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa, (b) jumlah pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa ditambah nilai sisa mencakup harga perolehan aset yang disewakan beserta bunganya, dan (c) masa sewa minimum 2 tahun.

Efektif sejak 1 Januari 2008, berdasarkan PSAK 30R, sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, jika tidak, sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Perusahaan telah menerapkan kriteria baru tersebut secara prospektif untuk sewa baru yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2008.

Berdasarkan U.S. GAAP, aset sewa pembiayaan dikapitalisasi jika salah satu kriteria berikut terpenuhi: (a) terdapat pengalihan kepemilikan secara otomatis pada akhir periode sewa, (b) perjanjian sewa memberikan hak opsi untuk membeli, (c) masa sewa mencakup 75% atau lebih dari masa manfaat ekonomis aset, dan (d) nilai kini seluruh pembayaran sewa pembiayaan mencapai minimum 90% dari nilai wajar aset.

Meskipun GAAP Indonesia kurang mengatur ketentuan rinci atas kriteria sewa dibandingkan US GAAP, berdasarkan penilaian perusahaan, terdapat perlakuan klasifikasi sewa yang sama, sepanjang hal tersebut material. Pengaruh dari penerapan PSAK 30R pada sewa pembiayaan dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008 karena pengaruh pada tahun-tahun sebelumnya tidak signifikan. Oleh karena itu, perbedaan sebelumnya antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan U.S. GAAP dieliminasi sebagaimana disajikan dalam ikhtisar penyesuaian terhadap laba bersih konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

l. Akuisisi Dayamitra

Pada tanggal 17 Mei 2001, Perusahaan memperoleh 90,32% kepemilikan di Dayamitra dan sekaligus memperoleh opsi beli ("*call option*") untuk membeli kepemilikan yang tersisa sebesar 9,68% dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal yang telah disepakati. Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan mengkonsolidasi 100% kepemilikan Dayamitra.

Berdasarkan GAAP Indonesia, Perusahaan mencatat sisa kepemilikan 9,68% di Dayamitra sebagai kepemilikan minoritas dan mulai mengkonsolidasi 9,68% kepemilikan yang tersisa tersebut pada tanggal 14 Desember 2004, pada tanggal eksekusi opsi tersebut.

Perbedaan waktu pengakuan kepemilikan 9,68% mengakibatkan adanya perbedaan pengakuan atas jumlah aset tidak berwujud dan beban amortisasi.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

m. Kewajiban yang timbul dari penghentian penggunaan aset ("Asset retirement obligations")

Sebelum tahun 2008, berdasarkan GAAP Indonesia, kewajiban yang timbul sehubungan dengan penghentian suatu aset tetap yang berasal dari pengadaan, konstruksi, pembangunan, dan/atau dalam kegiatan normal aset tersebut, dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian periode berjalan pada saat terjadinya.

Berdasarkan GAAP Indonesia yang telah direvisi, efektif sejak 1 Januari 2008, kewajiban yang timbul dari penghentian penggunaan aset diakui sebagai kewajiban dan jumlah yang sama dikapitalisasi ke aset terkait dan disusutkan selama masa manfaat aset tersebut. GAAP Indonesia, dalam hal tertentu berbeda dengan ketentuan U.S. GAAP khususnya dalam menentukan nilai kini kewajiban dan beban. Namun, karena dampaknya tidak signifikan terhadap periode-periode sebelumnya, akumulasi efek perbedaan tersebut dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008.

n. Pajak tangguhan

Berdasarkan GAAP Indonesia, Perusahaan dan anak perusahaan tidak melakukan pengakuan pajak tangguhan atas beda temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas apabila perbedaan tersebut tidak akan terpulihkan pada masa depan. Untuk tujuan pelaporan keuangan, aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan sebagai akun-akun tidak lancar.

Berdasarkan U.S. GAAP, Perusahaan mengakui pajak tangguhan atas seluruh beda temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Untuk tujuan pelaporan keuangan, aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan sebagai akun-akun lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi yang diharapkan dari aset dan kewajiban yang terkait.

o. Penurunan nilai aset

Berdasarkan GAAP Indonesia, kerugian penurunan nilai aset diakui apabila nilai tercatat suatu aset atau unit penghasil kas dimana aset tersebut berada melebihi nilai yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*). Nilai aset tetap yang dapat dipulihkan adalah nilai yang lebih besar antara harga jual bersih dengan nilai pakainya (*value in use*). Dalam menentukan nilai pakai, taksiran arus kas di masa depan (*future cash flow*) didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tarif diskonto sebelum pajak yang mencerminkan taksiran sekarang mengenai nilai waktu uang dan risiko spesifik yang terkait dengan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai aset dapat dipulihkan hanya jika terjadi perubahan dalam taksiran yang digunakan dalam menentukan nilai aset yang dapat dipulihkan.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset (lanjutan)

Pemulihan penurunan nilai aset tidak boleh dilakukan melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui, bersih setelah dikurangi penyusutan, seandainya pada tahun sebelumnya tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai aset.

Berdasarkan U.S. GAAP, kerugian penurunan nilai aset diakui apabila jumlah arus kas di masa depan yang diharapkan dari aset yang bersangkutan (tanpa didiskontokan dan biaya bunga) lebih kecil dari nilai tercatat aset yang bersangkutan. Aset yang mengalami penurunan nilai diturunkan nilainya menjadi nilai wajar yang didasarkan pada harga pasar resmi pada pasar yang aktif atau nilai diskonto taksiran arus kas di masa depan. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset sebelumnya tidak diperkenankan.

Pada tanggal 31 Desember 2009, tidak terdapat rugi penurunan nilai aset yang diakui baik berdasarkan GAAP Indonesia dan U.S. GAAP.

p. Laba (rugi) pelepasan aset tetap

Berdasarkan GAAP Indonesia, Perusahaan dan anak perusahaan mengklasifikasikan laba (rugi) pelepasan aset tetap sebagai bagian dari pendapatan (beban) lain-lain dan tidak diperhitungkan dalam menentukan laba usaha.

Berdasarkan U.S. GAAP, laba (rugi) pelepasan aset tetap diklasifikasikan sebagai bagian dari beban usaha dan oleh karena itu diperhitungkan dalam menentukan laba usaha. Untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007, laba usaha akan menjadi lebih tinggi (rendah) masing-masing sebesar (Rp13.588) juta, (Rp15.659) juta, dan Rp20.641 juta, dan pendapatan (beban) lain-lain akan menjadi lebih (tinggi) rendah sebesar jumlah yang sama terkait dengan diperhitungkannya laba (rugi) pelepasan aset tetap dalam menentukan laba usaha.

q. Efek tersedia untuk dijual

Berdasarkan GAAP Indonesia, efek tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya dan perubahan nilai wajar diakui sebagai “Laba (rugi) belum direalisasi atas pemilikan efek yang tersedia untuk dijual” pada ekuitas.

Berdasarkan U.S. GAAP, efek tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya dan laba atau rugi yang belum direalisasikan dilaporkan sebagai komponen dalam akumulasi laba komprehensif lainnya pada bagian ekuitas.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

r. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan konsolidasian

Berdasarkan GAAP Indonesia, investasi pada perusahaan asing dengan menggunakan metode ekuitas dilaporkan dengan menjabarkan aset dan kewajiban perusahaan asing tersebut dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal neraca. Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan nilai tukar pada tanggal transaksi atau rata-rata nilai tukar pada tahun berjalan untuk tujuan kepraktisan. Hasil dari penjabaran tersebut dilaporkan sebagai bagian dari "Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan konsolidasian" pada bagian ekuitas.

Berdasarkan U.S. GAAP, selisih penjabaran tersebut dilaporkan dalam akumulasi laba komprehensif lainnya pada bagian ekuitas.

s. Amandemen dan pernyataan kembali KSO VII

Perusahaan telah mencatat amandemen dan pernyataan kembali atas perjanjian KSO VII sebagai sebuah penggabungan usaha dengan menggunakan metode pembelian.

Berdasarkan GAAP Indonesia, selisih lebih harga perolehan atas kepemilikan Perusahaan atas nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan kewajiban yang diakui dicatat sebagai *goodwill.* Setelah melakukan alokasi atas harga perolehan terhadap semua aset dan kewajiban yang teridentifikasi, nilai sisa yang didapat dialokasikan sebagai aset tidak berwujud yang merupakan hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO VII, dan diamortisasi selama sisa masa perjanjian KSO VII yaitu 4,3 tahun. Oleh karena itu, tidak ada pengakuan *goodwill* berdasarkan GAAP Indonesia.

Untuk tujuan pelaporan keuangan yang didasarkan pada U.S. GAAP, hak untuk mengoperasikan bisnis di wilayah KSO VII merupakan hak yang diperoleh kembali dan diakui oleh Perusahaan sebagai sebuah aset tidak berwujud terpisah berdasarkan *Emerging Issues Task Force* ("EITF") 04-1 *"Accounting for Preexisting Relationships between the Parties to a Business Combination"* (kini ASC 805 *"Business Combination"*). Aset tidak berwujud dinilai secara langsung untuk menentukan nilai wajarnya sesuai dengan persyaratan dalam EITF *Topic* No. D-108 *"Use of the Residual Method to Value Acquired Assets Other Than Goodwill"*. Selisih nilai pembelian atas nilai bersih yang dialokasikan atas aset yang diakuisisi dan kewajiban sebesar Rp61.386 juta diakui sebagai *goodwill.*

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(1) Penjelasan perbedaan antara GAAP Indonesia dan U.S. GAAP (lanjutan)

t. Pengukuran nilai wajar

Berdasarkan GAAP Indonesia, tidak ada standar akuntansi yang secara khusus menentukan pengukuran nilai wajar. Namun dalam hal tertentu terdapat beberapa standar akuntansi yang mensyaratkan atau mengijinkan pengukuran dengan menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran. Bukti nilai wajar yang paling andal adalah harga yang digunakan pada suatu kontrak penjualan yang mengikat dalam suatu transaksi normal. Jika tidak terdapat kontrak penjualan yang mengikat, nilai wajar didasarkan pada informasi yang paling andal yang merefleksikan suatu jumlah yang dapat diperoleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan. Basis pengukuran yang digunakan untuk menentukan nilai wajar harus diungkapkan.

Berdasarkan U.S. GAAP, informasi terkait dengan hirarki nilai wajar harus diungkapkan, dengan melakukan pemisahan terhadap pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi harga pasar resmi untuk aset atau kewajiban yang identik (Level 1), informasi signifikan lainnya yang dapat diobservasi (Level 2) dan informasi signifikan lainnya yang tidak dapat diobservasi (Level 3).

u. Penyajian Kepemilikan Nonpengendali

Berdasarkan GAAP Indonesia, kepemilikan nonpengendali disajikan dalam neraca konsolidasian diantara bagian kewajiban dan ekuitas.

Berdasarkan U.S. GAAP, kepemilikan non-pengendali harus disajikan sesuai dengan FAS 160, "Kepemilikan Nonpengendali dalam Laporan Keuangan Konsolidasi - Amandemen atas ARB No. 51" (kini ASC 810 *"Consolidation"*) yang efektif untuk laporan keuangan yang dimulai atau setelah 15 Desember 2008. FAS 160 harus diterapkan secara prospektif. Berdasarkan FAS 160, kepemilikan non-pengendali disajikan sebagai bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan atau neraca konsolidasian, secara terpisah dari ekuitas induk.

Arus kas untuk akuisisi kepemilikan non-pengendali di anak perusahaan dilaporkan sebagai arus kas pendanaan sesuai dengan dengan FAS 160, "Kepemilikan Nonpengendali dalam Laporan Keuangan Konsolidasi - Amandemen atas ARB No. 51" (kini ASC 810 *"Consolidation"*).

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(2) a. Berikut adalah ikhtisar penyesuaian yang signifikan terhadap laba bersih konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 yang diperlukan seandainya U.S. GAAP diterapkan, sebagai pengganti GAAP Indonesia, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian:

	Catatan	2009	2008	2007
Laba bersih menurut laporan laba rugi konsolidasian yang disusun berdasarkan GAAP Indonesia		11.332.140	10.619.470	12.857.018
Penyesuaian ke U.S. GAAP - kenaikan (penurunan) disebabkan oleh:				
Imbalan atas pemutusan kontrak kerja secara sukarela	(a)	(679.940)	749.867	(1.461.149)
Pembalikan penyusutan atas kapitalisasi selisih kurs	(b)	50.690	72.598	76.473
Laba selisih kurs - setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar Rp(2.265) juta, Rp12.540 juta, dan Rp14.634 juta, atas kontrak-kontrak yang mengandung instrumen derivatif valuta asing melekat	(c)	2.005.729	(627.432)	57.156
Kapitalisasi beban bunga atas aset dalam pembangunan - setelah dikurangi penyusutan masing-masing sebesar Rp45.661 juta, Rp42.072 juta, dan Rp34.686 juta di tahun 2009, 2008, dan 2007	(d)	(2.726)	12.504	61.865

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(2) (lanjutan)

a. (lanjutan)

	Catatan	2009	2008	2007
Pendapatan PBH	(e)	82.542	53.900	274.917
Pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	(f)	(123.854)	(95.819)	(115.759)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(f)	(41.043)	(94.359)	(97.572)
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi	(g)	(327)	(366)	(324)
Amortisasi hak atas tanah	(h)	(34.619)	(31.266)	(20.481)
Pengakuan pendapatan	(i)	92.958	64.536	43.941
Amortisasi *goodwill*	(j)	4.325	17.048	-
Sewa pembiayaan	(k)	13.222	11.628	(31.988)
Penyesuaian konsolidasian Dayamitra	(l)	10.244	11.387	11.388
Asset retirement obligations	(m)	-	25.735	(11.936)
Amandemen dan pernyataan kembali KSO VII	(s)	16.269	16.269	15.857
Pajak tangguhan:				
Pajak tangguhan atas penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas dan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(n)	(9.145)	(5.503)	(2.503)
Pengaruh Pajak tangguhan terhadap penyesuaian ke U.S. GAAP		(397.716)	(35.452)	329.387
		986.609	145.275	(870.728)
Kepentingan non-pengendali		(226.356)	109.479	(20.733)
Penyesuaian bersih		760.253	254.754	(891.461)
Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP diatribusikan kepada Perusahaan		12.092.393	10.874.224	11.965.557
Laba bersih per saham berdasarkan U.S.GAAP - dalam Rupiah penuh		614,78	550,63	599,43
Laba bersih per ADS berdasarkan U.S. GAAP - dalam Rupiah penuh (40 saham Seri B per ADS)		24.591,25	22.025,34	23.977,20

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(2) (lanjutan)

b. Berikut adalah ikhtisar penyesuaian yang signifikan terhadap ekuitas konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang diperlukan seandainya U.S. GAAP diterapkan, sebagai pengganti GAAP Indonesia, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian:

	Catatan	2009	2008
Ekuitas menurut neraca konsolidasian yang disusun berdasarkan GAAP Indonesia		38.989.747	34.314.071
Penyesuaian ke U.S. GAAP - kenaikan (penurunan) disebabkan oleh:			
Imbalan atas pemutusan kontrak kerja secara sukarela	(a)	69.927	749.867
Pembalikan penyusutan atas kapitalisasi selisih kurs	(b)	(187.134)	(237.824)
Laba selisih kurs - setelah dikurangi penyusutan, atas kontrak-kontrak yang mengandung instrumen derivatif valuta asing melekat	(c)	1.435.453	(570.276)
Kapitalisasi beban bunga atas aset dalam pembangunan - setelah dikurangi penyusutan	(d)	292.213	294.939
Pendapatan PBH	(e)	246.750	164.208
Pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya	(f)	701.026	(250.601)
Imbalan kesehatan pasca kerja	(f)	658.066	735.028
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi	(g)	(19.861)	(19.534)
Amortisasi hak atas tanah	(h)	(187.312)	(152.693)
Pengakuan pendapatan	(i)	(512.455)	(605.413)
Amortisasi *goodwill*	(j)	115.310	110.985
Sewa pembiayaan	(k)	(64.554)	(77.776)
Penyesuaian konsolidasian Dayamitra	(l)	(12.498)	(22.742)
Assets retirement obligations	(m)	-	-
Amandemen dan pernyataan kembali KSO VII	(s)	52.874	36.605

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(2) (lanjutan)

b. (lanjutan)

	Catatan	2009	2008
Pajak tangguhan:			
Pajak tangguhan atas penyertaan yang dicatat dengan metode ekuitas dan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(n)	32.169	27.567
Pengaruh Pajak tangguhan terhadap penyesuaian ke U.S. GAAP		(514.725)	151.942
Jumlah penyesuaian U.S. GAAP		2.105.249	334.282
Kepentingan non-pengendali		(133.697)	78.934
Penyesuaian bersih		1.971.552	413.216
Ekuitas pemegang saham berdasarkan U.S. GAAP		**40.961.299**	**34.727.287**

c. Perubahan ekuitas dan kepentingan non-pengendali berdasarkan U.S. GAAP untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Ekuitas pemegang saham, awal tahun	34.727.287	29.817.813	26.308.572
Perubahan selama tahun berjalan:			
Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP	12.092.393	10.874.224	11.965.557
Dividen	(6.364.898)	(8.034.515)	(6.047.448)
Akumulasi laba komprehensif lainnya, bersih setelah pajak	832.469	4.067.227	(1.274.468)
Kompensasi terminasi dini hak eksklusifitas	118.000	90.000	90.000
Modal saham yang diperoleh kembali	-	(2.087.462)	(1.224.400)
Dampak akuisisi 49% kepemilikan Infomedia	(443.952)	-	-
Ekuitas pemegang saham, akhir tahun	**40.961.299**	**34.727.287**	**29.817.813**

	2009	2008	2007
Kepentingan non-pengendali, awal tahun	9.604.847	9.322.907	8.167.363
Perubahan selama tahun berjalan:			
Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali	4.870.428	3.944.164	4.831.545
Laba komprehensif lainnya	(18.234)	12.401	17.136
Jumlah laba komprehensif	4.852.194	3.956.565	4.848.681
Dampak akuisisi	(156.202)	57.776	-
Distribusi	(3.233.795)	(3.732.401)	(3.693.137)
Kepentingan non-pengendali. akhir tahun	**11.067.044**	**9.604.847**	**9.322.907**

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(2) (lanjutan)

d. Ikhtisar neraca konsolidasian berdasarkan U.S. GAAP adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Neraca konsolidasian		
Aset lancar	18.435.897	15.597.511
Aset tidak lancar	83.100.462	76.636.284
Jumlah aset	**101.536.359**	**92.233.795**
Kewajiban jangka pendek	26.964.302	27.032.520
Kewajiban jangka panjang	22.543.714	20.869.141
Jumlah kewajiban	49.508.016	47.901.661
Ekuitas		
Kepentingan non-pengendali	11.067.044	9.604.847
Ekuitas pemegang saham	40.961.299	34.727.287
Jumlah kewajiban dan ekuitas	**101.536.359**	**92.233.795**

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC

a. PPh

(i) Rekonsiliasi antara perkiraan penyisihan PPh berdasarkan U.S. GAAP dengan penyisihan PPh aktual berdasarkan U.S. GAAP adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Laba sebelum pajak konsolidasian berdasarkan U.S. GAAP	23.742.758	20.499.040	24.398.041
PPh berdasarkan U.S. GAAP menurut tarif pajak yang berlaku	6.416.251	5.917.643	7.319.412
Pengaruh beban yang tidak dapat dikurangkan (pendapatan yang bukan merupakan objek pajak) berdasarkan tarif pajak maksimum yang berlaku :			
Beban imbalan kesehatan pasca kerja berkala bersih	61.637	240.999	233.151
Amortisasi diskonto wesel bayar dan biaya pinjaman lainnya	76.903	106.924	6.645
Denda pajak	1.301	(9.738)	28.225
Imbalan kerja karyawan	54.299	50.733	30.343
Perbedaan tetap atas Unit KSO	43.473	39.450	35.286
Pendapatan yang telah dikenakan PPh final	(122.776)	(167.603)	(139.132)
Penyesuaian atas kewajiban pajak tangguhan berkaitan dengan aset tetap	-	-	(132.407)
Efek penurunan tarif di masa datang terhadap kewajiban pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan - bersih	-	(637.543)	-
Lainnya	248.848	139.786	219.414
Jumlah	363.685	(236.992)	281.525
Beban penyisihan PPh berdasarkan U.S. GAAP	**6.779.936**	**5.680.651**	**7.600.937**

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009, 2008, dan 2007, seluruh pendapatan usaha Perusahaan dan anak perusahaan diperoleh di wilayah Indonesia dan oleh karena itu, Perusahaan dan anak perusahaan tidak dikenakan PPh di negara-negara lain.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

a. PPh (lanjutan)

(ii) Pajak tangguhan

	2009	2008
Aset pajak tangguhan		
Lancar		
Pendapatan yang ditangguhkan	29.844	31.014
Penyisihan piutang ragu-ragu	308.261	297.319
Penyisihan persediaan usang	18.061	16.408
Rugi fiskal yang dapat dikompensasikan	17.317	22.991
Beban yang masih harus dibayar	326.734	131.392
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	306.258	301.370
Lain-lain	36.352	32.474
	1.042.827	832.968
Tidak Lancar		
Pendapatan yang ditangguhkan	98.269	120.473
Penyertaan jangka panjang	27.575	22.972
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	32.275	402.649
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar	77.829	404.267
Lain-lain	43.817	41.497
	279.765	991.858
Total aset pajak tangguhan (sebelum *offset*)	**1.322.592**	**1.824.826**
Kewajiban pajak tangguhan		
Jangka pendek		
Beban dibayar di muka	(29.661)	(23.992)
Jangka panjang		
Aset tetap	(4.695.652)	(3.891.917)
Aset tidak berwujud	(298.776)	(604.979)
	(4.994.428)	(4.496.896)
Jumlah kewajiban pajak tangguhan (sebelum *offset*)	**(5.024.089)**	**(4.520.888)**

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

a. PPh (lanjutan)

(ii) Pajak tangguhan (lanjutan)

	2009	2008
Kewajiban pajak tangguhan bersih - disajikan setelah *offset* dalam neraca konsolidasian adalah sebagai berikut:		
Aset pajak tangguhan - lancar	1.023.454	813.962
Kewajiban pajak tangguhan - lancar	(10.288)	(4.985)
Aset pajak tangguhan - tidak lancar	53.346	32.991
Kewajiban pajak tangguhan - tidak lancar	(4.768.009)	(3.538.030)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008, Perusahaan dan anak perusahaan mengadopsi SFAS 158 (kini ASC 715 *"Compensation Retirement Benefits"*) dan mengakui secara langsung aset pajak tangguhan yang berasal dari kewajiban masa transisi, biaya jasa lalu dan rugi aktuaria masing-masing sebesar Rp169.346 juta dan Rp444.336 juta, langsung pada akumulasi laba komprehensif lainnya.

Aset pajak tangguhan dari nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan berasal dari pengurangan pajak yang dapat diklaim atas pembayaran tetap bulanan kepada MGTI dan BSI untuk perhitungan PPh badan.

(iii) Akuntansi untuk ketidakpastian PPh

Perusahan dan anak perusahaan menerapkan FASB Interpretation 48 *"Uncertainty in Income Tax: an Interpretation of SFAS 109"* ("FIN 48", kini ASC 740 *"Income Taxes"*) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2007. FIN 48 mengatur penentuan apakah suatu manfaat pajak yang diklaim atau diharapkan akan diklaim dalam pelaporan pajak harus diakui dalam Laporan Keuangan. Berdasarkan FIN 48, manfaat pajak dari suatu ketidakpastian posisi pajak diakui apabila besar kemungkinan terjadi, berdasarkan pertimbangan seluruh aspek teknis dari posisi pajak tersebut, bahwa posisi tersebut akan dapat dipertahankan dalam audit pajak oleh DJP. Jumlah manfaat pajak yang diakui adalah jumlah terbesar dari manfaat pajak tersebut yang mempunyai kemungkinan dapat direalisasikan lebih besar daripada lima puluh persen dalam putusan final perpajakan.

Berdasarkan analisis atas seluruh posisi pajak Perusahaan dan anak perusahaan yang terkait PPh yang diatur oleh SFAS 109 (kini ASC 740 *"Income Taxes"*), Perusahaan dan anak perusahaan menyimpulkan bahwa tidak terdapat dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun fiskal yang belum diaudit, serta pengakuan atas manfaat pajak yang tidak diakui tidak akan berdampak material terhadap tingkat pajak efektif untuk tahun-tahun tersebut. Perusahaan dan anak perusahaan berpendapat bahwa posisi saat ini untuk tidak mengakui manfaat pajak tidak akan berubah secara signifikan dalam 12 bulan ke depan.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

a. PPh (lanjutan)

(iii) Akuntansi untuk ketidakpastian PPh (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008, tidak ada beban bunga dan denda atas PPh badan. Perusahaan dan anak perusahaan mencatat bunga dan denda untuk PPh kurang bayar, jika ada, masing-masing sebagai beban bunga dan beban lain-lain dalam laporan keuangan konsolidasian.

Saat ini, Perusahaan sedang diperiksa pajak untuk tahun fiskal 2008. Untuk tahun-tahun fiskal 2003 dan 2009 tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan untuk tahun-tahun fiskal lainnya, Perusahaan telah diperiksa pajak.

Saat ini, Telkomsel sedang diperiksa pajak untuk tahun-tahun fiskal 2006 dan 2008. Untuk tahun-tahun fiskal 2003 dan 2009 tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Sedangkan untuk tahun-tahun fiskal lainnya, Telkomsel telah diperiksa pajak.

b. Nilai wajar instrumen keuangan

Metode dan asumsi berikut digunakan dalam menentukan taksiran nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan:

(i) Kas dan setara kas dan penyertaan sementara
Nilai tercatat akun ini mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu instrumen yang singkat.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

b. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

(ii) Hutang bank jangka pendek dan hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun

Nilai tercatat akun ini mendekati nilai wajarnya karena jangka waktu instrumen kewajiban yang singkat.

(iii) Instrumen derivatif melekat

Piutang dan hutang derivatif terdiri atas derivatif melekat yang diakui berdasarkan U.S. GAAP. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model internal. Model ini menekankan pada penggunaan input nilai pasar yang dapat diobservasi yang meliputi harga *forward* dan *spot* mata uang.

(iv) Hutang jangka panjang

Nilai wajar hutang jangka panjang diestimasi dengan mendiskontokan arus kas mendatang masing-masing instrumen menggunakan tingkat bunga terkini yang ditawarkan oleh bank-bank kreditur Perusahaan dan anak perusahaan untuk instrumen hutang serupa dengan jangka waktu yang setara.

(v) Estimasi nilai wajar aset dan kewajiban keuangan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

	Nilai tercatat	Nilai wajar
2009		
Kas dan setara kas	7.805.460	7.805.460
Penyertaan sementara	359.507	359.507
Piutang derivatif	1.036.326	1.036.326
Hutang derivatif	873	873
Hutang bank jangka pendek	43.850	43.850
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Pinjaman penerusan	423.983	423.983
Wesel bayar jangka menengah	5.518	5.518
Hutang bank	5.826.347	5.826.347
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	1.221.287	1.221.287
Hutang jangka panjang:		
Pinjaman penerusan	3.094.110	3.005.075
Wesel bayar jangka menengah	68.777	68.605
Hutang bank	11.086.688	10.146.268
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	108.079	102.060

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

b. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

(v) Estimasi nilai wajar aset dan kewajiban keuangan Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Nilai tercatat	Nilai wajar
2008		
Kas dan setara kas	6.889.945	6.889.945
Penyertaan sementara	267.044	267.044
Piutang derivatif	47.769	47.769
Hutang derivatif	482.064	482.064
Hutang bank jangka pendek	46.000	46.000
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Pinjaman penerusan	490.692	490.692
Hutang bank	5.014.766	5.014.766
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	1.297.857	1.297.857
Hutang jangka panjang:		
Pinjaman penerusan	3.949.431	3.518.405
Hutang bank	7.495.144	6.950.343
Nilai perolehan penggabungan usaha yang ditangguhkan	1.458.545	1.373.444

Metode dan asumsi yang digunakan dalam menentukan taksiran nilai wajar pada dasarnya mengandung unsur pertimbangan dan memiliki berbagai keterbatasan, termasuk hal-hal sebagai berikut:

a. Nilai wajar yang disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi nilai tukar mata uang di masa depan.

b. Taksiran nilai wajar belum tentu mengindikasikan jumlah yang akan dicatat oleh Perusahaan dan anak perusahaan pada saat pelepasan/penghentian aset dan kewajiban keuangan.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

c. Laba komprehensif

	2009	2008	2007
Laba bersih berdasarkan U.S. GAAP			
Diatribusikan kepada Perusahaan	12.092.393	10.874.224	11.965.557
Diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	4.870.428	3.944.164	4.831.545
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas pemilikan efek yang tersedia untuk dijual	37.202	(30.303)	2.372
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi, bersih setelah pajak masing-masing sebesar Rp(13.747) juta, Rp2.491 juta, dan Rp704 juta untuk tahun 2009, 2008, dan 2007	6.423	5.811	1.644
Rugi aktuaria yang belum diakui, beban jasa lalu, kewajiban transisi, bersih setelah pajak	770.610	4.104.117	(1.261.347)
Laba komprehensif	**17.777.056**	**18.898.013**	**15.539.771**
Laba komprehensif diatribusikan kepada:			
Kepentingan non-pengendali	4.852.194	3.956.565	4.848.681
Perusahaan	12.924.862	14.941.448	10.691.090
Jumlah	**17.777.056**	**18.898.013**	**15.539.771**

Komponen akumulasi laba komprehensif lainnya yang diatribusikan kepada pemegang saham adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas pemilikan efek yang tersedia untuk dijual	18.136	(19.066)	11.237
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan perusahaan asosiasi	173.246	166.823	161.011
Penyesuaian atas adopsi SFAS 158 (kini ASC 715 *"Compensation Retirement Benefits"*):			
Kewajiban transisi	(123.748)	(152.587)	(196.722)
Biaya jasa lalu	(1.145.607)	(1.363.318)	(1.475.427)
Rugi aktuaria	715.467	173.173	(3.762.301)
	(362.506)	**(1.194.975)**	**(5.262.202)**

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja

(i) Perusahaan

a. Pengungkapan berdasarkan SFAS 132 (Revisi 2003), *"Employers' Disclosure about Pension and Other Postretirement Benefits"* ("SFAS 132 (Revisi 2003)") dan SFAS 106 (kini ASC 715 *"Compensation Retirement Benefits")* adalah sebagai berikut:

	Pensiun			Kesehatan		
	2009	**2008**	**2007**	**2009**	**2008**	**2007**
Komponen beban imbalan berkala bersih						
Beban jasa	284.090	282.134	441.174	72.007	143.981	115.392
Beban bunga	1.154.174	1.076.969	976.920	686.767	903.498	735.427
Taksiran pengembalian aset program	(1.030.829)	(930.835)	(788.583)	(410.378)	(343.366)	(237.937)
Amortisasi beban (laba) jasa lalu	283.564	283.564	253.601	(99)	(367)	(367)
Rugi aktuaria yang diakui	(1.243)	-	-	-	268.924	183.926
Amortisasi kewajiban transisi	5.721	28.634	28.634	24.325	24.325	24.325
Beban imbalan berkala bersih	695.477	740.466	911.746	372.622	996.995	820.766
Jumlah yang dibebankan ke anak perusahaan berdasarkan perjanjian	(1.425)	(1.460)	-	(523)	(839)	-
Jumlah beban imbalan berkala bersih setelah dikurangi jumlah yang dibebankan kepada anak perusahaan	**694.052**	**739.006**	**911.746**	**372.099**	**996.156**	**820.766**

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

b. Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban imbalan, perubahan aset program, dan bagian lancar dan tidak lancar dari aset dan kewajiban yang diakui dalam neraca konsolidasian Perusahaan berdasarkan U.S. GAAP pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008:

	Pensiun		Kesehatan	
	2009	**2008**	**2009**	**2008**
Perubahan kewajiban imbalan				
Kewajiban imbalan pada awal tahun	9.516.974	10.727.812	5.855.223	8.925.612
Beban jasa	284.090	282.134	72.007	143.981
Beban bunga	1.154.174	1.076.969	686.767	903.498
Kontribusi peserta program	44.476	44.593	-	-
Rugi (laba) aktuaria	1.207.376	(2.168.268)	816.313	(479.581)
Pembayaran imbalan	(453.651)	(446.266)	(264.336)	(221.995)
Dampak perubahan imbalan	-	-	-	(3.416.292)
Kewajiban imbalan pada akhir tahun	11.753.439	9.516.974	7.165.974	5.855.223
Perubahan aset program				
Nilai wajar aset program pada awal tahun	8.713.418	9.034.392	4.018.692	3.376.172
Pengembalian aktual aset program	3.058.457	(842.819)	1.167.384	(236.324)
Kontribusi pemberi kerja	889.061	889.061	1.100.523	1.100.839
Kontribusi peserta program	44.476	44.593	-	-
Pembayaran imbalan	(405.231)	(411.809)	(264.336)	(221.995)
Nilai wajar aset program pada akhir tahun	12.300.181	8.713.418	6.022.263	4.018.692
Status pendanaan pada akhir tahun	**546.742**	**(803.556)**	**(1.143.711)**	**(1.836.531)**

Jumlah yang diakui dalam neraca konsolidasian:

	Pensiun		Kesehatan	
	2009	**2008**	**2009**	**2008**
Aset - tidak lancar	1.003.634	-	-	-
Kewajiban - jangka pendek	(37.038)	(33.861)	-	-
Kewajiban - jangka panjang	(419.854)	(769.695)	(1.143.711)	(1.836.531)

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

c. Tanggal pengukuran yang digunakan dalam menentukan imbalan pensiun dan imbalan kesehatan adalah 31 Desember untuk setiap tahunnya.

d. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan kewajiban imbalan untuk masing-masing program pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	Pensiun		Kesehatan	
	2009	2008	2009	2008
Tingkat diskonto	10,75%	12%	10,75%	12%
Tingkat kenaikan kompensasi	8%	8%	-	-

e. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan beban imbalan berkala bersih masing-masing program untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	Pensiun			Kesehatan		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
Tingkat diskonto	10,75%	12%	10,25%	10,75%	12%	10,25%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program	10,50%	11,5%	10%	9,25%	9,25%	9%
Tingkat kenaikan kompensasi	8%	8%	8%	-	-	-

f. Taksiran tingkat pertumbuhan beban kesehatan pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Taksiran tingkat pertumbuhan beban kesehatan untuk tahun depan	10%	12%	14%
Tingkat pertumbuhan akhir beban kesehatan	8%	8%	8%
Tahun tercapainya tingkat pertumbuhan akhir	2012	2011	2011

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

g. Penilaian aktuaria untuk program pensiun imbalan pasti dan program imbalan kesehatan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 dilakukan masing-masing pada tanggal 22 Januari 2010, 31 Maret 2009, dan 31 Maret 2008 oleh aktuaris independen.

Tingkat diskonto ditentukan berdasarkan kisaran suku bunga Obligasi Pemerintah. Asumsi tingkat pertumbuhan kompensasi ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi jangka panjang dengan kisaran antara 6% dan 7%. Tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program Dapen dan Yakes masing-masing sebesar 10,5% dan 9,25%, yang mana untuk tahun 2010 mencerminkan tingkat rata-rata pengembalian yang diharapkan atas dana yang telah atau akan diinvestasikan, untuk menghasilkan manfaat yang termasuk di dalam proyeksi kewajiban imbalan. Dalam penentuan asumsi tingkat pengembalian jangka panjang, Dapen dan Yakes mempertimbangkan komposisi aset dalam investasi program, tingkat pengembalian historis atas aset program, informasi pasar terkini atas tingkat pengembalian jangka panjang dan alokasi aset kini dalam kategori aset. Alokasi target ditentukan berdasarkan strategi portofolio Dapen dan Yakes. Pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program ditentukan berdasarkan tingkat pengembalian rata-rata yang diharapkan dapat diperoleh melalui aset program yang mempertimbangkan portofolio aset dan tingkat pengembalian atas aset secara individual. Dapen dan Yakes menentukan tingkat pengembalian atas saham bursa sebesar 13% dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian historis selama 10 tahun terakhir. Asumsi tingkat pengembalian atas obligasi Pemerintah adalah sebesar 9,5% yang ditentukan berdasarkan tingkat pengembalian rata-rata saat ini atas obligasi Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu rata-rata 5 (lima) tahun. Tingkat pengembalian atas obligasi korporasi adalah sebesar 11,5% yang ditentukan dengan menggunakan kurva obligasi Pemerintah dengan tambahan sebesar 2% untuk mengakomodasi tingkat risiko yang lebih tinggi. Tingkat pengembalian jangka panjang reksadana ditentukan berdasarkan tingkat pengembalian dari aset terkait masing-masing sebesar 12,75% dan 10% untuk Dapen dan Yakes.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

g. (lanjutan)

Asumsi tingkat pertumbuhan beban kesehatan mempunyai dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan untuk program imbalan kesehatan. Perubahan sebesar satu persen pada asumsi tingkat pertumbuhan beban kesehatan pasca kerja akan memberikan dampak sebagai berikut:

	1-persen kenaikan	1-persen penurunan
Pengaruh terhadap keseluruhan komponen beban jasa dan bunga	139.740	(114.015)
Pengaruh terhadap kewajiban imbalan kesehatan pasca kerja	1.128.733	(926.535)

h. Strategi portofolio Dapen menekankan pada tingkat pengembalian optimum yang ditetapkan secara tahunan dengan mempertimbangkan risiko keuangan, operasional dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Aset dialokasikan berdasarkan risiko jangka panjang dan taksiran pengembalian. Dapen menerapkan diversifikasi dan pengendalian risiko untuk meminimalkan konsentrasi risiko. Tabel dibawah ini menunjukkan alokasi aset yang ditetapkan oleh Dapen:

Jenis Investasi	Proporsi	
	Dari	Sampai
Kas dan setara kas	1%	20%
Efek berpendapatan tetap	50%	80%
Properti	0%	15%
Saham bursa	10%	40%
Saham non-publik	0%	5%

Target alokasi diatas akan bervariasi sepanjang waktu dan dapat berubah jika ada perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian. Strategi investasi Dapen secara keseluruhan adalah untuk memperoleh suatu gabungan aset yang memungkinkan Dapen untuk memenuhi proyeksi pembayaran imbalan pensiun dengan mempertimbangkan risiko dan pengembalian. Tidak terdapat konsentrasi risiko yang signifikan dalam hal sektor, industri, geografi, atau nama-nama perusahaan.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

i. Nilai wajar aset program Dapen pada tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan kategori aset adalah sebagai berikut:

Kelompok	Kategori aset	Jumlah	Harga pasar aset sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Kas dan setara kas	Deposito rupiah	479.000	479.000	-	-
	Deposits on Call	170.625	170.625	-	-
	Sub-jumlah	649.625	649.625	-	-
Efek berpendapatan tetap	Surat berharga Pemerintah	5.164.538	-	5.164.538	-
	Obligasi	2.562.811	-	2.369.707	193.104
	Reksadana pendapatan tetap	4.215	4.215	-	-
	Reksadana campuran	4.467	4.467	-	-
	Efek beragun aset dari KIK EBA	5.000	-	5.000	-
	Sub-jumlah	7.741.031	8.682	7.539.245	193.104
Properti	Tanah dan Bangunan	64.995	-	-	64.995
	Sub-jumlah	64.995	-	-	64.995
Saham bursa	Saham bursa	2.739.200	2.739.200	-	-
	Reksadana saham	806.108	806.108	-	-
	Sub-jumlah	3.545.308	3.545.308	-	-
Saham non-publik	Penyertaan saham	110.967	-	-	110.967
	Sub-jumlah	110.967	-	-	110.967
Lainnya	Lainnya	188.255	188.255	-	-
	Sub-jumlah	188.255	188.255	-	-
Jumlah		**12.300.181**	**4.391.870**	**7.539.245**	**369.066**

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

i. (lanjutan)

Kas dan setara kas termasuk deposito berjangka dan *deposit on call* dalam mata uang Rupiah. Aset tersebut dinilai dengan menggunakan nilai nominalnya yang mencerminkan nilai wajarnya, sehingga diklasifikasikan dalam level 1 pada hirarki nilai wajar.

Efek berpendapatan tetap termasuk surat berharga pemerintah, obligasi yang memiliki peringkat sekurang-kurangnya "A" dan reksadana tertentu. Nilai wajar dari efek berpendapatan tetap didasari oleh harga yang bisa diobservasi untuk aset sejenis atau yang bisa diperbandingkan. Untuk itu, surat-surat berharga tersebut diklasifikasikan dalam level 1 dan 2. Perusahaan melakukan perhitungan internal untuk mengukur nilai wajar dari beberapa obligasi yang nilai pasarnya tidak tersedia dengan menyesuaikan premi risiko kredit masing-masing. Untuk itu obligasi tersebut diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar.

Investasi pada properti menunjukkan kepemilikan pada tanah dan bangunan. Nilai wajar investasi ditentukan dengan menggunakan pendekatan biaya dan estimasi harga pasar dari aset sejenis, sehingga diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar.

Saham bursa adalah investasi pada saham biasa perusahaan domestik yang terdaftar di BEI dan reksadana tertentu. Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan harga pasar dan diklasifikasikan dalam level 1 pada hirarki nilai wajar.

Saham non-publik terdiri dari penyertaan saham langsung pada beberapa perusahaan domestik yang bergerak dalam industri telekomunikasi, hotel, perbankan, dan properti. Nilai wajar dari investasi tersebut dinilai dengan menggunakan teknik pendekatan pendapatan yang melibatkan beberapa pertimbangan perusahaan. Oleh karena itu, investasi ini diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar.

Aset lainnya terutama terdiri dari kupon atas surat berharga. Kupon tersebut diklasifikasikan dalam level 1 pada hirarki nilai wajar berdasarkan klasifikasi surat berharga terkait.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(ii) Perusahaan (lanjutan)

j. Mutasi selama periode berjalan atas nilai wajar aset program yang pengukurannya menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)

	Pengukuran nilai wajar menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)			
	Obligasi	**Properti**	**Penyertaan saham**	**Jumlah**
Saldo awal per 31 Desember 2008	135.375	61.940	130.121	327.436
Pengembalian aktual aset program:				
Aset terjual selama periode berjalan	-	-	-	-
Aset masih dimiliki pada tanggal pelaporan	7.729	3.055	(19.154)	(8.370)
Pembelian	50.000	-	-	50.000
Saldo akhir per 31 Desember 2009	**193.104**	**64.995**	**110.967**	**369.066**

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

k. Strategi portofolio Yakes menekankan pada tingkat pengembalian optimum yang ditetapkan secara tahunan dengan mempertimbangkan risiko keuangan, operasional dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Aset dialokasikan berdasarkan risiko jangka panjang dan taksiran pengembalian. Yakes menerapkan diversifikasi dan pengendalian risiko untuk meminimalkan konsentrasi risiko. Tabel dibawah ini menunjukkan alokasi aset yang ditetapkan oleh Yakes:

Jenis Investasi	Proporsi	
	Dari	Sampai
Kas dan setara kas	1%	20%
Efek berpendapatan tetap	40%	85%
Saham bursa	10%	40%
Properti	0%	15%
Saham non-publik	0%	10%

Target alokasi diatas akan bervariasi sepanjang waktu dan dapat berubah jika ada perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian. Strategi investasi Yakes secara keseluruhan adalah untuk memperoleh suatu gabungan aset yang memungkinkan Yakes untuk memenuhi proyeksi pembayaran klaim biaya pengobatan dengan mempertimbangkan risiko dan pengembalian. Tidak terdapat konsentrasi risiko yang signifikan dalam hal sektor, industri, geografi, atau nama-nama perusahaan.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

l. Nilai wajar aset program Yakes pada tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan kategori aset adalah sebagai berikut:

Kelompok	Kategori aset	Jumlah	Harga pasar aset sejenis pada pasar aktif (level 1)	Input signifikan yang dapat diobservasi (level 2)	Input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)
Kas dan setara kas	Deposito rupiah	150.690	150.690	-	-
	Deposits on Call	211.935	211.935	-	-
	Sub-jumlah	362.625	362.625	-	-
Efek berpendapatan tetap	Surat berharga Pemerintah	1.628.273	-	1.628.273	-
	Obligasi	848.642	-	822.383	26.259
	Reksadana pendapatan tetap	65.047	65.047	-	-
	Reksadana terproteksi	1.536.682	1.536.682	-	-
	Reksadana campuran	213.092	213.092	-	-
	Rekasadana berbentuk KIK penyertaan berbasis hutang	372.867	372.867	-	-
	Sub-jumlah	4.664.603	2.187.688	2.450.656	26.259
Saham bursa	Saham bursa	737.960	737.960	-	-
	Reksadana saham	227.890	227.890	-	-
	Sub-jumlah	965.850	965.850	-	-
Saham non-publik	Penyertaan saham	5.207	-	-	5.207
	Sub-jumlah	5.207	-	-	5.207
Lainnya	Lainnya	23.978	23.978	-	-
	Sub-jumlah	23.978	23.978	-	-
Jumlah		**6.022.263**	**3.540.141**	**2.450.656**	**31.466**

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

l. (lanjutan)

Kas dan setara kas termasuk deposito berjangka dan *deposit on call* dalam mata uang Rupiah. Aset tersebut dinilai dengan menggunakan nilai nominalnya yang mencerminkan nilai wajarnya, sehingga diklasifikasikan dalam level 1 pada hirarki nilai wajar.

Efek berpendapatan tetap termasuk surat berharga pemerintah, obligasi yang memiliki peringkat sekurang-kurangnya "A" dan reksadana tertentu. Nilai wajar dari efek berpendapatan tetap didasari oleh harga yang bisa diobservasi untuk aset sejenis atau yang bisa diperbandingkan. Untuk itu, surat-surat berharga tersebut diklasifikasikan dalam level 1 dan 2. Perusahaan melakukan perhitungan internal untuk mengukur nilai wajar dari beberapa obligasi yang nilai pasarnya tidak tersedia dengan menyesuaikan premi risiko kredit masing-masing. Untuk itu obligasi tersebut diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar.

Saham bursa adalah investasi pada saham biasa perusahaan domestik yang terdaftar di BEI dan reksadana tertentu. Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan harga pasar dan diklasifikasikan dalam level 1 pada hirarki nilai wajar.

Saham non-publik terdiri dari 100% kepemilikan pada perusahaan farmasi yang baru didirikan. Nilai wajar dari investasi dinilai dengan menggunakan pendekatan biaya dan oleh karena itu diklasifikasikan dalam level 3 pada hirarki nilai wajar.

Aset lainnya terutama terdiri dari kupon atas surat berharga. Kupon tersebut diklasifikasikan dalam level 1 pada hirarki nilai wajar berdasarkan klasifikasi surat berharga terkait.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Perusahaan (lanjutan)

m. Mutasi selama periode berjalan atas nilai wajar aset program yang pengukurannya menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)

	Pengukuran nilai wajar menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi (level 3)		
	Obligasi	**Penyertaan saham**	**Jumlah**
Saldo awal per 31 Desember 2008	-	-	-
Pengembalian aktual aset program:			
Aset terjual selama periode berjalan	-	-	-
Aset masih dimiliki pada tanggal pelaporan	2.259	208	2.467
Pembelian	24.000	4.999	28.999
Saldo akhir per 31 Desember 2009	**26.259**	**5.207**	**31.466**

n. Taksiran kontribusi yang akan dibayarkan oleh Perusahaan di tahun 2010 untuk program pensiun imbalan pasti sebesar Rp485.254juta dan program imbalan kesehatan pasca kerja sebesar Rp990.000juta

(ii) Telkomsel

a. Program pensiun

	2009	**2008**	**2007**
Beban jasa	40.314	43.112	38.017
Beban bunga	39.285	34.569	27.603
Taksiran tingkat pengembalian aset program	(18.433)	(13.568)	(2.232)
Amortisasi beban jasa lalu	24	24	24
Rugi aktuaria yang diakui	2.209	5.344	9.249
Amortisasi kewajiban transisi	458	458	458
Beban pensiun berkala bersih	**63.857**	**69.939**	**73.119**

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

b. Tabel berikut ini menyajikan perubahan kewajiban pensiun, perubahan aset program dan bagian jangka pendek dan jangka panjang kewajiban yang diakui pada neraca Telkomsel berdasarkan U.S. GAAP pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008:

	2009	2008
Perubahan kewajiban pensiun		
Kewajiban pensiun pada awal tahun	330.958	332.096
Beban jasa	40.314	43.112
Beban bunga	39.285	34.569
Rugi aktuaria	42.031	(77.247)
Pembayaran pensiun	(1.108)	(1.572)
Kewajiban pensiun pada akhir tahun	451.480	330.958
Perubahan aset program pensiun		
Nilai wajar aset program pensiun pada awal tahun	157.193	132.081
Pengembalian aktual atas aset program pensiun	(11.586)	(14.308)
Kontribusi pemberi kerja	41.112	40.992
Pembayaran pensiun	(1.108)	(1.572)
Nilai wajar aset program pensiun pada akhir tahun	185.611	157.193
Status pendanaan pada akhir tahun	**(265.869)**	**(173.765)**

Jumlah yang diakui dalam neraca Telkomsel:

	2009	2008
Kewajiban - jangka pendek	(6.817)	(6.781)
Kewajiban - jangka panjang	(259.052)	(166.984)

c. Penilaian aktuaria untuk program pensiun dilakukan oleh aktuaris independen. Tanggal pengukuran yang digunakan untuk menentukan imbalan pensiun untuk program pensiun adalah tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(ii) Telkomsel (lanjutan)

d. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan kewajiban imbalan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Tingkat diskonto	10,5%	12%
Tingkat kenaikan kompensasi	8%	9%

e. Asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menentukan beban pensiun berkala bersih pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	2007
Tingkat diskonto	10,5%	12%	10,5%
Taksiran tingkat pengembalian jangka panjang aset program pensiun	10,5%	12%	10,5%
Tingkat kenaikan kompensasi	8%	9%	8%

Program pensiun Telkomsel dikelola oleh Jiwasraya, perusahaan asuransi milik negara (Catatan 40).

(iii) Perkiraan pembayaran imbalan

Perkiraan pembayaran imbalan oleh Perusahaan dan anak perusahaan adalah sebagai berikut:

	Pensiun	Kesehatan
2010	731.486	287.924
2011	810.491	299.984
2012	840.280	308.799
2013	882.878	316.870
2014	944.286	324.937
2015 - 2019	8.068.719	1.798.571

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

d. Imbalan kerja (lanjutan)

(iv) Jumlah yang diakui sebagai akumulasi laba komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 terdiri dari:

	2009					
	Imbalan pensiun	**Imbalan kesehatan pasca kerja**	**Imbalan pasca kerja lainnya**	**Jumlah**	**Pajak tangguhan**	**Bersih setelah pajak**
Kewajiban transisi	2.832	121.624	-	124.456	708	123.748
Beban (laba) jasa lalu	1.497.817	-	29.659	1.527.476	381.869	1.145.607
Rugi aktuaria	(937.580)	(75.773)	84.655	(928.698)	(213.231)	(715.467)
Jumlah	**563.069**	**45.851**	**114.314**	**723.234**	**169.346**	**553.888**

	2008					
	Imbalan pensiun	**Imbalan kesehatan pasca kerja**	**Imbalan pasca kerja lainnya**	**Jumlah**	**Pajak tangguhan**	**Bersih setelah pajak**
Kewajiban transisi	8.851	145.949	-	154.800	2.213	152.587
Beban (laba) jasa lalu	1.781.396	(99)	36.551	1.817.848	454.530	1.363.318
Rugi aktuaria	(163.966)	(135.918)	114.304	(185.580)	(12.407)	(173.173)
Jumlah	**1.626.281**	**9.932**	**150.855**	**1.787.068**	**444.336**	**1.342.732**

Kewajiban transisi, beban jasa masa lalu dan rugi aktuaria bersih tercakup dalam akumulasi laba komprehensif lainnya pada tanggal 31 Desember 2009 dan diperkirakan diakui pada beban periodik bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	Pensiun	**Imbalan kesehatan pasca kerja**	**Imbalan pasca kerja lainnya**	**Jumlah**
Kewajiban transisi	298	24.325	-	24.623
Beban (laba) jasa lalu	283.580	-	6.892	290.472
Rugi aktuaria	19.705	-	4.460	24.165
Kotor sebelum pajak	303.583	24.325	11.352	339.260
Pajak tangguhan	75.896	-	2.838	78.734
Bersih sesudah pajak	**227.687**	**24.325**	**8.514**	**260.526**

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

e. Sewa Operasi

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007, Perusahaan dan anak perusahaan mencatat beban sewa untuk tanah dan bangunan, kendaraan, peralatan kantor, dan infrastruktur telekomunikasi masing-masing sejumlah Rp2.066.890 juta, Rp1.585.803 juta, dan Rp810.210 juta.

Beberapa anak perusahaan melakukan perjanjian sewa tanah dan sewa kantor yang tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewa minimum per tahun untuk lima tahun ke depan sebesar Rp63.982 juta, Rp69.103 juta, Rp66.955 juta, Rp64.612 juta, dan Rp13.286 juta masing-masing untuk tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.

f. Pengukuran nilai wajar

Tabel di bawah menyajikan nilai tercatat dari instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar:

	31 Desember 2009			
		Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
	Saldo	Harga pasar resmi (tanpa penyesuaian) aset atau kewajiban sejenis pada pasar aktif (*level 1*)	Input signifikan lainnya yang dapat diobservasi (*level 2*)	Input signifikan lainnya yang tidak dapat diobservasi (*level 3*)
Aset				
Surat berharga diperdagangkan	53	53	-	-
Surat berharga tersedia untuk dijual	359.454	104.816	254.638	-
Piutang derivatif	1.036.326	-	-	1.036.326
Jumlah	**1.395.833**	**104.869**	**254.638**	**1.036.326**
Kewajiban				
Hutang derivatif	873	-	-	873
Jumlah	**873**	**-**	**-**	**873**

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

f. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

	31 Desember 2008			
		Pengukuran nilai wajar pada tanggal pelaporan menggunakan		
	Saldo	Harga pasar resmi (tanpa penyesuaian) aset atau kewajiban sejenis pada pasar aktif (*level 1*)	Input signifikan lainnya yang dapat diobservasi (*level 2*)	Input signifikan lainnya yang tidak dapat diobservasi (*level 3*)
Aset				
Surat berharga diperdagangkan	5.497	5.497	-	-
Surat berharga tersedia untuk dijual	261.547	46.595	214.952	-
Piutang derivatif	47.769	-	-	47.769
Jumlah	**314.813**	**52.092**	**214.952**	**47.769**
Kewajiban				
Hutang derivatif	482.064	-	-	482.064
Jumlah	**482.064**	**-**	**-**	**482.064**

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir untuk instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

f. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

	Level 3 2009	Level 3 2008
Piutang derivatif		
Saldo 1 Januari	47.769	254
Bagian dari laporan laba rugi konsolidasian		
Laba yang direalisasi	(889.125)	(18.591)
Laba yang belum direalisasi	988.557	47.515
Penambahan aset	887.843	18.436
Penambahan beban operasional dan pemeliharaan	1.282	155
Saldo 31 Desember	1.036.326	47.769
Hutang derivatif		
Saldo 1 Januari	482.064	46.316
Bagian dari laporan laba rugi konsolidasian		
Rugi yang direalisasi	354.158	245.205
Rugi yang belum direalisasi	(481.191)	435.748
Penambahan (pengurangan) aset	(354.127)	(245.095)
Penambahan (pengurangan) beban operasional dan pemeliharaan	(31)	(110)
Saldo 31 Desember	873	482.064

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

f. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Penyertaan sementara terutama terdiri dari saham, reksadana serta obligasi korporasi dan pemerintah. Obligasi korporasi dan pemerintah dicatat pada nilai wajar menggunakan basis surat berharga sejenis pada tanggal neraca. Karena tidak aktif diperdagangkan di pasar yang aktif, surat berharga ini diklasifikasikan sebagai level 2. Saham dan reksa dana dicatat pada nilai wajar menggunakan harga pasar dan diklasifikasikan sebagai level 1.

Piutang dan hutang derivatif terdiri atas derivatif melekat yang diakui berdasarkan U.S. GAAP. Piutang dan hutang derivatif yang termasuk dalam level 3 meliputi kontrak pengadaan yang mengandung instrumen derivatif valuta asing melekat. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model internal. Model ini menekankan pada penggunaan input nilai pasar yang dapat diobservasi yang meliputi harga *forward* dan *spot* mata uang.

Pada tanggal neraca tidak terdapat aset dan kewajiban non-keuangan yang dicatat dengan menggunakan nilai wajar. Penyesuaian nilai wajar untuk aset dan kewajiban non-keuangan tersebut dilakukan hanya dalam kondisi tertentu (misalnya ketika terdapat bukti penurunan nilai).

g. Standar akuntansi baru di Amerika Serikat

Pada bulan Oktober 2009, FASB mengeluarkan ASU 2009-13 "*Revenue Recognition (Topic 605)*" ("ASU 2009-13"). ASU 2009-13 memberikan pedoman akuntansi bagi *multiple deliverable arrangement* untuk memudahkan perusahaan dalam mencatat barang atau jasa secara terpisah bukan sebagai suatu unit gabungan. ASU 2009-13 memberikan hirarki penentuan harga penjualan dari suatu penyerahan apakah menggunakan *vendor specific objective evidence* (VSOE) jika tersedia, bukti dari pihak ketiga jika VSOE tidak tersedia, atau menggunakan estimasi harga penjualan jika VSOE maupun bukti dari pihak ketiga tidak tersedia. ASU 2009-13 berlaku efektif untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah 15 Juni 2010 dan diterapkan secara prospektif.

Pada bulan Oktober 2009, FASB mengeluarkan ASU 2009-14, "*Software (Certain Revenue Arrangements That Include Software Elements)*" ("ASU 2009-14"). ASU 2009-14 memberikan pedoman akuntansi atas kontrak pendapatan yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. ASU 2009-14 berlaku efektif untuk kontrak pendapatan yang terjadi atau diubah secara material untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 15 Juni 2010 dan diterapkan secara prospektif. Penerapan dini ASU 2009-14 diperkenankan.

52. RINGKASAN PERBEDAAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA GAAP INDONESIA DENGAN U.S. GAAP (lanjutan)

(3) Pengungkapan tambahan atas laporan keuangan konsolidasian yang dipersyaratkan oleh U.S. GAAP dan U.S. SEC (lanjutan)

g. Standar akuntansi baru di Amerika Serikat (lanjutan)

Pada bulan Januari 2010, FASB mengeluarkan ASU 2010-06, *"Fair Value Measurements and Disclosures (Topic 820), Improving Disclosures about Fair Value Measurements",* ("ASU 2010-06"). ASU 2010-06 memberikan penggantian atas *Subtopic 820-10* yang mengharuskan pengungkapan baru, meliputi a) pemindahan dari dan ke level 1 dan 2, suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan secara terpisah nilai dari pemindahan yang signifikan dari dan ke pengukuran nilai wajar level 1 dan level 2 dan menjelaskan alasan pemindahan tersebut; dan b) aktivitas pada level 3 pengukuran nilai wajar, suatu entitas pelaporan harus menyajikan informasi secara terpisah tentang pembelian, penjualan, penerbitan, dan penyelesaian (yaitu, dengan suatu dasar gross dibanding sebagai satu nilai netto). ASU 2010-06 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang diterbitkan pada – tahun-tahun fiskal dan periode-periode interim yang dimulai setelah 15 Desember 2009, kecuali untuk pengungkapan-pengungkapan terkait pembelian, penjualan, penerbitan, dan penyelesaian pada level 3 yang akan efektif untuk tahun fiskal dan periode interim yang dimulai pada atau setelah 15 Desember 2010.

Perusahaan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan standar diatas terhadap laporan keuangan konsolidasian.

53. REKONSILIASI LABA BERSIH KE KAS BERSIH YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan rekonsiliasi dari laba bersih ke arus kas bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasi berdasarkan SFAS 95:

	2009	2008	2007
Laba bersih berdasarkan GAAP Indonesia	11.332.140	10.619.470	12.857.018
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih menjadi kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi:			
Penyusutan aset tetap	12.565.928	11.069.575	9.440.476
Kerugian dari penyelesaian awal atas PBH	-	32.602	47.462
Pendapatan bunga	(462.169)	(671.834)	(518.663)
Beban bunga	2.000.023	1.581.818	1.436.165
Rugi (laba) selisih kurs	(355.987)	775.525	176.890
Bagian (laba) rugi bersih perusahaan asosiasi	29.715	(20.471)	(6.637)
Rugi (laba) penjualan aset tetap	13.588	15.659	(20.641)
Hasil dari klaim asuransi	-	(11.159)	(10.626)
Amortisasi *goodwill* dan aset tidak berwujud lainnya	1.390.458	1.243.641	1.154.005
Amortisasi pendapatan ditangguhkan	(100.278)	(180.944)	(194.151)
Amortisasi beban ditangguhkan	24.755	21.751	11.906
Penyisihan piutang ragu-ragu dan persediaan usang	573.704	398.797	500.808
Beban PPh	6.373.076	5.639.696	7.927.823
Hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan	4.644.072	4.053.643	4.810.812
Perubahan aset dan kewajiban:			
Piutang usaha	(841.077)	(480.629)	(134.585)
Piutang lain-lain	(19.150)	(50.162)	858
Persediaan	64.164	(307.207)	(8.547)
Pajak dibayar dimuka	90.987	(185.002)	(409.713)
Beban dibayar di muka	(621.988)	(448.289)	(334.081)
Uang muka dan aset tidak lancar lainnya	(108.693)	(909.288)	(116.544)
Hutang usaha	258.382	448.113	(489.982)
Hutang lain-lain	(18.768)	(6.363)	6.065
Hutang pajak	(93.679)	(293.068)	191.243
Beban yang masih harus dibayar	218.975	1.296.595	(612.109)
Pendapatan diterima di muka	85.032	401.810	376.180
Uang muka pelanggan dan pemasok	(29.775)	(230)	(19.901)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya yang masih harus dibayar	(333.481)	(226.035)	152.604
Beban LSA yang masih harus dibayar	109.885	28.113	(390.488)
Beban imbalan kesehatan pasca kerja yang masih harus dibayar	(768.944)	(198.203)	(176.805)
Pembayaran bunga	(2.089.844)	(1.429.781)	(1.470.328)
Penerimaan bunga	471.965	659.450	514.524
Pembayaran PPh	(5.035.463)	(8.551.296)	(6.963.766)
Penerimaan tagihan restitusi pajak	348.021	-	-
Jumlah penyesuaian	18.383.434	13.696.827	14.870.254
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	**29.715.574**	**24.316.297**	**27.727.272**

Laporan Tahunan 2009

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.

Investor Relations/Corporate Secretary
Grha Citra Caraka 5th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52
Jakarta 12710

Tel. : (62-21) 521 5109
Fax. : (62-21) 522 0500
e-mail : investor@telkom.co.id

IDX : TLKM
NYSE : TLK
LSE : TKIA

www.telkom.co.id